WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3/1187/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan rencana kerja Perangkat Daerah, sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perangkat daerah untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan tugas dan fungsinya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Kota Denpasar Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);

7. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencan Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Juni 2025

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 19 JUNI 2025
NOMOR : 100.3.3/1187/HK/2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

1. PERUBAHAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
2. PERUBAHAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
3. PERUBAHAN RENJA RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR
4. PERUBAHAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2025
5. PERUBAHAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
6. PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
7. PERUBAHAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
8. PERUBAHAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
9. PERUBAHAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
10. PERUBAHAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2025
11. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
12. PERUBAHAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
13. PERUBAHAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
14. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
15. PERUBAHAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
16. PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
17. PERUBAHAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
18. PERUBAHAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2025
19. PERUBAHAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
20. PERUBAHAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
21. PERUBAHAN RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
22. PERUBAHAN RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
23. PERUBAHAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
24. PERUBAHAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
25. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

26. PERUBAHAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
27. PERUBAHAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
28. PERUBAHAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
29. PERUBAHAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
30. PERUBAHAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
31. PERUBAHAN RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
32. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
33. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2025
34. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2025
35. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2025
36. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
37. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

RENJA

RENCANA KERJA







DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR

TAHUN

2025

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Pembangunan bidang Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pembangunan Sumber Daya Manusia dan untuk mencapai tujuan dimaksud diperlukan adanya perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan. Konsep pembangunan senantiasa lebih menekan pada proses keberlanjutan sehingga akan tercapai makna dari tujuan pembangunan. Satuan dan jenjang pendidikan memerlukan banyak faktor pendukung, baik sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana penunjang pembelajaran, maupun infrastruktur lainnya, demikian juga dengan pembangunan bidang Kepemudaan dan Olah Raga. Agar pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga memiliki arah yang jelas dan terpadu, maka dengan demikian Rencana Kerja Perubahan Anggaran dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Tahun 2025 disusun.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini disamping merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, juga merupakan integrasi optimalisasi sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan yang terjadi baik pada skala lokal, regional maupun nasional.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan ini akan menjadi acuan dasar perencanaan, implementasi dan pemantauan gerak langkah pembangunan bidang pendidikan kepemudaan dan Olah Raga di Kota Denpasar yang akan menjadi alat pemersatu hati dan gerak laju ke depan serta menjadi alat koordinasi bagi seluruh lembaga/instansi/dinas serta satuan terkait.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, semoga permasalahan krusial yang ditemui dalam pengembangan peningkatan kualitas pendidikan dapat diminimalisir sehingga berdampak terhadap perbaikan mutu sumber daya manusia baik siswa maupun pendidik dan tenaga kependidikan. Kami berharap penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar ini akan bermanfaat bagi kami selaku leading sektor di Kota Denpasar dan pihak-pihak lainnya yang terkait.

Denpasar, 10 Juni 2025
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan
Olahraga Kota Denpasar,

Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag
Pembina Tingkat I
NIP. 19680404 199403 1 016

DAFTAR ISI

COVER i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I
PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TW. I TAHUN 2025 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I 6

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 20

BAB IV
PENUTUP 37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, renja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana kerja. Adapun dalam tahap penyusunan rancangan akhir ini berdasar pada rancangan awal RKPD dan rencana strategis (renstra) tahun 2021-2026 serta realisasi Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan penyempurnaan rancangan awal rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Di dalamnya telah dilakukan analisis evaluasi capaian Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Selain itu, juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga di Kota Denpasar.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan perubahan struktur sesuai dengan Visi dan Misi Kota Denpasar :

"KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU"

dengan Misinya :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan;
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana;
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);

4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana; dan
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Berdasarkan hal tersebut, disusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Tahun 2025 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
4. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Denpasar Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Nomenklatur Kelembagaan dan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2000 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari dan menemukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan Visi Misi Pemerintah Kota Denpasar serta penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Tahun 2025 ini bertujuan untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Denpasar yang berkaitan dengan bidang Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga seperti yang dijabarkan dalam RPJMD Kota Denpasar 2021-2026 serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengembangan Pendidikan kepemudaan dan Olahraga di Kota Denpasar.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Tahun 2025 disajikan dengan mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan dalam rangka pencapain target kinerja, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi Renja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh Pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025, Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

1. **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

   Dalam Pelaksanaan Tahun Anggaran 2025, secara keseluruhan Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar sudah dapat dilaksanakan walaupun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum berjalan secara maksimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

2. **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

   Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sudah dilaksanakan namun belum sesuai dengan apa yang telah ditargetkan dengan capaian keuangan sebesar 18.17%.

3. **Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

   Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar secara keseluruhan target yang telah ditetapkan belum berjalan secara maksimal dan akan terus ditingkatkan dengan berbagai cara dan inovasi untuk menunjang tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

4. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

   Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar adalah :

   a. Adanya peningkatan sarana prasarana sekolah;
   b. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
   c. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
   d. Pelaksanaan Pembinaan bagi atlet dan pelatih yang berprestasi;
   e. Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan dalam lingkungan kerja dan maupun beraktivitas di luar

5. **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**

   Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang telah ditetapkan yaitu, untuk menunjang pelaksanaan belajar mengajar di Kota Denpasar agar berjalan dengan baik dan kondusif serta peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olahraga.

6. **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut**

   Tindakan yang diambil dengan melakukan perencanaan dan pengganggaran yang lebih terencana dan tepat sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			**764,084,619,930**		**105,120,517,982**	**658,964,101,948**
	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan			**764,084,619,930**		**105,120,517,982**	**658,964,101,948**
1.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**409,499,832,516**	**25**	**75,415,135,087**	**334,084,697,429**
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**397,764,439,196**	**25**	**73,330,252,155**	**324,434,187,041**
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3303 orang	397,764,439,196	3157	73,330,252,155	324,434,187,041
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**1,442,247,000**	**25**	**35,187,500**	**1,407,059,500**
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	67,914,000	0	0	67,914,000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	73 paket	955,518,500	0	35,187,500	920,331,000
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket	47,840,500	0	0	47,840,500
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	282,368,000	0	0	282,368,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	4 Dokumen	4,506,000	0	0	4,506,000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	84,100,000	0	0	84,100,000
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**8,941,396,320**	**25.00**	**1,983,899,932**	**6,957,496,388**
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	13,500,000	0	0	13,500,000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1,272,000,000	1	68,476,745	1,203,523,255
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	8,000,000	0	0	8,000,000
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7,647,896,320	0	1,915,423,187	5,732,473,133
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**1,351,750,000**	**25.00**	**65,795,500**	**1,285,954,500**
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30,000,000	1	7,500,000	22,500,000
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68 Unit	381,870,000	30	58,295,500	323,574,500

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	427 Unit	349,610,000	0	0	349,610,000
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	590,270,000	0	0	590,270,000
1.01.02	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI**	**99.88%**	**354,468,586,414**	**0**	**29,705,382,895**	**324,763,203,519**
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	**99.02%**		**0**		
1.01.02.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI**	**104.50%**	**210,743,541,572**	**0**	**10,564,990,778**	**200,178,550,794**
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	**98%**		**0**		
1.01.02.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	11 Unit	3,311,617,500	0	0	3,311,617,500
1.01.02.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	388 Peserta didik	813,608,000	0	0	813,608,000
1.01.02.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	219 Orang	3,739,465,330	214	1,223,497,278	2,515,968,052
1.01.02.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	71,253,114	0	0	71,253,114

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.02.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	256 Satuan pendidikan	46,392,100	0	0	46,392,100
1.01.02.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	166 Satuan pendidikan	87,915,127,750	25	9,191,260,000	78,723,867,750
1.01.02.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi LTIK) untuk Pendidikan	280 Orang	9,179,200	0	0	9,179,200
1.01.02.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	109 Orang	15,603,100	0	0	15,603,100
1.01.02.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	4,343,700	0	0	4,343,700
1.01.02.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	99,756,100	50.00	25,104,000	74,652,100
1.01.02.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	48 Kegiatan	3,600,000	0	0	3,600,000
1.01.02.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	300,000,000	0	0	300,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.02.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	183 Ruang	107,332,018,500	25	0	107,332,018,500
1.01.02.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	490 Orang	453,565,878	322	103,570,000	349,995,878
1.01.02.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	166 Satuan Pendidikan	143,546,300	0	0	143,546,300
1.01.02.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	5,057,592,000	0	0	5,057,592,000
1.01.02.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	321 Peserta didik	933,045,000	247.00	21,559,500	911,485,500
1.01.02.01.0055	Pengandaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	493,828,000	0	0	493,828,000
1.01.02.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs**	**94%**	**121,875,285,674**	**0**	**12,378,698,470**	**109,496,587,204**
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	**81%**		**0**		
1.01.02.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	57,606,497,000	0	1,561,500	57,604,935,500
1.01.02.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	350,000,000	0	350,000,000	-
1.01.02.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	2,045,805,000	0	1,147,100	2,044,657,900

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.02.02.0012	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah sarana prasara dan utilitas sekolah yang telah dibangun	4 Unit	2,881,152,000	0	3,085,000	2,878,067,000
1.01.02.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1,018,059,000	0	1,385,750	1,016,673,250
1.01.02.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	8 Paket	1,983,430,000	0	2,308,700	1,981,121,300
1.01.02.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	666 Peserta didik	2,290,881,000	0	0	2,290,881,000
1.01.02.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2900 Peserta didik	636,883,750	0	0	636,883,750
1.01.02.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	28 Orang	482,026,448	27	154,366,479	327,659,969
1.01.02.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	100 Orang	109,553,906	0	0	109,553,906
1.01.02.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	100 Satuan pendidikan	87,355,500	0	10,188,000	77,167,500
1.01.02.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	17 Satuan pendidikan	48,753,768,900	25	11,834,784,341	36,918,984,559

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.02.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	66,533,000	0	7,983,000	58,550,000
1.01.02.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	160 Orang	37,344,000	0	0	37,344,000
1.01.02.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	6,001,000	0	1,917,500	4,083,500
1.01.02.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	17,939,500	0	3,002,000	14,937,500
1.01.02.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	12 Kegiatan	7,937,000	0	1,307,000	6,630,000
1.01.02.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	20000 Satuan Pendidikan	357,967,000	0	4,015,000	353,952,000
1.01.02.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	2,086,533,000	0	1,647,100	2,084,885,900
1.01.02.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	50 Orang	16,589,670	0	0	16,589,670
1.01.02.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	283,600,000	0	0	283,600,000
1.01.02.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	749,429,000	0	0	749,429,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.02.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD**	**63.50%**	**18,047,240,818**	**2**	**5,357,553,647**	**12,689,687,171**
1.01.02.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	548,455,000	5%	300,000	548,155,000
1.01.02.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	4 Paket	98,318,000	5%	220,000	98,098,000
1.01.02.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	846 Orang	4,199,191,276	11	62,890,047	4,136,301,229
1.01.02.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	35,421,642	0	0	35,421,642
1.01.02.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	140 Satuan pendidikan	75,660,000	25%	4,500,000	71,160,000
1.01.02.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	140 Satuan pendidikan	11,217,526,000	5%	5,288,843,600	5,928,682,400
1.01.02.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	440 Orang	25,823,000	0	0	25,823,000
1.01.02.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	31,756,500	0	0	31,756,500
1.01.02.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	21,621,000	5%	200,000	21,421,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.02.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	20 Komunitas	13,243,000	0	0	13,243,000
1.01.02.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas	250 Orang	81,002,000	0	0	81,002,000
1.01.02.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	616,859,900	0	0	616,859,900
1.01.02.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	6 Paket	223,073,000	0	0	223,073,000
1.01.02.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	240 Peserta didik	859,290,500	5%	600,000	858,690,500
1.01.02.04	**Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI**	**104.50%**	**3,802,518,350**	**0**	**1,404,140,000**	2,398,378,350
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	**94%**		**0**		
1.01.02.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14 Satuan pendidikan	3,673,954,500	0	1,402,700,000	2,271,254,500
1.01.02.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	13,161,000	0	0	13,161,000
1.01.02.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5 paket	71,624,000	0	0	71,624,000
1.01.02.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah TanggaSekolah yang Tersedia	3 Paket	18,349,500	1	1,440,000	16,909,500
1.01.02.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Peserta didik	25,429,350	0	0	25,429,350

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.03	**Program Pengembangan Kurikulum**	**Persentase Penerapan Kurikulum Muatan Lokal pada satuan pendidikan**	**100%**	**77,860,500**	**0**	**0**	**77,860,500**
1.01.03.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Persentase Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan Dasar Yang Mampu Menyusun Kurikulum**	**100%**	**36,207,000**	**0**	**0**	**36,207,000**
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	100 Orang	36,207,000	0	0	36,207,000
1.01.03.2.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Persentase Tenaga Pendidik Satuan PAUD dan Nonformal Yang Mampu Menyusun Kurikulum**	**100%**	**41,653,500**	**0**	**0**	**41,653,500**
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2 Dokumen	41,653,500	0	0	41,653,500
1.01.05	**Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**	**Persentase lembaga PAUD dan nonformal yang berizin**	**92.96%**	**38,340,500**	**0**	**0**	**38,340,500**
1.01.05.2.02	**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat**	**Persentase satuan Paud terakreditasi**	**93.61%**	**38,340,500**	**0**	**0**	38,340,500
		Persentase satuan pendidikan nonformal terakreditasi	**92.31%**		**0**		
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	96 Dokumen	38,340,500	0	0	38,340,500

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			**60,473,323,100**		**44,726,006,500**	**15,747,316,600**
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga			**60,473,323,100**		**44,726,006,500**	**15,747,316,600**
2.19.02	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif**	**82%**	**243,903,500**	**20**	**0**	**243,903,500**
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase prestasi Pemuda tingkat Provinsi dan Nasional**	**76.50%**	**243,903,500**	**20**	**0**	**243,903,500**
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	243,903,500	0	0	243,903,500
2.19.03	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional**	**93%**	**59,191,641,600**	**0**	**44,726,006,500**	**14,465,635,100**
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota**	**100%**	**1,379,012,600**	**0**	**0**	**1,379,012,600**
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	4028 Unit	1,379,012,600	0	0	1,379,012,600

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Medali pada event Olahraga**	**570 Medali**	**13,260,746,000**	**0**	**224,123,500**	**13,036,622,500**
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	13,260,746,000	1	224,123,500	13,036,622,500
2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Persentase pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga**	**100%**	**44,551,883,000**	**100**	**44,501,883,000**	**50,000,000**
2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	44,551,883,000	100	44,501,883,000	50,000,000
2.19.04	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kepramukaan**	**81%**	**1,037,778,000**	**0**	**0**	**1,037,778,000**
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persentase pembinaan dan pengambangan Organisasi Kepramukaan**	**100%**	**1,037,778,000**	**0**	**0**	**1,037,778,000**
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1,037,778,000	0	0	1,037,778,000

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang dan sekretariat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olaharaga Kota Denpasar Tahun 2025 tetap mengacu pada Sasaran dan Tujuan yang telah di tetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar maupun Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olaharaga Kota Denpasar. Untuk mencapai sasaran dan Tujuan yang sebagaimana yang telah ditetapkan, adapun Rencana Kerja Perubahan yang akan di lakukan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olaharaga Kota Denpasar pada Tahun 2025 oleh Sekretariat maupun Bidang yang ada pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olaharaga Kota Denpasar sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Tahun 2025

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8
	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				**855,244,966,436**	**905,931,009,182**	**50,686,042,746**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**794,568,540,336**	**830,795,340,882**	**36,226,800,546**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				**794,568,540,336**	**830,795,340,882**	**36,226,800,546**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan**	**100 %**	**100 %**	**445,609,284,222**	**454,936,456,998**	**9,327,172,776**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**433,496,610,002**	**440,447,314,328**	**6,950,704,326**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3303 Orang/bulan	3303 Orang/bulan	433,496,610,002	440,447,314,328	6,950,704,326
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**1,594,459,500**	**1,466,247,000**	**(128,212,500)**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	67,914,000	67,914,000	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	73 Paket	6 Paket	1,061,412,500	955,518,500	(105,894,000)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket	2 Paket	53,222,000	47,840,500	(5,381,500)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	2 Paket	314,005,000	306,368,000	(7,637,000)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	3 Dokumen	4,506,000	4,506,000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	93,400,000	84,100,000	(9,300,000)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	27 Unit	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**9,166,464,720**	**11,579,904,760**	**2,413,440,040**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	13,500,000	(1,500,000)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1,481,408,400	1,272,000,000	(209,408,400)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	8,000,000	8,000,000	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	7,662,056,320	10,286,404,760	2,624,348,440
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**100 %**	**1,351,750,000**	**1,442,990,910**	**91,240,910**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	30,000,000	30,000,000	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68 Unit	68 Unit	381,870,000	381,870,000	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	427 Unit	427 Unit	349,610,000	349,610,000	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	6 Unit	590,270,000	681,510,910	91,240,910
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata-Rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah**	**11,78 Tahun 14,05 Tahun**	**11,78 Tahun 14,05 Tahun**	**348,821,436,114**	**375,742,682,884**	**26,921,246,770**
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**	**104.50 % 98 %**	**104.50 % 98 %**	**207,017,585,622**	**221,719,626,234**	**14,702,040,612**
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	14 Unit	3,312,321,500	3,311,617,500	(704,000)
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-	17 Paket	-	5,545,622,500	5,545,622,500
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	388 Peserta Didik	388 Peserta Didik	839,530,000	804,908,000	(34,622,000)
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	228 Orang	219 Orang	3,740,416,330	5,811,835,732	2,071,419,402

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	150 Orang	110,827,114	71,253,114	(39,574,000)
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	256 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	52,651,000	6,796,400	(45,854,600)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	166 Satuan Pendidikan	216 Satuan Pendidikan	83,917,303,000	87,915,127,750	3,997,824,750
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	280 Orang	256 Orang	519,659,200	9,179,200	(510,480,000)
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	109 Orang	109 Orang	23,443,200	15,603,100	(7,840,100)
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	4,850,200	4,343,700	(506,500)
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	107,087,600	99,756,100	(7,331,500)

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	48 Kegiatan	48 Kegiatan	3,600,000	3,600,000	-
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	300,000,000	300,000,000	-
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	164 Ruang	183 Ruang	107,333,167,000	108,974,018,500	1,640,851,500
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	-	-	-
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	490 Orang	1660 Orang	488,386,878	453,565,878	(34,821,000)
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	166 Satuan Pendidikan	166 Satuan Pendidikan	290,524,600	226,196,300	(64,328,300)
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	19 Ruang	5,057,909,000	6,841,029,460	1,783,120,460
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	321 Peserta Didik	270 Peserta Didik	915,909,000	831,345,000	(84,564,000)
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-	5 Paket	-	493,828,000	493,828,000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs** **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs**	**94 %** **81 %**	**94 %** **81 %**	**119,940,703,724**	**132,003,255,294**	**12,062,551,570**
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	57,606,967,000	57,666,497,000	59,530,000
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	350,000,000	350,000,000	-
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	-	-	-
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	-	-	-
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	1,046,275,000	2,045,805,000	999,530,000
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	2,881,682,000	3,829,152,000	947,470,000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	6 Ruang	1,018,529,000	1,518,059,000	499,530,000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	1 Ruang	-	54,000,000	54,000,000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	1 Unit	-	872,000,000	872,000,000
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	8 Paket	8 Paket	1,983,430,000	2,311,930,000	328,500,000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	666 Peserta Didik	4017 Peserta Didik	2,265,097,400	7,607,126,000	5,342,028,600
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2900 Peserta Didik	2900 Peserta Didik	668,067,000	636,883,750	(31,183,250)
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	26 Orang	28 Orang	482,632,448	697,293,848	214,661,400
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	117,484,906	231,511,126	114,026,220
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	91,475,500	87,355,500	(4,120,000)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	17 Satuan Pendidikan	64 Satuan Pendidikan	47,756,719,300	48,753,768,900	997,049,600

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	200 Orang	70,533,000	66,533,000	(4,000,000)
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	160 Orang	160 Orang	39,649,000	37,344,000	(2,305,000)
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	6,351,000	6,001,000	(350,000)
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	19,914,500	17,939,500	(1,975,000)
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	12 Kegiatan	12 Kegiatan	8,672,000	7,937,000	(735,000)
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	20000 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	387,767,000	357,967,000	(29,800,000)
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	3 Ruang	2,087,003,000	2,486,533,000	399,530,000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	50 Orang	18,420,670	16,589,670	(1,831,000)
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	283,900,000	283,600,000	(300,000)
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	1 Ruang	-	327,000,000	327,000,000
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	6 Paket	4 Paket	750,134,000	1,734,429,000	984,295,000
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD**	**63.50 %**	**63.50 %**	**18,040,390,918**	**18,217,283,006**	**176,892,088**
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	396,145,500	548,455,000	152,309,500
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	4 Paket	4 Paket	99,424,350	98,318,000	(1,106,350)
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	-	-	-
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	846 Orang	846 Orang	4,199,671,276	4,293,836,464	94,165,188

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	150 Orang	41,092,342	35,421,642	(5,670,700)
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	140 Satuan Pendidikan	140 Satuan Pendidikan	101,451,700	75,660,000	(25,791,700)
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	140 Satuan Pendidikan	267 Satuan Pendidikan	11,217,676,000	11,217,526,000	(150,000)
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	440 Orang	440 Orang	37,966,000	25,823,000	(12,143,000)
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	53,126,000	31,756,500	(21,369,500)
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	37,415,000	21,621,000	(15,794,000)
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	20 Komunitas	20 Komunitas	14,214,500	13,243,000	(971,500)

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	250 Orang	89,408,000	81,002,000	(8,406,000)
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	617,073,800	616,859,900	(213,900)
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	1 Unit	-	75,397,000	75,397,000
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	6 Paket	6 Paket	231,054,950	223,073,000	(7,981,950)
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	240 Satuan Pendidikan	240 Satuan Pendidikan	904,671,500	859,290,500	(45,381,000)
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Angka Partisipasi Kasar (APK)SD/MI** **Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs**	**104.50 %** **94 %**	**104.50 %** **94 %**	**3,822,755,850**	**3,802,518,350**	**(20,237,500)**
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	3,674,115,000	3,673,954,500	(160,500)
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	14,001,000	13,161,000	(840,000)
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	78,457,000	71,624,000	(6,833,000)

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	18,554,500	18,349,500	(205,000)
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Peserta Didik	1 Peserta Didik	37,628,350	25,429,350	(12,199,000)
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase sekolah yang telah mereviu Kurikulum K13**	**100 %**	**100 %**	**99,226,000**	**77,860,500**	**(21,365,500)**
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	**Persentase Tenaga Pendidik Satuan Pendidkan dasar Yang Mampu Menyusun Kurikulum**	**100 %**	**100 %**	**38,032,000**	**36,207,000**	**(1,825,000)**
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	100 Orang	100 Orang	38,032,000	36,207,000	(1,825,000)
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	**Persentase Tenaga Pendidik Satuan PAUD dan Nonformal Yang Mampu Menyusun Kurikulum**	**100 %**	**100 %**	**61,194,000**	**41,653,500**	**(19,540,500)**
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	61,194,000	41,653,500	(19,540,500)
4	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase legalitas penyelenggaraan pendidikan**	**88 %**	**88 %**	**38,594,000**	**38,340,500**	**(253,500)**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	**Persentase Lembaga Pendidikan Paud dan Nonformal yang Berizin**	**92.96 %**	**92.96 %**	**38,594,000**	**38,340,500**	**(253,500)**
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	96 Dokumen	96 Dokumen	38,594,000	38,340,500	(253,500)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**60,676,426,100**	**75,135,668,300**	**14,459,242,200**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				**60,676,426,100**	**75,135,668,300**	**14,459,242,200**
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase partisipasi pemuda dalam event nasional**	**83 %**	**83 %**	**286,956,500**	**243,903,500**	**(43,053,000)**
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase prestasi Pemuda tingkat Provinsi dan Nasional**	**76.50 %**	**76.50 %**	**286,956,500**	**243,903,500**	**(43,053,000)**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	286,956,500	243,903,500	(43,053,000)
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Partisipasi Atlet di Tingkat Nasional**	**94 %**	**94 %**	**59,351,691,600**	**73,853,986,800**	**14,502,295,200**
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota**	**100 %**	**100 %**	**1,383,128,600**	**1,379,012,600**	**(4,116,000)**
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	4028 Unit	4028 Unit	1,383,128,600	1,379,012,600	(4,116,000)
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Medali pada event Olahraga**	**570 Medali**	**570 Medali**	**13,416,680,000**	**20,681,746,000**	**7,265,066,000**
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	5 Kegiatan	13,416,680,000	20,681,746,000	7,265,066,000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**100 %**	**100 %**	**44,551,883,000**	**51,793,228,200**	**7,241,345,200**
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3 Dokumen	44,551,883,000	51,793,228,200	7,241,345,200
7	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kepramukaan**	**82 %**	**82 %**	**1,037,778,000**	**1,037,778,000**	**-**
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Persentase pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**100 %**	**100 %**	**1,037,778,000**	**1,037,778,000**	**-**
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	1,037,778,000	1,037,778,000	-

BAB IV
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Tahun 2025 disusun dengan kebutuhan Pendanaan Sebesar **Rp. 905.931.009.182,-** (sembilan ratus lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang akan direncanakan pada tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga ini disusun dengan harapan dapat membantu pencapaian target peningkatan kualitas dalam bidang pendidikan kepemudaan dan olahraga yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar pada khususnya yang pada akhirnya dapat membantu pemenuhan capaian dari Visi Misi Kota Denpasar pada umumnya.

Kami menyadari dalam Rencana Kerja Perubahan ini tentunya masih terdapat kekurangan baik dalam materi maupun penyajiannya, akhirnya apabila ada hal yang kurang berkenan maupun kekeliruan dalam penyusunan Renja Perubahan ini, maka dengan lapang dada kami menerima masukan dan saran guna penyempurnaan penyusunan Renja Perubahan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Tahun 2025.

Denpasar, 10 Juni 2025
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar,

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag
Pembina Tingkat I
NIP. 19680404 199403 1 016

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025



OLEH

DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Proses penyusunan rencana kerja dilaksanakan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah ditetapkan oleh Kepala Daerah, kemudian masing-masing OPD membuat Renstra yang disesuaikan dengan RPJM daerah. Renja OPD berpedoman pada Renstra OPD yang mengacu pada prioritas pembangunan Dearah dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan untuk merealisasikan rencana pembangunan walikota dan wakil walikota terpilih. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 ini menjabarkan visi, misi, program dan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota, serta Visi dan Misi Dinas Kesehatan, sehingga tetap terjalin benang merah antara pembangunan Kota Denpasar dengan rencana Program dan kegiatan Dinas Kesehatan. Rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini dibuat disamping berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Denpasar dan juga berdasarkan hasil musyawarah tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, komplek dan bahkan terkadang tak terduga. Oleh karena itu pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran aktif masyarakat.

Melalui kesempatan ini saya mengajak semua pelaku pembangunan kesehatan untuk saling bahu membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan di Kota Denpasar

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan petunjuk dan kekuatan bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kota Denpasar dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Denpasar, 10 Juni 2025
Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 196709151998032003

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	V			
2	Pengolahan data dan informasi.	V			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota Denpasar	V			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Denpasar berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar.	V			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	V			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD Kota Denpasar.	V			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	V			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	V			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	V			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	V			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.	V			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	V			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	V			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	V			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak		
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	V			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Denpasar telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	V			

Denpasar, 10 Juni 2025

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 196709151998032003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 4
2.1Pengendalian dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 6

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 35
3.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Perubahan 35

BAB IV PENUTUP 74

WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/ 2690 /HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa Dinas Kesehatan Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Denpasar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);

7. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:

a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025;
b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Urusan Bidang Kesehatan.
c. menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2025;
d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2025; dan
e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 November 2023

a.n. Walikota Denpasar
Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar,

dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati,M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19670915 199803 2003

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
3. Inspektur Kota Denpasar
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
7. Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar
8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2023
NOMOR : 188.45 /2690/ HK / 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

Penasehat :
1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar

Pembina :
1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Anggota :
1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
5. JFT Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar
   - I Nyoman Dana, SKM.,M.Kes. : Administrator Kesehatan Ahli Muda
   - Ida Bagus Ketut Giri Manuaba, SKM.,M.Kes. : Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda
   - Luh Putu Kertiasih, SKM. : Administrator Kesehatan Ahli Muda
   - Ni Gusti Made Wardani, SKM. : Administrator Kesehatan Ahli Muda

- Ni Made Nariyuni, S.Si.,Apt. : Apoteker Ahli Muda
- Ni Nyoman Muryati, SKM. : Administrator Kesehatan Ahli Muda

6. Pelaksana Pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Denpasar
   - Ni Made Sunarmi. S.Si. : Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
   - Ida Ayu Kharisma Dyah Intan Maharani, S.KM. : Pelaksana

a.n. Walikota Denpasar
Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar,

dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati,M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19670915 199803 2003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga dapat berproduksi secara ekonomi dan sosial. Dinas Kesehatan Kota Denpasar merupakan salah satu perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota Denpasar dalam bidang kesehatan. Derajat Kesehatan penduduk kota Denpasar terus dapat ditingkatkan melaui upaya pembangunan kesehatan yang bersesinambungan, namun demikian masih ditemukan permasalahan kesehatan yang harus segera diatasi seperti potensi kematian ibu, bayi balita dan gizi buruk, meningkatnya kejadian penyakit menular dan tidak menular yang menjadi tantangan dalam pembangunan kesehatan di Kota Denpasar

Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja (Renja) di masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD). Renja merupakan dokumen perencanaan untuk priode 1 (satu) tahun. Proses penyusunan rencana kerja dilaksanakan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ditetapkan oleh Kepala Daerah, kemudian masing-masing OPD membuat Rencana Strategis (Renstra) yang disesuaikan dengan RPJM daerah. Renja OPD berpedoman pada Renstra OPD yang mengacu pada prioritas pembangunan Dearah dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja merupakan dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan untuk merealisasikan rencana pembangunan walikota dan wakil walikota terpilih. Rencana kerja ini menjabarkan visi, misi, program dan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota, sehingga tetap terjalin benang merah antara pembangunan Kota Denpasar dengan rencana Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Renja Dinas Kesehatan Kota Denpasar menjembati perencanaan pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar.

Renja Perubahan Dinas Kesehatan tahun 2025 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Denpasar dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2021-2026,

memuat hasil musyawarah tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dengan memperhatikan sistem kesehatan nasional (SKN) yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja anggaran (RKA). Rencana program dan kegiatan memuat indikator dan target kinerja mengacu pada kebijakan umum dan prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS)

Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan dan akan digunakan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2025. Selain sebagai dokumen perencanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2025 juga merupakan sebuah instrumen yang dipakai untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dicapai.

1.2 Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara RepublikmIndonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk HukumDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543)
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
25. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar

Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);

28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

29. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 25);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Sebagai pedoman dan memberikan arah bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam penyelenggaraan program dan kegiatan agar terselenggara pembangunan kesehatan yang efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 yang akhirnya mampu mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar secara berkesinambungan.

2. Tujuan
   1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan kesehatan.
   2. Mendiskripsikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar
   3. Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Denpasar untuk mencapai tujuan, sasaran program dan indikator kinerja kegiatan
   4. Menjadi dasar bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Denpasar

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1Pengendalian dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Perubahan

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TW I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

1. **Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

2. **Kendala dan Permasalahan dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025**

   - Belanja Pemeliharaan Listrik, Air dan Telepon tidak ada di RKBMD Induk 2025 tetapi ada di RKBMD Perubahan

3. **Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut**

   - Pemeliharan tetap dilaksanakan akan tetapi realisasi anggaran ada di Perubahan

Tabel 2.1

Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

sampai dengan Triwulan I

No	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025		Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran
						Realisasi Kinerja (K)	Realisasi Anggaran (Rp)	
			Tahun 2025					
			K			12 = 8+9+10+11		
1	3	4	7			K	Rp	
					Rp.			
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya administrasi perkantoran**	**100.00**	**%**	**334,700,974,108.00**	**25.00**	**86,363,805,297.36**	
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	**Tersedianya gaji dan tunjangan ASN**	**1,440.00**	**Orang/Bulan**	**170,499,227,194.00**	**1,440**	**41,734,320,191.00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.02.01.2.02.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,440	Orang/Bulan	170,499,227,194	1,440	41,734,320,191.00	128,764,907,003.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN WANGAYA 1.02.01.2.02.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terpenuhinya administrasi perkantoran**	**81**	**Paket/Dokumen**	**4,260,089,690**	**14.00**	**303,985,150.00**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 1.02.01.2.06.02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	Paket	2,907,880,490	2	**132,330,000.00**	2,775,550,490.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.02.01.2.06.03	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8	Paket	225,039,400	1	**9,545,000.00**	215,494,400.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.02.01.2.06.04	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	Paket	1,050,812,800	3	**158,143,400.00**	892,669,400.00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan 1.02.01.2.06.05	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	69,517,000	2	**3,116,750.00**	66,400,250.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.02.01.2.06.06	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	Dokumen	6,840,000	6	**850,000.00**	5,990,000.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**				**0.00**	**0.00**	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0	**0.00**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya jasa pelayanan umum kantor**	**24**	**Laporan**	**18,126,019,224**	**6**	**1,677,512,134.00**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.01.2.08.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	laporan	2,799,969,000	3	348,160,384.00	2,451,808,616.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.02.01.2.08.04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	15,326,050,224	3	1,329,351,750.00	13,996,698,474.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Gedung kantor dan bangunan lainnya**	**156**	**Unit**	**1,717,338,000.00**	**8.00**	**307,020,800.00**	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.02.01.2.09.02	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	155	Unit	1,497,338,000	8.0	**307,020,800.00**	1,190,317,200.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya 1.02.01.2.09.09	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	220,000,000	0	**0.00**	220,000,000.00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Terselenggaranya operasional BLUD RS Wangaya dan Puskesmas**	**12**	**Unit Kerja**	**140,098,300,000.00**	12.00	**42,340,967,022.36**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.02.01.2.10.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit kerja	115,000,000,000	1	40,337,849,155.97	74,662,150,844.03
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas I Denpasar Timur	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	3,093,163,600	1	**167,085,930.00**	2,926,077,670.00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas II Denpasar Timur	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit kerja	2,089,773,400	1	**115,841,408.39**	1,973,931,991.61
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas I Denpasar Barat	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	2,923,224,400	1	**279,506,676.00**	2,643,717,724.00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas II Denpasar Barat	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	3,126,630,600	1	**134,489,657.00**	2,992,140,943.00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas I Denpasar Selatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	2,140,187,200	1	**402,448,497.00**	1,737,738,703.00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas II Denpasar Selatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1,596,929,800	1	**148,632,179.00**	1,448,297,621.00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas III Denpasar Selatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit kerja	1,391,039,800	1	**69,115,103.00**	1,321,924,697.00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas IV Denpasar Selatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit kerja	1,907,053,400	1	**171,799,421.00**	1,735,253,979.00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas I Denpasar Utara	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit kerja	2,108,766,400	1	**200,734,479.00**	1,908,031,921.00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas II Denpasar Utara	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit kerja	2,136,570,800	1	**171,807,105.00**	1,964,763,695.00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas III Denpasar Utara	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit kerja	2,584,960,600	1	**141,657,411.00**	2,443,303,189.00
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	**56**		**139,262,348,802.00**	**10.51**	**14,757,992,118.00**	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penggunaan obat tradisional (POR) di puskesmas**	**713**	**Paket/Unit**	**46,537,697,188.00**	**0.30**	**379,727,760.00**	
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas					**0.00**	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	26	Unit	2,629,984,000	0	**0.00**	2,629,984,000.00
	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan 1.02.02.2.01.13	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan						
	Pengadaan Alat kesehatan/alat penunjang Medik fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.02.02.2.01.14	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	659	unit	5,071,260,807	0	**0.00**	5,071,260,807.00

	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang Medik fasilitas Pelayanan Kesehatan WANGAYA	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 22	unit	20,368,766,181	0	**0.00**	20,368,766,181.00

	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 1.02.02.2.01.0023	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2	Paket	18,055,889,400	0.3	**379,727,760.00**	17,676,161,640.00
	Pengadaan Bahan Habis Pakai 1.02.02.2.01.17	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan					**0.00**	
	Pemeliharaan Rutin & Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.02.02.2.01.20	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	3	Unit	360,000,000	0	**0.00**	360,000,000.00
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan lainnya 1.02.02.2.01.21.	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	paket	51,796,800	0	**0.00**	51,796,800.00
	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	**100**	**%**	**92,481,505,164.00**	**100.00**	**14,376,236,008.00**	
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				0	**0.00**	
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				0	**0.00**	
		Pelayanan Kesehatan Balita				0	**0.00**	
		pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar				0	**0.00**	
		Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				0	**0.00**	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus				0	**0.00**	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				0	**0.00**	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.01	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	10,911	orang	49,400,000	1832	**0.00**	49,400,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk I Dentim	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	312	Orang	11,680,000.00	0	**0.00**	11,680,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk II Dentim	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	80	orang	31,280,000.00	0	**0.00**	31,280,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk I Denbar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	380	Orang	13,640,000.00	0	**0.00**	13,640,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk II Denbar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	1,529	Orang	16,480,000.00	0	**0.00**	16,480,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk I Densel	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	580	Orang	23,000,000.00	135	**5,310,000.00**	17,690,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk II Densel	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	480	orang	17,600,000.00	0	**0.00**	17,600,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk III Densel	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	276	orang	8,440,000.00	27	**830,000.00**	7,610,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk IV Densel	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	960	orang	28,800,000.00	120	**3,600,000.00**	25,200,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk I Denut	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	112	orang	4,000,000.00	10	**380,000.00**	3,620,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk II Denut	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	56	orang	5,560,000.00	2	**80,000.00**	5,480,000.00

	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk III Denut	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	360	Orang	15,840,000.00	20	**0.00**	15,840,000.00

###	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.02	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10,870	orang	284,120,000	1781	**0.00**	284,120,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Denbar I	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Denbar II	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Dentim I	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Dentim II	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Densel I	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Densel II	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					**0.00**	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Densel III	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					**0.00**	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Densel IV	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Denut I	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Denut II	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Denut III	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) I Denpasar Timur	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	46	Orang	7,360,000.00	2	**320,000.00**	7,040,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) II Denpasar Timur	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20,000	orang	5,120,000.00	0	**0.00**	5,120,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) I Denpasar Barat	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	36	Orang	2,880,000.00	0	**0.00**	2,880,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) II Denpasar Barat	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	71	Orang	640,000.00	3	**0.00**	640,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) I Denpasar Selatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	60	Orang	3,200,000.00	18	**960,000.00**	2,240,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) II Denpasar Selatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40	orang	1,600,000.00	8	**320,000.00**	1,280,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) III Denpasar Selatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40	orang	1,600,000.00	20	**800,000.00**	800,000.00

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) IV Denpasar Selatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	192	orang	7,680,000.00	52	**1,200,000.00**	6,480,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) I Denpasar Utara	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1,560	orang	4,800,000.00	0	**0.00**	4,800,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) II Denpasar Utara	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	228	orang	9,120,000.00	32	**1,280,000.00**	7,840,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) III Denpasar Utara	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6	Orang	11,280,000.00	2	**2,400,000.00**	8,880,000.00

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.02.02.2.02.03	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10,459	orang	459,885,000.00	1715	**0.00**	459,885,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1.02.02.2.02.04	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	59,866	orang	75,594,000.00	8014	**0.00**	75,594,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk I Denbar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk II Denbar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk I Dentim	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk II Dentim	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk II Densel	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk III Densel	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk IV Densel	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk I Denut	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk II Denut	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk III Denut	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.05	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	171,121	orang	396,840,232.00	171121	**0.00**	396,840,232.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pusk I Dentim	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17,261	orang	44,480,000.00	2453	**6,320,000.00**	38,160,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pusk II Dentim	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12,827	Orang	28,840,000.00	0	**0.00**	28,840,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pusk I Denbar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	93	Orang	26,400,000.00	32	**5,800,000.00**	20,600,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pusk II Denbar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21,066	Orang	51,720,000.00	3000	**1,600,000.00**	50,120,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pusk I Densel	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	448	Orang	17,920,000.00	144	**5,760,000.00**	12,160,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pusk II Densel	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1,064	orang	42,560,000.00	152	**6,000,000.00**	36,560,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pusk III Densel	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	357	orang	14,280,000.00	96	**640,000.00**	13,640,000.00

	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pusk IV Densel	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	241	orang	9,640,000.00	55	**2,200,000.00**	7,440,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pusk I Denut	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165	orang	22,560,000.00	47	**7,040,000.00**	15,520,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pusk II Denut	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	632	orang	25,280,000.00	140	**5,600,000.00**	19,680,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pusk III Denut	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	134	Orang	26,800,000.00	39	**6,800,000.00**	20,000,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1.02.02.2.02.06	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	242,855	Orang	71,639,000	41,467	**7,175,000.00**	64,464,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk I Denbar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Denbar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk I Dentim	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Dentim	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Densel	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk III Densel	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk I Denut	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Denut	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk III Denut	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 1.02.02.2.02.07	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	95,575	orang	209,039,000	16526	**0.00**	209,039,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pusk I Denbar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pusk II Denbar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pusk I Dentim	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	

	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pusk II Dentim	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pusk I Densel	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pusk II Densel	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pusk III Densel	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pusk IV Densel	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pusk I Denut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pusk III Denut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 1.02.02.2.02.08	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30,694	Orang	18,774,850	5789	**300,000.00**	18,474,850.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 1.02.02.2.02.09	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10,883	Orang	983,901,050	2521	**0.00**	983,901,050.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.10	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1,260	Orang	13,697,000	320	**675,000.00**	13,022,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pusk I Dentim	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	43	Orang	10,320,000	4	**960,000.00**	9,360,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pusk II Dentim	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	50	orang	24,000,000	0	**0.00**	24,000,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pusk I Denbar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	42	Orang	3,360,000	8	**560,000.00**	2,800,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pusk II Denbar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5	Orang	3,200,000	1	**400,000.00**	2,800,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pusk I Densel	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30	Orang	2,400,000	10	**800,000.00**	1,600,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pusk II Densel	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	72	orang	2,880,000	24	**960,000.00**	1,920,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pusk III Densel	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48	orang	1,920,000	8	**320,000.00**	1,600,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pusk IV Densel	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	480	orang	19,200,000	132	**3,520,000.00**	15,680,000.00

	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pusk I Denut	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	55	orang	4,400,000	15	**1,200,000.00**	3,200,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pusk II Denut	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90	orang	7,200,000	30	**1,200,000.00**	6,000,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pusk III Denut	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90	Orang	7,200,000	30	**1,440,000.00**	5,760,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.11	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7033	Orang	791,268,806	1862	**86,242,080.00**	705,026,726.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis Pusk I Dentim	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	66	Orang	5,280,000	6	**480,000.00**	4,800,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis Pusk II Dentim	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	orang	7,800,000	0	**0.00**	7,800,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis Pusk I Denbar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	80	Orang	3,200,000	12	**320,000.00**	2,880,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis Pusk II Denbar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	61	0rang	44,400,000	8	**2,040,000.00**	42,360,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis Pusk I Densel	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	42	Orang	4,160,000	15	**1,560,000.00**	2,600,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis Pusk II Densel	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	132	orang	5,280,000	24	**960,000.00**	4,320,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis Pusk III Densel	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	198	orang	7,920,000	54	**1,440,000.00**	6,480,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis Pusk IV Densel	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	142	orang	5,680,000	48	**1,920,000.00**	3,760,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis Pusk I Denut	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	110	orang	13,200,000	30	**3,600,000.00**	9,600,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis Pusk II Denut	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	96	orang	3,840,000	25	**1,000,000.00**	2,840,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis Pusk III Denut	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	52	Orang	4,160,000	16	**800,000.00**	3,360,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0012	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	13,614	Orang	1,338,795,120	4259	150,478,681.00	1,188,316,439.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV Pusk I Denbar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0	**0.00**	

	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV Pusk II Denbar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0	**0.00**	

	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV Pusk I Dentim	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV Pusk II Dentim	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV Pusk I Densel	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV Pusk II Densel	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV Pusk III Densel	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV Pusk IV Densel	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV Pusk I Denut	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV Pusk II Denut	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV Pusk III Denut	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0	**0.00**	
	Pengelolaaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.02.02.2.02.13	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	10.00	Dokumen	7,500,000	0.83	**0.00**	7,500,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana 1.02.02.2.02.14	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1.00	dokumen	27,266,000	0	**0.00**	27,266,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan I Denpasar Timur	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	11.00	dokumen	10,560,000	2	**1,920,000.00**	8,640,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan II Denpasar Timur	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	10.00	dokumen	4,000,000	0	**0.00**	4,000,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan I Denpasar Barat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	11.00	Dokumen	8,800,000	3	**1,600,000.00**	7,200,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan II Denpasar Barat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	10.00	Dokumen	4,800,000	2	**480,000.00**	4,320,000.00

	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan I Denpasar Selatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12.00	Dokumen	960,000	3	**320,000.00**	640,000.00

	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan II Denpasar Selatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1.00	dokumen	3,840,000	1	**640,000.00**	3,200,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan III Denpasar Selatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	10.00	dokumen	1,760,000	3	**480,000.00**	1,280,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan IV Denpasar Selatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	11.00	dokumen	8,800,000	3	**2,400,000.00**	6,400,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan I Denpasar Utara	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	11.00	dokumen	2,640,000	3	**720,000.00**	1,920,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan II Denpasar Utara	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	32.00	dokumen	9,600,000	8	**2,400,000.00**	7,200,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan III Denpasar Utara	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	110.00	Dokumen	8,800,000	30	**1,600,000.00**	7,200,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.15	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11	Dokumen	428,135,000.00	3	**0.00**	428,135,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Dentim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	49	dokumen	174,955,000.00	1	**2,720,000.00**	172,235,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Dentim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	dokumen	114,800,000.00	0	**0.00**	114,800,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Denbar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	38	Dokumen	202,425,000.00	9	**8,080,000.00**	194,345,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Denbar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	29	Dokumen	153,349,000.00	6	**640,000.00**	152,709,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	Dokumen	117,697,000.00	3	**34,270,000.00**	83,427,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20	dokumen	117,335,000.00	1	**1,280,000.00**	116,055,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk III Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	91	dokumen	126,619,000.00	6	**5,920,000.00**	120,699,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk IV Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11	dokumen	91,103,000.00	3	**2,640,000.00**	88,463,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Denut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	477	dokumen	160,112,000.00	20	**9,280,000.00**	150,832,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Denut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	dokumen	106,598,000.00	2	**1,160,000.00**	105,438,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk III Denut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6,234	Dokumen	161,594,000.00	129	**7,960,000.00**	153,634,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga 1.02.02.2.02.16	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2	Dokumen	26,629,500	0.5	**450,000.00**	26,179,500.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga Pusk I Dentim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4	dokumen	960,000	0	**0.00**	960,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga Pusk II Dentim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12	dokumen	2,720,000	0	**0.00**	2,720,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga Pusk I Denbar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6	Dokumen	1,200,000	2	**0.00**	1,200,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga Pusk II Denbar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4	Dokumen	5,200,000	0	**0.00**	5,200,000.00

	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga Pusk I Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12	Dokumen	200,000	3	**200,000.00**	0.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga Pusk II Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	dokumen	3,200,000	1	**1,600,000.00**	1,600,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga Pusk III Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3	dokumen	480,000	1	**120,000.00**	360,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga Pusk IV Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2	dokumen	1,240,000	0	**0.00**	1,240,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga Pusk I Denut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8	dokumen	640,000	3	**240,000.00**	400,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga Pusk II Denut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5	dokumen	520,000	0	**0.00**	520,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga Pusk III Denut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	49	Dokumen	3,920,000	15	**800,000.00**	3,120,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.17	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6	Dokumen	264,720,000	0.6	**0.00**	264,720,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk I Dentim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11	dokumen	20,400,000	2	**2,880,000.00**	17,520,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk II Dentim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	dokumen	17,152,000	0	**0.00**	17,152,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk I Denbar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	33	Dokumen	11,202,000	6	**880,000.00**	10,322,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk II Denbar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	42	Dokumen	27,360,000	7	**0.00**	27,360,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk I Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	Dokumen	5,717,000	3	**440,000.00**	5,277,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk II Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7	dokumen	16,240,000	2	**2,960,000.00**	13,280,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk III Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	35	dokumen	15,610,000	9	**3,600,000.00**	12,010,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk IV Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11	dokumen	5,040,000	3	**720,000.00**	4,320,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk I Denut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	111	dokumen	8,885,000	30	**960,000.00**	7,925,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk II Denut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	478	dokumen	19,140,000	40	**1,600,000.00**	17,540,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Pusk III Denut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	284	Dokumen	22,720,000	69	**3,680,000.00**	19,040,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1.02.02.2.02.18	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	40	dokumen	427,674,500	1	**1,100,000.00**	426,574,500.00
	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Denbar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Denbar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Dentim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Dentim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0	**0.00**	

	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk III Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Denut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Denut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk III Denut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0	**0.00**	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 1.02.02.2.02.19	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4	Dokumen	153,488,550	1	**6,885,000.00**	146,603,550.00
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.20	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3	Dokumen	355,125,000	0.75	**1,125,000.00**	354,000,000.00
	Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk I Dentim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	dokumen	25,978,000	2	**4,000,000.00**	21,978,000.00
	Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk II Dentim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	dokumen	23,200,000	0	**0.00**	23,200,000.00
	Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk I Denbar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	35	Dokumen	77,520,000	11	**10,720,000.00**	66,800,000.00
	Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk II Denbar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30	Dokumen	28,320,000	5	**3,200,000.00**	25,120,000.00
	Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk I Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	Dokumen	1,360,000	3	**0.00**	1,360,000.00
	Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk II Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3	dokumen	3,560,000	1	**480,000.00**	3,080,000.00
	Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk III Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	40	dokumen	19,680,000	4	**3,840,000.00**	15,840,000.00
	Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk IV Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11	dokumen	17,680,000	3	**5,840,000.00**	11,840,000.00
	Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk I Denut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	213	dokumen	30,840,000	50	**8,640,000.00**	22,200,000.00
	Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk II Denut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1,187	dokumen	47,480,000	110	**4,400,000.00**	43,080,000.00
	Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk III Denut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	258	Dokumen	24,495,000	76	**3,840,000.00**	20,655,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 1.02.02.2.02.22	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	45	orang	83,125,000	10	**3,000,000.00**	80,125,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza Pusk II Denbar	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza Pusk I Dentim	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza Pusk II Dentim	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza Pusk II Densel	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza Pusk III Densel	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza Pusk IV Densel	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan				0	**0.00**	

		Kesehatan						
	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza Pusk I Denut	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0	**0.00**	

	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza Pusk III Denut	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0	**0.00**	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)1.02.02.2.02.0038	Jumlah Public Safety Center (PSC119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3	unit	4,196,087,961	0	**994,855,511.00**	3,201,232,450.00
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.25	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11	Dokumen	15,728,915,397	1	**1,529,426,768.00**	14,199,488,629.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Pusk I Dentim	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18	dokumen	50,760,000	2	**3,600,000.00**	47,160,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Pusk II Dentim	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24	dokumen	65,400,000	0	**0.00**	65,400,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Pusk I Denbar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	59	Dokumen	44,250,000	12	**6,000,000.00**	38,250,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Pusk II Denbar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	114	Dokumen	51,927,000	16	**4,400,000.00**	47,527,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Pusk I Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	Dokumen	115,760,000	3	**79,920,000.00**	35,840,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Pusk II Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18	dokumen	107,676,000	2	**6,600,000.00**	101,076,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Pusk III Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	78	dokumen	42,600,000	12	**9,280,000.00**	33,320,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Pusk IV Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11	dokumen	54,775,000	3	**10,880,000.00**	43,895,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Pusk I Denut	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	92	dokumen	40,880,000	20	**8,800,000.00**	32,080,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Pusk II Denut	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1,122	dokumen	44,880,000	64	**2,800,000.00**	42,080,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Pusk III Denut	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	616	Dokumen	78,600,000	217	**12,880,000.00**	65,720,000.00
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.02.02.2.02.26	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	dokumen	56,488,088,000	3	**10,932,738,000.00**	45,555,350,000.00
	Pengambilan dan Pengiriman spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan /Nasional 1.02.02.2.02.0028	Jumlah spesimen penyakit potensi kejadian luar biasa (KLB) ke laboragorium rujukan nasional yang didistribusikan	6,508	Paket	159,995,000	4	**1,000,000.00**	158,995,000.00
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1.02.02.2.02.29	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	Dokumen	73,150,000	0.05	**0.00**	73,150,000.00
	Operasional pelayanan rumah sakit					0	**0.00**	
	Operasional Pelayanan Puskesmas I Dentim 1.02.02.2.02.33	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	12	dokumen	142,736,000	2	**1,280,000.00**	141,456,000.00
	Operasional Pelayanan Puskesmas II Dentim 1.02.02.2.02.33	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	12	dokumen	140,192,500	2	**9,100,000.00**	131,092,500.00
	Operasional Pelayanan Puskesmas I Denbar 1.02.02.2.02.33	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	32	Dokumen	144,162,800	4	**3,500,000.00**	140,662,800.00
	Operasional Pelayanan Puskesmas II Denbar 1.02.02.2.02.33	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	66	Dokumen	189,752,000	10	**7,900,000.00**	181,852,000.00
	Operasional Pelayanan Puskesmas I Densel 1.02.02.2.02.33	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	12	Dokumen	135,102,000	3	**10,830,000.00**	124,272,000.00

	Operasional Pelayanan Puskesmas II Densel 1.02.02.2.02.33	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	47	dokumen	138,485,000	4	**4,600,000.00**	133,885,000.00
	Operasional Pelayanan Puskesmas III Densel 1.02.02.2.02.33	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	33	dokumen	96,115,000	3	**7,720,000.00**	88,395,000.00
	Operasional Pelayanan Puskesmas IV Densel 1.02.02.2.02.33	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	12	dokumen	81,281,600	3	**7,970,000.00**	73,311,600.00
	Operasional Pelayanan Puskesmas I Denut 1.02.02.2.02.33	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	46	dokumen	115,500,000	10	**10,420,000.00**	105,080,000.00
	Operasional Pelayanan Puskesmas II Denut 1.02.02.2.02.33	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	24	dokumen	119,169,000	6	**13,700,000.00**	105,469,000.00
	Operasional Pelayanan Puskesmas III Denut 1.02.02.2.02.33	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	92	Dokumen	149,200,750	18	**7,400,000.00**	141,800,750.00
	Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.02.02.2.02.0034	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12	Dokumen	57,698,000	0	**0.00**	57,698,000.00
	Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya di Puskesmas I Dentim	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3	dokumen	8,515,000	0	**0.00**	8,515,000.00
	Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya di Puskesmas II Dentim	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3	dokumen	9,290,000	0	**0.00**	9,290,000.00
	Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya di Puskesmas I Denbar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0	**0.00**	
	Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya di Puskesmas II Denbar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3	dokumen	11,614,000	0	**0.00**	11,614,000.00
	Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya di Puskesmas II Densel	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7	dokumen	9,292,000	0	**0.00**	9,292,000.00
	Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya di Puskesmas III Densel	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8	dokumen	6,194,000	0	**0.00**	6,194,000.00
	Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya di Puskesmas I Denut	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6	dokumen	7,355,000	0	**0.00**	7,355,000.00
	Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya di Puskesmas II Denut	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	25	dokumen	7,742,000	0	**0.00**	7,742,000.00
	Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya di Puskesmas III Denut	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6	Dokumen	9,290,000	0	**0.00**	9,290,000.00
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.35	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	11	unit	287,950,000	3	**9,525,000.00**	278,425,000.00
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0036	Jumlah laporan hsil investigasi awal kejadiantidak di harapkan(KIPI)dan pemberian obat massal				0	**0.00**	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pusk I Dentim	Jumlah laporan hsil investigasi awal kejadiantidak di harapkan(KIPI)dan pemberian obat massal			-	0	**0.00**	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pusk II Dentim	Jumlah laporan hsil investigasi awal kejadiantidak di harapkan(KIPI)dan pemberian obat massal			-	0	**0.00**	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pusk I Denbar	Jumlah laporan hsil investigasi awal kejadiantidak di harapkan(KIPI)dan pemberian obat massal			-	0	**0.00**	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pusk II Denbar	Jumlah laporan hsil investigasi awal kejadiantidak di harapkan(KIPI)dan pemberian obat massal			-	0	**0.00**	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pusk I Densel	Jumlah laporan hsil investigasi awal kejadiantidak di harapkan(KIPI)dan pemberian obat massal			-	0	**0.00**	

	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pusk II Densel	Jumlah laporan hsil investigasi awal kejadiantidak di harapkan(KIPI)dan pemberian obat massal			-	0	**0.00**	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pusk III Densel	Jumlah laporan hsil investigasi awal kejadiantidak di harapkan(KIPI)dan pemberian obat massal			-	0	**0.00**	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pusk IV Densel	Jumlah laporan hsil investigasi awal kejadiantidak di harapkan(KIPI)dan pemberian obat massal			-	0	**0.00**	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pusk I Denut	Jumlah laporan hsil investigasi awal kejadiantidak di harapkan(KIPI)dan pemberian obat massal			-	0	**0.00**	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pusk II Denut	Jumlah laporan hsil investigasi awal kejadiantidak di harapkan(KIPI)dan pemberian obat massal			-	0	**0.00**	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pusk III Denut	Jumlah laporan hsil investigasi awal kejadiantidak di harapkan(KIPI)dan pemberian obat massal			-	0	**0.00**	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dasar melaui pendekatan keluarga	Jumlah keluarga yg dikunjungidan di intervesi masalah kesehatannya oleh tenaga kes Pusk 100%				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.40	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1,447	Orang	1,118,745,632	297	**0.00**	1,118,745,632.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Pusk I Denbar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Pusk II Denbar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Pusk I Dentim	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Pusk II Dentim	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Pusk I Densel	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Pusk II Densel	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Pusk III Densel	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Pusk IV Densel	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Pusk I Denut	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Pusk II Denut	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0	**0.00**	

	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Pusk III Denut	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0	**0.00**	

	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.41	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6,283	Orang	1,654,965,916	6361	**108,289,968.00**	1,546,675,948.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Puskesmas I Dentim	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Puskesmas II Dentim	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Puskesmas I Denbar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Puskesmas II Denbar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Puskesmas II Densel	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Puskesmas III Densel	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Puskesmas IV Densel	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Puskesmas I Denut	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Puskesmas II Denut	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Puskesmas III Denut	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0	**0.00**	
	Pengelolaan Layanan Imunisasi I Denpasar Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	9	dokumen	32,080,000	1	**0.00**	32,080,000.00
	Pengelolaan Layanan Imunisasi II Denpasar Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12	dokumen	33,960,000	0	**0.00**	33,960,000.00
	Pengelolaan Layanan Imunisasi I Denpasar Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	40	Dokumen	15,680,000	4	**1,120,000.00**	14,560,000.00
	Pengelolaan Layanan Imunisasi II Denpasar Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	14	Dokumen	17,200,000	0	**0.00**	17,200,000.00
	Pengelolaan Layanan Imunisasi I Denpasar Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12	Dokumen	11,840,000	3	**0.00**	11,840,000.00
	Pengelolaan Layanan Imunisasi II Denpasar Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	2	dokumen	6,080,000	1	**320,000.00**	5,760,000.00
	Pengelolaan Layanan Imunisasi III Denpasar Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12	dokumen	9,640,000	0	**0.00**	9,640,000.00

	Pengelolaan Layanan Imunisasi IV Denpasar Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5	dokumen	3,600,000	0	**0.00**	3,600,000.00
	Pengelolaan Layanan Imunisasi I Denpasar Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	22	dokumen	19,000,000	10	**1,200,000.00**	17,800,000.00
	Pengelolaan Layanan Imunisasi II Denpasar Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	32	dokumen	10,480,000	0	**0.00**	10,480,000.00
	Pengelolaan Layanan Imunisasi III Denpasar Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	110	Dokumen	13,200,000	0	**0.00**	13,200,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria 1.02.02.2.02.0042	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1	orang	6,025,000	0	**0.00**	6,025,000.00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria Pusk I Denbar	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria Pusk I Dentim	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria Pusk II Dentim	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria Pusk II Densel	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria Pusk III Densel	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria Pusk IV Densel	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0	**0.00**	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria Pusk I Denut	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0	**0.00**	
### #	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas I Dentim	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	9	dokumen	26,920,000	2	**1,360,000.00**	25,560,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas II Dentim	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12	dokumen	71,316,000	2	**5,700,000.00**	65,616,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas I Denbar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	40	Dokumen	65,874,000	0	**0.00**	65,874,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas II Denbar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	8	Dokumen	96,360,000	0	**0.00**	96,360,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas I Densel	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12	Dokumen	100,746,000	3	**46,900,000.00**	53,846,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas II Densel	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	8	dokumen	86,300,000	0	**0.00**	86,300,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas III Densel	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	54	dokumen	55,290,000	8	**4,660,000.00**	50,630,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas IV Densel	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	4	dokumen	14,560,000	0	**0.00**	14,560,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas I Denut	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	84	dokumen	66,660,000	10	**3,320,000.00**	63,340,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas II Denut	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12	dokumen	77,620,000	2	**1,760,000.00**	75,860,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas III Denut	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	146	Dokumen	54,032,000	20	**3,700,000.00**	50,332,000.00

	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0046	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	6	dokumen	313,637,000	1	**0.00**	313,637,000.00
###	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas I Dentim	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2	dokumen	1,560,000	0	**0.00**	1,560,000.00
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas II Dentim	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12	dokumen	760,000	0	**0.00**	760,000.00
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas I Denbar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8	Dokumen	320,000	0	**0.00**	320,000.00
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas II Denbar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	10	Dokumen	400,000	0	**0.00**	400,000.00
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas I Densel	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				0	**0.00**	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas II Densel	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2	dokumen	125,000	0	**0.00**	125,000.00
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas III Densel	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12	dokumen	1,280,000	3	**320,000.00**	960,000.00
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas IV Densel	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	10	dokumen	404,000	1	**40,000.00**	364,000.00
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas I Denut	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	10	dokumen	1,040,000	0	**0.00**	1,040,000.00
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas II Denut	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	64	dokumen	2,560,000	2	**80,000.00**	2,480,000.00
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas III Denut	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4	Dokumen	160,000	3	**40,000.00**	120,000.00
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		**1**	**dokumen**	**9,681,000.00**	0	**0.00**	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1.02.02.2.03.0002	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.00	Dokumen	9,681,000	0	**0.00**	9,681,000.00
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas I Dentim 1.02.02.2.03.0002	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0	**0.00**	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas II Dentim	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0	**0.00**	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas I Denbar	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0	**0.00**	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas II Denbar	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0	**0.00**	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas I Densel	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0	**0.00**	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas II Densel	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0	**0.00**	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas III Densel	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0	**0.00**	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas IV Densel	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0	**0.00**	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas I Denut	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0	**0.00**	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas II Denut	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0	**0.00**	

	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas III Denut	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0	**0.00**	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase faskes memenuhi standar mutu**	**11**	**unit**	**233,465,450.00**	**3.00**	**2,028,350.00**	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 1.02.02.2.01.03	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) pelayanan kesehatan	11	unit	233,465,450	3	**2,028,350.00**	231,437,100.00
						0.00	**0.00**	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	**Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin**	**100**	**%**	**1,016,330,000**	**100.00**	**2,250,000.00**	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin**	**45.00**	**Dokumen**	**3,480,000.00**	15.00	**900,000.00**	
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1.02.03.2.01.01	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktek tenaga kesehatan	45	dokumen	3,480,000	15	**900,000.00**	2,580,000.00
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya perencanaan kebutuhan SDM**	**6.00**	**Dokumen**	**14,970,000.00**	**2.00**	**1,350,000.00**	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 1.02.03.202.02	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayayanan kesehatan (Fasyankes)						
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar RSU WANGAYA	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayayanan kesehatan (Fasyankes)						
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.02.03.2.02.03	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	6	dokumen	14,970,000	2	**1,350,000.00**	13,620,000.00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan kapasitas SDM kesehatan**	**250**	**orang**	**997,880,000.00**	**67.00**	**0.00**	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	250	orang	997,880,000	67	**0.00**	997,880,000.00
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman	**Persentase TPM memenuhi syarat**	**62**	**%**	**452,744,900**	**0.44**	**2,010,000.00**	
	Pemberian Izin Apotek,Toko Obat,Toko Alat Kesehatan & Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Persentase Apotek,Toko Obat,Toko Alat Kesehatan & Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki ijin**	**30.00**	Dokumen	**35,459,900.00**	**1.00**	**450,000.00**	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1.02.04.2.01	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30	Dokumen	35,459,900	1	**450,000.00**	35,009,900.00
	Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, Makanan dan Minuman tertentu yang di produksi oleh industri Rumah Tangga	**Industri pangan rumah tangga bersertifikat produksi**	**70**	**Dokumen**	**86,950,000.00**	**15.00**	**750,000.00**	

	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, Makanan dan Minuman tertentu yang di produksi oleh industri Rumah Tangga 1.02.04.2.04.03.01	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70	Dokumen	86,950,000	15	**750,000.00**	86,200,000.00
	Penerbitan sertifikat laik sehat higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	**Persentase TPM memenuhi syarat**	**62**	**%**	**9,265,000.00**	**0.00**	**0.00**	
	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Penerbitan sertifikat laik sehat higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM) 1.02.04.2.04.01	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3	Dokumen	9,265,000	0	**0.00**	9,265,000.00
	Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	**Persentase TPM memenuhi syarat**	**1.00**	**Dokumen**	**150,000,000.00**	0.00	**0.00**	
	Pengendalian dan pengawasan serta tindaklanjut Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan 1.02.04.2.05.01	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	Dokumen	150,000,000	0	**0.00**	150,000,000.00
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet yang dilarang pada makanan/minuman**	**12.00**	**Sampel**	**171,070,000.00**	0.47	**810,000.00**	
	Pemeriksaan Post Market pada Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar & Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan 1.02.04.2.06.01	Jumlah produk dan sarana produksi makanan minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	12	Sampel	171,070,000	0.47	**810,000.00**	170,260,000.00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	**Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)**	**80.00**	**%**	**745,712,450.00**	**9.00**	**11,441,000.00**	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat & Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)**	**24**	**Dokumen**	**555,866,300.00**	**1.00**	**6,000,000.00**	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan & Pemberdayaan Masyarakat 1.02.05.2.01.01	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	24	Dokumen	555,866,300	1	**6,000,000.00**	549,866,300.00
	Pengembangan & Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pelayanan kesehatan remaja**	**8,575**	**Dokumen**	**189,846,150.00**	**17.00**	**5,441,000.00**	
	Bimbingan Teknis & Supervisi Pengembangan & Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1.02.05.2.03.01	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11	dokumen	91,818,800	3	**0.00**	91,818,800.00
	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk I Dentim	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12	dokumen	8,200,000.00	2	**960,000.00**	7,240,000.00
	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk II Dentim	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12	dokumen	21,317,500.00	0	**0.00**	21,317,500.00
	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk I Denbar	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16	Dokumen	21,975,200.00	0	**0.00**	21,975,200.00

	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk II Denbar	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	30	Dokumen	7,478,000.00	0	**0.00**	7,478,000.00
	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk I Densel	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12	Dokumen	4,808,000.00	3	**3,681,000.00**	1,127,000.00
	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk II Densel	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3	dokumen	4,587,000.00	0	**0.00**	4,587,000.00
	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk III Densel	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	dokumen	3,573,000.00	0	**0.00**	3,573,000.00
	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk IV Densel	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3	dokumen	4,649,400.00	1	**320,000.00**	4,329,400.00
	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk I Denut	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6	dokumen	4,587,000.00	0	**0.00**	4,587,000.00
	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk II Denut	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9	dokumen	4,560,000.00	2	**160,000.00**	4,400,000.00
	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Pusk III Denut	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8,459	Dokumen	12,292,250.00	6	**320,000.00**	11,972,250.00
	TOTAL				**476,178,110,260**		**101,137,498,415.36**	**375,040,611,844.64**
Rata - rata capaian kinerja (%)						**29.49**	**21.24**	
Predikat Kinerja						**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**	

BAB III.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**332,234,042,152**	**334,357,448,308**	**307,563,356,379**	**309,683,387,079**	**335,529,355,803**	**340,190,380,434**	**4,661,024,631**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**332,234,042,152**	**334,357,448,308**	**307,563,356,379**	**309,683,387,079**	**335,529,355,803**	**340,190,380,434**	**4,661,024,631**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan kesekretariatan**			**100%**	**100%**	**218,391,279,881**	**220,514,686,037**	**194,602,674,108**	**194,602,674,108**	**220,448,642,832**	**223,668,034,573**	**3,219,391,741**	
1	**02**	**01**	**2.02**		**AdministrasiKeuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya gaji dan tunjangan ASN**			**100%**	**100%**	**194,187,792,967**	**196,311,199,123**	**170,499,227,194**	**170,499,227,194**	**194,655,268,918**	**198,545,740,659**	**3,890,471,741**	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	751 orang/bulan	751 orang/bulan	194,187,792,967	196,311,199,123	170,499,227,194	170,499,227,194	194,655,268,918.00	198,545,740,659.00	3,890,471,741	
1	02	01	2.06		**AdministrasiUmumPerangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**	**4,260,089,690**	**4,260,089,690**	**4,260,089,690**	**4,260,089,690**	**4,260,089,690**	**4,268,689,690**	**8,600,000**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	7 paket	7 paket	2,907,880,490	2,907,880,490	2,907,880,490	2,907,880,490	2,907,880,490.00	2,907,880,490.00	0	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	8 paket	8 paket	225,039,400	225,039,400	225,039,400	225,039,400	225,039,400.00	233,639,400.00	8,600,000	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	11 paket	11 paket	1,050,812,800	1,050,812,800	1,050,812,800	1,050,812,800	1,050,812,800.00	1,050,812,800.00	0	

1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	7 paket	7 paket	69,517,000	69,517,000	69,517,000	69,517,000	69,517,000.00	69,517,000.00	0	
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	48 dokumen	48 dokumen	6,840,000	6,840,000	6,840,000	6,840,000	6,840,000.00	6,840,000.00	0	
1	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa pelayanan umum kantor**			**100%**	**100%**	**18,226,059,224**	**18,226,059,224**	**18,126,019,224**	**18,126,019,224**	**19,815,946,224**	**18,986,266,224**	**-829,680,000**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	12 laporan	12 laporan	2,799,969,000	2,799,969,000	2,799,969,000	2,799,969,000	2,799,969,000.00	1,970,289,000.00	-829,680,000	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	12 laporan	12 laporan	15,426,090,224	15,426,090,224	15,326,050,224	15,326,050,224	17,015,977,224.00	17,015,977,224.00	0	
1	02	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Gedung kantor dan bangunan lainnya**			**100%**	**100%**	**1,717,338,000**	**1,717,338,000**	**1,717,338,000**	**1,717,338,000**	**1,717,338,000**	**1,867,338,000**	**150,000,000**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	155 Unit	155 Unit	1,497,338,000	1,497,338,000	1,497,338,000	1,497,338,000	1,497,338,000.00	1,497,338,000.00	0	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1 Unit	1 Unit	220,000,000	220,000,000	220,000,000	220,000,000	220,000,000.00	370,000,000.00	150,000,000	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**			**85.5%**	**89.16%**	**111,475,827,771**	**111,475,827,771**	**110,843,922,271**	**112,963,952,971**	**112,963,952,971**	**113,922,645,861**	**958,692,890**	
						Persentase Balita stunting			**9%**	**15%**							-	
						Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup			**1.2**	**9**							-	
						Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup			**56**	**99**							-	
						Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam			**100%**	**100%**							-	
1	02	02	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas**			**100%**	**100%**	**24,334,395,307**	**24,334,395,307**	**24,334,395,307**	**26,168,931,007**	**26,168,931,007**	**27,252,109,007**	**1,083,178,000**	
						Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas			**95%**	**95%**							-	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	26 unit	32 unit	2,629,984,000	2,629,984,000	2,629,984,000	2,629,984,000	2,629,984,000.00	2,729,984,000.00	100,000,000	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	659 unit	661 unit	4,983,106,407	4,983,106,407	4,983,106,407	5,071,260,807	5,071,260,807.00	5,921,260,807.00	850,000,000	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa	3 Unit	3 Unit	360,000,000	360,000,000	360,000,000	360,000,000	360,000,000.00	510,000,000.00	150,000,000	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	2 paket	2 paket	16,309,508,100	16,309,508,100	16,309,508,100	18,055,889,400	18,055,889,400.00	18,039,067,400.00	-16,822,000	
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1 paket	1 paket	51,796,800	51,796,800	51,796,800	51,796,800	51,796,800.00	51,796,800.00	0	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk**			**170 per 100.000 pdd**	**170 per 100.000 pdd**	**86,865,735,014**	**86,865,735,014**	**86,266,380,514**	**86,551,875,514**	**86,551,875,514**	**86,427,394,404**	**161,013,890**	
						Pelayanan Kesehatan Balita			**100%**	**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir			**100%**	**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan ibu bersalin			**100%**	**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			**100%**	**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			**100%**	**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar			**100%**	**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis			**100%**	**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus			**100%**	**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi			**100%**	**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan dasar			**100%**	**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Usia Produktif			**100%**	**100%**							-	
						Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan			**100%**	**100%**							-	
						Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap			**100%**	**100%**							-	
						Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam			**100%**	**100%**							-	
						Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar			**99%**	**99%**							-	
						Persentase TTU memenuhi syarat			**100%**	**100%**							-	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	17051 orang	17051 orang	49,400,000	49,400,000	49,400,000	49,400,000	49,400,000.00	49,400,000.00	0	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	16332 orang	16332 orang	300,995,000	300,995,000	284,120,000	284,120,000	284,120,000.00	284,120,000.00	0	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	16513 orang	16513 orang	459,885,000	459,885,000	459,885,000	459,885,000	459,885,000.00	459,885,000.00	0	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	59866 orang	59866 orang	89,094,000	89,094,000	75,594,000	75,594,000	75,594,000.00	75,594,000.00	0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	171121 orang	171121 orang	410,340,232	410,340,232	396,840,232	396,840,232	396,840,232.00	396,840,232.00	0	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	51130 orang	242855 orang	71,639,000	71,639,000	71,639,000	71,639,000	71,639,000.00	71,639,000.00	0	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	62884 orang	62884 orang	212,039,000	212,039,000	209,039,000	209,039,000	209,039,000.00	209,039,000.00	0	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	15915 orang	30694 orang	137,774,850	137,774,850	18,774,850	18,774,850	18,774,850.00	18,774,850.00	0	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1095 orang	10883 orang	983,901,050	983,901,050	983,901,050	983,901,050	983,901,050.00	983,901,050.00	0	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1196 orang	1260 orang	13,697,000	13,697,000	13,697,000	13,697,000	13,697,000.00	13,697,000.00	0	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	6028 orang	7033 orang	791,268,806	791,268,806	791,268,806	791,268,806	791,268,806.00	730,290,096.00	-60,978,710	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	20587 orang	13614 orang	1,509,418,120	1,509,418,120	1,338,795,120	1,338,795,120	1,338,795,120.00	1,275,296,720.00	-63,498,400	
1	02	02	02.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	10 dokumen	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000.00	7,500,000.00	0	
1	02	02	02.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	27,266,000	27,266,000	27,266,000	27,266,000	27,266,000.00	27,266,000.00	0	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	11 dokumen	11 dokumen	142,640,000	142,640,000	142,640,000	428,135,000	428,135,000.00	428,135,000.00	0	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	2 dokumen	2 dokumen	26,629,500	26,629,500	26,629,500	26,629,500	26,629,500.00	26,629,500.00	0	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	6 dokumen	6 dokumen	264,720,000	264,720,000	264,720,000	264,720,000	264,720,000.00	264,720,000.00	0	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	40 dokumen	40 dokumen	456,362,500	456,362,500	427,674,500	427,674,500	427,674,500.00	427,674,500.00	0	
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	4 dokumen	4 dokumen	226,856,550	226,856,550	153,488,550	153,488,550	153,488,550.00	153,488,550.00	0	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	12 dokumen	3 dokumen	382,570,000	382,570,000	355,125,000	355,125,000	355,125,000.00	355,125,000.00	0	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	45 orang	45 orang	83,125,000	83,125,000	83,125,000	83,125,000	83,125,000.00	83,125,000.00	0	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	11 dokumen	11 dokumen	15,728,915,397	15,728,915,397	15,728,915,397	15,728,915,397	15,728,915,397.00	15,728,911,503.00	-3,894	
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	6 dokumen	12 dokumen	56,511,738,000	56,511,738,000	56,488,088,000	56,488,088,000	56,488,088,000.00	56,488,088,000.00	0	
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/ nasional yang didistribusikan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	-	6508 paket	159,995,000	159,995,000	159,995,000	159,995,000	159,995,000.00	159,995,000.00	0	
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1 dokumen	1 dokumen	99,446,000	99,446,000	73,150,000	73,150,000	73,150,000.00	73,150,000.00	0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	-	12 dokumen	57,698,000	57,698,000	57,698,000	57,698,000	57,698,000.00	57,698,000.00	0	
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	11 unit	11 unit	287,950,000	287,950,000	287,950,000	287,950,000	287,950,000.00	287,950,000.00	0	
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu SPGDT	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	Kota Denpasar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa	3 unit	3 unit	4,279,497,461	4,279,497,461	4,196,087,961	4,196,087,961	4,196,087,961.00	4,196,087,961.00	0	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesaui standar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1240 orang	1447 orang	1,118,745,632	1,118,745,632	1,118,745,632	1,118,745,632	1,118,745,632.00	1,118,745,632.00	0	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	6283 orang	6283 orang	1,654,965,916	1,654,965,916	1,654,965,916	1,654,965,916	1,654,965,916.00	1,654,965,810.00	-106	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1 orang	1 orang	6,025,000	6,025,000	6,025,000	6,025,000	6,025,000.00	6,025,000.00	0	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	-	6 dokumen	313,637,000	313,637,000	313,637,000	313,637,000	313,637,000.00	313,637,000.00	0	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan**			**-**	**1 dokumen**	**9,681,000**	**9,681,000**	**9,681,000**	**9,681,000**	**9,681,000**	**9,681,000**	**0**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	-	1 dokumen	9,681,000	9,681,000	9,681,000	9,681,000	9,681,000.00	9,681,000.00	0	
1	02	02	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase faskes memenuhi standar mutu**			**100%**	**100%**	**266,016,450**	**266,016,450**	**233,465,450**	**233,465,450**	**233,465,450**	**233,461,450**	**-4,000**	
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	11 unit	11 unit	266,016,450	266,016,450	233,465,450	233,465,450	233,465,450.00	233,461,450.00	-4,000	
1	02	03			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin**			**100%**	**100%**	**1,020,530,000**	**1,020,530,000**	**1,016,330,000**	**1,016,330,000**	**1,016,330,000**	**954,230,000**	**-62,100,000**	
1	02	03	2.01		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin**			**100%**	**100%**	**3,480,000**	**3,480,000**	**3,480,000**	**3,480,000**	**3,480,000**	**3,480,000**	0	
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	45 dokumen	45 dokumen	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000.00	3,480,000.00	0	
1	02	03	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya perencanaan kebutuhan SDM**			**100%**	**100%**	**19,170,000**	**19,170,000**	**14,970,000**	**14,970,000**	**14,970,000**	**14,970,000**	0	
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	6 dokumen	6 dokumen	19,170,000	19,170,000	14,970,000	14,970,000	14,970,000.00	14,970,000.00	0	
1	02	03	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan kapasitas SDM kesehatan**			**100%**	**100%**	**997,880,000**	**997,880,000**	**997,880,000**	**997,880,000**	**997,880,000**	**935,780,000**	-62,100,000	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	132 orang	250 orang	997,880,000	997,880,000	997,880,000	997,880,000	997,880,000.00	935,780,000.00	-62,100,000	
1	02	04			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase TPM memenuhi syarat**			**60%**	**60%**	**624,774,900**	**624,774,900**	**452,744,900**	**452,744,900**	**452,744,900**	**452,744,900**	**0**	
1	02	04	2.01		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional UMOT**	**Persentase Apotek,Toko Obat,Toko Alat Kesehatan & Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki ijin**			**100%**	**100%**	**39,479,900**	**39,479,900**	**35,459,900**	**35,459,900**	**35,459,900**	**35,459,900**	**0**	
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	30 dokumen	30 dokumen	39,479,900	39,479,900	35,459,900	35,459,900	35,459,900.00	35,459,900.00	0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	02	04	2.03		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Industri pangan rumah tangga bersertifikat produksi**			**40%**	**40%**	**125,760,000**	**125,760,000**	**86,950,000**	**86,950,000**	**86,950,000**	**86,950,000**	0	
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa	70 dokumen	70 dokumen	125,760,000	125,760,000	86,950,000	86,950,000	86,950,000.00	86,950,000.00	0	
1	02	04	2.04		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentase TPM memenuhi syarat**			**60%**	**60%**	**9,265,000**	**9,265,000**	**9,265,000**	**9,265,000**	**9,265,000**	**9,265,000**	0	
1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	3 dokumen	3 dokumen	9,265,000	9,265,000	9,265,000	9,265,000	9,265,000.00	9,265,000.00	0	
1	02	04	2.05		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Persentase tempat pengolahan makanan memenuhi syarat**			**60%**	**60%**	**150,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**	0	
1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1 dokumen	1 dokumen	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000.00	150,000,000.00	0	
1	02	04	2.06		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet yang dilarang pada makanan/minuman**			**12 sampel**	**12 sampel**	**300,270,000**	**300,270,000**	**171,070,000**	**171,070,000**	**171,070,000**	**171,070,000**	0	
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	40 unit	40 unit	300,270,000	300,270,000	171,070,000	171,070,000	171,070,000.00	171,070,000.00	0	
1	02	05			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat)**			**80%**	**80%**	**721,629,600**	**721,629,600**	**647,685,100**	**647,685,100**	**647,685,100**	**1,192,725,100**	**545,040,000**	
1	02	05	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)**			**80%**	**80%**	**594,360,800**	**594,360,800**	**555,866,300**	**555,866,300**	**555,866,300**	**555,866,300**	0	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	24 dokumen	24 dokumen	594,360,800	594,360,800	555,866,300	555,866,300	555,866,300.00	555,866,300.00	0	
1	02	05	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan kesehatan remaja**			**100%**	**100%**	**127,268,800**	**127,268,800**	**91,818,800**	**91,818,800**	**91,818,800**	**636,858,800**	**545,040,000**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	11 dokumen	11 dokumen	127,268,800	127,268,800	91,818,800	91,818,800	91,818,800.00	636,858,800.00	545,040,000	
1.02.0.00.0.00.01.0001					**PUSKESMAS I DENPASAR TIMUR**						**3,675,907,600**	**3,675,907,600**	**3,675,907,600**	**3,675,907,600**	**3,675,907,600**	**4,293,494,200**	**617,586,600**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3,675,907,600**	**3,675,907,600**	**3,675,907,600**	**3,675,907,600**	**3,675,907,600**	**4,293,494,200**	**617,586,600**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3,675,907,600**	**3,675,907,600**	**3,675,907,600**	**3,675,907,600**	**3,675,907,600**	**4,293,494,200**	**617,586,600**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan keseketariatan**			**100%**	**100%**	**3,093,163,600**	**3,093,163,600**	**3,093,163,600**	**3,093,163,600**	**3,093,163,600**	**3,710,750,200**	**617,586,600**	
1	**02**	**01**	**10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terselenggaranya operasional BLUD**			**100%**	**100%**	**3,093,163,600**	**3,093,163,600**	**3,093,163,600**	**3,093,163,600**	**3,093,163,600**	**3,710,750,200**	**617,586,600**	
1	02	01	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	1 unit kerja	1 unit kerja	3,093,163,600	3,093,163,600	3,093,163,600	3,093,163,600	3,093,163,600.00	3,710,750,200.00	617,586,600	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Balita stunting**			-	**15%**	**574,544,000**	**574,544,000**	**574,544,000**	**574,544,000**	**574,544,000**	**574,544,000**	-	
						Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				**100%**								
						Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup				**99**								
						Indeks Kepuasan Masyarakat				**89.16**								
						Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup				**9**								
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk**			-	**170 per 100.000 pdd**	**574,544,000**	**574,544,000**	**574,544,000**	**574,544,000**	**574,544,000**	**574,544,000**	**0**	
						Pelayanan Kesehatan Balita				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan ibu bersalin				**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi				**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan dasar				**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				**100%**							-	
						Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan				**100%**							-	
						Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap				**100%**							-	
						Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam				**100%**							-	
						Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar				**99%**							-	
						Persentase TTU memenuhi syarat				**100%**							-	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	-	312 orang	11,680,000	11,680,000	11,680,000	11,680,000	11,680,000.00	11,680,000.00	0	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	-	17261 orang	44,480,000	44,480,000	44,480,000	44,480,000	44,480,000.00	44,480,000.00	0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	-	43 orang	10,320,000	10,320,000	10,320,000	10,320,000	10,320,000.00	10,320,000.00	0	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	-	66 orang	5,280,000	5,280,000	5,280,000	5,280,000	5,280,000.00	5,280,000.00	0	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	-	49 dokumen	174,955,000	174,955,000	174,955,000	174,955,000	174,955,000.00	174,955,000.00	0	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	-	4 dokumen	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000.00	960,000.00	0	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	-	11 dokumen	20,400,000	20,400,000	20,400,000	20,400,000	20,400,000.00	20,400,000.00	0	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	-	12 dokumen	25,978,000	25,978,000	25,978,000	25,978,000	25,978,000.00	25,978,000.00	0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	-	46 Orang	7,360,000	7,360,000	7,360,000	7,360,000	7,360,000.00	7,360,000.00	0	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	-	18 dokumen	50,760,000	50,760,000	50,760,000	50,760,000	50,760,000.00	50,760,000.00	0	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	-	12 dokumen	142,736,000	142,736,000	142,736,000	142,736,000	142,736,000.00	142,736,000.00	0	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	-	3 dokumen	8,515,000	8,515,000	8,515,000	8,515,000	8,515,000.00	8,515,000.00	0	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	-	9 dokumen	26,920,000	26,920,000	26,920,000	26,920,000	26,920,000.00	26,920,000.00	0	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	-	2 dokumen	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000.00	1,560,000.00	0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	-	11 dokumen	10,560,000	10,560,000	10,560,000	10,560,000	10,560,000.00	10,560,000.00	0	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	-	9 dokumen	32,080,000	32,080,000	32,080,000	32,080,000	32,080,000.00	32,080,000.00	0	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)**			**-**	**80%**	**8,200,000**	**8,200,000**	**8,200,000**	**8,200,000**	**8,200,000**	**8,200,000**	0	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat UKBM Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan kesehatan remaja**			**-**	**100%**	**8,200,000**	**8,200,000**	**8,200,000**	**8,200,000**	**8,200,000**	**8,200,000**	**0**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	-	12 dokumen	8,200,000	8,200,000	8,200,000	8,200,000	8,200,000.00	8,200,000.00	0	
1.02.0.00.0.00.01.0002					**PUSKESMAS IIDENPASAR TIMUR**						**2,690,921,400**	**2,690,921,400**	**2,690,921,400**	**2,690,921,400**	**2,690,921,400**	**2,911,933,000**	**221,011,600**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2,690,921,400**	**2,690,921,400**	**2,690,921,400**	**2,690,921,400**	**2,690,921,400**	**2,911,933,000**	**221,011,600**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,690,921,400**	**2,690,921,400**	**2,690,921,400**	**2,690,921,400**	**2,690,921,400**	**2,911,933,000**	**221,011,600**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan kesekretariatan**			**100%**	**100%**	**2,089,773,400**	**2,089,773,400**	**2,089,773,400**	**2,089,773,400**	**2,089,773,400**	**2,310,785,000**	**221,011,600**	
1	**02**	**01**	**10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terselenggaranya operasional BLUD**			**100%**	**100%**	**2,089,773,400**	**2,089,773,400**	**2,089,773,400**	**2,089,773,400**	**2,089,773,400**	**2,310,785,000**	**221,011,600**	
1	02	01	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas		1 unit kerja	1 unit kerja	2,089,773,400	2,089,773,400	2,089,773,400	2,089,773,400	2,089,773,400.00	2,310,785,000.00	221,011,600	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup**			**-**	**99**	**579,830,500**	**579,830,500**	**579,830,500**	**579,830,500**	**579,830,500**	**579,830,500**	-	
						Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				**100%**								
						Indeks Kepuasan Masyarakat				**89.16**								
						Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup				**9**								
						Persentase Balita stunting				**15%**								
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk**			**-**	**170 per 100.000 pdd**	**579,830,500**	**579,830,500**	**579,830,500**	**579,830,500**	**579,830,500**	**579,830,500**	0	
						Pelayanan Kesehatan Balita				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan ibu bersalin				**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				**100%**							-	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
						Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi				**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan dasar				**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				**100%**							-	
						Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan				**100%**							-	
						Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap				**100%**							-	
						Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam				**100%**							-	
						Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar				**99%**							-	
						Persentase TTU memenuhi syarat				**100%**							-	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri	-	80 orang	31,280,000	31,280,000	31,280,000	31,280,000	31,280,000.00	31,280,000.00	0	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri	-	12827 orang	28,840,000	28,840,000	28,840,000	28,840,000	28,840,000.00	28,840,000.00	0	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri	-	50 Orang	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000.00	24,000,000.00	0	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri	-	100 orang	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000.00	7,800,000.00	0	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri	-	12 dokumen	114,800,000	114,800,000	114,800,000	114,800,000	114,800,000.00	114,800,000.00	0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	-	12 dokumen	2,720,000	2,720,000	2,720,000	2,720,000	2,720,000.00	2,720,000.00	0	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	-	12 dokumen	17,152,000	17,152,000	17,152,000	17,152,000	17,152,000.00	17,152,000.00	0	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	-	12 dokumen	23,200,000	23,200,000	23,200,000	23,200,000	23,200,000.00	23,200,000.00	0	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	-	20000 Orang	5,120,000	5,120,000	5,120,000	5,120,000	5,120,000.00	5,120,000.00	0	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	-	24 dokumen	65,400,000	65,400,000	65,400,000	65,400,000	65,400,000.00	65,400,000.00	0	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	-	12 dokumen	140,192,500	140,192,500	140,192,500	140,192,500	140,192,500.00	140,192,500.00	0	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	-	3 dokumen	9,290,000	9,290,000	9,290,000	9,290,000	9,290,000.00	9,290,000.00	0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	-	12 dokumen	71,316,000	71,316,000	71,316,000	71,316,000	71,316,000.00	71,316,000.00	0	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	-	12 dokumen	760,000	760,000	760,000	760,000	760,000.00	760,000.00	0	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	-	10 dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000.00	4,000,000.00	0	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	-	12 dokumen	33,960,000	33,960,000	33,960,000	33,960,000	33,960,000.00	33,960,000.00	0	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)**			**-**	**80%**	**21,317,500**	**21,317,500**	**21,317,500**	**21,317,500**	**21,317,500**	**21,317,500**	**0**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan kesehatan remaja**			**-**	**100%**	**21,317,500**	**21,317,500**	**21,317,500**	**21,317,500**	**21,317,500**	**21,317,500**	**0**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	-	12 dokumen	21,317,500	21,317,500	21,317,500	21,317,500	21,317,500.00	21,317,500.00	0	
1.02.0.00.0.00.01.0003 PUSKESMAS I DENPASAR BARAT											**3,566,113,400**	**3,566,113,400**	**3,566,113,400**	**3,566,113,400**	**3,566,113,400**	**4,135,443,208**	**569,329,808**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3,566,113,400**	**3,566,113,400**	**3,566,113,400**	**3,566,113,400**	**3,566,113,400**	**4,135,443,208**	**569,329,808**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3,566,113,400**	**3,566,113,400**	**3,566,113,400**	**3,566,113,400**	**3,566,113,400**	**4,135,443,208**	**569,329,808**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan kesekretariatan**			**100%**	**100%**	**2,923,224,400**	**2,923,224,400**	**2,923,224,400**	**2,923,224,400**	**2,923,224,400**	**3,492,554,208**	**569,329,808**	
1	**02**	**01**	**10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terselenggaranya operasional BLUD**			**100%**	**100%**	**2,923,224,400**	**2,923,224,400**	**2,923,224,400**	**2,923,224,400**	**2,923,224,400**	**3,492,554,208**	**569,329,808**	
1	02	01	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,923,224,400	2,923,224,400	2,923,224,400	2,923,224,400	2,923,224,400.00	3,492,554,208.00	569,329,808	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana		Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
										Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam**				**-**	**100%**	**620,913,800**	**620,913,800**	**620,913,800**	**620,913,800**	**620,913,800**	**620,913,800**	-	
						Indeks Kepuasan Masyarakat					**89.16**								
						Persentase Balita stunting					**15%**								
						Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup					**99**								
						Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup					**9**								
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk**				**-**	**170 per 100.000 pdd**	**620,913,800**	**620,913,800**	**620,913,800**	**620,913,800**	**620,913,800**	**620,913,800**	0	
						Pelayanan Kesehatan Balita					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan ibu bersalin					**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi					**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan dasar					**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Usia Produktif					**100%**							-	
						Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan					**100%**							-	
						Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap					**100%**							-	
						Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam					**100%**							-	
						Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar					**99%**							-	
						Persentase TTU memenuhi syarat					**100%**							-	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas		Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	-	380 orang	13,640,000	13,640,000	13,640,000	13,640,000	13,640,000.00	13,640,000.00	0	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas		Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	-	93 orang	26,400,000	26,400,000	26,400,000	26,400,000	26,400,000.00	26,400,000.00	0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	-	42 orang	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000.00	3,360,000.00	0	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	-	80 orang	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000.00	3,200,000.00	0	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	-	38 dokumen	202,425,000	202,425,000	202,425,000	202,425,000	202,425,000.00	202,425,000.00	0	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	-	6 dokumen	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000.00	1,200,000.00	0	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	-	33 Dokumen	11,202,000	11,202,000	11,202,000	11,202,000	11,202,000.00	11,202,000.00	0	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	-	35 dokumen	77,520,000	77,520,000	77,520,000	77,520,000	77,520,000.00	77,520,000.00	0	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	-	36 Orang	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000.00	2,880,000.00	0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	-	59 dokumen	44,250,000	44,250,000	44,250,000	44,250,000	44,250,000.00	44,250,000.00	0	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	-	32 dokumen	144,162,800	144,162,800	144,162,800	144,162,800	144,162,800.00	144,162,800.00	0	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	-	40 dokumen	65,874,000	65,874,000	65,874,000	65,874,000	65,874,000.00	65,874,000.00	0	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	-	8 dokumen	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000.00	320,000.00	0	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	-	11 dokumen	8,800,000	8,800,000	8,800,000	8,800,000	8,800,000.00	8,800,000.00	0	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	-	18 dokumen	15,680,000	15,680,000	15,680,000	15,680,000	15,680,000.00	15,680,000.00	0	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)**			-	**80%**	**21,975,200**	**21,975,200**	**21,975,200**	**21,975,200**	**21,975,200**	**21,975,200**	**0**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan kesehatan remaja**			-	**100%**	**21,975,200**	**21,975,200**	**21,975,200**	**21,975,200**	**21,975,200**	**21,975,200**	**0**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	-	16 dokumen	21,975,200	21,975,200	21,975,200	21,975,200	21,975,200.00	21,975,200.00	0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1.02.0.00.0.00.01.0004					**PUSKESMAS II DENPASAR BARAT**						**3,836,830,600**	**3,836,830,600**	**3,836,830,600**	**3,836,830,600**	**3,836,830,600**	**4,146,516,000**	**309,685,400**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3,836,830,600**	**3,836,830,600**	**3,836,830,600**	**3,836,830,600**	**3,836,830,600**	**4,146,516,000**	**309,685,400**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3,836,830,600**	**3,836,830,600**	**3,836,830,600**	**3,836,830,600**	**3,836,830,600**	**4,146,516,000**	**309,685,400**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan keseknetariatan**			**100%**	**100%**	**3,126,630,600**	**3,126,630,600**	**3,126,630,600**	**3,126,630,600**	**3,126,630,600**	**3,436,316,000**	**309,685,400**	
1	**02**	**01**	**10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terselenggaranya operasional BLUD**			**100%**	**100%**	**3,126,630,600**	**3,126,630,600**	**3,126,630,600**	**3,126,630,600**	**3,126,630,600**	**3,436,316,000**	**309,685,400**	
1	02	01	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3,126,630,600	3,126,630,600	3,126,630,600	3,126,630,600	3,126,630,600.00	3,436,316,000.00	309,685,400	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup**			**-**	**99**	**702,722,000**	**702,722,000**	**702,722,000**	**702,722,000**	**702,722,000**	**702,722,000**	**-**	
						Persentase Balita stunting				**15%**								
						Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup				**9**								
						Indeks Kepuasan Masyarakat				**89.16**								
						Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				**100%**								
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk**			**-**	**170 per 100.000 pdd**	**702,722,000**	**702,722,000**	**702,722,000**	**702,722,000**	**702,722,000**	**702,722,000**	**0**	
						Pelayanan Kesehatan Balita				**100%**							**-**	
						Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir				**100%**							**-**	
						Pelayanan kesehatan ibu bersalin				**100%**							**-**	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				**100%**							**-**	
						Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat				**100%**							**-**	
						Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar				**100%**							**-**	
						Pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis				**100%**							**-**	
						Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus				**100%**							**-**	
						Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi				**100%**							**-**	
						Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan dasar				**100%**							**-**	
						Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				**100%**							**-**	
						Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan				**100%**							**-**	
						Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap				**100%**							**-**	
						Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam				**100%**							**-**	
						Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar				**99%**							**-**	
						Persentase TTU memenuhi syarat				**100%**							**-**	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	-	1529 orang	16,480,000	16,480,000	16,480,000	16,480,000	16,480,000.00	16,480,000.00	0	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	-	21066 orang	51,720,000	51,720,000	51,720,000	51,720,000	51,720,000.00	51,720,000.00	0	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	-	5 Orang	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000.00	3,200,000.00	0	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	-	61 orang	44,400,000	44,400,000	44,400,000	44,400,000	22,800,000.00	22,800,000.00	0	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	-	29 dokumen	153,349,000	153,349,000	153,349,000	153,349,000	153,349,000.00	153,349,000.00	0	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	-	4 dokumen	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000.00	5,200,000.00	0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	-	42 dokumen	27,360,000	27,360,000	27,360,000	27,360,000	27,360,000.00	27,360,000.00	0	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	-	30 dokumen	28,320,000	28,320,000	28,320,000	28,320,000	31,520,000.00	31,520,000.00	0	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	-	71 Orang	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000.00	640,000.00	0	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	-	114 dokumen	51,927,000	51,927,000	51,927,000	51,927,000	69,847,000.00	69,847,000.00	0	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	-	66 dokumen	189,752,000	189,752,000	189,752,000	189,752,000	189,752,000.00	189,752,000.00	0	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	-	3 dokumen	11,614,000	11,614,000	11,614,000	11,614,000	11,614,000.00	11,614,000.00	0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	-	8 dokumen	96,360,000	96,360,000	96,360,000	96,360,000	96,360,000.00	96,360,000.00	0	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	-	10 dokumen	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000.00	400,000.00	0	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	-	10 dokumen	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000.00	4,800,000.00	0	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	-	14 dokumen	17,200,000	17,200,000	17,200,000	17,200,000	17,680,000.00	17,680,000.00	0	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)**			-	**80%**	**7,478,000**	**7,478,000**	**7,478,000**	**7,478,000**	**7,478,000**	**7,478,000**	**0**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan kesehatan remaja**			-	**100%**	**7,478,000**	**7,478,000**	**7,478,000**	**7,478,000**	**7,478,000**	**7,478,000**	**0**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	-	30 dokumen	7,478,000	7,478,000	7,478,000	7,478,000	7,478,000.00	7,478,000.00	0	
1.02.0.00.0.00.01.0005 PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN											**2,685,057,200**	**2,685,057,200**	**2,685,057,200**	**2,685,057,200**	**2,685,057,200**	**3,097,306,000**	**412,248,800**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2,685,057,200**	**2,685,057,200**	**2,685,057,200**	**2,685,057,200**	**2,685,057,200**	**3,097,306,000**	**412,248,800**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,685,057,200**	**2,685,057,200**	**2,685,057,200**	**2,685,057,200**	**2,685,057,200**	**3,097,306,000**	**412,248,800**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan kesekretariatan**			**100%**	**100%**	**2,140,187,200**	**2,140,187,200**	**2,140,187,200**	**2,140,187,200**	**2,140,187,200**	**2,552,436,000**	**412,248,800**	
1	**02**	**01**	**10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terselenggaranya operasional BLUD**			**100%**	**100%**	**2,140,187,200**	**2,140,187,200**	**2,140,187,200**	**2,140,187,200**	**2,140,187,200**	**2,552,436,000**	**412,248,800**	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana		Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
										Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	02	01	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas		Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,140,187,200	2,140,187,200	2,140,187,200	2,140,187,200	2,140,187,200.00	2,552,436,000.00	412,248,800	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam**				-	**100%**	**540,062,000**	**540,062,000**	**540,062,000**	**540,062,000**	**540,062,000**	**540,062,000**	-	
						Persentase Balita stunting					**15%**								
						Indeks Kepuasan Masyarakat					**89.16**								
						Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup					**99**								
						Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup					**9**								
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk**				-	**170 per 100.000 pdd**	**540,062,000**	**540,062,000**	**540,062,000**	**540,062,000**	**540,062,000**	**540,062,000**	**0**	
						Pelayanan Kesehatan Balita					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan ibu bersalin					**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi					**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan dasar					**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Usia Produktif					**100%**							-	
						Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan					**100%**							-	
						Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap					**100%**							-	
						Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam					**100%**							-	
						Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar					**99%**							-	
						Persentase TTU memenuhi syarat					**100%**							-	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas		Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	-	580 orang	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000.00	23,000,000.00	0	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas		Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	-	448 orang	17,920,000	17,920,000	17,920,000	17,920,000	17,920,000.00	17,920,000.00	0	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas		Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	-	30 Orang	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000.00	2,400,000.00	0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	-	42 orang	4,160,000	4,160,000	4,160,000	4,160,000	4,160,000.00	4,160,000.00	0	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	-	12 dokumen	117,697,000	117,697,000	117,697,000	117,697,000	117,697,000.00	117,697,000.00	0	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	-	12 dokumen	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000.00	200,000.00	0	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	-	12 dokumen	5,717,000	5,717,000	5,717,000	5,717,000	5,717,000.00	5,717,000.00	0	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	-	12 dokumen	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000.00	1,360,000.00	0	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	-	60 Orang	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000.00	3,200,000.00	0	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	-	12 dokumen	115,760,000	115,760,000	115,760,000	115,760,000	115,760,000.00	115,760,000.00	0	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	-	12 dokumen	135,102,000	135,102,000	135,102,000	135,102,000	135,102,000.00	135,102,000.00	0	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	-	12 dokumen	100,746,000	100,746,000	100,746,000	100,746,000	100,746,000.00	100,746,000.00	0	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	-	12 dokumen	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000.00	960,000.00	0	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	-	12 dokumen	11,840,000	11,840,000	11,840,000	11,840,000	11,840,000.00	11,840,000.00	0	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)**			-	**80%**	**4,808,000**	**4,808,000**	**4,808,000**	**4,808,000**	**4,808,000**	**4,808,000**	0	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan kesehatan remaja**			-	**100%**	**4,808,000**	**4,808,000**	**4,808,000**	**4,808,000**	**4,808,000**	**4,808,000**	**0**	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	-	12 dokumen	4,808,000	4,808,000	4,808,000	4,808,000	4,808,000.00	4,808,000.00	0	
1.02.0.00.0.00.01.0006					**PUSKESMAS IID ENPASAR SELATAN**						**2,163,569,800**	**2,163,569,800**	**2,163,569,800**	**2,163,569,800**	**2,163,569,800**	**2,479,909,104**	**316,339,304**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2,163,569,800**	**2,163,569,800**	**2,163,569,800**	**2,163,569,800**	**2,163,569,800**	**2,479,909,104**	**316,339,304**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,163,569,800**	**2,163,569,800**	**2,163,569,800**	**2,163,569,800**	**2,163,569,800**	**2,479,909,104**	**316,339,304**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan kesekretariatan**			**100%**	**100%**	**1,596,929,800**	**1,596,929,800**	**1,596,929,800**	**1,596,929,800**	**1,596,929,800**	**1,913,269,104**	**316,339,304**	
1	**02**	**01**	**10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terselenggaranya operasional BLUD**			**100%**	**100%**	**1,596,929,800**	**1,596,929,800**	**1,596,929,800**	**1,596,929,800**	**1,596,929,800**	**1,913,269,104**	**316,339,304**	
1	02	01	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pendapatan dari BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,596,929,800	1,596,929,800	1,596,929,800	1,596,929,800	1,596,929,800.00	1,913,269,104.00	316,339,304	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam**			**-**	**100%**	**562,053,000**	**562,053,000**	**562,053,000**	**562,053,000**	**562,053,000**	**562,053,000**	**-**	
						Indeks Kepuasan Masyarakat				**89.16**								
						Persentase Balita stunting				**15%**								
						Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup				**9**								
						Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup				**99**								
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk**			**-**	**170 per 100.000 pdd**	**562,053,000**	**562,053,000**	**562,053,000**	**562,053,000**	**562,053,000**	**562,053,000**	**0**	
						Pelayanan Kesehatan Balita				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan ibu bersalin				**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi				**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan dasar				**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				**100%**							-	
						Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan				**100%**							-	
						Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap				**100%**							-	
						Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam				**100%**							-	
						Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar				**99%**							-	
						Persentase TTU memenuhi syarat				**100%**							-	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	-	480 orang	17,600,000	17,600,000	17,600,000	17,600,000	17,600,000.00	17,600,000.00	0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	-	1064 orang	42,560,000	42,560,000	42,560,000	42,560,000	42,560,000.00	42,560,000.00	0	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	-	72 Orang	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000.00	2,880,000.00	0	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	-	132 orang	5,280,000	5,280,000	5,280,000	5,280,000	5,280,000.00	5,280,000.00	0	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	-	20 dokumen	117,335,000	117,335,000	117,335,000	117,335,000	117,335,000.00	117,335,000.00	0	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	-	1 dokumen	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000.00	3,200,000.00	0	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	-	7 dokumen	16,240,000	16,240,000	16,240,000	16,240,000	16,240,000.00	16,240,000.00	0	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	-	3 dokumen	3,560,000	3,560,000	3,560,000	3,560,000	3,560,000.00	3,560,000.00	0	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	-	40 Orang	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000.00	1,600,000.00	0	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	-	18 dokumen	107,676,000	107,676,000	107,676,000	107,676,000	107,676,000.00	107,676,000.00	0	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	-	47 dokumen	138,485,000	138,485,000	138,485,000	138,485,000	138,485,000.00	138,485,000.00	0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	-	7 dokumen	9,292,000	9,292,000	9,292,000	9,292,000	9,292,000.00	9,292,000.00	0	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	-	8 dokumen	86,300,000	86,300,000	86,300,000	86,300,000	86,300,000.00	86,300,000.00	0	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	-	2 dokumen	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000.00	125,000.00	0	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	-	1 dokumen	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000.00	3,840,000.00	0	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	-	2 dokumen	6,080,000	6,080,000	6,080,000	6,080,000	6,080,000.00	6,080,000.00	0	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)**			**-**	**80%**	**4,587,000**	**4,587,000**	**4,587,000**	**4,587,000**	**4,587,000**	**4,587,000**	**0**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan kesehatan remaja**			**-**	**100%**	**4,587,000**	**4,587,000**	**4,587,000**	**4,587,000**	**4,587,000**	**4,587,000**	**0**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	-	3 dokumen	4,587,000	4,587,000	4,587,000	4,587,000	4,587,000.00	4,587,000.00	0	
1.02.0.00.0.00.01.0007					**PUSKESMAS III DENPASAR SELATAN**						**1,804,040,800**	**1,804,040,800**	**1,804,040,800**	**1,804,040,800**	**1,804,040,800**	**2,239,182,200**	**435,141,400**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1,804,040,800**	**1,804,040,800**	**1,804,040,800**	**1,804,040,800**	**1,804,040,800**	**2,239,182,200**	**435,141,400**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,804,040,800**	**1,804,040,800**	**1,804,040,800**	**1,804,040,800**	**1,804,040,800**	**2,239,182,200**	**435,141,400**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan kesekretariatan**			**100%**	**100%**	**1,391,039,800**	**1,391,039,800**	**1,391,039,800**	**1,391,039,800**	**1,391,039,800**	**1,826,181,200**	**435,141,400**	
1	**02**	**01**	**10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terselenggaranya operasional BLUD**			**100%**	**100%**	**1,391,039,800**	**1,391,039,800**	**1,391,039,800**	**1,391,039,800**	**1,391,039,800**	**1,826,181,200**	**435,141,400**	
1	02	01	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,391,039,800	1,391,039,800	1,391,039,800	1,391,039,800	1,391,039,800.00	1,826,181,200.00	435,141,400	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**			**-**	**89.16**	**409,428,000**	**409,428,000**	**409,428,000**	**409,428,000**	**409,428,000**	**409,428,000**	**-**	
						Persentase Balita stunting				**15%**								
						Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup				**9**								
						Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				**100%**								

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
						Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup				**99**								
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk**			-	**170 per 100.000 pdd**	**409,428,000**	**409,428,000**	**409,428,000**	**409,428,000**	**409,428,000**	**409,428,000**	**0**	
						Pelayanan Kesehatan Balita				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan ibu bersalin				**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi				**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan dasar				**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				**100%**							-	
						Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan				**100%**							-	
						Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap				**100%**							-	
						Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam				**100%**							-	
						Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar				**99%**							-	
						Persentase TTU memenuhi syarat				**100%**							-	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	-	276 orang	8,440,000	8,440,000	8,440,000	8,440,000	8,440,000.00	8,440,000.00	0	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	357 orang	14,280,000	14,280,000	14,280,000	14,280,000	14,280,000.00	14,280,000.00	0	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	48 orang	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000.00	1,920,000.00	0	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	198 orang	7,920,000	7,920,000	7,920,000	7,920,000	7,920,000.00	7,920,000.00	0	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	91 dokumen	126,619,000	126,619,000	126,619,000	126,619,000	126,619,000.00	126,619,000.00	0	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 dokumen	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000.00	480,000.00	0	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	35 dokumen	15,610,000	15,610,000	15,610,000	15,610,000	15,610,000.00	15,610,000.00	0	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	40 dokumen	19,680,000	19,680,000	19,680,000	19,680,000	19,680,000.00	19,680,000.00	0	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	40 Orang	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000.00	1,600,000.00	0	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	78 dokumen	42,600,000	42,600,000	42,600,000	42,600,000	42,600,000.00	42,600,000.00	0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	33 dokumen	96,115,000	96,115,000	96,115,000	96,115,000	96,115,000.00	96,115,000.00	0	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	8 dokumen	6,194,000	6,194,000	6,194,000	6,194,000	6,194,000.00	6,194,000.00	0	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	54 dokumen	55,290,000	55,290,000	55,290,000	55,290,000	55,290,000.00	55,290,000.00	0	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 dokumen	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000.00	1,280,000.00	0	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 dokumen	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000.00	1,760,000.00	0	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	9,640,000	9,640,000	9,640,000	9,640,000	9,640,000.00	9,640,000.00	0	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)**			**-**	**80%**	**3,573,000**	**3,573,000**	**3,573,000**	**3,573,000**	**3,573,000**	**3,573,000**	**0**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan kesehatan remaja**			**-**	**100%**	**3,573,000**	**3,573,000**	**3,573,000**	**3,573,000**	**3,573,000**	**3,573,000**	**0**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 dokumen	3,573,000	3,573,000	3,573,000	3,573,000	3,573,000.00	3,573,000.00	0	
1.02.0.00.0.00.01.0008					**PUSKESMAS IV DENPASAR SELATAN**						**2,261,186,400**	**2,261,186,400**	**2,261,186,400**	**2,261,186,400**	**2,261,186,400**	**2,794,133,000**	**532,946,600**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2,261,186,400**	**2,261,186,400**	**2,261,186,400**	**2,261,186,400**	**2,261,186,400**	**2,794,133,000**	**532,946,600**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,261,186,400**	**2,261,186,400**	**2,261,186,400**	**2,261,186,400**	**2,261,186,400**	**2,794,133,000**	**532,946,600**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan kesekretariatan**			**100%**	**100%**	**1,907,053,400**	**1,907,053,400**	**1,907,053,400**	**1,907,053,400**	**1,907,053,400**	**2,440,000,000**	**532,946,600**	
1	**02**	**01**	**10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terselenggaranya operasional BLUD**			**100%**	**100%**	**1,907,053,400**	**1,907,053,400**	**1,907,053,400**	**1,907,053,400**	**1,907,053,400**	**2,440,000,000**	**532,946,600**	
1	02	01	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,907,053,400	1,907,053,400	1,907,053,400	1,907,053,400	1,907,053,400.00	2,440,000,000.00	532,946,600	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup**			**-**	**99**	**349,483,600**	**349,483,600**	**349,483,600**	**349,483,600**	**349,483,600**	**349,483,600**	**-**	
						Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				**100%**								
						Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup				**9**								
						Indeks Kepuasan Masyarakat				**89.16**								
						Persentase Balita stunting				**15%**								
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk**			**-**	**170 per 100.000 pdd**	**349,483,600**	**349,483,600**	**349,483,600**	**349,483,600**	**349,483,600**	**349,483,600**	**0**	
						Pelayanan Kesehatan Balita				**100%**							**-**	
						Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir				**100%**							**-**	
						Pelayanan kesehatan ibu bersalin				**100%**							**-**	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				**100%**							**-**	
						Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat				**100%**							**-**	
						Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar				**100%**							**-**	
						Pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis				**100%**							**-**	
						Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus				**100%**							**-**	
						Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi				**100%**							**-**	
						Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan dasar				**100%**							**-**	
						Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				**100%**							**-**	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
						Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan				**100%**							-	
						Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap				**100%**							-	
						Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam				**100%**							-	
						Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar				**99%**							-	
						Persentase TTU memenuhi syarat				**100%**							-	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	-	960 orang	28,800,000	28,800,000	28,800,000	28,800,000	28,800,000.00	28,800,000.00	0	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	-	241 orang	9,640,000	9,640,000	9,640,000	9,640,000	9,640,000.00	9,640,000.00	0	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	-	480 orang	19,200,000	19,200,000	19,200,000	19,200,000	19,200,000.00	19,200,000.00	0	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	-	142 orang	5,680,000	5,680,000	5,680,000	5,680,000	5,680,000.00	5,680,000.00	0	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	-	11 dokumen	91,103,000	91,103,000	91,103,000	91,103,000	91,103,000.00	91,103,000.00	0	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	-	2 dokumen	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000.00	1,240,000.00	0	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	-	11 dokumen	5,040,000	5,040,000	5,040,000	5,040,000	5,040,000.00	5,040,000.00	0	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	-	11 dokumen	17,680,000	17,680,000	17,680,000	17,680,000	17,680,000.00	17,680,000.00	0	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	-	192 Orang	7,680,000	7,680,000	7,680,000	7,680,000	7,680,000.00	7,680,000.00	0	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	-	11 dokumen	54,775,000	54,775,000	54,775,000	54,775,000	54,775,000.00	54,775,000.00	0	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas; Pendapatan Dana Kapitasi	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	-	12 dokumen	81,281,600	81,281,600	81,281,600	81,281,600	81,281,600.00	81,281,600.00	0	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	-	4 dokumen	14,560,000	14,560,000	14,560,000	14,560,000	14,560,000.00	14,560,000.00	0	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	-	10 dokumen	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000.00	404,000.00	0	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	-	11 dokumen	8,800,000	8,800,000	8,800,000	8,800,000	8,800,000.00	8,800,000.00	0	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	-	5 Dokumen	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000.00	3,600,000.00	0	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)**			**-**	**80%**	**4,649,400**	**4,649,400**	**4,649,400**	**4,649,400**	**4,649,400**	**4,649,400**	**0**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Kesehatan Remaja**			**-**	**100%**	**4,649,400**	**4,649,400**	**4,649,400**	**4,649,400**	**4,649,400**	**4,649,400**	**0**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	-	3 dokumen	4,649,400	4,649,400	4,649,400	4,649,400	4,649,400.00	4,649,400.00	0	
1.02.0.00.0.00.01.0009					**PUSKESMAS I DENPASAR UTARA**						**2,615,865,400**	**2,615,865,400**	**2,615,865,400**	**2,615,865,400**	**2,615,865,400**	**2,847,866,616**	**232,001,216**	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						**2,615,865,400**	**2,615,865,400**	**2,615,865,400**	**2,615,865,400**	**2,615,865,400**	**2,847,866,616**	**232,001,216**	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						**2,615,865,400**	**2,615,865,400**	**2,615,865,400**	**2,615,865,400**	**2,615,865,400**	**2,847,866,616**	**232,001,216**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan kesekretariatan**			**100%**	**100%**	**2,108,766,400**	**2,108,766,400**	**2,108,766,400**	**2,108,766,400**	**2,108,766,400**	**2,340,767,616**	**232,001,216**	
1	**02**	**01**	**10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terselenggaranya operasional BLUD**			**100%**	**100%**	**2,108,766,400**	**2,108,766,400**	**2,108,766,400**	**2,108,766,400**	**2,108,766,400**	**2,340,767,616**	**232,001,216**	
1	02	01	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pendapatan dari BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,108,766,400	2,108,766,400	2,108,766,400	2,108,766,400	2,108,766,400.00	2,340,767,616.00	232,001,216	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup**			**-**	**9**	**502,512,000**	**502,512,000**	**502,512,000**	**502,512,000**	**502,512,000**	**502,512,000**	**-**	
						Persentase Balita stunting				**15%**								
						Indeks Kepuasan Masyarakat				**89.16**								

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana		Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
										Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
						Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup					**99**								
						Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam					**100%**								
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk**				-	**170 per 100.000 pdd**	**502,512,000**	**502,512,000**	**502,512,000**	**502,512,000**	**502,512,000**	**502,512,000**	**0**	
						Pelayanan Kesehatan Balita					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan ibu bersalin					**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi					**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan dasar					**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Usia Produktif					**100%**							-	
						Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan					**100%**							-	
						Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap					**100%**							-	
						Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam					**100%**							-	
						Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar					**99%**							-	
						Persentase TTU memenuhi syarat					**100%**							-	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	-	112 orang	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000.00	4,000,000.00	0	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	-	165 orang	22,560,000	22,560,000	22,560,000	22,560,000	22,560,000.00	22,560,000.00	0	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	-	55 Orang	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000.00	4,400,000.00	0	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	-	110 orang	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000.00	13,200,000.00	0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	-	477 Dokumen	160,112,000	160,112,000	160,112,000	160,112,000	160,112,000.00	160,112,000.00	0	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	-	8 dokumen	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000.00	640,000.00	0	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	-	111 dokumen	8,885,000	8,885,000	8,885,000	8,885,000	8,885,000.00	8,885,000.00	0	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	-	213 Dokumen	30,840,000	30,840,000	30,840,000	30,840,000	30,840,000.00	30,840,000.00	0	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	-	1560 Orang	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000.00	4,800,000.00	0	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	-	92 Dokumen	40,880,000	40,880,000	40,880,000	40,880,000	40,880,000.00	40,880,000.00	0	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	-	46 Dokumen	115,500,000	115,500,000	115,500,000	115,500,000	115,500,000.00	115,500,000.00	0	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	-	6 Dokumen	7,355,000	7,355,000	7,355,000	7,355,000	7,355,000.00	7,355,000.00	0	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	-	84 dokumen	66,660,000	66,660,000	66,660,000	66,660,000	66,660,000.00	66,660,000.00	0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	-	10 dokumen	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000.00	1,040,000.00	0	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	-	11 Dokumen	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000.00	2,640,000.00	0	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	-	22 Dokumen	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000.00	19,000,000.00	0	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)**			**-**	**80%**	**4,587,000**	**4,587,000**	**4,587,000**	**4,587,000**	**4,587,000**	**4,587,000**	**0**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Kesehatan Remaja**			**-**	**100%**	**4,587,000**	**4,587,000**	**4,587,000**	**4,587,000**	**4,587,000**	**4,587,000**	**0**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	-	6 dokumen	4,587,000	4,587,000	4,587,000	4,587,000	4,587,000.00	4,587,000.00	0	
1.02.0.00.0.00.01.0010					**PUSKESMAS IIDENPASAR UTARA**						**2,637,919,800**	**2,637,919,800**	**2,637,919,800**	**2,637,919,800**	**2,637,919,800**	**3,240,460,800**	**602,541,000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2,637,919,800**	**2,637,919,800**	**2,637,919,800**	**2,637,919,800**	**2,637,919,800**	**3,240,460,800**	**602,541,000**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,637,919,800**	**2,637,919,800**	**2,637,919,800**	**2,637,919,800**	**2,637,919,800**	**3,240,460,800**	**602,541,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan kesekretariatan**			**100%**	**100%**	**2,136,570,800**	**2,136,570,800**	**2,136,570,800**	**2,136,570,800**	**2,136,570,800**	**2,739,111,800**	**602,541,000**	
1	**02**	**01**	**10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terselenggaranya operasional BLUD**			**100%**	**100%**	**2,136,570,800**	**2,136,570,800**	**2,136,570,800**	**2,136,570,800**	**2,136,570,800**	**2,739,111,800**	**602,541,000**	
1	02	01	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,136,570,800	2,136,570,800	2,136,570,800	2,136,570,800	2,136,570,800.00	2,739,111,800.00	602,541,000	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam**			**-**	**100.0%**	**496,789,000**	**496,789,000**	**496,789,000**	**496,789,000**	**496,789,000**	**496,789,000**	**-**	
						Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup				**99**								
						Indeks Kepuasan Masyarakat				**89.16**								
						Persentase Balita stunting				**15%**								
						Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup				**9**								
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk**			**-**	**170 per 100.000 pdd**	**496,789,000**	**496,789,000**	**496,789,000**	**496,789,000**	**496,789,000**	**496,789,000**	**0**	
						Pelayanan Kesehatan Balita				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan ibu bersalin				**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat				**100%**							-	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
						Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus				**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi				**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan dasar				**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				**100%**							-	
						Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan				**100%**							-	
						Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap				**100%**							-	
						Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam				**100%**							-	
						Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar				**99%**							-	
						Persentase TTU memenuhi syarat				**100%**							-	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	-	56 orang	5,560,000	5,560,000	5,560,000	5,560,000	5,560,000.00	5,560,000.00	0	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	-	632 orang	25,280,000	25,280,000	25,280,000	25,280,000	25,280,000.00	25,280,000.00	0	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	-	90 Orang	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000.00	7,200,000.00	0	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	-	50 Orang	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000.00	3,840,000.00	0	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	-	88 Dokumen	106,598,000	106,598,000	106,598,000	106,598,000	106,598,000.00	106,598,000.00	0	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	-	5 Dokumen	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000.00	520,000.00	0	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	-	12 Dokumen	19,140,000	19,140,000	19,140,000	19,140,000	19,140,000.00	19,140,000.00	0	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	-	11 dokumen	47,480,000	47,480,000	47,480,000	47,480,000	47,480,000.00	47,480,000.00	0	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	-	6 Orang	9,120,000	9,120,000	9,120,000	9,120,000	9,120,000.00	9,120,000.00	0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	-	62 Dokumen	44,880,000	44,880,000	44,880,000	44,880,000	44,880,000.00	44,880,000.00	0	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	-	24 Dokumen	119,169,000	119,169,000	119,169,000	119,169,000	119,169,000.00	119,169,000.00	0	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	-	24 Dokumen	7,742,000	7,742,000	7,742,000	7,742,000	7,742,000.00	7,742,000.00	0	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	-	12 Dokumen	77,620,000	77,620,000	77,620,000	77,620,000	77,620,000.00	77,620,000.00	0	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	-	32 Dokumen	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000.00	2,560,000.00	0	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	-	32 Dokumen	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000.00	9,600,000.00	0	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	-	32 Dokumen	10,480,000	10,480,000	10,480,000	10,480,000	10,480,000.00	10,480,000.00	0	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)**			**-**	**80%**	**4,560,000**	**4,560,000**	**4,560,000**	**4,560,000**	**4,560,000**	**4,560,000**	**0**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Kesehatan Remaja**			**-**	**100%**	**4,560,000**	**4,560,000**	**4,560,000**	**4,560,000**	**4,560,000**	**4,560,000**	**0**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	-	9 dokumen	4,560,000	4,560,000	4,560,000	4,560,000	4,560,000.00	4,560,000.00	0	
1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSKESMAS III DENPASAR UTARA											**3,188,544,600**	**3,188,544,600**	**3,188,544,600**	**3,188,544,600**	**3,188,544,600**	**3,925,352,864**	**736,808,264**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3,188,544,600**	**3,188,544,600**	**3,188,544,600**	**3,188,544,600**	**3,188,544,600**	**3,925,352,864**	**736,808,264**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3,188,544,600**	**3,188,544,600**	**3,188,544,600**	**3,188,544,600**	**3,188,544,600**	**3,925,352,864**	**736,808,264**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan kesekretariatan**			**100%**	**100%**	**2,584,960,600**	**2,584,960,600**	**2,584,960,600**	**2,584,960,600**	**2,584,960,600**	**3,321,768,864**	**736,808,264**	
1	**02**	**01**	**10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terselenggaranya operasional BLUD**			**100%**	**100%**	**2,584,960,600**	**2,584,960,600**	**2,584,960,600**	**2,584,960,600**	**2,584,960,600**	**3,321,768,864**	**736,808,264**	
1	02	01	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,584,960,600	2,584,960,600	2,584,960,600	2,584,960,600	2,584,960,600.00	3,321,768,864.00	736,808,264	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**			**-**	**89.16**	**591,291,750**	**591,291,750**	**591,291,750**	**591,291,750**	**591,291,750**	**591,291,750**	**-**	
						Persentase Balita stunting				**15%**								

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana		Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
										Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
						Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup					**9**								
						Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam					**100%**								
						Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup					**99**								
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk**				-	**170 per 100.000 pdd**	**591,291,750**	**591,291,750**	**591,291,750**	**591,291,750**	**591,291,750**	**591,291,750**	**0**	
						Pelayanan Kesehatan Balita					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan ibu bersalin					**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus					**100%**							-	
						Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi					**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan dasar					**100%**							-	
						Pelayanan Kesehatan Usia Produktif					**100%**							-	
						Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan					**100%**							-	
						Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap					**100%**							-	
						Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam					**100%**							-	
						Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar					**99%**							-	
						Persentase TTU memenuhi syarat					**100%**							-	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	-	360 orang	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000.00	15,840,000.00	0	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	-	134 orang	26,800,000	26,800,000	26,800,000	26,800,000	26,800,000.00	26,800,000.00	0	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	-	90 orang	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000.00	7,200,000.00	0	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	-	52 Orang	4,160,000	4,160,000	4,160,000	4,160,000	4,160,000.00	4,160,000.00	0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	-	6234 dokumen	161,594,000	161,594,000	161,594,000	161,594,000	161,594,000.00	161,594,000.00	0	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	-	49 dokumen	3,920,000	3,920,000	3,920,000	3,920,000	3,920,000.00	3,920,000.00	0	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	-	284 dokumen	22,720,000	22,720,000	22,720,000	22,720,000	22,720,000.00	22,720,000.00	0	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	-	258 dokumen	24,495,000	24,495,000	24,495,000	24,495,000	24,495,000.00	24,495,000.00	0	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	-	94 Orang	11,280,000	11,280,000	11,280,000	11,280,000	11,280,000.00	11,280,000.00	0	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	-	616 Dokumen	78,600,000	78,600,000	78,600,000	78,600,000	78,600,000.00	78,600,000.00	0	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	-	92 Dokumen	149,200,750	149,200,750	149,200,750	149,200,750	149,200,750.00	149,200,750.00	0	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	-	6 Dokumen	9,290,000	9,290,000	9,290,000	9,290,000	9,290,000.00	9,290,000.00	0	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	-	146 Dokumen	54,032,000	54,032,000	54,032,000	54,032,000	54,032,000.00	54,032,000.00	0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025		PAGU 2025						Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
									Sebelum	Sesudah	Induk	Pagu Pergeseran I	Pagu Pergeseran II	Pagu Pergeseran III	Pagu Pergeseran IV	Pagu Perubahan		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	-	4 Dokumen	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000.00	160,000.00	0	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	-	110 Dokumen	8,800,000	8,800,000	8,800,000	8,800,000	8,800,000.00	8,800,000.00	0	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	-	110 Dokumen	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000.00	13,200,000.00	0	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)**			**-**	**80%**	**12,292,250**	**12,292,250**	**12,292,250**	**12,292,250**	**12,292,250**	**12,292,250**	**0**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat UKBM Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Kesehatan Remaja**			**-**	**100%**	**12,292,250**	**12,292,250**	**12,292,250**	**12,292,250**	**12,292,250**	**12,292,250**	**0**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAK Non Fisik- Dana BOK BOK Puskesmas	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	-	8459 Dokumen	12,292,250	12,292,250	12,292,250	12,292,250	12,292,250.00	12,292,250.00	0	
1.02.0.00.0.00.01.0012 BLUD RSUD WANGAYA											**135,368,766,181**	**135,368,766,181**	**135,368,766,181**	**135,368,766,181**	**135,368,766,181**	**169,555,873,107.36**	**34,187,106,926**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**135,368,766,181**	**135,368,766,181**	**135,368,766,181**	**135,368,766,181**	**135,368,766,181**	**169,555,873,107.36**	**34,187,106,926**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**135,368,766,181**	**135,368,766,181**	**135,368,766,181**	**135,368,766,181**	**135,368,766,181**	**169,555,873,107.36**	**34,187,106,926**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya administrasi perkantoran**			**-**	**100%**	**115,000,000,000**	**115,000,000,000**	**115,000,000,000**	**115,000,000,000**	**115,000,000,000**	**138,740,861,427.36**	**23,740,861,427**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terselenggaranya operasional BLUD RS Wangaya**			**-**	**100%**	**115,000,000,000**	**115,000,000,000**	**115,000,000,000**	**115,000,000,000**	**115,000,000,000**	**138,740,861,427.36**	**23,740,861,427**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	-	1 unit kerja	115,000,000,000	115,000,000,000	115,000,000,000	115,000,000,000	115,000,000,000.00	138,740,861,427.36	23,740,861,427	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Survei Kepuasan Masyarakat**				**89.16%**	**20,368,766,181**	**20,368,766,181**	**20,368,766,181**	**20,368,766,181**	**20,368,766,181**	**30,815,011,680**	**10,446,245,499**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan**			**-**	**41 unit**	**20,368,766,181**	**20,368,766,181**	**20,368,766,181**	**20,368,766,181**	**20,368,766,181**	**30,815,011,680**	**10,346,245,499**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	-	41 unit	20,368,766,181	20,368,766,181	20,368,766,181	20,368,766,181	20,368,766,181.00	30,715,011,680.00	10,346,245,499	

1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	-	1 unit	-	-	-	-	-	100,000,000.00	100,000,000	
					TOTAL						**498,728,765,333**	**500,852,171,489**	**474,058,079,560**	**476,178,110,260**	**502,024,078,984**	**545,857,850,533.36**	**43,833,771,549.36**	

BAB IV

Renja Perubahan Dinas Kesehatan 2025 berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana 2021-2026, Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021-2026, dan Rancangan Perubahan RKPD Kota Denpasar. Untuk tahun 2025 Perubahan akan diselenggarakan 5 program dengan 19 kegiatan dan 256 sub kegiatan.

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto VI/J No. 24, Denpasar. Kode Pos : 80111
Telepon : (0361) 428425 Faximile : (0361) 428424

RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KOTA DENPASAR

TAHUN 2025



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/2702/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);

6. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);

7. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:

a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025;
b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah terkait Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
c. menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025;
d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025; dan
e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 November 2023

a.n. Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Denpasar,

A.A. Ngurah Bagus Airawata, ST.Sp.PSDA
Pembina Utama Muda
NIP. 196604161997031005

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Walikota Denpasar.
2. Ketua DPRD Kota Denpasar.
3. Inspektur Kota Denpasar.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 22 NOVEMBER 2023
NOMOR : 188.45 /2702/HK/2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

Penasehat :
1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar

Pembina :
1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

Sekretaris : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

Anggota :
1. Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program
2. Kepala Bidang Bina Marga
3. Kepala Bidang Sumber Daya Air
4. Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
5. Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Kawasan Permukiman
6. Kepala Bidang Penataan Ruang
7. Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

8. Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda
9. Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda
10. Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
11. Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda
12. Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda
13. Kepala Sub Bagian Umum dan Informasi Publik Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
14. Staf Bina Program Pada Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program sebanyak 4 (empat) orang yaitu :
    1. Ni Wayan Suarti
    2. Ni Putu Alit Wulandari
    3. I Gede Gustyonika Tisna Putra
    4. I Gede Ariyuda
    5. Putu Bening Dania Widya Pratiwi

a.n. Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Denpasar,

A.A.Ngurah Bagus Airawata, ST.Sp.PSDA
Pembina Utama Muda
NIP. 196604161997031005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, berkat asung kertha waranugrahaNya Rancangan Akhir Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025 dapat kami susun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025 ini disusun dalam rangka pengambilan keputusan penyusunan rencana program dan kegiatan OPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Denpasar 2025-2029, Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, serta usulan-usulan kegiatan dari masyarakat / stakeholder. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada tugas pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

Dengan adanya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025 ini, diharapkan proses perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, terinci dan target kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang ditetapkan.

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan atas kerjasama dan partisipasi semua pihak dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025 ini, kami ucapkan terimakasih.

Denpasar, 28 Mei 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Denpasar

A.A. Ngurah Bagus Airawata, ST, Sp.PSDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199703 1 005

DAFTAR ISI

BAB	**I**	**PENDAHULUAN ……..**	1
	1.1	Latar Belakang ……	1
	1.2	Landasan Hukum ……	2
	1.3	Maksud dan Tujuan ……	3
	1.4	Sistematika Penulisan …….	4
BAB	**II**	**HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (BULAN MEI)……..…**	**5**
	2.1	Hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan II (BULAN MEI) ……..……...	5
BAB	**III**	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ……..**	**15**
	3.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan……..…….	15
BAB	**IV**	**PENUTUP ……...……..…..**	21

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II (Bulan Mei) 6

Tabel 3.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Pada Tahun Anggaran 2025 15

Lampiran

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025

Rekap Tabel 2.2 RKA Perubahan Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB I
PENDAHULUAN

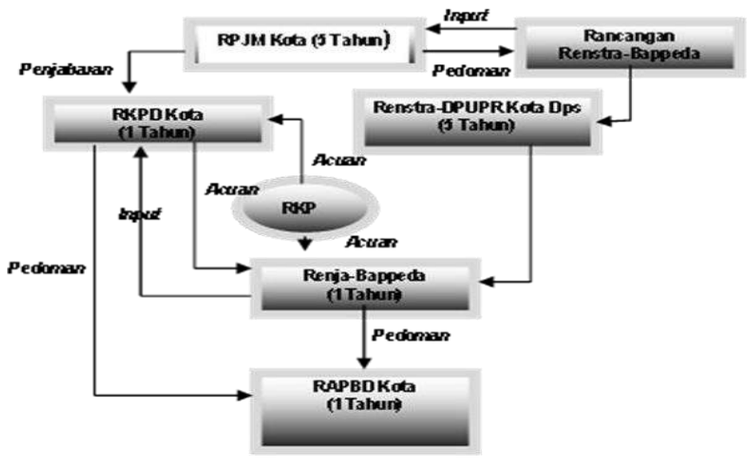
1.1 Latar Belakang

Kota Denpasar sebagai kota metropolitan dengan penduduk yang cukup padat dan aktifitas ekonomi perkotaan yang tumbuh dengan pesat dan intensif disektor perdagangan, serta menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, perekonomian, perdagangan, jasa, dan sebagai salah satu tujuan wisata di Bali. Guna menunjang kelancaran dan kenyamanan beragam aktivitas masyarakat di Kota Denpasar, maka diperlukan Perencanaan, Penyediaan, Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan seperti jalan, jembatan, drainase, irigasi, sanitasi, gedung, pengembangan jasa konstruksi, pengelolaan air minum dan air limbah serta penyediaan Infrastruktur ke PU an dan Penataaan Ruang.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik melalui ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk mewujudkan arah kebijakan Pemerintah Kota Denpasar yaitu meningkatkan perbaikan lingkungan dan infrastruktur Kota, dan sebagai penjabaran Tema Meningkatkan Kapasitas SDM untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat serta guna melaksanakan tugas urusan Pemerintahan wajib pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dengan mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025 juga disusun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Adapun penganggaran yang disusun berdasarkan skala prioritas dan berdasarkan kajian teknis Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar sesuai dengan skema perencanaan.

Gambar/Skema Perencanaan :



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur tentang kewenangan PD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);

6. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);

7. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pembuatan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025 ini adalah sebagai instrumen untuk pengambilan kebijakan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan pada Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar berdasarkan skala prioritas yang mengacu pada RPJMD, Renstra Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, dan hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang selanjutnya akan dituangkan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Anggaran (RKA) dan ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025 dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan program pembangunan sebagaimana misi Pemerintah Kota Denpasar menuju tercapainya visi yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dari materi bahasan, dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025 ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

B A B I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025 serta sistematika penulisan.

B A B II : HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (BULAN MEI)

Menguraikan evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II (Bulan Mei) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dan membuat kajian terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dari Fisik dan Keuangan. Dari kajian evaluasi tersebut akan diketahui tingkat capaian kinerja pelaksanaan tugas kegiatan dalam tahun tersebut.

B A B III : RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2025

Menguraikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025 dan yang disusun berdasarkan arah kebijakan Pembangunan Nasional, RPJMD Kota Denpasar, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

B A B IV PENUTUP

Menguraikan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025 yang merupakan acuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dalam melaksanakan Pogram dan Kegiatan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2025.

BAB II

HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (Bulan Mei)

2.1. Hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan II (Bulan Mei)

Bab ini memuat kajian pelaksanaan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang mengacu pada APBD tahun berjalan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 10 Program, 17 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut :

1	**Total Anggaran**	=	**Rp 415.289.802.216,00**
2	**Belanja Operasi**	=	**Rp 93.078.356.516,00**
	a. Belanja Pegawai	=	RP 32.196.217.881,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	=	RP 50.882.138.635,00
	c. Belaja Hibah	=	RP 10.000.000.000,00
3	**Belanja Modal**	=	**RP 322.211.445.700,00**
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	=	RP 5.647.800.000,00
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	=	RP 37.277.270.000,00
	c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	=	RP 279.286.375.700,00
	d. Belanja Modal Aset Lainnya	=	-

Tabel 2.1
Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I I (Bulan Mei)

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Bulan Mei		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**61.453.513.583,00**	**41,39**	**16.107.636.731,00**	**(45.345.876.852,00)**
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**32.196.217.881,00**	**22,88**	**7.366.521.486,00**	**(24.829.696.395,00)**
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	32.196.217.881,00	22,88	7.366.521.486,00	(24.829.696.395,00)
1.03.01.2.06	**Administasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**9.669.016.000,00**	**43,18**	**2.134.540.000,00**	**(7.534.476.000,00)**
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkap an Kantor Perangkat Daerah	100 %	6.199.095.000,00	16,67	1.020.305.000,00	(5.178.790.000,00)
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	100 %	99.836.000,00	62,81	62.702.500,00	(37.133.500,00)
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	100 %	135.420.000,00	54,57	73.900.000,00	(61.520.000,00)
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundangan yang Tersedia	100 %	8.280.000,00	41,67	3.450.000,00	(4.830.000,00)

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Bulan Mei		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Bahan Material yang Tersedia	100 %	3.208.385.000,00	41,67	968.982.500,00	(2.239.402.500,00)
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Konsumsi untuk Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Tersedia	100 %	18.000.000,00	41,67	5.200.000,00	(12.800.000,00)
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**14.140.169.702,00**	**41,91**	**5.581.716.316,00**	**(8.558.453.386,00)**
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	1.052.000.000,00	41,67	193.210.195,00	(858.789.805,00)
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	13.088.169.702,00	42,16	5.388.506.121,00	(7.699.663.581,00)
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kendaraan Dinas/ Operasional yang laik jalan**	**100 %**	**5.448.110.000,00**	**57,61**	**1.024.858.929,00**	**(4.423.251.071,00)**
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/ Operasional yang laik jalan	100 %	4.524.860.000,00	41,67	704.113.143,00	(3.820.746.857,00)
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Kondisi Baik	100 %	551.000.000,00	39,01	14.940.000,00	(536.060.000,00)
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	300.000.000,00	100,00	289.531.786,00	(10.468.214,00)
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	72.250.000,00	49,74	16.274.000,00	(55.976.000,00)

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Bulan Mei		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**- Persentase panjang jaringan irigasi berfungsi normal - Persentase panjang sungai berfungsi normal**	**0.68 KM**	**8.154.001.051,00**	**12,43**	**601.437.182,00**	**(7.552.563.869,00)**
1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya di bawah 1.000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota**	**Panjang Jaringan Irigasi yang Berfungsi Normal**	**0.68 KM**	**8.154.001.051,00**	**12,43**	**601.437.182,00**	**(7.552.563.869,00)**
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0.68 KM	8.154.001.051,00	12,43	601.437.182,00	(7.552.563.869,00)
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah**	**35,000 M^2/ Hari**	**1.111.025.000,00**	**5,34**	**59.304.000,00**	**(1.051.721.000,00)**
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah**	**35,000 M^2/ Hari**	**1.111.025.000,00**	**5,34**	**59.304.000,00**	**(1.051.721.000,00)**
1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat skala perkotaan yang ditingkatkan	35,000 M^2/ Hari	1.111.025.000,00	5,34	59.304.000,00	(1.051.721.000,00)

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Bulan Mei		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum**	**600 SR**	**2.318.094.000,00**	**5,09**	**118.062.000,00**	**(2.200.032.000,00)**
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pipa Sambungan Rumah**	**600 SR**	**2.318.094.000,00**	**5,09**	**118.062.000,00**	**(2.200.032.000,00)**
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan rumah yang terlayani oleh perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan	600 SR	2.318.094.000,00	5,09	118.062.000,00	(2.200.032.000,00)
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal**	**10 Sistem Drainase Perkotaan**	**64.035.398.376,00**	**32,87**	**1.316.865.637,00**	**(62.718.532.739,00)**
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal**	**10 Sistem Drainase Perkotaan**	**64.035.398.376,00**	**32,87**	**1.316.865.637,00**	**(62.718.532.739,00)**
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Yang Dibangun	5 Sistem Drainase Perkotaan	56.582.500.000,00	39,91	75.413.210,00	(56.507.086.790,00)
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Yang Beroperasi Dan Terpelihara	5 Sistem Drainase Perkotaan	7.452.898.376,00	25,84	1.241.452.427,00	(6.211.445.949,00)

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Bulan Mei		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis**		**44.781.681.090,00**	**17,42**	**464.203.950,00**	**(44.317.477.140,00)**
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis**		**44.781.681.090,00**	**17,42**	**464.203.950,00**	**(44.317.477.140,00)**
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Regulasi Bangunan Gedung	100 %	235.340.000,00	19,05	881.450,00	(234.458.550,00)
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	43.556.970.000,00	0,65	279.478.500,00	(43.277.491.500,00)
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Persentase Pelayanan Penerbitan IMB/PBG	100 %	989.371.090,00	32,55	183.844.000,00	(805.527.090,00)

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Bulan Mei		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**		**5 Unit**	**3.768.450.000,00**	**57,49**	**2.577.200,00**	**(3.765.872.800,00)**
1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**		**5 Unit**	**3.768.450.000,00**	**57,49**	**2.577.200,00**	**(3.765.872.800,00)**
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis	5 Unit	3.768.450.000,00	57,49	2.577.200,00	(3.765.872.800,00)
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap**		**227.318.919.116,00**	**10,31**	**2.063.022.704,00**	**(225.255.896.412,00)**
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota**	**Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang**		**227.318.919.116,00**	**10,31**	**2.063.022.704,00**	**(225.255.896.412,00)**
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	300.000.000,00	15,00	-	(300.000.000,00)
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan / Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	450,127 KM	612.000.000,00	14,74	-	(612.000.000,00)
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	10.50 KM	23.680.910.804,00	6,33	1.432.322.994,00	(22.248.587.810,00)
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	9,283 KM	73.281.563.400,00	15,00	98.706.000,00	(73.182.857.400,00)
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitas	13,745 KM	116.632.327.300,00	15,00	93.502.000,00	(116.538.825.300,00)
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0.70 KM	3.119.825.000,00	15,00	-	(3.119.825.000,00)

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Bulan Mei		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	22 KM	6.293.156.612,00	11,68	438.491.710,00	(5.854.664.902,00)
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	2 Jembatan	3.199.136.000,00	15,00	-	(3.199.136.000,00)
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	3 Jembatan	200.000.000,00	-	-	(200.000.000,00)
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib**	**100 %**	**290.758.000,00**	**10,88**	**12.971.250,00**	**(277.786.750,00)**
1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi**	**100 %**	**205.950.000,00**	**1,01**	**600.000,00**	**(205.350.000,00)**
1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	100 %	103.150.000,00	1,44	300.000,00	(102.850.000,00)
1.03.11.2.02.0015	Operasionalissi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	100 %	102.800.000,00	0,58	300.000,00	(102.500.000,00)
1.03.11.2.03	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	**Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi**	**100 %**	**46.750.000,00**	**0,64**	**300.000,00**	**(46.450.000,00)**
1.03.11.2.03.0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	100 %	46.750.000,00	0,64	300.000,00	(46.450.000,00)

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Bulan Mei		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
1.03.11.2.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi**	**100 %**	**38.058.000,00**	**31,00**	**12.071.250,00**	**(25.986.750,00)**
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	100 %	34.654.000,00	37,23	11.771.250,00	(22.882.750,00)
1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	100 %	3.404.000,00	24,78	300.000,00	(3.104.000,00)
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Ketaatan Terhadap RTRW**	**100 %**	**2.057.962.000,00**	**13,12**	**95.793.204,00**	**(1.962.168.796,00)**
1.03.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketaatan Terhadap RTRW**	**100 %**	**451.400.000,00**	**3,00**	**4.896.200,00**	**(446.503.800,00)**
1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	100 %	340.050.000,00	1,89	2.458.100,00	(337.591.900,00)
1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/ Kota	100 %	111.350.000,00	4,11	2.438.100,00	(108.911.900,00)
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Ketaatan Terhadap RTRW**	**100 %**	**1.067.740.000,00**	**12,94**	**16.261.020,00**	**(1.051.478.980,00)**
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	100 %	43.590.000,00	37,11	10.461.020,00	(33.128.980,00)

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Bulan Mei		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	100 %	611.000.000,00	0,63	2.900.000,00	(608.100.000,00)
1.03.12.2.03.0007	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	100 %	413.150.000,00	1,07	2.900.000,00	(410.250.000,00)
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase Ketaatan Terhadap RTRW**	**100 %**	**538.822.000,00**	**23,43**	**74.635.984,00**	**(464.186.016,00)**
1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	100 %	101.770.000,00	42,13	12.696.000,00	(89.074.000,00)
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	100 %	65.950.000,00	5,59	2.550.000,00	(63.400.000,00)
1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	100 %	264.602.000,00	43,03	56.689.984,00	(207.912.016,00)
1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	100 %	106.500.000,00	2,97	2.700.000,00	(103.800.000,00)
	TOTAL			**415.289.802.216,00**		**20.841.873.858,00**	**(394.447.928.358,00)**

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR

3.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam bab III ini akan disampaikan rumusan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dan pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang di tuangkan dalam program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan hasil RKA. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Rencana Perubahan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
Kota Denpasar Tahun 2025

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertamba/ (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	7	8=7-6
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Sarana dan Prasarana Perkantoran**	**100 %**	**100 %**	**56.277.563.121,00**	**79.066.168.597,00**	**22.788.605.476,00**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**34.022.010.671,00**	**37.021.130.895,00**	**2.999.120.224,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menrima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/ Bulan	518 Orang/ bulan	34.022.010.671,00	37.021.130.895,00	2.999.120.224,00
	Administasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**5.599.016.000,00**	**21.832.516.000,00**	**16.233.500.000,00**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	6 Paket	2.129.095.000,00	18.362.595.000,00	16.233.500.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	99.836.000,00	99.836.000,00	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	135.420.000,00	135.420.000,00	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3 Dokumen	8.280.000,00	8.280.000,00	-
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.208.385.000,00	3.208.385.000,00	-

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertamba/ (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	7	8=7-6
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**11.208.426.450,00**	**14.590.411.702,00**	**3.381.985.252,00**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	1.052.000.000,00	1.052.000.000,00	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	10.156.426.450,00	13.538.411.702,00	3.381.985.252,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik**	**100 %**	**100 %**	**5.448.110.000,00**	**5.622.110.000,00**	**174.000.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	91 Unit	4.524.860.000,00	4.548.860.000,00	24.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	87 Unit	91 Unit	551.000.000,00	551.000.000,00	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 Unit	3 Unit	300.000.000,00	450.000.000,00	150.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	109 Unit	78 Unit	72.250.000,00	72.250.000,00	-
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**- Persentase panjang jaringan irigasi berfungsi normal** **- Persentase panjang Sungai berfungsi normal**	**21% (11.513 M)** **50% (35.500M)**	**21% (11.513 M)** **50% (35.500M)**	**8.209.082.530,00**	**8.586.901.051,00**	**377.818.521,00**
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya di bawah 1.000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	**Panjang Jaringan Irigasi yang Berfungsi Normal**	**1500 M**	**1500 M**	**8.209.082.530,00**	**8.586.901.051,00**	**377.818.521,00**
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	0,68 KM	0,68 KM	8.209.082.530,00	8.586.901.051,00	377.818.521,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertamba/ (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	7	8=7-6
3	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah**	**8,27% (12.003 SR)**	**8,27% (12.003 SR)**	**1.111.025.000,00**	**1.111.025.000,00**	**-**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah**	**12373 SR**	**12373 SR**	**1.111.025.000,00**	**1.111.025.000,00**	**-**
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat skala perkotaan yang ditingkatkan	35000 M^3/Hari	35000 M^3/Hari	1.111.025.000,00	1.111.025.000,00	-
4	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum**	**63,88% (92.672 SR)**	**63,88% (92.672 SR)**	**2.318.094.000,00**	**2.318.094.000,00**	**-**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pipa Sambungan Rumah**	**109559 SR**	**109559 SR**	**2.318.094.000,00**	**2.318.094.000,00**	**-**
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan rumah yang terlayani oleh perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan	600 SR	600 SR	2.318.094.000,00	2.318.094.000,00	-
5	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal**	**70% (1.141.616)**	**70% (1.141.616)**	**63.923.289.390,00**	**66.539.198.376,00**	**2.615.908.986,00**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal**	**70 %**	**70 %**	**63.923.289.390,00**	**66.539.198.376,00**	**2.615.908.986,00**
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang dibangun	5 Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan	56.582.500.000,00	57.596.500.000,00	1.014.000.000,00
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang beroperasi dan terpelihara	5 Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan	7.340.789.390,00	8.942.698.376,00	1.601.908.986,00
6	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar teknis**	**0,36% (1080 IMB)**	**0,36% (1080 IMB)**	**44.946.907.090,00**	**44.981.681.090,00**	**34.774.000,00**
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis**	**0,36 %**	**0,36 %**	**44.946.907.090,00**	**44.981.681.090,00**	**34.774.000,00**
	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait penyelenggaraan banguan Gedung	1 Dokumen	1 Dokumen	235.340.000,00	135.340.000,00	(100.000.000,00)

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertamba/ (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	7	8=7-6
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	43.556.970.000,00	43.856.970.000,00	300.000.000,00
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1080 Dokumen	1080 Dokumen	1.154.597.090,00	989.371.090,00	(165.226.000,00)
7	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase penataan Bangunan lingkungan yang memenuhi standar teknis**	**16,67 %**	**16,67 %**	**3.768.450.000,00**	**3.968.450.000,00**	**200.000.000,00**
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis**	**5 Unit**	**5 Unit**	**3.768.450.000,00**	**3.968.450.000,00**	**200.000.000,00**
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	1 Kawasan	3.768.450.000,00	3.968.450.000,00	200.000.000,00
8	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap**	**83,08 %**	**83,08 %**	**227.234.199.750,00**	**267.841.893.116,00**	**40.607.693.366,00**
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	**Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang**	**403,84 Km**	**403,84 Km**	**227.234.199.750,00**	**267.841.893.116,00**	**40.607.693.366,00**
	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan yang dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	-
	Survey Kondisi Jalan / Jembatan	Panjang Jalan/ Jembatan yang disurvey kondisinya	450.127 KM	450.127 KM	612.000.000,00	612.000.000,00	-
	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	10,5 KM	10,5 KM	23.671.291.370,00	46.821.934.804,00	23.150.643.434,00
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi	19,278 KM	9.283 KM	73.281.563.400,00	78.106.063.400,00	4.824.500.000,00
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi	33,739 KM	13.745 KM	116.632.327.300,00	128.732.279.300,00	12.099.952.000,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala	1,8 KM	0.697 KM	3.119.825.000,00	3.119.825.000,00	-

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertamba/ (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	7	8=7-6
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yangdipelihara secara rutin	22 KM	22 KM	6.218.056.680,00	6.750.654.612,00	532.597.932,00
	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang diganti	1 Jembatan	2 Jembatan	3.199.136.000,00	3.199.136.000,00	-
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang dipelihara secara rutin	105 Jembatan	3 Jembatan	200.000.000,00	200.000.000,00	-
9	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi**	**50 %**	**50 %**	**291.458.000,00**	**290.758.000,00**	**(700.000,00)**
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	**Data Base Jasa Konstruksi**	**100 %**	**100 %**	**206.300.000,00**	**205.950.000,00**	**(350.000,00)**
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	103.500.000,00	103.150.000,00	(350.000,00)
	Operasionalissi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	102.800.000,00	102.800.000,00	-
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	**Jumlah Peserta Sosialisasi**	**100%**	**100%**	**47.100.000,00**	**46.750.000,00**	**(350.000,00)**
	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Kontruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	47.100.000,00	46.750.000,00	(350.000,00)
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	**Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring**	**100 %**	**100 %**	**38.058.000,00**	**38.058.000,00**	**-**
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	20 Paket Pekerjaan	20 Paket Pekerjaan	34.654.000,00	34.654.000,00	-
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	3.404.000,00	3.404.000,00	-
10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Ketaatan Terhadap RTRW**	**-**	**95,80 %**	**2.163.154.000,00**	**2.255.235.500,00**	**92.081.500,00**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Ketaatan RTRW**	**-**	**95,60 %**	**451.400.000,00**	**451.400.000,00**	**-**
	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	1 Peta	340.050.000,00	340.050.000,00	-
	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	111.350.000,00	111.350.000,00	-

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertamba/ (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	7	8=7-6
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Penerbitan Informasi Memanfaatan Ruang dan Rekomendasi Reklame Tepat Waktu**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**1.067.740.000,00**	**1.092.740.000,00**	**25.000.000,00**
	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1000 Layanan	1000 Layanan	43.590.000,00	43.590.000,00	-
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi pemanfaatan ruang	1 Dokumen	6 Dokumen	611.000.000,00	611.000.000,00	-
	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	413.150.000,00	438.150.000,00	25.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pelanggaran Pemanfaatan Ruang**	**4,20 %**	**4,20 %**	**644.014.000,00**	**711.095.500,00**	**67.081.500,00**
	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTR	Jumlah kasus yang dikenakan sanki administratif	240 kasus	240 kasus	105.070.000,00	185.719.500,00	80.649.500,00
	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	65.950.000,00	65.950.000,00	-
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi forum penataan ruang	1 Laporan	1 Laporan	366.494.000,00	352.926.000,00	(13.568.000,00)
	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil penilaian perwujudan RTR	1 Dokumen	1 Dokumen	106.500.000,00	106.500.000,00	-
				TOTAL	**410.243.222.881,00**	**476.959.404.730,00**	**66.716.181.849,00**

BAB IV
PENUTUP

Dengan dibuatnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2025 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan penyusunan RKA yang selanjutnya dapat ditetapkan dalam DPPA T.A 2025 dengan Total Anggaran sebesar **Rp. 476.959.404.730,00,00 (empat ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)** dan digunakan sebagai acuan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Denpasar, 28 Mei 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Denpasar

A.A. Ngurah Bagus Airawata, ST, Sp.PSDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199703 1 005

LAMPIRAN

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto VI/J No. 24, Denpasar. Kode Pos : 80111
Telepon : (0361) 428425 Faximile : (0361) 428424

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2	Pengolahan data dan informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota Denpasar.	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024 berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar.	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2025.	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Denpasar.	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar dengan usulan program dan kegiatan hasil Munsrenbang Kecamatan.	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar.	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Denpasar.	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Denpasar telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota yang telah disyahkan.	√			

Denpasar, 28 Mei 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Denpasar

A.A. Ngurah Bagus Airawata, ST, Sp.PSDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199703 1 005

Petunjuk Pengisian:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025

REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD

Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 92.101.777.181	Rp. 318.141.445.700			Rp. 410.243.222.881	Rp. 101.004.983.030	Rp. 375.954.421.700			Rp. 476.959.404.730	Rp. 2.474.810.250,00
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				Rp. 92.101.777.181	Rp. 318.141.445.700			Rp. 410.243.222.881	Rp. 101.004.983.030	Rp. 375.954.421.700			Rp. 476.959.404.730	Rp. 2.474.810.250,00
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 54.716.563.121	Rp. 1.561.000.000			Rp. 56.277.563.121	Rp. 61.271.668.597	Rp. 17.794.500.000			Rp. 79.066.168.597	
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 34.022.010.671				Rp. 34.022.010.671	Rp. 37.021.130.895				Rp. 37.021.130.895	
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Alokasi Umum (DAU) - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 34.022.010.671				Rp. 34.022.010.671	Rp. 37.021.130.895				Rp. 37.021.130.895	
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 4.038.016.000	Rp. 1.561.000.000			Rp. 5.599.016.000	Rp. 4.038.016.000	Rp. 17.794.500.000			Rp. 21.832.516.000	
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 568.095.000	Rp. 1.561.000.000			Rp. 2.129.095.000	Rp. 568.095.000	Rp. 17.794.500.000			Rp. 18.362.595.000	
1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 99.836.000				Rp. 99.836.000	Rp. 99.836.000				Rp. 99.836.000	
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 135.420.000				Rp. 135.420.000	Rp. 135.420.000				Rp. 135.420.000	
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 8.280.000				Rp. 8.280.000	Rp. 8.280.000				Rp. 8.280.000	
1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.208.385.000				Rp. 3.208.385.000	Rp. 3.208.385.000				Rp. 3.208.385.000	
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 18.000.000				Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000				Rp. 18.000.000	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 11.208.426.450				Rp. 11.208.426.450	Rp. 14.590.411.702				Rp. 14.590.411.702	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.052.000.000				Rp. 1.052.000.000	Rp. 1.052.000.000				Rp. 1.052.000.000	
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.156.426.450				Rp. 10.156.426.450	Rp. 13.538.411.702				Rp. 13.538.411.702	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 5.448.110.000				Rp. 5.448.110.000	Rp. 5.622.110.000				Rp. 5.622.110.000	
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.524.860.000				Rp. 4.524.860.000	Rp. 4.548.860.000				Rp. 4.548.860.000	
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 551.000.000				Rp. 551.000.000	Rp. 551.000.000				Rp. 551.000.000	

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 300.000.000				Rp. 300.000.000	Rp. 450.000.000				Rp. 450.000.000	
1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 72.250.000				Rp. 72.250.000	Rp. 72.250.000				Rp. 72.250.000	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				Rp. 8.209.082.530				Rp. 8.209.082.530	Rp. 8.586.901.051				Rp. 8.586.901.051	
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 8.209.082.530				Rp. 8.209.082.530	Rp. 8.586.901.051				Rp. 8.586.901.051	
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 8.209.082.530				Rp. 8.209.082.530	Rp. 8.586.901.051				Rp. 8.586.901.051	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				Rp. 98.094.000	Rp. 2.220.000.000			Rp. 2.318.094.000	Rp. 98.094.000	Rp. 2.220.000.000			Rp. 2.318.094.000	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 98.094.000	Rp. 2.220.000.000			Rp. 2.318.094.000	Rp. 98.094.000	Rp. 2.220.000.000			Rp. 2.318.094.000	
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	- Dana Bagi Hasil (DBH) - Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 98.094.000	Rp. 2.220.000.000			Rp. 2.318.094.000	Rp. 98.094.000	Rp. 2.220.000.000			Rp. 2.318.094.000	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				Rp. 1.025.000	Rp. 1.110.000.000			Rp. 1.111.025.000	Rp. 1.025.000	Rp. 1.110.000.000			Rp. 1.111.025.000	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 1.025.000	Rp. 1.110.000.000			Rp. 1.111.025.000	Rp. 1.025.000	Rp. 1.110.000.000			Rp. 1.111.025.000	
1	03	05	2.01	0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	- Pajak Air Tanah	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.025.000	Rp. 1.110.000.000			Rp. 1.111.025.000	Rp. 1.025.000	Rp. 1.110.000.000			Rp. 1.111.025.000	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				Rp. 7.340.789.390	Rp. 56.582.500.000			Rp. 63.923.289.390	Rp. 8.942.698.376	Rp. 57.596.500.000			Rp. 66.539.198.376	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 7.340.789.390	Rp. 56.582.500.000			Rp. 63.923.289.390	Rp. 8.942.698.376	Rp. 57.596.500.000			Rp. 66.539.198.376	
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	- Opsen PKB	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 56.582.500.000			Rp. 56.582.500.000		Rp. 57.596.500.000			Rp. 57.596.500.000	
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.340.789.390				Rp. 7.340.789.390	Rp. 8.942.698.376				Rp. 8.942.698.376	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				Rp. 11.402.837.090	Rp. 33.544.070.000			Rp. 44.946.907.090	Rp. 11.137.611.090	Rp. 33.844.070.000			Rp. 44.981.681.090	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				Rp. 11.402.837.090	Rp. 33.544.070.000			Rp. 44.946.907.090	Rp. 11.137.611.090	Rp. 33.844.070.000			Rp. 44.981.681.090	
1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	- PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 235.340.000				Rp. 235.340.000	Rp. 135.340.000				Rp. 135.340.000	
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Opsen PKB	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.029.700.000	Rp. 33.527.270.000			Rp. 43.556.970.000	Rp. 10.029.700.000	Rp. 33.827.270.000			Rp. 43.856.970.000	

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.137.797.090	Rp. 16.800.000			Rp. 1.154.597.090	Rp. 972.571.090	Rp. 16.800.000			Rp. 989.371.090	
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				Rp. 18.450.000	Rp. 3.750.000.000			Rp. 3.768.450.000	Rp. 18.450.000	Rp. 3.950.000.000			Rp. 3.968.450.000	
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 18.450.000	Rp. 3.750.000.000			Rp. 3.768.450.000	Rp. 18.450.000	Rp. 3.950.000.000			Rp. 3.968.450.000	
1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Opsen PKB	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 18.450.000	Rp. 3.750.000.000			Rp. 3.768.450.000	Rp. 18.450.000	Rp. 3.950.000.000			Rp. 3.968.450.000	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				Rp. 7.860.324.050	Rp. 219.373.875.700			Rp. 227.234.199.750	Rp. 8.402.541.416	Rp. 259.439.351.700			Rp. 267.841.893.116	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				Rp. 7.860.324.050	Rp. 219.373.875.700			Rp. 227.234.199.750	Rp. 8.402.541.416	Rp. 259.439.351.700			Rp. 267.841.893.116	
1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan	- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 300.000.000				Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000				Rp. 300.000.000	
1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan	- Opsen PKB	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 3.199.136.000			Rp. 3.199.136.000		Rp. 3.199.136.000			Rp. 3.199.136.000	
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	- Opsen PKB	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 530.267.370	Rp. 23.141.024.000			Rp. 23.671.291.370	Rp. 539.886.804	Rp. 46.282.048.000			Rp. 46.821.934.804	
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 73.281.563.400			Rp. 73.281.563.400		Rp. 78.106.063.400			Rp. 78.106.063.400	
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 3.119.825.000			Rp. 3.119.825.000		Rp. 3.119.825.000			Rp. 3.119.825.000	
1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 612.000.000				Rp. 612.000.000	Rp. 612.000.000				Rp. 612.000.000	
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	- Opsen PKB	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 116.632.327.300			Rp. 116.632.327.300		Rp. 128.732.279.300			Rp. 128.732.279.300	
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.218.056.680				Rp. 6.218.056.680	Rp. 6.750.654.612				Rp. 6.750.654.612	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				Rp. 291.458.000				Rp. 291.458.000	Rp. 290.758.000				Rp. 290.758.000	
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 206.300.000				Rp. 206.300.000	Rp. 205.950.000				Rp. 205.950.000	
1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	- PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 103.500.000				Rp. 103.500.000	Rp. 103.150.000				Rp. 103.150.000	
1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	- PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 102.800.000				Rp. 102.800.000	Rp. 102.800.000				Rp. 102.800.000	
1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)				Rp. 47.100.000				Rp. 47.100.000	Rp. 46.750.000				Rp. 46.750.000	
1	03	11	2.03	0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	- PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 47.100.000				Rp. 47.100.000	Rp. 46.750.000				Rp. 46.750.000	

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				Rp. 38.058.000				Rp. 38.058.000	Rp. 38.058.000				Rp. 38.058.000	
1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	- PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 34.654.000				Rp. 34.654.000	Rp. 34.654.000				Rp. 34.654.000	
1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	- PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.404.000				Rp. 3.404.000	Rp. 3.404.000				Rp. 3.404.000	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				Rp. 2.163.154.000				Rp. 2.163.154.000	Rp. 2.255.235.500				Rp. 2.255.235.500	Rp. 2.474.810.250,00
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 451.400.000				Rp. 451.400.000	Rp. 451.400.000				Rp. 451.400.000	Rp. 496.540.000,00
1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 340.050.000				Rp. 340.050.000	Rp. 340.050.000				Rp. 340.050.000	Rp. 374.055.000,00
1	03	12	2.02	0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 111.350.000				Rp. 111.350.000	Rp. 111.350.000				Rp. 111.350.000	Rp. 122.485.000,00
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 1.067.740.000				Rp. 1.067.740.000	Rp. 1.092.740.000				Rp. 1.092.740.000	Rp. 1.202.014.000,00
1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 43.590.000				Rp. 43.590.000	Rp. 43.590.000				Rp. 43.590.000	Rp. 47.949.000,00
1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 611.000.000				Rp. 611.000.000	Rp. 611.000.000				Rp. 611.000.000	Rp. 672.100.000,00
1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 413.150.000				Rp. 413.150.000	Rp. 438.150.000				Rp. 438.150.000	Rp. 481.965.000,00
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 644.014.000				Rp. 644.014.000	Rp. 711.095.500				Rp. 711.095.500	Rp. 776.256.250,00
1	03	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 105.070.000				Rp. 105.070.000	Rp. 185.719.500				Rp. 185.719.500	Rp. 204.291.450,00
1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 65.950.000				Rp. 65.950.000	Rp. 65.950.000				Rp. 65.950.000	Rp. 72.545.000,00
1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 366.494.000				Rp. 366.494.000	Rp. 352.926.000				Rp. 352.926.000	Rp. 382.269.800,00
1	03	12	2.04	0012	Penilaian Perwujudan RTR	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 106.500.000				Rp. 106.500.000	Rp. 106.500.000				Rp. 106.500.000	Rp. 117.150.000,00
							Jumlah		**Rp. 92.101.777.181**	**Rp. 318.141.445.700**			**Rp. 410.243.222.881**	**Rp. 101.004.983.030**	**Rp. 375.954.421.700**			**Rp. 476.959.404.730**	**Rp. 2.474.810.250,00**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Denpasar



A.A. Ngurah Bagus Airawata, ST, Sp.PSDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199703 1 005

PEMERINTAH
KOTA DENPASAR

Rancangan Akhir

PERUBAHAN RENCANA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

2025

KATA PENGANTAR



Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar sebagai OPD yang membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang penanggulangan bencana, wajib menyusun dokumen perencanaan seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Salah satu dokumen perencanaan tersebut adalah Rencana Kerja (Renja) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja utama dan pendanaan indikatif yang akan diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan penanggulangan kebencanaan kepada masyarakat. Rancangan Akhir Perubahan Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar disusun dikarenakan adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sehingga berdasarkan Perubahan RKPD yang sudah disusun yang akan menjadi pedoman atau acuan dalam Rancangan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025.

Sebagai akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan – masukan dan data – data yang diperlukan dalam proses penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar.

Denpasar, 28 Mei 2025
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Denpasar

Drs. Ida Bagus Joni Ariwibawa, M.Si.
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 19680627 198812 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii

Bab I **Pendahuluan** 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4

Bab II **Evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar sampai dengan triwulan I Tahun 2025** 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar 20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar 21

Bab III **Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar** 24

Bab IV **Penutup** 32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar 14

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar..... 20

Tabel 2.3 Analisis SWOT Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar..... 22

Tabel 3.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar..... 25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang proses sistematisnya berkelanjutan yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) serta berpedoman Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah. Fungsi Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang dilaksanakan maupun yang akan datang dan sebagai alat ukur *outcome* / hasil yang harus dicapai, juga sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar yang merupakan salah satu dari Lembaga Teknis Daerah memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana, telah menyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 pada tanggal 24 September 2021, beserta perubahannya dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar merupakan dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dengan telah ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025, maka dilaksanakan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 yang mengacu pada Perubahan RKPD Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025 dan

berpedoman pada hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025.

Rancangan Akhir Perubahan Renja BPBD Kota Denpasar Tahun 2025 memuat rencana program atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan tahun 2025 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kota Denpasar secara terperinci. Rancangan Akhir Perubahan Renja BPBD Kota Denpasar berupaya memadukan dan menselaraskan rencana kerja penanggulangan bencana nasional, provinsi, maupun kota dengan pertimbangan kondisi sosial, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kota Denpasar.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum perubahan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar;
16) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
17) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan;
18) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
19) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025;

20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21) Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor 000.7.2.4/502/BAPPEDA tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar ini adalah sebagai penjabaran Renstra dan sebagai bentuk operasionalisasi strategi-strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar adalah :

1) Memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku terkait perencanaan.
2) Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan pada setiap tahunnya, yang akan dibiayai oleh APBD Pemerintah Kota Denpasar melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun anggaran 2025.
3) Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada tahun 2025.
4) Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar tahun 2025 disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar sampai dengan triwulan I tahun 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Denpasar sampai dengan triwulan I tahun 2025

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar sampai dengan triwulan I Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai atau tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul, maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian atau perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun 2025 sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD Kota Denpasar. Berdasarkan program dan kegiatan yang ada, BPBD Kota Denpasar telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program dan kegiatan yang ada dengan dana APBD Tahun 2025, yang ditargetkan sampai dengan triwulan I sebesar Rp 6.013.855.295,00 dari total anggaran Rp 15.078.545.001,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp 2.785.154.949,00 atau 18,47%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Denpasar, antara lain:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1.1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pada Indikator Kinerja kegiatan (*Output*) persentase pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target kinerja dan anggaran renja sampai triwulan I tahun 2025 sebesar 27,28%, perhitungan ini berdasarkan pada jumlah semua kegiatan dan indikator Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam jangka 1 (satu) tahun berjalan tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tercapai 23,28% dan fisik sebesar 33,28%.

1.2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pada Indikator Kinerja kegiatan (*Output*) persentase jasa surat menyurat yang tersedia dengan target kinerja dan anggaran renja sampai triwulan I tahun 2025 sebesar 50,00%, perhitungan ini berdasarkan pada jumlah semua kegiatan dan indikator Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dalam jangka 1 (satu) tahun berjalan tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tercapai 0,00% dan realisasi fisik sebesar 5,00%.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pada Indikator Kinerja kegiatan (*Output*) Persentase tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor dengan target kinerja dan anggaran renja sampai triwulan I tahun 2025 sebesar 43,47%, perhitungan ini berdasarkan pada jumlah semua kegiatan dan indikator Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam jangka 1 (satu) tahun berjalan tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tercapai 13,19% dan realisasi fisik sebesar 14,89%.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pada Indikator Kinerja kegiatan (*Output*) Persentase Persentase peralatan rumah tangga yang tersedia dengan target kinerja dan anggaran renja sampai triwulan I tahun 2025 sebesar 23,30%, perhitungan ini berdasarkan pada jumlah semua kegiatan dan indikator Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dalam jangka 1 (satu) tahun berjalan tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tercapai 14,63% dan realisasi fisik sebesar 14,70%.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pada Indikator Kinerja kegiatan (*Output*) Persentase Konsumsi yang tersedia dengan target kinerja dan anggaran renja sampai triwulan I tahun 2025 sebesar 100,00%, perhitungan ini berdasarkan pada jumlah semua kegiatan dan indikator Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dalam jangka 1 (satu) tahun berjalan tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tercapai 4,26% dan realisasi fisik sebesar 6,40%.

e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pada Indikator Kinerja kegiatan (*Output*) Persentase barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dengan target kinerja dan anggaran renja sampai triwulan I tahun 2025 sebesar 26,01%, perhitungan ini berdasarkan pada

jumlah semua kegiatan dan indikator Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dalam jangka 1 (satu) tahun berjalan tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tercapai 22,58% dan realisasi fisik sebesar 23,16%.

f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pada Indikator Kinerja kegiatan (*Output*) Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang tersedia dengan target kinerja dan anggaran renja sampai triwulan I tahun 2025 sebesar 25,00%, perhitungan ini berdasarkan pada jumlah semua kegiatan dan indikator Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dalam jangka 1 (satu) tahun berjalan tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tercapai 25,00% dan realisasi fisik sebesar 25,00%.

1.3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pada Indikator Kinerja kegiatan (*Output*) Persentase tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target kinerja dan anggaran renja sampai triwulan I tahun 2025 sebesar 100,00% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah semua kegiatan dan indikator Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dalam jangka 1 (satu) tahun berjalan tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tercapai 0,00% dan realisasi fisik sebesar 0,00%.

1.4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pada Indikator Kinerja kegiatan (*Output*) Persentase tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target kinerja dan anggaran renja sampai triwulan I tahun 2025 sebesar 26,12% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah semua kegiatan dan indikator Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dalam jangka 1 (satu) tahun berjalan tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tercapai 22,91% dan realisasi fisik sebesar 22,91%.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pada Indikator Kinerja kegiatan (*Output*) Persentase tersedianya Jasa Pelayanan umum dengan target kinerja dan anggaran renja sampai triwulan I tahun 2025 sebesar 36,61%, perhitungan ini berdasarkan pada jumlah semua kegiatan dan indikator Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam jangka 1 (satu) tahun berjalan tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tercapai 34,34% dan realisasi fisik sebesar 34,59%.

1.5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pada Indikator Kinerja kegiatan (*Output*) Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dengan kondisi baik dengan target kinerja dan anggaran renja sampai triwulan I tahun 2025 sebesar 100,00%, perhitungan ini berdasarkan pada jumlah semua kegiatan dan indikator Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dalam jangka 1 (satu) tahun berjalan tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tercapai 7,35% dan realisasi fisik sebesar 7,35%.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pada Indikator Kinerja kegiatan (*Output*) Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik dengan target kinerja dan anggaran renja sampai triwulan I tahun 2025 sebesar 100,00%, perhitungan ini berdasarkan pada jumlah semua kegiatan dan indikator Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dalam jangka 1 (satu) tahun berjalan tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tercapai 10,16% dan realisasi fisik sebesar 10,29%.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pada Indikator Kinerja kegiatan (*Output*) Persentase sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik dengan target kinerja dan anggaran renja sampai triwulan I tahun 2025 sebesar 100,00%, perhitungan ini berdasarkan pada jumlah semua kegiatan dan indikator Sub Kegiatan Pemeliharaan /

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam jangka 1 (satu) tahun berjalan tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tercapai 0,00% dan realisasi fisik sebesar 0,00%.

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pada Indikator Kinerja kegiatan (*Output*) Persentase sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor berfungsi dengan baik dengan target kinerja dan anggaran renja sampai triwulan I tahun 2025 sebesar 100,00%, perhitungan ini berdasarkan pada jumlah semua kegiatan dan indikator Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam jangka 1 (satu) tahun berjalan tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tercapai 0% dan realisasi fisik sebesar 0%.

2) Program Penanggulangan Bencana

2.1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

Pada Indikator Kinerja kegiatan (*Output*) Persentase terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana dengan target kinerja dan anggaran renja sampai triwulan I tahun 2025 sebesar 20,56%, perhitungan ini berdasarkan pada jumlah semua kegiatan dan indikator Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dalam jangka 1 (satu) tahun berjalan tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tercapai 0% dan realisasi fisik sebesar 0%. Hal ini karena kegiatan tersebut belum berjalan.

2.2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

Pada Indikator Kinerja kegiatan (Output) Persentase laporan kerusakan/kerugian akibat bencana dengan target kinerja dan anggaran renja sampai triwulan I tahun 2025 sebesar 37,03%, perhitungan ini berdasarkan pada jumlah semua kegiatan dan indikator Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota dalam jangka

1 (satu) tahun berjalan tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tercapai 0,00% dan realisasi fisik sebesar 0,00%. Hal ini karena kegiatan belum berjalan.

b. Sub Kegiatan penyusunan Rencana Kontijensi

Pada Indikator Kinerja kegiatan (Output) Persentase laporan kerusakan/kerugian akibat bencana dengan target kinerja dan anggaran renja sampai triwulan I tahun 2025 sebesar 98,13%, perhitungan ini berdasarkan pada jumlah semua kegiatan dan indikator Sub Kegiatan penyusunan Rencana Kontijensi dalam jangka 1 (satu) tahun berjalan tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tercapai 0,00% dan realisasi fisik sebesar 3,67%. Hal ini karena kegiatan masih dalam tahap koordinasi.

c. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi bencana kabupaten/Kota

Pada Indikator Kinerja kegiatan (*Output*) Persentase tersusunnya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi bencana kabupaten/Kota dengan target kinerja dan anggaran renja sampai triwulan I tahun 2025 sebesar 2,86%, perhitungan ini berdasarkan pada jumlah semua kegiatan dan indikator Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi bencana kabupaten/Kota dalam jangka 1 (satu) tahun berjalan tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tercapai 0,00% dan realisasi fisik sebesar 0,00%. Hal ini karena kegiatan belum berjalan.

d. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Pada Indikator Kinerja kegiatan (*Output*) Persentase terpenuhinya sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target kinerja dan anggaran renja sampai triwulan I tahun 2025 sebesar 9,46%, perhitungan ini berdasarkan pada jumlah semua kegiatan dan indikator Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota dalam jangka 1 (satu) tahun berjalan tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tercapai 0,00% dan realisasi fisik sebesar 0,00%. Hal ini karena kegiatan belum berjalan.

2.3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

a. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Pada Indikator Kinerja kegiatan (*Output*) Persentase penanganan darurat bencana dengan target kinerja dan anggaran renja sampai triwulan I tahun 2025 sebesar 100,00%, perhitungan ini berdasarkan pada jumlah semua kegiatan dan indikator Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dalam jangka 1 (satu) tahun berjalan tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tercapai 0% dan realisasi fisik sebesar 0%. Hal ini baru bisa berjalan bila terjadi bencana.

b. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Pada Indikator Kinerja kegiatan (*Output*) Persentase penanganan darurat bencana dengan target kinerja dan anggaran renja sampai triwulan I tahun 2025 sebesar 15,24%, perhitungan ini berdasarkan pada jumlah semua kegiatan dan indikator Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dalam jangka 1 (satu) tahun berjalan tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tercapai 0% dan realisasi fisik sebesar 0%. Hal ini baru bisa berjalan bila terjadi bencana.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Pada Indikator Kinerja kegiatan (*Output*) Persentase logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang tersedia dengan target kinerja dan anggaran renja sampai triwulan I tahun 2025 sebesar 0,00%, perhitungan ini berdasarkan pada jumlah semua kegiatan dan indikator Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dalam jangka 1 (satu) tahun berjalan tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tercapai 0,00% dan realisasi fisik sebesar 0,00%. Hal ini karena kegiatan belum berjalan dan sisa logistik yang masih tersedia.

2.4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

a. Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Pada Indikator Kinerja kegiatan (*Output*) tersedianya dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dengan target kinerja dan anggaran renja sampai triwulan I tahun 2025 sebesar 0,20%, perhitungan ini berdasarkan pada jumlah semua kegiatan dan indikator

Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dalam jangka 1 (satu) tahun berjalan tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tercapai 0,00% dan realisasi fisik sebesar 0,00%. Hal ini karena kegiatan belum berjalan.

b. Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi

Pada Indikator Kinerja kegiatan (*Output*) tersedianya Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi dengan target kinerja dan anggaran renja sampai triwulan I tahun 2025 sebesar 25,10%, perhitungan ini berdasarkan pada jumlah semua kegiatan dan indikator Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dalam jangka 1 (satu) tahun berjalan tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tercapai 0% dan realisasi fisik sebesar 8,11%. Hal ini karena kegiatan masih dalam tahap koordinasi.

3) Tidak terdapat realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang di rencanakan.

4) Kebijakan / tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain :

a. Meningkatkan perencanaan dan kinerja pelaksana kegiatan.

b. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan periode sebelumnya.

6) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Daerah Kota Denpasar adalah :

a. Belum tercapainya target kegiatan sesuai yang tertuang dalam renstra.

b. Tercapainya target kinerja sesuai dengan yang telah direncanakan berdampak terhadap peningkatan pelayanan kebencanaan dan peningkatan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Sisa Anggaran
				(Tahun 2025)		I						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Pemenuhan layanan penunjang kinerja Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100**	**11.960.954.724**	**16,26**	**2.785.154.949**	**16,26**	**2.785.154.949**	**16,26**	**23,29**	**9.175.799.775**
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Tersedia gaji dan tunjangan ASN**	**100**	**7.338.156.758**	**33,28**	**1.708.572.046**	**33,28**	**1.708.572.046**	**33,28**	**23,28**	**5.629.584.712**
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	7.338.156.758	33,28	1.708.572.046	33,28	1.708.572.046	33,28	23,28	5.629.584.712
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**681.208.900**	**14,86**	**86.846.600**	**14,86**	**86.846.600**	**14,86**	**12,75**	**594.362.300**
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	6.256.000	5,00	0	5,00	0	5,00	0,00	6.256.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	127.552.300	14,89	16.821.600	14,89	16.821.600	14,89	13,19	110.730.700

		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9	344.535.600	14,70	50.405.000	14,70	50.405.000	14,70	14,63	294.130.600
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	146.175.000	6,40	6.225.000	6,40	6.225.000	6,40	4,26	139.950.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	32.090.000	23,16	7.245.000	23,16	7.245.000	23,16	22,58	24.845.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	24.600.000	25,00	6.150.000	25,00	6.150.000	25,00	25,00	18.450.000
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai**	**100**	**37.875.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**37.875.000**
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	37.875.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	37.875.000
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**2.699.790.066**	**28,75**	**907.103.803**	**28,75**	**907.103.803**	**28,75**	**33,60**	**1.792.686.263**
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	174.000.000	22,91	39.865.468	22,91	39.865.468	22,91	22,91	134.134.532

		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	2.525.790.066	34,59	867.238.335	34,59	867.238.335	34,59	34,34	1.658.551.731
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah yang siap pakai**	**100**	**1.203.924.000**	**4,41**	**82.632.500**	**4,41**	**82.632.500**	**4,41**	**6,86**	**1.121.291.500**
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	783.884.000	7,35	57.600.000	7,35	57.600.000	7,35	7,35	726.284.000
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68	246.270.000	10,29	25.032.500	10,29	25.032.500	10,29	10,16	221.237.500
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	154.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	154.000.000
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14	19.770.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	19.770.000
2	**Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**1. Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**46,51**	**2.346.230.700**	**1,24**	**0**	**1,24**	**0**	**1,24**	**0,00**	**9.175.799.775**

			2. Persentase pelayanan penanggulangan bencana	**100**								
			3. Persentase rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	**100**								
		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Daerah Rawan Bencana**	**100**	**164.284.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**164.284.000**
		Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggal	1000	164.284.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	164.284.000
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana**	**100**	**1.265.671.000**	**0,92**	**0**	**0,92**	**0**	**0,92**	**0,00**	**1.265.671.000**
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	65	327.182.000	3,67	0	3,67	0	3,67	0,00	327.182.000

		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1	103.225.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	103.225.000
		Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1	700.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	700.000.000
		Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1	135.264.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	135.264.000
		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**100**	**620.849.400**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**620.849.400**
		Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1	79.149.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	79.149.000
		Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10	448.700.400	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	448.700.400

		Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200	93.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	93.000.000
		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah**	**100**	**295.426.300**	**4,06**	**0**	**4,06**	**0**	**4,06**	**0,00**	**295.426.300**
		Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	3	183.749.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	183.749.000
		Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2	111.677.300	8,11	0	8,11	0	8,11	0,00	111.677.300
JUMLAH					**15.078.545.001**		**2.785.154.949**		**2.113.909.656**			**12.964.635.345**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Hasil evaluasi target pelayanan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar didasarkan atas hasil pelaksanaan program/kegiatan, yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis dari pencapaian target kinerja atas sasaran dan kebijakan Pemerintah Kota Denpasar. Manajemen Bencana sebagai upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat dan setelah bencana. Tahun 2025 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar di dukung oleh indikator dan beberapa program/kegiatan seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi 2025	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	7	8	8	8	11	11	11	12	13
4.	Indeks Risiko Bencana (IRB)			98,72	95,76	92,89	90,10	104,39	104,39	104,39	92,89	-
5.	Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time Rate*)			-	-	-	-	9 Menit	-	-	-	-
6.	Persentase daerah rawan bencana yang dibina			37,21%	41,86%	46,51	51,16%	18,60%	18,60%	100%	46,51	-
7.	Persentase pelayanan penanggulangan bencana			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
8.	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
9.	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			-	-	-	-	100%	-	-	-	-

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Mengacu pada isu strategis nasional BNPB, maka dapat ditetapkan isu - isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi adalah Sebagai berikut :

1. Penguatan kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat menghadapi bencana.

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar serta dikaitkan dengan kondisi obyektif di lapangan. Dalam konteks pencegahan bencana (pra bencana), pada saat tanggap darurat dan penanganan pasca bencana, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Orientasi penanggulangan bencana pada umumnya masih lebih terarah pada penanganan kedaruratan dan belum pada aspek pencegahan serta pengurangan resiko bencana.
2. Masih belum optimalnya jangkauan pengembangan tim siaga bencana ditingkat instansi terkait, kecamatan maupun desa/kelurahan, para relawan bencana dan dunia usaha.
3. Belum semua petugas mendapatkan pelatihan mitigasi bencana.
4. Belum maksimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, sehingga peranan pemerintah lebih dominan dalam penanganan kebencanaan
5. Masih kurangnya pemanfatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pencegahan mengurangi resiko bencana.
6. Aspek sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas masih kurang memadai.

Permasalahan yang dihadapi tersebut juga memiliki dampak terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional, salah satunya Indeks Risiko Bencana (IRB) yang diukur berdasarkan indikator-indikator dari Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, maka dilakukan analisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya. Berikut analisis SWOT Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar:

Tabel 2.3
Analisis SWOT Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Internal	Eksternal
Kekuatan : 1. Sudah ada lembaga teknis penanggulangan Bencana (BPBD). 2. Tersedianya satuan tugas penangulangan bencana (TRC). 3. Sinergitas SKPD, TNI, POLRI, Masyarakat dan Dunia Usaha.	Peluang : 1. Peraturan perundangan-undangan mengenai penanggulangan bencana sudah ada. 2. Partisipasi masyarakat dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana sudah berjalan baik.
Kelemahan : 1. Belum tersosialisasinya Peta Daerah Rawan Bencana. 2. Belum optimalnya kompetensi SDM. 3. Belum optimalnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan dini bencana.	Ancaman : 1. Mobilitas penduduk yang semakin meningkat. 2. Banyaknya pembangunan di daerah rawan bencana. 3. Adanya alih fungsi lahan yang semakin meningkat.

Melihat faktor – faktor yang diidentifikasi melalui analisis SWOT diatas, maka dapat ditetapkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi diantaranya:

1. Perkembangan tingkat penduduk yang akan memicu pertambahan kebutuhan akan lahan pemukiman dan perumahan.
2. Masih banyaknya rumah yang dibangun oleh masyarakat tidak memenuhi peraturan tentang tata ruang Pemerintah Kota Denpasar.
3. Masih banyaknya jalur akses ke beberapa lokasi rawan bencana yang tergolong sulit karena jalannya sempit.
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat yang tinggal/membangun di pemukiman daerah rawan bencana.
5. Masih terdapat keterbatasan kebijakan penannggulangan bencana di daerah.
6. Upaya untuk terus meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Dari tantangan tersebut diatas maka ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan kinerja BPBD Kota Denpasar, yaitu:

1. Penguatan landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana di daerah mengacu pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Perencanaan penanggulangan bencana secara terpadu.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secra aktif dalam upaya pengurangan resiko bencana dan penangnan bencana.
4. Adanya ketentuan dan peraturan tentang pengelolaan lingkungan.
5. Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana.
6. Terus berkembangnya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih efektif.
7. Optimalisasi pemulihan dampak bencana.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 mengacu pada Perubahan RKPD Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025 dan juga berpedoman pada Renstra BPBD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 beserta perubahannya yang telah disusun sebelumnya. Perubahan Renja BPBD Kota Denpasar Tahun 2025 memuat rencana program atau kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025 oleh sekretariat dan masing-masing bidang beserta UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kota Denpasar secara terperinci, dan juga untuk mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan target yang sudah ditetapkan. Adapun rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Denpasar pada tahun 2025, antara lain:

Tabel 3.1
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Tahun 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA 2025		SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN (Rp)			BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	KET.
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		RKPD / RENJA 2025	APBD / DPA 2025	RENCANA PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					16.707.833.504	17.800.400.820	20.304.445.599	2.504.044.779	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%		14.010.361.656	15.454.170.120	17.765.614.899	2.311.444.779	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedia gaji dan tunjangan ASN	100%	100%		9.376.754.950	9.944.962.220	11.609.291.999	1.664.329.779	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang / Bulan	34 Orang / Bulan	Dana Alokasi Umum (DAU); Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU PPPK	9.376.754.950	9.944.962.220	11.609.291.999	1.664.329.779	
1.05.01.2.02.0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%		769.735.100	681.208.900	682.133.900	925.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA 2025		SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN (Rp)			BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	KET.
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		RKPD / RENJA 2025	APBD / DPA 2025	RENCANA PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6.007.500	6.256.000	6.256.000	0	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	143.810.600	127.552.300	128.477.300	925.000	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	373.695.600	344.535.600	344.535.600	0	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	152.445.000	146.175.000	146.175.000	0	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	39.132.000	32.090.000	32.090.000	0	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	54.644.400	24.600.000	24.600.000	0	
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai**	**100%**	**100%**		**77.875.000**	**37.875.000**	**349.607.000**	**311.732.000**	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	5 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0	0	13.392.000	13.392.000	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	77.875.000	37.875.000	336.215.000	298.340.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA 2025		SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN (Rp)			BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	KET.
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		RKPD / RENJA 2025	APBD / DPA 2025	RENCANA PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**100%**		**2.324.732.606**	**3.586.200.000**	**3.878.158.000**	**291.958.000**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	358.240.000	174.000.000	174.000.000	0	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.966.492.606	3.412.200.000	3.704.158.000	291.958.000	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang siap pakai**	**100%**	**100%**		**1.461.264.000**	**1.203.924.000**	**1.246.424.000**	**42.500.000**	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	31 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	970.124.000	783.884.000	783.884.000	0	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	68 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	312.970.000	246.270.000	288.770.000	42.500.000	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	154.000.000	154.000.000	154.000.000	0	
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	14 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	24.170.000	19.770.000	19.770.000	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA 2025		SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN (Rp)			BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	KET.
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		RKPD / RENJA 2025	APBD / DPA 2025	RENCANA PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**1) Persentase daerah rawan bencana yang dibina** **2) Persentase pelayanan penanggulangan bencana** **3) Persentase rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana**	**46,51%** **100%** **100%**	**46,51%** **100%** **100%**		**2.697.471.848**	**2.346.230.700**	**2.538.830.700**	**192.600.000**	
1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Daerah Rawan Bencana**	**100%**	**100%**		**148.849.440**	**164.284.000**	**164.284.000**	**0**	
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1000 Orang	1000 Orang	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	148.849.440	164.284.000	164.284.000	0	
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana**	**100%**	**100%**		**1.592.692.008**	**1.265.671.000**	**1.354.171.000**	**88.500.000**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA 2025		SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN (Rp)			BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	KET.
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		RKPD / RENJA 2025	APBD / DPA 2025	RENCANA PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	-	65 Unit	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	0	0	58.500.000	58.500.000	
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	65 Orang	65 Orang	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	357.949.288	327.182.000	327.182.000	0	
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	103.285.000	103.225.000	103.225.000	0	
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Laporan	1 Laporan	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	771.000.000	700.000.000	730.000.000	30.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA 2025		SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN (Rp)			BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	KET.
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		RKPD / RENJA 2025	APBD / DPA 2025	RENCANA PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	1 Kawasan	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	360.457.720	135.264.000	135.264.000	0	
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana**	**100%**	**100%**		**620.869.400**	**620.849.400**	**705.849.400**	**85.000.000**	
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	79.169.000	79.149.000	79.149.000	0	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	10 Orang	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	448.700.400	448.700.400	533.700.400	85.000.000	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Orang	200 Orang	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	93.000.000	93.000.000	93.000.000	0	
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase tersedianya dokumen kebencanaan**	**100%**	**100%**		**335.061.000**	**295.426.300**	**314.526.300**	**19.100.000**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA 2025		SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN (Rp)			BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	KET.
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		RKPD / RENJA 2025	APBD / DPA 2025	RENCANA PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	194.990.000	183.749.000	183.749.000	0	
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	140.071.000	111.677.300	130.777.300	19.100.000	
	Jumlah					**16.707.833.504**	**17.800.400.820**	**20.304.445.599**	**2.504.044.779**	

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, dengan memperhatikan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan), kondisi masyarakat dan juga ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 memuat rencana program atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan tahun 2025 sebagai penjabaran dari Perubahan RKPD Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025 dan juga Renstra BPBD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 beserta perubahannya dan juga acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kota Denpasar secara terperinci.

Semoga dengan tersusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dapat menjawab terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2025 agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan pelayanan penanganan dan penyelamatan bencana maupun non kebencanaan sesuai dengan harapan masyarakat Kota Denpasar.

RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat Nya, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar ini adalah dokumen perencanaan sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata saat tahun berjalan guna mewujudkan target-target Indikator Kinerja yang telah disusun, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Semoga buku ini menjadi pedoman pada pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tahun 2025.

Om Santi , Santi, Santi Om.

Denpasar, 28 Mei 2025
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kota Denpasar

Ir. I Gede Cipta Sudewa Atmaja, ST.,MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690426 199803 1012

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar Tahun 2025 yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yaitu ***Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju***.

Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD semesta berencana 2021-2026 adalah keamanan dan lingkungan yang kondusif dalam rangka menjaga jati diri dan martabat daerah dalam tatanan internal maupun eksternal, meningkatkan peran dan sinergi pelaku pariwisata, desa adat, serta aparatur kemananan untuk menciptakan kondisi iklim investasi yang baik serta lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat.. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada *"Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju"*. Untuk mecapai hal tersebut ditetapkan beberapa Misi, yaitu :

1. Meningkatkan KeMAKMURan Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan ;
2. Menjaga Stabilitas KeAMANan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana;
3. KeJUJURan dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance);
4. UNGGUL dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana;
5. Menguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan KeBUDAYAan Bali.

Dari ke-5 Misi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Denpasar, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar akan lebih fokus menjalankan Misi ke-1 yaitu "1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan" serta Misi ke-4 yaitu Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar didasarkan atas perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015– 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 – 2045;
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

a. Maksud

Perubahan Renja Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Tahun ke 5 (lima) RPJMD Kota Denpasar yang memuat program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Perubahan 2025 yang dikaitkan dengan RPJMD 2021-2026 dan visi misi Pemerintah kota Denpasar yang dijabarkan dalam rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar Tahun 2021 -2026.

b. Tujuan :

Dengan telah tersusunnya Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kota Denpasar Tahun 2025 ini, diharapkan nantinya tujuan dari program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dapat berjalan lebih terarah, efisien dan efektif sesuai dengan RPJMD 2021-2026 dan visi, misi , tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator dan pagu dana sebagaimana yang telah digariskan didalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026.

1.4 Sistematika

Adapun mekanisme penulisan laporan ini dalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar sampai triwulan I Tahun

2025 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar Tahun 2025 s/d triwulan I dan Capaian Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar

Rencana kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar Tahun 2025 terdiri dari 7 Program, 15 (lima belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan. Sedangkan jumlah nilai/pagu dana sebesar Rp. 127.591.233.792,00 (Seratus dua puluh tujuh milyard lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah). Realiasasi sampai Triwulan I (Bulan Maret) adalah sebesar Rp. 3.079.982.424,00 (Tiga milyard tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) atau sebanyak 2,41% dari target Triwulan I yang sebanyak 10,15%. Terdapat defisiasi negatif sebesar 7,74%.

Tabel 2.1
Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai denganTriwulan I

Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2			3	4	5	6
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**120.710.545.171**		**3.079.982.424**	**117.310.337.747**
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**120.710.545.171**		**3.079.982.424**	**117.310.337.747**
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**15.752.020.171**	**19,52%**	**3.075.482.424**	**12.676.537.747**
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**11.796.080.497**	**20,02%**	**2.362.010.141**	**9.434.070.356**
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51 orang	11.796.080.497	20,02%	2.362.010.141	9.434.070.356
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**651.077.450**	**22,80%**	**148.472.450**	**502.605.000**
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.795.600	49,60%	6.842.000	6.953.600
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	292.307.500	28,97%	84.694.300	207.613.200
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	219.634.350	24,91%	54.704.150	164.930.200
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.840.000	14,09%	2.232.000	13.608.000
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	109.500.000	0,00%	0	109.500.000
1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**94.092.000**	**96,92%**	**91.338.000**	**2.754.000**
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel peralatan kantor yang diadakan	13 Buah	51.500.000	98,54%	50.750.000	750.000

Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2			3	4	5	6
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	13 Unit	42.592.000	95,29%	40.588.000	2.004.000
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**2.205.890.224**	**18,64%**	**411.174.133**	**1.794.716.091**
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	252.000.000	14,15%	35.668.289	216.331.711
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.953.890.224	19,22%	375.505.844	1.578.384.380
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**1.004.880.000**	**6,22%**	**62.487.700**	**942.392.300**
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	412.670.000	15,14%	62.487.700	350.182.300
1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	10.000.000	0,00%	0	10.000.000
1.04.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	82.210.000	0,00%	0	82.210.000
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000	0,00%	0	500.000.000
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase pemenuhan SPM Perumahan**	**100%**	**1.019.950.000**	**0,00%**	**0**	**732.025.000**
1.04.02.2.01	**Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase Dokumen Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota**	**100%**	**252.925.000**	**0,00%**	**0**	**50.600.000**
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	50.300.000	0,00%	0	50.300.000
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	300.000	0,00%	0	300.000
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	375.000	0,00%	0	375.000

Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2			3	4	5	6
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	50.900.000	0,00%	0	50.900.000
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.675.000	0,00%	0	50.675.000
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.375.000	0,00%	0	100.375.000
1.04.02.2.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabiltasi**	**100%**	**300.000**	**0,00%**	**0**	**300.000**
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	20 Orang	300.000	0,00%	0	300.000
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabiltiasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Program Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabiltasi**	**100%**	**365.600.000**	**0,00%**	**0**	**280.300.000**
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabiltasi	4 Unit Rumah	280.300.000	0,00%	0	280.300.000
1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	5 Rumah Tangga	85.300.000	0,00%	0	85.300.000
1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan**	**100%**	**401.125.000**	**0,00%**	**0**	**401.125.000**
1.04.02.2.06.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	1 Laporan	401.125.000	0,00%	0	401.125.000
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Kawasan Kumuh**	**0,018%**	**2.643.250.000**	**0,00%**	**0**	**2.610.950.000**
1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persentase Kawasan permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan Kualitasnya**	**100%**	**32.300.000**	**0,00%**	**0**	**5.221.900.000**

Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2			3	4	5	6
1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	43 Kelompok Masyarakat	32.300.000	0,00%	0	32.300.000
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persentase Kawasan permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditingkatkan Kualitasnya**	**100%**	**2.610.950.000**	**0,00%**	**0**	**2.610.950.000**
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang diremajakan	5 Ha	2.610.950.000	0,00%	0	2.610.950.000
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Rumah Layak Huni**	**95%**	**2.054.125.000**	**0,00%**	**0**	**2.054.125.000**
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rumah Layak Huni yang tertata**	**20 Unit**	**2.054.125.000**	**0,00%**	**0**	**2.054.125.000**
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Diperbaiki	20 Unit	2.003.000.000	0,00%	0	2.003.000.000
1.04.04.2.01.0001	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah orang yang mengikuti penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	300 Orang	51.125.000	0,00%	0	51.125.000
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara**	**100%**	**99.241.200.000**	**89,68%**	**4.500.000**	**99.236.700.000**
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase terbangunnya fasilitasi sosial guna menunjang aktivitas masyarakat**	**100%**	**99.241.200.000**	**89,68%**	**4.500.000**	**99.236.700.000**
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, Sarana dan utilitas uum yang menunang fungsi hunian	43 lokasi	99.140.750.000	12,91%	4.500.000	99.136.250.000
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	100.450.000	0,00%	0	100.450.000
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**7.448.377.500**		**0**	**7.448.377.500**
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**7.448.377.500**		**0**	**7.448.377.500**

Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2			3	4	5	6
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase konflik pertanahan yang terselesaian**	**100%**	**10.050.000**	**0,00%**	**0**	**10.050.000**
2.10.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terfasilitasinya administrasi pertanahan**	**100%**	**10.050.000**	**0,00%**	**0**	**10.050.000**
2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa Konflik dan perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.050.000	0,00%	0	10.050.000
2.10.08	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Jumlah sertifikat tanah fasos fasum Pemerintah Kota Denpasar**	**12 Sertifikat**	**7.438.327.500**	**0,00%**	**0**	**7.438.327.500**
2.10.08.2.02	**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	**Jumlah tanah pemerintah yang terinventarisasi**	**12 Sertifikat**	**7.438.327.500**	**0,00%**	**0**	**7.438.327.500**
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinvetarisasi	1 Laporan	7.438.327.500	0,00%	0	7.438.327.500
				128.158.922.671	**12,71%**	**3.079.982.424**	**124.758.715.247**

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta diperlukan adanya sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan Propinsi, Nasional dan rencana pembangunan daerah. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Bali serta Renstra Kementerian PUPR Republik Indonesia. Dengan adanya sinkronisasi Renstra antara Propinsi dan Pusat diharapkan program dan kegiatan Pemerintah Kota, Propinsi dan Pusat dapat berjalan searah.

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan fasilitas penyediaan pembiayaan infrastruktur dasar perumahan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui fasilitas penyediaan pembiayaan perumahan. sarana strategis yang ingin dicapai oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu:

1. Meningkatkan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan
2. Meningkatkan penyediaan dan pembiayaan perumahan

Sasaran trategis tersebut akan dilaksanakan melalui sasaran program :

a. Meningkatnya rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah yang layak huni melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan

b. Menurunnya kekurangan tempat tinggal karena adanya bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan

Sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali yaitu:

1) Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan rencana pengembangan rumah layak huni dan kawasan permukiman bebas kumuh
2) Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melaui pengembangan rumah layak huni dan kawasan permukiman bebas kumuh

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar

a) Tujuan

Tujuan dari pembuatan renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini adalah untuk dapat menyusun program, kegiatan dan pagu dana serta indikator kinerja serta target-targetnya agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga program-program yang dilaksanakan akan tepat sasaran.

b) Sasaran

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran jangka menengah tahun 2021-2026 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang didukung fasilitas PSU yang memadai;

   Hal ini dilaksanakan melalui 3 (Tiga) Indikator, yaitu :

   a. Persentase berkurangnya permukiman yang layak huni;
   b. Persentase penurunan luas lingkungan permukiman kumuh; dan

c. Persentase PSU Perumahan yang terfasilitasi.

2. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan; dengan indikatornya yaitu :
   - Persentase tanah Pemerintah Kota Denpasar bersertifikat.

3.3 Program dan Kegiatan

a) Faktor–faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan Sub Kegiatan dengan mempertimbangkan :
   1. Menuntaskan Program Inovatif
   2. Perlunya Pedoman teknis Perumahan dan Pendataan Perumahan Kumuh di Kota Denpasar

b) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi :
   1. Dalam Tahun Anggaran Perubahan 2025 ini direncanakan melaksanakan 7 (tujuh) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan.;
   2. Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan ini dilaksanakan di Kota Denpasar yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan yaitu Denpasar Timur, Denpasar Barat, Denpasar Selatan dan Denpasar Utara;
   3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan (terlampir);
   4. Penjelasan Rumusan Program dan kegiatan.

Adapun program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar pada Anggaran Perubahan Tahun 2025 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
7. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Dari segi jumlah program tidak ada perubahan atau telah sesuai dengan usulan yang termuat dalam RKPD demikian pula hanya dengan jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada Anggaran Perubahan Tahun 2025 ini, namun dari segi sub kegiatan terdapat penambahan 1 (Satu) Sub Kegiatan baru, yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh. Sub Kegiatan ini dimunculkan pada anggaran perubahan ini disebabkan sesuai arahan dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar terkait dengan **Aplikasi Siap Selem** yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar.

Hal ini telah dikoordinasikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar selaku leading sektor dalam menyusun penyiapan rancangan awal Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Denpasar Tahun 2025.

Tabel 3.1.
Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum perubahan	Target Kinerja Setelah perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**120.710.545.171**	**154.276.828.061**	**33.566.282.890**
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**120.710.545.171**	**154.276.828.061**	**33.566.282.890**
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**100%**	**15.752.020.171**	**17.187.953.061**	**1.435.932.890**
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**11.796.080.497**	**12.986.861.387**	**1.190.780.890**
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51 orang	102 Orang	11.796.080.497	12.986.861.387	1.190.780.890
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**651.077.450**	**651.077.450**	**0**
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.795.600	13.795.600	0
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	292.307.500	292.307.500	0
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	219.634.350	219.634.350	0
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	15.840.000	15.840.000	0
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	109.500.000	109.500.000	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum perubahan	Target Kinerja Setelah perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**94.092.000**	**190.192.000**	**96.100.000**
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit mebel yang Diadakan	13 Buah	13 Buah	51.500.000	51.500.000	0
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	5 Unit	13 Unit	42.592.000	138.692.000	96.100.000
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**2.205.890.224**	**2.234.942.224**	**29.052.000**
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	252.000.000	252.000.000	0
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	1.953.890.224	1.982.942.224	29.052.000
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**1.004.880.000**	**1.124.880.000**	**120.000.000**
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit	412.670.000	432.670.000	20.000.000
1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	10.000.000	10.000.000	0
1.04.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	74 Unit	82.210.000	82.210.000	0
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	500.000.000	600.000.000	100.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum perubahan	Target Kinerja Setelah perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase pemenuhan SPM Perumahan**	**100%**	**100%**	**1.019.950.000**	**1.319.950.000**	**300.000.000**
1.04.02.2.01	**Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase Dokumen Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota**	**100%**	**100%**	**252.925.000**	**252.925.000**	**0**
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.300.000	50.300.000	0
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	300.000	0
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	1 Dokumen	375.000	375.000	0
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	50.900.000	50.900.000	0
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50.675.000	50.675.000	0
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.375.000	100.375.000	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum perubahan	Target Kinerja Setelah perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.04.02.2.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**300.000**	**300.000**	**0**
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	20 Orang	20 Orang	300.000	300.000	0
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabiltiasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Program Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabiltasi**	**100%**	**100%**	**365.600.000**	**665.600.000**	**300.000.000**
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabiltasi	4 Unit Rumah	7 Unit Rumah	280.300.000	580.300.000	300.000.000
1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	5 Rumah Tangga	5 Rumah Tangga	85.300.000	85.300.000	0
1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan**	**100%**	**100%**	**401.125.000**	**401.125.000**	**0**
1.04.02.2.06.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	1 Laporan	1 Laporan	401.125.000	401.125.000	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum perubahan	Target Kinerja Setelah perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase kawasan kumuh**	**0,018%**	**0,018%**	**2.643.250.000**	**2.694.600.000**	**51.350.000**
1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persentase Kawasan permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan Kualitasnya**	**100%**	**100%**	**32.300.000**	**32.300.000**	**0**
1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	43 Kelompok Masyarakat	43 Kelompok Masyarakat	32.300.000	32.300.000	0
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persentase Kawasan permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditingkatkan Kualitasnya**	**100%**	**100%**	**2.610.950.000**	**2.662.300.000**	**51.350.000**
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	-	1 Laporan	0	51.350.000	51.350.000
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang diremajakan	5 Ha	5 Ha	2.610.950.000	2.610.950.000	0
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Rumah Layak Huni**	**94,53%**	**94,53%**	**2.054.125.000**	**4.054.125.000**	**2.000.000.000**
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rumah Layak Huni yang tertata**	**20 Unit**	**20 Unit**	**2.054.125.000**	**4.054.125.000**	**2.000.000.000**
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh	20 Unit	36 Unit	2.003.000.000	4.003.000.000	2.000.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum perubahan	Target Kinerja Setelah perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Diperbaiki					
1.04.04.2.01.0001	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah orang yang mengikuti penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	300 Orang	300 Orang	51.125.000	51.125.000	0
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara**			**99.241.200.000**	**129.020.200.000**	**29.779.000.000**
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase terbangunnya fasilitasi sosial guna menunjang aktivitas masyarakat**			**99.241.200.000**	**129.020.200.000**	**29.779.000.000**
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	43 lokasi	43 lokasi	99.140.750.000	128.919.750.000	29.779.000.000
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	100.450.000	100.450.000	0
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**7.448.377.500**	**7.549.727.500**	**101.350.000**
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**7.448.377.500**	**7.549.727.500**	**101.350.000**
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase konflik pertanahan yang terselesaian**	**100%**	**100%**	**10.050.000**	**10.050.000**	**-**
2.10.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terfasilitasinya administrasi pertanahan**	**100%**	**100%**	**10.050.000**	**10.050.000**	**0**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum perubahan	Target Kinerja Setelah perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa Konflik dan perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	10.050.000	10.050.000	0
2.10.08	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Jumlah sertifikat tanah fasos fasum Pemerintah Kota Denpasar**	**12 Sertifikat**	**12 Sertifikat**	**7.438.327.500**	**7.539.677.500**	**101.350.000**
2.10.08.2.02	**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	**Jumlah tanah pemerintah yang terinventarisasi**	**12 Sertifikat**	**12 Sertifikat**	**7.438.327.500**	**7.539.677.500**	**101.350.000**
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinvetarisasi	1 Laporan	1 Laporan	7.438.327.500	7.539.677.500	101.350.000
					128.158.922.671	**161.826.555.561**	**33.667.632.890**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 yang telah disusun ini merupakan acuan kerja bagi seluruh komponem di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar untuk melaksanakan tugas operasional Tahun 2025.

Unsur-unsur yang ada di Perangkat Daerah hendaknya selalu berkoordinasi dan berkomunikasi serta meningkatkan kebersamaan didalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan tugas-tugas perangkat daerah yang bersangkutan. Tahun 2025 merupakan Tahun ke-5 (Kelima) dari masa perjalanan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, dimana pada Tahun tersebut juga akan menentukan situasi dan kondisi daerah kota Denpasar.

Meskipun demikian, Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah dan instansi-instansi terkait semestinya tetap berupaya melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan, namun selalu waspada terhadap dinamika yang akan terjadi, sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah bisa tercapai.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar Tahun 2025, masih jauh dari sempurna sehingga mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaannya di masa yang akan datang.

Denpasar, 28 Mei 2025
Kepala Dinas Perumahan,Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar

Ir. I Gede Cipta Sudewa Atmaja, ST.,MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690426 199803 1 012

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓			
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	✓			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	✓			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	✓			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	✓			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	✓			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.		✓	RKPD Kota Denpasar saat ini masih berproses/belum disahkan oleh Walikota	

Denpasar, 28 Mei 2025
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar

Ir. I Gede Cipta Sudewa Atmaja, ST.,MT..
Pembina Utama Muda
NIP. 19690426 199803 1 012

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Perubahan RENJA Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 memuat pendahuluan, hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Perubahan RENJA Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan Perubahan RENJA Tahun 2025 ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tahun 2025.

Akhir kata kami berharap agar Perubahan RENJA Tahun 2025 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh staf di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

Denpasar, 28 Mei 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar,

A.A. Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E.
Pembina Tk. I
NIP. 19720313 199603 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan sesungguhnya merupakan suatu jembatan yang harus dilalui didalam mewujudkan pembangunan yang ingin dicapai atau dicita-citakan. Oleh sebab itu, maka penyelenggara/pelaksana pembangunan juga harus patuh terhadap rencana-rencana yang telah ditentukan dan ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya sehingga kualitas hasilnya dapat dijamin. Sistem perencanaan pembangunan nasional dikatakan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka pendek (tahunan), jangka menengah, dan jangka panjang yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah.

Terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu :

1. Penyusunan rencana adalah menyiapkan rancangan rencana pembangunan yang sifatnya teknokratik, menyeluruh dan terukur dari masing-masing instansi pemerintah (Perangkat Daerah) dengan melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
2. Penetapan rencana dalam hal ini Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang merupakan produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.
3. Pengendalian pelaksanaan rencana yaitu pelaksanaan perencanaan dilakukan melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana.
4. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan

dan kinerja pembangunan, yang dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan, meliputi masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Sebagai unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah semua Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Denpasar wajib mengikuti tahapan-tahapan perencanaan pembangunan tersebut didalam mewujudkan RPJMD Kota Denpasar tahun 2021–2026 dan RPJPD Kota Denpasar tahun 2005–2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar No.1 Tahun 2009. Sebagai penyelenggara negara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar memiliki visi sebagai katalisator dalam mewujudkan masyarakat Kota Denpasar yang aman dan tenteram dalam menunjang pembangunan Kota yang Berwawasan Budaya. Untuk mempertahankan visi tersebut maka sasarannya adalah menurunnya angka pelanggaran hukum, mencegah ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat atau antar golongan, menurunnya pecandu narkoba, meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum, meningkatkan rasa aman bagi masyarakat Kota Denpasar, yang dicapai dengan strategi: memberdayakan masyarakat melalui pembentukan kelompok pengamanan swadaya, dan memberikan bimbingan dan penyuluhan terkait masalah keamanan dan ketertiban.

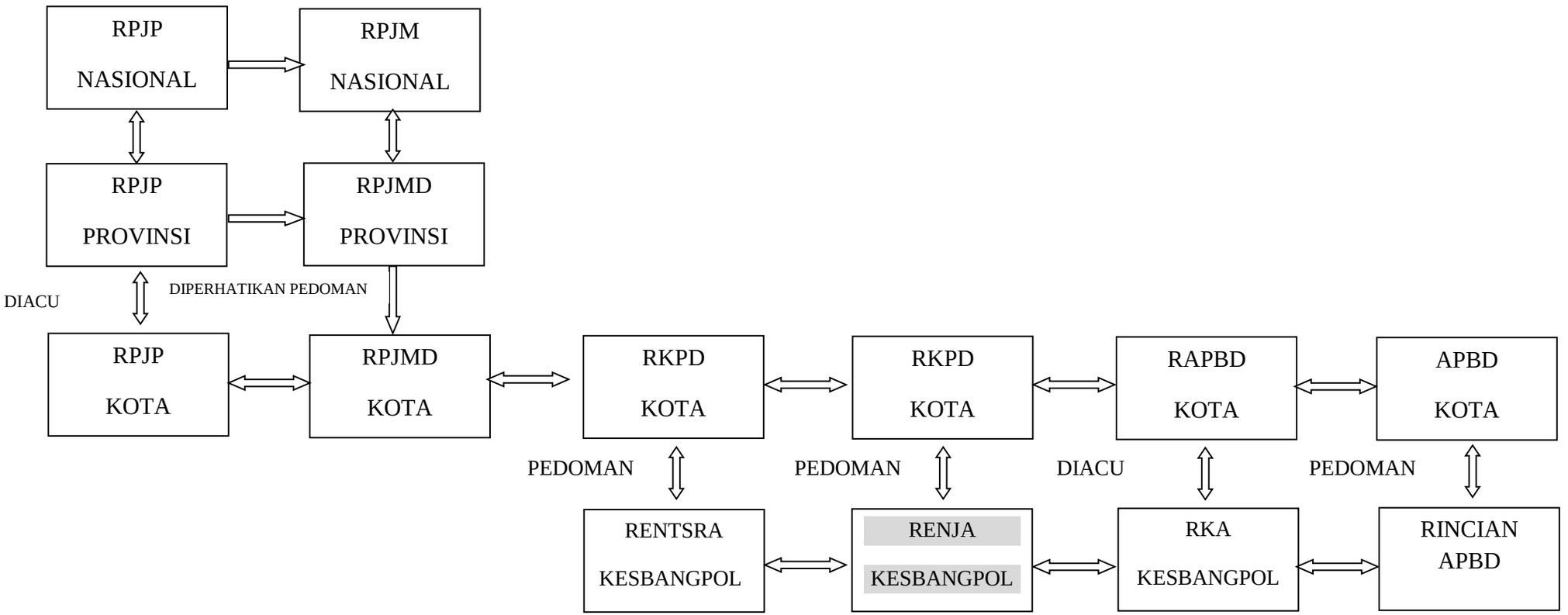
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Dokumen perencanaan yang harus disusun dan ditetapkan setiap daerah (kabupaten/kota) adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan juga diamanatkan menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, di mana dalam proses penyusunannya berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya yaitu RPJMD. Sebagai informasi Perubahan Renja Badan Kesbangpol

Tahun 2025 sebatas rencana kerja, sehingga Perubahan Renja ini dalam perjalanannya masih sangat dimungkinkan terjadi perubahan atau koreksi.

Keterkaitan Perubahan Renja Badan Kesbangpol Kota Denpasar dengan dokumen perencanaan lainnya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam mekanisme pelaksanaan pembangunan dan penganggaran keuangan daerah seperti dalam gambar di bawah ini :

GAMBAR 1.1
HUBUNGAN RENJA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja berpedoman pada :

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kota Denpasar Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025, sedangkan tujuannya adalah merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar selama tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar disusun berdasarkan tata urutan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar sebagai berikut :

1.4.1 Bab I Pendahuluan terdiri dari :

- Latar Belakang
- Landasan Hukum
- Maksud dan Tujuan

- Sistematika Penulisan

1.4.2 Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah, terdiri dari :

- Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I

1.4.3 Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- Rencana Kerja dan Pendanaan

1.4.4 Bab IV Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar sampai dengan Triwulan I

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2025 terdiri dari 6 (Enam) Program dengan 11 (Sebelas) Kegiatan dan 30 (Tiga Puluh) Sub Kegiatan. Untuk jumlah pagu belanja daerah sebesar Rp 17.783.407.681,- (Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah). Berikut review (kajian) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I disajikan dalam tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**			**17.783.407.681**	**13,32**	**2.369.959.680**	**15.413.448.001**
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**17.783.407.681**	**13,32**	**2.326.074.669**	**15.413.448.001**
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**8.051.920.231**	**21,80**	**1.755.302.456**	**6.296.617.775**
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**100%**	**9.354.050**	**98,17**	**9.183.050**	**171.000**
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	9.354.050	98,17	9.183.050	171.000
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**6.159.843.033**	**21,84**	**1.345.208.385**	**4.814.634.648**
8.01.01.2.02.0001	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24 Orang/ Bulan	6.159.843.033	21,84	1.345.208.385	4.814.634.648
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**186.677.500**	**23,70**	**40.479.750**	**146.197.750**
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	6.232.000	-	-	6.232.000
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	78.206.500	11,66	9.120.000	69.086.500
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	14.008.000	11,56	1.619.750	12.388.250

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
8.01.01.2.06.0005	Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	12.441.000	62,32	7.753.000	4.688.000
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	5.280.000	25,00	1.320.000	3.960.000
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	6.480.000	4,32	280.000	6.200.000
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	64.030.000	31,84	20.387.000	43.643.000
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**22.750.000**	**-**	**-**	**22.750.000**
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	28 Unit	22.750.000	-	-	22.750.000
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1.320.735.648**	**23,70**	**313.070.271**	**1.007.665.377**
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	250.687.858	30,14	75.568.900	175.118.958
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Laporan	145.400.000	13,51	19.644.845	125.755.155
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	924.647.790	23,56	217.856.526	706.791.264
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**352.560.000**	**13,43**	**47.361.000**	**305.199.000**

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 Unit	222.530.000	16,86	37.511.000	185.019.000
8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	20 Unit	5.000.000	-	-	5.000.000
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	73 Unit	75.030.000	13,13	9.850.000	65.180.000
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	-	-	50.000.000
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100%**	**4.662.014.200**	**6,51**	**303.512.224**	**4.358.501.976**
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100%**	**4.662.014.200**	**6,51**	**303.512.224**	**4.358.501.976**
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	750 Orang	887.388.000	-	-	887.388.000
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	1.060 Orang	1.970.335.000	10,01	197.140.000	1.773.195.000

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
	Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	78 Orang	1.804.291.200	5,90	106.372.224	1.697.918.976
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik**	**80%**	**1.753.846.000**	**0,02**	**350.000**	**1.753.496.000**
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**	**100%**	**1.753.846.000**	**0,02**	**350.000**	**1.753.496.000**
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan	Jumlah orang yang mengikuti kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan	65 Orang	7.850.000	4,46	350.000	7.500.000

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
	Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	22 Orang	1.743.436.000	-	-	1.743.436.000
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	2.560.000	-	-	2.560.000
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif**	**70%**	**438.427.500**	**16,27**	**71.325.000**	**367.102.500**

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**100%**	**438.427.500**	**16,27**	**71.325.000**	**367.102.500**
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	438.427.500	16,27	71.325.000	367.102.500
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Pembinaan dan pemantauan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**100%**	**1.908.040.750**	**12,33**	**235.250.000**	**1.672.790.750**
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**100%**	**1.908.040.750**	**12,33**	**235.250.000**	**1.672.790.750**
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,	1 Laporan	1.908.040.750	12,33	235.250.000	1.672.790.750

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
	Kepercayaan di Daerah	Fasilitas Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase penurunan Konflik Sosial**	**90%**	**969.159.000**	**0,44**	**4.220.000**	**964.939.000**
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**100%**	**969.159.000**	**0,44**	**4.220.000**	**964.939.000**
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	35 Orang	229.243.000	0,37	845.000	228.398.000
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang	35 Orang	327.006.000	0,34	1.125.000	325.881.000

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
	Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	283.670.000	0,33	950.000	282.720.000
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	129.240.000	1,01	1.300.000	127.940.000
	TOTAL			**17.783.407.681**	**13,32**	**2.369.959.680**	**15.413.448.001**

1. **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

   Dalam pelaksanaan TA. 2025, secara keseluruhan Program dan Kegiatan sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun terdapat Program dan Kegiatan yang belum berjalan karena kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III dan IV.

2. **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

   Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan I TA. 2025 dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan dan sudah tercapai fisik dan keuangan sebesar 13,32%. Dimana ada beberapa kegiatan yang masih dalam proses administrasi keuangan.

3. **Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

   Dalam pelaksanakan kegiatan secara keseluruhan target kegiatan belum dapat berjalan secara optimal daripada target yang telah ditetapkan.

4. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

   Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah:

   a. Telah dibuatnya kalender kerja membantu di dalam pelaporan realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
   b. Rapat rutin setiap triwulannya membantu didalam melakukan evaluasi kegiatan di seluruh bidang dan sekretariatan.

   Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian nilai akhir kinerja sasaran adalah:

   a. Adanya beberapa kegiatan yang masih dalam proses administrasi peng-SPJ-an dan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV.

5. **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**

   Apabila target capaian program Renja Perangkat Daerah bisa terpenuhi setiap tahun anggaran, maka Perangkat Daerah yang bersangkutan bisa pula mengembangkan usulan program/kegiatan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan visi dan misi serta tupoksi Perangkat Daerah.

6. **Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

   Pimpinan (Kepala Perangkat Daerah) harus mampu mengakomodir unsur–unsur pimpinan secara struktural termasuk staf dengan meningkatkan koordinasi didalam merancang usulan program/kegiatan sehingga tercipta suasana kerjasama yang baik untuk mewujudkan keberhasilan dalam melaksanakan tugas–tugas.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu Perangkat Daerah mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya rencana kerja Perangkat Daerah, dalam hal ini pimpinan akan memahami skala prioritas dengan lebih baik. Rencana kerja juga dapat membantu aparatur dalam Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan dengan baik dan teratur, di samping itu rencana kerja yang tersusun dengan baik, akan menghasilkan pembagian tugas yang baik pula. Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sebagaimana yang telah ditetapkan, adapun usulan Perubahan Rencana Kerja yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar pada Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**100%**	**9.460.026.400**	**10.578.173.695**	**1.118.147.295**
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	9.354.050	9.354.050	-
	Sub Kegiatan :						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.354.050	9.354.050	-
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	7.321.472.808	8.061.075.643	739.602.835
	Sub Kegiatan :						
1	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24 Orang/ Bulan	61 Orang/ Bulan	7.321.472.808	8.061.075.643	739.602.835
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	186.677.500	215.577.500	28.900.000
	Sub Kegiatan :						
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	6.232.000	6.232.000	-
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	78.206.500	80.756.500	2.550.000
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	14.008.000	14.008.000	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7-6**
4	Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	12.441.000	12.441.000	-
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	5.280.000	5.280.000	-
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	1 Laporan	6.480.000	7.000.000	520.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	64.030.000	89.860.000	25.830.000
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	22.750.000	199.045.000	176.295.000
	Sub Kegiatan :						
1	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	18 Unit	28 Unit	22.750.000	37.875.000	15.125.000
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 Unit	8 Unit	-	161.170.000	161.750.000
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.567.212.042	1.566.911.502	(300.540)
	Sub Kegiatan :						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1 Laporan	250.687.858	253.308.858	2.621.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	145.400.000	145.400.000	0
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.171.124.184	1.168.202.644	(2.921.540)
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	352.560.000	526.210.000	173.650.000
	Sub Kegiatan :						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7-6**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 Unit	18 Unit	222.530.000	261.180.000	38.650.000
2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	6 Unit	6 Unit	5.000.000	5.000.000	-
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	73 Unit	83 Unit	75.030.000	110.030.000	35.000.000
4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	150.000.000	100.000.000
2	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100%**	**100%**	**4.662.014.200**	**5.736.982.200**	**1.074.968.000**
2.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	4.662.014.200	5.736.982.200	1.074.968.000
	Sub Kegiatan :						
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	750 Orang	750 Orang	887.388.000	887.388.000	-
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	1060 Orang	1060 Orang	1.970.335.000	1.970.335.000	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7-6**
	dan Sejarah Kebangsaan	Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					
3	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	78 Orang	78 Orang	1.804.291.200	2.879.259.200	1.074.968.000
3	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	**Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik**	**80%**	**80%**	**1.753.846.000**	**1.932.343.000**	**178.497.000**
3.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100%	100%	1.753.846.000	1.932.343.000	178.497.000
	Sub Kegiatan :						
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	65 Orang	65 Orang	7.850.000	7.850.000	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7-6**
		Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	22 Orang	22 Orang	1.743.436.000	1.743.436.000	-
3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2.560.000	181.057.000	178.497.000
4	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif**	**70%**	**70%**	**438.427.500**	**888.427.500**	**450.000.000**
4.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	438.427.500	888.427.500	450.000.000
	Sub Kegiatan :						
1	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran	1 Laporan	1 Laporan	438.427.500	888.427.500	450.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7-6**
	Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					
5	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**Persentase Pembinaan dan pemantauan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**100%**	**100%**	**1.908.040.750**	**2.182.909.268**	**274.868.518**
5.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100%	100%	1.908.040.750	2.182.909.268	274.868.518
	Sub Kegiatan :						
1	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan terlaksananya monitoring dan evaluasi tim satuan petugas ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dalam antisipasi perayaan hari-hari besar keagamaan serta fasilitasi pencegahan penyakit masyarakat guna terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar	1 Laporan	1 Laporan	1.908.040.750	2.182.909.268	274.868.518
6	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase penurunan Konflik Sosial**	**90%**	**90%**	**969.159.000**	**1.239.030.000**	**269.871.000**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
6.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	969.159.000	1.239.030.000	269.871.000
	Sub Kegiatan :						
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	35 Orang	35 Orang	229.243.000	229.243.000	-
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	35 Orang	35 Orang	327.006.000	327.006.000	-
3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi	1 Laporan	1 Laporan	283.670.000	320.270.000	36.600.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7-6**
	Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
4	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	129.240.000	362.511.000	233.271.000
	TOTAL				**19.191.513.850**	**22.557.865.663**	**3.366.351.813**

BAB V
PENUTUP

Catatan penting yang juga mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan adalah apabila hal tersebut memang terjadi, maka semua Perangkat Daerah pada umumnya perlu hati–hati dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) untuk masing–masing program/kegiatan. Unsur-unsur yang ada di Perangkat Daerah hendaknya selalu berkoordinasi dan berkomunikasi serta meningkatkan kebersamaan di dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan tugas-tugas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Anggaran Induk Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar melaksanakan 6 (Enam) Program dengan 11 (Sebelas) Kegiatan dan 30 (Tiga Puluh) Sub Kegiatan. Untuk jumlah pagu belanja daerah sebesar Rp 17.783.407.681,- (Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), dan di dalam anggaran perubahan diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 4.774.457.982,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), sehingga Anggaran Perubahan Tahun 2025 menjadi 6 (Enam) Program dengan 11 (Sebelas) Kegiatan dan 31 (Tiga Puluh Satu) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 22.557.865.663,- (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga). Penambahan anggaran dimaksud untuk melaksanakan program kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

Meskipun demikian, Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah dan instansi–instansi terkait semestinya tetap berupaya melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan, namun selalu waspada terhadap kemungkinan–kemungkinan yang akan terjadi, sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah bisa tercapai. Kaedah–kaedah pelaksanaannya adalah sudah tentu berpedoman kepada peraturan perundang–undangan yang berlaku sebagai landasan hukumnya dan mekanisme yang telah ditetapkan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki oleh masing–masing Perangkat Daerah.

Mengenai rencana tindak lanjut dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar selaku Perangkat Daerah apabila dalam merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan mengalami hambatan-hambatan atau kegagalan, maka akan dievaluasi dan dikaji serta dikoordinasikan, baik kedalam (internal) maupun keluar (eksternal) untuk mengetahui dimana letak kekurangannya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tahun 2025, yang sudah tentu jauh dari sempurna sehingga mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaannya di masa yang akan datang.

Denpasar, 28 Mei 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar,

A.A. Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E.
Pembina Tk. I
NIP. 19720313 199603 1 002

KOTA DENPASAR

RANCANGAN AKHIR

PERUBAHAN RENCANA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA DENPASAR

TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kami dapat menyampaikan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka pelaksanaan misi organisasi. Perubahan Rencana Kerja ini juga dilengkapi dengan indikator kinerja kegiatan dan program sehingga memudahkan untuk mengukur capaian kinerjanya. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja sebagai komitmen kinerja yang hendak dicapai, diajukan sebagai bahan dalam suatu penetapan kinerja sebagai kesepakatan terhadap Perubahan Rencana Kerja.

Melalui Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

Om Santi , Santi, Santi Om.

Denpasar, 28 Mei 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar

Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, SH., M.Si
NIP. 19670418 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		**i**
DAFTAR ISI		ii
BAB. I PENDAHULUAN		1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	3
	1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB. II . EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....		5
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sat.Pol PP Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.....	5
BAB. III . RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR.....		10
	3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan.....	10
BAB.IV . PENUTUP		16

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar yang berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

Di dalam Pasal 12 Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa masalah penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, maka penyusunan Renja Satpol PP perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Kota Denpasar tahun 2021 - 2026, sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka dilakukan penjabaran ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dalam pengukuran kinerja ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu, perjanjian, pengumpulan data dan cara pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja sebagai dokumen perencanaan ini mengakomodasi faktor politis dan aspiratif sehingga secara resmi mengikat seluruh aparat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dalam melaksanakan kegiatan perekonomian dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, disamping untuk penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dilaksanakan dengan memperhatikan Visi Kota Denpasar yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Visi : ***"Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju"*** dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disusun misi antara lain:

1) Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2) Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
3) Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4) Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5) Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Mengacu kepada visi dan misi Kota Denpasar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Denpasar, maka tugas pokok dan fungsinya adalah: "Membantu Walikota menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta Perlindungan Masyarakat"

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar adalah :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
e. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. seharusnya menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mejadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

l. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7)

m. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar 2021 – 2026

n. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar 2021 – 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar adalah untuk memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Perubahan Satpol PP Kota Denpasar Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mencakup :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI TRIWULAN II DAN CAPAIAN RENTRA SKPD
BAB III	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	PENUTUP

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sat.Pol PP Sampai Triwulan I dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Renja Satpol PP Kota Denpasar Tahun 2025. Evaluasi terhadap Renja Satpol PP Kota Denpasar Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sat.Pol PP Tahun 2021-2026. Evaluasi pelaksanaan Renja Sat.Pol PP Kota Denpasar s.d. Triwulan II tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD

s/d Triwulan I Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-5*
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**23.181.821.684**	**22%**	**5.030.828.794**	**18.150.992.890**
1.05.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**18.390.997.304**	**22%**	**4.055.070.582**	**14.335.926.722**
1.05.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang	18.390.997.304	22%	4.055.070.582	14.335.926.722
1.05.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**410.744.000**	**0%**	**0**	**410.744.000**
1.05.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	214 Paket	410.744.000	0%	0	410.744.000
1.05.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**384.769.250**	**22%**	**83.622.906**	**301.146.344**
1.05.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.785.000	0%	0	9.785.000
1.05.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	288.698.750	27%	78.588.906	210.109.844
1.05.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.044.500	0%	0	12.044.500
1.05.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Bacaan	14.640.000	10%	1.524.000	13.116.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-5*
1.05.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8.000.000	0%	0	8.000.000
1.05.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	51.601.000	7%	3.510.000	48.091.000
1.05.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**28.000.000**	**0%**	**0**	**28.000.000**
-	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	75 Unit	28.000.000	0%	0	28.000.000
1.05.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**2.761.309.130**	**28%**	**771.362.306**	**1.989.946.824**
1.05.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	182.450.000	17%	31.258.033	151.191.967
1.05.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.578.859.130	29%	740.104.273	1.838.754.857
1.05.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**1.206.002.000**	**10%**	**120.773.000**	**1.085.229.000**
1.05.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	83 unit	1.117.872.000	11%	117.773.000	1.000.099.000
1.05.01.2.09.05	Sub Kegiata Pemeliharaan Mebel	Jumlah Aset /sarana dan prasarana yang siap digunakan	26 unit	6.280.000	0%	0	6.280.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-5*
1.05.01.2.09.07	Sub Kegiata Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	132 Unit	81.850.000	4%	3.000.000	78.850.000
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan**	90.95%	**642.699.000**	**14%**	**90.870.000**	**551.829.000**
1.05.02.2.01	**Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani**	**500Kasus**	**324.087.000**	**15%**	**49.620.000**	**274.467.000**
1.05.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	46.890.000	10%	4.680.000	42.210.000
1.05.02.2.01.05	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	50 Orang	114.042.000	39%	44.940.000	69.102.000
1.05.02.2.01.02	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 laporan	154.355.000	0%	0	154.355.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-5*
1.05.02.2.01.09	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	8.800.000	0%	0	8.800.000
1.05.02.2.02	**Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani**	**500 Kasus**	**318.612.000**	**13%**	**41.250.000**	**277.362.000**
1.05.02.2.02.03	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan	318.612.000	13%	41.250.000	277.362.000

Berdasarkan TABEL 2.1 di atas, maka konsistensi perencanaan Satpol PP yang menjadi target telah tercapai dengan efektivitas yang cukup baik. Capaian ini didukung oleh faktor pendorong seperti adanya political will pelaksana kegiatan pada masing-masing bidang untuk terus melakukan perbaikan kualitas perencanaan yang diterjemahkan dalam upaya-upaya perbaikan yang dilakukan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama perencanaan antara perencanaan dan pelaksana kegiatan. Dukungan pelaksana kegiatan sangat penting khususnya ditandai dengan meningkatnya pemahaman akan pentingnya perencanaan. Jika sebelumnya sebagian besar menganggap perencanaan sebagai sebuah rutinistas formal semata, tetapi sekarang pelaksana kegiatan sudah menyadari pentingnya penyusunan perencanaan yang baik sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan tugas

Namun berdasarkan Hasil Evaluasi berdasarkan Tabel 2.1 Tersebut, terdapat beberapa kegiatan yang serapannya masih dibawah 25% yaitu :

1. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
2. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
5. Pemeliharaan Mebel
6. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
7. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Kelemahan dalam perencanaan pembangunan daerah pelaksanaan Renstra Sat.Pol PP dapat diidentifikasi diantaranya sebagai berikut :

a. Permasalahan pada proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah yaitu :

1) adanya keterlambatan dalam pelaksanaan tahapan penyusunan perencanaan. Dalam pelaksanaan Renstra, masih terdapat keterlambatan pelaksanaan tahapan kegiatan.

2) Penyusunan renja SKPD yang belum sesuai dengan ketentuan. Hal ini banyak disebabkan oleh kelemahan koordinasi sehingga penyusunan hanya menjadi beban pejabat yang menangani perencanaan bukan hasil rumusan tim penyusun yang melibatkan semua bidang-bidang yang ada di Sat.Pol PP

3) Kualitas indikator kinerja pada Satpol PP yang masih banyak belum memenuhi kriteria. Kondisi diakibatkan belum dipahaminya kinerja dan penyusunan indikator kinerja sehingga hasilnya indikator kinerja yang dipasang belum menggambarkan kinerja yang dicapai dari kegiatan/program yang dilaksanakan.

4) Perencanaan belum disusun secara cermat dengan mempertimbangkan kesiapan pendukung pelaksanaan kegiatan seperti Personil pendukung, sarana prasarana dan perencanaan detilnya sehingga banyak kegiatan tidak terlaksana dengan baik

b. Permasalahan pada pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada Satpol PP yaitu :

1) Belum terlaksananya pengendalian penyusunan kebijakan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan baik sehingga masih ditemukan inkonsistensi program/kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen perencanaan dan dokumen anggaran.

2) Belum terbiasanya Satpol PP menyusun jadwal kerja yang menggambarkan tahapan kegiatan dan target penyelesaiannya sesuaid tahapan sehingga keterlambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tidak segera teridentifikasi untuk dicari solusi agar target kegiatan tercapai dengan baik.

c. Permasalahan pada evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah yaitu :

1) Laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah tidak tersusun dengan baik karena banyak kegiatan yang tidak terukur sebagai dampak belum konsistennya indikator kinerja.

2) Evaluasi baru pada tahap pengukuran kinerja belum mampu menyediakan rekomendasi perbaikan karena minimnya penyajian data dan identifikasi permasalahan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SAT.POL.PP DENPASAR

3.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perubahan Rencana kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu perangkat daerah mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya rencana perangkat daerah, dalam hal ini pimpinan akan memahami skala prioritas dengan lebih baik. Rencana kerja juga dapat membantu aparatur dalam perangkat daerah melaksanakan kegiatan dengan baik dan teratur, disamping itu rencana kerja yang tersusun dengan baik, akan menghasilkan pembagian tugas yang baik pula. Sehubungan diuraikan dalam Bab III, bahwa dalam 5 tahun ke depan tujuan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

Dalam pelaksanaan pembangunan urusan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2025 ini seluruh kegiatan diarahkan untuk mendukung kesuksesan misi, visi Kota Denpasar dan misi visi Walikota – Wakil Walikota terpilih serta merealisasikan target pada urusan wajib pelayanan dasar, untuk lebih jelasnya pada tabel dibawah ini akan diauraikan lebih lanjut keterkaitan sasaran, indikator sasaran, target yang ditetapkan pada anggaran perubahan tahun 2025 serta program dan kegiatan pendukungnya disertai dengan sumber pendanaannya

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan ini, nantinya dijadikan sebagai dasar penyusunan perjanjian kinerja dan rencana aksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2025

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertamba/ (Berkurang)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**28.535.307.575**	**30.285.863.997**	**1.750.556.422**
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**100%**	**27.892.608.575**	**29.516.374.997**	**1.623.766.422**
1.05.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**22.114.991.909**	**23.443.758.331**	**1.328.766.422**
1.05.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang	194 Orang	22.114.991.909	23.443.758.331	1.328.766.422
1.05.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi**	**100%**	**100%**	**410.744.000**	**410.744.000**	**-**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertamba/ (Berkurang)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		kepegawaian perangkat daerah					
1.05.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	229 Paket	214 Paket	410.744.000	410.744.000	-
1.05.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**384.769.250**	**384.769.250**	**-**
1.05.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.785.000	9.785.000	-
1.05.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	288.698.750	288.698.750	-

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertamba/ (Berkurang)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
1.05.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.044.500	12.044.500	-
1.05.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Bacaan	3 Bacaan	14.640.000	14.640.000	-
1.05.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000	8.000.000	-
1.05.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	51.601.000	51.601.000	-
1.05.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**100%**	**100%**	**28.000.000**	**316.000.000**	**288.000.000**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertamba/ (Berkurang)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		Pemerintah Daerah					
-	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	14 Unit	75 Unit	28.000.000	316.000.000	288.000.000
1.05.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**3.748.101.416**	**3.755.101.416**	**7.000.000**
1.05.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	182.450.000	189.450.000	7.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertamba/ (Berkurang)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
1.05.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	3.565.651.416	3.565.651.416	-
1.05.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**1.206.002.000**	**1.206.002.000**	**-**
1.05.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	83 unit	83 unit	1.117.872.000	1.117.872.000	-
1.05.01.2.09.05	Sub Kegiata Pemeliharaan Mebel	Jumlah Aset /sarana dan prasarana yang siap digunakan	26 unit	26 unit	6.280.000	6.280.000	-
1.05.01.2.09.07	Sub Kegiata Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	132 Unit	132 Unit	81.850.000	81.850.000	-

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertamba/ (Berkurang)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
							-
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan**	90.95%	90.95%	**642.699.000**	**769.489.000**	**126.790.000**
1.05.02.2.01	**Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani**	**500 Kasus**	**500 Kasus**	**324.087.000**	**322.377.000**	**- 1.710.000**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertamba/ (Berkurang)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
1.05.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	1 dokumen	46.890.000	46.890.000	-
1.05.02.2.01.05	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	50 Orang	50 Orang	114.042.000	114.042.000	-

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertamba/ (Berkurang)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
1.05.02.2.01.02	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	250 kasus	250 kasus	154.355.000	152.645.000	- 1.710.000
1.05.02.2.01.09	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan	8.800.000	8.800.000	-

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertamba/ (Berkurang)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
1.05.02.2.02	**Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani**	**500 Kasus**	**500 Kasus**	**318.612.000**	**447.112.000**	**128.500.000**
1.05.02.2.02.03	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan	1 Laporan	318.612.000	447.112.000	128.500.000

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tahun 2025 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2025 penyusunannya dilakukan berdasarkan RPJMD daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Evaluasi Triwulan II Tahun 2025 Renja ini merupakan acuan / pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja pemerintah daerah Kota Denpasar. Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2025 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak berkepentingan.

Denpasar, 28 Mei 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, SH., M.Si
NIP. 19670418 199703 1 002

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2025

DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR

TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3/1187/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan rencana kerja Perangkat Daerah, sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perangkat daerah untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan tugas dan fungsinya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Kota Denpasar Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);

7. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencan Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Juni 2025

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 19 JUNI 2025
NOMOR : 100.3.3/1187/HK/2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

1. PERUBAHAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
2. PERUBAHAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
3. PERUBAHAN RENJA RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR
4. PERUBAHAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2025
5. PERUBAHAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
6. PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
7. PERUBAHAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
8. PERUBAHAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
9. PERUBAHAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
10. PERUBAHAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2025
11. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
12. PERUBAHAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
13. PERUBAHAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
14. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
15. PERUBAHAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
16. PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
17. PERUBAHAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
18. PERUBAHAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2025
19. PERUBAHAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
20. PERUBAHAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
21. PERUBAHAN RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
22. PERUBAHAN RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
23. PERUBAHAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
24. PERUBAHAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
25. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

26. PERUBAHAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
27. PERUBAHAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
28. PERUBAHAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
29. PERUBAHAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
30. PERUBAHAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
31. PERUBAHAN RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
32. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
33. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2025
34. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2025
35. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2025
36. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
37. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2025 dilakukan berdasarkan rancangan program kegiatan yang akan dilaksanakan dan hasil evaluasi kinerja kegiatan sebelumnya serta mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Akhirnya, mengingat berbagai keterbatasan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini, maka kami sangat mengharapkan masukan, usul, dan saran dari pihak-pihak terkait untuk kesempurnaan laporan pada tahun berikutnya.

Om Santih, Santih, Santih Om

Denpasar, 19 Juni 2025
Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar

I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty, SS,M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19720223 199603 2 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar isi Ii

BAB I : **PENDAHULUAN** 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II : **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025**
..... 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah TRIWULAN I Tahun 2025 11
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 20

BAB III : **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR**..... 21
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan 21

BAB IV : **PENUTUP**..... 30
4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan 30
4.2 Rencana Tindak Lanjut 31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepemerintahan yang lebih berdaya dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan, maka disusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2025.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial untuk periode 2025, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Denpasar, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya Renja ini menjadi acuan seluruh unit kerja Dinas Sosial dalam menyusun Renja unit kerja masing-masing, sebagai implementasi yang lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Denpasar.

Renja ini merupakan gambaran garis besar dari langkah-langkah pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dirumuskan pada tujuan dan sasaran untuk setiap program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Denpasar yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Berdasarkan hirarki perencanaan, Rencana Kerja Dinas Sosial 2025 dan pelaksanaan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara RepublikmIndonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodetifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 5 Tahun 2021);

26. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
27. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 24);
28. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2025.

Tujuan disusunnya Renja Perubahan adalah :

1) Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2) Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
3) menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Triwulan I Perangkat Daerah Tahun 2025

Bab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Bab III. Rencana Kerja Dan Pendanaan

Bab ini memuat : Tujuan Sasaran, Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Rancangan Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

Bab IV. Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Renja Perangkat Daerah, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi renja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Sosial Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dinas Sosial Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab hingga akhir tahun 2023. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

1. **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

   Dalam Pelaksanaan TA. 2025, secara keseluruhan Program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan walaupun masih adanya terdapat silpa anggaran dari pelaksanaan kegiatan.

2. **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

   Dari Empat (4) program dan sepuluh (10) kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Denpasar dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan dengan capaian fisik sebesar 17,43% sedangkan keuangan realisasinya sebesar 9,94% pada Triwulan I T.A 2025.

3. **Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

   Dalam pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan target sudah dapat dipenuhi.

4. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan**

   Faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah :

   - Masih terbatasnya jangkauan pelayaan kesejahteraan sosial bagi PPKS
   - Belum optimlaknya peran masyarakat, dunia usaha dalam penyelenggaraan pelaksanaan kesejahteraan sosial
   - Masih dominannya peran pemerintah dalam pelayanan program pemberdayaan PPKS dan PSKS sehingga mengurangi asensi pemberdayaan PPKS dan PSKS sehingga mengurangi pemberdayaan sosial itu sendiri

5. **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**

   Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang telah ditetapkan yaitu dimana secara tidak langsung kita dapat melihat bahwa peningkatan PPKS yang tertangani dan penurunan jumlah KK Miskin dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. **Kebijakan /tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

   Strategi pemecahan masalahnya adalah :

   - Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial PPKS
   - Meningkatkan kualitas pelayanan PPKS
   - Meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan serta meningkatkan peran serta masyarakat, orsos/LSM, dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial

Tabel 2.1
Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
						Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7		8 =6-7
1	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100**	**15.021.742.957**	**19,48**	**2.550.767.037**	**12.470.975.920**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**10.340.168.392**	**20,71**	**1.588.192.206**	**7.667.646.408**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	10.340.168.392	20,71	1.588.192.206	7.667.646.408

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**446.873.920**	**25,16**	**138.095.500**	**583.208.250**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	4.016.319	0,00	-	43.619.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	285.375.930	22,57	103.695.500	459.363.250
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	62.805.644	43,16	17.100.000	39.616.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	49.874.567	45,65	16.730.000	36.650.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	44.801.460	14,39	570.000	3.960.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan**	**100**	**3.588.842.212**	**26,84**	**764.713.731**	**3.153.321.868**

			Pemerintahan Daerah					
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	196.775.040	29,99	85.664.367	285.600.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	3.392.067.172	23,68	679.049.364	2.867.721.868
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**645.858.433**	**5,21**	**59.765.600**	**710.764.000**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	433.197.908	15,62	59.765.600	382.744.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	192.163.125	0,00	-	125.020.000

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	20.497.400	0,00	-	203.000.000
		Program Pemberdayaan Sosial	**Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial**	**100**	**1.083.799.293**	**20,02**	**233.876.600**	**1.233.778.000**
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota**	**100**	**1.083.799.293**	**20,02**	**233.876.600**	**1.233.778.000**
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100	-	21,16	9.000.000	42.525.000

		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100	1.083.799.293	18,88	224.876.600	1.191.253.000
		Program Rehabilitasi Sosial	**Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial**	**100**	**3.780.911.751**	**3,84**	**72.709.000**	**1.482.164.000**
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**100**	**2.721.158.691**	**0,00**	**-**	**127.200.000**
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100	35.577.630	0,00	-	18.000.000

		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100	7.320.500	0,00	-	97.200.000
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	2.713.838.191	0,00	-	12.000.000
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**100**	**1.059.753.060**	**7,69**	**72.709.000**	**1.354.964.000**

		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100	157.024.725	11,81	6.885.000	58.320.000
		Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	390.084.262	2,84	22.044.000	776.744.000
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100	512.644.073	8,42	43.780.000	519.900.000
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS**	**100**	**465.986.200**	**3,21**	**21.000.000**	**1.637.025.000**
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100**	**465.986.200**	**3,21**	**21.000.000**	**1.637.025.000**

		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	100	91.099.400	0,00	-	34.725.000
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	100	241.786.800	9,40	18.000.000	191.400.000
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	133.100.000	0,21	3.000.000	1.410.900.000
		Program Penanganan Bencana	**Persentase Penanganan bencana**	**100**	**268.839.107**	**3,17**	**1.200.000**	**53.565.000**
		Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	**Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**100**	**23.059.575**	**0,00**	**-**	**15.750.000**
		Penyediaan Makanan	jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	100	23.059.575	**0,00**	-	15.750.000

		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota**	**100**	**245.779.532**	**3,17**	**1.200.000**	**37.815.000**
		Koordinasi sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	245.779.532	3,17	1.200.000	37.815.000

Keterangan : Pagu Induk yang dipergunakan dalam tabel diatas adalah **Induk Pergeseran Ke-II (Kedua)** Tahun 2025

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Penentuan Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tupoksi, kinerja pelayanan dan juga tantangan ekternal. Isu trategis merupakan keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan ekonomi dan sosial di berbagai level.

Berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk, kemiskinan masih menjadi permasalahan utama yang belum terselesaikan dan masih terus dicari solusinya oleh hampir seluruh wilayah termasuk oleh Denpasar. Adapun isu-siu tersebut yaitu :

1. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Belum Optimalnya Partisipasi dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
3. Jangkauan, mutu, dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang merata di seluruh wilayah
4. Masalah sumber daya manusia masih kurang memadai.

BAB. III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yeng telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Sosial Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan sekretariat Dinas Sosial Kota Denpasar.

Rencana kerja Dinas Sosial Kota Denpasar dalam Perubahan Tahun 2025 tetap mengacu pada menjadi Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar maupun Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar. Adapun Misi, tujuan serta sasaran dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran

Nomor	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Renja 2025	Target Renja Perubahan 2025
1	Meningkatkan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase (%) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terlayani	100%	100%

Dalam mencapai sasaran dan Tujuan yang sebagaimana yang telah ditetapkan, adapun Rencana Kerja Perubahan yang akan di lakukan oleh bidang- bidang maupun sekretariat yang terlah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2025. Berkaitan dengan program/kegiatan yang akan diusulkan tersebut, berikut lebih rinci dijabarkan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2

Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2025

No	Sasaran	Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran 2025		Bertambah/Berkurang
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8 =6-7
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			19.863.503.175	23.310.214.829	3.446.711.654
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			19.863.503.175	23.310.214.829	3.446.711.654
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	15.456.971.175	18.243.552.829	2.786.581.654

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**10.339.929.403**	**11.556.229.037**	**1.321.601.404**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/Bulan	10.339.929.403	11.661.530.807	**1.321.601.404**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**583.208.250**	**582.647.750**	**(560.500)**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.619.000	43.067.000	(560.500)
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	459.363.250	459.354.750	(8.500)
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	39.616.000	39.616.000	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.650.000	36.650.000	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.960.000	3.960.000	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**3.823.069.522**	**3.734.244.562**	**- 88.824.960**
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	285.600.000	285.600.000	-

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.537.469.522	3.537.469.522	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**710.764.000**	**2.176.304.750**	**1.465.540.750**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	382.744.000	382.840.000	96.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	261 Unit	125.020.000	125.020.000	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	203.000.000	1.668.444.750	1.465.444.750
		Program Pemberdayaan Sosial	**Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial**	**100%**	**1.233.778.000**	**1.597.128.000**	**363.350.000**
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**1.233.778.000**	**1.597.128.000**	**363.350.000**

		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	42.525.000	42.525.000	-
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	1.191.253.000	1.554.603.000	363.350.000
		Program Rehabilitasi Sosial	**Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial**	**100%**	**1.482.164.000**	**1.715.044.000**	**232.880.000**
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**100%**	**109.200.000**	**121.200.000**	**12.000.000**
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	18.000.000	18.000.000	-

		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang	97.200.000	109.200.000	12.000.000
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	12.000.000	12.000.000	-
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**100%**	**1.354.964.000**	**1.575.844.000**	**220.880.000**
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	58.320.000	58.320.000	-

		Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	550 Orang	776.744.000	997.624.000	220.880.000
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	4100 Orang	519.900.000	519.900.000	-
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS**	**100%**	**1.637.025.000**	**1.700.925.000**	**63.900.000**
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**1.637.025.000**	**1.700.925.000**	**63.900.000**
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	9687 Orang	34.725.000	34.725.000	-
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	1702 Orang	191.400.000	191.400.000	-

		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1157 Orang	1.410.900.000	1.474.800.000	63.900.000
		Program Penanganan Bencana	**Persentase pemenuhan penanganan bencana**	**100%**	**53.565.000**	**53.565.000**	**-**
		Kegiatan: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**100%**	**15.750.000**	**15.750.000**	**-**
		Penyediaan Makanan	jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	50 Orang	15.750.000	15.750.000	**-**
							-
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota**	**100%**	**37.815.000**	**37.815.000**	**-**

		Koordinasi sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	37.815.000	37.815.000	-

Keterangan : Pagu Anggaran Sebelum Perubahan: DPA Induk Pergeseran Ke-IV Th 2025

BAB IV
PENUTUP

Pada dasarnya kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar merupakan kegiatan yang menyentuh langsung terhadap aspek-aspek kehidupan sosial masyarakat dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dituangkan didalam Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 yang memuat 5 (lima) Program 10 (sepuluh) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan yang telah disesuaikan dengan visi misi Kota Denpasar.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Denpasar Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran

4.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Denpaasar Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan memiliki tujuan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1) Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Sosial Kota Denpasar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a) melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b) menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2) Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Denpasar, 19 Juni 2025
Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar

I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty, SS,M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19720223 199603 2 003

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025



DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena atas berkatNyalah akhirnya pembuatan **Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja)** Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya

Kami menyadari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar masih perlu penyempurnaan oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja ini. Semoga Perubahan Rencana Kerja ini bermanfaat dan tak lupa kepada semua pihak yang telah memberikan masukan-masukan sehingga tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini, kami sampaikan terima kasih.

Denpasar, 28 Mei 2025
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

I Putu Sandika S.E, M.Si
NIP. 19680306 20000 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…… i

DAFTAR ISI…….. ii

DAFTAR TABEL…….. iii

BAB I PENDAHULUAN…….. 1

1.1. Latar belakang…… 1

1.2. Landasan hukum…… 2

1.3. Maksud dan tujuan…… 5

1.4. Sistematika Penulisan……..6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR……..7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dan Capaian Renstra DTKSK…… 8

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR……17

BAB IV PENUTUP……..25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sampai dengan Triwulan I Tahun 2024.....8

Tabel 3.1 Rencana Program/ Kegiatan dan Pendanaan Dinas Tenaga kerja dan sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2025.....17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik di bandingkan keadaan sebelumnya. Salah satu proses pembangunan dilaksanakan melalui optimalisasi Sumber Daya Manusia. Optimalisasi Sumber Daya Manusia mempunyai artibahwa pembangunan diharapkan dapat mendayagunakan Sumber Daya Manusia (SDM) agar memiliki nilai kemanfaatan yang lebih bagi masyarakat.

Pencapaian tujuan pembangunan yang dilakukan secara bertahap mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Perubahan Renja pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi dilakukan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat tercapainya kualitas kinerja perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Denpasar dalam bidang ketenagakerjaan.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan melalui program dan kegiatan. Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Denpasar yaitu : Visi : **“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”**

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan Misi Kota Denpasar sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance)
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

6. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
7. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana.
8. Kejujuran dan spirit sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menujutata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance)
9. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
10. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskankebudayaan Bali.

Sebagai dokumen rencana tahunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan dapat mengetahui sampai sejauh mana capaian kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286) ;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perncanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Prencanaan,Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah, serta Tata cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 1312)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114)
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, TambahanLembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;
20. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 53);
21. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dimaksud untuk mempertegas arah program dan kegiatan tahun 2025 yang akan dilakukan dalam rangka mengisi pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan di kota Denpasar. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Tahun 2025 diharapkan nantinya tujuan dari program/kegiatan yang direncanakan dapat berjalan lebih terarah, efisien dan efektif sesuai dengan visi misi sebagaimana yang telah digariskan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu,terarah dan terukur.
3. Menjadi tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar.
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Bab IV Penutup

Lampiran

Tabel

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dann Sertifikasi Kompetinsi Kota Denpasar

Rancangan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dann Sertifikasi Kompetinsi Kota Denpasar tahun 2025 disusun berorientasi pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Adapun program dan kegiatan tahun 2025 terdiri dari **4 (Empat) program, 14 (Empat Belas) kegiatan dan 30 (Tiga Puluh) sub kegiatan** dengan pagu sebesar **Rp**. **11.263.339.823**.,- dengan perincian seperti tabel berikut (tabel 2.1)

Tabel 2.1
Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
	Urusan : Ketenagakerjaan						
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**8.588.010.023**	**18.83%**	**1.617.839.227**	**6.970.170.796**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN**	**12 Bulan**	**6.025.924.147**	**20,55%**	**1.238.214.303**	**4.787.709.844**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/Bulan	6.025.924.147	20,55%	1.238.214.303	4.787.709.844
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah**	**50 Laporan**	**7.800.000**	**-**	**-**	**7.800.000**

	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijkan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	50 Laporan	7.800.000	-	-	7.800.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100%**	**202.196.700**	**25.68%**	**51.929.870**	**150.266.830**
	Penyediaan komponen instalsi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	6.201.000	32.36%	2.006.880	4.194.120
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	50.200.000	63.83%	32.044.820	18.155.180
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	19.532.600	23%	4.492.170	15.040.430
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	66.739.100	15.25%	10.176.000	56.563.100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	14.100.000	22.77%	3.210.000	10.890.000

	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	45.424.000	-	-	45.424.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah siap pakai**	**100%**	**265.190.500**	-	-	**265.190.500**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	190.000.000	-	-	190.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	75.190.500	-	-	75.190.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**1.605.508.676**	**18.32%**	**294.185.654**	**1.311.323.022**
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	172.843.500	10.69%	18.480.800	154.362.700
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	146.400.000	15.72%	23.018.681	123.381.319

	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	207.941.000	11.25%	23.395.000	184.546.000
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1.078.324.176	21.26%	229.291.173	849.033.003
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah siap pakai**	**100%**	**481.390.000**	**7%**	**33.509.400**	**447.880.600**
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan pajaknya	17 Unit	285.140.000	10.50%	29.929.400	255.210.600
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Paket	62.850.000	6%	3.580.000	59.270.000
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	129.400.000	-	-	129.400.000

	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantordan Bangunan Lainnya	3 Unit	4.000.000	-	-	4.000.000
2	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi**	**89%**	**1.335.031.600**	**0.46%**	**6.160.800**	**1.328.870.800**
		Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	**93%**				
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**Jumlah Tenaga Kerja yang Terkompetensi**	**470 Orang**	**1.272.200.000**	-	-	**1.272.200.000**
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	470 Orang	1.272.200.000	-	-	1.272.200.000
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Pentingnya**	**25 %**	**16.130.000**	**36.33%**	**5.860.800**	**10.269.200**

		Produktivitas di LPKS dan Perusahaan					
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	16.130.000	36.33%	5.860.800	10.269.200
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	**Jumlah LPKS yang memenuhi Syarat sebagai Lembaga Pelatihan**	**50 LPKS**	**46.701.600**	**0.64%**	**300.000**	**46.401.600**
	Pembinaan Lembaga Pelatihan KerjaSwasta (LPKS)	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	50 LPKS	46.701.600	0.64%	300.000	46.401.600
3	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan**	**37%**	**945.086.200**	**28%**	**265.606.100**	**679.480.100**
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Informasi Pasar Kerja**	**8.000 Orang**	**531.588.700**	**49.58%**	**263.606.100**	**267.982.600**
	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui JOB FAIR/ Bursa Kerja	425 Orang	295.131.200	89.32%	263.606.100	-

	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	533 Orang	236.457.500	-	-	236.457.500
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan**	**20%**	**402.565.000**	**2%**	**2.000.000**	**400.565.000**
	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	85 Orang	247.982.500	-	-	247.982.500
	Penyuluhan danBimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	450 Orang	56.800.000	-	-	56.800.000
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan Disabilitas	25 Orang	97.782.500	2%	2.000.000	95.782.500
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia Mempergunakan Aplikasi Rekom Paspor PMI**	**20%**	**10.932.500**	**-**	**-**	**10.932.500**

	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan Kompetensinya	350 Orang	10.932.500	-	-	10.932.500
4	**Program Hubungan Industrial**	**Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)**	**63%**	**395.212.000**	**4%**	**16.815.000**	**378.397.000**
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan	**61%**				
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perselisihan Kerja yang diselesaikan**	**35 Perkara**	**205.624.000**	**7%**	**15.455.000**	**190.169.000**
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	35 Perkara	26.574.000	45.63%	12.125.000	14.449.000

	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	55 Perusahaan	179.050.000	1.86%	3.330.000	175.720.000
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian KerjaBersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroprasi dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Sarana HI dan Kesejahteraan Pekerja**	**160 Perusahaan**	**189.588.000**	**0.72%**	**1.360.000**	**188.228.000**
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sertapengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	189.588.000	0.72%	1.360.000	188.228.000

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar untuk usulan anggaran perubahan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.1,dimana ada **4 Program**, **14 Kegiatan**, dan **30 Sub Kegiatan**.

Tabel 3.1
Rencana Program dan Pendanaan
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2025

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
	Urusaan : Ketenagakerjaan						
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**8.588.010.023**	**10.460.978.220**	**1.872.968.197**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**6.025.924.147**	**7.567.597.520**	**1.541.673.373**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/ Bulan	54 Orang/ Bulan	6.025.924.147	7.567.597.520	1.541.673.373

	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah**	**50 Laporan**	**50 Laporan**	**7.800.000**	**7.800.000**	**-**
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijkan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	50 Laporan	50 Laporan	7.800.000	7.800.000	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**202.196.700**	**202.196.700**	**-**
	Penyediaan komponen instalsi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	6.201.000	6.201.000	-
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	50.200.000	50.200.000	-
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	2 Paket	19.532.600	19.532.600	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	66.739.100	66.739.100	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	14.100.000	14.100.000	-

	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	45.424.000	45.424.000	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah siap pakai**	**100%**	**100%**	**265.190.500**	**265.190.500**	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit	190.000.000	190.000.000	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit	75.190.500	75.190.500	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**1.605.508.676**	**1.936.803.500**	**331.294.824**
	Penyediaan jasasurat menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1 Laporan	172.843.500	172.843.500	-
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	146.400.000	146.400.000	-
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	207.941.000	207.941.000	-

	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.078.324.176	1.409.619.000	331.294.824
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah siap pakai**	**100%**	**100%**	**481.390.000**	**481.390.000**	-
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	17 Unit	17 Unit	285.140.000	285.140.000	-
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Paket	5 Paket	62.850.000	62.850.000	-
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah GedungKantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	129.400.000	129.400.000	-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	4.000.000	4.000.000	-

2	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Besaran TenagaKerja Yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi**	**89%**	**89%**	**1.335.031.600**	**1.335.031.600**	**-**
		Besaran TenagaKerja Yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	**93%**	**93%**			
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**Jumlah Tenaga Kerja yang Terkompetensi**	**470 Orang**	**470 Orang**	**1.272.200.000**	**1.272.200.000**	**-**
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Keterampilan bagiPencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	470 Orang	470 Orang	1.272.200.000	1.272.200.000	-
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Pentingnya Produktivitas di LPKS dan Perusahaan**	**25%**	**25%**	**16.130.000**	**16.130.000**	**-**
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	16.130.000	16.130.000	-
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	**Jumlah LPKS yang memenuhi Syarat sebagai Lembaga Pelatihan**	**50 LPKS**	**50 LPKS**	**46.701.600**	**46.701.600**	**-**

	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	50 LPKS	50 LPKS	46.701.600	46.701.600	-
3	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan**	**37%**	**37%**	**945.086.200**	**945.086.200**	-
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Informasi Pasar Kerja**	**8.000 Orang**	**8.000 Orang**	**531.588.700**	**531.588.700**	-
	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui JOB FAIR/ Bursa Kerja	425 Orang	425 Orang	295.131.200	295.131.200	-
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	533 Orang	533 Orang	236.457.500	236.457.500	-
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan**	**20%**	**20%**	**402.565.000**	**402.565.000**	-
	Pelayanan AntarKerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	85 Orang	85 Orang	247.982.500	247.982.500	-
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	450 Orang	450 Orang	56.800.000	56.800.000	-

	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan Disabilitas	25 Orang	25 Orang	97.782.500	97.782.500	-
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia Mempergunakan Aplikasi Rekom Paspor PMI**	**20 %**	**20 %**	**10.932.500**	**10.932.500**	-
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan Kompetensinya	350 Orang	350 Orang	10.932.500	10.932.500	-
4	**Program Hubungan Industrial**	**Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)**	**63%**	**63%**	**395.212.000**	**395.212.000**	-
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan	**61%**	**61%**			
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perselisihan Kerja yang diselesaikan**	**35 Perkara**	**35 Perkara**	**205.624.000**	**205.624.000**	-

	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	35 Perkara	35 Perkara	26.574.000	26.574.000	-
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	55 Perusahaan	55 Perusahaan	179.050.000	179.050.000	-
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroprasi dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Sarana HI dan Kesejahteraan Pekerja**	**160 Perusahaan**	**160 Perusahaan**	**189.588.000**	**189.588.000**	-
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	5 Laporan	189.588.000	189.588.000	-

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)tahun 2021-2026.

Agar program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dengan berbagai hambatan dan kendala, mampu meningkatkan capaian kinerja secara keseluruhan yang lebih optimal, seyogyanya mendapatkan perhatian dan prioritas yang baik dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun pendanaan yang memadai. Disamping itu program dan kegiatan ini harus menitik beratkan pada pelayanan kepada masyarakat secara langsung di bidang program kegiatan non pelayanan dasar.

Demikian Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 disusun, semoga dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Denpasar di Bidang Ketenagakerjaan, serta mampu memberikan kinerja yang lebih optimal.

Sekian dan Terimakasih

Denpasar, 28 Mei 2025
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

I Putu Sandika S.E, M.Si
NIP. 19680306 20000 1 007

PEMERINTAHAN KOTA DENPASAR
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
Jl. Gatot Subroto VI/J No. 32 Denpasar Telp (0361) 9075666/9075751

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓			
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	✓			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	✓			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	✓			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		✓	Tidak Ada Usulan saat Musrenbang Kecamatan	
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing – masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota	✓			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kotatelah r	✓			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kotayang telah disyahkan.	✓			

Denpasar, 28 Mei 2025
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

I Putu Sandika S.E, M.Si
NIP. 19680306 20000 1 007

RANKHIR RENJA PERUBAHAN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR



(0361) 428380

kb.denpasarkota.go.id

WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/2761/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar;

Dipindai dengan CamScanner

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);

6. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);

7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu yaitu :

a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2025;

b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar;

c. menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2025;

d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2025;

e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 November 2023

An. Walikota Denpasar
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar,

Dra. I Gusti Agung Sri Wetrawati, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311 199503 2 001

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2023
NOMOR : 188.45 / 2761/ HK/ 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

Penasehat :
1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar

Pembina :
1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Anggota :
1. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dipindai dengan CamScanner

2. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Data Dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahtraan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. Jabatan Fungsional Tertentu Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

An. Walikota Denpasar
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar,

Dra. I Gusti Agung Sri Wetrawati, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311 199503 2 001

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR : 188.45 /2761/ HK / 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hayang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Wara Nugraha-Nya, Rankhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2025 telah kami susun.

Rankhir Renja Perubahan Tahun 2025 ini bersifat menyeluruh dan terukur serta menyelaraskan rencana yang dihasilkan melalui rapat perencanaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar. Penetapan Rankhir Rencana Kerja Perubahan TA 2025 ini menjadi produk hukum dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

Namun dengan segala keterbatasan, kami menyadari bahwa Rankhir Renja Perubahan Tahun 2025 ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran dan kritik yang dapat kami pergunakan untuk melakukan review sehingga Renja ini semakin baik dan lengkap.

Denpasar, 10 Juni 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Denpasar,

Dra I Gusti Agung Sri Wetrawati, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19660311 199503 2 001

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……. I

LAMPIRAN …… i

KATA PENGANTAR ……... ii

DAFTAR ISI …….. iii

BAB I PENDAHULUAN …….. 1

I.1 Latar Belakang ……. 1

I.2 Landasan hukum ... ……. 4

I.3 Maksud dan tujuan…… 9

I.4 Sistematika …… 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 11

2.2 Kendala dan Permasalahan dalam Pelaksanaan Renja 23

2.3 Kebijakan/ tindakan perencanaan dan pengangaran 23

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,PENEGNDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 25

BAB IV PENUTUP …….. 37

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perwujudan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak merupakan salah satu indikator dalam pencapaian tujuan pembangunan karena perempuan dan anak merupakan aset dan potensi pembangunan. Laki laki dan perempuan, serta anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak untuk bisa mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat pembangunan yang setara disesuaikan dengan pengalaman, kebutuhan dan permasalahan masing-masing sehingga mereka mendapatkan keadilan dan kesetaraan.

Untuk mengetahui apakah pembangunan manusia telah setara antara laki-laki dan perempuan, maka digunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menggunakan dimensi yang sama dengan IPM, tetapi telah memperhitungkan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil kesebjangan antara IPM dan IPG menunjukkan bahwa semakin kecil pula kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah penghitungan ukuran pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan atau kesenjangan gender. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Denpasar tahun 2014 hingga tahun 2024 secara umum mengalami peningkatan. Namun, peningkatan tersebut belum dapat mencapai angka yang memperlihatkan kesetaraan pembangunan perempuan dan laki-laki (belum mencapai angka mutlak 100). Akan tetapi, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Bali dan Nasional (Indonesia), nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Denpasar lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan target Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Denpasar selalu melebihi target selama kurun waktu tahun 2019–2023. Hal tersebut menandakan bahwa capaian kinerja pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Denpasar cukup baik.

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Denpasar tahun 2014 hingga tahun 2019 secara umum mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Bali dan Nasional

(Indonesia), nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Denpasar lebih rendah. Hal ini menggambarkan partisipasi perempuan Kota Denpasar di bidang sosial, politik, dan ekonomi masih belum optimal jika dibandingkan perempuan Provinsi Bali dan Indonesia secara umum. Adanya pandemi *covid-19* berpotensi semakin memperburuk kondisi pemberdayaan perempuan karena ekonomi nasional terkena dampak yang signifikan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan untuk menstimulasi perempuan untuk dapat berperan lebih aktif di bidang sosial, politik, dan ekonomi termasuk mensiasati bagaimana mendorong peran aktif perempuan dimasa pandemi.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, utamanya kasus kekerasan seksual anak. Hanya sebagian kecil kasus kekerasan yang dilaporkan, karena adanya anggapan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah masalah domestik dalam keluarga. Selain itu faktor ketidaktahuan dan sulitnya akses menyebabkan masyarakat enggan untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi. Walaupun ada jaminan perundang-undangan yang melindungi warga Negara khususnya perempuan dan anak namun kasus perempuan dan anak semakin bertambah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mempunyai hak untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial, kesehatan, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan, menjelaskan bahwa anak dalam situasi dan kondisi tertentu seperti anak korban penyalahgunaan narkotika, anak pengungsi, anak dalam situasi konflik, anak korban jaringan terorisme, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak dengan perilaku sosial menyimpang, anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait orang tuanya wajib dilindungi oleh negara.

Pemenuhan Hak Anak merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar. Dalam Bidang Pemenuhan

Hak Anak mencangkup tiga bidang yang menjadi wewenang antara lain hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya. Upaya pemenuhan hak anak ini dilakukan untuk mewujudkan Kota Layak Anak.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini menyangkut “pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing” dan mendukung revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani dan sumber daya manusia. Karakteristik pembangunan antara lain dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, dan dengan cara pengembangan kualitas penduduk, melalui perwujudan keluarga bahagia sejahtera dan berkualitas dan terkendalinya mobilitas penduduk. Sebagaimana diketahui bahwa Kota Denpasar adalah termasuk wilayah yang penduduknya paling padat di Provinsi Bali dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Sejak 1 Januari 2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar telah melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban yang dijabarkan melalui Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, standar organisasi, tugas fungsi serta tata kerja Dinas Daerah.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana - rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

yang diselenggarakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Rancangan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar yang sudah mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan RKPD Provinsi Bali, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Keterkaitan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar dengan Dokumen Perencanaan lainnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

I.2 Landasan Hukum

1. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
20. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);
21. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
23. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Anak;
24. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
25. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah;
26. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;

27. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
28. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembanguan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
35. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Repubik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 ;
36. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indinesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 ;

37. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;
38. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah Kota Denpasar;
39. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 30);
40. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender.

I.3 Maksud dan Tujuan

1. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Kota Denpasar Tahun 2026 adalah Renja Tahun kedua sebagai upaya untuk mencapai visi Pemerintah Kota Denpasar yang tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar tahun 2021-2026 yaitu: **KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU.** Proses pemerintahan yang baik pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan terarahnya proses pengembangan ekonomi serta kemampuan masyarakat, sehingga tercapainya tujuan pelayanan publik.

I.4. Sistematika Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Kota Denpasar 2026 adalah sebagai berikut.

I. BAB I PENDAHULUAN
- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan hukum
- I.3 Maksud dan tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

II. BAB II EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2025
2.2 Kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
2.3 Kebijakan/ Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

III. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

3.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3AP2KB Kota Denpasar sampai dengan bulan Mei Tahun 2025 dengan jumlah anggaran Belanja Tahun 2025 Rp.22.499.169.289.992.258.404,- dengan 10 program, 25 kegiatan, dan 53 sub kegiatan. Capaian realisasi sampai dengan bulan Mei Tahun 2025 Rp 5.422.635.464 (38,56%).

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, diwujudkan melalui dengan 10 program, 25 kegiatan dan 53 sub kegiatan anggaran sebesar Rp.22.499.169.289,-.

Target :

1	Belanja operasi	Rp.	22.470.229.289,-
2	Belanja modal	Rp.	28.940.000,-
3	Total belanja operasi dan belanja modal	Rp.	22.499.169.289,-

Realisasi : sampai bulan Maret Tahun 2025

Realisasi :

1	Belanja operasi	Rp.	5.394.835.464,-
2	Belanja modal	Rp.	27.800.000,-
3	Total belanja operasi dan belanja modal	Rp.	5.422.635.464,-

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tersaji pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas P3AP2KB Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Mei 2025		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7-5**
2.08.2.14.0.00.01.0000	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		**Total**	**22.499.169.289**	38,56	**5.422.635.464**	**17.076.533.825**
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		Total	**14.582.149.789**	39,53	**4.185.645.894**	**10.396.503.895**
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Pemenuhan Program Penunjang Urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%	**13.396.882.139**	57,9	**3.915.513.878**	**9.481.368.261**
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**10.226.276.739**	39,45	**2.879.966.118**	**7.346.310.621**
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	10.226.276.739	39,45	2.879.966.118	7.346.310.621
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**511.066.500**	42,57	**184.628.500**	**326.438.000**
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	368.798.500	49,13	138.672.500	230.126.000
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	20.302.000	50,34	10.195.000	10.107.000
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	64.326.000	45	28.786.000	35.540.000
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan	12 Laporan	57.640.000	15,46	6.975.000	50.665.000

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
2.08.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**28.940.000**	100	**27.800.000**	**1.140.000**
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	23 unit	28.940.000	100	27.800.000	1.140.000
2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan,Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Jumlah Jasa yang disediakan	100%	**1.850.508.900**	40,22	**620.052.255**	**1.230.456.645**
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	129.600.000	41,67	32.893.803	96.706.197
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	12 Laporan	1.720.908.900	38,76	587.158.452	1.133.750.448
2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan barang milik negara		**780.090.000**	67,29	**203.067.005**	**577.022.995**
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.000.000	41,67	12.500.000	17.500.000
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	73 Unit	517.050.000	35,86	159.912.005	357.137.995
2.08.01.2.09.0005	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	1 unit	4.400.000	100	4.400.000	-
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	82.140.000	50	23.255.000	58.885.000
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	119.000.000	100	-	119.000.000
2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	27.500.000	42	3.000.000	24.500.000
2.8.2	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN**	-Persentase Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah,	20 %	**105.621.000**	41,61	**31.775.000**	**73.846.000**

	GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Desa dan Kelurahan					
		-Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja APBD	20 %				
		-Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	9,8 %				
2.8.2. 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi Penguatan Kelompok Kerja PUG, Driver, Tim Teknis dan Focal Point. Pemilihan Perangkat daerah, Desa dan Kelurahan pelaksana PUG terbaik. Terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Anak		**35.700.000**	52,62	**15.975.000**	**19.725.000**
2.08.02. 2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Perangkat Daerah	19.185.000	100	15.135.000	4.050.000
2.08.02. 2.01.0004	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Perangkat Daerah	16.515.000	5,23	840.000	15.675.000
2.8.2. 2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**			**69.921.000**	30,61	**15.800.000**	**54.121.000**
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	69.921.000	30,61	15.800.000	54.121.000
2.8.3	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat Layanan	100 %	**258.118.000**	14,65	**7.492.800**	**250.625.200**

		Komprehensif					
2.8.3.2.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya cakupan Stakeholder dan masyarakat yang mendapat KIE terkait KtP termasuk TPPO	Total	**63.166.000**	12,21	**7.492.800**	**55.673.200**
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	63.166.000	12,21	7.492.800	55.673.200
2.8.3.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Total	**114.350.000**	7,68	**0**	**114.350.000**
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Layanan	114.350.000	7,68	-	114.350.000
2.8.3.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab./Kota	Total	**80.602.000**	18,15	**0**	**80.602.000**
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang	80.602.000	18,15	-	80.602.000
2.8.4	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Persentase Desa/Kelurahan yang dapat melaksanakan Pendampingan Kualitas Keluarga (Terbentuk PUSPAGA Desa/Lurah)	4,6%	**11.799.750**	50	**4.825.000**	**6.974.750**
2.8.4.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**4.825.000**	100	**4.825.000**	**0**

2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	4.825.000	100	4.825.000	-
2.8.4.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		**6.974.750**	0	**0**	**6.974.750**
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	6.974.750	0	-	6.974.750
2.8.5	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Persentase Data Terpilah Gender dan Anak pada OPD	20%	**56.360.900**	57,04	**15.410.900**	**40.950.000**
2.8.5.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah peserta bimtek Penyusunan Data Terpilah OPD, jumlah peserta bimtek Penyusunan Data Terpilah Desa/Kel ,Jumlah Profil Kekerasan Perempuan dan Anak		**56.360.900**	57,04	**15.410.900**	**40.950.000**
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	14.810.900	100	14.810.900	-
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	41.550.000	14,08	600.000	40.950.000
2.8.6	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Cakupan Indikator KLA	Utama	**483.601.000**	50,03	**208.498.300**	**275.102.700**
2.8.6.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		**229.504.000**	62,26	**100.663.000**	**128.841.000**
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	13 Organisasi	26.220.000	83,07	21.263.000	4.957.000

	Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha					
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	203.284.000	41,45	79.400.000	123.884.000
2.8.6.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		**254.097.000**	37,8	**107.835.300**	**146.261.700**
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	101.447.000	85,77	86.913.000	14.534.000
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	36.165.000	19,05	3.125.000	33.040.000
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	21.570.000	19,05	3.997.300	17.572.700
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	94.915.000	16,29	13.800.000	81.115.000
2.8.7	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat layanan konprehensif	100 %	**269.767.000**	7,72	**2.130.016**	**267.636.984**
2.8.7.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang**	Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan	Total	**137.925.000**	6,51	**2.130.016**	**135.794.984**

	Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
2.08.07.2.01.0004	Sub Kegiatan Advokasi Dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan / Program / Kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan pencegahan KTA	685 orang	101.500.000	0	0	101.500.000
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	36.425.000	6,51	2.130.016	34.294.984
2.08.07.2.02	**Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten /Kota**	Meningkatnya Pelayanan Korban Kekerasan Anak, TPPO, ABH	Total	**115.790.000**	8	**0**	**115.790.000**
2.08.07.2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Layanan	115.790.000	8	0	115.790.000
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Derah Kabupaten / Kota	Total	**16.052.000**	0,93	**0**	**16.052.000**
2.08.07.2.03.02	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Perlindungan Bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	16.052.000	0,93	0	16.052.000
2,14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		Total	**7.917.019.500**		**1.236.989.570**	**6.680.029.930**

2.14.2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	-Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	2,3 %	**217.900.000**		**39.725.000**	**178.175.000**
		-Persentase Kelompok Kerja Bangga Kencana di Kecamatan dan Desa Lurah yang Efektif	9,3 %				
2.14.2.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		**217.900.000**	31,53	**39.725.000**	**178.175.000**
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	3 Laporan	59.950.000	27,97	6.075.000	53.875.000
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	2 Dokumen	21.750.000	34,71	7.550.000	14.200.000
	Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga	Jumlah laporan Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga	2 Laporan	124.200.000	20	24.600.000	99.600.000
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	12.000.000	27,5	1.500.000	10.500.000
2.14.3	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Persentase Kebutuhan ber KB yang Tidak Terlayani(Unmetneed)	7,81 %	**2.928.260.000**	42,26	**188.904.020**	**2.739.355.980**
2.14.3.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya lokal	Total	**485.180.000**	48,96	**13.600.000**	**471.580.000**
2.14.3.2.01.010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	48.800.000	48,96	8.500.000	40.300.000
2.14.3.2.01.011	Pelaksanaan Mekanisme operasional program bangga kencana melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam) rapat koordinasi desa (rakordes) dan mini lokarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi	2 Laporan	101.400.000	40%	5.100.000	96.300.000

		Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					
2.14.3.2.01.012	Promosi dan KIE program bangga kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	125.000.000	75		125.000.000
2.14.3.2.01.013	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program bangga kencana sesuai Kearifan Budaya Local	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	6 Dokumen	10.000.000	10		10.000.000
2.14.3.2.01.014	Advokasi Program Bangga Kencana dan Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan mitra kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	199.980.000	30	-	199.980.000
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)**	**Cakupan Pemberdayaan Tenaga PenyuluhKB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)**	Total	**344.000.000**	30,00%	**68.800.000**	**275.200.000**
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	430 orang	344.000.000	30,00%	68.800.000	275.200.000
2.14.3.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		Total	**2.026.520.000**	26,53	**106.504.020**	**1.920.015.980**
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode	1698 Orang	1.913.620.000	46,26	89.704.020	1.823.915.980

	Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluaga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Falsilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9 Laporan	50.400.000	33,33	16.800.000	33.600.000
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	25 orang	62.500.000	0	-	62.500.000
2.14.3.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan KKBPK di Kampung KB	Total	**72.560.000**	40	**-**	**72.560.000**
2.14.03.2.04.06	PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	26 Kampung	72.560.000	40	-	72.560.000
2.14.4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Persentase Keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan Pendampingan Pembentukan Karakter (BKB,BKR,BKL)	15 %	**4.770.859.500**	42,53	**1.008.360.550**	**3.762.498.950**
2.14.4.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Total	**359.864.000**	27,58	**40.480.550**	**319.383.450**
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Layanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan/Dokumen	9.560.000	60	-	9.560.000
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	10 Unit	130.000.000	0	-	130.000.000

	BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	128 orang	220.304.000	22,73	40.480.550	179.823.450
2.14.4.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pelaksanaan dan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tribina (BKB,BKR,BKL) serta PPKS, PIK-R dan UPPKS		**4.410.995.500**	36,07	**967.880.000**	**3.443.115.500**
2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Ormas Dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Organisasi	721.595.500	32,13	230.000.000	491.595.500
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data Dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita]	Cakupan pemantaun data dan informasi Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 Laporan	3.689.400.000	40	737.880.000	2.951.520.000

Berdasarkan Tabel di atas terkait Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas P3AP2KB Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Masih terdapat anggaran belanja yang belum terealisasi sesuai anggaran kas
- Masih terdapat SPJ dalam proses yang masih dalam tahap pencairan

2.2 Kendala dan Permasalahan dalam Pelaksanaan Renja

a. Terdapat efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 per tanggal 25 Januari 2025 Dalam beberapa kegiatan terdapat ketidaksesuaian perencanaan pada DPA induk untuk merealisasikannya sehingga diperlukan perubahan beberapa uraian yang waktu perubahannya harus menunggu perubahan DPA pada APBD Perubahan.
b. Terdapat SPJ yang masih dalam proses dan SP2D terbit di bulan April sehingga pencatatan realisasi keuangan masuk ke Triwulan II.
c. Pada kegiatan pelayanan anggaran yang direaliasikan berdasarkan kasus yang ditangani sehingga sulit menetapkan target layanan karena pelaporan dan penanganan kasus bersifat fluktuatif.
d. Terdapat perbedaan harga pada saat penganggaran dengan harga pada e-katalog sehingga ada SILPA akibat efisiensi harga pada beberapa kegiatan.

2.3 Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengganggaran

Tindakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian target pelaksanaan program kegiatan sebagaimana diuraikan seperti di atas adalah:

a. Perencanaan akan dilakukan secara efektif dan efisien dan direncanakan untuk mengalokasikan anggarannya pada APBD induk.
b. Penyusunan anggaran kas dengan lebih optimal sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan
c. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat mengenai program/kegiatan lintas sektoral dan

wilayah terutama yang pelaksanaannya diluar daerah.

d. Melakukan pembinaan, pelatihan, pengelolaan, pengembangan dan pelestarian secara berkelanjutan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2025 sebagai berikut :

Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan

a. Jumlah program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tahun 2023 terdiri dari 10 Program dan 25 kegiatan 53 sub kegiatan.
b. Total kebutuhan dana/pagu indikatif : Total kebutuhan dana/pagu indikatif Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tahun 2025 sebesar Rp. 923.835.414,- dengan rincian pada Tabel 3.1.
c. Penjabaran pagu anggaran pada tabel 3.1 mengacu pada DPA Pergeseran IV Dimana terdapat penyesuaian anggaran gaji untuk PPPK sehingga pagu awal senilai Rp. 22.499.169.289,-

Rumusan Rencana Program /Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1.

TABEL 3.1

Rencana PerubahanProgram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja sebelum perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
					Rp	Rp	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	
2.08.2.14.0.00.01.0000	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		**Total**	**Total**	**23.398.840.712**	**23.423.004.703**	**508.166.741**	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		Total	Total	**15.289.138.212**	**15.264.585.203**		
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Pemenuhan Program Penunjang Urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	**13.034.715.062**	**14.075.733.553**		
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	**9.959.708.932**	**10.664.977.753**		
2.08.01.2.02.00001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	36 Orang/bulan	9.959.708.932	10.664.977.753	705.268.821	
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	**581.205.500**	**614.666.900**		
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	386.525.500	451.670.900	65.145.400	
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	20.302.000	23.288.000	2.986.000	
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	66.698.000	64.326.000	(2.372.000)	
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan	12 Laporan	12 Laporan	107.680.000	75.382.000	(32.298.000)	

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
2.08.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		100%	100%	**28.940.000**	**39.240.000**		
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	73 unit	23 unit	28.940.000	39.240.000	10.300.000	
2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan,Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Jumlah Jasa yang disediakan	100%	100%	**1.684.770.630**	**1.953.258.900**		
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	129.600.000	142.350.000	12.750.000	
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.555.170.630	1.810.908.900	255.738.270	
2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pemeliharaan barang milik negara**	100%	100%	**780.090.000**	**803.590.000**		
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	30.000.000	30.000.000	-	
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	73 Unit	73 Unit	517.050.000	517.050.000	-	
2.08.01.2.09.0005	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	1 unit	1 unit	4.400.000	4.400.000	-	
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	107 Unit	82.140.000	82.140.000	-	
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	119.000.000	119.000.000	-	
2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	27.500.000	51.000.000	23.500.000	

2.8.2	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	-Persentase Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan	10 %	10 %	**202.761.500**	**108.325.000**		
		-Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja APBD	10 %	10 %			-	
		-Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	9,8 %	9,8 %			-	
2.8.2. 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi Penguatan Kelompok Kerja PUG, Driver, Tim Teknis dan Focal Point. Pemilihan Perangkat daerah, Desa dan Kelurahan pelaksana PUG terbaik. Terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Anak	4 Kecamatan	4 Kecamatan	**80.920.500**	**35.700.000**	(45.220.500)	
2.08.02. 2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Kewenangan kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan	93 orang	93 orang	24.215.500	19.185.000	(5.030.500)	
2.08.02. 2.01.0008	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG kewenangan kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	56 orang	56 orang	56.705.000	16.515.000	(40.190.000)	
2.8.2. 2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**		4 Kecamatan	4 Kecamatan	**121.841.000**	**72.625.000**		
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	121.841.000	72.625.000	(49.216.000)	
2.8.3	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat Layanan Komprehensif	60%	60%	**510.564.500**	**258.118.000**	(252.446.500)	
2.8.3.2.01	**Pencegahan Kekerasan**	Meningkatnya cakupan	160 orang	160 orang	**70.370.000**	**63.166.000**	(7.204.000)	

	terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Stakeholder dan masyarakat yang mendapat KIE terkait KtP termasuk TPPO						
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	70.370.000	63.166.000	(7.204.000)	
2.8.3.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	35 Orang	**230.140.000**	**114.350.000**	(115.790.000)	
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Layanan	100 Layanan	230.140.000	114.350.000	(115.790.000)	
2.8.3.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab./Kota	-	-	**210.054.500**	**80.602.000**	(129.452.500)	
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	35 Orang	210.054.500	80.602.000	(129.452.500)	
2.8.4	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Persentase Desa/Kelurahan yang dapat melaksanakan Pendampingan Kualitas Keluarga (Terbentuk PUSPAGA Desa/Lurah)	9,30%	9,30%	**35.231.000**	**11.799.750**	(23.431.250)	
2.8.4.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	**5.525.000**	**4.825.000**	(700.000)	

	Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	5.525.000	4.825.000	(700.000)	
2.8.4.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	4 Kecamatan	**29.706.000**	**6.974.750**	(22.731.250)	
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	80 Orang	29.706.000	6.974.750	(22.731.250)	
2.8.5	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Persentase Data Terpilah Gender dan Anak pada OPD	75%	75%	**63.659.400**	**56.360.900**	(7.298.500)	
2.8.5.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah peserta bimtek Penyusunan Data Terpilah OPD, jumlah peserta bimtek Penyusunan Data Terpilah Desa/Kel ,Jumlah Profil Kekerasan Perempuan dan Anak	1 Profil	1 Profil	**63.659.400**	**56.360.900**	(7.298.500)	
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	16.159.400	14.810.900	(1.348.500)	
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	47.500.000	41.550.000	(5.950.000)	

2.8.6	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Cakupan Indikator KLA	Utama	Utama	**1.378.819.000**	**483.601.000**	(895.218.000)	
2.8.6.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	4 Kecamatan	**648.282.000**	**229.504.000**	(418.778.000)	
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	13 Organisasi	13 Organisasi	81.850.000	26.220.000	(55.630.000)	
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	566.432.000	203.284.000	(363.148.000)	
2.8.6.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	4 Kecamatan	**730.537.000**	**254.097.000**	(476.440.000)	
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	110.742.000	101.447.000	(9.295.000)	
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	8 Dokumen	140.256.000	36.165.000	(104.091.000)	
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	5 Dokumen	5 Dokumen	27.275.000	21.570.000	(5.705.000)	

		Kabupaten/Kota						
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	8 Dokumen	452.264.000	94.915.000	(357.349.000)	
2.8.7	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat layanan konprehensif	71%	71%	**63.387.750**	**270.647.000**		
2.8.7.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	4 Kecamatan	**45.120.500**	**138.805.000**		
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan	-	685 orang	0	101.500.000	101.500.000	
2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi	2 Dokumen	2 Dokumen	45.120.500	37.305.000	(7.815.500)	
2.08.07.2.02	**Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten /Kota**	Jumlah Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Derah Kabupaten / Kota	200 orang	200 orang	**0**	**115.790.000**	115.790.000	
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	100 Layanan	100 Layanan	0	115.790.000	115.790.000	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Derah Kabupaten / Kota	4 Kecamatan	4 Kecamatan	**18.267.250**	**16.052.000**	(2.215.250)	
2.08.07.2.03.0005	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Perlindungan Bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	18.267.250	16.052.000	(2.215.250)	
2,14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN**		Total	Total	**8.109.702.500**	**8.158.419.500**		

	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
2.14.2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	-Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	2,3 %	2,3 %	**37.150.000**	**217.900.000**	180.750.000	
		-Persentase Kelompok Kerja Bangga Kencana di Kecamatan dan Desa Lurah yang Efektif	13,9 %	13,9 %				
2.14.2.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			**37.150.000**	**217.900.000**	180.750.000	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	3 Laporan	-	59.950.000	59.950.000	
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	2 Dokumen	2 Dokumen	37.150.000	21.750.000	(15.400.000)	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga	Jumlah laporan Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga	-	2 Laporan	-	124.200.000	124.200.000	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	2 Dokumen	-	12.000.000	12.000.000	
2.14.3	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Persentase Kebutuhan ber KB yang Tidak Terlayani(Unmetneed)	7,38 %	7,38 %	**7.018.450.000**	**2.939.660.000**		
2.14.3.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya lokal			**6.955.950.000**	**496.580.000**		
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	1 Laporan	-	48.800.000	48.800.000	

2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme operasional program bangga kencana melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam) rapat koordinasi desa (rakordes) dan mini lokarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2 Laporan	2 Laporan	6.094.360.000	101.400.000	(5.992.960.000)	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE program bangga kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	4 Dokumen	-	125.000.000	125.000.000	
2.14.3.2.01.013	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program bangga kencana sesuai Kearifan Budaya Local	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	6 Dokumen	6 Dokumen	861.590.000	21.400.000	(840.190.000)	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga Kencana dan Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan mitra kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	4 Organisasi	-	199.980.000	199.980.000	
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)**	**Cakupan Pemberdayaan Tenaga PenyuluhKB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)**	77,25 %	77,25%	**0**	**344.000.000**	344.000.000	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	430 orang	-	344.000.000	344.000.000	
2.14.3.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan**		0,0092	0,0092	**62.500.000**	**2.026.520.000**	1.964.020.000	

	KB di Daerah Kabupaten/Kota							
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	1698 Orang	-	1.913.620.000	1.913.620.000	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluaga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Falsilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	9 Laporan	-	50.400.000	50.400.000	
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	100 orang	100 orang	62.500.000	62.500.000	-	
2.14.3.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan KKBPK di Kampung KB	-	-	**-**	**72.560.000**	72.560.000	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	-	26 Kampung	-	72.560.000	72.560.000	
2.14.4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Persentase Keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan Pendampingan Pembentukan Karakter (BKB,BKR,BKL)	16 %	16 %	**1.054.102.500**	**5.000.859.500**		
2.14.4.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			**329.507.000**	**359.864.000**	30.357.000	
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Layanan	-	1 Laporan/ Dokumen	-	9.560.000	9.560.000	

		Keluarga Sejahtera (PPKS)						
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	10 Unit	-	130.000.000	130.000.000	
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	128 orang	128 orang	329.507.000	220.304.000	(109.203.000)	
2.14.4.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pelaksanaan dan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tribina (BKB,BKR,BKL) serta PPKS, PIK-R dan UPPKS			**724.595.500**	**4.640.995.500**		
2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Ormas Dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Organisasi	4 Organisasi	724.595.500	951.595.500	227.000.000	
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data Dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita]	Cakupan pemantaun data dan informasi Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	1 Laporan	-	3.689.400.000	3.689.400.000	

BAB IV
PENUTUP

Rankhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tahun 2025 dalam Rencana Pembangunan Tahunan dimana tahapan penyusunan meliputi, penyiapan rancangan, penyiapan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar.

Rankhir Rencana Kerja Perubahan 2025 diberlakukan sejak tanggal ditetapkan sampai 31 Desember 2025 dan hasilnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tahun 2024 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk dapat secara optimal merealisasikan program – program yang telah direncanakan dalam Rankhir Rencana Kerja Peruabahan Tahun 2025 ini tentu sangat dipengaruhi oleh pendanaan yang memadai, sehingga sangat diperlukan kejelian dalam menentukan prioritas program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Denpasar, 10 Juni 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Denpasar,

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dra. I Gusti Agung Sri Wetrawati, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19660311 199503 2 001

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Gatot Subroto VI/J Denpasar, Kode Pos : 80237 Telp./Fax.: (0361) 428380 Telp./Fax.: (0361) 428380
Laman: kb.denpasarkota.go.id. Pos-el : kb.denpasarkota@gmail.com

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perubahan Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	V			
2	Pengolahan data dan informasi.	V			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota Denpasar	V			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Denpasar tahun 2018 berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar.	V			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	V			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2025.	V			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	V			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	V			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	V			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	V			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.	V			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	V			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesualan		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	tidak		
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	V			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	V			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	V			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Denpasar telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	V			

Denpasar, 10 Juni 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

(Dra. I Gusti Agung Sri Wetrawati,M.Si)
Pembina Utama Muda
NIP : 19660311199503 2 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA DENPASAR

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025

DENPASAR 2025

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas berkatNyalah akhirnya penyusunan **Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja)** Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan **Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja)** Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 ini dibuat merupakan amanat dari Undang–Undang No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana didalamnya terkandung materi evaluasi pelaksanaan terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun lalu dan tujuan, sasaran serta program kegiatan tahun 2025. Dengan telah tersusunnya **Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja)** Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 ini diharapkan nantinya pada tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sudah mempunyai pijakan yang jelas didalam membuat program dan kegiatan pada masa pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tahun 2021-2026 sehingga nantinya kegiatan pembangunan urusan wajib non pelayanan dasar dapat lebih terarah sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan peningkatan kualitas lingkungan di kota Denpasar dapat terwujud.

Demikian kami sampaikan, semoga **Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja)** Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 ini nantinya dapat direalisasikan dengan baik ditataran komponen masyarakat maupun lingkungan.

Denpasar, 28 Mei 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar

Ida Bagus Putra Wirabawa,S.TP,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730217 200003 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TW I TAHUN 2025..... 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan DLHK Kota Denpasar dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar 8
2.2 Rekapitulasi Pergeseran Anggaran Tahun 2025 DLHK Kota Denpasar…. 16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DLHK KOTA DENPASAR 23
3.1 Analisis Kinerja DLHK Kota Denpasar 26
3.2 Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan DLHK Kota Denpasar 27
BAB IV PENUTUP 33
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah merupakan PD hasil peleburan dari 2 (dua) satuan kerja perangkat daerah yaitu : SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar dan SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar sebagai implementasi dari Undang – undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah no 18 Tahun 2016 Tentang organisasi perangkat daerah serta peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P.74, MenLHK – Setjen/ Kum. 1/8/2016 Tanggal 16 Agustus Tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 yang merupakan rencana pembangunan tahunan di bidang lingkungan, yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan VISI Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yaitu : ***"Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju".***

Berangkat dari visi tersebut, maka Misi pembangunan Kota Denpasar yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana

5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Kebudayaan Bali Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan

Berdasarkan visi pembangunan jangka panjang daerah adalah Denpasar Kota Berbudaya, Dilandasi Tri Hita Karana, sasaran pokok untuk perencanaan pembangunan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan Pemahaman Agama
2. Terwujudnya Sistem Ekonomi Kerakyatan
3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM
4. Terwujudnya Keamanan dan Lingkungan Kondusif .

Berdasarkan misi pembangunan Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar mendukung misi keempat yaitu Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.

Berangkat dari Visi, Misi dan tujuan, program dan sasaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2020-2024,

- Visi : Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat, dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”
- Misi :
    1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
    2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
    3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan
    4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- Tujuan :
    1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim
    2. Meningkatkan kemampuan sumber daya hutan untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional
    3. Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, adapun kegiatan-kegiatan KLHK yang akan disinkronisasikan: (1) Penyusunan Inventarisasi dan Perhitungan DDDT SDALH (Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup); (2) Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis); (3) Penyusunan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup); (4) Penyusunan IKPLHD (Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah); (5) Penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan (6) Penyusunan JAKSTRADA (Kebijakan dan Strategi Daerah) dan ADIPURA. Sasaran Strategis pembangunan KLHK tahun 2020-2024 adalah : (1) Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim; (2) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya kutung dan daya tamping lingkungan; (3) Terjaganya Keberadaan, fungsi dan sitribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan dan (4) Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

Kebijakan pengembangan kewilayahan pada prinsipnya memuat tema untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dan daerah antar daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional. Sinergi pusat daerah dan antar daerah dilakukan melalui penyusunan program dan kegiatan yang konsisten , terpadu dan bersifat lintas sector, dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah , sistem hukum dan kelembagaan yang andal serta koordinasi dan kerjasama yang solid antara kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah dalam seluruh proses mulai dari perencanaan , pelaksanaan , pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan dan pengembangan wilayah.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 ini telah melalui tahapan proses perencanaan pembangunan seperti yang tertuang dalam undang –undang No.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaran program/kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Perencanaan pembangunan pada hakekatnya merupakan pengerahan sumber –sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan amanat undang – undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta undang – undang No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang –Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Mendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 ;
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

a. Maksud

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini adalah merupakan rencana kerja pembangunan lingkungan hidup yang memuat program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai upaya untuk perlindungan dan pengelolaan permasalahan / isu strategis lingkungan hidup dan kebersihan dikaitkan dengan RPJMD Kota Denpasar tahun 2021-2026 dan visi misi Pemerintah kota Denpasar yang dijabarkan dalam rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar tahun 2021-2026, dan diharapkan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar tahun 2025 juga dimaksudkan berupaya mendukung program pembangunan nasional dengan penekanan kepada keserasian kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dengan pemerintah kota Denpasar seperti yang diamanatkan undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

b. Tujuan

Dengan telah tersusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 ini diharapkan nantinya tujuan dari program / kegiatan yang direncanakan dapat berjalan lebih terarah, efisien dan efektif sesuai dengan RPJMD 2021-2026 dan visi, misi ,tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator dan pagu dana sebagaimana yang telah digariskan didalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar tahun 2021-2026, sehingga tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan didalam undang – undang nomor 32 tahun 2009 dan undang – undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan berupa peningkatan kualitas lingkungan dapat terwujud. Adanya perubahan

target Indikator Kinerja Utama (IKU) mengingat pada TPST Tahura sudah dilakukan pemutusan kontrak dan kinerja pada 2(dua) TPST lainnya yang ada di Kota Denpasar tidak berjalan dengan optimal sehingga perlu adanya penyesuaian target kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) DLHK Kota Denpasar tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
- 2.2 Rekapitulasi Pergeseran Anggaran Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
- 3.1 Analisis Kinerja DLHK Kota Denpasar
- 3.2 Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Bab IV Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Rancangan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 disusun berorientasi pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025 – 2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Adapun program dan kegiatan tahun 2025 terdiri dari 8 (delapan) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan dengan pagu sebesar **Rp.231.706.362.695**.,- dengan perincian seperti tabel berikut (tabel 2.1).

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		REALISASI s/d TRIWULAN I TAHUN 2025	
			K	Rp	K	Rp
	2	3	4	5	6	7
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			***231.706.362.695***		**19.240.792.172**
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan					

I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**86.652.454.445**	**2,02%**	**14.532.355.931**
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**29.427.898.600**	**3,99%**	**6.881.659.755**
(1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	201 orang/bulan	29.427.899.600	1,23%	6.881.659.755
2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian daerah**	**100%**	**1.791.808.000**	**0%**	-
(2)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	1.791.808.000	0%	-
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**1.468.685.630**	**1,89%**	**133.088.948**
(3)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.215.418.330	0%	96.046.564
(4)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	20.831.000	0%	18.743.000
(5)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	106.812.300	4,90%	8.684.300

(6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	126.624.000	2,66%	9.615.064
4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**53.305.621.215**	**1,64%**	**7.440.896.728**
(7)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	834.510.000	1,87%	116.088.761
(8)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	52.471.111.215	1,40%	7.324.717.967
5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**658.440.000**	**2,61%**	**76.800.500**
(9)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	51 unit	29.850.000	3,33%	1.350.500
(10)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	97 unit	485.470.000	2,24%	75.450.000

(11)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	143.120.000	0%	-
II	**PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar**	**80%**	**71.500.000**	**0%**	**-**
6	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah muatan hasilpenyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun**	1 dokumen	**71.500.000**	**0%**	**-**
(12)	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	1 dokumen	71.500.000	0%	-
III	**PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-Persentase peningkatan kualitas air** **-Persentase peningkatan kualitas udara** **-Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan**	**4%** **4%** **2%**	**2.822.599.950**	**1,57%**	**750.000**
7	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**-Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut** **- Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan** **- Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas**	**1 dokumen** **1 dokumen** **1 dokumen**	**573.757.950**	**0%**	**750.000**

		lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan				
(13)	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah. Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah,air, udara, dan laut	1 dokumen	235.467.000	0%	750.000
(14)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 dokumen	51.500.000	0%	-
(15)	Pengelolaan Laboraturium Lingkungan Hidup kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboraturium lingkungan	1 dokumen	286.790.950	0%	-
8	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan**	**1 laporan**	**1.098.680.000**	**3,14%**	**215.675.000**
(16)	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan	1.098.680.000	6,29%	215.675.000

9	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi**	**1 dokumen**	**250.162.000**	**0%**	**-**
(17)	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi dari Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 kegiatan	250.162.000	0%	-
IV	**PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemeliharaan pohon perindang** **Persentase taman yang terpelihara**	**40%** **100%**	**35.863.081.500**	**1,80%**	**811.814.850**
10	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota**	**-Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota** **- Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola**	**1.792,12 Ha** **39 unit**	**35.863.081.500**	**1,80%**	**811.814.850**
(18)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	1792.12 Ha	28.707.022.500	0%	-
(19)	Pengelolaan sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	39 unit	7.156.059.000	3,59%	811.814.850
V	**PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase TPS limbah B3 yang memenuhi syarat**	**100%**	**120.800.000**	**4,22%**	**12.991.750**

11	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan**	**1 laporan**	**120.800.000**	**4,22%**	**12.991.750**
(20)	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	1 laporan	120.800.000	4,22%	12.991.750
VI	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar**	**86%**	**216.785.000**	**0%**	**1.200.000**
12	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**- Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan** **- Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**200 dokumen** **70 laporan**	**216.785.000**	**0%**	**1.200.000**

(21)	Fasilitasi Pemenuhan, Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen	216.785.000	0%	1.200.000
VII	**PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase pemeberian penghargaan lingkungan hidup**	**3%**	**239.779.000**	**5,80%**	**2.175.000**
13	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH**	**5 entitas**	**239.779.000**	**5,80%**	**2.175.000**
(22)	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanyadalam rangka PPLH	5 entitas	239.779.000	5,80%	2.175.000
VIII	**PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase volume sampah yang dikelola**	**100%**	**105.719.362.800**	**2,70%**	**3.663.829.641**
14	**Pengelolaan Sampah**	**Jumlah volume sampah yang dikelola**	**1.020 ton/hari**	**105.719.362.800**	**2,70%**	**3.663.829.641**
(23)	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan	10 kelompok	2.945.990.000	0%	260.719.365

		pengelolaan sampah berbasis masyarakat				
(24)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	413 unit	68.036.784.800	0,50%	3.223.368.900
(25)	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSa,RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.020 ton	34.737.588.000	0%	179.741.376

2.2. Rekapitulasi Pergeseran Anggaran Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar melakukan pergeseran anggaran pada APBD Tahun 2025. Adapun pergeseran anggaran pada APBD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pergeseran Anggaran Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025	INDUK TAHUN 2025	PERGESERAN TAHUN 2025
	2	3	4	5	6
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			***246.291.608.897***	***245.717.964.442***
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**101.101.914.647**	**100.664.056.192**
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**43.330.049.402**	**41.990.862.547**
(1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	201 orang/bulan	43.330.049.402	41.990.862.547

2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian daerah**	**100%**	**1.791.808.000**	1.791.808.000
(2)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	**1.791.808.000**	1.791.808.000
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**2.015.996.030**	**1.468.685.630**
(3)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.302.824.230	1.215.418.330
(4)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	20.831.000	20.831.000
(5)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	106.812.300	106.812.300
(6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	585.528.500	125.624.000
4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**53.305.621.215**	**54.754.260.015**
(7)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	834.510.000	834.510.000

(8)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	52.471.111.215	53.919.750.015
5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**658.440.000**	**658.440.000**
(9)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	51 unit	29.850.000	29.850.000
(10)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	97 unit	485.470.000	485.470.000
(11)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	143.120.000	143.120.000
II	**PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar**	**80%**	**71.500.000**	**71.500.000**
6	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup**	**80%**	71.500.000	**71.500.000**
(12)	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	1 dokumen	71.500.000	71.500.000
III	**PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-Persentase peningkatan kualitas air** **-Persentase peningkatan kualitas udara**	**4%** **4%**	**2.859.599.950**	**2.822.599.950**

		-Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	**2%**		
7	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**-Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut** **- Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan** **- Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan**	**1 dokumen** **1 dokumen** **1 dokumen**	**573.757.950**	**573.757.950**
(13)	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah. Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	1 dokumen	235.467.000	235.467.000
(14)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboraturium lingkungan	1 dokumen	51.500.000	51.500.000
(15)	Pengelolaan Laboraturium Lingkungan Hidup kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1 dokumen	286.790.950	286.790.950
8	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di**	**1 laporan**	**2.035.680.000**	**1.998.680.000**

		kabupaten/kota yang dilaksanakan			
(16)	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkunganhidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan	2.035.680.000	1.998.680.000
9	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi**	**1 dokumen**	**250.162.000**	**250.162.000**
(17)	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi dari Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 kegiatan	250.162.000	250.162.000
IV	**PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemeliharaan pohon perindang** **Persentase taman yang terpelihara**	**40%** **100%**	**35.863.081.500**	**35.863.081.500**
10	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota**	**-Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota kewenangan kabupaten/kota** **- Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola**	**1.792,12 Ha** **39 unit**	**35.863.081.500**	**35.863.081.500**
(18)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	1792.12 Ha	28.707.022.500	28.707.022.500

(19)	Pengelolaan sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	39 unit	7.156.059.000	7.156.059.000
V	**PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase TPS limbah B3 yang memenuhi syarat**	**100%**	**126.800.000**	**120.800.000**
11	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan**	**1 laporan**	**126.800.000**	**120.800.000**
(20)	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	1 laporan	126.800.000	120.800.000
VI	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar**	**86%**	**218.985.000**	**216.785.000**
12	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**- Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan** **- Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan,**	**200 dokumen** **70 laporan**	**218.985.000**	**216.785.000**

		persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
(21)	Fasilitasi Pemenuhan, Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen	218.985.000	216.785.000
VII	**PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH**	**5 entitas**	**307.865.000**	**239.779.000**
13	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanyadalam rangka PPLH	5 entitas	**307.865.000**	**239.779.000**
(22)	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanyadalam rangka PPLH	5 entitas	307.865.000	239.779.000
VIII	**PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase volume sampah yang dikelola**	**100%**	**105.741.862.800**	**105.719.362.800**
14	**Pengelolaan Sampah**	**Jumlah volume sampah yang dikelola**	**1.020 ton/hari**	**105.741.862.800**	**105.719.362.800**
(23)	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif	10 kelompok	2.968.490.000	2.945.990.000

		dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat			
(24)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	413 unit	68.035.784.800	68.035.784.800
(25)	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSa,RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.020 ton	34.737.588.000	34.737.588.000

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR

Implikasi yang timbul / diharapkan terhadap target capaian program Renstra Perangkat daerah yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan setiap tahun anggaran adalah merupakan tujuan dari amanat Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

1. Melindungi wilayah negara kesatuan Repulik Indonesia dari pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
8. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan
9. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Dalam upaya pencapaian tujuan , maka kebijakan / tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Strategi mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan dilaksanakan dengan kebijakan
    a. Kebijakan pengelolaan sampah di mulai dari sumbernya dan dikelola oleh Desa / Kelurahan dan dibawah koordinasi Kecamatan
    b. Akan di bentuk unit pelaksana teknis daerah sampai ke tingkat kecamatan
2. Strategi mengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilaksanakan dengan kebijakan :
    a. Menyusun regulasi dalam pengendalian dan perusakan lingkungan hidup serta menyelesaikan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum.

b. Memantau kualitas air tanah, air permukaan, air laut dikawasan pesisir, tanah / biomassa dan udara.
c. Meningkatkan fasilitas pemantau pencemaran, pengawasan air minum dan air limbah, emisi gas buang dan pengelolaan limbah B3

3. Strategi mengelola perlindungan dan konservasi sumber daya alam, langkah – langkah yang dipedomani sebagai arah dan kebijakan adalah
   a. Melindungi sumber daya alam dari pemanfaatan yang tidak terkendali, mengembangkan koordinasi pengelolaan daerah aliran sungai dan melindungi keanekaragaman hayati dari kepunahan serta mengembangkan sistem insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam
   b. Mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat legeslatif, dunia usaha dalam perlindungan dan pelestarian daya alam serta merumuskan mekanisme pendanaan bagi kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam
4. Strategi merehabilitasi dan memulihkan cadangan sumber daya alam, langkah – langkah yang dipedomani sebagai arah dan kebijakan adalah :
   a. Merehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak di kawasan hutan, pesisir, perairan serta mengembangkan manajemen sistem pengelolaannya
   b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan sarana dan prasarana rehabilitasi serta pengayaan sumber daya pertanian dan perikanan
5. Strategi meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, langkah – langkah yang dipedomani sebagai arah dan kebijakan adalah :
   a. Menyusun neraca sumber daya alam dan neraca lingkungan hidup, menyusun data potensi maupun daya dukung kawasan ekosistem serta mengembangkan evaluasi sumber daya alam yang meliputi hutan, air dan pesisir
   b. Mengembangkan informasi terpadu dan sistem jaringan pemantau kualitas lingkungan,menyusun status lingkungan hidup serta

melibatkan peran serta masyarakat dalam pemantauan dan informasi kualitas lingkungan hidup

6. Strategi meningkatkan pengendalian polusi dilaksanakan dengan kebijakan :
   a. Pemantauan kualitas udara melalui uji emisi terhadap sampling kendaraan bermotor pencegahan terjadinya pencemaran udara
   b. Pengendalian pencemaran udara yang di sebabkan oleh aktivitas industri melalui kegiatan pengujian emisi udara akibat aktivitas industri
   c. Melaksanakan uji kualitas air sungai dan air laut serta air limbah dari aspek fisika, kimia dan mikrobiologi
   d. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sanitasi masyarakat dalam bentuk kegiatan lomba antar kelompok sanitasi masyarakat
7. Strategi Mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia serta meningkatkan koordinasi / kerjasama lintas sektoral, langkah – langkah yang dipedomani sebagai arah dan kebijakan adalah :
   a. Meningkatkan wawasan dan ketrampilan SDM melalui pendidikan dan pelatihan formal
   b. Meningkatkan ketersediaan administrasi perkantoran
   c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
8. Strategi mengelola ruang terbuka hijau (RTH) dilaksanakan dengan kebijakan:

   Mempertahankan keberadaan RTHK sebagai daerah resapan air, daya tarik pariwisata, pertanian, ekonomi dan bisnis (Agrowisata)

3.1 Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Triwulan I Tahun 2025

Capaian indikator kinerja pada triwulan I 2025 dapat digambarkan pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	-	62,04	-	0
2.	Optimalisasi pengelolaan sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST/PDU	%	5,01%	0,25%	4,9%

Pada indikator persentase indeks kualitas lingkungan hidup target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 62,04 realisasi baru bisa dihitung di akhir tahun karena masih menunggu hasil perhitungan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sedangkan indikator persentase volume sampah yang masuk ke TPST/PDU target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 5,01% realisasi 0,25% dengan capaian kinerja 4,9%.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar untuk usulan perubahan anggaran tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025	PAGU APBD INDUK TAHUN 2025	PAGU USULAN PERUBAHAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			***246.291.608.897***	***245.649.568.243***
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**101.101.914.647**	**111.092.784.993**
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**43.330.049.402**	**49.035.969.748**
(1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	201 orang/bulan	**43.330.049.402**	49.035.969.748
2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian daerah**	**100%**	**1.791.808.000**	**1.776.808.000**
(2)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	**1.791.808.000**	1.776.808.000
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**2.015.996.030**	**1.741.724.130**

(3)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.302.824.230	1.488.456.830
(4)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	20.831.000	20.831.000
(5)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	106.812.300	106.812.300
(6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	585.528.500	125.624.000
4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**53.305.621.215**	**57.733.508.115**
(7)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	834.510.000	834.510.000
(8)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	52.471.111.215	56.898.998.115
5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**658.440.000**	**804.775.000**
(9)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	51 unit	29.850.000	31.145.000
(10)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	97 unit	485.470.000	485.470.000

(11)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	143.120.000	288.160.000
II	**PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar**	**80%**	**71.500.000**	**71.500.000**
6	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun**	**1 dokumen**	71.500.000	71.500.000
(12)	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	1 dokumen	71.500.000	71.500.000
III	**PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-Persentase peningkatan kualitas air** **-Persentase peningkatan kualitas udara** **-Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan**	**4%** **4%** **2%**	**2.859.599.950**	**2.894.099.950**
7	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**-Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut** **- Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan** **- Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan**	**1 dokumen** **1 dokumen** **1 dokumen**	**573.757.950**	**645.257.950**
(13)	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah. Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah,air, udara, dan laut	1 dokumen	235.467.000	305.467.000

(14)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 dokumen	51.500.000	51.500.000
(15)	Pengelolaan Laboraturium Lingkungan Hidup kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboraturium lingkungan	1 dokumen	286.790.950	288.290.950
8	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan**	**1 laporan**	**2.035.680.000**	**1.998.680.000**
(16)	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkunganhidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan	2.035.680.000	1.998.680.000
9	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi**	**1 dokumen**	**250.162.000**	**250.162.000**
(17)	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi dari Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 kegiatan	250.162.000	250.162.000
IV	**PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemeliharaan pohon perindang** **Persentase taman yang terpelihara**	**40%** **100%**	**35.863.081.500**	**42.191.201.500**
10	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota**	**-Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota** **- Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola**	**1.792,12 Ha** **39 unit**	**35.863.081.500**	**42.191.201.500**

(18)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	1792.12 Ha	28.707.022.500	30.709.642.500
(19)	Pengelolaan sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	39 unit	7.156.059.000	11.481.559.000
V	**PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase TPS limbah B3 yang memenuhi syarat**	**100%**	**126.800.000**	**114.800.000**
11	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan**	**1 laporan**	**126.800.000**	**114.800.000**
(20)	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	1 laporan	126.800.000	114.800.000
VI	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar**	**86%**	**218.985.000**	**120.785.000**
12	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**- Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan** **- Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**200 dokumen** **70 laporan**	**218.985.000**	**120.785.000**
(21)	Fasilitasi Pemenuhan, Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan	20 dokumen	218.985.000	120.785.000

		lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan			
VII	**PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase pemeberian penghargaan lingkungan hidup**	**3%**	**307.865.000**	**239.779.000**
13	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH**	**5 entitas**	**307.865.000**	**239.779.000**
(22)	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanyadalam rangka PPLH	5 entitas	307.865.000	239.779.000
VIII	**PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase volume sampah yang dikelola**	**100%**	**105.741.862.800**	**88.924.617.800**
14	**Pengelolaan Sampah**	**Jumlah volume sampah yang dikelola**	**1.020 ton/hari**	**105.741.862.800**	**88.924.617.800**
(23)	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	10 kelompok	2.968.490.000	983.240.000
(24)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	413 unit	68.035.784.800	72.090.884.800
(25)	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSa,RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.020 ton	34.737.588.000	15.850.493.000

BAB V
P E N U T U P

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 ini dibuat, yang merupakan repleksi dari Peraturan Walikota Denpasar No. 45 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana nantinya akan menjadi bahan / pedoman dalam pembuatan rencana kerja dan anggaran (RKA) perubahan tahun 2025 urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Adapun pagu induk tahun 2025 sebesar Rp.246.291.608.897, setelah pergeseran menjadi Rp.245.717.964.442 dan dianggaran perubahan 2025 diusulkan sebesar Rp. 245.679.568.243.

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 ini, diharapkan nantinya program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara lebih terarah dengan tetap memperhatikan skala prioritas permasalahan di lapangan dikaitkan dengan keterbatasan pagu dana yang ada dengan harapan peningkatan pelestarian fungsi lingkungan hidup nantinya dapat terwujud.

Harapan kedepan agar semua program dan kegiatan tersebut nantinya dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, transparansi dan selalu berorientasi kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, 28 Mei 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar

Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730217 200003 1 002

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

RANCANGAN
RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Masa Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat karunia-Nya kami dapat menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2025 dimana Rencana Kerja Perubahan ini memuat rencana dan target yang hendak dicapai dalam tahun bersangkutan setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja sampai pada bulan Mei 2025, dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka pelaksanaan misi organisasi.

Melalui rancangan akhir rencana kerja perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, dan dapat dijadikan alat ukur dari kinerja yang telah dicapai sebagai bahan evaluasi serta pengambilan kebijakan yang akan diterapkan pada tahun berikutnya.

Denpasar, 10 Mei 2025
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Drs. Dewa Gde Juli Artabrata
Pembina Utama Muda
NIP. 19680729 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI.....ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum.....2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025
2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 10

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 12

BAB IV PENUTUP 17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat kebijakan, program dan kegiatan Dinas. Sebagai suatu dokumen resmi, rencana kerja mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 7 mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis OPD tahun 2021-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh perangkat daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Perubahan merupakan perubahan rencana kerja setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja sampai pada Triwulan I tahun berkenaan. Penyusunan rancangan perubahan rencana kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan perubahan rencana kerja.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2025. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi acuan Renja disusun sesuai dengan masukan dari Sekretariat dan masing-masing bidang yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2025 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992, tentang Pembentukan Kota Denpasar;
b. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), dengan perubahan terakhir Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah ;
e. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
f. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
h. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

l. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025**;**
m. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar.
n. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2025 disusun sebagai acuan bagi seluruh struktur organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

1.3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2025 adalah :

a. Mengefektifkan pelaksanaan program-program dan kegiatan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
b. Agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan motto sewaka dharma, yaitu melayani adalah kewajiban;
c. Terwujudnya keselarasan dalam pembangunan di bidang kependudukan baik yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Denpasar.

Sedangkan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

a. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
b. Meningkatnya indeks pelayanan publik

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika perumusan rencana kerja ini.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Dalam bab ini diuraikan mengenai evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dan Analisis Kinerja Pelayanan.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah. Bab ini berisi mengenai Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Bab IV Penutup, Menguraikan mengenai catatan penting untuk dapat terealisasinya program dan kegiatan secara optimal.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Rencana Kerja merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan menyusun program dan kegiatan yang dilandasi rencana strategis sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2025 melaksanakan 4 Program, 8 Kegiatan, dan 13 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 24.120.589.674 (pergeseran ke-4 anggaran Induk 2025). Dari jumlah tersebut, sampai bulan Mei tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 9.321.454.683. Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   c. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   d. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel

2. Program Pendaftaran Penduduk
   a. Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk
      - Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
      - Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
   a. Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil
      - Sub Kegiatan : Peningkatan Dalam Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   a. Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
      - Sub Kegiatan : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
      - Sub Kegiatan : Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
   b. Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
      - Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Target dan realisasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sampai dengan bulan Mei tahun 2025 disampaikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Bulan Mei Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

No.	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun	Target s/d Mei Tahun 2025		Realisasi s/d Mei Tahun 2025		SISA ANGGARAN
				Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**							
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	13.518.693.946	36,70	4.961.358.184	31,00	4.156.462.911	9.362.231.035
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1.609.940.800	87,51	1.408.826.400	65,00	1.039.911.750	570.029.050
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40.080.000	88,90	35.630.000	72,00	28.750.000	11.330.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.644.000	41,67	1.935.000	42,00	1.935.000	2.709.000
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.333.985.928	49,60	1.157.646.960	38,00	880.731.820	1.453.254.108

No.	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun	Target s/d Juni Tahun 2024		Realisasi s/d Juni Tahun 2024		SISA ANGGARAN
				Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	292.570.000	38,01	111.200.000	26,00	76.438.202	216.131.798
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	9.125.000	100	9.125.000	29,00	2.625.000	6.500.000
2	**Program Pendaftaran Penduduk**							
	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk							
	Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	150.000.000	63,42	95.130.000	54,00	80.409.000	69.591.000
	Sub Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	22.107.500	24,82	5.486.000	25,00	5.471.000	16.636.500
3	**Program Pencatatan Sipil**							
	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil							
	Sub Kegiatan : Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan SIpil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6.028.588.500	55,07	3.320.243.500	50,00	3.013.220.000	3.015.368.500

No.	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun	Target s/d Maret Tahun 2025		Realisasi s/d Maret Tahun 2025		SISA ANGGARAN
				Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**							
	Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Databse Kependudukan							
	Sub Kegiatan : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	27.855.000	17,07	4.755.000	17,00	4.625.000	23.230.000
	Sub Kegiatan : Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	24.159.000	89,13	21.534.000	67,00	16.275.000	7.884.000
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	58.840.000	24,90	14.650.000	25,00	14.600.000	44.240.000
TOTAL			**24.120.589.674**	**46,22**	**11.147.520.044**	**38,65**	**9.321.454.683**	**14.799.134.991**

Dalam menjalankan program kegiatan tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar mengalami kendala antara lain:

a. Permasalahan

- Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan pada triwulan I masih dalam proses pencairan dana.
- Belanja modal tidak terealisasi karena terdapat perubahan rekening

b. Solusi

- Mengupayakan percepatan proses pencairan dana pada triwulan I
- Menggeser anggaran belanja modal dengan rekening yang sesuai dengan RKBMD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mengukur kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, digunakan tolak ukur antara lain :

1. Terwujudnya capaian kinerja fisik dan keuangan;
2. Terwujudnya persentase capaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan;
3. Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang berbasis gender;
4. Terwujudnya pelayanan prima yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Hasil analisis menunjukan bahwa tingkat pencapaian kinerja fisik keuangan perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dari bulan Januari sampai Mei tahun 2025 hasilnya, adalah sebagai berikut :

a. Kinerja Fisik.

   Target fisik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sampai dengan bulan Mei 2025 adalah sebesar 46,22% sedangkan realisasinya adalah sebesar 38,65%.

b. Target Keuangan.

   Target dan realisasi keuangan pada belanja langsung sampai dengan bulan Mei 2025 adalah sebesar Rp 11.147.520.044 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp 9.321.454.683

2.3 Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan

Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan disajikan pada tabel2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisa
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Persentase Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	100%	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	
2	Persentase Penerbitan KTP- el	100%	-	99%	99,1%	99,2%	99,92%	98,58%	97,47%	99,65%	99,92%	
3	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 th	90%	-	99%	99,1%	99,2%	99,50%	100%	99,21%	99,38%	99,50%	
4	Persentase penduduk yang meninggal yang dilengkapi dengan Akta Kematian	70%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Indeks Pelayanan Publik	-	-	A-	A-	A-	-	A-	A	A	-	
6	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)		-	-	-	-	4,40%	-	-	4,37%	4,40%	

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisa
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
7	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak			-	-	-	82%	-	-	80,32%	82%	
8	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian			-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan			-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2025 terdapat perubahan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan yaitu:

a. penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN
b. perubahan kode rekening belanja modal
c. pengurangan gaji pegawai non ASN
d. kegiatan pemberian santunan kematian kepada warga Denpasar yang taat Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar memerlukan tambahan anggaran agar dapat melaksanakan Kegiatan pemberian santunan kematian,

Dalam Anggaran Induk Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar melaksanakan 4 Program, 8 Kegiatan, dan 13 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 24.120.589.674. Pada Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar melaksanakan 4 Program, 8 Kegiatan, dan 13 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 27.453.391.426. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar disampaikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	APBD 2025	ANGGARAN PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					**24.120.589.674**	**27.453.391.426**	**3.332.801.752**
2.12.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**		**17.809.039.674**	**18.652.882.926**	**843.843.252**
2.12.01.2.02	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**		**13.518.693.946**	**14.347.407.910**	**828.713.964**
2.12.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 orang/bulan	PAD, DAU	13.518.693.946	14.347.407.910	828.713.964
2.12.01.2.06	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100%**		**1.654.664.800**	**1.656.752.800**	**2.088.000**
2.12.01.2.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	PAD	1.609.940.800	1.612.028.800	2.088.000

2.12.01.2.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	PAD	40.080.000	40.080.000	0
2.12.01.2.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	PAD	4.644.000	4.644.000	0
2.12.01.2.08	**Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase pemenuhan jasa penunjang kinerja perangkat daerah**	**100%**		**2.333.985.928**	**2.347.027.216**	**13.041.288**
2.12.01.2.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	PAD	2.333.985.928	2.347.027.216	13.041.288
2.12.01.2.09	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**		**301.695.000**	**301.695.000**	**0**
2.12.01.2.09.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	23 Unit	PAD	292.570.000	292.570.000	**0**

2.12.01.2.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	45 Unit	PAD	9.125.000	9.125.000	**0**
2.12.02	**Program Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan**	**100%**		**172.107.500**	**161.066.000**	**- 11.041.500**
2.12.02.2.01	**Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Presentase pelayanan pendaftaran penduduk**	**100%**		**172.107.500**	**161.066.000**	**- 11.041.500**
2.12.02.2.01.01	Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2000 Dokumen	BKK	150.000.000	150.000.000	**0**
2.12.02.2.01.04	Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	PAD	22.107.500	11.066.000	- 11.041.500
2.12.03	**Program Pencatatan Sipil**	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**	**94%**		**6.028.588.500**	**8.528.588.500**	**2.500.000.000**
2.12.03.2.02	**Kegiatan : Pelayananan Pencatatan Sipil**	**Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil**	**100%**		**6.028.588.500**	**8.528.588.500**	**2.500.000.000**
2.12.03.2.02.08	Sub Kegiatan : Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipill	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	PAD	6.028.588.500	8.528.588.500	2.500.000.000
2.12.04	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Validitas Data Kependudukan**	**100%**		**110.854.000**	**110.854.000**	**0**
2.12.04.2.01	**Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Tersedianya buku data dokumen kependudukan**	**100%**		**52.014.000**	**52.014.000**	**0**

2.12.04.2.01.01	Sub Kegiatan : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	6 Dokumen	PAD	27.855.000	27.855.000	**0**
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	PAD	24.159.000	24.159.000	**0**
2.12.04.2.04	**Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Kota Denpasar**	**100%**		**58.840.000**	**58.840.000**	**0**
2.12.04.2.04.01	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	43 Laporan	PAD	58.840.000	58.840.000	0

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan sebagai perwujudan konkrit dalam upaya mencapai visi dan misi dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seyogyanya mendapatkan perhatian dan prioritas baik dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun pendanaan yang memadai karena hal ini melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan. Di samping itu, program dan kegiatan ini menitikberatkan pada pelayanan kepada masyarakat secara langsung yang berbeda dengan program kegiatan non pelayanan.

Dalam Anggaran Induk Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar melaksanakan 4 Program, 8 Kegiatan, dan 13 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 24.120.589.674. Di dalam Anggaran Perubahan diusulkan 4 Program, 8 Kegiatan, dan 14 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 27.453.391.426.

Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Renja juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Denpasar, 10 Mei 2025
Dinas Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Drs. Dewa Gde Juli Artabrata
Pembina Utama Muda
NIP. 19680729 199303 1 006

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa maka penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai melalui program dan kegiatan di Tahun 2025.

Saran-saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terimakasih.

Denpasar, 12 Juni 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kota Denpasar

I Wayan Budha, S.IP., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 197007151992011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**
DAFTAR ISI **2**
DAFTAR TABEL **3**
1.1Latar Belakang 5
1.2Landasan Hukum 5
1.3Maksud dan Tujuan 8
1.4Sistematika Penulisan 9
BAB II **10**
BAB III **17**
BAB IV **24**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMD Tahun 2025 12

Tabel 3. 1 Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan DPMD Kota Denpasar Tahun 2025 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2025 ini merupakan penjabaran awal daripada rencana strategis (renstra) tahun 2021-2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, renja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan rencana kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Akhir akhir, penyusunan Rancangan Akhir, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan Rancangan Akhir akhir, dan penetapan rencana kerja. Adapun dalam tahap penyusunan Rancangan Akhir ini berdasar pada Rancangan Akhir RKPD dan rencana strategis (renstra) tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penyusunan Rencana Kerja ini di dalamnya telah dilakukan analisis evaluasi capaian pada tahun 2023 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2024. Selain itu, juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Bali maupun Nasional. Tidak bisa dipungkiri, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi pilihan yang strategis dalam pembangunan daerah saat ini. Hal ini mengingat Desa adalah lingkup terkecil dari sebuah negara sekaligus pemerintahan terbawah yang langsung menyentuh masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan perubahan struktur sesuai dengan Visi dan Misi Kota Denpasar, yang mana reformasi pada sektor ekonomi pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan yang tertuang dalam Rencana Strategis yang mengarahkan semua unsur yang mempengaruhi Lingkungan Internal (kekuatan dan kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) berdasarkan hal tersebut, disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja berpedoman pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara RepublikmIndonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dimaksud sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan prinsip-prinsip *good governance* (penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme) sesuai dengan Visi dan Misi.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2025, yang merupakan penjabaran tahun ke lima daripada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2021-2026. Sedangkan tujuannya adalah sebagai gambaran awal apa yang akan dilakukan dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Renja Perangkat Daerah, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi renja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi.

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar melaksanakan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 melalui APBD Kota Denpasar terdiri dari 4 program dan 8 kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (5 Kegiatan)
b) Program Peningkatan Kerjasama Desa (1 Kegiatan)
c) Program Administrasi Pemerintah Desa (1 Kegiatan)
d) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (1 Kegiatan)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2025
   Pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam kurun waktu triwulan tersebut.
2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2025
   Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Realisasi fisik sebesar 19% sedangkan keuangan nya terealisasi sebesar 15%.

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   Pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 belum ada yang melebihi target kinerja hasil/keluarkan yang direncanakan.

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

   Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah :

   a. Ketersediaan anggaran dalam memenuhi segala kebutuhan yang terdapat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
   b. Seluruh SDM yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah mengetahui tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, sehingga memperlancar proses administrasi dan pengadaan.
   c. Sistem pengadaan berbasis elektronik yang mempermudah pelaku pengadaan melakukan survey harga

   Adapun Faktor-faktor penghambat pencapaian nilai akhir kinerja sasaran adalah :

   a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya :
      Belanja masih menunggu rekomendasi barang TKDN
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya:
      Rekanan belum masuk ke dalam INAPROC V.6
   c. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga :
      Belanja dalam sub ini mengikuti pergeseran 4 sehingga mengalami kemunduran dalam proses penyusunan dokumen pertanggungjawaban (SPJ)

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra DPMD Kota Denpasar

   Sebagai implikasi dari belum optimalnya pencapaian kegiatan tersebut diatas membuat beberapa rencana target capaian kegiatan sesuai dengan apa yang tertera di Rencana Strategis belum juga dapat dicapai optimal. Hal ini tentu menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya.

Adapun Evaluasi Pelaksanaan Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dalam bentuk tabel seperti tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMD Tahun 2025

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Tahun 2025		Realisasi sampai Triwulan I 2025	
							K	Rp	K	Rp
1					2	3	4		5	
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100**	**8,573,642,591**	**19.68**	**1,523,248,497**
2	**13**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**5,530,729,963**	**35.19**	**932,681,084**
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	5,530,729,963	35.19	932,681,084
2	**13**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**358,537,400**	**0.00**	**76,451,000**
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	7,785,000	18.01	1,787,000
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	244,753,600	22.95	58,979,400
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	67,838,800	24.10	12,444,600
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	13,140,000	18.34	3,240,000
2	13	01	2.06	0009	Penyeleggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	25,020,000	24.66	-
2	**13**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**49,115,000**	**0.00**	**-**

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Tahun 2025		Realisasi sampai Triwulan I 2025	
							K	Rp	K	Rp
1					2	3	4		5	
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	100	49,115,000	-	-
2	**13**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**2,003,568,228**	**0.00**	**441,165,613**
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	171,000,000	19.67	28,777,779
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	1,832,568,228	16.83	412,387,834
2	**13**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**100**	**631,692,000**	**22.50**	**72,950,800**
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	329,232,000	25.54	72,950,800
2	13	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100	5,000,000	22.16	-
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	72,760,000	20.00	-
2	13	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	224,700,000	25.00	-
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Jumlah Kerjasama yang terbentuk**	**100**	**38,567,000**	**35.00**	**-**
2	**13**	**03**	**2.01**		**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa**	**Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan kerjasama**	**100**	**38,567,000**	**10.00**	**-**
2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	100	38,567,000	10.00	-

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Tahun 2025		Realisasi sampai Triwulan I 2025	
							K	Rp	K	Rp
1					2	3	4		5	
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Desa yang Tertib Administrasi**	**100**	**741,883,000**	**10.00**	**27,861,980**
2	**13**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**- Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa - Jumlah Bumdes yang aktif**	**100**	**741,883,000**	**0.00**	**27,861,980**
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100	348,848,000	16.81	900,000
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	100	45,841,000	16.81	26,436,980
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdes dan Lembaga Kerjasama antar desa	100	38,025,000	15.00	-
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	100	32,494,000	57.67	300,000
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	100	34,762,000	-	-
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	100	241,913,000	10.00	225,000
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif**	**100**	**2,120,202,000**	**10.00**	**257,860,000**

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Tahun 2025		Realisasi sampai Triwulan I 2025	
							K	Rp	K	Rp
1					2	3	4		5	
2	**13**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif '- Jumlah Pasar Desa dengan Fasilitasi yang baik**	**100**	**2,120,202,000**	**10.00**	**257,860,000**
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan KArang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100	3,235,000	15.00	-
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	73,680,000	-	-
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	100	154,051,000	16.98	450,000
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100	58,128,000	16.98	-

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Tahun 2025		Realisasi sampai Triwulan I 2025	
							K	Rp	K	Rp
1					2	3	4		5	
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100	55,314,000	10.00	-
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100	1,775,794,000	10.00	257,410,000
TOTAL							**100**	**11,474,294,591**	**19**	**1,808,970,477**

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan sekretariat.

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Tahun 2025 tetap mengacu pada Sasaran dan Tujuan yang telah di tetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar maupun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.

Untuk mencapai sasaran dan Tujuan yang sebagaimana yang telah ditetapkan, adapun Rencana Kerja yang akan di lakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2025 oleh Sekretariat maupun Bidang yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan DPMD Kota Denpasar Tahun 2025

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
2	13	01			Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	9,915,196,913	11,358,403,975	1,443,207,062
2	13	01	2.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	6,641,270,500	7,117,047,620	475,777,120
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	47 Orang/Bulan	6,641,270,500	7,117,047,620	475,777,120
2	13	01	2.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	358,537,400	358,537,400	-
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7,785,000	7,785,000	-
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	244,753,600	244,753,600	-
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	67,838,800	67,838,800	-
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	13,140,000	13,140,000	-
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1 Laporan	1 Laporan	25,020,000	25,020,000.00	-

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
					Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
2	13	01	2.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	49,115,000	660,444,750	611,329,750
2	13	01	2.07	0006	Pengandaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	55 Unit	63 Unit	49,115,000	660,444,750 ✓	611,329,750
2	13	01	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2,234,582,013	2,391,882,205	157,300,192
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	171,000,000	171,000,000	-
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2,063,582,013	2,220,882,205 ✓	157,300,192
2	13	01	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	100 %	631,692,000	830,492,000	198,800,000
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	329,232,000	329,232,000	-
2	13	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	5,000,000	5,000,000	-

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	97 Unit	97 Unit	72,760,000	72,760,000	-
2	13	01	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	224,700,000	423,500,000 ✓	198,800,000
2	13	03			Program : Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Kerjasama yang terbentuk	34	34	38,567,000	38,696,000	129,000
2	13	03	2.01		Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan kerjasama	27 Desa	27 Desa	38,567,000	38,696,000	129,000
2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	38,567,000	38,696,000 ✓	129,000
2	13	04			Program : Administrasi Pemerintahaan Desa	Presentase Desa yang Tertib Administrasi	100%	100%	741,883,000	1,170,856,500	428,973,500
2	13	04	2.01		Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	- Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa - Jumlah Bumdes yang aktif	27 Desa 27 Bumdes	27 Desa 27 Bumdes	741,883,000	1,170,856,500	428,973,500
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	27 Dokumen	27 Dokumen	348,848,000	403,557,500 ✓	54,709,500
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	27 Dokumen	27 Dokumen	45,841,000	45,841,000	-

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdes dan Lembaga Kerjasama antar desa	1 Dokumen	1 Dokumen	38,025,000	302,595,000 ✓	264,570,000
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	43 Dokumen	43 Dokumen	32,494,000	32,494,000	-
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	27 Dokumen	27 Dokumen	34,762,000	100,788,000 ✓	66,026,000
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Dokumen	10 Dokumen	241,913,000	285,581,000 ✓	43,668,000
2	13	05			Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif	100%	100%	2,120,202,000	3,510,510,000	1,390,308,000
2	13	05	2.01		Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupatan/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif - Jumlah Pasar Desa dengan Fasilitasi yang baik	27 LKD 15 Pasar	27 LKD 15 Pasar	2,120,202,000	3,510,510,000	1,390,308,000

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
					Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Keluruhan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluruhan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	3,235,000	3,235,000	-
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Keluruhan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluruhan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	27 Lembaga	27 Lembaga	73,680,000	153,710,000 ✓	80,030,000

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	154,051,000	474,079,000	320,028,000
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	58,128,000	58,128,000	-
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	55,314,000	55,314,000	-
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	1,775,794,000	2,766,044,000	990,250,000
TOTAL									**12,815,848,913**	**16,078,466,475**	**3,262,617,562**

Keterangan:

- Pagu Anggaran Sebelum Perubahan: DPA Induk Pergeseran Ke-IV Th 2025

BAB IV
PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan tumbuh dari prakarsa masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri dibarengi peningkatan tata kelola pemerintahan Desa. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan difokuskan pada fungsi regulasi, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar melaksanakan 4 (empat) program dengan 8 (delapan) kegiatan dengan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 16,078,466,475,-

Rencana Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Rencana Program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna.

Denpasar, 12 Juni 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kota Denpasar

I Wayan Budha, S.IP., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 197007151992011001

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

DINAS PERHUBUNGAN

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Tantangan pembangunan jangka pendek yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Denpasar khususnya Dinas Perhubungan kedepan semakin kompleks, untuk itu sangat diperlukan suatu perencanaan yang lebih mantap. Dengan perencanaan yang lebih baik dari sebelumnya maka diharapkan program pembangunan akan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2025 ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2021 - 2026.

Dengan perencanaan yang terarah dan sistematis maka pembangunan di bidang perhubungan diharapkan menuju pada Visi Wali Kota yaitu : **"Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju"** dan menunjang Misi II Wali Kota yaitu: **"Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana"**

Pada kesempatan ini pula kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan pemikiran sehingga Dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan.

Akhir kata semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembangunan bidang perhubungan yang bermuara pada peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

Om, Shanti Shanti, Shanti, Om.

Denpasar, 28 Mei 2025
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Denpasar

I Ketut Sriawan,SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19680714 199603 1 003

DAFTAR ISI

Isi Halaman

JUDUL I
KATA PENGANTAR II
DAFTAR ISI III
DAFTAR TABEL IV

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sitematika 4

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 5
2.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan 5
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Denpasar Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 5
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19
2.4 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 22

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 29

BAB IV PENUTUP 40
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

2.1 Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kota Denpasar Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 6

2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2021 - 2022 20

2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2023 - 2025 20

3.1 Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2025..... 29

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Denpasar merupakan Ibu Kota Provinsi Bali disamping sebagai pusat Pemerintahan, Kota Denpasar juga merupakan pusat perdagangan, bisnis, jasa, pendidikan dan salah satu tujuan wisata yang ada di Provinsi Bali. Dengan menyandang sebagai pusat kota yang majemuk tentunya di perlukan perhatian dan juga penanganan yang intens guna ikut mendukung peningkatan pelayanan masyarakat di bidang sarana transportasi lalulintas dan angkutan jalan. Sebagai bahan rujukan dan implementasi pelaksanaan kegiatan maka diperlukan suatu dokumen perencanaan yang bersifat komprehensif yang mana rancangan itu dituangkan dalam renstra dinas perhubungan Kota Denpasar Tahun 2021-2026,dimana dokumen ini merupakan pengejawatahan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kota denpasar tahun 2021-2026 dan untuk acuan perencanaan jangka pendek (tahunan) maka dibuatlah dokumen rencana kerja (Renja).

Renja Perubahan PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perubahan PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi PD, Renja Perubahan PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dimana Renja Perubahan PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) Kota serta

dokumen Renja Perubahan PD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan di Dinas Perhubungan Kota Denpasar.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN - PD) adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026

8. Peraturan Daerah Kota Denpasar No.15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2025 ini disusun dengan maksud menyediakan tolak ukur pelaksanaan strategi pembangunan dinas perhubungan kota denpasar untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peranan yang diemban dan dijadikan sebagai acuan bagi arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Denpasar.

2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Perhubungan Kota Denpasar tahun 2025 mempunyai tujuan sebagi berikut :

- Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang ditetapkan dapat tercapai
- Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal dan external
- Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana tahunan

- Menjadikan kerangka dasar dalam meningkatkan kualitas perencanaan kedepannya.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan - PD) Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

RENJA PERUBAHAN - PD DINAS PERHUBUNGAN
KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

BAB I : PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
1.2.Landasan Hukum
1.3.Maksud dan Tujuan
1.4.Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
2.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Denpasar Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Tujuan dan sasaran renja tentunya tidak terlepas dari pada tujuan dan sasaran Renstra, adapun tujuan dan sasaran sebagai berikut

Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselamatan, kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan laut."

Sedangkan sasaran Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas transportasi lalu lintas dan angkutan jalan
2. Meningkatkan kualitas transportasi laut

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Denpasar Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan yang dihadapi, Dinas Perhubungan Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab sampai Triwulan I Tahun 2025. Adapun evaluasi renja Dinas Perhubungan Kota Denpasar sampai dengan triwulan I dapat dilihat pada table 2.1

Tabel 2.1

Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kota Denpasar Sampai Dengan Triwulan I

Tahun 2025

Kode Rekening					Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
									Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8=5-7
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**Rp 108.517.542.123**		**Rp 6.861.539.564**	**Rp 101.656.002.559**
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota**	**100%**	**Rp 32.972.471.909**	**35,60%**	**Rp 3.462.117.535**	**Rp 29.510.354.374**
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi**	**100%**	**Rp -**	**0,00%**	**Rp -**	**Rp -**

2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp -	0,00%	Rp -	Rp -
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Rp -	0,00%	Rp -	Rp -
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**100%**	**Rp 21.299.009.481**	**83,00%**	**Rp 1.924.543.416**	**Rp 19.374.466.065**
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/Bulan	Rp 21.299.009.481	83,33%	Rp 1.924.543.416	Rp 19.374.466.065
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**81%**	**Rp 10.007.109.428**	**12,00%**	**Rp 1.385.268.038**	**Rp 8.621.841.390**
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	2 Paket	Rp 10.080.000	100,00%	Rp 10.080.000	Rp -

						Disediakan					
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Rp 9.602.252.428	42,86%	Rp 1.338.726.538	Rp 8.263.525.890
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Rp 38.452.000	100,00%	Rp 31.843.000	Rp 6.609.000
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 157.643.000	50,00%	Rp 1.363.500	Rp 156.279.500
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Rp 41.580.000	50,00%	Rp 2.805.000	Rp 38.775.000

2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	Rp 157.102.000	5,71%	Rp 450.000	Rp 156.652.000
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**10%**	**Rp -**	**0,00%**	**Rp -**	**Rp -**
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Rp -	0,00%	Rp -	Rp -
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**Rp 830.000.000**	**25,00%**	**Rp 84.886.581**	**Rp 745.113.419**

2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp 830.000.000	25,00%	Rp 84.886.581	Rp 745.113.419
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik**	**85%**	**Rp 836.353.000**	**10,00%**	**Rp 67.419.500**	**Rp 768.933.500**
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	106 Unit	Rp 554.563.000	23,58%	Rp 67.419.500	Rp 487.143.500
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	116 Unit	Rp 118.820.000	0,00%	Rp -	Rp 118.820.000

2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 162.970.000	0,00%	Rp -	Rp 162.970.000
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan**	**35%**	**Rp 73.482.334.214**	**84,00%**	**Rp 3.399.062.029**	**Rp 70.083.272.185**
2	**15**	**02**	**2.01**		**Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**			**Rp -**	**0,00%**	**Rp -**	Rp -
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupten/Kota	1 Dokumen	Rp -	0,00%	Rp -	Rp -
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase terpenuhinya perlengkapan jalan kabupaten / Kota**	**97%**	**Rp 54.727.239.988**	**1,00%**	**Rp 3.186.268.229**	**Rp 51.540.971.759**

2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	85 Unit	Rp 5.115.000.000	0,00%	Rp -	Rp 5.115.000.000
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	78 Unit	Rp 25.481.220.988	0,00%	Rp 156.450.000	Rp 25.324.770.988
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	142 Unit	Rp 24.131.019.000	2,82%	Rp 3.029.818.229	Rp 21.101.200.771
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Pengembangan Utilitas terminal penumpang tipe C**	**70%**	**Rp 2.201.435.150**	**25,00%**	**Rp 2.033.000**	**Rp 2.199.402.150**
2	15	02	2.03	07	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Unit	Rp 1.469.900.000	0,00%	Rp -	Rp 1.469.900.000
2	15	02	2.03	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	Rp 731.535.150	0,00%	Rp 2.033.000	Rp 729.502.150

2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Uji**	**70%**	**Rp 3.208.255.776**	**14,00%**	**Rp 12.155.000**	**Rp 3.196.100.776**
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3 Unit	Rp 1.862.036.000	0,00%	Rp 8.000.000	Rp 1.854.036.000
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30000 Dokumen	Rp 1.033.600.000	0,00%	Rp -	Rp 1.033.600.000
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	39 Unit	Rp 312.619.776	0,00%	Rp 4.155.000	Rp 308.464.776

2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase terwujudnya manajemen rekayasa yang efektif dan efesien untuk jaringan jalan kabupaten / kota (tingkat kinerja pelayanan jalan)**	**59%**	**Rp 4.625.110.000**	**0,00%**	**Rp 122.400.000**	**Rp 4.502.710.000**
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	8 Laporan	Rp 4.327.075.000	0,00%	Rp 122.400.000	Rp 4.204.675.000
2	15	02	2.06	17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	Rp 298.035.000	0,00%	Rp -	Rp 298.035.000

2	**15**	**02**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Persentase terlaksananya kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ**	**100%**	**Rp 55.025.000**	**0,00%**	**Rp -**	**Rp 55.025.000**
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	Rp 37.500.000	0,00%	Rp -	Rp 37.500.000
2	15	02	2.08	07	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	Rp 17.525.000	0,00%	Rp -	Rp 17.525.000

2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penumpang yang menggunakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**35%**	**Rp 8.665.268.300**	**84,00%**	**Rp 76.205.800**	**Rp 8.589.062.500**
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	14 Unit	Rp 577.832.000	0,00%	Rp -	Rp 577.832.000

2	15	02	2.09	03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	Rp 8.087.436.300	92,86%	Rp 76.205.800	Rp 8.011.230.500
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar**	**83%**	**Rp 2.062.736.000**	**0,00%**	**Rp 360.000**	**Rp 2.062.376.000**
2	**15**	**03**	**2.12**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Persentase Peningkatan pemenuhan Sarpras Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**38%**	**Rp 2.062.736.000**	**5,00%**	**Rp 360.000**	**Rp 2.062.376.000**

2	15	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1 Unit	Rp 1.971.674.000	0,00%	Rp -	Rp 1.971.674.000
2	15	03	2.12	03	Pengoprasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Unit	Rp 91.062.000	0,00%	Rp 360.000	Rp 90.702.000

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Dinas Perhubungan Kota Denpasar mempunyai beberapa indikator sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan capaian kinerja pelayanan. Data pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kota Denpasar dilihat pada table 2.2 dan tabel 2.3

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2021 - 2022

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target			Realisasi		Proyeksi	Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	11
1	Peningkatan Load Faktor Angkutan			33%	33%	33%	17,84%	46,68%	-	
2	Pemenuhan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dan Angkutan Laut			60%	60%	62%	16%	8,00%	-	
3	Persentase Sarana Angkutan yang Berkeselamatan			55%	55%	57%	181%	105,79%	-	

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2023 – 2025

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target			Realisasi			Proyeksi	Catatan Analisa
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Pelayanan Kinerja Jalan (Vc Rasio)			67%	67%	67%	67,00%	69,80%	-	-	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			70%	78%	83%	76,88%	75,85%	-	-	

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 2.2 merupakan pencapaian kinerja pada dokumen perencanaan (RENSTRA) sebelum mengalami perubahan dan menjelaskan bahwa meningkatnya keselamatan transportasi yang mana sarana angkutan yang berkesalamatan Kota Denpasar meningkat sebesar 105,79%, sehingga di sektor keselamatan transportasi dari aspek sarana telah mengalami peningkatan yang signifikan. Sasaran RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 dengan RENSTRA Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 – 2024 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.6050/PR.002/DRJD/2020 saling berkaitan. Sasaran RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 yakni terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan berkaitan dengan Sasaran RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 – 2024 pada Program Infrastruktur Konektivitas dalam Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat. Sasaran RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 yaitu meningkatnya prasarana dan fasilitas transportasi yang berkeselamatan memiliki hubungan dengan Sasaran RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 – 2024 pada Program Infrastruktur Konektivitas dalam Sasaran Kegiatan Meningkatnya Fasilitas dan Layanan Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan. Sasaran ketiga yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar yang terkandung pada RENSTRA Tahun 2021 - 2026 yakni meningkatnya sarana transportasi yang berkeselamatan berkaitan Program Infrastruktur Konektivitas dalam Sasaran Program Meningkatnya Keselamatan Trasnportasi pada RENSTRA Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 – 2024. Sedangkan untuk tabel 2.3 merupakan capaian kinerja pada dokumen (RENSTRA) setelah mengalami perubahan dan menjelaskan bahwa capaian dari Indeks Pelayanan Kinerja Jalan (Vc Rasio) sudah melampaui target sebesar 69,80% dari target yang direncanakan sebesar 67% akan tetapi untuk Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami penurunan dari tahun 2023 dan tidak mencapai target di tahun 2024 dikarenakan dari hasil survey yang dilakukan menerangkan bahwa penurunan ini disebabkan oleh penurunan kualitas pelayanan

pelabuhan sanur yang paling utama adalah tidak tersedianya lahan parkir kendaraan yang memadai, sehingga menyebabkan kesemrwawutan dan kemacetan lalu lintas di area pelabuhan Sanur. Kondisi tersebut jika tidak dilakukan penataan penyediaan kantong parker dan sirkulasi kendaraan, akan memperburuk pelayanan. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan IKM di Pelabuhan Sanur yakni :

1. Menyiapkan perencaanaan penataan kawasasn pelabuhan sanur khususnya pengembangan penyediaan kantong parkir dan sirkulasi kendaraan.
2. Mengajukan permohonan Pengelolaan Pelabuhan Sanur oleh pemerintah Kota Denpasar kepada bapak Menteri Perhubungan dengan menyusun Business Plan yang telah dipaparkan langsung dihadapan Bapak Menteri Perhubungan RI melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sehingga penyediaan infrastruktur parkir dan akses keluar masuk kendaraan menuju Pelabuhan Sanur dapat segera dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar.
3. Mengkoordinasikan anggaran infrastuktur pendukung lainya bersama OPD terkait dalam upaya memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk operasional Pelabuhan Sanur.

2.4 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perkembangan transportasi Kota Denpasar tidak terlepas dari isu-isu strategis yang baik yang terkait langsung dengan sektor transportasi maupun yang mempengaruhi sektor transportasi tersebut. Isu-isu strategis tersebut dapat dipengaruhi baik dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) yang tentunya akan mempengaruhi terhadap perubahan sistemtransportasi yang ada. Isu-isu strategis yang dijabarkan di dalam pengembangan transportasi wilayah Kota Denpasar adalah sebagai berikut

1. Perkembangan Tata Guna Lahan

Isu utama dalam prasarana transportasi di Kota Denpasar khususnya jaringan jalan yaitu lemahnya struktur jaringan jalan dimana Kota Denpasar tidak

memiliki struktur ideal seperti grid ataukah ring-radial sehingga terjadi pencampuran dan penumpukan pergerakan menerus dan lokal di pusat Kota Denpasar. Jaringan jalan lingkar Kota Denpasar seperti Jalan Bypass Gatot Subroto dan Bypass Ngurah Rai merupakan perlintasan pergerakan lalu lintas lokal, regional dan nasional. Sehingga terjadi konflik pergerakan yang seringkali justru menyebabkan kemacetan lalu lintas. Lebar jalan di Kota Denpasar terbatas dan hampir tidak memungkinkan lagi dilakukan pengembangan jalan. Lebar jalan yang sudah terbatas dan dikurangi lagi kapasitasnya oleh keberadaan parkir di badan jalan. Perkembangan volume lalu lintas yang tinggi dari tahun ke tahun tidak mampu diikuti dengan penambahan jaringan jalan. Pada sebagian persimpangan dan ruas jalan kapasitasnya sudah mulai terlampui. Tundaan yang tinggi dan kemacetan lalu lintas mulai menjadi pemandangan sehari-hari di Kota Denpasar terutama pada saat jam puncak. Oleh sebab itu kinerja simpang dan ruas jalan di Kota Denpasar sangat rentan dan dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas dan permukiman terutama di Kota Denpasar dan Badung Selatan. Arus urbanisasi yang terus meningkat setiap tahun akibat pesatnya perkembangan tata guna lahan terutama di Denpasar dan Badung Selatan akan kian membebani jaringan jalan di Kota Denpasar

2. Pengembangan Pusat-pusat Perbelanjaan dan Perdagangan

Pusat perbelanjaan berskala besar seperti swalayan dan mall telah berkembang pesat di Kota Denpasar, seperti Tiara Dewata, Ramayana, Matahari, Level 21, dan sepanjang Mahendradata. Bangkitan yang ditimbulkan oleh pusat-pusat perbelanjaan tersebut cukup tinggi. Terbatasnya ruang parker telah menyebabkan penggunaan sebagian badan jalan untuk parkir kendaraan. Hal ini selain mengurangi kapasitas jalan juga mengakibatkan tundaan yang tinggi hingga kemacetan lalu lintas. Pengembangan pusat-pusat perbelanjaan skala besar seperti ini ke depannya harus memiliki kajian analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) sebelum diterbitkannya IMB. Selain pusat-pusat perbelanjaan berskala besar, di Kota Denpasar juga kian menjamur aktivitas pedagang kaki lima dengan konsep modern yang menjual makanan nasi jingo dan kopi disertai dengan live musik. Kondisi ini merupakan dampak dari Kota Denpasar sebagai pusat kegiatan dan

pusat pendidikan yang aktivitas di malam hari semakin tinggi. Namun demikian yang harus menjadi perhatian sebagian besar usaha tersebut merupakan peralihan fungsi bangunan eksisting dan tidak menyediakan tempat parkir yang memadai sehingga kendaraan parkir di badan jalan. Maka dari itu, ke depannya sangat memerlukan perhatian khusus untuk meminimalisir dampak yang terjadi. Demikian pula pasar-pasaar tradisional banyak yang tidak memiliki fasilitas parkir dan ruang sirkulasi arus lalu lintas memadai sehingga menyebabkan kemacetan pada ruas jalan di sekitarnya. Pedagang berjualan hingga meluber ke pinggir jalan dan di atas trotoar secara tidak terkendali, sehingga menyebabkan kesemrawutan lalu lintas. Pedagang musiman baik berkendaraan maupun tidak, akhir-akhir ini dengan alasan dampak pandemi covid-19 mulai banyak berjualan di pinggir jalan sehingga menyebabkan kesan kumuh dan mengganggu arus lalu lintas. Bila hal ini jika dibiarkan tanpa penertiban, maka para pedagang akan kian menjamur dan kelancaran lalu lintas terganggu

3. Pembangunan Hotel dan Condotel

Sebagai daerah pariwisata, kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara terus meningkat setiap tahunnya. Pembangunan hotel dan condotel juga mengalami peningkatan. Hotel dan contodel merupakan salah satu sumber bangkitan perjalanan di Kota Denpasar. Sebagian hotel dan condotel tersebut jika tidak menyediakan tempat parkir yang memadai akan memanfaatkan badan jalan untuk parkir. Kendaraan pariwisata dan taksi yang menunggu wisatawan cenderung antri membentuk terminal bayangan disekitar lokasi hotel dan condotel tersebut. Oleh karena itu, persyaratan IMB perlu diperketat dan diprasyaratkan untuk dilakukan kajian Andalalin agar pihak pengembang memperhatikan kecukupan fasilitas parkir yang disediakan dan maneuver kendaraan masuk/keluar tidak sampai mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Pembangunan hotel dan Condotel di Badung Selatan juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pembangunan hotel beserta aktivitas penunjangnya diikuti oleh kian meningkatnya arus urbanisasi. Pergerakan dari/ke Badung Selatan melintasi jaringan jalan di Kota Denpasar seperti halnya sepanjang wilayah Denpasar Barat desa Pemecutan kelod sampai padang sambian.

Sehingga apabila perkembangan aktivitas kepariwisataan terus berkembang di Badung Selatan, maka akan berkontribusi terhadap kian parahnya kemacetan lalu lintas yang terjadi di Kota Denpasar.

4. Perkembangan Permukiman

Dengan kian meningkatnya aktivitas perekonomian di Kota Denpasar dan juga Badung Selatan, maka perkembangan permukiman juga kian meningkat untuk mengakomodasi perkembangan jumlah para pekerja yang tinggal di Kota Denpasar. Para pengembang maupun masyarakat seringkali melanggar jalur hijau akibat kian terbatasnya lahan di Kota Denpasar. Harga tanah kian meningkat dan sebagai konsekuensinya perkembangan permukiman terjadi dengan pesat ke arah luar Kota Denpasar yaitu kearah Badung, Gianyar, Tabanan bahkan hingga ke Klungkung. Kondisi ini telah menyebabkan kian meningkatnya arus pergerakan eskternal yang membebani jaringan jalan di Kota Denpasar.

5. Perkembangan Sekolah

Sebagai Kota Inti dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Sarbagita, sekolah-sekolah favorit terpusat di Kota Denpasar. Distribusi lokasi sekolah favorit ini tidak menyebar merata secara spasial. Tidak juga ada upaya rayonisasi sekolah. Sebagai akibatnya pergerakan dari/ke sekolah di Kota Denpasar turut berkontribusi terhadap kemacetan yang terjadi khususnya pada saat jam puncak pagi dan jam puncak siang. Lokasi sekolah yang berada pada jalan utama di Kota Denpasar menimbulkan konflik pergerakan dengan arus lalu lintas menerus. Hampir setiap hari bisa ditemui adanya kemacetan lalu lintas pada jam masuk/keluar siswa sekolah di Kota Denpasar. Banyak sekolah yang tidak dapat menyediakan fasilitas parkir dan maneuver kendaraan antar/jemput yang memadai sehingga membebani ruas jalan disekitarnya. Siswa TK, SD dan SMP sebagian besar moda transportasinya ke sekolah dengan diantar/jemput dengan kendaraan pribadi. Sebagian siswa SMP dan siswa SMU sangat tergantung pada penggunaan kendaraan pribadi ke sekolah. Beban lalu lintas akibat perjalanan dari/ke sekolah cukup tinggi dan dampaknya cukup luas mengingat pola pergerakan siswa tersebar ke seluruh pelosok kota bahkan ada yang berasal dari luar Kota Denpasar.

Dari hasil studi kajian bus sekolah tahun 2015 didapatkan jumlah pelajar yang berdomilisi di Kota Denpasar lebih dari 125.000 jiwa, persentase siswa sekolah yang menggunakan angkutan umum sangat kecil kurang dari 1 %. Hal ini antara lain akibat rendahnya koneksitas trayek dan kualitas pelayanan angkutan umum serta tingginya biaya perjalanan dengan angkutan umum

6. Perkembangan Prasarana Transportasi

Perkembangan volume lalu lintas (aspek demand) jauh lebih pesat daripada kemampuan pemerintah untuk mengembangkan prasarana transportasi (aspek supply). Perkembangan panjang jalan di Kota Denpasar hanya sekitar 0,48% per tahun. Berbagai rencana pengembangan simpul transportasi seperti Bandar Udara Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Sanur, dan Terminal Modern Ubung, yang menimbulkan tambahan bangkitan perjalanan, akan mempengaruhi kinerja jaringan jalan di Kota Denpasar, wajib dijadikan antisipasi di dalam pembangunan transportasi 5 (lima) tahun ke depan. Adapun program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rencana Pelabuhan Sanur dan Pelabuhan Benoa

Pelabuhan Sanur yang saat ini sedang dibangun oleh Kementrian Perhubungan akan dirancang melayani pergerakan orang maupun barang antar kabupaten/kota di Provinsi Bali terutama penyebrangan lintas Sanur – Nusa Penida. Pelabuhan Sanur dikembangkan secara terbatas sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan arahan Tatrawil Provinsi Bali (2012) yang kewenangam pengelolaannya di Pemerintah Kota Denpasar. Pelabuhan Sanur akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2022 dengan kapasitas daya tamping kapal sebanyak 75 unit. Mitigasi yang perlu dilakukan salah satunya adalah menyiapkan intergrasi moda trasportasi ke pelabuhan dan diperlukan akses keluar masuk ke Pelabuhan Sanur dari jalur utama By Pass Ngurah Rai.

Selain Pelabuhan Sanur, pengembangan Pelabuhan Benoa sebagai pelabuhan regional di Provinsi Bali perlu mendapatkan perhatian

pemerintah Kota Denpasar. Pelabuhan Benoa merupakan Pelabuhan Utama yang dikembangkan terutama untuk pergerakan orang baik lintas nasional maupun internasional (wisatawan melalui kapal Cruise). Luas pelabuhan yang disetujui sesuai arahan RTRW Kota Denpasar yaitu seluas 143 Ha. Kegiatan bongkar muat barang dilakukan secara terbatas dan diarahkan ke Pelabuhan Celukan Bawang untuk mengurangi beban lalu lintas angkutan barang di Kota Denpasar

b. Pengembangan Terminal Modern Ubung di Kota Denpasar

Kota Denpasar merupakan simpul perlintasan dari jalur-jalur pergerakan regional, khususnya di Bali Selatan. Dalam perkembangannya, seiring dengan meningkatnya intensitas kegiatan perangkutan umum regional, ditambah dengan perangkutan lokal (antar kabupaten dan kecamatan) dan adanya rencana pengembangan Terminal Ubung sebagai Terminal Modern dan TOD akibatnya sejumlah persoalan muncul berkaitan dengan kelancaran turun-naik penumpang, perparkiran bus dan kendaraan lain, serta kenyamanan. Diperlukan penegasan fungsi terminal dan penataan sistem operasional angkutan umum untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

c. Pengembangan Simpul Angkutan Barang

Keberadaan simpul angkutan barang di Jalan Gunung Galunggung, Padasambian Kaja, Denpasar memiliki luas 2 Ha. Luas bangunan lantai I, II dan III masing-masing 1,050 m2. Luas areal yang diaspal 8.268 m2. Luas gudang seluruhnya 1.398,82 m2 (terdiri dari 16 gudang). Luas jembatan timbang 156 m2 (kapasitas 60 ton). Bengkel dan perawatan seluas 60 m2 dan ruang tunggu awak kendaraan seluas 80 m2. Kantin 50 m2, Genset 28 m2, Pos jaga 1 (10 m2), pos jaga 2 (2,2 m2), pos jaga 3 (7 m2). Tempat sudi/padmasana 65 m2. Akses jalan masuk terminal (panjang 1 km, lebar 14 m). Daya tampung kendaraan besar 50 unit.

Dalam kenyataannya angkutan Barang tersebut tidak dapat menampung keseluruhan kendaraan barang yang ada. Gudang-gudang yang ada seperti disepanjang Jl. Mahendradata tidak menyediakan ruang parkir yang memadai. Sehingga disepanjang jalan tersebut dipenuhi oleh truk-truk besar yang parkir menunggu untuk bongkar muat barang. Rata-rata akumulasi kendaraan truk yang parkir mencapai 98 unit per jam. Untuk itu diperlukan perluasan areal terminal barang. Disamping itu, dengan rencana dibatasinya waktu bagi kendaraan barang untuk memasuki jaringan jalan di Kota Denpasar, maka diperlukan tempat mangkal bagi kendaraan barang tersebut sebelum dapat melanjutkan perjalanannya

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program/Kegiatan/sub kegiatan dan Pendanaan pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar tentunya telah disesuaikan dengan dokumen renstra yang ada tentunya pendanaan yang dimuat berdasarkan pendanaan tahun lalu yang diakumulasikan sesuai dengan keadaan pada tahun tersebut adapun rencana kerja dan pendanaan dapat dijabarkan pada tabel 3.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2025

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		SUMBER DANA	PAGU		BERTAMBAH / BERKURANG
							INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**					**Rp 124.560.013.187**	**Rp146.287.646.011**	**Rp 21.727.632.824**
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota**	**100%**	**100%**		**Rp 48.177.510.973**	**Rp 55.700.142.347**	**Rp 7.522.631.374**

					KABUPATEN/KOTA							
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi**	**100%**	**100%**		**Rp -**	**Rp -**	Rp -
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		Rp -	Rp -	Rp -
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan		Rp -	Rp -	Rp -
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**100%**	**100%**		**Rp 36.442.670.545**	**Rp 39.824.992.195**	**Rp 3.382.321.650**
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/Bulan	132 Orang/Bulan		Rp 36.442.670.545	Rp 39.824.992.195	Rp 3.382.321.650
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**83%**	**83%**		**Rp 10.068.487.428**	**Rp 14.090.777.152**	**Rp 4.022.289.724**

2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket		Rp 10.080.000	Rp 10.080.000	Rp -
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket		Rp 9.627.252.428	Rp 13.685.920.152	Rp 4.058.667.724
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket		Rp 38.452.000	Rp 38.452.000	Rp -
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket		Rp 157.643.000	Rp 157.643.000	Rp -
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen		Rp 41.580.000	Rp 41.580.000	Rp -
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	70 Laporan		Rp 193.480.000	Rp 157.102.000	-Rp 36.378.000

2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**10%**	**10%**		**Rp -**	**Rp 100.000.000**	**Rp 100.000.000**
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit		Rp -	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**		**Rp 830.000.000**	**Rp 824.500.000**	-Rp 5.500.000
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan		Rp 830.000.000	Rp 824.500.000	-Rp 5.500.000
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik**	**85%**	**85%**		**Rp 836.353.000**	**Rp 859.873.000**	**Rp 23.520.000**

2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	106 Unit	106 Unit		Rp 554.563.000	Rp 578.083.000	Rp 23.520.000
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	116 Unit	116 Unit		Rp 118.820.000	Rp 118.820.000	Rp -
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		Rp 162.970.000	Rp 162.970.000	Rp -
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan**	**35%**	**35%**		**Rp 74.265.198.214**	**Rp 88.349.767.664**	**Rp 14.084.569.450**
2	**15**	**02**	**2.01**		**Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**					**Rp -**	**Rp -**	Rp -

2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		Rp -	Rp -	Rp -
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase terpenuhinya perlengkapan jalan kabupaten / Kota**	**97%**	**97%**		**Rp 55.458.503.988**	**Rp 68.186.016.938**	**Rp 12.727.512.950**
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	85 Unit	85 Unit		Rp 5.115.000.000	Rp 13.875.000.000	Rp 8.760.000.000
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	78 Unit	78 Unit		Rp 26.212.484.988	Rp 28.990.324.938	Rp 2.777.839.950
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	142 Unit	142 Unit		Rp 24.131.019.000	Rp 25.320.692.000	Rp 1.189.673.000
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Pengembangan Utilitas terminal penumpang tipe C**	**70%**	**70%**		**Rp 2.201.785.150**	**Rp 2.291.848.650**	**Rp 90.063.500**
2	15	02	2.03	07	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Unit	1 Unit		Rp 1.470.250.000	Rp 1.552.900.000	Rp 82.650.000

2	15	02	2.03	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	4 Unit		Rp 731.535.150	Rp 738.948.650	Rp 7.413.500
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Uji**	**70%**	**70%**		**Rp 3.208.605.776**	**Rp 3.566.335.776**	**Rp 357.730.000**
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3 Unit	3 Unit		Rp 1.862.386.000	Rp 2.210.036.000	Rp 347.650.000
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30000 Dokumen	30000 Dokumen		Rp 1.033.600.000	Rp 1.033.600.000	Rp -
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	39 Unit	39 Unit		Rp 312.619.776	Rp 322.699.776	Rp 10.080.000
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase terwujudnya manajemen rekayasa yang efektif dan efesien untuk jaringan**	**59%**	**59%**		**Rp 4.676.010.000**	**Rp 4.908.086.000**	**Rp 232.076.000**

						jalan kabupaten / kota (tingkat kinerja pelayanan jalan)						
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	6 Laporan		Rp 4.377.975.000	Rp 4.610.051.000	Rp 232.076.000
2	15	02	2.06	17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	8 Laporan	8 Laporan		Rp 298.035.000	Rp 298.035.000	Rp -
2	**15**	**02**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Persentase terlaksananya kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ**	**100%**	**100%**		**Rp 55.025.000**	**Rp 55.025.000**	**Rp -**

2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan		Rp 37.500.000	Rp 37.500.000	Rp -
2	15	02	2.08	07	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	1 Laporan		Rp 17.525.000	Rp 17.525.000	Rp -
2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penumpang yang menggunakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**35%**	**35%**		**Rp 8.665.268.300**	**Rp 9.342.455.300**	**Rp 677.187.000**

2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan		Rp 577.832.000	Rp 1.150.396.000	Rp 572.564.000
2	15	02	2.09	03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	14 Unit	14 Unit		Rp 8.087.436.300	Rp 8.192.059.300	Rp 104.623.000
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar**	**83%**	**83%**		**Rp 2.117.304.000**	**Rp 2.237.736.000**	**Rp 120.432.000**
2	**15**	**03**	**2.12**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan**	**Persentase Peningkatan pemenuhan Sarpras Pengoprasian Pelabuhan**	**38%**	**38%**		**Rp 2.117.304.000**	**Rp 2.237.736.000**	**Rp 120.432.000**

					Pengumpan Lokal	**Pengumpan Lokal**						
2	15	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1 Unit	1 Unit		Rp 2.025.892.000	Rp 2.146.674.000	Rp 120.782.000
2	15	03	2.12	03	Pengoprasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit		Rp 91.412.000	Rp 91.062.000	-Rp 350.000

BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan yang lebih terarah maka Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025 dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang sehingga tujuan dan sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dapat tercapai dan tentunya diharapkan pula dengan tercapainya tujuan dan sasaran tersebut dapat mewujudkan efisiensi sistem angkutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, kesetaraan dalam mobilitas di antara seluruh anggota masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dengan memperkecil efek negatif dari emisi kendaraan dan kebisingan, dan peningkatan keselamatan guna mengurangi jumlah korban kecelakaan lalu lintas. Renja PD Kota Denpasar ini merupakan turunan dan masih merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari RKPD Kota Denpasar yang memuat Prioritas Pembangunan, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Denpasar ini berlaku dari tanggal 1 Oktober 2025 s/d 31 Desember 2025 dengan jumlah 3 Program, 13 Kegiatan dan 30 sub kegiatan, untuk menunjang keberhasilan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025, maka diperlukan koordinasi baik lintas wilayah maupun lintas sektoral yang dapat dikoordinasikan melalui berbagai forum koordinasi seperti MUSRENBANG. Dengan demikian dalam perencanaan pembangunan diharapkan ada peran serta masyarakat (*Partisipatory Planning*).



Jln. Gunung Galunggung no. 1, Padangsambian Kaja
Tel. (0361) 8443206 - Fax (0361) 8443208
email : perhubungan@denpasarkota.go.id
www.perhubungan.denpasarkota.go.id

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Wara Nugraha-Nya, maka Perubahan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar tahun 2025 dapat diselesaikan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk wajib menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar tahun 2025 ini tidak terlepas dengan kendala-kendala teknis yang dihadapi, namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut dengan langkah-langkah antisipatif melalui koordinasi dengan instansi dan pihak terkait. Mudah-mudahan Perubahan RENJA ini dapat memberikan informasi untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar pada tahun-tahun berikutnya.

Denpasar, 28 Mei 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kota Denpasar



Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta,SSTP,MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 197801281996121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ---------- 1

1.2. Landasan Hukum. ---------- 3

1.3. Maksud dan Tujuan ---------- 4

1.4. Sistematika Penulisan ---------- 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Sampai Triwulan I Tahun 2025 8

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar 23

BAB IV PENUTUP 32

DAFTAR TABEL

2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar 9

2.2. Pencapaian Kinerja terkait Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar 14

2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar 24

3.1. Perubahan Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar 27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah sebagai rencana kerja tahunan. Undang- undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Sebagai tindak lanjutnya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra-Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD serta mengacu pada hasil Musrenbang.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II. Di dalam perubahan Renja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah. Dengan adanya Perubahan Renja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman

pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program Perangkat Daerah lainnya.

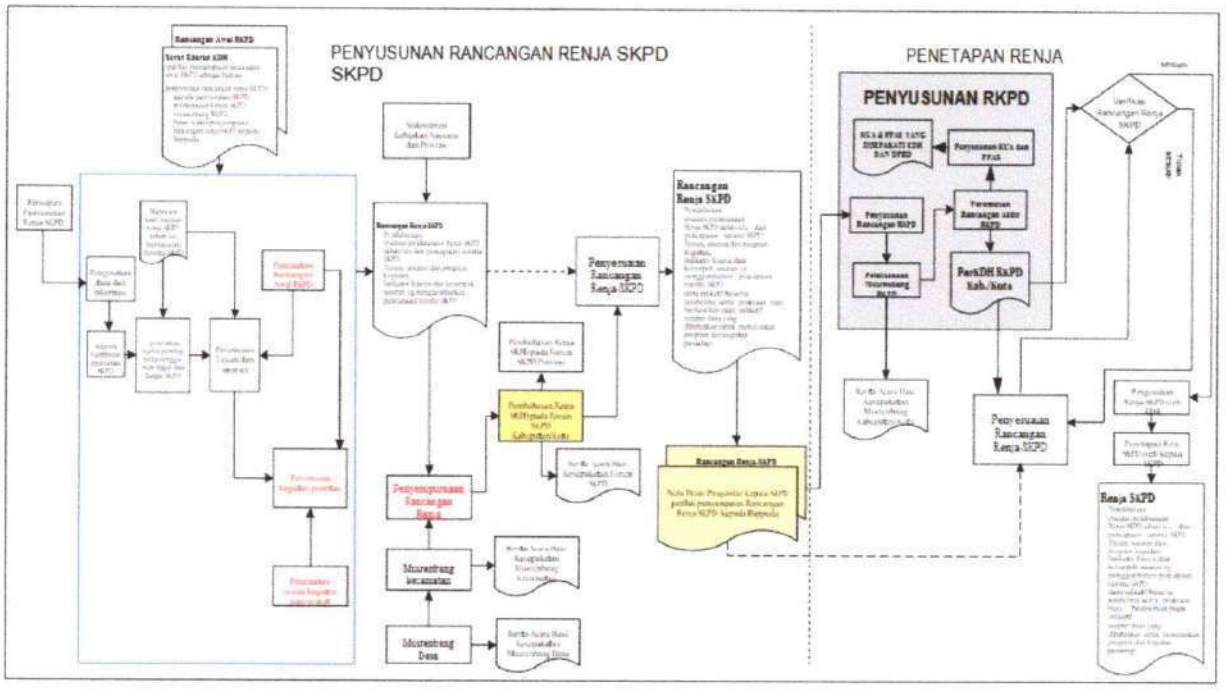
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar juga diwajibkan menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2024. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan di Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah, dan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja SKPD sebagai berikut :

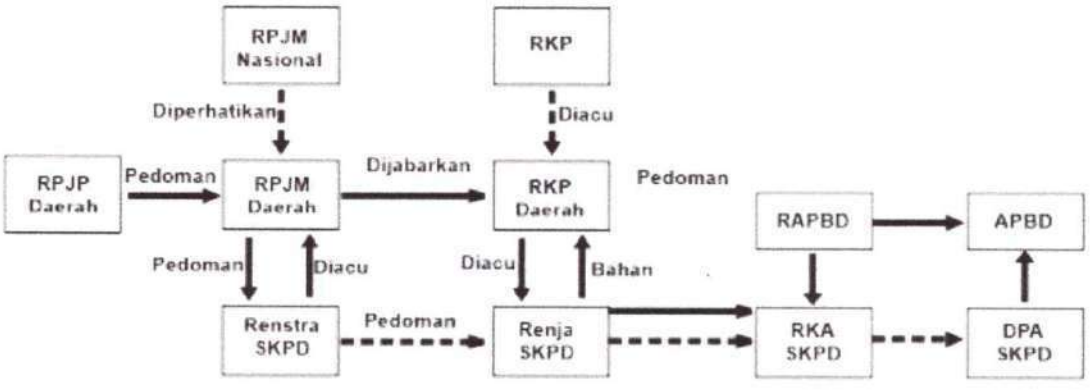
a. Persiapan penyusunan Renja OPD
b. Penyusunan Rancangan Renja OPD
c. Pelaksanaan Forum OPD
d. Penetapan Renja OPD

Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Keterkaitan Renja OPD dengan Dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen yang ada diatasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD, dan RPJM, bagi RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Keterkaitan Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dapat di Lihat Pada Gambar di Bawah ini :



1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2025 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1992, tentang Pembentukan Kota Denpasar:
2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025;

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016), tambahan lembaran daerah Kota Denpasar Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali: (5,100/200));
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah;
15. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2024 tentan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar tahun 2025:

a. Menjabarkan Sasaran dan Program yang telah tertuang di dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dalam bentuk kegiatan Tahunan agar efektif dan terarahnya pelaksanaan program serta menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
b. Melakukan penyesuaian terhadap adanya perubahan dinamika pembangunan dan kebutuhan yang berkembang demi meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

c. Melakukan pencermatan terhadap hasil evaluasi Renja Awal dan melakukan penyesuaian pada Perubahan Renja.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

a. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
b. Untuk menyesuaikan rencana kerja dengan kebijakan terbaru dan selaras dengan Asta Cita serta Prioritas Nasional.
c. Untuk melakukan penyesuaian terhadap hasil Evaluasi Renja jika dalam pelaksanaanya terdapat kekurangan atau hambatan agar dilakukan perubahan rencana kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar.

1.4 Sistematika Penyajian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Renja secara ringkas yang mencakup, antara lain:

1.1 Latar belakang, Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Denpasar serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

1.2 Landasan hukum, Memuat penjelasan tentang Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang (Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar sampai Triwulan I

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sampai Triwulan I mengacu pada APBD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

Dalam bab ini menyajikan rumusan Rencana Program dan Kegiatan di Tahun 2025 beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Sampai Triwulan I

Evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa *input, output,* dan *outcome* pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara lebih langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimal indikator output.

Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar selama tahun 2025. Adaupun Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Kota Denpasar

No	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TW I TAHUN 2025				
			TARGET RENJA SKPD TAHUN 2025		REALISASI KINERJA S/D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**17.554.048.809**	**15.23**	**2.187.886.607**	**15.23**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**17.554.048.809**	**15.23**	**2.187.886.607**	**15.23**
I	**Kegiatan** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1	**Sub Kegiatan** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang	8.845.985.471	24,09	1.521.339.995	24,09
II	**Kegiatan** Administrasi Umum Perangkat Daerah						
2	**Sub Kegiatan** Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	2.431.837.358	23.68	420.728.500	23.68
3	**Sub Kegiatan** Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	103.865.280	10,40	10.800.000	10,40
4	**Sub Kegiatan** Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29.388.000	0	0	0
5	**Sub Kegiatan** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	51.020.000	0	0	0
III	**Kegiatan** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						

	Daerah						
6	**Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	508.615.700	10,77	54.802.300	10,77
7	**Sub Kegiatan** Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	119 Unit	111.660.600	0	0	0
IV	**Kegiatan** Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
8	**Sub Kegiatan** Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	89.512.000	0	0	0
9	**Sub Kegiatan** Kemitraan Komunikasi dan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	38.975.000	15.46	6.024.000	15.46
10	**Sub Kegiatan** Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100%	630.475.000	14.53	91.605.000	14.53
11	**Sub Kegiatan** Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	339.831.400	11.51	39.129.840	11.51
12	**Sub Kegiatan** Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	1 Konten	150.750.000	13.42	20.225.000	13.42
V	**Kegiatan** Pengelolaan E-						

	government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
13	**Sub Kegiatan** Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	286.825.000	1.42	4.062.000	1.42
14	**Sub Kegiatan** Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	186.064.000	0.32	600.000	0.32
15	**Sub Kegiatan** Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	616.000.000	0.12	750.000	0.12
16	**Sub Kegiatan** Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Aplikasi	107.200.000	0.94	1.005.000	0.94
17	**Sub Kegiatan** Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	75 Perangkat Daerah	2.751.175.000	15.914.972	0.58	15.914.972
VI	**Kegiatan** Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
18	**Sub Kegiatan** Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	28.000.000	0	0	0
19	**Sub Kegiatan** Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	62.650.000	0	0	0
VII	**Kegiatan** Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
20	**Sub Kegiatan** Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan	98 Perangkat Daerah	184.219.000	0.49	900.000	0.49

	Kabupaten/Kota	Layanan Keamanan Informasi					
				17.554.048.809	**15.23**	**2.187.886.607**	**15.23**

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, terdapat beberapa evaluasi yang dapat disimpulakan meliputi:

1. **Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

   Dalam pelaksanaan Triwulan I Tahun anggaran 2025, Proses pengadaan barang dan jasa belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan terkendala dengan proses pengadaan yang menggunakan Aplikasi E-Catalog Versi 6 beserta adanya deretan proses rasionalisasi/pergeseran anggaran yang merujuk pada Inpres No 1 Presiden terkait Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. **Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

   Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun anggaran 2025, pencapaian realisasi Fisik sub kegiatan sebesar 26% dan realisasi keuangan 15,23 % dari target yang direncanakan sebesar 25 %.

3. **Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program /kegiatan**

   Faktor-faktor penghambat pencapaian nilai akhir kinerja sasaran adalah

   - Proses pengadaan harus mempertimbangkan penggunaan produksi dalam negeri (TKDN)
   - Proses adaptasi menggunaan E-Catalog Versi 6 dalam memproses pesanan
   - Belum optimalnya penerapan perencanaan dan anggaran yang terjadi dikarenakan adanya beberapa kebijakan dari Inpres yang mengharuskan mengurangi/merasionalisasikan belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan adalah :

- Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memahami teknologi
- Penerapan Adaptasi kebiasaan Baru dengan bantuan teknologi informasi
- Telah Optimalnya koordinasi antar bidang dalam pelaksanaan kegiatan

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang telah ditetapkan yaitu berkembangnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk mempermudah masyarakat berpartisipasi didalam pembangunan khususnya di Kota Denpasar. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi akan dapat meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien dan efektif sehingga Meningkatkan Pelayanan Publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance)* Guna Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas (Smart City)

5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Strategi pemecahan masalahnya adalah:

- Merencanakan secara cermat proses perencanaan dan penganggaran agar dapat memenuhi Target yang telah ditetapkan.
- Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar senantiasa melaksanakannya melalui Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi pada hasil (*result oriented government*) sesuai wewenang, tugas dan fungsinya. Adaupun

seluruh capaian tujuan yang diuraiakan dalam capaian sasaran dapat digambarkan sebagai berikut;

Indikator Tujuan

Indeks SPBE

Untuk Capaian terhadap Indikator Kinerja Utama dan Capaian terhadap Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2024 meliputi;

Tabel. 2.2 Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar sampai dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	% Capaian Tahun 2024
Indeks SPBE	3.75	3.20	3.60	3.95

Indikator Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), sejalan dengan Visi Kota Denpasar tahun 2021 – 2026 yaitu ***"Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju"*** dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang terdapat dalam Misi No 4 yaitu ***Unggul Dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana.*** Dalam kaitanya kebijakan pembangunan Kota Denpasar tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan teknologi dalam pengembangan insfratruktur di Kota Denpasar, dengan mewujudkan kualitas prima SDM, membina daya saing daerah, melaksanakan penghargaan pemerintah, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana. Secara Spesifik Indikator Indeks SPBE dapat diformulasikan meliputi:

1. **Nilai Indeks Kebijakan SPBE**
2. **Nilai Indeks Tata Kelola SPBE**
3. **Nilai Indeks Manajemen SPBE**
4. **Nilai Indeks Layanan SPBE**

Adaupun Langkah-Langkah Untuk mewujudkan Tujuan tersebut maka Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar telah menetapkan Kebijakan yang mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Denpasar dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2021 –2026. Adapun Arah Kebijakan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar sebagai berikut :

1. **Penerapan kebijakan Internal Tata Kelola SPBE**
2. **Penerapan Perencanaan Strategi SPBE**
3. **Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi**
4. **Peningkatan Kapasitas Penyelenggara SPBE**
5. **Penerapan Manajemen SPBE**
6. **Penerapan Pelaksanaan Audit TIK**
7. **Penerapan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik**
8. **Penerapan Layanan Publik Berbasis Elektronik**

1. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

Berdasarkan capaian Renja Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2025 ini disusun, Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar memiliki Indikator Kinerja yang dipakai sebagai acuan kerja, sekaligus sebagai tolak ukur pencapaian target dalam hal pelaksanaan urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Adapun Sasaran Kinerja Dinas Komunikasi, Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar sebagai berikut:

Tabel 2.3

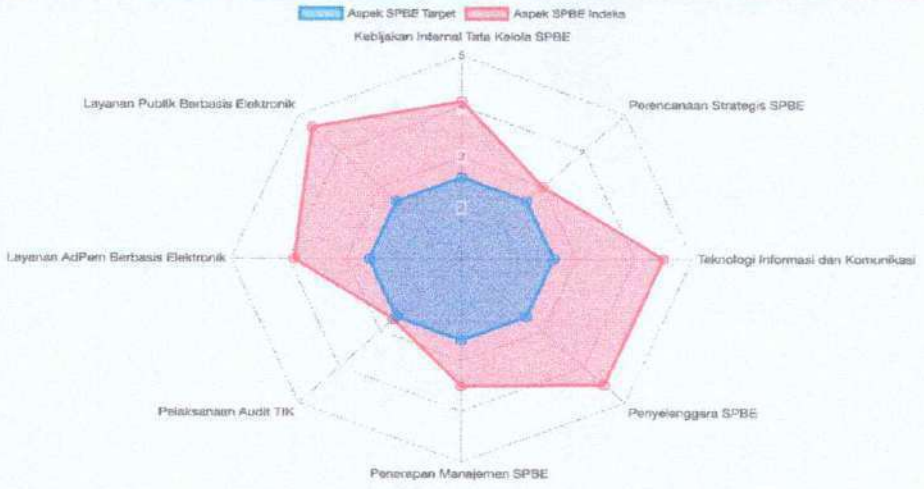
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target						Kondisi Akhir Tahun 2026	Formulasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE	Nilai Indeks kebijakan SPBE	-	3,00	3,20	3,40	3.60	3,80	4.00	4.00	Nilai pembobotan domain 1 : Kebijakan Internal SPBE
2	Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE	Nilai Indeks tata Kelola SPBE	-	3,30	3,45	3.60	3.75	3,90	4.05	4.05	Nilai pembobotan domain 2 : Tata Kelola SPBE
3	Meningkatnya kematangan manajemen SPBE	Nilai Indeks manajemen SPBE	-	2,18	2,40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.20	Nilai pembobotan domain 3 : Manajemen SPBE
4	Meningkatnya kematangan layanan SPBE	Nilai Indeks layanan SPBE	-	3,55	3,65	3.75	3.85	3.95	4.05	4.05	Nilai pembobotan domain 4 : Layanan SPBE

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KOTA DENPASAR

3,96
(Sangat Baik)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	**3,96**
Domain Kebijakan SPBE	4,10
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*4,10*
Domain Tata Kelola SPBE	3,90
Perencanaan Strategis SPBE	*3,00*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*4,50*
Penyelenggara SPBE	*4,50*
Domain Manajemen SPBE	3,27
Penerapan Manajemen SPBE	*3,50*
Audit TIK	*2,67*
Domain Layanan SPBE	4,20
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*3,90*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*4,67*

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

1. Tugas Pokok

Dalam pelaksanaanya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengelola Sistem E-Government di Kota Denpasar

2. Fungsi

Dalam pelaksanaanya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai fungsi meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, dan pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Menyikapi Tugas Pokok dan Fungsi yang telah dijalankan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar, beberapa permasalahan atau hambatan pastinya masih ada untuk dievaluasi. Oleh sebab itu diperlukannya Analisis akan Isu-Isu Strategis demi menilai dampak dan resiko serta Pengambilan Keputusan yang tepat dalam mengidentifikasikan Peluang dan Ancaman yang akan dihadapi kedepannya.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

3. Isu-Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik meliputi;

1. Percepatan Transformasi Digital dan Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah Daerah
2. Keamanan Siber (Cyber Security) pada Data dan Informasi Pemerintah Daerah
3. Regulasi dan Kebijakan Digital
4. Pengawasan dan Penanggulangan Penyebaran Berita Hoaks
5. Penyebaran Informasi dan Edukasi Publik terkait Privasi Data dan Informasi
6. Keterbukaan Informasi Publik
7. Penggunaan Data Statistik dalam Penyusunan Kebijakan

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi

Beberapa Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian di Kota Denpasar :

1. Belum Optimalnya Transformasi Digital dalam mendukung pencapaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Belum Optimalnya Infrastruktur Digital dalam upaya penanggulangan serangan siber yang semakin kompleks;

3. Belum Optimalnya pelaksanaan regulasi atau peraturan baru yang sesuai dengan kemajuan teknologi, serta mudah mengadaptasi kebijakan agar tidak menghambat inovasi, namun tetap menjaga kepentingan publik dan pemerintah daerah
4. Belum tersedianya Data dan Informasi Publik yang berkualitas
5. Masih lemahnya sistem keamanan data dan informasi ;

2.3.2 Dampak Terhadap Capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian Program Nasional

Apabila isu-isu strategis yang ada melalui strategi-strategi dan arah kebijakan yang dipersiapkan mampu dipenuhi dan berjalan dengan baik dalam mengatasi segala hambatan dan permasalahan yang ada, maka capaian visi dan misi kepala daerah, dan capaian program nasional tentunya akan tercapai dengan baik, oleh karenanya dibutuhkan komitmen dari pihak-pihak yang berkompeten untuk mensukseskannya.

2.3.3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

Perumusan permasalahan dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut;

- **Tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar**
    a. Kesinambungan pembangunan *E-Government* akibat dinamika politik di pucuk pimpinan.
    b. Kurangnya pemahaman publik tentang tata cara memanfaatkan layanan *E-Government.*
    c. Kondisi lingkungan untuk pembangunan infrastruktur jaringan.
    d. Peningkatan tuntutan kinerja aparat untuk layanan masyarakat yang baik.
- **Peluang yang dapat dimanfaatkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar**
    a. Persaingan yang baik antar pemerintah daerah dalam meraih penghargaan nasional.
    b. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
    c. Peningkatan pelaksanaan *E-Govermnent.*
    d. Tren dan perkembangan teknologi yang sangat cepat

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah Serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu perangkat daerah mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya rencana perangkat daerah, dalam hal ini pimpinan akan memahami skala prioritas dengan lebih baik. Rencana kerja juga dapat membantu aparatur dalam perangkat daerah melaksanakan kegiatan dengan baik dan teratur, disamping itu rencana kerja yang tersusun dengan baik, akan menghasilkan pembagian tugas yang baik pula.

Dalam Pelaksanaanya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2025 tetap mengacu pada Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar akan tetapi Program dan Kegiatannya mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dimana dalam Peraturan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut terjadi Perubahan komposisi klasifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi sebagai berikut:

SEMULA

-	Program	Kegiatan

MENJADI

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Menerjemahkan sub urusan	Menerjemahkan Kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota	Menerjemahkan aktivitas/layanan

Dan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar dalam pencapaian visi dan misi Walikota Denpasar.

a. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2025

Mengacu pada Tujuan, Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan Dinas, Berdasarkan Hal tersebut maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar tahun 2025 terdiri dari:

❖ **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini bertujuan untuk mewujudkan dukungan administrasi, sarana dan prasarana terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan sehingga tercapainya efektifitas dan efisien. Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain:

a. Kegiatan : **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Kegiatan : **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub Kegiatan : *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*

c. Kegiatan : **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan : *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*

: *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*

2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini dalam rangka desiminasi informasi kepada masyarakat. Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain:

a. **Kegiatan** : **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan : Relasi Media

: Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

: Diseminasi Informasi

: Pengelolaan Media Komunikasi Publik

: Penyusunan Konten

3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Program ini bertujuan pemanfaatan Teknologi Informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain:

a. **Kegiatan** : **Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah

: Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE

: Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan pemerintah

: Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah

: Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

❖ **URUSAN BIDANG STATISTIK**

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Program ini bertujuan atas Ketersediaan Data dan Informasi untuk pemenuhan kebutuhan data dalam perencanaan pembangunan daerah di Pemerintah Kota Denpasar. Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain:

a. Kegiatan : **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

: Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral

❖ **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini bertujuan Pengamanan Informasi di Pemerintah Kota Denpasar. Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain:

a. Kegiatan : **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan : *Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*

Untuk mencapai sasaran dan Tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, Adapun Perubahan Rencana Kerja yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025 yang akan diusulkan di Sub Kegiatan lebih lanjut dijabarkan dalam Tabel 3.1 yaitu;

Tabel 3.1

Perubahan Rencana Program / Kegiatan dan Pendanaan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

Tahun 2025

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		APBD Induk 2025	Pagu Usulan Perubahan	Bertambah/Berkurang
			Induk 2025	Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**17,554,048,809**	**19.247.94.557**	**1.63.945.748**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**17,554,048,809**	**19.247.994.557**	**1.693.945.748**
I	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**8,845,985,471**	**9.733.953.269**	**887.967.798**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang	95 Orang	8,845,985,471	9.733.953.269	887.967.798
II	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**2,616,110,638**	**3.052.158.588**	**436.047.950**

2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	22 Paket	2,431,837,358	2.802.855.358	371.018.000
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	103,865,280	103.865.280	0
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	29,388,000	41.715.950	12.327.950
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	51,020,000	103.722.000	52.702.000
III	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**				**620,276,300**	**756.276.300**	**136.000.000**
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	28 Unit	508,615,700	644.615.700	136.000.000
7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	119 Unit	119 Unit	111,660,600	111.660.600	0

IV	**Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**1,249,543,400**	**1.479.873.400**	**230.330.000**
8	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	1 Laporan	89,512,000	189.512.000	100.000.000
9	Kemitraan Komunikasi dan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	1 Komunitas	38,975,000	38.975.000	0
10	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100%	100%	630,475,000	657.275.000	26.800.000
11	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	1 Media	339,831,400	443.361.400	103.530.000
12	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	1 Konten	1 Konten	150,750,000	150.750.000	0

V	**Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**3,947,264,000**	**3.947.264.000**	**0**
13	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasiona	1 Dokumen	1 Dokumen	286,825,000	286.825.000	0
14	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	186,064,000	186.064.000	0
15	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi	616,000,000	616.000.000	0
16	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi	107,200,000	107.200.000	0
17	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	75 Perangkat Daerah	75 Perangkat Daerah	2,751,175,000	2.751.175.000	0

VI	**Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**90,650,000**	**94.250.000**	**3.600.000**
18	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	100%	28,000,000	31.600.000	3.600.000
19	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	1 Dokumen	62,650,000	62.650.000	0
VII	**Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**184,219,000**	**184.219.000**	**0**
20	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	98 Perangkat Daerah	98 Perangkat Daerah	184,219,000	184.219.000	0
					17,554,048,809	**19.247.994.557**	**1.693.945.748**

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar 2025 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan selama perubahan tahun 2025 di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar. Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2025 mengacu kepada Renja Tahun 2025, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan I tahun anggaran 2025.

Dalam Anggaran Induk Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar melaksanakan 5 (Lima) Program, 7 (Tujuh) Kegiatan dan 20 (Dua Puluh) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp.17.554.048.809,-** dan di dalam Anggaran Perubahan diusulkan menjadi **Rp.19.247.994.607** terjadi penambahan sebesar **1.693.945.798,** dengan pelaksanaan melaksanakan 5 (Lima) Program, 7 (Tujuh) Kegiatan dan 20 (Dua Puluh) Sub Kegiatan. Penambahan Anggaran dimaksud agar tercapainya Sasaran dan Target yang telah ditetapkan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

Denpasar, 28 Mei 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kota Denpasar

Dr. Ida Bagus Ajit Adhi Merta,SSTP,MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 197801281996121003



PERUBAHAN RENJA

Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar
Tahun 2025





LAMPIRAN
Peraturan Walikota Denpasar
Nomor 100.3.3.3/1187/HK/2025
Tentang Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2025

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KOTA DENPASAR

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KOTA DENPASAR 2025

WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3/1187/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan rencana kerja Perangkat Daerah, sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perangkat daerah untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan tugas dan fungsinya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Kota Denpasar Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);

7. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencan Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Juni 2025

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 19 JUNI 2025
NOMOR : 100.3.3/1187/HK/2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

1. PERUBAHAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
2. PERUBAHAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
3. PERUBAHAN RENJA RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR
4. PERUBAHAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2025
5. PERUBAHAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
6. PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
7. PERUBAHAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
8. PERUBAHAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
9. PERUBAHAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
10. PERUBAHAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2025
11. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
12. PERUBAHAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
13. PERUBAHAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
14. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
15. PERUBAHAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
16. PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
17. PERUBAHAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
18. PERUBAHAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2025
19. PERUBAHAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
20. PERUBAHAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
21. PERUBAHAN RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
22. PERUBAHAN RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
23. PERUBAHAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
24. PERUBAHAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
25. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

26. PERUBAHAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
27. PERUBAHAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
28. PERUBAHAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
29. PERUBAHAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
30. PERUBAHAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
31. PERUBAHAN RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
32. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
33. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2025
34. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2025
35. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2025
36. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
37. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2021-2026. Kami sangat menyadari bahwa Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RENJA ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025.

Akhir kata kami berharap agar Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh staf di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar.

Denpasar, 2 Juni 2025
Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar

Dr. I Dewa Made Agung, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196605251993031010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Daftar isi iii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I 8

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 17

BAB IV : PENUTUP 25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan perubahan rencana kerja. Adapun dalam tahap penyusunan rancangan akhir ini berdasar pada rancangan akhir RKPD, Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 serta realisasi Capaian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar sampai dengan triwulan ke I Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan Perubahan daripada Rencana Kerja yang telah disusun sebelumnya. Di dalamnya telah dilakukan analisis evaluasi capaian triwulan ke I pada tahun 2025. Selain itu juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis pemberdayaan koperasi dan UMKM, baik di Kota Denpasar, Provinsi Bali maupun Nasional.

Tidak bisa dipungkiri, pemberdayaan Koperasi dan UMKM menjadi pilihan yang strategis dalam pembangunan daerah saat ini. Hal ini mengingat populasi UMKM yang cukup besar, dan Koperasi sebagai soko guru ekonomi rakyat terbukti sebagai lembaga keuangan yang mampu bertahan dalam menghadapi tekanan dan krisis ekonomi, walaupun dalam perkembangannya selalu mengalami tantangan dan persaingan dengan industri besar dan perdagangan lintas sektor dan wilayah. Terlebih lagi dimana dalam tahun 2020 adanya pandemi virus corona 19 (covid -19), yang menyebabkan

lumpuhnya sektor pariwisata tentu saja hal tersebut sudah tentu berimbas kepada pelaku UMKM yang mengandalkan sektor pariwisata, begitu juga dengan Koperasi yang mana anggotanya merupakan pekerja dibidang pariwisata tentu akan berpengaruh pada SHU atau pendapatan yang diperoleh oleh koperasi.

Ditengah keterpuruk ekonomi yang disebabkan oleh dampak virus corona, para pelaku UMKM dituntut untuk melakukan inovasi – inovasi atau melihat peluang yang ada, salah satunya adalah produksi masker serta penjualan produk secara online yang begitu pesat, yang mana reformasi pada sektor ekonomi pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan yang tertuang dalam Rencana Strategis yang mengarahkan semua unsur yang mempengaruhi Lingkungan Internal (kekuatan dan kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan).

Selain itu sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dimana dalam upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan. Serta Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi dimana perlu diatur mengenai pemberian kemudahan dan fasilitasi dalam pengesahan pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, maka berdasarkan hal tersebut disusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahaan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodetifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 276);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 8 Tahun 2016), Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
29. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56).
30. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);
31. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 26);
32. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 30).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar dimaksud sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan prinsip-prinsip *good govenance* (penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme) sesuai dengan Visi dan Misi.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2025, yang merupakan penjabaran tahun keempat daripada Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan menengah tahun 2021-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2021-2026. Sedangkan tujuannya adalah sebagai gambaran awal apa yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar pada tahun 2025 dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Kota Denpasar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2025 berasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mencakup :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I

Bab III. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI UMKM TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Renja Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2025.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Renja Perangkat Daerah, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi Renja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

1. **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

   Dalam pelaksanaan triwulan I TA. 2025, program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan, walaupun ada realisasi kegiatan yang tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan, hal ini disebakan karena masih adanya adaptasi dengan katalog versi 6 serta beberapa belanja masih dalam proses SPJ.

2. **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

   Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan hingga triwulan I TA. 2025 beberapa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan walupun ada kegiatan yang belum bisa dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, adapun capaian fisik sebesar 21,58% sedangkan realisasi keuangannya sebesar 18,54%.

3. **Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

   Dalam pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan.

4. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

   Faktor–faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah :

- Pelaksanaan Workshop dan Pendampingan bagi Pelaku UMKM dan Pengelola Koperasi, Pendampingan Kemiskinan, serta pelaksanaan acara HUT Kota Denpasar.
- Kualitas kinerja pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Adapun Faktor-faktor penghambat pencapaian nilai akhir kinerja sasaran adalah :

- Adaptasi proses belanja dengan katalog versi 6 sehingga realisasi menjadi tidak tepat waktu.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang telah ditetapkan yaitu, dimana secara tidak langsung kita dapat melihat bahwa pertumbuhan ekonomi atau adanya ke sungguhan daripada para pengelola Koperasi maupun Pelaku UMKM untuk memajukan usahanya, sehigga otomatis dapat menimbulkan penumbuhan ekonomi secara makro. Yang mana dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan perekonomian di Kota Denpasar khususnya.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Strategi pemecahan masalahnya adalah :

- Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi pengelola koperasi dan UMKM, pembinaan administrasi koperasi secara berkelanjutan.
- Secara bertahap memberikan informasi bantuan Stimulus Usaha bagi Koperasi, Pelaku Usaha Mikro.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025
Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025		Sisa Anggaran
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintahan			**12.587.119.952**		**2.333.240.039**	**10.253.879.913**
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			**12.587.119.952**		**2.333.240.039**	**10.253.879.913**
	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah			**12.587.119.952**		**2.333.240.039**	**10.253.879.913**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**9.659.185.952**		**1.880.865.039**	**7.778.320.913**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Dokumen	141.150.000	-	-	141.150.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	141.150.000	-	-	141.150.000

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	7.574.521.578	25,80%	1.670.577.264	5.903.944.314
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	7.574.521.578	12 Bulan	1.670.577.264	5.903.944.314
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	278.809.850	29%	39.934.500	238.875.350
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.840.000	35%	1.985.000	3.855.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	180.100.850	22,10%	22.358.000	157.742.850
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	26.967.000	31,33%	8.449.500	18.517.500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	17.352.000	16,67%	2.892.000	14.460.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.000.000	-	-	4.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsul	1 Laporan	34.960.000	-	-	34.960.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	9.590.000	1 Dokumen	4.250.000	5.340.000

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100%	205.450.000	-	-	205.450.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	56 Unit	155.450.000	-	-	155.450.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	-	-	50.000.000
							-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	906.784.524	21%	142.020.575	764.763.949
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.967.000	41,62%	2.427.000	3.540.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	146.400.000	18,57%	1.778.799	144.621.201
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	754.417.524	2,46%	137.814.776	616.602.748
							-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100%	552.470.000	2%	28.332.700	524.137.300
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	257.800.000	10,99%	28.332.700	229.467.300
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	36 Unit	2.880.000	-	-	2.880.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	67 Unit	45.750.000	-	-	45.750.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	240.040.000	-	-	240.040.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.000.000	-	-	6.000.000
							-
2	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Aktif**	**95,00%**	**607.100.000**	**-**	**-**	**607.100.000**
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	100 Koperasi	607.100.000	-	-	607.100.000
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	100 Unit Usaha	105.625.000	-	-	105.625.000
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100 Unit Usaha	501.475.000	-	-	501.475.000
3	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas**	**38,48%**	**681.532.000**	**-**	**-**	**681.532.000**
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150 Koperasi	681.532.000	-	-	681.532.000

	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	150 Unit Usaha	31.505.000	-	-	31.505.000
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	16 Unit Usaha	650.027.000	-	-	650.027.000
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi**	**12%**	**165.319.000**	**-**	**-**	**165.319.000**
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan restrukturisasi usaha	10 Usaha	165.319.000	-	-	165.319.000
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	200 Unit Usaha	165.319.000	-	-	165.319.000
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan**	**30%**	**74.333.000**	**-**	**15.825.000**	**58.508.000**
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	30 Unit Usaha	74.333.000	-	15.825.000	58.508.000

	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	16.975.000	-	-	16.975.000
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	60 Unit Usaha	19.400.000	-	-	19.400.000
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100 Unit Usaha	37.958.000	60 Unit Usaha	15.825.000	22.133.000
							-
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Peningkatan Usaha Mikro**	**25%**	**1.399.650.000**	**5%**	**436.550.000**	**963.100.000**
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya jumlah UMKM yang meningkatnya Omset dan asetnya	100 UMKM	1.399.650.000	60 Unit Usaha	436.550.000	963.100.000
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Wirausaha Pemula menjadi Wirausaha Mapan	9 Orang	470.035.000	9 Orang	194.000.000	276.035.000
	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi dalam Inkubator Wirausaha	20 Unit Usaha	410.450.000	20 Unit Usaha	46.050.000	364.400.000
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	519.165.000	60 Unit Usaha	196.500.000	322.665.000

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yeng telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan sekretariat Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Perubahan Rencana kerja Dinas Koperasi dalam Perubahan Tahun 2025 tetap mengacu pada menjadi Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar maupun Renstra Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, yang mana untuk meningkatan kesejahteraan maupun peningkatan Produktivitas daripada koperasi dan UMKM itu sendiri.

Untuk mencapai sasaran dan Tujuan yang sebagaimana yang telah ditetapkan, adapun Rencana Kerja Perubahan yang akan di lakukan oleh Dinas Koperasi UMKM pada Tahun 2025 oleh Sekretariat maupun Bidang yang ada pada Dinas Koperasi UMKM. Terkait dengan kegiatan – kegiatan yang akan diusulkan dalam hal anggaran perubahan TA. 2025 lebih lanjut dijabarkan dalam Tabel. 31

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Program/Kegiatan Dan Pendanaan
Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (SEBELUM)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (SESUDAH)	Bertambah/Berkurang
	Urusan Pemerintahan			**13.509.726.374**	**15.237.163.560**	**1.727.437.186**
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			**13.509.726.374**	**15.237.163.560**	**1.727.437.186**
	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah			**13.509.726.374**	**15.237.163.560**	**1.727.437.186**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**10.581.792.374**	**11.234.252.060**	**652.459.686**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 Dokumen	141.150.000	251.350.000	110.200.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	141.150.000	251.350.000	110.200.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	8.369.101.290	8.570.690.976	201.589.686
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/Bulan	8.369.101.290	8.570.690.976	201.589.686

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	278.809.850	256.229.850	22.580.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.840.000	5.840.000	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	180.100.850	157.520.850	22.580.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	26.967.000	26.967.000	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	17.352.000	17.352.000	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.000.000	4.000.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsul	1 Laporan	34.960.000	34.960.000	-
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	9.590.000	9.590.000	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100%	205.450.000	377.200.000	171.750.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	56 Unit	155.450.000	155.450.000	-

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	50.000.000	221.750.000	171.750.000
						-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.034.811.234	1.035.311.234	**500.000**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.967.000	6.467.000	500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	146.400.000	146.400.000	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	882.444.234	882.444.234	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100%	552.470.000	743.470.000	191.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	257.800.000	257.800.000	-
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	36 Unit	2.880.000	2.880.000	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	67 Unit	45.750.000	45.750.000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	240.040.000	431.040.000	191.000.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.000.000	6.000.000	-
2	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Aktif**	**95,00%**	**607.100.000**	**642.090.000**	**34.990.000**
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	100 Koperasi	607.100.000	642.090.000	34.990.000
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	100 Unit Usaha	105.625.000	140.615.000	34.990.000
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100 Unit Usaha	501.475.000	501.475.000	-
3	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas**	**38,48%**	**681.532.000**	**681.532.000**	**-**
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150 Koperasi	681.532.000	681.532.000	-

	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	150 Unit Usaha	31.505.000	31.505.000	-
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	16 Unit Usaha	650.027.000	650.027.000	-
4	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat**	**35,35%**	**0**	**723.762.500**	**723.762.500**
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah SDM pengelola KUMKM yang berkompeten	180 Orang	0	723.762.500	723.762.500
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 Unit Usaha	0	723.762.500	723.762.500
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi**	**12%**	**165.319.000**	**165.319.000**	-
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan restrukturisasi usaha	10 Usaha	165.319.000	165.319.000	-

	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	200 Unit Usaha	165.319.000	165.319.000	-
6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan**	**30%**	**74.333.000**	**74.333.000**	**-**
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	30 Unit Usaha	74.333.000	74.333.000	-
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	16.975.000	16.975.000	-
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	60 Unit Usaha	19.400.000	19.400.000	-
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100 Unit Usaha	37.958.000	37.958.000	-
7	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Peningkatan Usaha Mikro**	**25%**	**1.399.650.000**	**1.715.875.000**	**316.225.000**
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya jumlah UMKM yang meningkatnya Omset dan asetnya	100 UMKM	1.399.650.000	1.715.875.000	316.225.000
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Wirausaha Pemula menjadi Wirausaha Mapan	9 Orang	470.035.000	470.035.000	-

	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi dalam Inkubator Wirausaha	120 Unit Usaha	410.450.000	410.450.000	-
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	210 Unit Usaha	519.165.000	835.390.000	316.225.000

Sesuai dengan tabel 3.1 adapun pagu dana yang di usulkan adalah sebesar Rp. 15.237.163.560 yang akan dipergunakan untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan serta pemenuhan sarana dan prasana kerja dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Program Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini merupakan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan Koperasi dan UMKM di Kota Denpasar yang memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan. Selain itu juga dilaksanakan program percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan merah Putih sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada periode tahun 2025 dimana program ini dapat mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam Anggaran Induk Tahun 2025 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar melaksanakan anggaran sebesar Rp. 13.509.726.374,- dan di dalam anggaran perubahan diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 1.727.437.186,- sehingga menjadi Rp. 15.237.163.560,-

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaksanakan oleh masyarakat, yang didukung oleh pemerintah. Untuk itu, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu mendorong peran serta masyarakat dalam proses pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Mempertimbangkan banyaknya komponen masyarakat, instansi pemerintah dan bukan pemerintah yang berperan utama dalam proses pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini, maka diperlukan mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program secara intensif dan terintegrasi.

Dinas Koperasi UMKM dituntut secara proaktif meningkatkan peran koordinasinya dengan masyarakat, instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam proses pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta keberanian untuk mengubah tatanan struktur perekonomian daerah yang lebih berimbang, demokratis dan adil.

. Denpasar, 2 Juni 2025
Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar

Dr. I Dewa Made Agung, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 196605251993031010

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Jln. Mulawarman No. 3 Denpasar, Telepon (0361) 416375, Fax. (0361) 424382
Website : koperasi.denpasarkota.go.id e-mail : koperasidenpasarkota@gmail.com

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2	Pengolahan data dan informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Denpasar tahun 2024 berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2025	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Denpasar.	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak		
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar.	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Denpasar.	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Denpasar telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

Denpasar, 02 Juni 2025
Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar

Dr. I Dewa Made Agung, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196605251993031010

WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/2693/ HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
5. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatangan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah;
6. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu :

a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2025;
b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
c. menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2025;
d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2025;
e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 November 2023

an. Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil
Dan Menengah Kota Denpasar

Dr. I Dewa Made Agung, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19660525 199303 1 010

Tembusan disampaikan kepada:

Yth
1. Walikota Denpasar
2. Ketua DPRD Kota Denpasar
3. Inspektur Kota Denpasar
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2023
NOMOR : 188.45 / 2693 / HK / 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

Penasehat :
1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar

Pembina :
1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Ketua : Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sekretaris : Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Anggota :
1. Kepala Bidang Pengawasan pada Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar
2. Kepala Bidang Bina Lembaga pada Koperasi pada Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar
3. Kepala Bidang UMKM pada Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar
4. Kepala Bidang Bina Usaha pada Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar
5. Kasubag Keuangan pada Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar
7. Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, yaitu :
   1. I Gusti Ngurah Agung Sastrawan, SE., MM.
   2. Ida Bagus Mayun Antara, SH.
   3. Anak Agung Rai Agung Kusuma Dewi, SE., M.Si.
   4. Ida Bagus made Ari Chandra Gopta, SP., M.Si
   5. Anak Agung Ayu Anom kartika Dewi, SE.

Staf Administrasi : Staf pada Sekretariat Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar sebanyak 2 orang, yaitu :

1. I Gede Umbu Bhakti, S.Tr.IP.
2. I Wayan Witayasa, SH.

an. Walikota Denpasar,

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil

Dan Menengah Kota Denpasar



Dr. I Dewa Made Agung, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19660525 199303 1 010

Perubahan Rencana Kerja

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar

Tahun 2025



Sewaka Dharma

WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3/1187/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan rencana kerja Perangkat Daerah, sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perangkat daerah untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan tugas dan fungsinya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Kota Denpasar Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);

7. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencan Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Juni 2025

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 19 JUNI 2025
NOMOR : 100.3.3/1187/HK/2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

1. PERUBAHAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
2. PERUBAHAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
3. PERUBAHAN RENJA RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR
4. PERUBAHAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2025
5. PERUBAHAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
6. PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
7. PERUBAHAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
8. PERUBAHAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
9. PERUBAHAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
10. PERUBAHAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2025
11. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
12. PERUBAHAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
13. PERUBAHAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
14. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
15. PERUBAHAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
16. PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
17. PERUBAHAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
18. PERUBAHAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2025
19. PERUBAHAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
20. PERUBAHAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
21. PERUBAHAN RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
22. PERUBAHAN RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
23. PERUBAHAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
24. PERUBAHAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
25. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

26. PERUBAHAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
27. PERUBAHAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
28. PERUBAHAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
29. PERUBAHAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
30. PERUBAHAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
31. PERUBAHAN RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
32. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
33. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2025
34. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2025
35. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2025
36. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
37. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, maka Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan perubahan rencana kerja yang didalamnya memuat rencana dan target yang hendak dicapai dalam tahun bersangkutan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar. Rencana kerja memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka pelaksanaan tujuan organisasi. Selanjutnya rencana kerja sebagai komitmen kinerja yang hendak dicapai, diajukan sebagai bahan dalam suatu penetapan kinerja sebagai kesepakatan terhadap rencana kinerja. Melalui Rencana kerja ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.

Denpasar, 28 Mei 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19720924 199803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang 1
1.2.Landasan hukum 1
1.3.Maksud dan tujuan 3
1.4.Sistematika Penulisan..... 4

BAB II HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 6

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 18

BAB IV PENUTUP..... 31
LAMPIRAN 33

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada perubahan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berguna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Rencana Kerja tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tahun 2025, merupakan dokumen yang berisikan perubahan rencana program dan kegiatan tahun 2025, yang nanti dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tahun 2024 adalah :

a. Undang–Undang Nomor 1 tahun 1992, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

b. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mejadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
d. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
j. Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
k. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar tahun 2021 Nomor 5);
l. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024 Tentang RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025 – 2045;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025

Sedangkan tujuan perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Denpasar tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar.
2. Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar selama tahun 2025 .

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.1 **Latar Belakang,** Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.2 **Landasan Hukum,** Memuat penjelasan tentang Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 **Maksud dan Tujuan,** Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.4 **Sistematika Penulisan,** Menguraikan susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGAKAT DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan triwulan I

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan rumusan rencana Program Kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Rencana Kerja perubahan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja Perubahan disusun untuk yang memuat evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan. Berikut ini rincian pelaksanaan Sub kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 dengan pagu anggaran setelah dilakukan efisiensi (Pagu anggaran pergeseran tahap II), sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I secara fisik kegiatan sudah mencapai 2.11 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.275.000,00

2. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan triwulan I secara fisik kegiatan sudah mencapai 24.65 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.165.210.286,00

3. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sampai dengan triwulan I belum ada realisasi belanja.

4. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi sampai dengan triwulan I belum ada realisasi belanja

5. Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor sampai dengan triwulanI secara fisik kegiatan sudah 22.98% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.076.000,00

6. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sampai dengan triwulan I telah mencapai 21.36% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 96.371.100,00

7. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga sampai dengan triwulan I secara fisik kegiatan sudah mencapai 19.57% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 65.421.000,00

8. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sampai dengan triwulan I secara fisik kegiatan sudah mencapai 32.00% dengan realisasi keuangan Rp. 8.088.000,00

9. Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan sampai dengan triwulan I secara fisik kegiatan sudah mencapai 25.00% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.690.000,00

10. Sub Kegiatan Pengadaan Peratan dan Mesin sampai dengan triwulan I belum ada realisasi belanja.

11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan listrik sampai dengan triwulan I secara fisik kegiatan sudah mencapai 25.33% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 287.990.611,00

12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor sampai dengan triwulan I secara fisik kegiatan sudah mencapai 21.42% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 770.075.832,00

13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sampai dengan triwulan I secara fisik kegiatan sudah mencapai 23.09% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 64.486.200,00

14. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sampai dengan triwulan I secara fisik kegiatan sudah mencapai 15.49% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.119.923.960,00

15. Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kota sampai dengan triwulan I belum ada realisasi belanja.

16. Sub Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasisi risiko sampai dengan triwulan I belum ada realisasi belanja.
17. Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota sampai dengan triwulan I belum ada realisasi belanja.
18. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota sampai dengan triwulan I secara fisik kegiatan sudah mencapai 15.01% namun belum ada realisasi keuangan.
19. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sampai dengan triwulan I secara fisik kegiatan sudah mencapai 10.16% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.704.000,00
20. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko sampai dengan triwulan I belum ada realisasi belanja.
21. Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasisi risiko sampai dengan triwulan I secara fisik kegiatan sudah mencapai 13.81% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 900.000,00
22. Sub Kegiatan Bimbingan teknis kepada pelaku usaha sampai dengan triwulan I belum ada realisasi belanja.
23. Sub KegiatanPengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sampai dengan triwulan I secara fisik kegiatan sudah mencapai 0.26% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.200.000,00

Tabel 2.1
Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Kode Rekening	Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	
	Urusan Pemerintahan						
	Bidang Urusan : Penanaman Modal			**23.765.798.762**	**50.00%**	**10.486.961.897**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**				
2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	dokumen	59.660.000	2.11	1.275.000	58.385.000
2.18.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	59.660.000	2.11	1.275.000	58.385.000
2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	15.295.370.780	24.65	3.165.210.286	12.130.160.494
2.18.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	57 orang / bulan	15.295.370.780	24.65	3.165.210.286	12.130.160.494

Kode Rekening	Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	
2.18.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	115.000.000	0	0	115.000.000
2.18.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	35.000.000	0	0	35.000.000
2.18.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 orang	80.000.000	0	0	80.000.000
2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	1.201.036.364	24.18		205.646.100
2.18.01.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 paket	120.885.000	22.98	26.076.000	94.809.000
2.18.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 paket	539.851.700	21.36	96.371.100	443.480.600
2.18.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	433.649.164	19.57	65.421.000	368.228.164

Kode Rekening	Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	
2.18.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	27.345.000	32.00	8.088.000	19.257.000
18.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	1 dokumen	38.760.000	25.00	9.690.000	29.070.000
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	28.350.000	25.93	0	28.350.000
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	18 unit	28.350.000	25.93	0	28.350.000
2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	5.119.514.578	23.37	1.058.066.443	4.061.448.135
2.18.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	1.497.400.000	25.33	287.990.611	1.209.409.389

Kode Rekening	Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	
2.18.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakn	1 laporan	3.622.114.578	21.42	770.075.832	2.852.038.746
2.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.794.727.700		184.410.160	1.610.317.540
2.18.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	33 unit	438.400.000	23.09	64.486.200	373.913.800
2.18.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1.356.327.700	15.49	119.923.960	1.236.403.740
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	**Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan oleh investor**	**20%**	**148.090.950**	-		-
2.18.02.2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang menajdi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Penetapan Peraturan Daerah Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal tepat Waktu	1 dokumen	41.460.950	0	0	41.460.950

Kode Rekening	Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	
2.18.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten / Kota	Jumlah kesepakatan kemitraan anatara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah	1 dokumen	39.160.950	0	0	39.160.950
2.18.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan berusaha berbasis resiko	1 dokumen	2.300.000	0	0	2.300.000
2.18.02.2.02	Kegiatan pembuatan peta potensi investasi Kabupaten / Kota	Penyusunan Laporan peta potensi investasi dan peluang usaha di Kota Denpasar tepat waktu	1 laporan	106.630.000	0	0	106.630.000
2.18.02.2.02.0004	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi Kabupaten /Kota	1 laporan	106.630.000	0	0	106.630.000
	Program Promosi Penanaman Modal	**Persentase peningkatan jumlah investor di Kota Denpasar**	**2 %**	**188.925.000**	**15.51**	**0**	**188.925.000**

Kode Rekening	Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan promosi investasi yang dilaksanakan setiap tahun	1 laporan	188.925.000	15.51	0	188.925.000
2.18.03.2.01. 0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	188.925.000	15.51	0	188.925.000
2.18.04	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Nilai Survey Kepuasan masyarakat**	**Niali 87,93**	**49.333.000**	**7.99**	**3.604.000**	**45.729.000**
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan SecaraTerpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan laporan penanaman modal, perijinan dan non perijinan tepat waktu	1 laporan	49.333.000	7.99	3.604.000	45.729.000

Kode Rekening	Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	
2.18.04.2.01.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 pelaku usaha	26.464.000	10.16	2.704.000	23.760.000
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem perizinan Berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	1000 pelaku usaha	9.965.000	0	0	9.965.000
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di	110 Kegiatan Usaha	12.904.000	13.81	900.000	12.004.000

Kode Rekening	Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	
	Risiko	bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten / Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha					
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	**Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang dibina**	**20%**	**7.348.000**	**0**	**0**	**7.348.000**
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pengendalian penanaman modal dari proses pemantauan , pembinaan dan pengawasan	100%	7.348.000	0	0	7.348.000
2.18.05.2.01.0005	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan	300 pelaku usaha	7.348.000	0	0	7.348.000

Kode Rekening	Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	
		perizinan berusaha berbasis risiko					
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	**Persentase pemanfaatan data oleh stakeholder**	**100 %**	**542.200.000**	**0.26**	**1200.000**	**541.000.000**
2.18.06.2.01	Kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan sistem informasi pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan	100 %	542.200.000	0.26	1.200.000	541.000.000
2.18.06.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinana Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 dokumen	542.200.000	0.26	1.200.000	541.000.000

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar merupakan dokumen yang berlandaskan pada RPJMD dan penjabaran setiap tahun dari rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar. Rencana Kerja memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dirancang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut dimana pagu anggaran sebelum perubahan merupakan pagu anggaran setelah pergeseraran ke IV.

Tabel 3.1
Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Tahun 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
	Urusan Pemerintahan						
	Bidang Urusan : Penanaman Modal				**28.054.390.551**	**28.209.725.051**	**155.334.500**
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**100%**	**27.118.493.601**	**27.129.432.101**	**10.938.500**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 dokumen	3 dokumen	59.660.000	5.060.000	(54.600.000)
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3 dokumen	59.660.000	5.060.000	(54.600.000)
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	18.230.063.121	18.230.063.121	0

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	57 orang / bulan	56 orang /bulan	18.230.063.121	18.230.063.121	0
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administasi kepegawaian perangkat Daerah	100 %	100 %	115.000.000	115.000.000	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya pakaian	1 paket	1 paket	35.000.000	35.000.000	-
	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 orang	80 orang	80.000.000	80.000.000	-
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.160.490.864	1.158.636.864	1.854.000
	Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	120.885.000	119.031.000	1.854.000
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 paket	11 paket	539.851.700	539.851.700	-
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	5 paket	433.649.164	433.649.164	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	27.345.000	27.345.000	-
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	1 dokumen	1 dokumen	38.760.000	38.760.000	-
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	28.350.000	63.350.000	35.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	3 unit	28.350.000	63.350.000	35.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	5.739.201.916	5.739.201.916	9.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	1.497.400.000	1.479.400.000	(18.000.000)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	4.259.801.916	4.259.801.916	27.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	1.794.727.700	1.816.266.200	21.538.500
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	33 unit	33 unit	438.400.000	438.400.000	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	1.356.327.700	1.377.866.200	21.538.500
2	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan oleh investor**	**20%**	**20%**	**148.090.950**	**148.090.950**	-
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang menajdi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Penetapan Peraturan Daerah Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal tepat Waktu	1 dokumen	1 dokumen	41.460.950	**41.460.950**	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
	Sub Kegiatan Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten / Kota	Jumlah kesepakatan kemitraan anatara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah	1 dokumen	1 dokumen	39.160.950	39.160.950	-
	Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan berusaha berbasis resiko	1 dokumen	1 dokumen	2.300.000	2.300.000	-
	Kegiatan pembuatan peta potensi investasi Kabupaten / Kota	Penyusunan Laporan peta potensi investasi dan peluang usaha di Kota Denpasar tepat waktu	1 laporan	1 laporan	106.630.000	106.630.000	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen peta potensi inveastasi Kabupaten /Kota	1 laporan	1 laporan	106.630.000	106.630.000	-
3	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Persentase peningkatan jumlah investor di Kota Denpasar**	**2%**	**2%**	**188.925.000**	**188.925.000**	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan promosi investasi yang dilaksanakan setiap tahun	1 laporan	1 laporan	188.925.000	188.925.000	-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 dokumen	188.925.000	188.925.000	-
4	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Nilai Survey Kepuasan masyarakat**	**Nilai 87,93**	**Nilai 87.93**	**49.333.000**	**49.333.000**	**-**
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan SecaraTerpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan laporan penanaman modal, perijinan dan non perijinan tepat waktu	1 laporan	1 laporan	49.333.000	49.333.000	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 pelaku usaha	1000 Pelaku usaha	26.464.000	26.464.000	-
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem perizinan Berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	1000 pelaku usaha	1000 pelaku usaha	9.965.000	9.965.000	-
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten / Kota	110 Kegiatan Usaha	110 kegiatan usaha	12.904.000	12.904.000	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
		bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha					
5	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang dibina**	**20%**	**20%**	**7.348.000**	**101.744.000**	**94.396.000**
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pengendalian penanaman modal dari proses pemantauan , pembinaan dan pengawasan	100%	100%	7.348.000	101.744.000	94.396.000
	Sub Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya		9 kegiatan usaha	0	4.245.000	4.245.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	300 pelaku usaha	300 pelaku usaha	7.348.000	91.219.000	83.871.000
	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dali pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha		24 kegiatan usaha	0	6.280.000	6.280.000
6	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Persentase pemanfaatan data oleh stakeholder**	**100 %**	**100%**	**542.200.000**	**592.200.000**	**50.000.000**
	Kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan sistem informasi pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan	100 %	100%	542.200.000	592.200.000	50.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinana Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6 dokumen	6 dokumen	542.200.000	592.200.000	50.000.000

Pada tabel di atas dapat dilihat tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Denpasar mengusulkan perubahan untuk beberapa Sub kegiatan antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   Sub kegiatan ini berkurang sebesar Rp. 54.600.000,00 pengurangan ini disebabkan karena adanya efisiensi belanja cetak dan pengurangan belanja pihak ketiga.

2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
   Sub Kegiatan ini bertambah sebesar Rp. 35.000.000,00 penambahan anggaran ini disebabkan karena adanya penambahan belanja laptop.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan listrik
   Sub Kegiatan ini berkurang sebesar Rp. 18.000.000,00 pengurangan anggaran ini dikarenakan adanya pengurangan anggaran biaya pengiriman.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor
   Sub Kegiatan ini bertambah sebesar Rp. 27.000.000,00 penambahan anggaran ini dikarenakan adanya penambahan gaji pegawai non ASN selama 3 bulan.

5. Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   Sub Kegiatan ini bertambahh sebesar Rp. 21.538.500,00 pengurangan anggaran ini dikarenakan adanya efisiensi pemeliharaan plumping

6. Sub Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
   Sub Kegiatan ini bertambah sebesar Rp. 4.245.000,00 penambahan anggaran ini dikarenakan adanya kegiatan fasilitasi permasalahan dengan pelaku usaha.

7. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
   Sub Kegiatan ini bertambah sebesar Rp. 83.871.000,00 penambahan anggaran ini dikarenakan adanya kegiatan bimtek untuk pelaku usaha.

8. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal
   Sub Kegiatan ini bertambah sebesar Rp6.280.000 penambahan anggaran ini dikarenakan adanya kegiatan pengawasan penanaman modal.

9. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
   Sub Kegiatan ini bertambah sebesar Rp. 50.000.000,00 penambahan anggaran ini dikarenakan adanya Perbaikan Hasil Rekomendasi ITSA dari BSSN.

BAB IV
P E N U T U P



Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tahun 2025 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tahun 2025 sebesar Rp. 28.207.871.051,00. Jumlah tersebut bertambah sebesar Rp. 153.480.500,00 dari pagu anggaran induk tahun 2025 sebesar Rp. 28.054.390.551,00. selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 rencana kerja berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar Tahun 2025 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana Mestinya

Denpasar, 28 Mei 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19720924 199803 1 008

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT, LUMINTANG, DENPASAR
TELP. (0361) 428610, 430820. Fax: (0361) 416075
Website: http://perijinan.denpasarkota.go.id . email:perijinan@denpasarkota.go.id

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2	Pengolahan data dan informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota Denpasar		√		
4	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Denpasar tahun 2024 berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar.		√		
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar		√		
6	Penelaahan rancangan awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2025		√		
7	Perumusan tujuan dan sasaran.		√		
8	Penelaahan usulan masyarakat.		√		

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak		
9	Perumusan kegiatan prioritas.		√		
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Denpasar		√		
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.		√		
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu .	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Denpasar		√		
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Denpasar telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak		
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	√			

Denpasar, 28 Mei 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kota Denpasar

(Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.)

Pembina Tk.I

Nip. 19720924 199803 1 008

Petunjuk Pengisian:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/2706/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
6. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:

a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Tahun 2025;

b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah terkait Penanaman Modal;
c. menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Tahun 2025;
d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Tahun 2025; dan
e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 November 2023

an.Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19720924 199803 1 008

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
3. Inspektur Kota Denpasar
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 22 NOVEMBER 2023
NOMOR : 188.45 /2706/ HK / 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2025

Penasehat :
1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar

Pembina :
1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah

Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

Anggota :
1. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
3. Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
4. Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

5. Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
6. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

an.Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19720924 199803 1 008

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2025







DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugrah-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.Sangat disadari dokumen ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang rencana program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar pada Tahun 2025.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renja Tahun 2025 ini. Dokumen Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025 yang sudah tersusun ini, diharapkan dapat menjadi dasar/acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Om Santi, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, 10 Juni 2025
Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar,

Drs. Raka Purwantara, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP.197202191991011002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud & Tujuan 4
1.4. Sistem Penulisan 4
BAB II EVALUASI TRIWULAN KE I PELAKSANAAN RENJA TA 2025 DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR **5**
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025 ..... **15**
BAB IV PENUTUP **32**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Tahun 2025 7
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 16
Tabel 3.2. Usulan Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai upaya pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan. Sebagai tindak lanjutnya, kepala Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD serta mengacu pada hasil Musrenbang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksankan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalam Renja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah. Dengan adanya Renja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program Perangkat Daerah lainnya.

Penyusunan Renja ini selain mengacu pada Renstra Dinas Kebudayaan 2021 – 2026 juga tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-

5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah, dan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026
16. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 tahun 2022 Tentang Pedoman Pengeloaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 MASKUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar adalah dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan untuk periode 1 tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sebagai bentuk cerminan penyelenggaraan pembangunan daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang akan ditetapkan dalam Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2026.

Dalam Rencana Kerja (Renja) ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan dan akan menjadi

tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025. Adapun Tujuan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar adalah:

1. Sebagai komitmen bagi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam melaksanakan Program/kegiatan dan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu periode tahunan;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar selama tahun 2025;
3. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar pada tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI TRIWULAN KE I PELAKSANAAN RENJA TA. 2025 DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEBUDAYAAN TA. 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI TRIWULAN KE I PELAKSANAAN RENJA TA. 2025 DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa input, *output*, dan *outcome* pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara lebih langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimal indikator output.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudankewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sebagai perbandingan pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan dari 4 program, 10 kegiatan dan 24 sub kegiatan, sampai dengan Bulan Desember telah terlaksana sesuai target yang direncanakan, Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Kebudayaan Kota Denpasar mendapatkan Pagu Aggaran induk (Belanja Langsung) sebesar Rp. 48.656.874.394,- melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi Rp. 67.346.846.960,- Adapun realisasi anggaran pada tahun 2024 sampai dengan Bulan Desember sebesar Rp. 63.528.325.389 (94%) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Berdasarkan pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di Tahun 2024 yang merupakan tahun ke 4 pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026 maka target pada Renstra tersebut telah terealisasi 80%.

Pada pelaksanaan Tahun Anggaran (TA) 2025 sampai triwulan I, secara keseluruhan dari 4 program, 11 Kegiatan, dan 36 Sub Kegiatan, secara fisik program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan dengan capaian 15,79%, dari sisi keuangan masih terdapat beberapa sub kegiatan yang masih belum direalisasikan sehingga realisasi keuangan baru mencapai 13,10%. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya/ terpenuhinya kinerja fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada triwulan I Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dalam pengerjaan SPJ jasa-jasa tim, honorarium mengalami kendala dalam pembuatan SK sehingga realisasinya menjadi terhambat
b. Beberapa pekerjaan yang menjadi target TW 1 telah selesai dan masih dalam proses administrasi keuangan
c. Adanya perubahan jadwal beberapa pekerjaan
d. Beberapa pekerjaan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan riil

Adapun solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang pada triwulan I, sebagai berikut:

a. Melakukan koordinasi dengan bagian terkait untuk mempercepat penyelesaian SK
b. Mempercepat proses penyelesaian administrasi keuangan bagi pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan
c. Melakukan penyesuaian anggaran kas terhadap pekerjaan yang jadwalnya berubah dan melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait
d. Untuk pekerjaan yang direalisasikan menyesuaikan dengan kebutuhan riil seperti belanja listrik, air, internet. Jika dibutuhkan kembali akan segera ditindaklanjuti dan direalisasikan

Berdasarkan target dan realisasi yang dicapai oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar pada Triwulan I Tahun 2025, rata-rata sudah mencapai target yang ditetapkan, hal ini tentunya tidak lepas dari dukungan semua pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Untuk lebih rincinya capaian pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja
Dinas Kebudayaan Tahun 2025

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
	Urusan Kebudayaan		**100%**	**64.426.413.651**	**27%**	**8.436.727.125**	**55.989.686.526**
2.22.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan layanan Kesekretariatan**	**100%**	**11.399.728.851**	**33%**	**2.170.837.825**	**9.228.891.026**
2 22 01 2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**27.500.000**	**0%**	**0**	**27.500.000**
2 22 01 2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	27.500.000	0%	0	27.500.000
2.22.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**7.039.360.557**	**100%**	**1.410.564.613**	**5.628.795.944**
2.22.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	7.039.360.557	100%	1.410.564.613	5.628.795.944
2.22.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**606.759.890**	**32%**	**63.733.250**	**543.026.640**

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
2.22.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.232.300	0%	0	16.232.300
2.22.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	326.817.140	60%	59.378.250	267.438.890
2.22.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	54.185.900	100%	1.280.000	52.905.900
2.22.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.650.000	50%	975.000	24.675.000
2.22.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	113.106.550	0%	0	113.106.550
2.22.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	42 Dokumen	12.600.000	17%	2.100.000	10.500.000
2.22.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	58.168.000	0%	0	58.168.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
2.22.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**466.152.000**	**17%**	**115.000.000**	**351.152.000**
2.22.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	154 Unit	143.902.000	0%	0	143.902.000
2.22.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	17.250.000	0%	0	17.250.000
2.22.01.2.07.07	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	305.000.000	50%	115.000.000	190.000.000
2.22.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**2.059.826.400**	**20%**	**541.339.962**	**1.518.486.438**
2.22.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan	217.200.000	24%	40.589.952	176.610.048
2.22.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	37 Laporan	1.842.626.400	16%	500.750.010	1.341.876.390

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
2.22.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1.200.130.004**	**29%**	**40.200.000**	**1.159.930.004**
2.22.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.000.000	100%	7.500.000	22.500.000
2.22.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	271.804.000	100%	32.700.000	239.104.000
2.22.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	43 Unit	32.148.000	0%	0	32.148.000
2.22.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	83.140.000	0%	0	83.140.000
2.22.01.2.09.07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	78.000.000	0%	0	78.000.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
2.22.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	194.916.000	0%	0	194.916.000
2.22.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	510.122.004	0%	0	510.122.004
2.22.02	**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan**	**100%**	**51.678.769.800**	**45%**	**6.218.259.300**	**45.460.510.500**
2.22.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan**	**100%**	**883.251.000**	**57%**	**141.817.500**	**741.433.500**
2.22.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	7 Objek	669.211.000	14%	141.817.500	527.393.500
2.22.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	227 Orang	214.040.000	100%	0	214.040.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
2.22.02.2.02	**Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional**	**100%**	**11.037.957.600**	**69%**	**0**	**11.037.957.600**
2.22.02.2.02.01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	10.265.072.600	57%	0	10.265.072.600
2.22.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	537.685.000	50%	0	537.685.000
2.22.02.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Sertifikat	235.200.000	100%	0	235.200.000
2.22.02.2.03	**Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat**	**100%**	**39.757.561.200**	**8%**	**6.076.441.800**	**33.681.119.400**

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
2.22.02.2.03.01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	38.693.199.200	25%	6.076.441.800	32.616.757.400
2.22.02.2.03.02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga,dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	189 Orang	516.562.000	0%	0	516.562.000
2.22.02.2.03.03	Sub Kegiatan Penyedian Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	19 Unit	547.800.000	0%	0	547.800.000
2.22.04	**Program Pembinaan Sejarah**	**Persentase media informasi dan data sejarah yang bisa diakses masyarakat**	**100%**	**1.071.730.000**	**28%**	**47.630.000**	**1.024.100.000**
2.22.04.2.01	**Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**1.071.730.000**	**28%**	**47.630.000**	**1.024.100.000**
2.22.04.2.01.01	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	479 Orang	564.997.000	58%	47.630.000	517.367.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
2.22.04.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	28 Dokumen	506.733.000	0%	0	506.733.000
2.22.05	**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan**	**100%**	**276.185.000**	**0%**	**0**	**276.185.000**
2.22.05.2.01	**Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota**	**100%**	**276.185.000**	**0%**	**0**	**276.185.000**
2.22.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	38.875.000	0%	0	38.875.000
2.22.05.2.01.02	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	237.310.000	0%	0	237.310.000

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah yaitu disebutkan bahwa Perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
b. Penyelenggaraan urusan penatausahaan perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian dan urusan perencanaan;
c. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan;
e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan kebudayaan;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan sesuai peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kebudayaan dibagi menjadi Sekretariat dan 4 Bidang yaitu Bidang Kesenian, Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, Bidang Tradisi dan Warisan Budaya, serta Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan dengan didukung dengan SDM yang merupakan ASN sejumlah 96 Orang.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka tertentu. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025 yang mengacu pada sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2026 seperti dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	100%	100%	100%	100% (3%)	100% (3%)
		Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	100%	100%	100%	100% (8%)	100% (8%)
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	100%	100%	100%	100% (10%)	100% (10%)
		Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	100%	100%	100%	100% (6%)	100% (6%)

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja suatu organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama atau disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari beberapa indikator yang ada. Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya. Indikator tersebut juga sebuah instrumen penanda tercapainya target untuk mengatasi Isu - isu strategis yang ada pada urusan Kebudayaan di Kota Denpasar. Isu strategis tersebut tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026 diantaranya meliputi:

1. Belum optimalnya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan seni dan budaya di Kota Denpasar
2. Belum optimalnya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya di Kota Denpasar

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Dinas Kebudayaan pada Tahun 2025, seiring perjalanan terdapat penyesuaian yang bertujuan agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan mempertimbangkan usulan masyarakat, kegiatan prioritas, dan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan maka ditetapkan rincian perubahan rencana kerja pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Usulan Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2025	Peruba Han 2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar/Urusan Kebudayaan	**-**	-	-		**68.867.896.652**	**79.737.565.404**	**10.869.668.752**
2.22.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan layanan Kesekretariatan**	**100%**	**100%**	**PAD**	**14.119.941.252**	**16.874.685.604**	**2.754.744.352**
2 22 01 2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	**38.900.000**	**27.500.000**	**(11.400.000)**
2 22 01 2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	38.900.000	27.500.000	(11.400.000)

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2025	Peruba Han 2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	Perangkat Daerah				TAHUN SEBELUMNYA			
2.22.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**PAD, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**	**9.649.665.958**	**10.876.888.166**	**1.227.222.208**
2.22.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/ bulan	98 Orang/ bulan	PAD, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS	9.649.665.958	10.876.888.166	1.227.222.208

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2025	Peruba Han 2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
					KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA			
2.22.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**PAD**	**666.166.890**	**636.478.890**	**(29.688.000)**
2.22.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	PAD	16.232.300	16.232.300	-
2.22.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	5 Paket	5 Paket	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN	328.817.140	352.990.140	24.173.000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2025	Peruba Han 2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	Kantor	Disediakan			SEBELUMNYA			
2.22.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	PAD	54.185.900	54.185.900	-
2.22.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	27.150.000	25.650.000	(1.500.000)
2.22.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	PAD	113.106.550	116.652.550	3.546.000
2.22.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	42 Dokumen	1 Dokumen	PAD	12.600.000	12.600.000	-
2.22.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	6 Laporan	3	SISA LEBIH PERHITUNGA	114.075.000	58.168.000	(55.907.000)

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2025	Peruba Han 2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	N ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA			
2.22.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**PAD**	**466.152.000**	**1.430.582.000**	**964.430.000**
2.22.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	159 Unit	159 Unit	PAD	143.902.000	143.902.000	-
2.22.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	21 Unit	PAD	17.250.000	986.680.000	969.430.000
2.22.01.2.07.07	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	PAD	305.000.000	300.000.000	(5.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2025	Peruba Han 2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2.22.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**PAD**	**2.064.326.400**	**2.667.084.540**	**602.758.140**
2.22.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan	3 Laporan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	221.700.000	217.200.000	(4.500.000)
2.22.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	37 Laporan	8 Laporan	PAD	1.842.626.400	2.449.884.540	607.258.140
2.22.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan**	**100%**	**100%**	**PAD**	**1.234.730.004**	**1.236.152.008**	**1.422.004**

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2025	Peruba Han 2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
		Pemerintahan Daerah						
2.22.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	PAD	30.000.000	30.000.000	-
2.22.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	PAD	271.804.000	271.804.000	-
2.22.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	43 Unit	43 Unit	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN	40.948.000	32.148.000	(8.800.000)

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2025	Peruba Han 2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
					SEBELUMNYA			
2.22.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	102 Unit	PAD	83.140.000	83.140.000	-
2.22.01.2.09.07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	PAD	78.000.000	78.000.000	-
2.22.01.2.09.07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit	PAD	12.000.000	0	(12.000.000)
2.22.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	PAD	194.916.000	194.916.000	-
2.22.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	5 Unit	5 Unit	PAD	523.922.004	546.144.008	22.222.004

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2025	Peruba Han 2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi						
2.22.02	**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan**	**100%**	**100%**	**SISA LEBIH PERHITUNGA N ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA**	**53.353.759.400**	**60.842.789.800**	**7.489.030.400**
2.22.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan**	**100%**	**100%**	**SISA LEBIH PERHITUNGA N ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA**	**1.052.862.000**	**949.361.000**	**(103.501.000)**
2.22.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan,	7 Objek	9 Objek	SISA LEBIH PERHITUNGA N ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	838.822.000	735.321.000	(103.501.000)

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2025	Peruba Han 2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
		Pemanfaatan						
2.22.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	227 Orang	227 Orang	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	214.040.000	214.040.000	-
2.22.02.2.02	**Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional**	**100%**	**100%**	**SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA**	**12.103.125.200**	**15.227.827.600**	**3.124.702.400**
2.22.02.2.02.01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	7 Objek	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	11.314.240.200	14.454.942.600	3.140.702.400

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2025	Peruba Han 2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2.22.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	2 Laporan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	542.685.000	537.685.000	(5.000.000)
2.22.02.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Sertifikat	12 Sertifikat	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	246.200.000	235.200.000	(11.000.000)
2.22.02.2.03	**Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat**	**100%**	**100%**	**SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA**	**40.197.772.200**	**44.665.601.200**	**4.467.829.000**

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2025	Peruba Han 2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2.22.02.2.03.01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	4 Objek	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	38.906.734.200	42.862.439.200	3.955.705.000
2.22.02.2.03.02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga,dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	189 Orang	189 Orang	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	742.888.000	1.255.362.000	512.474.000
2.22.02.2.03.03	Sub Kegiatan Penyedian Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	19 Unit	19 Unit	BKK PROV. DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	548.150.000	547.800.000	(350.000)
2.22.04	**Program Pembinaan Sejarah**	**Persentase media informasi dan data sejarah yang bisa diakses**	**100%**	**100%**	**SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN**	**1.104.535.000**	**1.674.230.000**	**569.695.000**

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2025	Peruba Han 2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
		masyarakat			**SEBELUMNYA**			
2.22.04.2.01	**Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**100%**	**SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA**	**1.104.535.000**	**1.674.230.000**	**569.695.000**
2.22.04.2.01.01	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	478 Orang	478 Orang	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	569.617.000	564.997.000	(4.620.000)
2.22.04.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	28 Dokumen	31 Dokumen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	534.918.000	1.109.233.000	574.315.000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2025	Peruba Han 2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2.22.05	**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan**	**100%**	**100%**	**SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA**	**289.661.000**	**345.860.000**	**56.199.000**
2.22.05.2.01	**Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota**	**100%**	**100%**	**SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA**	**289.661.000**	**345.860.000**	**56.199.000**
2.22.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	5 Objek	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	42.725.000	77.500.000	34.775.000
2.22.05.2.01.02	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	4 Objek	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	246.936.000	268.360.000	21.424.000

Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 dengan perkiraan biaya pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 63.003.939.820 kemudian dianggarkan pada APBD Induk sebesar Rp 68.867.896.652. Namun, terdapat rasionalisasi dalam rangka menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD TA. 2025 menjadi Rp 67.683.239.226 dimana efisiensi dilakukan pada belanja cetak, publikasi, perjalanan dinas dan belnaja jasa lainnya. Untuk mencapai target kinerja yang ditarget pada tahun 2025, maka perkiraan penambahan anggaran perubahan menjadi Rp 79.737.565.404. Perubahan Anggaran meliputi penambahan Gaji dan Tunjangan ASN untuk formasi P3K tahap 1, penambahan Belanja Rutin dan Belanja Modal, Penambahan Kegiatan Melepas Matahari, Pengembangan Wawasan Bendesa Adat, Sabha Upadesa dan Study Komparasi Pasikian Yowana, Penambahan Objek untuk Inventarisasi WBTB, Inventarisasi Objek Diduga Cagar Budaya dan Penetapan Cagar Budaya, serta penambahan Hibah yang diberikan kepada masyarakat. Pendanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan juga telah memperhitungkan prakiraan maju di Tahun 2026 sebesar Rp. 56.389.387.916.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Tahun 2025 disusun sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025 sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar. Rencana Kerja tahunan memuat strategi, kebijakan dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam instansi Dinas Kebudayaan dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar digunakan untuk acuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Perubahan Rencana Kerja ini akan dilaksanakan melalui 4 program, 11 Kegiatan, dan 36 Sub Kegiatan dengan jumlah Pagu anggaran sebesar **Rp. 79.737.565.404**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik, akuntabel dan berkelanjutan.Untuk dapat secara optimal merealisasikan program-program yang telah direncanakan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta semangat, tekad dan kedisplinan semua pihak khususnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam memprioritaskan program sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR

TAHUN 2025



DENPASAR

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu.

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas Asung Kertha Wara NugrahaNya, kami telah berhasil merampungkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar tahun 2025. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjabarkan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Materi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini nantinya kami padukan dengan rencana pencapaian Pembangunan Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, sekaligus merealisasikan capaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPKD Kota Denpasar Tahun 2025.

Kami berharap program dan kegiatan pembangunan yang terkandung di dalamnya, dapat merepresentasikan kebutuhan masyarakat, serta mampu membangun opini publik dan menciptakan partisipasi yang tinggi dari masyarakat untuk merealisasikannya .

Selanjutnya kami ingin mengajak seluruh pihak yang berkompeten untuk bersama-sama mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar dalam rangka mewujudkan Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju.

Denpasar, 10 Juni 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar,

Drs. Dewa Nyoman Sudarsana, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650814 198602 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 7

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 7

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 7

2.1.3 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan 7

2.1.4 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut 8

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR 17

BAB IV. PENUTUP 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Renja Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 S/D Triwulan I..... 9
Tabel 3.1 Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Denpasar Tahun 2025 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Dokumen perencanaan yang harus disusun dan ditetapkan setiap daerah (kabupaten/kota) adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

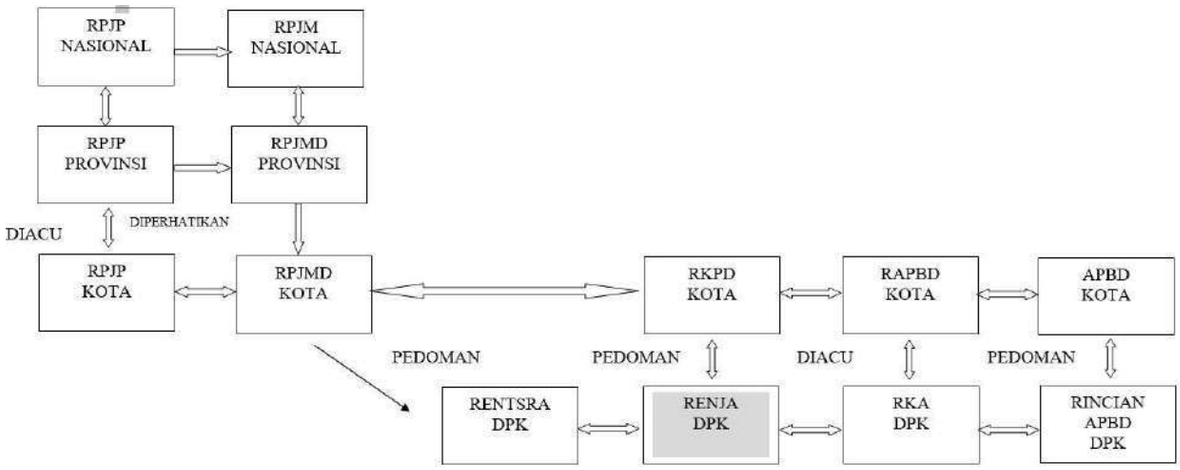
Sejalan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004, Perangkat Daerah selaku perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan juga diamanatkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, di mana dalam proses penyusunannya berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya yaitu RPJMD.

Menindaklanjuti amanat tersebut di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar Tahun 2025, yang selanjutnya disingkat Renja DPK Tahun 2025.

Perubahan Renja DPK Tahun 2025, selain mengacu pada dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas, juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja DPK Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan, dimana Perubahan Renja DPK Tahun 2025 ini merupakan Renja Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra DPK Tahun 2021 – 2026. Sebagai informasi tambahan, Perubahan Renja DPK Tahun 2025 baru sebatas rancangan rencana kerja, sehingga rancangan perubahan renja ini dalam perjalanannya masih sangat dimungkinkan terjadi perubahan atau koreksi.

Keterkaitan Perubahan Rencana Kerja (Renja) DPK Kota Denpasar dengan dokumen perencanaan lainnya, mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam mekanisme pelaksanaan pembangunan dan penganggaran keuangan daerah seperti dalam gambar di bawah ini :

Gambar 1.1 Hubungan Renja Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar (Renja DPK) Tahun 2025 adalah :

a. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774, Lembaran Lepas Sekretariat Negara: 27 Halaman);
e. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071, Lembaran Lepas Sekretariat Negara: 52 Halaman);

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
q. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
r. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
s. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
t. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
u. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);

v. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);

w. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja DPK Kota Denpasar Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025, sedangkan tujuannya adalah merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar selama tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Dalam bagian ini dimuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar sampai dengan triwulan I Tahun 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR

Menguraikan tentang perubahan rencana kerja yang ditargetkan dalam tahun perencanaan sebagai bahan penyusunan perjanjian kinerja dan rencana aksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar Tahun 2025 serta menguraikan sumber pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan – catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II.
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar sampai dengan Triwulan I tahun 2025, disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, kegiatan pengadaan barang dan jasa belum dapat dilaksakan secara optimal dikarenakan terkendala dengan adanya Inpres No. 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang efisiensi anggaran belanja. Sehingga pengadaan barang dan jasa harus ditunda mengingat adanya proses penyesuaian anggaran tersebut.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, pencapaian realisasi keuangan baru mencapai 8,68% yakni Rp 2.650.942.882 jika dibandingkan dengan target Tahun 2025 sebesar Rp 13.107.144.801.

2.1.3 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran kegiatan, sebagai berikut:

1. Telah optimalnya koordinasi antar bidang di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar dalam hal pelaksanaan kegiatan
2. Penerapan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan guna menjadi solusi tidak dapat berjalannya pertemuan tatap muka telah berjalan secara optimal
3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam penggunaan teknologi

Faktor-faktor penghambat pencapaian nilai akhir kinerja sasaran, sebagai berikut:

1. Adanya efisiensi anggaran dari pusat melalui Inpres No. 1 Tahun 2025

2. Adanya aturan baru dari pusat terkait pengadaan Pegawai PPPK yang tidak menentu
3. Penyesuaian terhadap kondisi politik dan terpilihnya Kepala Daerah baru
4. Belum optimalnya penerapan perencanaan dan anggaran

2.1.4 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan yang dapat diterapkan sebagai solusi dari permasalahan yang ada, yaitu:

1. Mengoptimalkan proses penyesuaian anggaran sesuai dengan instruksi pusat
2. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia
3. Menjalankan kegiatan dengan mengoptimalkan anggaran yang tidak terkena efisiensi

Tabel 2.1 Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 S/D Triwulan I

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan**	**100%**	**Rp 11.745.573.601**	**8,42%**	**Rp 2.618.232.882**	**Rp 9.127.340.719**
	Kegiatan:						
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhnya Administrasi Keuangan**	**100%**	**Rp 9.385.367.019**	**25,23%**	**Rp 2.239.190.469**	**Rp 7.146.176.622**
	Sub Kegiatan:						
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang / Bulan	Rp 9.385.367.019	40 Orang / Bulan	Rp 2.239.190.469	Rp 7.146.176.622
	Kegiatan:						
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**Rp 430.563.250**	**-**	**Rp 26.961.500**	**Rp 403.601.750**

	Sub Kegiatan:						
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 18.488.000	-	-	Rp 18.488.000
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 117.678.500	-	Rp 2.710.000	Rp 114.968.500
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 153.649.000	-	Rp 18.126.500	Rp 135.522.500
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 33.022.750	-	-	Rp 33.022.750
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Rp 25.200.000	-	Rp 3.000.000	Rp 22.200.000
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan	Jumlah Laporan	1 Laporan	Rp 8.400.000	-	Rp 2.000.000	Rp 6.400.000

	Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu					
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp 74.125.000	-	Rp 1.125.000	Rp 73.000.000
	Kegiatan:						
2.23.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Pengadaan Barang Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100%**	**Rp 26.880.000**	**-**	**-**	**Ep 26.880.000**
	Sub Kegiatan:						
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Rp 26.880.000	-	-	Ep 26.880.000
	Kegiatan:						
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100%**	**Rp 1.488.453.260**	**-**	**Rp 318.920.513**	**Rp 1.169.532.747**
	Sub Kegiatan:						
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1 Laporan	Rp 168.000.000	-	Rp 28.243.319	Rp 139.756.681

		yang Disediakan					
2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 8.000.000	-	-	Rp 8.000.000
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 1.312.453.260	-	Rp 290.677.194	Rp 1.021.776.066
	Kegiatan:						
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**100%**	**Rp 414.310.000**	**16,88%**	**Rp 33.160.400**	**Rp 381.149.600**
	Sub Kegiatan:						
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	Rp 258.120.000	6 Unit	Rp 33.160.400	Rp 224.959.600
2.23.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak	Jumlah Aset Tak	4 Unit	Rp 30.600.000	-	-	Rp 30.600.000

	Berwujud	Berwujud yang Dipelihara					
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 45.000.000	-	-	Rp 45.000.000
2.23.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	Rp 80.590.000	7 Unit	-	Rp 80.590.000
	Program:						
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Pemustaka Pertahun**	**3,15%**	**Rp 1.031.351.600**	**-**	**Rp 30.020.000**	**Rp 1.001.331.600**
	Kegiatan:						
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemustaka Pertahun**	**3,15%**	**Rp 191.078.600**	**-**	**-**	**Rp 191.078.600**
	Sub Kegiatan:						
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	50 Orang	Rp 34.928.600	-	-	Rp 34.928.600

		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2500 Eksemplar	Rp 156.150.000	-	-	Rp 156.150.000
	Kegiatan:						
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemustaka Pertahun**	**3,15%**	**Rp 840.273.000**	**-**	**Rp 30.020.000**	**Rp 810.253.000**
	Sub Kegiatan:						
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	48 Orang	Rp 737.676.000	-	-	Rp 737.676.000
2.23.02.2.02.0010	Sosiailisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada	180 Lokus	Rp 102.597.000	15	Rp 30.020.000	Rp 72.577.000

	Masyarakat	Satuan Pendidikan					
	Program:						
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Nilai Rata-Rata Evaluasi Kearsipan**	**85,75**	**Rp 365.148.200**	**-**	**Rp 2.690.000**	**Rp 362.458.200**
	Kegiatan:						
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perangkat Daerah yang Arsip Dinamisnya dikelola dengan Baik**	**36 Perangkat Daerah**	**Rp 107.660.000**	**-**	**Rp 330.000**	**Rp 107.330.000**
	Sub Kegiatan:						
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	46.405 Berkas	Rp 59.990.000	-	-	Rp 59.990.000
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Laporan	Rp 47.670.000	-	RP 330.000	Rp 47.340.000
	Kegiatan:						
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perangkat Daerah yang Arsip Statisnya dikelola dengan Baik**	**3 Perangkat Daerah**	**Rp 83.783.000**	**-**	**-**	**Rp 83.783.000**
	Sub Kegiatan:						

2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	5 Arsip	Rp 83.783.000	-	-	Rp 83.783.000
	Kegiatan:						
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Terbentuknya Jaringan Informasi Kearsipan Tingkat Kabupaten/Kota**	**1 Aplikasi**	**Rp 173.705.200**	**-**	**Rp 2.360.000**	**Rp 171.345.200**
	Sub Kegiatan:						
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah	2 Laporan	Rp 173.705.200	-	Rp 2.360.000	Rp 171.345.200

BAB III.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar Tahun 2024 mengacu pada Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana maupun Renstra Perangkat Daerah. Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sebagaimana telah ditetapkan, maka disusun Perubahan Rencana Kerja DPK Kota Denpasar terdiri dari 3 Program, 10 Kegiatan, dan 24 Sub Kegiatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 dengan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Terkait dengan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang diusulkan dalam hal anggaran perubahan tahun anggaran 2024 lebih lanjut dijabarkan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Denpasar Tahun 2025

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		APBD Induk 2025	Pagu Usulan Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
			Induk 2025	Perubahan 2025			
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR				**Rp 14.832.546.836**	**Rp 15.377.818.718**	**Rp 545.271.882**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				**Rp 14.289.479.136**	**Rp 15.012.661.518**	**Rp 723.182.382**
	Program:						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan**	**100%**	**100%**	**Rp 12.966.647.786**	**Rp 13.953.109.918**	**Rp 986.462.132**
	Kegiatan:						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terpenuhnya Administrasi**	**100%**	**100%**	**Rp 10.518.784.926**	**Rp 11.258.813.628**	**Rp 740.028.702**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		APBD Induk 2025	Pagu Usulan Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
			Induk 2025	Perubahan 2025			
		Keuangan					
	Sub Kegiatan:						
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang / Bulan	40 Orang / Bulan	Rp 10.518.784.926	Rp 11.258.813.628	Rp 740.028.702
	Kegiatan:						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**Rp 482.155.600**	**Rp 445.816.750**	**(Rp 36.338.850)**
	Sub Kegiatan:						
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 18.488.000	Rp 18.488.000	-
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	Rp 160.289.000	Rp 117.678.500	(Rp. 42.610.500)

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		APBD Induk 2025	Pagu Usulan Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
			Induk 2025	Perubahan 2025			
		yang Disediakan					
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 154.656.100	Rp 168.902.500	Rp 14.246.400
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 39.122.500	Rp 33.022.750	(Rp. 6.099.750)
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 25.200.000	Rp 25.200.000	-
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Rp 9.600.000	Rp 8.400.000	(Rp. 1.200.000)
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 74.800.000	Rp 74.125.000	(Rp. 675.000)

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		APBD Induk 2025	Pagu Usulan Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
			Induk 2025	Perubahan 2025			
	SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
	Kegiatan:						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terpenuhinya Pengadaan Barang Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**Rp 26.880.000**	**Rp 26.880.000**	**-**
	Sub Kegiatan:						
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	Rp 26.880.000	Rp 26.880.000	-
	Kegiatan:						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**Rp 1.489.253.260**	**Rp 1.767.289.540**	**Rp. 278.036.280**
	Sub Kegiatan:						
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	Rp 168.000.000	Rp 168.000.000	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		APBD Induk 2025	Pagu Usulan Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
			Induk 2025	Perubahan 2025			
	Daya Air, dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan					
11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 8.800.000	Rp 8.800.000	-
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 1.312.453.260	Rp 1.590.489.540	Rp. 278.036.280
	Kegiatan:						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**Rp 449.574.000**	**Rp 454.310.000**	**Rp. 4.736.000**
	Sub Kegiatan:						

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		APBD Induk 2025	Pagu Usulan Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
			Induk 2025	Perubahan 2025			
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	Rp 282.624.000	Rp 258.120.000	(Rp. 24.504.000)
14	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	Rp 30.600.000	Rp 30.600.000	-
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000	-
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	Rp 91.350.000	Rp 120.590.000	Rp 29.240.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		APBD Induk 2025	Pagu Usulan Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
			Induk 2025	Perubahan 2025			
	Program:						
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Persentase Pemustaka Pertahun**	**3,15%**	**3,15%**	**Rp 1.322.831.350**	**Rp 1.059.551.600**	**(Rp. 263.279.750)**
	Kegiatan:						
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pemustaka Pertahun**	**3,15%**	**3,15%**	**Rp 243.602.350**	**Rp 191.078.600**	**(Rp. 52.523.750)**
	Sub Kegiatan:						
17	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	Rp 61.999.600	Rp 34.928.600	(Rp 27.071.000)
18	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan	2500 Eksemplar	2500 Eksemplar	Rp 181.602750	Rp 156.150.000	(Rp 25.452.750)

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		APBD Induk 2025	Pagu Usulan Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
			Induk 2025	Perubahan 2025			
		untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan					
	Kegiatan:						
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pemustaka Pertahun**	**3,15%**	**3,15%**	**Rp 1.079.229.000**	**Rp 868.473.000**	**(Rp 210.756.000)**
	Sub Kegiatan:						
19	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	48 Orang	48 Orang	Rp 952.842.000	Rp 765.876.000	(Rp 186.966.000)
20	Sosiailisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	180 Lokus	180 Lokus	Rp 126.387.000	Rp 102.597.000	(Rp 23.790.000)

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		APBD Induk 2025	Pagu Usulan Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
			Induk 2025	Perubahan 2025			
	Program:						
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Nilai Rata-Rata Evaluasi Kearsipan**	**85,75**	**85,75**	**Rp 543.067.700**	**Rp 365.157.200**	**(Rp 177.910.500)**
	Kegiatan:						
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perangkat Daerah yang Arsip Dinamisnya dikelola dengan Baik**	**36 Perangkat Daerah**	**36 Perangkat Daerah**	**Rp 229.741.000**	**Rp 107.669.000**	**(Rp 122.072.000)**
	Sub Kegiatan:						
21	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	46.405 Berkas	46.405 Berkas	Rp 99.721.000	Rp 59.999.000	(Rp 39.722.000)
22	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Laporan	36 Laporan	Rp 130.020.000	Rp 47.670.000	(Rp 82.350.000)
	Kegiatan:						

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		APBD Induk 2025	Pagu Usulan Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
			Induk 2025	Perubahan 2025			
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perangkat Daerah yang Arsip Statisnya dikelola dengan Baik**	**3 Perangkat Daerah**	**3 Perangkat Daerah**	**Rp 84.660.000**	**Rp 83.783.000**	**(Rp 877.000)**
	Sub Kegiatan:						
23	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	5 Arsip	5 Arsip	Rp 84.660.000	Rp 83.783.000	(Rp 877.000)
	Kegiatan:						
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Terbentuknya Jaringan Informasi Kearsipan Tingkat Kabupaten/Kota**	**1 Aplikasi**	**1 Aplikasi**	**Rp 228.666.700**	**Rp 173.705.200**	**(Rp 54.961.500)**
	Sub Kegiatan:						
24	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 228.666.700	Rp 173.705.200	(Rp 54.961.500)

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		APBD Induk 2025	Pagu Usulan Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
			Induk 2025	Perubahan 2025			
	Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah					
Jumlah					**Rp 14.832.546.836**	**Rp 15.377.818.718**	**Rp 545.271.882**

BAB IV.
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) DPK Kota Denpasar selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja DPK, dan Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf DPK Kota Denpasar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Untuk dapat mengoptimalkan realisasi program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Perubahan Rencana Kerja DPK Kota Denpasar Tahun 2025 ini, tentu sangat dipengaruhi oleh pendanaan yang memadai, oleh karena itu kiranya dokumen Perubahan Renja DPK Kota Denpasar Tahun 2025 ini agar dijadikan bahan pertimbangan oleh Tim dalam mengalokasikan anggaran untuk DPK Kota Denpasar dalam Perubahan APBD Kota Denpasar Tahun 2025.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 10 Juni 2025

Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Denpasar,

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Drs. Dewa Nyoman Sudarsana, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650814 198602 1 005

PERUBAHAN RENJA

2025

DINAS PERIKANAN

DAN KETAHANAN PANGAN

KOTA DENPASAR

Jl. MATARAM NO.1

WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3/1187/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan rencana kerja Perangkat Daerah, sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perangkat daerah untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan tugas dan fungsinya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Kota Denpasar Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);

7. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencan Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Juni 2025

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 19 JUNI 2025
NOMOR : 100.3.3/1187/HK/2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

1. PERUBAHAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
2. PERUBAHAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
3. PERUBAHAN RENJA RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR
4. PERUBAHAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2025
5. PERUBAHAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
6. PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
7. PERUBAHAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
8. PERUBAHAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
9. PERUBAHAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
10. PERUBAHAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2025
11. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
12. PERUBAHAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
13. PERUBAHAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
14. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
15. PERUBAHAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
16. PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
17. PERUBAHAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
18. PERUBAHAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2025
19. PERUBAHAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
20. PERUBAHAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
21. PERUBAHAN RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
22. PERUBAHAN RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
23. PERUBAHAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
24. PERUBAHAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
25. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

26. PERUBAHAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
27. PERUBAHAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
28. PERUBAHAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
29. PERUBAHAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
30. PERUBAHAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
31. PERUBAHAN RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
32. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
33. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2025
34. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2025
35. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2025
36. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
37. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Rancangan Akhir Perubahan RENJA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar tahun 2025 telah berhasil disusun. Rancangan Akhir Perubahan RENJA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan yang disusun merupakan terjemahan dari Rancangan Akhir RENSTRA Dinas periode 2021 - 2026 yang sedang disusun setelah disusunnya RPJMD Kota Denpasar periode 2021 - 2026 sebagai penjabaran Program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Rancangan Perubahan RENJA Dinas disusun tetap mengacu pada RPJM yang telah diuraikan sampai kegiatan dalam RENSTRA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dan merupakan kerja Tim penyusun Renja Dinas yang telah ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Rancangan Akhir Perubahan RENJA Dinas dipakai sebagai pedoman untuk bidang dan seksi dalam menyusun Perubahan RKA tahun 2025 masing-masing bidang.

Demikian Rancangan Akhir Perubahan RENJA ini kami susun sebagai bahan acuan dalam penjabaran Program dan kegiatan, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RENJA ini.

Denpasar, 19 Juni 2025

Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Kota Denpasar

drh. Ida Bagus Mayun Suryawangsa
Pembina Utama Muda
NIP. 19660328 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I. PENDAHULUAN
1.1.LATAR BELAKANG 1
1.2.LANDASAN HUKUM 2
1.3.MAKSUD DAN TUJUAN 3
1.4.SISTEMATIKA 4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMAPI TRIWULAN I 5
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... 8
BAB IV. PENUTUP 9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD. Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja merupakan tahapan penyusunan rencana Kerja yang dilaksanakan setiap tahun. Rancangan Akhir Perubahan RENJA 2025 disusun untuk mengakomodir tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dan Ketahanan pangan yang belum bisa diakomodir pada penganggaran Induk 2025 yang merupakan pelaksanaan tahun ke 4 RPJM Daerah Tahun 2021-2026 dan sebagai tindak lanjut dari RKPD Tahun 2025 serta Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 - 2026. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar tahun 2021 Nomor 5) , hasil kerja pembangunan tahun lalu dan laporan Renstra SKPD, isu strategis yang akan dicapai pada tahun pelaksanaan rencana kerja serta mempertimbangkan kebijakan program pembangunan Pusat dan Provinsi bidang Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar merupakan rencana kegiatan untuk periode perubahan yang biasanya dilaksanakan pada Triwulan IV dalam setiap tahunnya. pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026 seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar yaitu : ***Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju.***

Dalam pencapaian Visi tersebut maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) didasarkan Misi Pembangunan Kota Denpasar yaitu :

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kulaitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan.
2. ***Menjaga Stabilitas Keamanan dengan terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaam Bencana.***
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yan baik.

4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju tata Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

Mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar dimaksud, maka Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar terkait dalam pencapaian Misi ke 2, yaitu: Menjaga Stabilitas Keamanan dengan terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan pangan dan Kesiapsiagaan Bencana.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4421);
3. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda

tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerahn(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar tahun 2021 Nomor 5)
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar No 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2045;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Perubahan Renja – SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode Perubahan yang pelaksanaannya pada Triwulan III danIV tahun berjalan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Program/Kegiatan dan pendanaannya dalam satu tahun anggaran 2025 secara terpadu, terarah dan terukur. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keterpaduan antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan dan mengakomodir program kegiatan yang belum bisa dilaksanakan pada APBD Induk 2025.

1.4 Sistematika

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2025 disusun dengan Sistimatika sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

- **1.1. LATAR BELAKANG**
- **1.2. LANDASAN HUKUM**
- **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**
- **1.4. SISTEMATIKA**

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

- **2.1. EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2024**

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Renja sampai Triwulan I Tahun 2025 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 terdiri dari 7 Program, 15 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan. Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi pada tahun 2024 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar mendapatkan alokasi Anggaran APBD Induk Kota Denpasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.367.124.225 dan mengalami beberapa pergeseran dimana pagu terakhir sebelum perubahan sebesar Rp. 15.104.161.671 (kondisi terakhir tanggal 9 April 2025).

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 realisasi keuangan Rp. 2.574.462.071 dengan penyerapan anggaran sebesar 19,42% dari target 21,17% dan realisasi fisik sebesar 24,71% dari target 21,17%.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

1.1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

1.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

1.1.2. Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten / Kota

1.1.3. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten / Kota

1.1.4. Sub Kegiatan Kordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokanndan harga pangan Pokok Strategis

1.2. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi

1.2.1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan target Konsumsi pangan perkapita pertahun

1.2.2. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman Konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

2.1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

2.1.2. Sub Kegiatan Penyusunan Pemuktahiran dan analisis Peta ketahanan dan kerentanan Pangan

2.2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

2.1.1. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

2.1.2. Koordinasi dan sinkronisasi penanganan dan gizi kabupaten/Kota.

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

3.1. Kegiatan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/Kota

3.1.1. Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan daerah Kabupaten/Kota

3.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/Kota

4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

4.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN

4.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

4.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4.3. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

4.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

4.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan jasa Surat Menyurat

4.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik

4.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

4.4.4. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

4.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

4.5.2. Sub Kegiatan Pemeliharan Peralatan dan mesin lainnya

4.5.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung kantor dan bangunan lainnya

5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

5.1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabuaten/Kota

5.1.1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.

5.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembagan kelembagaan nelayan kecil.

5.1.3. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha nelayan kecil

6. Program P engelolaan Budidaya Perikanan

6.1.Pemberdayaan Pembudidayaan ikan kecil

6.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidayaan ikan kecil

6.1.2. Sub Kegiatan Pemberian pendampingan dan akses ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi serta penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan

6.2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

6.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

6.2.2. Sub Kegiatan Pengelolaan kesehhatan Ikan dalam1 (satu) daerahKabupaten/Kota

6.2.3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

7. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

7.1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

7.1.1. Pelaksanaan Bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil

7.2. Penyediaan dan Penyaluran bahan baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

7.2.1. Peningkatan Ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

7.2.2.. Pemberian fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja sampai Triwulan I berdasarkan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025, disajikan pada Tabel 2.1 Rancangan Perubahan Renja 2025.

Adapun frealisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target, sesuai target dan melebihi target adalah sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya terdapat belanja yang belum dapat dilaksanakan karena ada kesalahan kode rekening belanja dan belum masuk RKBMD. Selanjutnya akan disesuaikan di anggaran perubahan.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat, mencapai kinerja seperti target yang ditetapkan. Realisasi keuangan tidak sesuai dengan target karena Uang Persediaan (UP) tidak mencukupi sedang proses pengamprahan ganti uang (GU)
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan, mencapai kinerja seperti target yang ditetapkan, realisasi keuangan tidak sesuai dengan target karena Uang Persediaan (UP) tidak mencukupi sedang proses pengamprahan Ganti uang (GU).
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan, mencapai kinerja seperti target yang ditetapkan, realisasi keuangan tidak sesuai dengan target karena Uang Persediaan (UP) tidak mencukupi sedang proses pengamprahan Ganti uang (GU).
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah capaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan, ada beberapa sub kegiatan realisasi keuangan tidak sesuai target karena keterbatasan uang persediaan.
5. Program Pengelolaan Perikanan tangkap, kinerja sesuai dengan yang ditetapkan.
6. Program Pengelolaan Budidaya Perikanan, kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan
7. Program Pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan, kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

c. Realisasi Program yang melebihi capaian100%. Pada Triwulan I sampai dengan bulan Maret tahun 2025, tidak ada program yang melewati capaian sesuai target yang ditetapkan.

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya atau melebihi target kinerja. Pada triwulan I Tahun 2025 ada beberapa faktor yang mempengaruhi target kinerja diantaranya adanya beberapa pergeseran anggaran yang menyebabkan kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga kinerja yang dirancang dari awal tidak sesuai sehingga perlu pencermatan kembali di anggaran perubahan.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD

Perubahan aturan yang timbul pada pertengahan perjalanan pelaksanaan kegiatan mempengaruhi capaian program renstra SKPD. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Perencanaan Renja, Renstra dan RPJMD dibuat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Perencanaan Renja, Renstra dan RPJMD dibuat melalui sinergisitas, koordinasi SKPD dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

  Untuk Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai Triwulan I tahun 2025 disajikan dalam bentuk tabel pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Keiatan	INDIKATOR KINERJA Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 (Maret)	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	RP
1	2	3	4	5	6	7
	Dinas Perikanan dan Ketahanan pangan			**14.367.124.225**		2.574.462.071
I	**Program Penunjang Urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota**			**12.404.127.798**		**2.249.245.503**
		Persentase pemenuhan penunjang layanan kesekretariatan (%)	100			
1,1	**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**			**10.306.337.178**		**1.874.414.636**
		Jumlah pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai (bulan)	14		5	
1.1.1	Penyediaan gaji dan Tunjanan ASN			10.306.337.178		1.874.414.636
		Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang)	45		36	
1,2	**Administrasi Umum Perangkat daerah**			**228.547.000**		**26.013.300**
		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100		30	
1.2.1	Penyediaan Peralatan Rumah tangga			182.913.000		22.598.300
		Jumlah paket Pengadaan rumah tangga yang disediakan (paket)	1		1	
1.2.2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			45.634.000		3.415.000
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	1		1	
1,3	**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**			**38.500.000**		-
1.3.1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya			38.500.000		-
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	3		0	
1,4	**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**			**1.368.485.620**		**295.511.667**
		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100			
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			45.195.000		14.807.500
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	1		1	
1.4.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik			150.710.400		33.474.853
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12		4	
1.4.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			27.202.000		1.500.000
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (laporan)	12		3	
1.4.4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor			1.145.378.220		245.729.314
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang				
1,5	**Pemeliharaan barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah**			**462.258.000**		**53.305.900**
		Persentase barang milik negara yang terawat	100		25	
1.5.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			292.818.000		53.305.900

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Keiatan	INDIKATOR KINERJA Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 (Maret)	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	RP
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	22		4	
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya			55.380.000		-
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	56		6	
1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya			114.060.000		-
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit			
2	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat**			**289.102.200**		**46.336.350**
		Ketersediaan energi	3968			
		Ketersediaan protein	173,3			
		Konsumsi energi	2292,0		0	
		Konsumsiprotein	70,0		0	
2,1	**Penyediaan dan Penyaluran panan pokok atau pangan lainnya sesuai**			**168.796.000**		**22.003.664**
		Koefisien keragaman (CV) ≤ 15%	≤ 13%			
2.1.1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			60.927.000		4.149.564
		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan	100			
2.1.2	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota			76.993.500		10.515.000
		Jumlah Kelembagaan distribusi pangan yang dikembangkan (unit)	2			
2.1.3	Penyediaanan Informasi Harga Pangan tingkat produsen dan			14.419.000		3.702.050
		Informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota(laporan)	1			
2.1.4	Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan pokok strategis			16.456.500		3.637.050
		Jumlah kordinasi dan sinkronisasi Pemantuan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (laporan)	1			
2,2	**Pelaksanaan Pecapaian target konsumsi perkapita/tahun sesuai**			**120.306.200**		**24.332.686**
		meningkatnya konsumsi pangan yang beragam (B2SA) (desa kelurahan)	**25**			
2.2.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi pangan Per Kapita per Tahun			20.305.750		2.818.446
		Target konsumsi pangan per kapita per tahun (dokumen)				
2.2.2	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal			100.000.450		21.514.240
		Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Keiatan	INDIKATOR KINERJA Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 (Maret)	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	RP
1	2	3	4	5	6	7
3	**Proram Penanganan Kerawanan pangan**			**176.439.000**		**425.000**
		Persentase cadangan pangan (%)	35			
3,1	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**			**14.878.500**		-
		Tersusunnya peta daerah ketahanan dan kerentanan pangan	**4**			
3.1.1	Penyusunan, Pemutahiran, dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentenan Pangan			14.878.500		-
		Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutahirkan (dokumen)	6			
3,2	**Penangnanan Kerawanan pangan kewenangan kabupaten/Kota**			**161.560.500**		**425.000**
		Pemantauan daerah rawan pangan (Kecamatan)	**4**			
3.2.1	Pelaksananaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup 1 9satu) Daerah Kabupaten/Kota			153.719.000		200.000
		Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (dokumen)	1			
3.2.2	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota			7.841.500		225.000
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota (laporan)	1			
4	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**			**75.864.152**		**4.436.138**
		Persentase pangan yang aman dikonsumsi	**90**			
4,1	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan pangan Segar daerah**			**75.864.152**		**4.436.138**
		Jumlah sosialisasi keamanan pangan (kali)	**50**			
4.1.1	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/Kota			11.943.350		2.332.832
		Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten / kota (dokumen)	1			
4.1.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			63.920.802		2.103.306
		Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (dokumen)	1			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Keiatan	INDIKATOR KINERJA Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 (Maret)	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	RP
1	2	3	4	5	6	7
5	**Program Pengelolaan perikanan Tangkap**			**452.555.575**		**41.335.600**
		Produksi perikanan tangkap nelayan kecil (ton)	**1530**		**320**	
5,1	**Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/Kota**			**452.555.575**		**41.335.600**
		Produksi perikanan tangkap laut (ton)	1487		306,1	
5.1.1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			256.413.205		19.805.600
		Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya (orang)	60			
5.1.2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil			133.607.370		21.030.000
		Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya (kelompok)	1			
5.1.3	Penyediaan sarana dan Prasarana Pemberdayaan usaha nelayan kecil			62.535.000		500.000
		Jumlah sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan kecil (unit)	1			
6	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**		100	**616.099.000**		**41.494.480**
		Produksi perikanan budidaya (ton)	**630**			
6,1	**Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan kecil**			**119.291.000**		**1.650.000**
		Meningkatnya kompetensi pelaku usaha perikanan (%)	85%			
6.1.1	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil			35.249.500		950.000
		Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan pengembangan kelembagaan (kelompok)	2			
6.1.2	Pemberian pendampingan kemudahan akses iptek dan informatikasetta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan			84.041.500		700.000
6,2	**Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**			**496.808.000**		**39.844.480**
		Luasan lahan budidaya perikanan (Ha)	36,0		36	
6.1.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten /Kota			280.632.000		2.891.780
		Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (unit)	20			
6.1.2	Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota			48.025.000		800.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Keiatan	INDIKATOR KINERJA Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 (Maret)	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	RP
1	2	3	4	5	6	7
6.1.2	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			168.151.000		36.152.700
		Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (unit) / ekor)	970000		244,5	
7	**Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan**			**352.936.500**		**191.189.000**
		Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	38,0			
7,1	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**			**225.040.000**		**174.308.000**
		Jumlah produk perikanan yang aman dikonsumsi (%)	75			
7.1.2	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			225.040.000		174.308.000
		Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko (unit usaha)	18			
7,2	**Penyediaan dan penyaluaran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota**			**127.896.500**		**16.881.000**
		Jumlah Ketersediaan ikan (ton)	36000			
7.2.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota			102.576.000		16.431.000
		Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (ton)	36000		883	
7.2.2	Pemberian fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 Kabupaten/Kota			25.320.500		450.000
		Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi (pelaku usaha)	6			
	TOTAL			**14.367.124.225**		**2.574.462.071**

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk mencapai indikator kinerja dari masing-masing sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan strategi dan arah kebijakan, maka diperlukan adanyan kebijakan umum sebagai landasan dalam menyusun program pembangunan daerah. Kebijakan umum Pembangunan Kota Denpasar disusun sesuai dengan prioritas pengembangan sektor pembangunan Perikanan dan Ketahanan Pangan untuk mencapai sasaran Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan yaitu Meningkatnya Pengelolaan Cadangan Pangan dan Meningkatnya Produksi Perikanan. Untuk mencapai sasaran yang dudah tercantum pada RENSTRA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, setiap tahun disusun Rencana Kerja Dinas yang menyajikan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan dana/pagu indikatif. Untuk Program kegiatan yang belum terakomodir pada Rencana Kerja 2025 ini, diusulkan kembali di Perubahan Renja 2025

Adapun penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.1 tentang Rencana Program/Kegiatan / Sub Kegiatan dan pendanaan dengan Total Pagu Rp 15.293.706.971,-.

Tabel 3.1
RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Keiatan	INDIKATOR KINERJA Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu APBD Induk 2025 (Rp.)	Pagu APBD Perubahan 2025
1	2	3	4	5	6
	Dinas Perikanan dan Ketahanan pangan			**14.367.124.225**	15.293.706.971
I	**Program Penunjang Urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota**			**12.404.127.798**	**13.169.341.044**
		Persentase pemenuhan penunjang layanan kesekretariatan (%)	100		
1,1	**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**			**10.306.337.178**	**10.671.475.436**
		Jumlah pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai (bulan)	14		
1.1.1	Penyediaan gaji dan Tunjanan ASN			10.306.337.178	10.671.475.436
		Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang)	45		
1,2	**Administrasi Umum Perangkat daerah**			**228.547.000**	**221.937.000**
		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100		
1.2.1	Penyediaan Peralatan Rumah tangga			182.913.000	182.913.000
		Jumlah paket Pengadaan rumah tangga yang disediakan (paket)	1		
1.2.2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			45.634.000	39.024.000
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	1		
1,3	**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**			**38.500.000**	**190.490.000**
1.3.1	Pengadaa Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)	10	-	-
1.3.2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya			38.500.000	190.490.000
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	4		
1,4	**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**			**1.368.485.620**	**1.593.180.608**
		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100		
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			45.195.000	43.225.000
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	1		
1.4.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik			150.710.400	150.710.400
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12		
1.4.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			27.202.000	17.117.000
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (laporan)	12		
1.4.4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor			1.145.378.220	1.382.128.208
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Keiatan	INDIKATOR KINERJA Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu APBD Induk 2025 (Rp.)	Pagu APBD Perubahan 2025
1	2	3	4	5	6
1,5	**Pemeliharaan barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**			**462.258.000**	**492.258.000**
		Persentase barang milik negara yang terawat	100		
1.5.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			292.818.000	292.818.000
		Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	22		
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya			55.380.000	85.380.000
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	56		
1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya			114.060.000	114.060.000
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit		
2	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat**			**289.102.200**	**326.470.700**
		Ketersediaan energi	3968		
		Ketersediaan protein	173,3		
		Konsumsi energi	2292,0		
		Konsumsi protein	70,0		
2,1	**Penyediaan dan Penyaluran panan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan**			**168.796.000**	**206.164.500**
		Koefisien keragaman (CV) ≤ 15%	≤ 13%		
2.1.1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			60.927.000	66.927.000
		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga (keluarga)	100		
2.1.2	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota			76.993.500	108.362.000
		Jumlah Kelembagaan distribusi pangan yang dikembangkan (unit)	2		
2.1.3	Penyediaanan Informasi Harga Pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/Kota			14.419.000	14.419.000
		Informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota(laporan)	1		
2.1.4	Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan pokok strategis			16.456.500	16.456.500
		Jumlah kordinasi dan sinkronisasi Pemantuan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (laporan)	1		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Keiatan	INDIKATOR KINERJA Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu APBD Induk 2025 (Rp.)	Pagu APBD Perubahan 2025
1	2	3	4	5	6
2,2	**Pelaksanaan Pecapaian target konsumsi perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi**			**120.306.200**	**120.306.200**
		meningkatnya konsumsi pangan yang beragam (B2SA) (desa kelurahan)	**25**		
2.2.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi pangan Per Kapita per Tahun			20.305.750	20.305.750
		Target konsumsi pangan per kapita per tahun (dokumen)			
2.2.2	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal			100.000.450	100.000.450
		Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (laporan)			
3	**Proram Penanganan Kerawanan pangan**			**176.439.000**	**237.200.000**
		Persentase cadangan pangan (%)	35		
3,1	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**			**14.878.500**	**11.276.500**
		Tersusunnya peta daerah ketahanan dan kerentanan pangan (kecamatan)	**4**		
3.1.1	Penyusunan, Pemutahiran, dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentenan Pangan			14.878.500	11.276.500
		Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutahirkan (dokumen)	6		
3,2	**Penangnanan Kerawanan pangan kewenangan kabupaten/Kota**			**161.560.500**	**225.923.500**
		Pemantauan daerah rawan pangan (Kecamatan)	**4**		
3.2.1	Pelaksananaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup 1 9satu) Daerah Kabupaten/Kota			153.719.000	218.474.000
		Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (dokumen)	1		
3.2.2	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota			7.841.500	7.449.500
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota (laporan)	1		
4	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**			**75.864.152**	**75.864.152**
		Persentase pangan yang aman dikonsumsi	**90**		
4,1	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan pangan Segar daerah kabupaten/Kota**			**75.864.152**	**75.864.152**
		Jumlah sosialisasi keamanan pangan (kali)	**50**		
4.1.1	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/Kota			11.943.350	11.943.350
		Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten / kota (dokumen)	1		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Keiatan	INDIKATOR KINERJA Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu APBD Induk 2025 (Rp.)	Pagu APBD Perubahan 2025
1	2	3	4	5	6
6.1.2	Pengelolaan kesehatan ikanndan lingkungan budidaya dalam satu daerah kabupaten/Kota			48.025.000	48.025.000
6.1.2	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			168.151.000	168.151.000
		Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (unit) / ekor)	970000		
7	**Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan**			**352.936.500**	**350.936.500**
		Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	38,0		
7,1	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**			**225.040.000**	**225.040.000**
		Jumlah produk perikanan yang aman dikonsumsi (%)	75		
7.1.2	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan perijinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko			225.040.000	225.040.000
		Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko (unit usaha)	18		
7,2	**Penyediaan dan penyaluaran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota**			**127.896.500**	**125.896.500**
		Jumlah Ketersediaan ikan (ton)	36000		
7.2.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota			102.576.000	102.576.000
		Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (ton)	36000		
7.2.2	Pemberian fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 Kabupaten/Kota			25.320.500	23.320.500
		Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi (pelaku usaha)	6		
	TOTAL			**14.367.124.225**	**15.293.706.971**

IV. PENUTUP

Demikian Rancangan Akhir Perubahan RENJA Akhir Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2025 telah tersusun dengan harapan terpenuhinya ketersediaan anggaran sesuai kebutuhan sehingga target kinerja yang telah disusun dalam program dan kegiatan dapat tercapai dalam upaya peningkatan pelaksanaan pembangunan dibidang perikanan dan ketahanan pangan serta pelayanan kepada masyarakat pembudidaya dan nelayan. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan 2025 : 7 Program, 15 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan Total pagu setelah Perubahan Rp. 15.293.706.971 bertambah Rp. 926.582.746 dari pagu Induk yang berjumlah 14.367.124.225. Pada Anggran Induk 2025 mengalami 4 (empat) kali pergeseran/penyesuaian dengan ada penambahan dan rasionalisasi sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Selanjutnya tindak lanjut dari Rencana Kerja ini dapat dipakai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan Menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2025.

Denpasar, 19 Juni 2025

Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Kota Denpasar

drh. Ida Bagus Mayun Suryawangsa

Pembina Utama Muda

NIP. 19660328 199703 1 003

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2	Pengolahan data dan informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Denpasar tahun 2024 berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2025.	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.		√	Tidak ada usulan saat Musrenbang Kecamatan	
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak		
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Denpasar telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

Denpasar, 28 Mei 2025

Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Kota Denpasar

dr. Ida Bagus Mayun Suryawangsa

Pembina Utama Muda

NIP. 19660328 199703 1 003

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Maruti No. 8 Denpasar Kode Pos 80115 Telepon. (0361) 413357
www.denpasarkota.go.id email: bappeda@denpasarkota.go.id

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2025

No.	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup Kota Denpasar telah berpedoman pada RKPD Kota Denpasar	Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja 2025 sudah berpedoman pada RKPD Kota Denpasar tahun 2025
2	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup Kota Denpasar dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Denpasar serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 Perangkat Daerah sudah mengacu pada perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup Kota Denpasar dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Denpasar serta pencapaian sasaran Pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.

Denpasar, 28 Mei 2025
Kepala Bappeda Kota Denpasar

I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199703 1 004

Petunjuk Pengisian :

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi

WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 188.45/2707/ HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:

a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2025;
b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah urusan pemerintahan bidang pangan dan perikanan;
c. menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2025;
d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2025; dan
e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 November 2023

a.n. Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan
Pangan Kota Denpasar,

drh.Ida Bagus Mayun Suryawangsa
Pembina Utama Muda
NIP. 196603281997031003

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
3. Inspektur Kota Denpasar
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 22 NOVEMBER 2023
NOMOR : 188.45 / 2707 / HK / 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

Penasehat :
1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar

Pembina :
1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Ketua : Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar

Sekretaris : Sekretaris Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Anggota :
1. Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil
2. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
4. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
5. Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Kota Denpasar
6. Kepala UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar

a.n. Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar,

drh. Ida Bagus Mayun Suryawangsa
Pembina Utama Muda
NIP. 196603281997031003

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025



DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR

www.pariwisata.denpasarkota.go.id

(0361) 8495707

denpasartourism@gmail.com

WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3/1187/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan rencana kerja Perangkat Daerah, sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perangkat daerah untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan tugas dan fungsinya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Kota Denpasar Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);

7. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencan Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Juni 2025

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 19 JUNI 2025
NOMOR : 100.3.3/1187/HK/2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

1. PERUBAHAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
2. PERUBAHAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
3. PERUBAHAN RENJA RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR
4. PERUBAHAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2025
5. PERUBAHAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
6. PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
7. PERUBAHAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
8. PERUBAHAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
9. PERUBAHAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
10. PERUBAHAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2025
11. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
12. PERUBAHAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
13. PERUBAHAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
14. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
15. PERUBAHAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
16. PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
17. PERUBAHAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
18. PERUBAHAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2025
19. PERUBAHAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
20. PERUBAHAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
21. PERUBAHAN RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
22. PERUBAHAN RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
23. PERUBAHAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
24. PERUBAHAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
25. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

26. PERUBAHAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
27. PERUBAHAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
28. PERUBAHAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
29. PERUBAHAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
30. PERUBAHAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
31. PERUBAHAN RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
32. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
33. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2025
34. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2025
35. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2025
36. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
37. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Denpasar tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2024 dilakukan berdasarkan rancangan program kegiatan yang akan dilaksanakan dan hasil evaluasi kinerja kegiatan sebelumnya serta mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Akhirnya, mengingat berbagai keterbatasan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini, maka kami sangat mengharapkan masukan, usul, dan saran dari pihak-pihak terkait untuk kesempurnaan laporan pada tahun berikutnya.

Om Santih, Santih, Santih Om

Denpasar, 19 Juni 2025
Kepala Dinas Pariwisata
Kota Denpasar

PEMERINTAH KOTA DINAS PARIWISATA DENPASAR

Ni Luh Putu Riyastiti, S.S., M.Par
Pembina Tk.I
NIP. 19720504 199803 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.3.1. Maksud 4
1.3.2. Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... **6**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Triwulan I 6

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN **19**

3.1. Tujuan dan Sasaran 19
3.2. Rencana Kerja dan Pendanaan 20

BAB IV PENUTUP **31**

4.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 31
4.2. Rencana Tindak Lanjut 32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan Dinas Pariwisata Triwulan I Tahun 2025.....	10
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran.....	20
Tabel 3.2	Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2025.....	22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepemerintahan yang lebih berdaya dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan kepariwisataan, maka disusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Pariwisata untuk periode 2025, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Denpasar, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya Renja ini menjadi acuan seluruh unit kerja Dinas Pariwisata dalam menyusun Renja unit kerja masing-masing, sebagai implementasi yang lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Denpasar.

Renja ini merupakan gambaran garis besar dari langkah-langkah pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dirumuskan pada tujuan dan sasaran untuk setiap program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kota Denpasar yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Berdasarkan hirarki perencanaan, Rencana Kerja Dinas Pariwisata 2025 dan pelaksanaan dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja berpedoman pada :

1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;
2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3) Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4) Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9) Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah di rubah dengan Permendagri No 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;
13) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14) Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15) Peraturan Menpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodetifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
19) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

21) Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor: SE.900.1.3/6629.A/SJ dan Menteri Keuangan Nomor: SE-1/MK.07/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025;
22) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
23) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;
25) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Renja Perubahan adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Perubahan adalah:

1) Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2) Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
3) menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai beriku :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat Tujuan Sasaran, Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025, dan Rancangan Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Triwulan I

Pelaksanaan evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Renja Perangkat Daerah, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Tujuan lain dari pelaksanaan evaluasi ini adalah dalam rangka melaksanakan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dinas Pariwisata Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Realisasi program/kegiatan yang *tidak* memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2025

Pada tahun anggaran 2025, terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak mencapai target kinerja hasil/keluaran sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan. Ketidaktercapaian ini disebabkan oleh berbagai faktor

internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program secara keseluruhan.

Beberapa kegiatan yang mengalami hambatan, diantaranya:

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah **Sub Kegiatan:** Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Realisasi Fisik 50,22% dari Target Fisik 97,42%. Hal ini disebabkan oleh: • Belanja spanduk dan dekorasi menghias kantor disesuaikan dengan kebutuhan. • Belanja modal proyektor 8000 lumens, belanja modal sound bar, dan belanja modal lensa fujifilm masih menunggu rekomendasi barang impor
2	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah **Sub Kegiatan:** Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Realisasi Fisik 69,50% dari Target Fisik 92,85%. Hal ini disebabkan oleh: • Belanja cetak masih dalam proses administrasi keuangan • Belanja fotocopy menyesuaikan dengan kebutuhan
3	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah **Sub Kegiatan:** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Realisasi Fisik 28,73% dari Target Fisik 19,97%. Hal ini disebabkan oleh: Belanja suku cadang dan jasa service menyesuaikan dengan kebutuhan
4	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	

	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah **Sub Kegiatan:** Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam kurun waktu triwulan tersebut.

2) Realisasi program/kegiatan yang *telah* memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2025

Program dan Kegiatan secara keseluruhan sudah memenuhi target kinerja yang sudah direncanakan, kecuali untuk beberapa sub kegiatan yang disebutkan pada poin ke-1. Target realisasi fisik dan keuangan 26,10% sedangkan ***realisasi fisik 22,50% dan realisasi keuangan sebesar 15,31%.***

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 belum ada yang melebihi target kinerja hasil/keluarkan yang direncanakan.

4) Kendala dan Permasalahan dalam Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Berikut beberapa kendala dan permasalahan yang dialami oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar selama triwulan I, diantarannya:

a) Terdapat beberapa belanja barang dan jasa seperti: (belanja spanduk, belanja dekorasi, suku cadang dan jasa service, fotocopy) yang menyesuaikan dengan kebutuhan, sehingga realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

b) Kendala dalam merealiasikan belanja barang dengan produk impor, karna perlu menunggu rekomadasi barang impor dari Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri Kota Denpasar.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut.

Dinas Pariwisata Kota Denpasar tetap berupaya untuk membangkitkan kondisi pariwisata Kota Denpasar sehingga memiliki kualitas dan berdaya saing yang tinggi. Beberapa tindakan yang masih diperlukan untuk diambil adalah:

1. Peningkatan kualitas destinasi melalui pengembangan infrastruktur, aksesibilitas, konektivitas, sarana prasarana, dan manajemen tata kelola yang regenerative dan berkelanjutan.
2. Peningkatan daya tarik wisata melalui pengembangan dan eksplorasi potensi daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan, serta penyelenggaraan even-even kreatif yang berkualitas.
3. Peningkatan citra pariwisata (*branding*) melalui kerja sama daerah dan penyelenggaraan even-even pariwisata yang kreatif dan berkualitas.
4. Pemasaran (promosi) pariwisata yang lebih efektif, komprehensif dan terintegrasi, berkolaborasi dengan stakeholder pariwisata dan masyarakat melalui pengembangan produk wisata dan segmentasi pasar
5. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui pelatihan, pembinaan, dan sertifikasi kompetensi

Tabel 2.1
Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Kode					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
									Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8=5-7
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**Rp 32.073.210.330**	**22,50%**	**Rp 4.910.110.384**	**Rp 27.163.099.946**
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**Rp 32.073.210.330**	**22,50%**	**Rp 4.910.110.384**	**Rp 27.163.099.946**
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**Rp 20.107.780.210**	**34,22%**	**Rp 3.860.030.432**	**Rp 16.247.749.778**
3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**Rp 11.513.314.094**	**35,10%**	**Rp 2.115.675.118**	**Rp 9.397.638.976**
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 Orang/Bulan	Rp 11.513.314.094	35,10%	Rp 2.115.675.118	Rp 9.397.638.976
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**Rp 756.828.200**	**55,05%**	**Rp 259.483.003**	**Rp 497.345.197**

Tabel 2.1
Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Kode					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
									Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8=5-7
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 13.111.500	100,00%	Rp 12.759.117	Rp 352.383
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp 514.675.500	50,22%	Rp 204.407.286	Rp 310.268.214
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Rp 176.035.700	30,54%	Rp 40.627.000	Rp 135.408.700
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 49.405.500	69,50%	Rp 1.257.600	Rp 48.147.900
3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Rp 3.600.000	25,00%	Rp 432.000	Rp 3.168.000

Tabel 2.1
Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Kode					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
									Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8=5-7
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**Rp 6.261.080.180**	**25,17%**	**Rp 1.398.891.241**	**Rp 4.862.188.939**
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 810.400.000	25,94%	Rp 177.708.334	Rp 632.691.666
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 5.450.680.180	24,40%	Rp 1.221.182.907	Rp 4.229.497.273
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**Rp 1.576.557.736**	**21,56%**	**Rp 85.981.070**	**Rp 1.490.576.666**

Tabel 2.1
Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Kode					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
									Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8=5-7
3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	Rp 212.864.000	19,97%	Rp 39.504.870	Rp 173.359.130
3	26	01	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp 1.363.693.736	23,14%	Rp 46.476.200	Rp 1.317.217.536
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah destinasi yang siap dipasarkan**	**4 Destinasi**	**Rp 452.968.000**	**5,93%**	**Rp 26.630.000**	**Rp 426.338.000**
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota**	**Terpenuhinya Pengelolaan Destinasi pariwisata**	**100%**	**Rp 452.968.000**	**5,93%**	**Rp 26.630.000**	**Rp 426.338.000**

Tabel 2.1
Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Kode					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
									Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8=5-7
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	Rp 452.968.000	5,93%	Rp 26.630.000	Rp 426.338.000
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase meningkatnya jumlah wisatawan**	**5%**	**Rp 5.881.361.120**	**3,15%**	**Rp 342.989.500**	**Rp 5.538.371.620**
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya kegiatan pemasaran pariwisata**	**100%**	**Rp 5.881.361.120**	**3,15%**	**Rp 342.989.500**	**Rp 5.538.371.620**

Tabel 2.1
Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Kode					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
									Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8=5-7
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	Rp196.144.000	0,00%	Rp0	Rp 196.144.000
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	9 Kegiatan	Rp 5.685.217.120	6,30%	Rp342.989.500	Rp 5.342.227.620
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase peningkatan jumlah produk ekraf yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitasi HAKI**	**60%**	**Rp 4.598.636.000**	**2,95%**	**Rp 399.900.000**	**Rp 4.198.736.000**

Tabel 2.1
Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Kode					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
									Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8=5-7
3	26	04	2.02		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Terkelolannya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**100%**	**Rp 4.598.636.000**	**2,95%**	**Rp 399.900.000**	**Rp 4.198.736.000**
3	26	04	2.02	0011	Fasilitasi pemberian insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	2 Pelaku Usaha	Rp 65.000.000	0,00%	Rp -	Rp 65.000.000
3	26	04	2.02	0017	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	5 Promosi	Rp 4.055.229.000	11,81%	Rp 399.600.000	Rp 3.655.629.000
3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	5 Laporan	Rp 432.282.000	0,00%	Rp 300.000	Rp 431.982.000
3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan	5 Produk	Rp 46.125.000	0,00%		Rp 46.125.000

Tabel 2.1
Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Kode					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
									Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8=5-7
						Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif					
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten**	**100 Orang**	**Rp 1.032.465.000**	**14,22%**	**Rp 280.560.452**	**Rp 751.904.548**
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**100%**	**Rp 832.465.000**	**28,44%**	**Rp 280.560.452**	**Rp 551.904.548**
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	140 Orang	Rp 560.365.000	56,88%	Rp 280.560.452	Rp 279.804.548

Tabel 2.1
Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Kode					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
									Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8=5-7
3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	200 Orang	Rp 272.100.000	0,00%	Rp -	Rp 272.100.000
3	**26**	**05**	**2.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**100%**	**Rp 200.000.000**	**0,00%**	**Rp -**	**Rp 200.000.000**
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreaatif	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	140 orang	200.000.000	0,00%	-	Rp 200.000.000

Keterangan : Pagu Anggaran Tahun 2025 kolom 5 sesuai dengan DPA Induk Tahun 2025. Tanggal Penetapan 27 Desember 2024

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan ***isu strategis*** yang dirumuskan dalam Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026 yaitu mengangkat isu utama berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nomor 8 yaitu:

"Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua".

Sedangkan isu strategis lainnya yang sesuai dengan kondisi Pariwisata saat ini di Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Peningkatan standar kualitas daya tarik destinasi wisata, jasa usaha pariwisata,SDM pariwisata, dsb, sehingga memiliki standar kualitas prima untuk melayani wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.
2. Jaringan promosi dan pemasaran pariwisata yang dapat diperkuat dan diperluas ke pasar dalam negeri dan luar negeri.
3. Sinergisitas berbagai pemangku kepentingan pariwisata (Penta Helix), yaitu pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, media dan komunitas dalam pengembangan pariwisata Kota Denpasar.

Penentuan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pariwisata Tahun 2025 sudah relavan untuk menjawab isu strategis yang telah dirumuskan sebelumnya pada dokumen Perubahan Renstra Tahun 2021-2026.

Sebagai urusan pemerintahan pilihan, Dinas Pariwisata Kota Denpasar juga memiliki peran strategis dalam ***mendukung pencapaian visi dan misi*** pembangunan daerah. Khususnya dalam mendukung ***Misi Wali Kota Denpasar Nomor 1***, yaitu:"Mewujudkan Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju",dan ***Misi Nomor 4***:"Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Berbasis Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan UMKM." Tujuan dan sasaran tersebut tertulisa di dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunana di dalam

dokumen Renja. Pada tahun 2025, Target dan Sasaran Dinas Pariwisata Kota Denpasar mengalami perubahan antara dokumen Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 dengan Renja Tahun 2025, dan Rancangan Akhir Perubahan Tahun 2025. Perubahan ini diakibatkan oleh capaian yang realisasi yang terjadi pada Tahun 2024, sehingga terjadi peningkatan capaian target khususnya pada Indikator Kinerja Utama (Jumlah Kunjungan Wisatawan, Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan, Usaha Ekonomi Kreatif) pada tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET		
			PERUBAHAN RENSTRA TH 2021-2026	RENJA TAHUN 2025	RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Mewujudkan pariwisata yang berkualitas					
Sasaran :					
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	272.042 (Asing 28.941, Domestik 243.101)	272.042 (Asing 28.941, Domestik 243.101)	1.990.000 (Asing 450.000, Domestik 1.540.000)
Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan	Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	Asing (2.5 hari), Domestik (2,3 hari)	Asing (2.5 hari), Domestik (2,3 hari)	Asing (9.28 hari), Domestik (5.42 hari)
Meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan	Rata-rata pengeluaran wisatawan	Rupiah (Asing) per hari	2.289.219	2.289.219	2.289.219
		Rupiah (Domestik) per hari	606.234	606.234	1.422.026
Mewujudkan ekonomi kreatif yang berkualitas :					
Meningkatnya ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah pengembangan pelaku ekraf	Usaha Ekonomi Kreatif	50	50	100

3.2. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yeng telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Pariwisata Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan sekretariat Dinas Pariwisata Kota Denpasar.

Rencana kerja Dinas Pariwisata Kota Denpasar dalam Perubahan Tahun 2025 tetap mengacu pada menjadi Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar maupun Renstra Dinas Pariwisata Kota Denpasar, yang mana untuk meningkatan jumlah dan kualitas wisatawan.

Dalam mencapai sasaran dan Tujuan yang sebagaimana yang telah ditetapkan, adapun Rencana Kerja Perubahan yang akan di lakukan oleh bidang-bidang maupun sekretariat yang terlah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2025. Berkaitan dengan program/kegiatan yang akan diusulkan tersebut, berikut lebih rinci dijabarkan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2025

Kode					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran		Bertamba/ (Berkurang)
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8=7-6
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**Rp 32.073.210.330**	**Rp 34.795.526.140**	**Rp 2.722.315.810**
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**Rp 32.073.210.330**	**Rp 34.795.526.140**	**Rp 2.722.315.810**
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**100%**	**Rp 20.107.780.210**	**Rp 21.199.237.220**	**Rp 1.091.457.010**
3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**Rp 11.513.314.094**	**Rp 11.857.359.588**	**Rp 344.045.494**
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/Bulan	108 Orang/Bulan	Rp 11.513.314.094	Rp 11.857.359.588	Rp 344.045.494
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**Rp 756.828.200**	**Rp 983.640.700**	**Rp 226.812.500**

Tabel 3.2
Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2025

Kode					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran		Bertamba/ (Berkurang)
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8=7-6
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 13.111.500	Rp 13.111.500	Rp -
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Rp 514.675.500	Rp 546.396.000	Rp 31.720.500
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Rp 176.035.700	Rp 380.665.200	Rp 204.629.500
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Rp 49.405.500	Rp 39.868.000	-Rp 9.537.500

Tabel 3.2
Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2025

Kode					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran		Bertamba/ (Berkurang)
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8=7-6
3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	Rp -
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**Rp 6.261.080.180**	**Rp 6.747.355.196**	**Rp 486.275.016**
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 810.400.000	Rp 801.400.000	-Rp 9.000.000
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 5.450.680.180	Rp 5.945.955.196	Rp 495.275.016

Tabel 3.2
Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2025

Kode					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran		Bertamba/ (Berkurang)
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8=7-6
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**Rp 1.576.557.736**	**Rp 1.610.881.736**	**Rp 34.324.000**
3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	Rp 212.864.000	Rp 212.864.000	Rp -
3	26	01	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Rp 1.363.693.736	Rp 1.398.017.736	Rp 34.324.000
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah destinasi yang siap dipasarkan**	**4 Destinasi**	**4 Destinasi**	**Rp 452.968.000**	**Rp 1.591.618.000**	**Rp 1.138.650.000**

Tabel 3.2
Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2025

Kode					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran		Bertamba/ (Berkurang)
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8=7-6
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota**	**Terpenuhinya Pengelolaan Destinasi pariwisata**	**100%**	**100%**	**Rp 452.968.000**	**Rp 1.591.618.000**	**Rp 1.138.650.000**
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	3 Laporan	Rp 452.968.000	Rp 1.591.618.000	Rp 1.138.650.000
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan**	**5%**	**5%**	**Rp 5.881.361.120**	**Rp 5.398.930.920**	**-Rp 482.430.200**
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya kegiatan pemasaran pariwisata**	**100%**	**100%**	**Rp 5.881.361.120**	**Rp 5.398.930.920**	**-Rp 482.430.200**

Tabel 3.2
Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2025

Kode					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran		Bertamba/ (Berkurang)
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8=7-6
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	2 Dokumen	Rp196.144.000	Rp190.954.000	-Rp 5.190.000
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Kegiatan	9 Kegiatan	Rp 5.685.217.120	Rp5.207.976.920	-Rp 477.240.200

Tabel 3.2
Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2025

Kode					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran		Bertamba/ (Berkurang)
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8=7-6
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase peningkatan jumlah produk ekraf yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitasi HAKI**	**70%**	**70%**	**Rp 4.598.636.000**	**Rp 5.444.733.000**	**Rp 846.097.000**
3	26	04	2.02		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Terkelolannya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**100%**	**100%**	**Rp 4.598.636.000**	**Rp 5.444.733.000**	**Rp 846.097.000**
3	26	04	2.02	0011	Fasilitasi pemberian insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	Rp 65.000.000	Rp 64.700.000	-Rp 300.000
3	26	04	2.02	0017	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	5 Promosi	5 Promosi	Rp 4.055.229.000	Rp 4.914.601.000	Rp 859.372.000
3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	5 Laporan	5 Laporan	Rp 432.282.000	Rp 419.532.000	-Rp 12.750.000

Tabel 3.2
Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2025

Kode					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran		Bertamba/ (Berkurang)
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8=7-6
3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	5 Produk	5 Produk	Rp 46.125.000	Rp 45.900.000	-Rp 225.000
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten**	**100 Orang**	**100 Orang**	**Rp 1.032.465.000**	**Rp 1.161.007.000**	**Rp 128.542.000**
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**100%**	**100%**	**Rp 832.465.000**	**Rp 961.007.000**	**Rp 128.542.000**

Tabel 3.2
Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2025

Kode					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran		Bertamba/ (Berkurang)
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8=7-6
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	70 Orang	170 Orang	Rp 560.365.000	Rp 688.907.000	Rp 128.542.000
3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	200 Orang	200 Orang	Rp 272.100.000	Rp 272.100.000	Rp -
3	**26**	**05**	**2.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**100%**	**100%**	**Rp 200.000.000**	**Rp 200.000.000**	**Rp -**
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreaatif	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	70 orang	140 orang	200.000.000	200.000.000	Rp -

Keterangan : Pagu Anggaran Tahun 2025 kolom 5 sesuai dengan DPA Induk Tahun 2025. Tanggal Penetapan 27 Desember 2024

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwista Kota Denpasar Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Denpasar Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran

4.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Denpaasar Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan memiliki tujuan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1) Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pariwisata Kota Denpasar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a) melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b) menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2) Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Denpasar, 19 Juni 2025
Kepala Dinas Pariwisata
Kota Denpasar

Ni Luh Putu Riyastiti, S.S., M.Par
Pembina Tk.I
NIP. 19720504 199803 2 006

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PARIWISATA
Jalan Majapahit No.1 Denpasar, Telepon (0361) 8495707

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2	Pengolahan data dan informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi Perubahan renja Perangkat Daerah Kota Denpasar tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
6	Penelaahan rancangan awal Perubahan RKPD Kota Denpasar.	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar				
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatf untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/ walikota	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah Kota Denpasar telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

Denpasar, 19 Juni 2025
Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar
Kota Denpasar

Ni Luh Putu Riyastiti, S.S., M.Par
Pembina Tk.I
NIP. 19720504 199803 2 006

WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/2709/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang :

a. bahwa Dinas Pariwisata Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Denpasar sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Denpasar;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
7. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:

a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2025;
b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah urusan Pariwisata;
c. menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2025;
d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2025; dan
e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Nopember 2023

a.n. Walikota Denpasar
Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar,

PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PARIWISATA

Ni Luh Putu Riyastiti, S.S., M.Par
Pembina Tk.I
NIP. 19720504 199803 2 006

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
3. Inspektur Kota Denpasar
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 23 NOPEMBER 2023
NOMOR : 188.45/2709/ HK/2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

Penasehat :
1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar

Pembina :
1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Ketua : Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar
Sekretaris : Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Denpasar
Anggota :
1. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Denpasar
2. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Denpasar
3. Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Denpasar
4. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Kota Denpasar
5. Kasubag Umum dan Keuangan di Sekretariat pada Dinas Pariwisata Kota Denpasar
6. Perencana pada Dinas Pariwisata Kota Denpasar
7. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Parwisata Kota Denpasar

a.n. Walikota Denpasar
Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar,

PEMERINTAH KOTA DINAS PARIWISATA DENPASAR

Ni Luh Putu Riyastiti, S.S., M.Par
Pembina Tk.I
NIP. 19720504 199803 2 006

Perubahan Rencana Kerja (RENJA)

TAHUN 2025

Dinas Pertanian Kota Denpasar

2025



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3/1187/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan rencana kerja Perangkat Daerah, sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perangkat daerah untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan tugas dan fungsinya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Kota Denpasar Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);

7. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencan Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Juni 2025

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 19 JUNI 2025
NOMOR : 100.3.3/1187/HK/2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

1. PERUBAHAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
2. PERUBAHAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
3. PERUBAHAN RENJA RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR
4. PERUBAHAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2025
5. PERUBAHAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
6. PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
7. PERUBAHAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
8. PERUBAHAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
9. PERUBAHAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
10. PERUBAHAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2025
11. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
12. PERUBAHAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
13. PERUBAHAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
14. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
15. PERUBAHAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
16. PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
17. PERUBAHAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
18. PERUBAHAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2025
19. PERUBAHAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
20. PERUBAHAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
21. PERUBAHAN RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
22. PERUBAHAN RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
23. PERUBAHAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
24. PERUBAHAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
25. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

26. PERUBAHAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
27. PERUBAHAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
28. PERUBAHAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
29. PERUBAHAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
30. PERUBAHAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
31. PERUBAHAN RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
32. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
33. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2025
34. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2025
35. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2025
36. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
37. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa berkat perkenanNya penyusunan Dokumen Perubahan Renja Tahun Anggaran 2025 Dinas Pertanian Kota Denpasar dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 adalah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Akhir Renja usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibuat pada akhir Tahun 2024 untuk pelaksanaan program kegiatan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2025, menyesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan perubahan-perubahan yang terjadi pada pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025, disamping merupakan evaluasi terhadap progres pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2025. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan sasaran - sasaran yang hendak dicapai melalui kegiatan rutin dan pembangunan pertanian pada masa periode Restra Dinas Pertanian Kota Denpasar 2021 - 2026.

Saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Denpasar di masa yang akan datang. Dan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 ini kami ucapkan terimakasih.

Denpasar, 19 Juni 2025
Kepala Dinas Pertanian,

Ir. A.A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA
Pembina Utama Muda
NIP. 196608031992031008

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Landasan Hukum.....3

1.3 Maksud dan Tujuan.....4

1.4 Sistematika Penulisan.....4

II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA.....6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai Triwulan I 6

III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN..... 12

IV. PENUTUP.....24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I (Bulan Maret) 7

Tabel 3.1 Usulan / Rancangan Rencana Kerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Kota Denpasar pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 12

Tabel 3.2 Perkembangan Pagu Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 18

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting di mana di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi. Perencanaan adalah tahap awal dalam kegiatan suatu organisasi terkait dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 ini adalah merupakan penyesuaian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 terhadap pagu program kegiatan / sub kegiatan sesuai prioritas dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan pertanian yang sedang berjalan, dan untuk menjabarkan visi RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yaitu "*Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju*". RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 -2026 disusun mengacu pada RPJPD Kota Denpasar yang merupakan dokumen jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD. Sedangkan visi RPJPD Kota Denpasar sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No 1 tahun 2009 adalah "Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana ".

Sedangkan fokus RPJMD Semesta Berencana periode Tahun 2021-2026 dan guna mewujudkan visi Kota Denpasar tersebut disusunlah misi antara lain :

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan.
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana.
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana.

5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

Dinas Pertanian Kota Denpasar mendukung dan memperkuat pelaksanaan misi ke dua.

Secara lebih spesifik dan fokus dari misi ke-2 tersebut dapat dijabarkan bahwa tujuan Dinas Pertanian sesuai tugas pokok dan fungsi adalah *Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produktifitas, Daya Saing Komoditas Pertanian serta Kesejahteraan Petani* dengan sasaran :

1. ***Meningkatnya pendapatan petani.***
2. ***Meningkatnya pendapatan peternak.***

Penyusunan rancangan perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rencana Strategis (Rentra) Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2021-2026, pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026. Pembuatan Rancangan perubahan Renja ini adalah untuk mengajukan program, kegiatan maupun sub kegiatan yang sedang berjalan / dilaksanakan ataupun yang merupakan prioritas di Tahun 2025.

Prioritas Perubahan RKPD 2025 adalah penyesuaian terhadap Asta Cita dan Prioritas nasional sebagai berikut :

1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan,
2. Program makan bergizi gratis (MBG),
3. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim,
4. Pengendalian inflasi di daerah,
5. Peningkatan pertumbuna perekonomian daerah,
6. Dukungan swasembada pangan,
7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam promosi, dan
8. Memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025.
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025;
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025;
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025;
15. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/1187/HK/2025 Tanggal 19 Juni 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Pertanian Kota Denpasar dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
b. Sebagai indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kerja tahunan setiap bidang.
c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan pertanian secara umum.

Tujuan disusunnya dokumen Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 adalah :

a. Untuk memudahkan seluruh jajaran Dinas pertanian Kota Denpasar dalam mencapai tujuan dalam satu tahun dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

4.1 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan rancangan perubahan rencana kerja program dan kegiatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

2.1. Hasil Evaluasi Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I (Bulan Maret)

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian Kota Denpasar

Bab IV Penutup

\

II. EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I (Bulan Maret 2025)

Dalam Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 terdapat 6 program, 12 kegiatan dan 26 sub kegiatan, setelah mapping sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang telah diperbaharui beberapa kali, dan yang terakhir mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Progres / realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan I (Bulan Maret) Tahun 2025 sebagian besar masih di bawah 20% karena perencanaan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I rata-rata hanya dibawah 20%.

Capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 (Bulan Maret) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I (Bulan Maret)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		REALISASI S/D TRIW I TAHUN 2025 (Bulan Maret)		KET
			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pilihan Pertanian						
	Dinas Pertanian			**24.738.189.914**	**14,14%**	**3.498.057.070**	
1	**Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**				
1	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**11.252.910.630**	**22,04%**	**2.480.681.853**	
1.1	**Sub Kegiatan :** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	53 orang / bulan	11.252.910.630	22,04%	2.480.681.853	
2	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan fasilitasi Administrasi Umum**	**100%**	**548.511.050**	**22,14%**	**121.466.240**	
2.1	**Sub Kegiatan :** Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	6.507.000	-	-	
2.2	**Sub Kegiatan :** Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	7.068.000	-	-	
2.3	**Sub Kegiatan :** Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan Rumah tangga yang disediakan	12 paket	394.336.000	24,67%	97.270.000	
2.4	**Sub Kegiatan :** Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	43.940.000	13,39%	5.885.000	

2.5	**Sub Kegiatan :** Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	108 dokumen	10.800.000	24,17%	2.610.000	
2.6	**Sub Kegiatan :** penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	11 laporan	38.936.000	2,31%	900.000	
3	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor**	**100%**	**2.347.964.864**	**22,07%**	**518.125.617**	
3.1	**Sub Kegiatan :** Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	111.129.500	12,57%	13.964.000	
3.2	**Sub Kegiatan :** Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	360.000.000	20,65%	74.333.101	
3.3	**Sub Kegiatan :** Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	1.876.835.364	22,90%	429.828.516	
4	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**789.893.000**	**7,56%**	**59.743.500**	
4.1	**Sub Kegiatan :** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	53 unit	389.013.000	15,36%	59.743.500	
4.2	**Sub Kegiatan :** Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	324.800.000	-		
4.3	**Sub Kegiatan :** Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kamtor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	86 unit	76.080.000	-	-	

II	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**- Produksi ternak - Produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura : - Padi - Bayam - Kangkung - Sayur Hijau - Semangka**	**- Padi : 71,90 kw/ha - Sayur Hijau : 178,22 kw/Ha - Kangkung : 155,32 Kw/Ha - Bayam : 57,70Kw/Ha - Semangka : 301,15 Kw/Ha - 1.800 ekor**	1.798.428.500	5,74	65.449.000	
5	**Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian**	**100%**	**1.140.253.500**	**8,43**	**32.030.000**	
5.1	**Sub Kegiatan :** Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi, dan spesifik lokasi	12 laporan	379.839.000	4,39	33.419.000	
5.2	**Sub Kegiatan :** Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	2 laporan	760.414.500	0,15	960.000	
6	**Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Populasi Ternak**	**10%**	**658.175.000**	**0,15**	**960.000**	
6.1	**Sub Kegiatan :** Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan / Pakan	12 laporan	658.175.000	5,74	65.449.000	
III	**Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian**	**Persentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik**	**41.87%**	6.260.880.600	1,90%	118.825.000	

7	**Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian Berkondisi Baik**	**9 unit**	**6.260.880.600**	**1,90%**	**118.825.000**	
7.1	**Sub Kegiatan** : Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	2 unit	4.786.388.600	0,04%	2.075.000,00	
7.2	**Sub Kegiatan** : Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	5 unit	703.595.000	0,11%	750.000	
7.3	**Sub Kegiatan :** Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	2 unit	770.897.000	15,05%	116.000.000	
IV	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis**	**100%**	**965.141.820**	**3,93%**	**22.620.000**	
8	**Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kasus PHMS**	**0 kasus**	**810.128.320**	**2,79%**	**22.620.000**	
8.1	**Sub Kegiatan :** Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 laporan	810.128.320	2,79%	3.146.000	
9	**Kegiatan : Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase produk ASUH**	**100%**	**71.840.000**	**4,38%**	**3.146.000**	
9.1	**Sub Kegiatan :** Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	12 laporan	71.840.000	4,38%	12.192.500	

10	**Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah/Kota**	**Persentase Pelayanan Jasa Medik Veteriner**	**100%**	**83.173.500**	**14,66%**	**12.192.500**	
10.1	**Sub Kegiatan** : Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 laporan	83.173.500	14,66%	22.620.000	
V	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Prosentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional**	**- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%**	**265.169.000**	**11,75%**	**31.167.000**	
11	**Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Persentase serangan OPT**	**- Padi 2,4% - Horti : 4,8%**	**265.169.000**	**11,75%**	**31.167.000**	
11.1	**Sub Kegiatan** : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	175 ha	265.169.000	11,75%	31.167.000	
VI	**Program Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Peningkatan / Pengukuhan Kelas Kelompok Tani**	**10%**	**556.214.500**	**14,11%**	**78.481.600**	
12	**Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuannya tentang pertanian**	**28 kelompok**	**556.214.500**	**14,11%**	**78.481.600**	
12.1	**Sub Kegiatan** : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	4 unit	402.014.000	18,28%	73.481.600	
12.2	**Sub Kegiatan** : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	12 unit	63.000.500	7,94%	5.000.000	
12.3	**Sub Kegiatan** : Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan Kapasitasnya	16 orang	91.200.000	-	-	

III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN

Mengacu pada target kinerja dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, usulan / rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pertanian Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Usulan / Rancangan Rencana Kerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Kota Denpasar pada Perubahan Tahun Anggaran 2025

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	PAGU INDUK 2025 / (Rp.)	PAGU USULAN PERUBAHAN 2025 (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN	**Persentase pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian**	**100%**	**25.877.534.144**	**27.464.192.456**
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**16.464.253.224**	**17.285.243.036**
I.1.	*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*100%*	*12.759.556.460*	*13.067.118.651*
I.1. a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	53 org/bln	12.759.556.460	13.067.118.651
I.2.	*Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum*	*100%*	*542.681.000*	*501.587.000*
I.2. a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	8 paket	6.507.000	6.507.000
I.2. b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perelengkapan kantor yang disediakan	12 paket	9.068.000	7.068.000

I.2.c	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	394.336.000	394.336.000
I.2.d	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	57.490.000	43.940.000
I.2.e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	10.800.000	10.800.000
I.2.f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	11 laporan	64.480.000	38.936.000
I.3.	*Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	-	*143.000.000*
I.3.a	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 unit	0	143.000.000
I.4.	*Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor*	*100%*	*2.372.122.764*	*2.783.644.385*
I.4.a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	135.287.400	111.129.500
I.4.b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	360.000.000	360.000.000
I.4.c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.876.835.364	2.312.514.885
I.5.	*Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD*	*100%*	*789.893.000*	*789.893.000*

I.5.a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Dinas atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	53 unit	389.013.000	389.013.000
I.5.b	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	4 unit	324.800.000	324.800.000
I.5.c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	86 unit	76.080.000	76.080.000
II	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Produktivitas Padi, Kangkung, Sayur Hijau, Semangka, Bayam dan produksi ternak**	**- Padi : 71,90 kw/ha - Sayur Hijau : 178,22 kw/Ha - Kangkung : 155,32 Kw/Ha - Bayam : 57,70 Kw/Ha - Semangka : 301,15 Kw/Ha - 1.800 ekor**	**1.404.742.500**	**1.670.178.500**
II.1.	*Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*	*Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian*	*100%*	*1.114.792.500*	*1.140.253.500*
II.1.a	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	12 laporan	476.382.000	379.839.000
II.1.b	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6 laporan	638.410.500	760.414.500
II.2.	*Kegiatan Pengendalian dan*	*Persentase peningkatan*	*10%*	*289.950.000*	*529.925.000*

	Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*populasi ternak*			
II. 2.a	Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan / Pakan	12 laporan	289.950.000	529.925.000
III	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Prosentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik**	**41.87%**	**6.347.144.600**	**6.260.880.600**
III. 1.	*Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian*	*Jumlah Prasarana Pertanian yang berkondisi baik*	9 unit	*6.347.144.600*	*6.260.880.600*
III. 1.a	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun , direhabilitasi dan di pelihara	5 unit	4.799.742.600	4.786.388.600
III. 1.b	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	2 unit	705.945.000	703.595.000
III. 1.c	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara serta beroprasi	2 unit	841.457.000	770.897.000
IV	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis**	**100%**	**987.333.820**	1.426.506.820
IV. 1.	*Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah kasus PHMS*	*0 kasus*	*810.128.320*	*1.273.493.320*
IV. 1.a	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami	12 laporan	810.128.320	1.273.493.320

	Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota			
IV. 2.	*Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase produk ASUH*	*100%*	*94.032.000*	*69.840.000*
IV. 2.a	Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12 laporan	94.032.000	69.840.000
IV. 3.	*Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Prosentase pencegahan dan pengobatan penyakit hewan yang terlayani*	100%	*83.173.500*	*83.173.500*
IV. 3.a	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 laporan	83.173.500	83.173.500
V	**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Prosentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional**	**- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%**	**167.216.000**	**265.169.000**
V.1.	*Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota*	*Persentase serangan OPT*	- Padi 2,4% - Horti : 4,8%	*167.216.000*	*265.169.000*
V.1.a	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	175 hektar	167.216.000	265.169.000
VI	**Program penyuluhan pertanian**	**Prosentase Peningkatan / Pengukuhan**	**10%**	**506.844.000**	**556.214.500**

		Kelas Kelompok Tani			
VI. 1.	*Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*	*Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuannya tentang pertanian*	*28 klp*	*506.844.000*	*556.214.500*
VI. 1.a	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	4 unit	437.184.000	402.014.000
VI. 1.b	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	12 unit	69.660.000	63.000.500
VI. 1.c	**Sub Kegiatan** : Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	16 orang	0	91.200.000

Tabel 3.2. PERKEMBANGAN PAGU TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Induk 2025 (Rp.)	Pagu Pergeseran 1	Pagu Pergeseran 2	Pagu Pergeseran 3	Pagu Pergeseran 4	Usulan Pagu Perubahan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**16.464.253.224**	**16.765.765.162**	**14.892.355.494**	**14.892.355.494**	**17.117.493.036**	**17.285.243.036**
1)	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.759.556.460**	**13.061.068.398**	**11.252.910.630**	**11.252.910.630**	**13.064.868.651**	**13.067.118.651**
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.759.556.460	13.061.068.398	11.252.910.630	11.252.910.630	13.064.868.651	13.067.118.651
2)	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**542.681.000**	**542.681.000**	**501.587.000**	**501.587.000**	**501.587.000**	**501.587.000**
2	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.507.000	6.507.000	6.507.000	6.507.000	6.507.000	6.507.000
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.068.000	9.068.000	7.068.000	7.068.000	7.068.000	7.068.000
4	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	394.336.000	394.336.000	394.336.000	394.336.000	394.336.000	394.336.000
5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	57.490.000	57.490.000	43.940.000	43.940.000	43.940.000	43.940.000
6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000

7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.480.000	64.480.000	38.936.000	38.936.000	38.936.000	38.936.000
3)	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-	-	-	**143.000.000**
8	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	143.000.000
4)	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.372.122.764**	**2.372.122.764**	**2.347.964.864**	**2.347.964.864**	**2.761.144.385**	**2.783.644.385**
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	135.287.400	135.287.400	111.129.500	111.129.500	111.129.500	111.129.500
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	360.000.000	360.000.000	360.000.000	360.000.000	360.000.000	360.000.000
11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.876.835.364	1.876.835.364	1.876.835.364	1.876.835.364	2.290.014.885	2.312.514.885
5)	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**789.893.000**	**789.893.000**	**789.893.000**	**789.893.000**	**789.893.000**	**789.893.000**
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	389.013.000	389.013.000	389.013.000	389.013.000	389.013.000	389.013.000

13	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	324.800.000	324.800.000	324.800.000	324.800.000	324.800.000	324.800.000
14	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	76.080.000	76.080.000	76.080.000	76.080.000	76.080.000	76.080.000
II	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**1.404.742.500**	**1.404.742.500**	**1.216.179.500**	**1.798.428.500**	**1.798.428.500**	**1.670.178.500**
6)	**Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**1.114.792.500**	**1.114.792.500**	**1.002.754.500**	**1.140.253.500**	**1.140.253.500**	**1.140.253.500**
15	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	476.382.000	476.382.000	379.839.000	379.839.000	379.839.000	379.839.000
16	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	638.410.500	638.410.500	622.915.500	760.414.500	760.414.500	760.414.500
7)	**Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**289.950.000**	**289.950.000**	**213.425.000**	**658.175.000**	**658.175.000**	**529.925.000**

17	Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	289.950.000	289.950.000	213.425.000	658.175.000	658.175.000	529.925.000
III	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**6.347.144.600**	**6.347.144.600**	**6.260.880.600**	**6.260.880.600**	**6.260.880.600**	**6.260.880.600**
8)	**Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**	**6.347.144.600**	**6.347.144.600**	**6.260.880.600**	**6.260.880.600**	**6.260.880.600**	**6.260.880.600**
18	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4.799.742.600	4.799.742.600	4.786.388.600	4.786.388.600	4.786.388.600	4.786.388.600
19	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	705.945.000	705.945.000	703.595.000	703.595.000	703.595.000	703.595.000
20	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	841.457.000	841.457.000	770.897.000	770.897.000	770.897.000	770.897.000
IV	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**987.333.820**	**987.333.820**	**965.141.820**	**965.141.820**	**965.141.820**	**1.426.506.820**
9)	**Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**810.128.320**	**810.128.320**	**810.128.320**	**810.128.320**	**810.128.320**	**1.273.493.320**

21	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	810.128.320	810.128.320	810.128.320	810.128.320	810.128.320	1.273.493.320
10)	**Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**94.032.000**	**94.032.000**	**71.840.000**	**71.840.000**	**71.840.000**	**69.840.000**
22	Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	94.032.000	94.032.000	71.840.000	71.840.000	71.840.000	69.840.000
11)	**Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner**	**83.173.500**	**83.173.500**	**83.173.500**	**83.173.500**	**83.173.500**	**83.173.500**
23	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	83.173.500	83.173.500	83.173.500	83.173.500	83.173.500	83.173.500
V	**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**167.216.000**	**167.216.000**	**153.389.000**	**265.169.000**	**265.169.000**	**265.169.000**
12)	**Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**167.216.000**	**167.216.000**	**153.389.000**	**265.169.000**	**265.169.000**	**265.169.000**
24	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	167.216.000	167.216.000	153.389.000	265.169.000	265.169.000	265.169.000

VI	**Program penyuluhan pertanian**	**506.844.000**	**598.044.000**	**556.214.500**	**556.214.500**	**556.214.500**	**556.214.500**
13)	**Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**506.844.000**	**598.044.000**	**556.214.500**	**556.214.500**	**556.214.500**	**556.214.500**
25	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	437.184.000	437.184.000	402.014.000	402.014.000	402.014.000	402.014.000
26	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	69.660.000	69.660.000	63.000.500	63.000.500	63.000.500	63.000.500
27	Sub Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	-	91.200.000	91.200.000	91.200.000	91.200.000	91.200.000
J U M L A H		**25.877.534.144**	**26.270.246.082**	**24.044.160.914**	**24.738.189.914**	**26.963.327.456**	**27.464.192.456**

BAB IV PENUTUP

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian pada perubahan Tahun Anggaran 2025 bertambah 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yang sebelumnya (induk) terdiri dari 6 program (5 program prioritas dan 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah), 12 kegiatan dan 26 sub kegiatan, menjadi 6 program (5 program prioritas dan 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah), 13 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan total pagu yang diusulkan senilai Rp. 27.464.192.456,- (Duapuluh Tujuh Milliar Empatratus Enampuluh Empat Juta Seratus Sembilanpuluh Dua Ribu Empatratus Limapuluh Enam Rupiah), dari sebelumnya pagu induk Rp. 25.877.534.144,- (Duapuluh Lima Milliar Delapanratus Tujuhpuluh Tujuh Juta Limaratus Tigapuluh Empat Ribu Seratus Empatpuluh Empat Rupiah). dan pergeseran IV Rp.26.963.327.456,- (Duapuluh Enam Milliar Sembilanratus Enampuluh Tiga Juta Tigaratus Duapuluh Tujuh Ribu Empatratus Limapuluh Enam Rupiah).

Rencana tindak lanjut dalam memantapkan program kegiatan yang dirancang ini telah ditetapkan sesuai dengan prioritas pembangunan Dinas Pertanian Kota Denpasar yaitu :

1) Memprioritaskan program / kegiatan dan usulan / proposal yang diajukan masyarakat petani / LSM / Musrenbang Kecamatan / Perguruan Tinggi.
2) Mengakomodir usulan prioritas program kegiatan dalam kerangka peningkatan potensi dan ketahanan pangan (swasembada pangan), pengentasan kemiskinan dan stunting.

3) Mengacu pada Program / kegiatan / sub kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis (Renstra) periode Tahun 2021 -2026 dan RPJPD Kota Denpasar Periode 2005 – 2025 dengan nomenklatur dan kodefikasi sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar,

Ir. A.A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA
Pembina Utama Muda
NIP. 196608031992031008

ᬩᬮᬾᬓᬶᬦᬕᬭᬸᬧᬸᬢᬭᬸᬓᬦᬾᬓᬶᬮᬾ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ᬩᬸᬤᬸᬓᬶᬧᬭᬦᬸᬫᬸᬓᬸᬧᬸᬭᬸᬫᬸᬓᬸᬤᬸᬭᬸᬫᬸᬓᬸᬤᬸᬭᬸᬫᬸᬓᬸᬤ

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja 2025 Dinas Pertanian Kota Denpasar

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian			
		Kesesuaian		Faktor penyebab ketidak sesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2.	Pengolahan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota tahun 2023 (Juni) berdasarkan renstra Perangkat Daerah kabupaten / kota				
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
6.	Penelaahan Perubahan RKPD Kabupten/Kota	√			
7.	Perumusan Tujuan dan Sasaran	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan	√			
10.b	Mempertajam indikator dan terget kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai surat edaran bupati./Walikota	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian			
		Kesesuaian		Faktor penyebab ketidak sesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi percepatan sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat Daerah Kabupaten/Kota		√	Forum perangkat daerah hanya dilaksanakan untuk penetapan pagu induk 2025	Pengalokasian pagu perubahan 2025 berdasarkan program prioritas
13.	Pendanaan Program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten /kota telah menyusun dan memperhitungkan perkiraan maju	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah di sahkan	√			

Denpasar, 28 Mei 2025

Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar

Ir. A.A Gde Bayu Brahmasta, MMA
Pembina Utama Muda
NIP 19660803 199203 1 008

WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 188.45/1854/ HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa Dinas Pertanian Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Denpasar sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Denpasar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:

a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025;
b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah urusan pemerintahan bidang pertanian;
c. menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025;
d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025; dan
e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Nopember 2023

a.n. Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Pertanian
Kota Denpasar,



IR. A.A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA
Pembina Utama Muda
NIP. 196608031992031008

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
3. Inspektur Kota Denpasar
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 22 NOPEMBER 2023
NOMOR : 188.45 /1854/ HK / 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

Penasehat :
1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar

Pembina :
1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar

Sekretaris : Sekretaris Dinas Pertanian Kota Denpasar

Anggota :
1. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Kota Denpasar
2. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian Kota Denpasar
3. Kepala Bidang Bina Usaha dan Pengolahan pada Dinas Pertanian Kota Denpasar
4. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kota Denpasar
5. Fungsional Perencana pada Dinas Pertanian Kota Denpasar
6. Kepala UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian Kota Denpasar
7. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kota Denpasar

a.n. Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Pertanian
Kota Denpasar,

IR. A. A.. Gde Bayu Brahmasta, M.MA
Pembina Utama Muda
NIP. 196608031992031008

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Denpasar

WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3/1187/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan rencana kerja Perangkat Daerah, sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perangkat daerah untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan tugas dan fungsinya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Kota Denpasar Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);

7. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencan Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Juni 2025

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 19 JUNI 2025
NOMOR : 100.3.3/1187/HK/2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

1. PERUBAHAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
2. PERUBAHAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
3. PERUBAHAN RENJA RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR
4. PERUBAHAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2025
5. PERUBAHAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
6. PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
7. PERUBAHAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
8. PERUBAHAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
9. PERUBAHAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
10. PERUBAHAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2025
11. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
12. PERUBAHAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
13. PERUBAHAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
14. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
15. PERUBAHAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
16. PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
17. PERUBAHAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
18. PERUBAHAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2025
19. PERUBAHAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
20. PERUBAHAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
21. PERUBAHAN RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
22. PERUBAHAN RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
23. PERUBAHAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
24. PERUBAHAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
25. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

26. PERUBAHAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
27. PERUBAHAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
28. PERUBAHAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
29. PERUBAHAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
30. PERUBAHAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
31. PERUBAHAN RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
32. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
33. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2025
34. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2025
35. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2025
36. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
37. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Ida Sanghyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan AnugrahNYA sehingga kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan pengelolaannya dalam tahun berjalan, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang memuat Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub kegiatan sesuai urusan pilihan bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 masih belum sempurna, serta masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada kami. Namun demikian, diharapkan Perubahan Rencana Kerja ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipergunakan sesuai dengan harapan.

Denpasar, 19 Juni 2025

Kepala
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Denpasar

Ni Nyoman Sri Utari, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 196706101989012004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang……..... 1

1.2 Landasan Hukum…… 1

1.3 Maksud dan Tujuan…… 4

1.4 Sistematika Penulisan…….. 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I…… 6

2.2 Kendala dan Permasalahan dalam pelaksanaan Renja PD….. 26

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR …….. 27

3.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 27

BAB IV PENUTUP 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar tahun 2025 ini dilakukan untuk merancang pelaksanaan Pameran Dagang Nasional sebagai fasilitasi bagi UKM/IKM untuk mengikuti Pameran Dagang Tingkat Nasional, sarana prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Denpasar serta biaya operasional kantor.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratiran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeirntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1;

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Perindustrian dan Perdagangan.
20. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 23);
21. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar tahun 2025 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di sektor Perindustrian dan Perdagangan serta menyesuaikan dengan kebijakan, dinamika dan permasalahan yang timbul dimasyarakat agar dapat menyesuaikan dengan sasaran dan hasil yang harus dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

2. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 (Tahun Berjalan)

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR

3. Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar sampai dengan triwulan I Tahun 2025 adalah untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan rencana kerja yang dilakukan, selain itu evaluasi juga bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dicapai.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar tahun 2025 terdiri dari 6 program urusan pilihan perdagangan, 3 program urusan pilihan perindustrian dan 1 program penunjang urusan. Berdasarkan realisasi anggaran, secara keseluruhan telah terealisasi sebesar Rp. 3.360.926.394,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 18.045.835.186,00. Capaian ini menunjukkan adanya upaya nyata dalam menjalankan program prioritas meskipun masih terdapat ruang peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya.

Secara umum, capaian kinerja fisik dan keuangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I masih perlu dipacu, baik dari sisi perencanaan teknis kegiatan, kecepatan pelaksanaan, maupun efisiensi penggunaan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas bidang, percepatan proses administrasi, serta evaluasi internal yang berkelanjutan agar sasaran tahunan dapat dicapai secara maksimal pada akhir tahun anggaran. Capaian kinerja dan keuangan ditampilkan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I

Kode rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
URUSAN PILIHAN				**18.045.835.186,00**		**3.360.926.394,00**	**14.684.908.792,00**
BIDANG URUSAN : PERDAGANGAN				**3.245.329.984,00**		**657.116.516,00**	**2.588.213.468,00**
3.30.02	**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)**	**40,00%**	**20.092.000,00**	**0%**	**240.000,00**	19.852.000,00
3.30.02.2.02	**Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	Persentase penerbitan tanda daftar gudang	**1,00%**	**2.530.000,00**	**0%**	**0,00**	**2.530.000,00**
3.30.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	2.530.000,00	**-**	0,00	2.530.000,00

Kode rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
3.30.02.2.05	**Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	**Peningkatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	**1%**	**15.150.000,00**	**0%**	0,00	**15.150.000,00**
3.30.02.2.05.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	15.150.000,00	**-**		15.150.000,00
3.30.02.2.06	**Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten /Kota**	**100,00%**	**2.412.000,00**	**25%**	**240.000,00**	**2.172.000,00**

Kode rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
3.30.02.2.06.0003	Sub Kegiatan Pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2)	12 Laporan	2.412.000,00	3 Laporan	240.000,00	2.172.000,00
3.30.03	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal**	**87,80%**	**412.365.000,00**	**87,80%**	**306.223.000**	**106.142.000,00**
3.30.03.2.01	**Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya**	**20,00%**	**326.415.000,00**	**20%**	**306.223.000**	20.192.000,00
3.30.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	306.240.000,00	2 Unit	306.223.000	17.000,00
3.30.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdaganan	0,00	20.175.000,00	0,00	-	20.175.000,00

Kode rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
3.30.03.2.02	**Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Persentase pembinaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya**	**10,00%**	**85.950.000,00**	0	**0,00**	85.950.000,00
3.30.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0,00	4.350.000,00	0	-	4.350.000,00
3.30.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	81.600.000,00	0	-	81.600.000,00
3.30.04	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Persentase stabilitas harga bahan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten/kota, agen, distributor dan pasar rakyat**	**77,33%**	**257.001.500,00**	**19,30%**	**31.843.200,00**	**225.158.300,00**

Kode rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
3.30.04.2.01	**Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingakat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat**	**96 Laporan**	**2.412.000,00**	**24 Laporan**	**240.000,00**	**2.172.000,00**
3.30.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersedian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	2.412.000,00	3 Laporan	240.000	2.172.000,00
3.30.04.2.02	**Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar dan Kabupaten/Kota**	**1,50%**	**250.898.500,00**	**0,75%**	**31.363.200,00**	**219.535.300,00**

Kode rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
3.30.04.2.02.0001	Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	24 Laporan	3.803.000,00	5 Laporan	240.000,00	3.563.000,00
3.30.04.2.02.0002	Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	96 Laporan	58.756.500,00	17 Laporan	720.000,00	58.036.500,00
3.30.04.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	188.339.000,00	2 Laporan	30.403.200,00	157.935.800,00

Kode rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
3.30.04.2.03	**Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota**	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	**75,83%**	**3.691.000,00**	**18,50%**	**240.000,00**	**3.451.000,00**
3.30.04.2.03.0003	Sub Kegiatan Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi Minimal 90%	24 Laporan	3.691.000,00	4 Laporan	240.000,00	3.451.000,00
3.30.05	**Program Pengembangan Ekspor**	**Ekspor bersih perdagangan**	**2.384.062.113 .417**	**1.074.452.000,00**	**426.981.502.78 0**	**146.109.012,00**	**928.342.988,00**
3.30.05.2.01	**Kegiatan Penyelengaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Tedapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang**	**8%**	**1.074.452.000,00**	**0,00%**	**146.109.012,00**	**928.342.988,00**
3.30.05.2.01.0002	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	3 pelaku usaha	1.027.282.000,00	3 pelaku usaha	146.109.012,00	881.172.988,00

Kode rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
3.30.05.2.01.0005	Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	47.170.000,00	0,00	0,00	47.170.000,00
3.30.06	**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	100%	**247.076.984,00**	**8,26%**	**17.834.804,00**	**229.242.180,00**
3.30.06.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera / tera ulang dalam tahun berjalan**	**100%**	**247.076.984,00**	**8,26%**	**17.834.804,00**	**229.242.180,00**
3.30.06.2.01.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	8,000 Unit	208.307.984,00	800 Unit	17.354.804,00	190.953.180,00
3.30.06.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	144 Orang	38.769.000,00	36 Orang	480.000,00	38.289.000,00

Kode rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
3.30.07	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**Peningkatan rata-rata omset IKM/UKM yang difasilitasi**	**0,94%**	**1.234.342.500,00**	**0,00%**	**154.866.500,00**	**1.079.476.000,00**
3.30.07.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Peningkatan rata-rata omset pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi**	**0,94%**	**1.234.342.500,00**	**0,00%**	**154.866.500,00**	**1.079.476.000,00**
3.30.07.2.01.0004	sub Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	24 Orang	773.812.500,00	0,00	-	773.812.500,00
3.30.07.2.01.0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten /Kota	40 UMKM	395.005.000,00	40 UMKM	154.866.500,00	240.138.500,00

Kode rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
3.30.07.2.01.0006	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	200 UMKM	65.525.000,00	0,00	-	65.525.000,00
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN				**14.800.505.202,00**		**2.703.809.878,00**	**12.096.695.324,00**
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Cakupan bina kelompok pengrajin**	**36%**	**311.375.000,00**	**0%**	**5.104.960,00**	**306.270.040,00**
3.31.02.2.01	**Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota**	**Persentase IKM yang telah mendapatkan Penerapan dan evaluasi RPIK terhadap Jumlah IKM yang berada diKota Denpasar**	**10%**	**311.375.000,00**	**0%**	**5.104.960,00**	**306.270.040,00**
3.31.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	3.570.000,00	0,00	-	3.570.000,00

Kode rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
3.31.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber daya industri	1 Dokumen	288.255.000,00	0,00	5.104.960,00	283.150.040,00
3.31.02.2.01.0005	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	14.800.000,00	0,00	-	14.800.000,00
3.31.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	4.750.000,00	0,00	-	4.750.000,00
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.**	**90%**	**56.825.000,00**	**4,20%**	**37.164.840,00**	**19.660.160,00**

Kode rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait terhadap jumlah IKM Kota denpasar yang berada didalam SIINAS**	90%	**56.825.000,00**	**4,20%**	**37.164.840,00**	**19.660.160,00**

Kode rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenanganKabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 dokumen	9.090.000,00	0,00	5.431.000	3.659.000,00

Kode rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	2 dokumen	47.735.000,00	0,00	31.733.840	16.001.160,00
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Data informasi industri yang lengkap dan terkini**	**90,00%**	**116.439.000,00**	**0,00%**	**4.046.000,00**	**112.393.000,00**

Kode rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
3.31.04.2.01	**Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini**	**65,00%**	**116.439.000,00**	**0,00%**	**4.046.000,00**	**112.393.000,00**
3.31.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 dokumen	84.300.000,00	0,00	4.046.000,00	80.254.000,00
3.31.04.2.01.0002	Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	2 dokumen	28.678.000,00	0,00		28.678.000,00

Kode rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
3.31.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 dokumen	3.461.000,00	0,00		3.461.000,00
PENUNJANG URUSAN				**14.315.866.202,00**		**2.657.494.078,00**	**11.658.372.124,00**
3.31.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	**100%**	**14.315.866.202,00**	**15,66%**	**2.657.494.078,00**	**11.658.372.124,00**
3.31.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN, laporan keuangan akhir tahun dan laporan bulanan/triwulanan/ semesteran sesuai dengan peraturan perundang-undangan**	**100%**	**11.814.852.472,00**	**21,75%**	**2.113.385.270,00**	**9.701.467.202,00**

Kode rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang/bulan	11.814.852.472,00	37 Orang	2.113.385.270,00	9.701.467.202,00
3.31.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100%**	**286.394.500,00**	**13,51%**	**60.202.231,00**	**226.192.269,00**
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.518.000,00	0 Paket	-	5.518.000,00
3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	222.193.500,00	7 Paket	55.340.650	166.852.850,00
3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	18 Paket	22.265.000,00	0 Paket	-	22.265.000,00
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	25.978.000,00	1 Paket	3.241.581	22.736.419,00

Kode rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	10.440.000,00	2 Laporan	1.620.000	8.820.000,00
3.31.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai**	**100%**	**22.000.000,00**	**16,67%**	**0,00**	**22.000.000,00**
3.31.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	22.000.000,00	1,00	0,00	22.000.000,00
3.31.01.2.08	**Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**1.774.691.230,00**	**24,45%**	**431.315.977,00**	**1.343.375.253,00**
3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.250.000,00	1 Laporan	1.100.000	2.150.000,00
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	171.600.000,00	3 Laporan	20.397.119	151.202.881,00

Kode rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
3.31.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	84.375.200,00	3 Laporan	15.955.500	68.419.700,00
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	21 Laporan	1.515.466.030,00	4 Laporan	393.863.358	1.121.602.672,00
3.31.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah siap pakai**	**100%**	**417.928.000,00**	**4,94%**	**52.590.600,00**	**365.337.400,00**
3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	350.018.000,00	32 Unit	52.590.600,00	297.427.400,00
3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	67.910.000,00	0 Unit	-	67.910.000,00

2.2 Kendala dan Permasalahan dalam Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2025

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 adalah terkait dengan perolehan data impor dimana dalam triwulan I nilai impor belum tersedia sehingga penghitungan Ekspor bersih perdagangan yang merupakan indikator dari Program Pengembangan Ekspor belum dapat dilaksanakan.Terkait dengan hal tersebut hal yang bisa dilakukan adalah berkoordinasi secara berkala dengan Dinas Perindustarian dan Perdagangan Provinsi Bali.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR

3.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar menyusun rencana perubahan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 guna menyesuaikan dan meningkatkan efektivitas implementasi program dan kegiatan. Perubahan ini dilakukan sebagai respon terhadap evaluasi dan dinamika yang berkembang serta untuk memperkuat capaian target-target strategis yang telah ditetapkan.

Pada aspek anggaran, perubahan dilakukan untuk menyesuaikan alokasi dana dengan prioritas kegiatan yang telah di revisi, sehingga sumber daya dapat diarahkan secara optimal sesuai kebutuhan dan potensi yang ada.

Secara umum, rencana perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan daya saing industri daerah, serta memastikan program-program strategis berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar dalam Tahun 2025 dirancang sebesar Rp. 17.896.256.241,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (149.578.945,00) jika dibandingkan dengan Pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 18.045.835.186,00.

Perubahan Rancangan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar yang dilakukan dalam tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2025

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Angaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7-6
URUSAN PILIHAN					**18.045.835.186,00**	**17.896.256.241,00**	**(149.578.945,00)**
I	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**3.245.329.984,00**	**2.289.073.984,00**	**(956.256.000,00)**
1	**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)**	**40%**	**40%**	**20.092.000,00**	**4.942.000,00**	**(15.150.000,00)**
1.2	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Persentase penerbitan tanda daftar gudang**	**1%**	**1%**	**2.530.000,00**	**2.530.000,00**	-
1.2.1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	1 Dokumen	2.530.000,00	2.530.000,00	-
1.3	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	**Peningkatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	**1%**	**1%**	**15.150.000,00**	-	**(15.150.000,00)**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Angaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7-6
1.3.1	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	15.150.000,00	-	**(15.150.000,00)**
1.4	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**100%**	**2.412.000,00**	**2.412.000,00**	-
1.4.1	Pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupn produsen B2 (P-B2)	12 Laporan	12 Laporan	2.412.000,00	2.412.000,00	-
2	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Cakupan bina kelompok pedagang /usaha informal**	**87,80%**	**87,80%**	**412.365.000,00**	**310.940.000,00**	**(101.425.000,00)**
2.1	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya**	20%	20%	**326.415.000,00**	**306.240.000,00**	**(20.175.000,00)**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Angaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7-6
2.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	2 Unit	306.240.000,00	306.240.000,00	-
2.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdaganan	1 Unit	0	20.175.000,00	-	**(20.175.000,00)**
2.2	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Persentase pembinaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya**	**10%**	**10%**	**85.950.000,00**	**4.700.000,00**	**(81.250.000,00)**
2.2.1	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	0	4.350.000,00	0,00	**(4.350.000,00)**
2.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	81.600.000,00	4.700.000,00	**(76.900.000,00)**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Angaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7-6
3	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Persentase stabilitas harga bahan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten/kota, agen, distributor dan pasar rakyat**	**77,33%**	**77,33%**	**257.001.500,00**	**201.001.500,00**	**(56.000.000,00)**
3.1	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingakat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat**	**96 Laporan**	**96 Laporan**	**2.412.000,00**	**2.412.000,00**	**-**
3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersedian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	2.412.000,00	2.412.000,00	-
3.2	**Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota**	**Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar dan Kabupaten/Kota**	**1,5%**	**1,5%**	**250.898.500,00**	**194.898.500,00**	**(56.000.000,00)**
3.2.1	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	24 Laporan	24 Laporan	3.803.000,00	3.803.000,00	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Angaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7-6
3.2.2	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	96 Laporan	96 Laporan	58.756.500,00	11.156.500,00	**(47.600.000,00)**
3.2.3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	188.339.000,00	179.939.000,00	**(8.400.000,00)**
3.3	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kinerja Realisasi Pupuk**	**75,83%**	**75,83%**	**3.691.000,00**	**3.691.000,00**	-
3.3.1	Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi Minimal 90%	24 Laporan	24 Laporan	3.691.000,00	3.691.000,00	-
4	**Program Pengembangan Ekspor**	**Ekspor bersih perdagangan**	**2.384.062.113.417**	**2.384.062.113.417**	**1.074.452.000,00**	**669.709.000,00**	**(404.743.000,00)**
4.1	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang**	8%	8%	**1.074.452.000,00**	**669.709.000,00**	**(404.743.000,00)**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Angaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7-6
4.1.1	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	3 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	1.027.282.000,00	637.714.000,00	**(389.568.000,00)**
4.1.2	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	10 Produk	47.170.000,00	31.995.000,00	(15.175.000,00)
5	**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	**100%**	**100%**	**247.076.984,00**	**169.378.984,00**	**(77.698.000,00)**
5.1	**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**	**Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan**	100%	100%	**247.076.984,00**	**169.378.984,00**	**(77.698.000,00)**
5.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	8000 Unit	8000 Unit	208.307.984,00	162.589.984,00	(45.718.000,00)
5.1.2	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	144 orang	144 orang	38.769.000,00	6.789.000,00	(31.980.000,00)
6	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**Peningkatan rata-rata omset produk IKM/UKM yang difasilitasi**	**0,94%**	**0,94%**	**1.234.342.500,00**	**933.102.500,00**	**(301.240.000,00)**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Angaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7-6
6.1	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Peningkatan rata-rata omset pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi**	**0,94%**	**0,94%**	**1.234.342.500,00**	**933.102.500,00**	**(301.240.000,00)**
6.1.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	24 orang	24 orang	773.812.500,00	523.222.500,00	(250.590.000,00)
6.1.2	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40 UMKM	40 UMKM	395.005.000,00	395.005.000,00	-
6.1.3	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	200 UMKM	200 UMKM	65.525.000,00	14.875.000,00	(50.650.000,00)
II	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**484.639.000**	**474.239.000**	**(10.400.000,00)**
1	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Cakupan bina kelompok pengrajin**	**36%**	**36%**	**311.375.000,00**	**300.975.000,00**	**(10.400.000,00)**
1.1	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota**	**Persentase IKM yang telah mendapatkan Penerapan dan evaluasi RPIK terhadap Jumlah IKM yang berada diKota Denpasar**	**10%**	**10%**	**311.375.000,00**	**300.975.000,00**	**(10.400.000,00)**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Angaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7-6
1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	3.570.000,00	3.570.000,00	-
1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber daya industri	1 Dokumen	1 Dokumen	288.255.000,00	277.855.000,00	(10.400.000,00)
1.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	14.800.000,00	14.800.000,00	-
1.1.4	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	4.750.000,00	4.750.000,00	-
2	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.**	**90%**	**90%**	**56.825.000,00**	**56.825.000,00**	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Angaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7-6
2.1	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait terhadap jumlah IKM Kota denpasar yang berada didalam SIINAS**	**90%**	**90%**	**56.825.000,00**	**56.825.000,00**	**-**
2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 dokumen	2 dokumen	9.090.000,00	9.090.000,00	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Angaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7-6
2.1.2	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	2 dokumen	2 dokumen	47.735.000,00	47.735.000,00	-
3	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Data informasi industri yang lengkap dan terkini**	**90%**	**90%**	**116.439.000,00**	**116.439.000,00**	-
3.1	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini**	**65%**	**65%**	**116.439.000,00**	**116.439.000,00**	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Angaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7-6
3.1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 dokumen	2 dokumen	84.300.000,00	84.300.000,00	-
3.1.2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	2 dokumen	2 dokumen	28.678.000,00	28.678.000,00	-
3.1.3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 dokumen	2 dokumen	3.461.000,00	3.461.000,00	-
III	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN**				**14.315.866.202,00**	**15.132.943.257,00**	**817.077.055,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**100%**	**14.315.866.202,00**	**15.132.943.257,00**	**817.077.055,00**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Angaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7-6
1.1	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN, laporan keuangan akhir tahun dan laporan bulanan/triwulanan/ semesteran sesuai dengan peraturan perundang-undangan**	**100%**	**100%**	**11.814.852.472,00**	**11.969.598.077,00**	**154.745.605,00**
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang/bulan	96 orang/bulan	11.814.852.472,00	11.969.598.077,00	**154.745.605,00**
1.2	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**286.394.500,00**	**269.009.500,00**	**(17.385.000,00)**
1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	5.518.000,00	4.957.000,00	(561.000,00)
1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	222.193.500,00	208.834.500,00	(13.359.000,00)
1.2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	18 Paket	18 Paket	22.265.000,00	19.904.000,00	(2.361.000,00)

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Angaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7-6
1.2.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	25.978.000,00	23.374.000,00	(2.604.000,00)
1.2.5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	18 Laporan	10.440.000,00	11.940.000,00	1.500.000,00
1.3	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai**	**100%**	**100%**	**22.000.000,00**	**156.800.000,00**	**134.800.000,00**
1.3.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	101 Unit	22.000.000,00	156.800.000,00	134.800.000,00
1.4	**Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**1.774.691.230,00**	**2.319.607.680,00**	**544.916.450,00**
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	3.250.000,00	3.250.000,00	-
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	171.600.000,00	171.600.000,00	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Angaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	BERTAMBAH BERKURANG
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = 7-6**
1.4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	84.375.200,00	117.615.400,00	33.240.200,00
1.4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21 Laporan	21 Laporan	1.515.466.030,00	2.027.142.280,00	511.676.250,00
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah siap pakai**	**100%**	**100%**	**417.928.000,00**	**417.928.000,00**	-
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	32 Unit	350.018.000,00	350.018.000,00	-
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	69 Unit	67.910.000,00	67.910.000,00	-

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan I tahun 2025, masih diperlukan kerja keras untuk pencapaian target pada tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar merupakan gambaran prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025 berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 serta adanya pagu yang mengalami perubahan karena adanya efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dirancang usulan untuk pelaksanaan Pameran Dagang Nasional sebagai fasilitasi bagi UKM/IKM untuk mengikuti Pameran Dagang Tingkat Nasional, sarana prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Denpasar serta biaya operasional kantor.

Selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 rencana kerja berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.

Denpasar, 19 Juni 2025

Kepala
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Denpasar

Ni Nyoman Sri Utari, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 196706101989012004

LAMPIRAN

WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/2689/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
7. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:

a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2025;

b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah urusan pilihan bidang Perindustrian dan Perdagangan;

c. menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2025;

d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2025; dan

e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Nopember 2023

An.Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Perindustriam dan
Perdagangan Kota Denpasar

Ni Nyoman Sri Utari, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670610 198901 2 004

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
3. Inspektur Kota Denpasar
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 21 NOPEMBER 2023
NOMOR : 188.45 /2689/ HK / 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

Penasehat :
1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar

Pembina :
1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar

Sekretaris : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar

Anggota :
- Kepala Bidang Industri Kerajinan, Aneka dan Sandang
- Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Elektonika Telematika dan Agro
- Kepala Bidang Perdagangan
- Kepala Bidang Metrologi dan Tertib Niaga
- Fungsional Perencana Ahli Muda
- Para Ka.Sub.Bag pada Sekretariat Disperindag
- Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Layanan Desain Denpasar
- Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Kota Denpasar
- Para Fungsional Penyuluh Ahli Muda Pada Bidang Industri Kerajinan, Aneka dan Sandang
- Para Fungsional Penyuluh Ahli Muda Pada Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika Telematika dan Agro

- Fungsional Pengawas Ahli Muda Pada Bidang Perdagangan
- Fungsional Analis Ahli Muda Pada Bidang Perdagangan
- Para Fungsional Pengawas Ahli Muda Pada Bidang Metrologi dan Tertib Niaga
- Staf Pada Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, terdiri dari :
  1. I Ketut Sumantra, S.E.
  2. I Gusti Ayu Swakerthi
  3. Ida Ayu Dinda Laksmi Pidada, S.H.

An.Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Perindustriam dan
Perdagangan Kota Denpasar



Ni Nyoman Sri Utari, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670610 198901 2 004

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Graha Sewaka Dharma, Jalan Majapahit No.1 Denpasar.
Tlp. (0361) 8495711, Email : perindagdenpasarkota.go.id / perindag.denpasarkota@gmail.com http://perindag.denpasarkota.go.id

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2	Pengolahan data dan informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak		
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.		√	Tidak ada usulan dari kecamatan	
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan surat edaran bupati/walikota	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak		
	Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.				
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

Denpasar, 28 Mei 2025
Kepala
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Kota Denpasar

Ni Nyoman Sri Utari, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670610 198901 2 004

Petunjuk Pengisian:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempumaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Maruti No. 8 Denpasar Kode Pos 80115 Telepon. (0361) 413357
www.denpasarkota.go.id email: bappeda@denpasarkota.go.id

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2025

No.	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup Kota Denpasar telah berpedoman pada RKPD Kota Denpasar	Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja 2025 sudah berpedoman pada RKPD Kota Denpasar tahun 2025
2	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup Kota Denpasar dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Denpasar serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 Perangkat Daerah sudah mengacu pada perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup Kota Denpasar dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Denpasar serta pencapaian sasaran Pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.

Denpasar, 28 Mei 2025
Kepala Bappeda Kota Denpasar

I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199703 1 004

Petunjuk Pengisian :

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PERUBAHAN
RENCANA KERJA TA 2025

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KOTA DENPASAR

KATA PENGANTAR

Keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar sebagai salah satu dari Lembaga Teknis Daerah memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan, wajib menyusun dokumen perencanaan seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Salah satu dokumen perencanaan tersebut adalah Rencana Kerja (Renja).

Rencana kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja utama dan pendanaan indikatif yang akan diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan penanggulangan kebencanaan dan kebakaran kepada masyarakat. Renja yang sudah disusun yang akan menjadi pedoman atau acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar Tahun 2025.

Sebagai akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan-masukan dan data-data yang diperlukan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar.

Denpasar, 28 Mei 2025

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota
Denpasar

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

I Made Tirana,SH.,M.H
Pembina/IV/a
NIP. 196711092008011006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6
2.1.1 Capaian Renja Dinas Damkar Kota Denpasar Tahun 2025 6
2.1.2 Realisasi Program dan Kegiatan 7
2.1.3 Program/kegiatan yang tidak mencapai target beserta kendala dan hambatannya 18
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar 19
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar 20
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR 24
3.1. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar 24
BAB IV PENUTUP 31

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Renja Tahun 2025……	6
Tabel 2.2	Evaluasi Renja Tahun 2025 Triwulan I ……..	8
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar.....	19
Tabel 3.1	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar ……..	26

YUDHA BRAMA JAYA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 merupakan bagian dalam satu kesatuan siklus perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renja PD disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Pemerintah Daerah untuk mendukung ketercapaian target sasaran Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, dan target kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan potensi sisa saldo anggaran belanja tahun berjalan dapat dioptimalisasi untuk mendukung ketercapaian target pembangunan.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 dilakukan dengan menganalisis gambaran pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi RENJA Perubahan tahun yang telah lalu serta mengacu pada Renstra Perangkat dan disesuaikan dengan visi, misi

dan program prioritas Kepala Daerah Tahun 2025-2029.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum rencana kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar Tahun 2025 meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat ll Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nornor 1781

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
18. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);
20. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 25);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar ini adalah sebagai penjabaran Renstra dan sebagai bentuk operasionalisasi strategi-strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar adalah:

1) Memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku terkait

perencanaan.

2) Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan pada setiap tahunnya, yang akan dibiayai oleh APBD Pemerintah Kota Denpasar.
3) Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun ke depan.
4) Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar tahun 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Denpasar
- 3.1. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar

BAB IV Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala dalam

pencapaian Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar. Evaluasi terhadap pencapaian kinerja merupakan sebuah tuntutan yang berdampak pada penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja akan membantu sebuah organisasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

2.1.1 Capaian Renja Dinas Damkar Kota Denpasar Tahun 2025

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakran dan Penyelamatan Kota Denpasar Tahun 2025 diwujudkan dalam 2 Program, 8 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan yang dianggarkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar DPA Dinas Pemadam Kebakran dan Penyelamatan Kota Denpasar Tahun 2025 dengan total nilai

keseluruhan sebesar Rp. 22.818.890.066 dengan realisasi hingga Triwulan I mencapai Rp. 4.101.808.080 dengan persentase serapan dana APBD mencapai 18%. Sedangkan untuk capaian kinerja Renja Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Renja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi TW I	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Tingkat Waktu tanggap *(Respon Time Rate)*	12 Menit	8,35 menit	143%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja renstra untuk sasaran strategis Disdamkar Kota Denpasar sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 secara umum terpenuhi sesuai dengan target Indikator Kerja Utama.

2.1.2 Realisasi Program dan Kegiatan

Akuntabilitas keuangan yang dicapai oleh Disdamkar Kota Denpasar tahun 2025 hingga triwulan I berdasarkan alokasi langsung per program dan kegiatan dapat disajikan sebagai berikut:

YUDHA BRAMA JAYA

Tabel 2.2 Evaluasi Renja Tahun 2025 Triwulan I

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat apaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
				(Tahun 2025)		II		II		III		IV									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%K	%Rp	K	Rp	K	Rp
		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		100	**22.818.890.066**	**38,56**	**4.101.808.080**							38,56	**4.101.808.080**	39%	18%	62,61	37.207.312.783	63%	133%
		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		100	**22.818.890.066**	**38,56**	**4.101.808.080**							38,56	**4.101.808.080**	39%	18%	62,61	37.207.312.783	63%	133%
1	**Pemenuhan layanan penunjang kinerja Perangkat Daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100**	**16.779.563.066**	**50,13**	**3.762.156.080**							**50,13**	**3.762.156.080**	50%	22%	65,47	23.951.588.055	**65%**	**95%**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase tersedia gaji dan tunjangan ASN**	**100**	**10.870.953.316**	**96,43**	**2.596.184.928**							96,43	**2.596.184.928**	96%	24%	79,71	14.252.557.261	**80%**	**111%**

PUDHA BRAMA JAYA

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat apaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
				(Tahun 2025)		II		II		III		IV									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%K	%Rp	K	Rp	K	Rp
		Peyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	10.870.953.316	**54,00**	2.596.184.928							54,00	**2.596.184.928**	96%	24%	58,00	14.252.557.261	74%	111%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase layanan administrasi kepegawaian**	100	**164.700.000**	**0,00**	**-**							0,00	**-**	0%	0%	44,50	135.686.000	**45%**	**25%**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	122	164.700.000	**0,00**	-							0,00	**-**	0%	0%	97,00	135.686.000	97%	25%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**persentase layanan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**395.881.750**	**42,33**	71.134.800							42,33	**71.134.800**	42%	18%	63,16	868.104.500	**63%**	**55%**

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat apaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
				(Tahun 2025)		II		II		III		IV									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%K	%Rp	K	Rp	K	Rp
		Peyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	2.917.500	**0,00**	-							0,00	**-**	0%	0%	1,00	2.812.500	100%	46%
		Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	130.571.000	**3,00**	6.581.500							3,00	**6.581.500**	43%	5%	14,00	156.160.700	117%	57%
		Peyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Rumah Tangga yang Disediakan	9	176.813.250	**4,00**	59.923.300							4,00	**59.923.300**	44%	34%	8,00	406.481.300	100%	47%
		Peyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	**3**	38.500.000	**2,00**	1.150.000							2,00	**1.150.000**	67%	3%	2,00	248.590.000	50%	91%
		Peyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	3	26.200.000	**0,00**	-							0,00	**-**	0%	0%	2,00	29.700.000	40%	32%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3	20.880.000	**3,00**	3.480.000							3,00	**3.480.000**	100%	17%	6,00	24.360.000	17%	45%

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat apaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
				(Tahun 2025)		II		II		III		IV							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%K	%Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100	**3.544.294.000**	**83,33**	937.996.352							83,33	**937.996.352**	83%	26%	90,67	6.434.334.724	**91%**	**81%**
		Peyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	241.200.000	**3,00**	52.360.523							3,00	**52.360.523**	100%	22%	3,00	261.180.187	100%	73%
		Peyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	**6,00**	3.303.094.000	**4,00**	885.635.829							4,00	**885.635.829**	67%	27%	7,00	6.173.154.537	117%	81%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase barang milik daerah yang siap pakai**	**100**	**1.803.734.000**	**28,57**	156.840.000							28,57	**156.840.000**	29%	9%	49,29	2.260.905.570	**49%**	**102%**

UDHA BRAMA JAYA

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat apaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
				(Tahun 2025)		II		II		III		IV									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%K	%Rp	K	Rp	K	Rp
		Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	1.361.336.000	**29,00**	141.000.000							29,00	**141.000.000**	100%	10%	32,00	1.870.697.800	107%	435%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	63	127.110.000	**9,00**	15.840.000							9,00	**15.840.000**	14%	12%	44,00	84.225.000	33%	5%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara dan Direhabilitasi	2	266.548.000	**0,00**	-							0,00	**-**	0%	0%	1,00	279.473.770	20%	132%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**20**	48.740.000	**0,00**	-							0,00	**-**	0%	0%	9,00	26.509.000	30%	230%

PUDHA BRAMA JAYA

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat apaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
				(Tahun 2025)		II		II		III		IV							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%K	%Rp	K	Rp	K	Rp
2	Meningkatnya pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan an evakuasi korban kebakaran 2. Tingkat Waktu tanggap (response time rate)	100	**6.039.327.000**	**26,99**	**339.652.000**							26,99	**339.652.000**	27%	6%	59,75	13.255.724.728	**60%**	**464%**
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanggulangan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	100	**5.447.764.000**	**55,97**	**337.477.000**							55,97	**337.477.000**	56%	6%	71,91	13.070.996.708	**72%**	**536%**

YUDHA BRAMA JAYA

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat apaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
				(Tahun 2025)		II		II		III		IV									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%K	%Rp	K	Rp	K	Rp
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3	337.058.000	2,00	72.445.000							2,00	72.445.000	67%	21%	2,00	72.445.000	200%	48%
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	693.040.000	1,00	32.392.000							1,00	32.392.000	100%	5%	1,00	32.392.000	100%	9%
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan	1	303.075.000	1,00	4.640.000							1,00	4.640.000	100%	2%	1,00	110.906.000	100%	43%

PUDHA BRAMA JAYA

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat apaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
				(Tahun 2025)		II		II		III		IV									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%K	%Rp	K	Rp	K	Rp
			Kebakaran dan Non Kebakaran																		
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	105	418.240.000	0,00	-							0,00	-	0%	0%	35,00	337.600.000	350%	338%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri yang Sah dan Legal sesuai	303	3.696.351.000	**40,00**	228.000.000							40,00	**228.000.000**	13%	6%	382,00	12.517.653.708	1273%	798%

YODHA BRAMA JAYA

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat apaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
				(Tahun 2025)		II		II		III		IV									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%K	%Rp	K	Rp	K	Rp
			Standar Teknis Terkait																		
		Investigasi Kejadian Kebakaran	**Persentase Investigasi lanjutan kejadian kebakaran**	**100**	**150.000.000**	**25,00**	**2.175.000**							25,00	**2.175.000**	25%	1%	25,00	2.175.000	**25%**	**0**
		Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1	150.000.000	**1,00**	2.175.000							1,00	**2.175.000**	100%	1%	1,00	2.175.000	100%	1%
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran**	**100**	**441.563.000**	**0,00**	**-**							0,00	**-**	0%	0%	24,28	182.553.020	**24%**	**70%**

YUDHA BRAMA JAYA

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat apaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
				(Tahun 2025)		II		II		III		IV									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%K	%Rp	K	Rp	K	Rp
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100	57.073.000	**0,00**	-							0,00	-	0%	0%	100,00	27.537.950	100%	25%
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	43	384.490.000	**0,00**	-							0,00	-	0%	0%	43,00	155.015.070	43%	103%

YUDHA BRAMA JAYA

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dari alokasi anggaran sebesar Rp.22.818.890.066 sampai dengan Triwulan I terealisasi sebesar Rp 4.101.808.080 atau sebesar 18 % dengan dengan capaian kinerja 39%. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan realisasi Rp339.652.000 atau sebesar 6% dikarenakan menyesuaikan dengan anggaran kas, menyesuaikan dengan kejadian kebakaran dan beberapa jenis belanja modal masih dalam proses administrasi.. Sedangkan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp.3.762.156.080 atau sebesar 22%.

2.1.3 Program/kegiatan yang tidak mencapai target beserta kendala dan hambatannya

Secara umum program kegiatan sesuai dengan perencanaan yang disusun pada perencanaan awal APDB 2025. Terdapat kegiatan yang belum maksimal penyerapan anggarannya seperti :

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan serapan anggaran Rp.71.134.800 (18%) dikarenakan adanya keterlambatan dalam pengadministrasian;
2. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan serapan anggaran Rp156.840.000 (9%) dikarenakan minimnya pemeliharaan BMD dan terdapat belanja yang masih dalam proses pengadministrasian.
3. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi Rp.337.477.000 (6%) yang penyerapan anggaran di sesuaikan dengan jumlah kejadian kebakaran dan penyelamatan serta beberapa belanja yang masih dalam proses pengadministrasian.
4. Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran dengan serapan anggaran sebesar Rp. 2.175.000 (1%) yang besaran serapan anggaran dipengaruhi oleh kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lebih lanjut.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan yang belum maksimal mencapai target dikarenakan beberapa hal yang bersifat teknis dan administratif. Perlu adanya percepatan proses administrasi dalam mempercepat pencapaian kinerja sesuai yang telah di rencanakan. Selain itu perlu adanya perubahan rencana kerja untuk memenuhi kekurangan-kekurangan yang belum terakomodir pada tahun 2025.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar sebagai OPD teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan bertanggungjawab dalam manajemen Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan meliputi Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran, Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Investigasi Kejadian Kebakaran dan, Pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diatas, hasil pelaksanaan program/kegiatan, yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis dari pencapaian target kinerja atas sasaran strategis dan kebijakan Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate)	15 menit	Waktu tanggap *(response time)* penanganan kebakaran	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	9 menit	9 menit	10 menit	10 menit	10 menit	-
2.	Persentase masyarakat Yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasl korban kebakaran		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	-

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, adapun target pencapaian kinerja pada Renstra Tahun 2022-2026 yaitu 15 menit sedangkan realisasi pada tahun 2022 sebesar 9 menit, tahun 2023 sebesar 9 menit dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan tingkat waktu tanggap menjadi 10 menit. Namun secara keseluruhan sudah mencapai target yang ditetapkan pada Renstra. Kenaikan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya kepadatan saat perjalanan menuju lokasi kejadian kebakaran, kesulitan akses menuju ke lokasi kejadian, kurang optimalnya sarana dan prasaran yang dimiliki hingga belum optimalnya relawan kebakaran yang dibentuk. Sedangkan untuk proyeksi capaian tahun 2025 yaitu 10 menit yang hingga Triwulan I capaian sebesar 8,35 menit.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar

2.3.1. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

2.3.2. Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
b. penyelenggaraan urusan penatausahaan perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;

d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai peraturan perundang-undangan;
g. pelaksaaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.3.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

Kota Denpasar merupakan daerah heterogen multi etnis yang dipengaruhi oleh urbanisasi penduduk dari berbagai daerah di Nusantara serta para wisatawan asing dari berbagai Negara yang mampu membaur dalam satu kesatuan kehidupan sosial budaya (social culture). Dengan kondisi tersebut yang mendorong tumbuhnya pembangunan perumahan dan penunjang pariwisata yang sangat pesat disertai dengan pertumbuhan penduduk akan menimbulkan berbagai masalah sosial.

Kepadatan penduduk dan peningkatan pembangunan permukiman akan rentan terjadinya musibah kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan nyawa. Untuk itu Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kebakaran dan Penyelamatan berusaha menekan kejadian kebakaran, meningkatkan rasa aman bagi masyarakat dan pengusaha terhadap terjadinya musibah kebakaran, dengan memberikan pelayanan umum mengenai penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.

Berdasarkan pengamatan terhadap berbagai kejadian kebakaran dewasa ini, beberapa permasalahan yang berkaitan erat dengan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran antara lain:

a) Provinsi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia dan kota Denpasar sebagai Ibukota sekaligus wajah Provinsi Bali sehingga perlunya menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan tertib.
b) Bertambahnya fungsi kawasan seperti kawasan perkantoran, kawasan industri dan perdagangan, kawasan pariwisata, serta berkembangnya

kawasan perumahan, kawasan padat hunian penduduk termasuk kawasan kumuh, bahaya kebakaran dikawasan tersebut memerlukan antisipasi pola penanganan berbeda terutama mengenai tindakan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

c) Pertambahan jumlah penduduk dan mobilitas penduduk perkotaan.
d) Masih adanya pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan bangunan yang tidak atau kurang memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan terhadap bahaya kebakaran sesuai dengan peraturan, pedoman dan standar teknis yang berlaku (Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Permen PU No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknik Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan).
e) Pengetahuan dan kemampuan masyarakat yang masih awam terhadap cara pencegahan dan pengantisipasian awal bahaya kebakaran sehingga apabila terjadi kebakaran, masyarakat tergantung terhadap bantuan pemadaman dari instansi pemadam kebakaran.
f) Kurang memadainya akses jalan untuk menjangkau pelayanan proses pemadaman serta adanya kepadatan lalu lintas.
g) Kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi memadai dalam memberikan kajian persyaratan teknis proteksi kebakaran sesuai dengan Permen PU No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknik Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
h) Kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran, baik secara kuantitas maupun kualitas seperti kondisi sarana dan prasarana pemadam yang sudah tua.

Permasalahan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur yang selaras dan seimbang yang pada akhirnya merupakan isu-isu strategis yang akan dipakai sebagai acuan untuk ditangani. Isu-isu strategis tersebut sebagai berikut:

1) Standar pelayanan minimal terkait penanggulangan, penyelamatan, evakuasikorban kebakaran, non kebakaran serta penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3).

2) Pelayanan prima dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
3) Ketahanan lingkungan bersama masyarakat.
4) Standar kompetensi petugas pemadam kebakaran yang profesional.
5) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pencegahan dan penanggulangan kebakaran

YUDHA BRAMA JAYA

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR

3.1. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar

Untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah hingga pelaporan kinerja sebagai acuan dalam melaksanakan rencana kerja pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaean yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran yang masih tergabung dengan Renstra BPBD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yang telah disusun sebelumnya. Adapun penjabaran visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar dan perumusan tujuan dan sasaran yang ditargetkan pada tahun 2025:

Visi	:	Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju” (Denpasar “Makmur, Aman, Jujur, Unggul”)
Misi ke-2	:	Menjaga stabilitas keAMANan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
Tujuan Strategis	:	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
Indikator Sasaran	:	Tingkat waktu Tanggap (Respon Time Rate)
Target	:	12 Menit
Strategi	:	1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan pencegahan, penanganan dan pengendalian kebakaran

2. Meningkatnya sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana operasional pencegahan dan pengendalian kebakaran
2. Meningkatkan pengembangan kompetensi aparatur
3. Meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi tentang pencegahan dan bahaya kebakaran secara berkelanjutan bagi masyarakat
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran.

Renja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar Tahun 2025 memuat rencana program atau kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025 oleh sekretariat dan masing-masing bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar secara terperinci, dan juga untuk mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan target yang sudah ditetapkan. Adapun rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar pada anggaran perubahan tahun 2025, antara lain:

YUDHA BRAMA JAYA

Tabel 3.1

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR			27.650.690.950		38.410.588.950
1	1.5.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN KESEKRETARIATAN	100%	21.611.363.950	100%	22.306.566.950
	1.05.01.2.02 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedia gaji dan tunjangan ASN	100%	14.517.232.200	100%	14.517.232.200
	1.05.01.2.02.0001 - sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	167 orang/ Bulan	14.517.232.200	167 orang/ Bulan	14.517.232.200
	1.05.01.2.05 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian ASN	100%	164.700.000	100%	305.000.000
	1.05.01.2.05.0002 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	122 Paket	164.700.000	122 Paket	305.000.000
	1.05.01.2.06 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	395.881.750	100%	406.411.750
	1.05.01.2.06.0001 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.917.500	1 Paket	2.917.500

	1.05.01.2.06.0002 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	130.571.000	7 Paket	141.101.000
	1.05.01.2.06.0003 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jurnlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	176.813.250	9 Paket	176.813.250
	1.05.01.2.06.0004 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jurnlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	38.500.000	3 Paket	38.500.000
	1.05.01.2.06.0005 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jurnlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	26.200.000	3 Paket	26.200.000
	1.05.01.2.06.0006 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jurnlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	20.880.000	3 Dokumen	20.880.000
	1.05.01.2.07 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai	0%	0	100%	194.239.000
	1.05.01.2.07.0006 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	20 Unit	194.239.000
	1.05.01.2.08 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4.729.816.000	100%	4.755.094.000
	1.05.01.2.08.0002 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	241.200.000	3 Laporan	248.200.000
	1.05.01.2.08.0004 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	4.488.616.000	7 Laporan	4.506.894.000

	1.05.01.2.09 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100%	1.803.734.000	100%	2.128.590.000
	1.05.01.2.09.0002 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	1.361.336.000	30 Unit	1.554.436.000
	1.05.01.2.09.0006 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	127.110.000	63 Unit	127.110.000
	1.05.01.2.09.0009 - Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /	2 Unit	266.548.000	2 Unit	398.304.000
	1.05.01.2.09.0010 - Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	20 Unit	48.740.000	20 Unit	48.740.000
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1) Tingkat waktu tanggap (response time rate); 2) Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	15 Menit 100%	6.039.327.000	12 Menit 100%	16.104.022.000
	1.05.04.2.01 – Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya	100%	5.447.764.000	100%	15.512.459.000

	1.05.04.2.01.0002 Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3 Dokumen	337.058.000	3 Dokumen	344.558.000
	1.05.04.2.01.0002 Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	693.040.000	1 Laporan	699.640.000
	1.05.04.2.01.0003 Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan esiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	303.075.000	1 Dokumen	368.653.000
	1.05.04.2.01.0007 Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	105 Orang	418.240.000	6 Orang	423.365.000
	1.05.04.2.01.0017- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	303 Unit	3.696.351.000	445 Unit	13.676.243.000
	1.05.04.2.03 - Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya investigasi kejadian kebakaran	100%	150.000.000	100%	150.000.000
	1.05.04.2.04.0001 - Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000
	1.05.04.2.04 - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100%	441.563.000	100%	441.563.000

	1.05.04.2.04.0001 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100 Orang	57.073.000	100 Orang	57.073.000
	1.05.04.2.04.0002 - Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jurnlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan KebakaranLingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	43 Desa / Kelurahan	384.490.000	43 Desa / Kelurahan	384.490.000

YUDHA BRAMA JAYA

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, dengan memperhatikan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan), kondisi masyarakat dan juga ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Renja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar Tahun 2025 memuat rencana program atau kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode perubahan tahun 2025 sebagai penjabaran dari RKPD Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025 dan juga Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan juga acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar secara terperinci.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, upaya pelaksanaan tugas dan fungsi dapat lebih terencana, terarah dan terukur demi terciptanya tata kelola kepemerintahan yang lebih baik dan akuntabel, serta memberikan pelayanan penanganan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan harapan masyarakat Kota Denpasar. Renja Perubahan Perangkat Daerah diatas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun RKA Perangkat Daerah.

Denpasar, 28 Mei 2025

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota
Denpasar

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

I Made Tirana,SH.,M.H
Pembina/IV/a
NIP. 196711092008011006

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
INSPEKTORAT DAERAH

RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) TAHUN 2025

"Vasudhaiva Kutumbakam"

KATA PENGANTAR



Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Denpasar merupakan media utama yang menuangkan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah direncanakan.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bahwa setiap OPD diwajibkan untuk menyusun Perubahan Renja dengan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kota Denpasar. Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 ini disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja ini, dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2025 pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar, dan kami berharap penyusunan Perubahan Renja ini dapat berguna bagi peningkatan kinerja dan nantinya dapat direalisasikan dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Denpasar.

Denpasar, 11 Juni 2025
Inspektur Daerah Kota Denpasar

Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650726 199201 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI.....ii
DAFTAR GAMBAR.....iii
DAFTAR TABEL.....iv
BAB I PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Landasan Hukum.....4
1.3 Maksud dan Tujuan.....8
1.4 Sistematika Penulisan.....9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025.....11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025.....11
BAB III RENCANA KERJA PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025.....23
BAB IV PENUTUP.....37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 2

DAFTAR TABEL

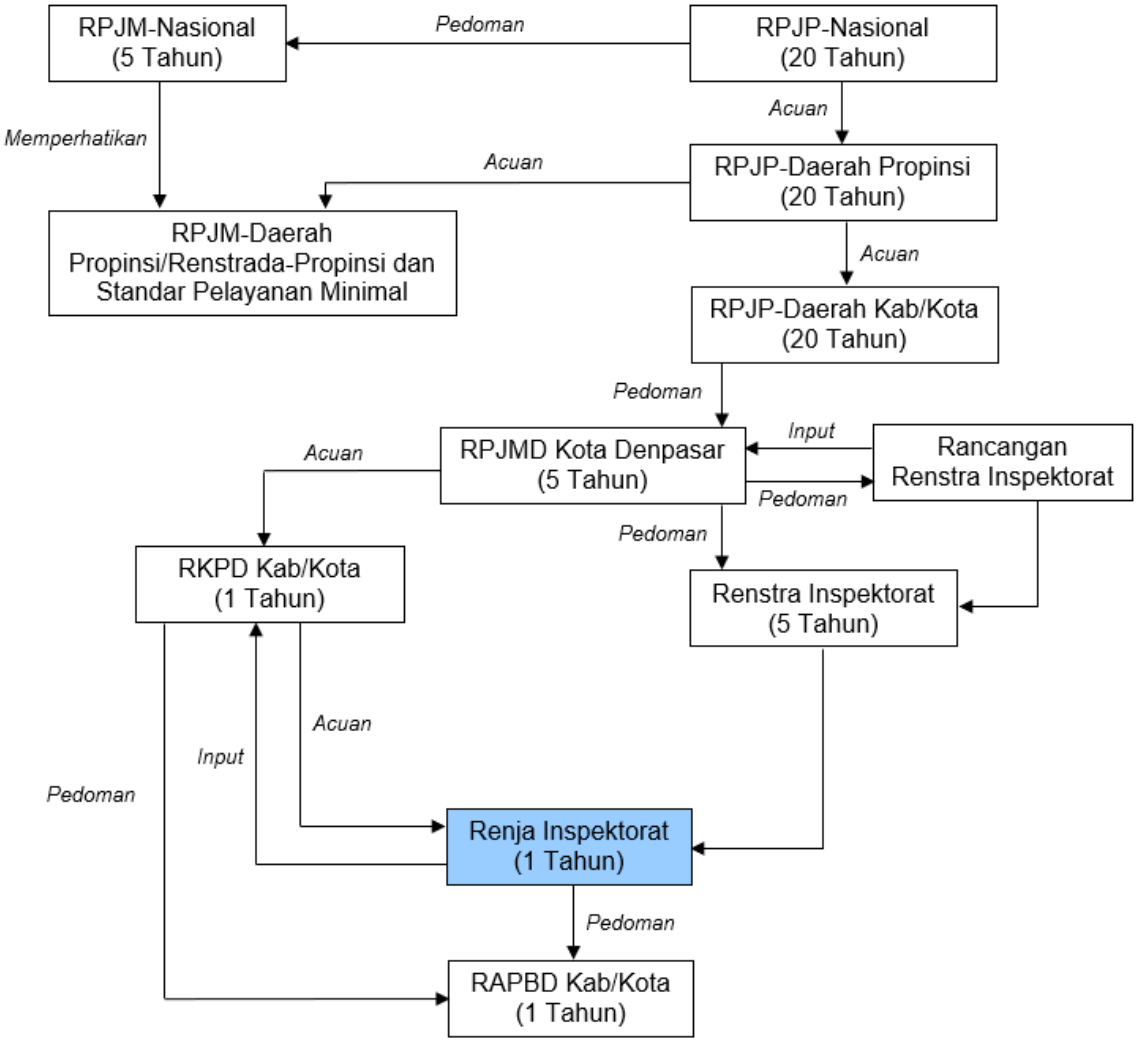
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Denpasar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 15
Tabel 3.1 Rencana Perubahan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025.....24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Renja merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, untuk mengoperasionalkan RKPD dan berupaya mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja pelayanan yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya dapat disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rancangan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kota Denpasar. Visi pembangunan Kota Denpasar sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yaitu: **"Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju".** Visi ini secara filosofis dilandasi oleh filsafat Tri Hita Karana, yaitu harmoni hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. Kerangka filosofis ini diadopsi dan diadaptasi menjadi kerangka dasar.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar No. 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Denpasar mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, dan menyelenggarakan fungsi meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan fungsi di atas, Inspektorat Kota Denpasar menyusun dokumen Rencana Kerja yang mengacu pada misi ke tiga Pemerintah Kota Denpasar yaitu **"Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*)"**.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas Inspektorat Kota Denpasar menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah merupakan pedoman pelaksanaan program kerja / kegiatan yang menunjang pembangunan daerah yang disusun berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tetang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor: SE 900.1.3/6629.A/SJ dan Menteri Keuangan Nomor: SE-1/MK.07/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025;

20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
26. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);

27. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 32);
28. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Daerah Kota Denpasar dimaksudkan sebagai penjabaran dari rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah tahun 2021 – 2026 serta untuk memberikan gambaran yang jelas tentang, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Denpasar.

Tujuan Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam pengawasan pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2025

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan Ingacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; factor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah; kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PROGRAM & KEGIATAN

Rencana Kerja dan pendanaan mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

Secara umum Inspektorat Daerah Kota Denpasar melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021 – 2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun awal dari masa berlaku Renstra 2021 – 2026, yang sekaligus merupakan dukungan terhadap pencapaian target – target RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 diawali dengan melaksanakan evaluasi tingkat capaian pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan triwulan I. Evaluasi ini menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas Inspektorat Daerah Kota Denpasar dalam Rencana Kerja Tahun 2025 dan sasaran RKPD serta RPJMD dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian pembangunan daerah.

Evaluasi sebagaimana dimaksud, meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan pertimbangan :

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar program.
3. Adanya keadaan luar biasa yang mengharuskan adanya perubahan pengeluaran yang dapat mempengaruhi APBD.

Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kota Denpasar memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Hasil evaluasi ini meliputi seluruh program dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 adalah :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2) Program Penyelenggaraan Pengawasan
3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 hal Penguatan Inspektorat Daerah Pengawasan Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 alokasi anggaran pengawasan Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 sebagai berikut.

No.	Jenis Kegiatan	Anggaran Induk	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III
1.	Total Belanja APBD Pergeseran 2025	3.590.924.704.365	3.590.924.704.365	3.591.015.904.365	3.591.015.904.365
2.	Total Pagu Inspektorat Daerah Kota Denpasar	39.237.206.784	40.118.116.523	35.670.451.301	35.670.451.301
	2a. Anggaran Pegawai (Gaji dan Tunjangan)	21.281.728.844	22.162.638.583	21.335.574.361	21.335.574.361
	2b. Anggaran Diklat	5.280.834.000	5.280.834.000	3.280.834.000	3.280.834.000
	2c. Anggaran Sarana dan Prasarana Rutin	8.832.867.940	8.832.867.940	8.799.467.940	8.799.467.940
	2d. Anggaran Program Pengawasan	3.841.776.000	3.841.776.000	2.254.575.000	2.254.575.000
3.	Total Anggaran Pengawasan (2b+2c+2d)	17.955.477.940	17.955.477.940	14.334.876.940	14.334.876.940
4.	Persentase Anggaran Pengawasan terhadap APBD Kota Denpasar (3/1)	0,50%	0,50%	0,40%	0,40%

Pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 hal Penguatan Inspektorat Daerah Pengawasan Pemerintah Daerah disebutkan “untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah dengan klasifikasi 2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; c) diatas Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja dan diatas Rp.15.000.000.000, (lima belas miliar);

Anggaran Induk Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 telah memenuhi amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 hal Penguatan Inspektorat Daerah Pengawasan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 dimana proporsi anggaran pengawasan adalah 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja APBD Kota Denpasar. Per triwulan I Tahun 2025 anggaran pengawasan Inspektorat Daerah Kota Denpasar terhadap APBD Kota Denpasar adalah 0,40% (nol koma empat puluh

persen) dimana beberapa kegiatan mengalami dampak efisiensi yang menyebabkan kebutuhan anggaran pengawasan belum memadai dan tidak sesuai dengan amanat yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 hal Penguatan Inspektorat Daerah Pengawasan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025, hal ini adalah implementasi atas tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Inspektorat Daerah Kota Denpasar mengelola Anggaran Pergeseran III (Per Triwulan I) di Tahun 2025 sebesar Rp.35.670.451.301 yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 29.835.906.301 dan Belanja Modal sebesar Rp. 5.834.545.000 dengan melaksanakan 3 Program, 10 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 total realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kota Denpasar adalah sebesar Rp.5.643.512.640 atau sebesar 15,82% dari total anggaran per triwulan I. Adapun rincian evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Denpasar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN PERGESERAN III TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2025		SISA ANGGARAN TAHUN 2025
					REALISASI KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
	INSPEKTORAT DAERAH			**35.670.451.301**		**5,643,512,640**	**30,026,938,661**
6.01.6.01.0.00.00 1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**33,415,876,301**	**29%**	**5,638,947,640**	**27,776,928,661**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**21,335,574,361**	**25%**	**5,159,353,870**	**16,176,220,491**
6.01.6.01.0.00.001.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	78 orang/bulan	21,335,574,361	77 Orang/ bulan	5,159,353,870	16,176,220,491
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**3,280,834,000**	**25%**	**102,376,348**	**3,178,457,652**

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN PERGESERAN III TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2025		SISA ANGGARAN TAHUN 2025
					REALISASI KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
6.01.6.01.0.00.001.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	78 orang	3,280,834,000	25 orang	102,376,348	3,178,457,652
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**849,723,980**	**23%**	**67,883,964**	781,840,016
6.01.6.01.0.00.001.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18,249,000	20%	-	18,249,000
6.01.6.01.0.00.001.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	124,625,500	25%	12,623,000	112,002,500
6.01.6.01.0.00.001.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	98,604,230	20%	-	98,604,230
6.01.6.01.0.00.001.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	144,788,250	25%	14,810,900	129,977,350

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN PERGESERAN III TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2025		SISA ANGGARAN TAHUN 2025
					REALISASI KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
6.01.6.01.0.00.001.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	120,651,000	20%	-	120,651,000
6.01.6.01.0.00.00 1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 Dokumen	14,400,000	25%	2,430,000	11,970,000
6.01.6.01.0.00.001.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	158,600,000	25%	6,100,000	152,500,000
6.01.6.01.0.00.00 1.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Laporan	169,806,000	25%	31,920,064	137,885,936
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**2,261,045,000**	**25%**	**-**	2,261,045,000
6.01.6.01.0.00.001.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	35 Unit	2,261,045,000	25%	-	2,261,045,000

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN PERGESERAN III TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2025		SISA ANGGARAN TAHUN 2025
					REALISASI KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1,675,118,960**	**25%**	**229,037,308**	1,446,081,652
6.01.6.01.0.00.001.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	196,800,000	25%	33,155,092	163,644,908
6.01.6.01.0.00.001.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	112,560,000	25%	-	112,560,000
6.01.6.01.0.00.001.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1,365,758,960	25%	195,882,216	1,169,876,744
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**4,013,580,000**	**25%**	**80,296,150**	3,933,283,850
6.01.6.01.0.00.001.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	52,300,000	25%	7,500,000	44,800,000

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN PERGESERAN III TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2025		SISA ANGGARAN TAHUN 2025
					REALISASI KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
6.01.6.01.0.00.001.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	30 Unit	438,780,000	25%	60,713,800	378,066,200
6.01.6.01.0.00.001.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	5 Unit	3,522,500,000	25%	12,082,350	3,510,417,650
6.01.6.01.0.00.00 2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Kapabilitas APIP; Maturitas SPIP**	**Level 3; Level 3**	**849,856,000**	**20%**	**1,350,000**	848,506,000
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**100%**	**764,536,000**	**19%**	**1,350,000**	763,186,000
6.01.6.01.0.00.002.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	511,857,000	20%	1,350,000	510,507,000
6.01.6.01.0.00.002.2.01.02.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	81,237,000	25%	-	81,237,000

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN PERGESERAN III TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2025		SISA ANGGARAN TAHUN 2025
					REALISASI KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
6.01.6.01.0.00.002.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	9,823,500	20%	-	9,823,500
6.01.6.01.0.00.002.2.01.04.	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	111,377,000	25%	-	111,377,000
6.01.6.01.0.00.002.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 Laporan	16,669,500	-	-	16,669,500
6.01.6.01.0.00.002.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	33,572,000	25%	-	33,572,000
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**100%**	**85,320,000**	**20%**	**-**	85,320,000
6.01.6.01.0.00.002.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	1 Laporan	14,182,000	20%	-	14,182,000

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN PERGESERAN III TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2025		SISA ANGGARAN TAHUN 2025
					REALISASI KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
6.01.6.01.0.00.002.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8 Laporan	71,138,000	20%	-	71,138,000
6.01.6.01.0.00.003.	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan**	**80 %**	**1,404,719,000**	**24%**	**3,215,000**	1,401,504,000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan**	**100%**	**48,846,000**	**23%**	**2,315,000**	46,531,000
6.01.6.01.0.00.003.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	2 Rekomen-dasi	9,224,000	25%	2,315,000	6,909,000
6.01.6.01.0.00.003.2.01.02.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun	2 Rekomen-dasi	39,622,000	20%	-	39,622,000
	Pendampingan dan Asistensi	**Persentase Pendampingan dan Asistensi**	**100%**	**1,355,873,000**	**25%**	**900,000**	1,354,973,000

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN PERGESERAN III TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2025		SISA ANGGARAN TAHUN 2025
					REALISASI KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
6.01.6.01.0.00.003.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	36 Perangkat Daerah	67,928,000	25%	900,000	67,028,000
6.01.6.01.0.00.003.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 Perangkat Daerah	51,907,000	25%	-	51,907,000
6.01.6.01.0.00.003.2.02.03.	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	1,000,682,000	25%	-	1,000,682,000
6.01.6.01.0.00.003.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	36 Perangkat Daerah	235,356,000	25%	-	235,356,000
TOTAL				**35.670.451.301**		**5,643,512,640**	**30,026,938,661**

BAB III
RENCANA KERJA PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Untuk mencapai target program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Denpasar maka diperlukan adanya perubahan yang memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan yang sudah berjalan. Pada dasarnya, dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan Rencana Kerja Induk Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 dari segi jumlah 3 Program, 10 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan.

Dengan terbitnya Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka Inspektorat Daerah Kota Denpasar telah melakukan penyesuaian dan efisiensi belanja dimana anggaran induk Tahun 2025 sebesar Rp. 39.237.206.784 dan anggaran Pergeseran IV sebesar Rp. 37.310.674.908.

Dalam hal perubahan anggaran terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.269.186.244 yang sebelumnya pagu Anggaran Pergeseran IV sebesar Rp. Rp.37.310.674.908 pada pagu perubahan menjadi Rp.37.579.861.152, penambahan dialokasikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan adanya penambahan Pajak Tunjangan serta Gaji dan Tunjangan PPPK. Rincian Plafon Anggaran Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1 Rencana Perubahan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		Target		Sumber dana	Tahun 2025						Bertambah/ Berkurang
		Induk 2025	Perubahan 2025	Induk 2025	Perubahan 2025		APBD Induk 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13-12
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**												
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**39.237.206.784**	**40.118.116.523**	**35.670.451.301**	**35.670.451.301**	**37.310.674.908**	**37.579.861.152**	**269.186.244**
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretaria-tan**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**100%**		**35.395.430.784**	**36.276.340.523**	**33,415,876,301**	**33,415,876,301**	**35.056.099.908**	**35.604.286.152**	**548.186.244**
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**		**21.281.728.844**	**22.162.638.583**	**21,335,574,361**	**21,335,574,361**	**22.820.107.688**	**23.089.293.932**	**269.186.244**
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 orang /bulan	78 orang /bulan	DAU dan APBD Kota Denpasar	21.281.728.844	22.162.638.583	21,335,574,361	21,335,574,361	22.820.107.688	23.089.293.932	269.186.244

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		Target		Sumber dana	Tahun 2025						Bertambah/ Berkurang
		Induk 2025	Perubahan 2025	Induk 2025	Perubahan 2025		APBD Induk 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13-12
		Tunjangan ASN											
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**		**5.280.834.000**	**5.280.834.000**	**3,280,834,000**	**3,280,834,000**	**3.280.834.000**	**3.280.834.000**	**-**
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	78 orang	78 orang	APBD Kota Denpasar	5.280.834.000	5.280.834.000	3,280,834,000	3,280,834,000	3,280,834,000	3.280.834.000	-
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**		**863.923.980**	**863.923.980**	**849,723,980**	**849,723,980**	**849,723,980**	**858.223.980**	**8.500.000**
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	1 Paket	1 Paket	APBD Kota Denpasar	18.249.000	18.249.000	18,249,000	18,249,000	18,249,000	18.249.000	-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		Target		Sumber dana	Tahun 2025						Bertambah/ Berkurang
		Induk 2025	Perubahan 2025	Induk 2025	Perubahan 2025		APBD Induk 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13-12
		Kantor yang Disediakan	Kantor yang Disediakan										
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perelngkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	APBD Kota Denpasar	136.125.500	136.125.500	124,625,500	124,625,500	124,625,500	124.625.500	-
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	APBD Kota Denpasar	98.604.230	98.604.230	98,604,230	98,604,230	98,604,230	98.604.230	-
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	APBD Kota Denpasar	144.788.50	144.788.50	144,788,250	144,788,250	144,788,250	144.788.250	-
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	APBD Kota Denpasar	120.651.000	120.651.000	120,651,000	120,651,000	120,651,000	120.651.000	-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		Target		Sumber dana	Tahun 2025						Bertambah/ Berkurang
		Induk 2025	Perubahan 2025	Induk 2025	Perubahan 2025		APBD Induk 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13-12
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	APBD Kota Denpasar	14.400.000	14.400.000	14,400,000	14,400,000	14,400,000	14.400.000	-
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	APBD Kota Denpasar	158.600.000	158.600.000	158,600,000	158,600,000	158,600,000	167.100.000	8.500.000
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	APBD Kota Denpasar	172.506.000	172.506.000	169,806,000	169,806,000	169,806,000	169.806.000	-
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**100%**	**100%**		**2.261.045.000**	**2.261.045.000**	**2,261,045,000**	**2,261,045,000**	**2,261,045,000**	**2.531.545.000**	**270.500.000**

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		Target		Sumber dana	Tahun 2025						Bertambah/ Berkurang
		Induk 2025	Perubahan 2025	Induk 2025	Perubahan 2025		APBD Induk 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13-12
	Pemerintah Daerah	**Urusan Pemerintah Daerah**	**Urusan Pemerintah Daerah**										
6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 Unit	35 Unit	APBD Kota Denpasar	2.261.045.000	2.261.045.000	2,261,045,000	2,261,045,000	2,261,045,000	2.531.545.000	270.500.000
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**		**1.694.318.960**	**1.694.318.960**	**1,675,118,960**	**1,675,118,960**	**1.830.809.240**	**1.830.809.240**	**-**
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	APBD Kota Denpasar	216.000.000	216.000.000	196,800,000	196,800,000	196,800,000	196.800.000	-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		Target		Sumber dana	Tahun 2025						Bertambah/ Berkurang
		Induk 2025	Perubahan 2025	Induk 2025	Perubahan 2025		APBD Induk 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13-12
		yang Disediakan											
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perelengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perelengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	APBD Kota Denpasar	112.560.000	112.560.000	112,560,000	112,560,000	112,560,000	112.560.000	-
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	APBD Kota Denpasar	1.365.758.960	1.365.758.960	1,365,758,960	1,365,758,960	1.521.449.240	1.521.449.240	-
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**		**4.013.580.000**	**4.013.580.000**	**4,013,580,000**	**4,013,580,000**	**4,013,580,000**	**4.013.580.000**	**-**

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		Target		Sumber dana	Tahun 2025						Bertambah/ Berkurang
		Induk 2025	Perubahan 2025	Induk 2025	Perubahan 2025		APBD Induk 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13-12
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	APBD Kota Denpasar	52.300.000	52.300.000	52,300,000	52,300,000	52,300,000	52.300.000	-
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	APBD Kota Denpasar	438.780.000	438.780.000	438,780,000	438,780,000	438,780,000	438.780.000	-
6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	5 Unit	5 Unit	APBD Kota Denpasar	3.522.500.000	3.522.500.000	3,522,500,000	3,522,500,000	3,522,500,000	3.522.500.000	-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		Target		Sumber dana	Tahun 2025						Bertambah/ Berkurang
		Induk 2025	Perubahan 2025	Induk 2025	Perubahan 2025		APBD Induk 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13-12
	Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi										
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Kapabilitas APIP; Maturitas SPIP**	**Kapabilitas APIP; Maturitas SPIP**	**Level 3; Level 3**	**Level 3; Level 3**		**1.603.926.000**	**1.603.926.000**	**849,856,000**	**849,856,000**	**849,856,000**	**561.856.000**	**-288.000.000**
6.01.02.2.01.0001	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**100%**	**100%**		**1.518.606.000**	**1.518.606.000**	**764,536,000**	**764,536,000**	**764,536,000**	**476.536.000**	**-288.000.000**
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	APBD Kota Denpasar	1.058.411.000	1.058.411.000	511,857,000	511,857,000	511,857,000	223.857.000	-288.000.000
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	APBD Kota Denpasar	81.237.000	81.237.000	81,237,000	81,237,000	81,237,000	81.237.000	-288.000.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		Target		Sumber dana	Tahun 2025						Bertambah/ Berkurang
		Induk 2025	Perubahan 2025	Induk 2025	Perubahan 2025		APBD Induk 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13-12
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	APBD Kota Denpasar	9.823.500	9.823.500	9,823,500	9,823,500	9,823,500	9.823.500	-288.000.000
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	APBD Kota Denpasar	318.893.000	318.893.000	111,377,000	111,377,000	111,377,000	111.377.000	-
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 Laporan	1 Laporan	APBD Kota Denpasar	16.669.500	16.669.500	16,669,500	16,669,500	16,669,500	16.669.500	-
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen	APBD Kota Denpasar	33.572.000	33.572.000	33,572,000	33,572,000	33,572,000	33.572.000	-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		Target		Sumber dana	Tahun 2025						Bertambah/ Berkurang
		Induk 2025	Perubahan 2025	Induk 2025	Perubahan 2025		APBD Induk 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13-12
		Pemeriksaan APIP											
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**100%**	**100%**		**85.320.000**	**85.320.000**	**85,320,000**	**85,320,000**	**85,320,000**	**85.320.000**	**-**
6.01.02.2.02.0001	Penanaganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Jumlah Laporan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	1 Laporan	1 Laporan	APBD Kota Denpasar	14.182.000	14.182.000	14,182,000	14,182,000	14,182,000	14.182.000	-
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8 Laporan	8 Laporan	APBD Kota Denpasar	71.138.000	71.138.000	71,138,000	71,138,000	71,138,000	71.138.000	-
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,**	**Persentase OPD yang didampingi / yang**	**Persentase OPD yang didampingi / yang**	**80 %**	**80 %**		**2.237.850.000**	**2.237.850.000**	**1,404,719,000**	**1,404,719,000**	**1,404,719,000**	**1.413.719.000**	**9.000.000**

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		Target		Sumber dana	Tahun 2025						Bertambah/ Berkurang
		Induk 2025	Perubahan 2025	Induk 2025	Perubahan 2025		APBD Induk 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13-12
	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**mendapat pendampingan**	**mendapat pendampingan**										
6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan**	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan**	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan**	**100%**	**100%**		**48.846.000**	**48.846.000**	**48,846,000**	**48,846,000**	**48,846,000**	**48.846.000**	**-**
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	2 Rekomen-dasi	2 Rekomen-dasi	APBD Kota Denpasar	9.224.000	9.224.000	9,224,000	9,224,000	9,224,000	9.224.000	-
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomen-dasi	2 Rekomen-dasi	APBD Kota Denpasar	39.622.000	39.622.000	39,622,000	39,622,000	39,622,000	39.622.000	-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		Target		Sumber dana	Tahun 2025						Bertambah/ Berkurang
		Induk 2025	Perubahan 2025	Induk 2025	Perubahan 2025		APBD Induk 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13-12
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Pendampingan dan Asistensi**	**100%**	**100%**		**2.189.004.000**	**2.189.004.000**	**1,355,873,000**	**1,355,873,000**	**1,355,873,000**	**1.364.873.000**	**9.000.000**
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	APBD Kota Denpasar	201.638.000	201.638.000	67,928,000	67,928,000	67,928,000	67.928.000	-
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	APBD Kota Denpasar	51.907.000	51.907.000	51,907,000	51,907,000	51,907,000	51.907.000	-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		Target		Sumber dana	Tahun 2025						Bertambah/ Berkurang
		Induk 2025	Perubahan 2025	Induk 2025	Perubahan 2025		APBD Induk 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13-12
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	APBD Kota Denpasar	1.512.252.000	1.512.252.000	1,000,682,000	1,000,682,000	1,000,682,000	1.009.682.000	9.000.000
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	APBD Kota Denpasar	423.207.000	423.207.000	235,356,000	235,356,000	235,356,000	235.356.000	-
TOTAL							**39.237.206.784**	**40.118.116.523**	**35.670.451.301**	**35.670.451.301**	**37.310.674.908**	**37.579.861.152**	**269.186.244**

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Denpasar merupakan implementasi dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Denpasar disusun dan ditetapkan untuk memfokuskan peningkatan peran dari Inspektorat dalam menghadapi tantangan Pemberantasan Korupsi. Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Denpasar setiap tahun akan dievaluasi sebagai dasar penyusunan Perubahan Renja tahun berikutnya, sehingga hasil pencapaian dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tiap tahunnya.

Rancangan Perubahan Renja Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2025 ini dilaksanakan konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Daerah Kota Denpasar untuk mampu meningkatkan kinerja dari proses yang merupakan *output* pengawasan dan sebagai dokumen Rencana Aksi yang memuat prioritas program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Walikota serta mendukung arahan prioritas Pemerintah Daerah.

Inspektur Daerah Kota Denpasar

Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19650726 199201 2 001



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN

RENCANA KERJA

BAPPEDA KOTA DENPASAR

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugrah-Nya, penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemeritah Daerah mengamanatkan bahwa perubahan RKPD dan rencana kerja perangkat daerah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar dalam pelaksanaan Program/Kegiatan tahun 2025 sehingga sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja ini dapat terpenuhi sesuai dengan prioritas pembangunan dan target yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025 ini.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar, 23 Juni 2025
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Denpasar

I Putu Wisnu Wijaya Kusuma ST.,MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19671007 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PEDAHULUAN **4**

1.1 LATAR BELAKANG 4

1.2 LANDASAN HUKUM 5

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 8

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 8

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... **10**

2.1 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 10

2.2 PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH DALAM PELAKSANAAN HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 13

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA DENPASAR **15**

3.1 TUJUAN DAN SASARAN 15

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025 16

BAB IV PENUTUP **21**

4.1 KAIDAH- KAIDAH PELAKSANAAN 21

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT 22

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2025 (sampai dengan Triwulan I) 11
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran 15
Tabel 3. 2 Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Perubahan Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025 17

BAB I
PEDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwa Renja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya perubahan RKPD Kota Denpasar tahun 2025 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan rancangan perubahan renja perangkat daerah dilakukan setelah perangkat daerah menerima surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan renja perangkat daerah dan berpedoman pada :

a. rancangan perubahan RKPD.
b. Hasil pengendaliaan pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan.

Penyusunan rancangan perubahan renja perngkat daerah sebagaimana

dimaksud terdiri atas:

a. perumusan rancangan perubahan perangkat daerah.
b. Penyajian rancangan perubahan renja perangkat daerah.
c. Rancangan perubahan renja perangkat daerah.
d. Penyusunan rancangan akhir renja perangkat daerah.
e. Penetapan perubahan renja perangkat daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 adalah :

a. Undang–Undang Nomor 1 tahun 1992, tentang Pembentukan Kota Madya Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
b. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), dengan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
h. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
j. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 1114);
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

o. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2; Tambaran Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
p. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
q. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
r. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
s. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;
t. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 53);
u. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
v. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025 disusun untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah khususnya yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan tahun 2025 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dalam rangka mengatasi kesenjangan dan ketidaksesuaian yang terjadi setelah dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun 2025. Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 adalah :

1. Untuk merencanakan berbagai kebijakan dan strategi percepatan pembangunan daerah dalam hal perencanaan pembangunan kearah yang lebih disesuaikan dengan kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin komplek;
2. Sebagai dasar atau acuan khususnya bagi Bappeda Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
3. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dalam melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi;
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan , penganggaran,Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Bappeda Kota Denpasar, hal- hal yang melatar belakangi penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Bappeda, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappeda.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Bappeda.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA

3.1. Menguraikan tentang tujuan dan sasaran

3.2. Menguraikan tentang Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

3.3. Menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

4.1. Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Kinerja Bappeda merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa input, output, dan outcome pada tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara lebih langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimal indikator output.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun pada Rencana Kerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Triwulan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar. Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kota Denpasar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kota Denpasar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Evaluasi renja sampai dengan triwulan I dimaksudkan untuk mengetahui faktor – faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian / perubahan rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian

pelaksanaan renja perangkat daerah pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Bappeda Kota Denpasar sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2025 (Realisasi Sampai TW I 2025)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
				Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (RP)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**10.910.974.071,00**	**19,93%**	**2.175.039.521,00**	8.735.934.550,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah*	**8.703.339.740,00**	**21,24%**	**1.848.472.176,00**	6.854.867.564,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.703.339.740,00	**21,24%**	1.848.472.176,00	6.854.867.564,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor*	**250.508.750,00**	**17,93%**	**44.905.469,00**	205.603.281,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	250.508.750,00	**17,93%**	44.905.469,00	205.603.281,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	**868.478.051,00**	**16,13%**	**140.125.347,00**	728.352.704,00
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	235.900.000,00	**15,19%**	35.825.588,00	200.074.412,00
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	632.578.051,00	**16,49%**	104.299.759,00	528.278.292,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah*	**1.088.647.530,00**	**13,00%**	**141.536.529,00**	947.111.001,00
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	523.836.840,00	**14,78%**	77.422.490,00	446.414.350,00
6	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	174.160.710,00	**13,83%**	24.093.100,00	150.067.610,00
7	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	390.649.980,00	**10,24%**	40.020.939,00	350.629.041,00
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	**Tolok Ukur Indikator Program (Outcome) ; Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat**	**2.410.935.670,00**	**18,89%**	**455.523.374,00**	1.955.412.296,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
				Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (RP)	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase dokumen perencanaan Kota yang ditetapkan dengan Perkada dengan tepat waktu; Persentase pemenuhan dokumen kota Denpasar; Tolok ukur indikator kegiatan (Output)*	**2.357.383.670,00**	**19,16%**	**451.617.574,00**	1.905.766.096,00
8	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	111.308.000,00	**367,65%**	409.225.500,00	- 297.917.500,00
9	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	578.057.170,00	**1,08%**	6.221.900,00	571.835.270,00
10	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1.668.018.500,00	**2,17%**	36.170.174,00	1.631.848.326,00
	Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Persentase capaian program pembangunan daerah Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan Persentase Pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah*	**4.534.000,00**	**42,15%**	**1.911.200,00**	2.622.800,00
11	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4.534.000,00	**42,15%**	1.911.200,00	2.622.800,00
	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumenAnalisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Persentase pemenuhan analisa data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	**49.018.000,00**	**4,07%**	**1.994.600,00**	47.023.400,00
12	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	49.018.000,00	**4,07%**	1.994.600,00	47.023.400,00
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**Presentase capaian Indikator Kinerja Utama perangkat daerah Kota Denpasar**	**664.811.840,00**	**14,25%**	**94.725.916,00**	570.085.924,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan*	**101.115.710,00**	**20,23%**	**20.452.554,00**	80.663.156,00
13	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	101.115.710,00	**20,23%**	20.452.554,00	80.663.156,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Presentase penjabaran program/ kegiatan/ subkegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam Renja Perangkat Daerah*	**111.990.565,00**	**29,85%**	**33.424.031,00**	78.566.534,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
				Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (RP)	
14	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	73.006.210,00	**29,59%**	21.604.754,00	51.401.456,00
15	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasi Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	38.984.355,00	**30,32%**	11.819.277,00	27.165.078,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Presentase penjabaran program/ kegiatan/ subkegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam Renja Perangkat Daerah*	**451.705.565,00**	**9,04%**	**40.849.331,00**	410.856.234,00
16	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	327.425.000,00	**2,43%**	7.955.000,00	319.470.000,00
17	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	47.607.355,00	**28,91%**	13.764.027,00	33.843.328,00
18	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	76.673.210,00	**24,95%**	19.130.304,00	57.542.906,00
Jumlah			**13.986.721.581,00**	**19,48%**	**2.725.288.811,00**	11.261.432.770,00

2.2 PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH DALAM PELAKSANAAN HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Berdasarkan tabel 2.1 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja sampai dengan tahun 2025 Triwulan I secara umum realisasi capaian program, kegiatan dan subkegiatan secara fisik sudah mencapai 26,55% sesuai dari target yang fisik ditetapkan sebesar 27,28% sedangkan nilai dari realisasi keuangan hingga triwulan I tahun 2025 baru mencapai 21,57% dari target yang keuangan ditetapkan sebesar 27,28%. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja didasarkan pada :

a. Penyesuaian anggaran
b. Mengakomodir kegiatan yang belum mendapatkan anggaran di induk pada penyusunan kegiatan di perubahan.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas maka tindakan perencanaan yang dilakuakan adalah melakukan perubahan Renja tahun 2025 yang

berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Denpasar tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada perubahan Renja tahun 2025 sebagai dasar untuk perubahan Rencana Kerja anggaran tahun anggaran 2025 pada mekanisme perubahan APBD Kota Denpasar tahun 2025.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA DENPASAR

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, efisien dan terintegrasi dan spasial yang dilaksanakan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi antara hulu dan hilir, integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi dan pembagian sumber pendanaan APBD dan Non APBD)

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan tersebut perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021 – 2026 . Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025 , target tujuan dan sasaran Bappeda Kota Denpasar tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	
		RENJA 2025	RENJA-P 2025
Tujuan : Terwujudnya perencanaan pembangunan Kota Denpasar yang berkualitas, bersenergi dan kredibel			
Sasaran : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Presentase sinergitas perencanaan	100%	100%
	2. Presentase konsistensi perencanaan	100%	100%
	3. Nilai SAKIP pada Area Perencanaan	24.60	24,60

Memperhatikan tabel 3.1 penyesuaian target tujuan/sasaran Perubahan RENJA 2025 diatas , menunjukkan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Bappeda Kota Denpasar tidak mengalami perubahan meskipun terdapat penyesuaian anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025.

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025 ,maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni Bappeda Kota Denpasar pada saat sebelum perubahan dilaksanakan , dan target indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kota Denpasar pada perubahan APBD 2025 Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 2 Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Perubahan Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	100%	100%	**10.910.974.071,00**	**11.900.687.149,00**	989.713.078,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah*	100%	100%	**8.703.339.740,00**	**9.422.234.063,00**	718.894.323,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang/bulan	30 orang/bulan	8.703.339.740,00	9.422.234.063,00	718.894.323,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor*	100%	100%	**250.508.750,00**	**461.962.750,00**	211.454.000,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13 Paket	250.508.750,00	461.962.750,00	211.454.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100%	100%	**868.478.051,00**	**792.517.576,00**	- 75.960.475,00
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	235.900.000,00	235.900.000,00	-
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	632.578.051,00	556.617.576,00	- 75.960.475,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah*	100%	100%	**1.088.647.530,00**	**1.223.972.760,00**	135.325.230,00
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	523.836.840,00	531.096.840,00	7.260.000,00
6	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 Unit	139 Unit	174.160.710,00	126.707.140,00	- 47.453.570,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)
7	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	390.649.980,00	566.168.780,00	175.518.800,00
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	**Tolok Ukur Indikator Program (Outcome) ; Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat**	100%	100%	**2.410.935.670,00**	**3.144.240.780,00**	733.305.110,00
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase dokumen perencanaan Kota yang ditetapkan dengan perkada dengan tepat waktu Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Kota Denpasar*	100%	100%	**2.357.383.670,00**	**2.923.528.780,00**	566.145.110,00
8	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	111.308.000,00	111.308.000,00	-
9	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	578.057.170,00	543.663.280,00	- 34.393.890,00
10	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	2 Dokumen	1.668.018.500,00	2.268.557.500,00	600.539.000,00
	Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Persentase capaian program pembangunan daerah Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan Persentase Pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah*	5 Laporan	5 Laporan	**4.534.000,00**	**4.534.000,00**	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)
11	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	5 Laporan	4.534.000,00	4.534.000,00	-
	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumenAnalisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Persentase pemenuhan analisa data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%	**49.018.000,00**	**216.178.000,00**	167.160.000,00
12	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 buku	3 buku	49.018.000,00	216.178.000,00	167.160.000,00
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**Presentase capaian Indikator Kinerja Utama perangkat daerah Kota Denpasar**	100%	100%	**664.811.840,00**	**702.865.410,00**	38.053.570,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan*	100%	100%	**101.115.710,00**	**76.877.140,00**	- 24.238.570,00
13	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	12 laporan	12 laporan	101.115.710,00	76.877.140,00	- 24.238.570,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Presentase penjabaran program/ kegiatan/ subkegiatan Bidang Perekonomian dan SDA dalam Renja Perangkat Daerah*	100%	100%	**111.990.565,00**	**78.235.210,00**	- 33.755.355,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)
14	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	16 Laporan	16 Laporan	73.006.210,00	50.502.640,00	- 22.503.570,00
15	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	6 Laporan	6 Laporan	38.984.355,00	27.732.570,00	- 11.251.785,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Presentase penjabaran program/ kegiatan/ subkegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam Renja Perangkat Daerah*	100%	100%	**451.705.565,00**	**547.753.060,00**	96.047.495,00
16	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	327.425.000,00	327.425.000,00	-
17	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 Laporan	6 Laporan	47.607.355,00	119.887.570,00	72.280.215,00
18	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	18 Laporan	18 Laporan	76.673.210,00	100.440.490,00	23.767.280,00
Jumlah					**13.986.721.581,00**	**15.747.793.339,00**	1.761.071.758,00

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah program dan kegiatan , indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Denpasar Tahun 2025 dan RKPD Perubahan Kota Denpasar Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1 KAIDAH- KAIDAH PELAKSANAAN

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025 merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu , dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Kota Denpasar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik- baiknya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksnaaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dngan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Denpasar, 23 Juni 2025
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Denpasar

I Putu Wisnu Wijaya Kusuma ST.,MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19671007 199703 1 004

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

RENCANA KERJA (RENJA)

PERUBAHAN

2025

Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar Tahun 2025. Rancangan Akhir Renja ini merupakan penjabaran pelaksanaan dari Renstra Bapenda Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda Kota Denpasar.

Rancangan Akhir Renja Bapenda Kota Denpasar Tahun 2025 ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda Kota Denpasar Tahun 2025 Triwulan II dan uraian mengenai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Di dalamnya memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kritik dan saran untuk kesempurnaan Rancangan Akhir Renja ini sangat kami harapkan. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Rancangan Akhir Renja ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Denpasar, 6 November 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar

Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TRIWULAN II TAHUN 2025 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar 12
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 13
BAB IV PENUTUP 21

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Setiap Perangkat Daerah dapat menyusun Perubahan Renja dengan merujuk pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan dilakukan akibat adanya ketidaksesuaian rencana kerja dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta perubahan kebijakan nasional maupun provinsi, sehingga mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung. Menindaklanjuti hal tersebut, penyusunan Perubahan Renja Bapenda Kota Denpasar Tahun 2025 dilakukaan dengan tetap merujuk pada Renstra Bapenda Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026.

Adapun dokumen Rancangan Akhir Renja Bapenda Kota Denpasar Tahun 2025 memuat perubahan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja. Hal ini dilakukan atas manfaat dan kebutuhan serta kondisi perekonomian masyrakat tentunya masih

adanya pengaruh dan mempengaruhi Penerimaan Pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

Rancangan Akhir juga dilakukan dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatkan anggaran yang tersedia sehingga menghasilkan *output* dan memberikan *outcome* yang mendukung dalam pencapaian target Renstra Bapenda Kota Denpasar.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rancangan Akhir Renja Bapenda Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 –

20025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 4) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889/2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
23. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun Tahun 2022 Nomor 22);
24. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rancangan Akhir Renja Bapenda Kota Denpasar Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Bapenda Kota Denpasar dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan Bapenda Kota Denpasar Tahun 2025.

2. Tujuan

Tujuan Rancangan Akhir Renja Bapenda Kota Denpasar Tahun 2025 adalah :

- Sebagai penjabaran dari rencana strategis Bapenda Kota Denpasar tahun 2021 – 2026
- Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana perubahan kegiatan dan anggaran Bapenda Kota Denpasar tahun 2025
- Mengakomudir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan
- Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Renja Bapenda Kota Denpasar Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada bab ini menjelaskan mengenai Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sampai dengan Triwulan II tahun 2025 dan Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai rencana kerja dan pendanaan perubahan tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah

Evaluasi Pelaksanaan renja merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis Acrual. Penganggaran berbasis Acrual merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan Bapenda Kota Denpasar dalam menyusun program kegiatan.

Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Bapenda Kota Denpasar telah melaksanakan program/kegiatan untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai dengan gambaran sebagai berikut :

1. **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

   Dalam Pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2025 semua kegiatan sudah dapat dilaksanakan dan memenuhi terget kinerja yang telah ditetapkan

2. **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

   Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sampai Triwulan II Tahun Anggaran 2025 sudah dilaksanakan dengan realisasi fisik mencapai 28,43% sedangkan realisasi keuangan sebesar 41.35%

3. **Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

   Dalam pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan sudah mencapai target yang diinginkan.

4. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan**

   Faktor–faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja program /kegiatan antara lain :

   - Berpengaruhnya pada kondisi perekonomian masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi dengan penggeliatan perekonomian yang ada tentunya masih adanya pengaruh terhadap penerimaan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

5. **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**

   Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang telah ditetapkan yaitu, untuk menunjang pendanaan belanja dalam rangka pembangunan di Kota Denpasar.

6. **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut**

   Tetap melaksanakan kebijakan dengan upaya pengembangan inovasi dan pengalian potensi dalam melaksanakan tatanan adaptasi kebiasaan Bali era baru sebagai upaya-upaya dalam peningkatan PAD.

Evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda Kota Denpasar sampai Triwulan II tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025 (Pergeseran VI)		REALISASI TRIWULAN III TAHUN 2025	
			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7
	KEUANGAN			**65.971.717.574**	**72,04%**	**47.527.282.157**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Outcome: Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan***		**58.352.027.574**	**76,13%**	**44.421.474.967**
1	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Output: Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN***	**100%**	**44.525.514.341**	**86,54%**	**38.531.934.619**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN*	*1 Tahun*	44.525.514.341	86,54%	38.531.934.619
2	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Output: Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**100%**	**575.395.150**	**74,67%**	**429.632.366**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025 (Pergeseran VI)		REALISASI TRIWULAN III TAHUN 2025	
			K	Rp	K	Rp
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah*	*12 Bulan*	16.555.500	96,48%	15.972.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah*	*12 Bulan*	264.775.250	69,25%	183.349.686
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah*	*12 Bulan*	43.435.000	78,74%	34.202.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah*	*12 Bulan*	215.383.400	83,35%	179.530.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan*	*1 Tahun*	17.280.000	55,75%	9.633.600
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Bulan*	17.966.000	38,66%	6.945.080

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025 (Pergeseran VI)		REALISASI TRIWULAN III TAHUN 2025	
			K	Rp	K	Rp
3	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Output: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**100%**	**7.945.551.709**	**20,27%**	**1.610.261.000**
	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Lainnya	*Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya Perangkat Daerah*	*1 Tahun*	7.945.551.709	20,27%	1.610.261.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Ouput: Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100%**	**3.773.283.374**	**76,39%**	**2.882.252.009**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah*	*12 Bulan*	271.589.100	57,06%	154.971.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*12 Bulan*	646.960.000	56,06%	362.681.011
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*12 Bulan*	2854734274	82,83%	2.364.599.998

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025 (Pergeseran VI)		REALISASI TRIWULAN III TAHUN 2025	
			K	Rp	K	Rp
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Ouput: Persentase Barang Milik Daerah yang Siap Pakai***	**100%**	**1.532.283.000**	**63,13%**	**967.394.973**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*12 bulan*	929.688.000	77,30%	718.604.638
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat Daerah*	*12 Bulan*	180.695.000	31,90%	57.640.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud yang Terlaksana	*Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Yang Terlaksana*	*1 Tahun*	30.000.000	0,00%	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*1 Tahun*	366.900.000	52,10%	191.150.335

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025 (Pergeseran VI)		REALISASI TRIWULAN III TAHUN 2025	
			K	Rp	K	Rp
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik*	*100%*	20.000.000	0,00%	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendujung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik*	*100%*	5.000.000	0,00%	-
II	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Outcome: Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah***	**100%**	**7.619.690.000**	**40,76%**	**3.105.807.190**
1	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	***Output: Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah***	**100%**	**7.619.690.000**	**40,76%**	**3.105.807.190**
	Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah	*Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah*	*1 Tahun*	974.900.000	37,67%	367.271.690

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025 (Pergeseran VI)		REALISASI TRIWULAN III TAHUN 2025	
			K	Rp	K	Rp
	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	*Tersedianya Analisa dan Kebijakan Pajak Daerah*	*1 Tahun*	1.467.750.000	77,09%	1.131.463.000
	Sub Kegiatan Penagihan Piutang Pajak Daerah	*Tertagihnya Piutang Pajak Daerah*	*1 Tahun*	582.870.000	82,45%	480.547.500
	Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	*Keberatan Pajak Daerah yang Terselesaikan*	*1 Tahun*	3.150.000	100,00%	3.150.000
	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*	*1 Tahun*	4.033.920.000	25,65%	1.034.875.000
	Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*	*1 Tahun*	557.100.000	15,89%	88.500.000

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik mewajibkan setiap Penyelenggara Pelayanan publik mengikut sertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel.

Peran serta masyarakat tercantum dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang secara tegas mengatur partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Peran serta masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik serta peran aktif dalam pembahasan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan serta penilaian pelayanan publik.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yeng telah ditetapkan dalam rencana strategis Bapenda Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan sekretariat Bapenda Kota Denpasar. Dalam perjalanannya perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja yang tetap mengacu pada sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar maupun Renstra Bapenda Kota Denpasar. Untuk mencapai sasaran dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, adapun Perubahan Renja Tahun 2025 yang akan di lakukan oleh Bapenda Kota Denpasar sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rencana Program / Kegiatan dan Pendanaan
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

NO	URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA	PAGU APBD INDUK TAHUN 2025	PERGESERAN VI	BERTAMBAH DAN BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					**86.423.704.378**	**65.971.717.574**	**20.451.986.804**
Program:							
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan**	**100%**		**80.664.664.378**	**58.352.027.574**	**22.312.636.804**
Kegiatan :							
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**100%**		**69.835.435.966**	**44.525.514.341**	**25.309.921.625**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	183 Orang/ bulan	DAU & PAD	69.835.435.966	44.525.514.341	25.309.921.625
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0		-	-	-
2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrai Umum Perangkat Daerah**	**100 %**		**521.556.400.000**	**575.395.150**	**520.981.004.850**

NO	URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA	PAGU APBD INDUK TAHUN 2025	PERGESERAN VI	BERTAMBAH DAN BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	11 Paket	PAD	16.555.500	16.555.500	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	113 Paket	PAD	210.944.250	264.775.250	-53.831.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	26 Paket	PAD	43.035.000	43.435.000	-400.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan	22 Paket	PAD	185.209.650	215.383.400	-30.173.750
	Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Dokumen	PAD	17.280.000	17.280.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SIPD	15 Laporan	PAD	48.532.000	17.966.000	30.566.000
3	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**100 %**		**4.862.303.989**	**7.945.551.709**	**-3.083.247.720**
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Aset Tetap Lainnya	81 Unit	SILVA	4.862.303.989	7.945.551.709	-3.083.247.720

NO	URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA	PAGU APBD INDUK TAHUN 2025	PERGESERAN VI	BERTAMBAH DAN BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**		**4.131.835.032**	**3.773.283.374**	**358.551.658**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Jasa Surat Menyurat	59 Laporan	PAD	230.300.265	271.589.100	-41.288.835
	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	7 Laporan	PAD	925.200.000	646.960.000	278.240.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	19 Laporan	PAD	2.976.334.758	2.854.734.274	121.600.484
5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Siap Pakai**	**100 %**		**1.313.533.000**	**1.532.283.000**	-218.750.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	140 Unit	PKB	923.688.000	929.688.000	-6.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	PAD	124.345.000	180.695.000	-56.350.000

NO	URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA	PAGU APBD INDUK TAHUN 2025	PERGESERAN VI	BERTAMBAH DAN BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	PAD	30.000.000	30.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	BBNKB	210.500.000	366.900.000	-156.400.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Perasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	BBNKB	20.000.000	20.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Perasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	BBNKB	5.000.000	5.000.000	
Program:			**41.00 %**				
II	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah**	**100 %**		**5.759.040.000**	**7.619.690.000**	**-1.860.650.000**
Kegiatan:							
1	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah**	**100 %**		**5.759.040.000**	**7.619.690.000**	**-1.860.650.000**
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	16 Dokumen	PAD	852.400.000	974.900.000	-122.500.000

NO	URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA	PAGU APBD INDUK TAHUN 2025	PERGESERAN VI	BERTAMBAH DAN BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Analisa dan Kebijakan Pajak Daerah	14 Dokumen	PAD	1.262.450.000	1.467.750.000	-205.300.000
	Penagihan Pajak Daerah	Tertagihnya Piutang Pajak Daerah	10 Dokumen	PAD	405.120.000	582.870.000	-177.750.000
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Keberatan Pajak Daerah yang Terselesaikan	3 Dokumen	PAD	3.150.000	3.150.000	0
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	PAD	3.098.820.000	4.033.920.000	-935.100.000
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	7 Laporan	PAD	137.100.000	557.100.000	-420.000.000
TOTAL JUMLAH					**86.423.704.378**	**65.971.717.574**	**20.451.986.804**

Sesuai dengan tabel diatas adapun pagu dana yang bergeser adalah sebesar **Rp. 65.971.717.574** yang akan dipergunakan untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Perubahan Renja Bapenda Kota Denpasar Tahun 2025 disusun dengan kebutuhan pagu perubahan sebesar **65.971.717.574** (*enam puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah*) serta pengembalian dana sebesar Rp. **20.451.986.804** (*dua puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah*) dengan harapan dapat membantu pencapaian target Pendapatan yang menjadi tanggung jawab Bapenda Kota Denpasar dan tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Bapenda Kota Denpasar yang akhirnya dapat dipergunakan untuk membiayai Tugas Umum Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Denpasar, 6 November 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar

Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3/1187/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan rencana kerja Perangkat Daerah, sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perangkat daerah untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan tugas dan fungsinya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Kota Denpasar Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);

7. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencan Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Juni 2025

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 19 JUNI 2025
NOMOR : 100.3.3/1187/HK/2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

1. PERUBAHAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
2. PERUBAHAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
3. PERUBAHAN RENJA RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR
4. PERUBAHAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2025
5. PERUBAHAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
6. PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
7. PERUBAHAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
8. PERUBAHAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
9. PERUBAHAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
10. PERUBAHAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2025
11. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
12. PERUBAHAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
13. PERUBAHAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
14. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
15. PERUBAHAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
16. PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
17. PERUBAHAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
18. PERUBAHAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2025
19. PERUBAHAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
20. PERUBAHAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
21. PERUBAHAN RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
22. PERUBAHAN RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
23. PERUBAHAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
24. PERUBAHAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
25. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

26. PERUBAHAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
27. PERUBAHAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
28. PERUBAHAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
29. PERUBAHAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
30. PERUBAHAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
31. PERUBAHAN RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
32. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
33. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2025
34. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2025
35. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2025
36. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
37. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Asung Kertha Wara Nugraha Nya kami telah dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2025. Rencana Kerja ini disusun guna memenuhi kewajiban pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan dijadikan sebagai pedoman rencana operasional oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan.

Denpasar, 19 Juni 2025

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Denpasar,

Dr. Ni Putu Kusumawati, S.E., M.Si, AK, CA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731206 199803 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud Dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKAD TRIWULAN I TAHUN 2025 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 19
2.4 Review Terhadap RKPD 2025 22
2.5 Penelahan Usulan Masyarakat 28

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD TAHUN 2025..... 29

BAB IV PENUTUP 36

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 188.45/2695/HK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka pada tahun 2017 dibentuklah Lembaga/Instansi baru di Kota Denpasar yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kota Denpasar, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar mempunyai tugas dalam menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun kebijakan teknis sesuai dengan lingkup pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi kerakyatan yang diselaraskan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Walikota Denpasar menetapkan rencana strategis kota Denpasar tahun 2021-2026 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi.

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah, sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yaitu pentingnya menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja memuat tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta dengan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam kurun waktu satu tahun. Adanya perubahan pagu anggaran yang terjadi pada Triwulan I tahun 2025 menyebabkan perlunya disusun dokumen Perubahan Rencana Kerja yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Triwulan I serta rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mengalami *refocusing*, pergeseran, penghapusan, dan penambahan sub kegiatan.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan BPKAD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 diukur dari realisasi keuangan telah mencapai 19,11% hal ini disebabkan beberapa belanja pada sub kegiatan masih dalam proses pengamprahan dan adanya efisiensi atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Untuk itu dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap perencanaan program kegiatan dan penganggaran pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3465);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah DaerahPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
19. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);
20. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, yang mana pada tahun berjalan mengalami beberapa kali pergeseran anggaran sebagai upaya kegiatan pengendalian inflasi. Berdasarkan hal tersebut disusunlah Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang akan menguraikan realokasi anggaran belanja guna kepentingan pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana non-alam. Sehingga seluruh kegiatan yang tidak terlalu mendesak akan dirasionalisasi/ditunda pelaksanaannya guna mengoptimalkan pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai komitmen bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan dan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu periode tahunan.
2. Merumuskan penggunaan dana program dan kegiatan pembangunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar selama Tahun 2025.
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025

2.5 Penelaahan Usulan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD TAHUN 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR
TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Triwulan I Tahun 2025

Dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, BPKAD selaku OPD yang melaksanakan entitas akuntansi pelaporan keuangan Perangkat Daerah, yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BPKAD sampai dengan triwulan I Tahun 2025.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Renja Perangkat Daerah, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi renja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel, sehingga melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja BPKAD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Capaian Renja BPKAD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan BPKAD dan/atau realisasi APBD. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan BPKAD pada Tahun Anggaran 2025, terdiri dari 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan. Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I, realisasi secara fisik maupun realisasi secara keuangan sama-sama telah mencapai 19,11%. Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BPKAD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d bulan Maret Tahun 2025
BPKAD Kota Denpasar

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	TARGET TAHUN 2025 (Pergeseran ke-4)		REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2025		SISA PAGU ANGGARAN TAHUN 2025
							K	Rp	K (%)	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						
5	**02**				**KEUANGAN**			**358,358,800,076.00**		**103,953,436,078.17**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Outcome: Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**16,807,517,910.00**	**12.83**	**3,083,613,351.17**	**13,723,904,558.83**
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Output: Tersedianya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**12,461,659,324.00**	**21.49**	**2,523,056,888.00**	**9,938,602,436.00**
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	12,326,397,824.00	24.71	2,499,613,888.00	9,826,783,936.00
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Output: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.000 dokumen	135,261,500.00	18.26	23,443,000.00	111,818,500.00
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Output: Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**460,025,500.00**	**10.77**	**22,128,100.00**	**437,897,400.00**
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	11,525,000.00	32.86	3,610,000.00	7,915,000.00
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	196,863,500.00	3.03	5,835,000.00	191,028,500.00
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	31,347,000.00	27.05	7,754,100.00	23,592,900.00
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 paket	116,470,000.00	2.64	3,079,000.00	113,391,000.00
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Output: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	16,480,000.00	0.00	-	16,480,000.00
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	12,600,000.00	8.81	1,110,000.00	11,490,000.00
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 laporan	74,740,000.00	0.99	740,000.00	74,000,000.00
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Output: Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**367,873,800.00**	**0**	**-**	**367,873,800.00**
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	35,873,800.00	0	-	35,873,800.00
5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 unit	332,000,000.00	0	-	332,000,000.00
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Output: Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**2,525,689,286.00**	**22.69**	**481,878,363.17**	**2,043,810,922.83**
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	252,000,000.00	20.10	50,651,570.00	201,348,430.00
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2,273,689,286.00	25.29	431,226,793.17	1,842,462,492.83
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Output: Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**992,270,000.00**	**9.20**	**56,550,000.00**	**935,720,000.00**
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	50,900,000.00	17.68	9,000,000.00	41,900,000.00
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 unit	341,620,000.00	13.36	41,595,000.00	300,025,000.00
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	156 unit	147,150,000.00	5.76	5,955,000.00	141,195,000.00
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	452,600,000.00	0.00	-	452,600,000.00
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Outcome: Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)**	**94,79%**	**339,659,121,266.00**	**7.85**	**100,849,387,727.00**	**238,809,733,539.00**
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Output: Tersusunnya dokumen rencana anggaran daerah sesuai peraturan perundang-undangan**	**100%**	**1,213,734,000.00**	**4.52**	**131,190,000.00**	**1,082,544,000.00**
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Output: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	59,280,000.00	0.17	100,000.00	59,180,000.00
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Output: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	57,960,000.00	0.00	-	57,960,000.00
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Output: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	863,515,000.00	17.91	131,090,000.00	732,425,000.00
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Output: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	232,979,000.00	0.00	-	232,979,000.00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	TARGET TAHUN 2025 (Pergeseran ke-4)		REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2025		SISA PAGU ANGGARAN TAHUN 2025
							K	Rp	K (%)	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Output: Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah sesuai peraturan perundang-undangan**	**100%**	**58,812,000.00**	**5.60**	**3,100,000.00**	**55,712,000.00**
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Output: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 dokumen	33,192,000.00	3.01	1,000,000.00	32,192,000.00
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	36 orang	25,620,000.00	8.20	2,100,000.00	23,520,000.00
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Output: Terlaksananya akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai peraturan perundangundangan**	**100%**	**265,265,000.00**	**0.04**	**200,000.00**	**265,065,000.00**
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Output: Jumlah laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 laporan	17,094,000.00	0.00	-	17,094,000.00
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Output: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	149,399,000.00	0.13	200,000.00	149,199,000.00
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Output: Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 dokumen	98,772,000.00	0.00	-	98,772,000.00
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Output: Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan**	**100%**	**338,040,910,266.00**	**21.21**	**100,714,897,727.00**	**237,326,012,539.00**
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Output: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 laporan	157,104,823,000.00	38.58	60,607,360,418.00	96,497,462,582.00
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Output: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 laporan	21,021,937,736.00	0.06	129,000,000.00	20,892,937,736.00
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Output: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 laporan	159,914,149,530.00	25.00	39,978,537,309.00	119,935,612,221.00
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Output : Terlaksananya pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota**	**100%**	**80,400,000.00**	**0.00**	**-**	**80,400,000.00**
5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	394 Orang	80,400,000.00	0.00	-	**80,400,000.00**
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Outcome: Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)**	**97,05%**	**1,892,160,900.00**	**1.78**	**20,435,000.00**	**1,871,725,900.00**
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Output: Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundangundangan**	**100%**	**1,892,160,900.00**	**1.78**	**20,435,000.00**	**1,871,725,900.00**
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Output: Jumlah Standar Harga yang disusun	3 dokumen	674,320,000.00	0.09	600,000.00	673,720,000.00
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Output: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	15,066,000.00	1.66	250,000.00	14,816,000.00
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Output: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 laporan	110,075,900.00	7.98	8,785,000.00	101,290,900.00
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Output: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 laporan	8,729,000.00	0.00	-	8,729,000.00
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Output: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 laporan	352,904,000.00	1.50	5,300,000.00	347,604,000.00
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Output: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 laporan	290,997,000.00	0.00	-	290,997,000.00
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Output: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 dokumen	440,069,000.00	1.25	5,500,000.00	434,569,000.00
					TOTAL			**358,358,800,076.00**		**103,953,436,078.17**	**254,405,363,997.83**

Adapun permasalahan yang dihadapi dapat dijelaskan pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2

Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Triwulan I Tahun 2025

SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP)	REALISASI (sampai bulan TW I) (RP)	% REALISASI		PERMASALAHAN / KETERANGAN LAIN
			FISIK	KEUANGAN	
2	3	4	5	6	(11)
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,114,977,349.00	2,499,613,888.00	24.71	24.71	1) Belanja Tunjangan Keluarga PPPK = Karena pegawai PPPK masih berstatus belum menikah; 2) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK = Karena SK Penerimaan PPPK th 2024 diundur
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	135,261,500.00	23,443,000.00	18.26	17.33	1) Belanja ATK = Karena adanya konsolidasi ke Sekretariat
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,525,000.00	3,610,000.00	32.86	31.32	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196,863,500.00	5,835,000.00	3.03	2.96	1) Belanja ATK = Masih proses di ekatalog; 2) Belanja Cetak = Masih belum ada realisasi; 3) Bahan Komputer = Masih proses administrasi
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31,347,000.00	7,754,100.00	27.05	24.74	Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya = Masih proses di ekatalog
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116,470,000.00	3,079,000.00	2.64	2.64	1) Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (home use) = Anggaran kas bulan Juni
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16,480,000.00	-	-	-	Bahan Cetak = Proses di ekatalog
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,600,000.00	1,110,000.00	8.81	8.81	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74,740,000.00	740,000.00	0.99	0.99	Belanja makmin rapat masih proses administrasi dan belanja perdin biasa anggaran kas bulan April dan Mei
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	332,000,000.00	-	-	-	1) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Belanja Modal Meja Kerja Pejabat, Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat, Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya = Karena ada efisiensi anggaran sesuai dg Inpres No 1 Tahun 2025; 2) Belanja Modal Personal Computer = Masih mencari spesifikasi laptop; 3) Belanja Modal Peralatan Mainframe = Masih mencari referensi; 4) Belanja Modal Jaringan Distribusi = Masih menunggu BA Review Tim P3DN Kota Dps dari Disperindag
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252,000,000.00	50,651,570.00	20.10	20.10	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,705,139,442.00	431,226,793.17	25.29	25.29	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,900,000.00	9,000,000.00	17.68	17.68	1) Belanja suku cadang, belanja pembayaran pajak bea perizinan, dan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang = Anggaran kas bulan Desember

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	341,620,000.00	41,595,000.00	13.36	12.18	1) Belanja Suku Cadang = Belum ada servis kendaraan dan ganti suku cadang; 2) Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang = Belum ada servis kendaraan; 3) Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua = Anggaran kas bulan Mei, Juli, Nopember
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	147,150,000.00	5,955,000.00	5.76	4.05	1) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya = Anggaran kas bulan April, Juli, Nopember; 2) Belanja Pemeliharaan Mebel dan Alat Pendingin = Belum ada pemeliharaan; 3) Belanja Pemeliharaan Mainframe = Anggaran kas bulan April
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	452,600,000.00	-	-	-	1) Belanja pemeliharaan komputer jaringan, jaringan air minum lainnya, jaringan listrik lainnya = Belum ada pemeliharaan; 2) Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor = Anggaran kas bulan Mei; 3) Belanja pemeliharana taman = Angagran kas bulan April; 4) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor = Anggaran kas bulan Juni
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	59,280,000.00	100,000.00	0.17	0.17	1) Belanja ATK = Karena adanya konsolidasi ke Sekretariat; 2) Belanja bahan cetak = Anggaran kas di bulan Juli; 3) Belanja bahan komputer = Ada pengembalian karena tidak muncul pada menu verifikasi SPJ di akun BUD pada V6 kemungkinan di realisasi bulan April; 4) Belanja Makmin Rapat = Anggaran kas di bulan Mei; 5) Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan = Anggaran kas di bulan Juli
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	57,960,000.00	-	-	-	1) Belanja ATK = Karena adanya konsolidasi ke Sekretariat; 2) Belanja bahan cetak dan Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan = Anggaran kas di bulan Juni; 3) Belanja Pos dan bahan komputer = Anggaran kas di bulan April; 4) Belanja makmin rapat = Anggaran kas di bulan Mei
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	863,515,000.00	131,090,000.00	17.91	15.18	1) Belanja ATK = Karena adanya konsolidasi ke Sekretariat; 2) Bahan komputer = Masih proses administrasi; 3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya; Belanja Sewa Mebel; Belanja Perjalanan Dinas Biasa = Karena ada efisiensi anggaran saat tahap evaluasi provinsi; 4) Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan = Anggaran kasnya di bulan Agustus
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	232,979,000.00	-	-	-	1) Belanja ATK = Karena adanya konsolidasi ke Sekretariat; 2) Bahan cetak = Anggaran kasnya di bulan Juni, Juli, September, Nopember, Desember; 3) Bahan Pos dan Bahan Komputer = Anggaran kasnya di bulan Mei; 4) Belanja makmin rapat = Anggaran kasnya di bulan April dan Juni; 5) Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan = Anggaran kasnya di bulan Juni; 6) Belanja Sewa Mebel dan Perdin Biasa = Karena ada efisiensi anggaran saat tahap evaluasi provinsi

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	33,192,000.00	1,000,000.00	3.01	3.01	Belanja cetak dan bahan komputer = Masih dalam proses
Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	25,620,000.00	2,100,000.00	8.20	8.20	1) Belanja bahan lainnya, belanja alat listrik, belanja sovenir, belanja makmin aktivitas lapangan, belanja jasa juri perlombaan, belanja sewa alat kantor lainnya, belanja sewa alat rumah tangga lainnya (home use) = Karena ada efisiensi anggaran sesuai dg Inpres No 1 Tahun 2025; 2) Belanja ATK = Karena adanya konsolidasi ke Sekretariat; 3) Bahan komputer = Anggaran kas dibulan Agustus; 4) Belanja makmin rapat = Ada sebagian yang mengalami efisiensi anggaran, dan sisanya anggaran kas bulan April, Juni dan Oktober
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17,094,000.00	-	-	-	Anggaran Kas di Bulan Mei
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	149,399,000.00	200,000.00	0.13	0.13	1) Belanja cetak dan bahan komputer = Masih dalam Proses Pencairan; 2) Belanja makmin rapat = Belum direalisasikan karena koordinasi/rapat dengan OPD kami lakukan secara daring; 3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain = Anggaran Kas di Bulan Juni
Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	98,772,000.00	-	-	-	Anggaran Kas di Bulan Mei
Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	157,104,823,000.00	60,607,360,418.00	38.58	38.58	1) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa = Belum ada amprahan; 2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	209,503,118,942.00	129,000,000.00	0.06	0.06	Belum Ada Kegiatan yang mengharuskan menggunakan Dana BTT (Mengikuti Pengajuan Dana Dari OPD Terkait yang membutuhkan Dana BTT)
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	159,914,149,530.00	39,978,537,309.00	25.00	25.00	
Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	80,400,000.00	-	-	-	1) Belanja makmin lapangan dan perdin meeting dlm kota = Karena ada efisiensi anggaran sesuai dg Inpres No 1 Tahun 2025; 2) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia = Anggaran kas bulan Juni
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	674,320,000.00	600,000.00	0.09	0.09	1) Belanja ATK = Karena adanya konsolidasi ke Sekretariat; 2) Bahan Cetak = Anggaran kas di bulan Mei; 3) Bahan Komputer = Anggaran kas bulan Juni; 4) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain = Masih proses penunjukan rekanan
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	15,066,000.00	250,000.00	1.66	1.66	1) Belanja ATK = Karena adanya konsolidasi ke Sekretariat; 2) Bahan cetak = Masih dalam proses rekon RKBMD; 3) Bahan Komputer = Anggaran kas di bulan Juli; 4) Belanja makmin rapat = Rapat rekon (masih dalam proses rekon RKBMD)

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	110,075,900.00	8,785,000.00	7.98	7.98	1) Belanja ATK = Karena adanya konsolidasi ke Sekretariat; 2) Bahan cetak = Belum ada dokumen yang harus digandakan; 3) Bahan komputer = Anggaran kas di bulan April; 4) Makmin aktivitas Lapangan = Belum ada pengecekan barang yang melibatkan pihak lain; 5) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,Pembawa Acara, dan Panitia = Anggaran kas di bulan Mei; 6) Belum ada kegiatan untuk perjalanan dinas; 7) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain = Masih menunggu realisasi pengadaan server
Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	8,729,000.00	-	-	-	1) Belanja ATK = Karena adanya konsolidasi ke Sekretariat; 2) Bahan cetak dan benda pos = Anggaran kas di bulan Agustus; 3) Bahan komputer = Perbaikan uraian anggaran; 4) Makmin rapat = Anggaran kas di bulan Mei; 5) Makmin lapangan = Masih belum ada jadwal turun ke lapangan
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	352,904,000.00	5,300,000.00	1.50	1.50	1) Belanja ATK = Karena adanya konsolidasi ke Sekretariat; 2) Bahan komputer = Anggaran kas bulan Mei; 3) Makmin lapangan = Belum ada jadwal turun ke lapangan; 4) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan = Sudah tidak ada kegiatan tim pelaksana kegiatan; 5) Belanja Jasa Pengukuran Tanah = Belum ada jadwal dari BPN; 6) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain = Anggaran kas di bulan Mei; 7) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja = Belum ada pengajuan sertifikat tanah milik pemkot; 8) Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya= Anggaran di pindah di jasa yang diberikan kepada pihak ketiga
Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	290,997,000.00	-	-	-	1) Belanja ATK = Karena adanya konsolidasi ke Sekretariat; 2) Bahan cetak = Anggaran kas di bulan Juli; 3) Bahan komputer = Anggaran kas di bulan April; 4) Belanja makmin lapangan = Menunggu jadwal tim penilaian BMD; 5) Sudah tidak ada jasa tenaga ahli; 6) Belum ada kegiatan untuk perjalanan dinas; 7) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain = Anggaran kas di bulan April, Mei dan Juni
Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	440,069,000.00	5,500,000.00	1.25	1.25	1) Belanja ATK = Karena adanya konsolidasi ke Sekretariat; 2) Bahan cetak = Anggaran kas di bulan Juni; 3) Bahan komputer = Anggaran kas di bulan Mei; 4) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan = Karena limit permohonan lelang belum ada nilai di atas 50 juta; 5) Belanja Asuransi Barang Milik Daerah = Berakhir asuransi di bulan Mei

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35,873,800.00	-	-	-	1) Belanja ATK = Karena adanya konsolidasi ke Sekretariat; 2) Belanja cetak, pos, bahan komputer, makmin lapangan, modal beroda 2 = Anggaran kas di bulan Oktober
JUMLAH	**544,060,010,963.00**	**103,953,436,078.17**	**19.11**	**19.11**	

Solusi :

Adapun solusi dari permasalahan yang diuraikan diatas yaitu akan dilakukan upaya – upaya sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan anggaran yang lebih detail dan terperinci sehingga untuk ke depannya alokasi anggaran dapat mewujudkan anggaran tepat guna dan tepat sasaran;
2. Mengevaluasi serapan anggaran tahun yang telah berjalan dan memonitoring penyerapan anggaran pada tahun berikutnya, sehingga daya serap anggaran belanja APBD bisa terserap maksimal;
3. Lebih mengintensifkan koordinasi dan sinergi yang baik dengan pihak-pihak / instansi terkait.
4. Meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar pada Tahun Anggaran 2025 telah terlaksana cukup baik sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan telah mencapai realisasi fisik dan keuangan sebesar 19,11%.

3. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Dalam pelaksanaan tahun anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 masih belum terdapat sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil. Hal ini dikarenakan pada Triwulan I rata-rata sub kegiatan masih dalam proses pengamprahan.

4. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Faktor–faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah :

- Adanya koordinasi yang maksimal dalam pelaksanaan kegiatan.

Adapun faktor–faktor penghambat keberhasilan pencapaian kinerja beberapa sub kegiatan yang realisasi keuangannya masih belum dapat terealisasi adalah sebagai berikut:

- Kualitas sarana dan prasarana pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah belum memadai;
- Belum adanya optimalisasi perencanaan anggaran;
- Lemahnya koordinasi antar OPD dan stakeholders lainnya;
- Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat;
- Keterbatasan sumber dana Pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung seluruh program pembangunan;
- Adanya refocusing anggaran untuk kegiatan pengendalian inflasi yang menyebabkan beberapa sub kegiatan harus ditunda dulu pelaksanaannya.

5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang telah ditetapkan yaitu dengan pelayanan birokrasi yang baik serta di dukung tenaga operasional berdedikasi tinggi dapat memperlancar proses penatausahaan keuangan dan aset daerah yang baik dan akuntabel.

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab Tersebut

Strategi pemecahan masalahnya adalah :

- Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- Meningkatkan pengembangan kerja dan informasi
- Membenahi sistem manajemen pemerintahan menuju sistem yang transparan, responsif, efisien dan efektif.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diamanatkan bahwa Kebijakan Umum Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan pelayanan urusan penunjang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Kebijakan Umum Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan pelayanan urusan penunjang Pemerintahan Daerah, pilihan salah satunya adalah: Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Sebagaimana yang terurai pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026 bahwa BPKAD mengacu pada Misi ke-3 “Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai

penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance)" dengan Tujuan "Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik" :

Adapun strategi RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah", dengan arah kebijakan melalui meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan administrasi pengelolaan asset daerah.

Atas dasar strategi dan arah kebijakan sebagaimana yang tercantum pada Rancangan Awal RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, maka BPKAD menetapkan dua (2) sasaran yaitu :

a. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator kinerja utama "Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah";
b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator kinerja utama "Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah".

Adapun pencapaian kinerja pelayanan BPKAD Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Denpasar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah			82,10%	85,52%	88,47%	92,22%	94,79%	92,08%	93,41%	92,08%	92,57%	-	
2	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah			97,22%	95,85%	96,15%	96,75%	97,05%	97,22%	96,32%	96,44%	97,03%	-	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu Strategis merupakan permasalahan utama yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada masyarakat lima tahun ke depan. Isu-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintahan Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar dengan memperhatikan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat serta merupakan implementasi dari pencapaian visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.

Penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya.

Dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas “Merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Walikota sesuai lingkup tugasnya”.

Terkait pencapaian kinerja pembangunan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, tentunya tidak terlepas dari ketentuan Perundang-Undangan, sebagaimana terurai sebagai berikut :

a. Terbitnya Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.
b. Sehubungan dengan adanya peraturan baru yaitu PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencabut PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tentunya penyusunan isu-isu penting penyelenggaraan Tugas

Pokok dan Fungsi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar akan menyesuaikan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar.

c. Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan dan Barang Milik Daerah. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

d. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar adalah melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mendukung isu-isu strategis yang tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, melalui penyusunan, pelaporan, pengkajian dan penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Permasalahan dan hambatan yang akan dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi perangkat daerah adalah :

a). Dari aspek kualitas sumber daya aparatur, jumlah SDM yang terdiri dari PNS sebanyak 44 orang dan PPPK sebanyak 65 orang dengan jumlah total ASN sebanyak 109 orang, dengan kualifikasi terdiri dari :

- Doktor Ilmu Ekonomi : 1 orang
- Magister Ekonomi : 15 orang
- Sarjana Ilmu Ekonomi : 2 orang
- Sarjana Ekonomi Manajemen : 23 orang
- Sarjana Ekonomi Pembangunan : 3 orang
- Sarjana Ekonomi Akuntansi : 11 orang
- Sarjana Sastra Inggris : 2 orang
- Sarjana Ilmu Administrasi Negara : 4 orang
- Sarjana Hukum : 11 orang
- Sarjana Teknik Industri : 1 orang
- Sarjana Teknik Informatika : 2 orang
- Sarjana Agribisnis : 1 orang
- Sarjana Psikolog : 1 orang
- Sarjana Pendidikan Sejarah : 1 orang
- Sarjana Matematika : 1 orang

- Sarjana Ilmu Komunikasi : 1 orang
- Sarjana Pendidikan PGSD : 1 orang
- Sarjana Sistem Komputer : 1 orang
- Sarjana Sistem Informasi : 2 orang
- D III Akuntansi : 7 orang
- D III Perbankan : 1 orang
- D III Manajemen Aset : 2 orang
- D III Perbendaharaan Negara : 1 orang
- D III Teknik Mesin : 1 orang
- SLTA/Sederajat : 13 orang

Kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur masih kurang memadai, dibandingkan beban tugas yang harus dilaksanakan.

b). Dari aspek kuantitas sumber daya aparatur, memiliki 109 personil dengan rincian :

- S3 : 1 orang
- S2 : 15 orang
- S1 : 68 orang
- Diploma III : 12 orang
- SLTA/Sederajat : 13 orang

Jumlah sumber daya aparatur masih sangat kurang/terbatas.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi akan sedikit mengalami hambatan karena keterbatasan personil dan kekurangan tenaga yang berkompeten dalam bidangnya untuk melakukan penyusunan, pengkajian, pelaporan dan penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Apabila permasalahan dan hambatan sumber daya aparatur yang masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah maka hal ini akan memberikan dampak terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah disusun. Terutama terhadap capaian program kegiatan yang sudah dirancang.

Tantangan/hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah adalah :

a. Belum adanya optimalisasi perencanaan anggaran sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran yang mengakibatkan jumlah SILPA menjadi signifikan;
b. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
c. Advokasi dan verifikasi penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen perencanaan daerah;

d. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh akan Sistem Akuntansi Pemerintah;
e. Dokumen pengelolaan keuangan yang belum tertata karena kurangnya dukungan sarana-prasarana pengelolaan arsip;
f. Kompetensi SDM pengelola keuangan daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar masih terbatas.

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi BPKAD di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yaitu: “Masih perlu ditingkatkannya kualitas pengelola keuangan dan barang milik daerah”, hal ini dibuktikan dengan hal-hal yang terurai sebagai berikut:

a. Perubahan yang cepat terhadap regulasi dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian;
b. Kurangnya SDM dengan kapabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang memadai;
c. Penuntasan MCP KPK khususnya pada point penganggaran dan pengelolaan barang milik daerah;
d. Daya serap anggaran belanja APBD Pemerintah Kota Denpasar masih dibawah 90%;
e. Belum optimalnya pemanfaatan aset (baik fisik maupun administrasi).

2.4 Review terhadap RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BPKAD dengan hasil pencapaian target tahunan.

Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 BPKAD telah melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur program dan kegiatan yang ada, karena telah berlakunya

Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang klarifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang kemudian dimutakhirkan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rekapitulasi Rasionalisasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, disampaikan dalam bentuk tabel 2.4 sebagai berikut :

TABEL 2.4

Rekapitulasi Rasionalisasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	INDUK		PERUBAHAN	
							TARGET TAHUN 2025		TARGET TAHUN 2025	
							K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					
5	**02**				**KEUANGAN**			357,762,867,812		477,151,783,790
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Outcome: Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**16,959,646,382**	**100%**	**22,123,235,376**
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Output: Tersedianya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**13,137,636,140**	**100%**	**14,253,313,214**
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	12,983,399,640	114 Orang/Bulan	14,118,051,714
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Output: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.000 dokumen	154,236,500	14.000 dokumen	135,261,500
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Output: Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**499,727,000**	**100%**	**465,445,500**
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	11,525,000	1 paket	11,525,000
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	214,872,500	5 paket	197,523,500
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	31,347,000	2 paket	31,347,000
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 paket	116,470,000	15 paket	121,230,000
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Output: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	18,310,500	1 paket	16,480,000
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	12,600,000	3 dokumen	12,600,000
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 laporan	94,602,000	16 laporan	74,740,000
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Output: Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**372,873,800**	**100%**	**3,739,915,000**
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	35,873,800	5 unit	3,407,915,000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	INDUK		PERUBAHAN	
							TARGET TAHUN 2025		TARGET TAHUN 2025	
							K	Rp	K	Rp
5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 unit	337,000,000	40 unit	332,000,000
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Output: Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**1,957,139,442**	**100%**	**2,532,441,662**
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	252,000,000	36 laporan	252,000,000
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,705,139,442	12 laporan	2,280,441,662
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Output: Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**992,270,000**	**100%**	**1,132,120,000**
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	50,900,000	1 unit	50,900,000
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 unit	341,620,000	27 unit	341,620,000
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	156 unit	147,150,000	156 unit	182,000,000
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	452,600,000	1 unit	557,600,000
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Outcome: Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)**	**94,79%**	**338,876,406,530**	**94,79%**	**452,093,845,514**
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Output: Tersusunnya dokumen rencana anggaran daerah sesuai peraturan perundang-undangan**	**100%**	**1,305,514,000**	**100%**	**1,158,234,000**
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Output: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	60,030,000	2 dokumen	59,280,000
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Output: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	59,460,000	2 dokumen	57,960,000
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Output: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	906,705,000	2 dokumen	808,015,000
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Output: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	279,319,000	2 dokumen	232,979,000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	INDUK		PERUBAHAN	
							TARGET TAHUN 2025		TARGET TAHUN 2025	
							K	Rp	K	Rp
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Output: Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah sesuai peraturan perundang-undangan**	**100%**	**74,047,000**	**100%**	**58,812,000**
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Output: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 dokumen	33,192,000	4 dokumen	33,192,000
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	36 orang	40,855,000	494 orang	25,620,000
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Output: Terlaksananya akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai peraturan perundangundangan**	**100%**	**290,091,000**	**100%**	**218,459,000**
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Output: Jumlah laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 laporan	22,184,000	1 laporan	17,094,000
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Output: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	167,174,000	2 dokumen	102,593,000
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Output: Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 dokumen	100,733,000	2 dokumen	98,772,000
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Output: Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan**	**100%**	**337,050,372,530**	**100%**	**450,577,940,514**
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Output: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 laporan	157,104,823,000	12 laporan	201,134,601,120
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Output: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 laporan	20,031,400,000	12 laporan	31,843,385,622
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Output: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 laporan	159,914,149,530	12 laporan	217,599,953,772
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Output : Terlaksananya pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota**	**100%**	**156,382,000**	**100%**	**80,400,000.00**

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	INDUK		PERUBAHAN	
							TARGET TAHUN 2025		TARGET TAHUN 2025	
							K	Rp	K	Rp
5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	394 orang	156,382,000	16 Orang	80,400,000.00
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Outcome: Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)**	**97,05%**	**1,926,814,900**	**97,05%**	**2,934,702,900**
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Output: Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundangundangan**	**100%**	**1,926,814,900**	**100%**	**2,934,702,900**
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Output: Jumlah Standar Harga yang disusun	3 dokumen	674,320,000	3 dokumen	678,302,000
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Output: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	16,560,000	1 dokumen	19,788,000
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Output: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 laporan	140,235,900	1 laporan	475,319,900
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Output: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 laporan	9,479,000	1 laporan	12,279,000
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Output: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 laporan	355,154,000	50 laporan	764,004,000
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Output: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 laporan	290,997,000	1 laporan	517,857,000
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Output: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 dokumen	440,069,000	2 dokumen	467,153,000
					TOTAL			**357,762,867,812**		**477,151,783,790**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat untuk perbaikan kinerja dalam Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah dirangkum dalam formulir SKM yang dilakukan secara berkala kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Denpasar. Di samping itu terdapat usulan saran dan perbaikan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan melalui kotak saran, web, email, Instagram, Telepon atau langsung disampaikan kepada petugas PPID yang ada di Kota Denpasar.

Selanjutnya usulan saran tersebut akan ditanggapi kembali oleh BPKAD dan bila sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta didukung oleh anggaran yang memadai maka usulan tersebut akan direalisasikan sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan kualitas Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD TAHUN 2025

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan strategis ditetapkan selain mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kota Denpasar juga mengacu kepada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BPKAD Kota Denpasar. Tujuan yang akan dicapai oleh BPKAD Kota Denpasar adalah "**Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Efektif dan Akuntabel**".

Sedangkan yang dimaksud dengan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) sub kegiatan perangkat daerah. Sasaran-sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada BPKAD Kota Denpasar. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh BPKAD Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**
2. **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Sasaran yang hendak dicapai oleh BPKAD Kota Denpasar diupayakan melalui beberapa program, yaitu: Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan didukung oleh adanya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: **Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah**.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan BPKAD pada Tahun Anggaran 2025, terdiri dari 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan sesuai dengan nomenklatur Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang klarifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang kemudian dimutakhirkan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Adapun rencana program BPKAD Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

   Program ini bertujuan untuk mendukung agar pelaksanaan program pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dapat berjalan sesuai dengan yang telah diharapkan.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

   Program pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu program yang mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

   Program pengelolaan barang milik daerah merupakan suatu program yang mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, penilaian, pengawasan, pengendalian, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program pembangunan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

   Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

   Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:
   - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
   - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
   - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
   - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
   - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

   Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Uraian kegiatan tersebut akan terbagi lagi menjadi beberapa sub-sub kegiatan, yang lebih terperinci. Adapun rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pagu perubahan Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dirancang sebesar

Rp 477.151.783.790,00. dengan rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan seperti tercantum dalam Tabel 3.1 serta dilampirkan usulan perubahan pada anggaran perubahan 2025 berikut ini :

TABEL 3.1
Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

NAMA OPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

Kode					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR		TARGET		SUMBER DANA	APBD INDUK 2025	RENCANA PERUBAHAN	Bertambah/ (Berkurang)
						INDUK 2025	PERUBAHAN 2025	INDUK 2025	PERUBAHAN 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	11	12=11-8
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								
5	**02**				**KEUANGAN**						**357,762,867,812**	**477,151,783,790**	**119,388,915,978**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Outcome: Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**Outcome: Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**100%**		**16,959,646,382**	**22,123,235,376**	**5,163,588,994**
5	**02**	**01**	**2.02**		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Output: Tersedianya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Output: Tersedianya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**100%**		**13,137,636,140**	**14,253,313,214**	**1,115,677,074**
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	114 Orang/Bulan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12,983,399,640	14,118,051,714	1,134,652,074
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Output: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Output: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.000 dokumen	14.000 dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	154,236,500	135,261,500	(18,975,000)
5	**02**	**01**	**2.06**		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Output: Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**Output: Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**100%**		**499,727,000**	**465,445,500**	**(34,281,500)**
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	11,525,000	11,525,000	-
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	214,872,500	197,523,500	(17,349,000)
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	2 paket	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	31,347,000	31,347,000	-
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 paket	15 paket	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	116,470,000	121,230,000	4,760,000
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Output: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Output: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	18,310,500	16,480,000	(1,830,500)
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Output: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	3 dokumen	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	12,600,000	12,600,000	-
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 laporan	16 laporan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	94,602,000	74,740,000	(19,862,000)
5	**02**	**01**	**2.07**		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**Output: Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Output: Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**100%**		**372,873,800**	**3,739,915,000**	**3,367,041,200**
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Output: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	5 unit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	35,873,800	3,407,915,000	3,372,041,200
5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Output: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 unit	40 unit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	337,000,000	332,000,000	(5,000,000)

Kode					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR		TARGET		SUMBER DANA	APBD INDUK 2025	RENCANA PERUBAHAN	Bertambah/ (Berkurang)
						INDUK 2025	PERUBAHAN 2025	INDUK 2025	PERUBAHAN 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	11	12=11-8
5	**02**	**01**	**2.08**		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Output: Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Output: Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**100%**		**1,957,139,442**	**2,532,441,662**	**575,302,220**
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36 laporan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	252,000,000	252,000,000	-
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	1,705,139,442	2,280,441,662	575,302,220
5	**02**	**01**	**2.09**		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Output: Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Output: Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**100%**		**992,270,000**	**1,132,120,000**	**139,850,000**
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	50,900,000	50,900,000	-
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 unit	27 unit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	341,620,000	341,620,000	-
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Output: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	156 unit	156 unit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	147,150,000	182,000,000	34,850,000
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Output: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	452,600,000	557,600,000	105,000,000
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Outcome: Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)**	**Outcome: Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)**	**94.79%**	**94.79%**		**338,876,406,530**	**452,093,845,514**	**113,217,438,984**
5	**02**	**02**	**2.01**		***Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah***	**Output: Tersusunnya dokumen rencana anggaran daerah sesuai peraturan perundang-undangan**	**Output: Tersusunnya dokumen rencana anggaran daerah sesuai peraturan perundang-undangan**	**100%**	**100%**		**1,305,514,000**	**1,158,234,000**	**(147,280,000)**
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Output: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Output: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	60,030,000	59,280,000	(750,000)
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Output: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Output: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	59,460,000	57,960,000	(1,500,000)
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Output: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Output: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	2 dokumen	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	906,705,000	808,015,000	(98,690,000)
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Output: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Output: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	2 dokumen	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	279,319,000	232,979,000	(46,340,000)
5	**02**	**02**	**2.02**		***Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah***	**Output: Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah sesuai peraturan perundang-undangan**	**Output: Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah sesuai peraturan perundang-undangan**	**100%**	**100%**		**74,047,000**	**58,812,000**	**(15,235,000)**
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Output: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Output: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 dokumen	4 dokumen	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	33,192,000	33,192,000	-

Kode					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR		TARGET		SUMBER DANA	APBD INDUK 2025	RENCANA PERUBAHAN	Bertambah/ (Berkurang)
						INDUK 2025	PERUBAHAN 2025	INDUK 2025	PERUBAHAN 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	11	12=11-8
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	36 orang	494 orang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	40,855,000	25,620,000	(15,235,000)
5	**02**	**02**	**2.03**		***Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah***	**Output: Terlaksananya akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai peraturan perundangundangan**	**Output: Terlaksananya akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai peraturan perundangundangan**	**100%**	**100%**		**290,091,000**	**218,459,000**	**(71,632,000)**
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Output: Jumlah laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Output: Jumlah laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 laporan	1 laporan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	22,184,000	17,094,000	(5,090,000)
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Output: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Output: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	167,174,000	102,593,000	(64,581,000)
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Output: Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Output: Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 dokumen	2 dokumen	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100,733,000	98,772,000	**(1,961,000)**
5	**02**	**02**	**2.04**		***Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah***	**Output: Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan**	**Output: Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan**	**100%**	**100%**		**337,050,372,530**	**450,577,940,514**	**113,527,567,984**
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Output: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Output: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 laporan	12 laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Desa	157,104,823,000	201,134,601,120	**44,029,778,120**
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Output: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Output: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 laporan	12 laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20,031,400,000	31,843,385,622	**11,811,985,622**
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Output: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Output: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	159,914,149,530	217,599,953,772	**57,685,804,242**
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Output : Terlaksananya pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota**	**100%**	**100%**	**100%**		**156,382,000**	**80,400,000**	**(75,982,000)**
5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	394 Orang	16 Orang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	156,382,000	80,400,000	(75,982,000)
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Outcome: Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)**	**Outcome: Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)**	**97.05%**	**97.05%**		**1,926,814,900**	**2,934,702,900**	**1,007,888,000**

Kode					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR		TARGET		SUMBER DANA	APBD INDUK 2025	RENCANA PERUBAHAN	Bertambah/ (Berkurang)
						INDUK 2025	PERUBAHAN 2025	INDUK 2025	PERUBAHAN 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	11	12=11-8
5	**02**	**03**	**2.01**		***Pengelolaan Barang Milik Daerah***	**Output: Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundangundangan**	**Output: Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundangundangan**	**100%**	**100%**		**1,926,814,900**	**2,934,702,900**	**1,007,888,000**
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Output: Jumlah Standar Harga yang disusun	Output: Jumlah Standar Harga yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	674,320,000	678,302,000	3,982,000
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Output: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Output: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	16,560,000	19,788,000	3,228,000
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Output: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Output: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 laporan	1 laporan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	140,235,900	475,319,900	335,084,000
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Output: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Output: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	9,479,000	12,279,000	2,800,000
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Output: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Output: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 laporan	50 laporan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	355,154,000	764,004,000	408,850,000
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Output: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Output: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	290,997,000	517,857,000	226,860,000
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Output: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Output: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 dokumen	2 dokumen	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	440,069,000	467,153,000	27,084,000
TOTAL											**357,762,867,812**	**477,151,783,790**	**119,388,915,978**

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Perubahan Rencana Kerja ini disusun sebagai upaya untuk mendukung pembangunan di Tahun 2025. Selain itu, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari BPKAD, dan juga jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan perencanaan tersebut. Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen Renja merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Perubahan Renja BPKAD Tahun 2025 ini disusun sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dengan melaksanakan 3 program, 11 kegiatan dan 37 sub kegiatan diharapkan di dalam pelaksanaannya secara lebih terarah dengan tetap memperhatikan skala prioritas termasuk ketersediaan pagu dana yang sesuai dengan pagu yang diusulkan BPKAD Kota Denpasar pada Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp 477.151.783.790,00.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 semoga dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selesai tepat waktu, terima kasih.

Denpasar, 19 Juni 2025

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Denpasar,

Dr. Ni Putu Kusumawati, SE., M.Si, AK, CA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731206 199803 2 004

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Maruti No. 8 Denpasar Kode Pos 80115 Telepon. (0361) 413357
www.denpasarkota.go.id email: bappeda@denpasarkota.go.id

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

No.	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup Kota Denpasar telah berpedoman pada RKPD Kota Denpasar	Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja 2024 sudah berpedoman pada RKPD Kota Denpasar tahun 2025
2	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup Kota Denpasar dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Denpasar serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 Perangkat Daerah sudah mengacu pada perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup Kota Denpasar dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Denpasar serta pencapaian sasaran Pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.

Denpasar, 28 Mei 2025
Kepala Bappeda Kota Denpasar

I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199703 1 004

Petunjuk Pengisian :

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Gatot Subroto VI E No. 2 Denpasar, Kode Pos 80231, Telepon: (0361) 9077878, Fax (0361) 9068644
www.bpkad.denpasarkota.go.id, email: bpkad.dps@gmail.com

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓			
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 berdasarkan renstra-Perangkat Daerah Kota Denpasar.	✓			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar.	✓			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2025	✓			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	✓			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	✓			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Denpasar.	✓			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.		✓	Tidak ada usulan saat musrenbang Kecamatan	
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar.	✓			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Denpasar.	✓			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Denpasar telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	✓			

Denpasar, 28 Mei 2025
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Denpasar

Dr. Ni Putu Kusumawati, SE, M.Si, AK, CA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731206 199803 2 004



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/2695/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang :

a. bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:

a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2025;

b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan;
c. menyusun dokumen Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2025;
d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2025;
e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Nopember 2023

a.n. Walikota Denpasar
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Denpasar,

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dr. Ni Putu Kusumawati, SE, M.Si, AK, CA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731206 199803 2 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 21 NOPEMBER 2023
NOMOR : 188.45/2695/HK/2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025

Penasehat :
1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar

Pembina :
1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar
2. Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar
3. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Sub Bidang I pada Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Sub Bidang II pada Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar
6. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan pada Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar
7. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada

Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar

8. Kepala Sub Bidang Analisa dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar
9. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar
10. Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar
11. Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar

a.n. Walikota Denpasar
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Denpasar,

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dr. Ni Putu Kusumawati, SE, M.Si, AK, CA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731206 199803 2 004

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

PERUBAHAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

Jalan Mataram No 2 Denpasar 80233. Tlp: 0361-229786

WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 188.45/2695/HK/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);

7. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);

8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:

a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar Tahun 2025;
b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan;
c. menyusun dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar Tahun 2025;
d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar Tahun 2025; dan
e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 November 2023

a.n. Walikota Denpasar
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Denpasar,

Drs. I Wayan Sudiana
Pembina Utama Muda
NIP. 19660504 199303 1 020

Tembusan disampaikan kepada :
1. Walikota Denpasar
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
3. Inspektur Kota Denpasar
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
7. Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2023
NOMOR : 188.45/2695/ HK/2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

Penasehat :
1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar

Pembina :
1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar

Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar

Anggota :
1. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
2. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
3. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
4. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
6. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
7. I Gede Widhi Artha, SSTP,MM., Analis Sumber Daya Aparatur pada Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
8. Dewa Ayu Ketut Suartini, SE., Analis Sumber Daya Aparatur pada Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar

9. I Gusti Komang Arya Widana, SE., Analis Sumber Daya Aparatur pada Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
10. Ida Ayu Komang Saraswatini, SE., Analis Sumber Daya Aparatur pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kota Denpasar
11. I Gusti Putu Wijaya Kusuma, S.Sos., Analis Sumber Daya Aparatur pada Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
12. I Gusti Agung Tri Widiasari, S.H, M.H., Analis Sumber Daya Aparatur pada Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
13. Faizah, SE,M.M., Analis Sumber Daya Aparatur pada Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
14. Ida Ayu Cininta Padangratha, S.AP., M.AP,. M.M.G., Perencana Ahli Muda pada Sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
15. Putu Shandra Ayu Sutardianie,S.STP., M.AP., Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
16. I Putu Reza Krisna Putra, S.E., Analis Perencanaan pada Sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar

a.n. Walikota Denpasar
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Denpasar,



Drs. I Wayan Sudiana
Pembina Utama Muda
NIP. 19660504 199303 1 020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bahwa setiap OPD diwajibkan untuk menyusun Renja dengan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Denpasar. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar Tahun 2025 ini disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar. Rancangan ini telah disempurnakan dengan melewati proses forum perangkat daerah yang dihadiri oleh pemaku kepentingan terkait

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, dan kami berharap penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat berguna bagi peningkatan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar.

Denpasar, 12 Juni 2025

Ditandatangani secara elektronik
oleh :
KEPALA BADAN
Drs. I WAYAN SUDIANA
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 196605041993031020

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:
https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202506/tte-e9c59436c479148c8b89ba972d118cea1_conv.pdf

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I
DAFTAR ISI II
DAFTAR TABEL III
DAFTAR GAMBAR IV
PENDAHULUAN 1
1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. LANDASAN HUKUM 3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 7
HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM KOTA DENPASAR TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 9
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM KOTA DENPASAR TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN CAPAIAN RENSTRA 9
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BKPSDM KOTA DENPASAR 20
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BKPSDM KOTA DENPASAR 24
2.3.1. KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN 2025 SESUAI TUPOKSI BKPSDM KOTA DENPASAR 24
2.3.2. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN DALAM MENYELENGGARAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 33
2.3.4. TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 34
2.3.5. TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) 34
2.4. REVIEW TERHADAP RKPD 36
2.5. STRATEGI PENANGGULANGAN MASALAH / KENDALA 52
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2025 53
PENUTUP 61

DAFTAR TABEL

TABEL 1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2025 10
TABEL 2. PENCAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 20
TABEL 3. PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 23
TABEL 4. SEBARAN ASN DI PEMERINTAH KOTA DENPASAR BERDASARKAN GENDER 35
TABEL 5. SEBARAN ASN DI PEMERINTAH KOTA DENPASAR BERDASARKAN GENDER DARI TAHUN 2022 HINGGA TAHUN 2024 35
TABEL 6. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD 2025 37
TABEL 7. RENCANA AKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025 46
TABEL 8. USULAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025 54

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. HUBUNGAN RENJA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA 2
GAMBAR 2. RAPAT EVALUASI TAHUN 2024 DAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 25
GAMBAR 3. RAPAT TIM TAPD 25
GAMBAR 4. RAPAT PERUBAHAN PERWALI TPP 26
GAMBAR 5. RAPAT PEMBINAAN OLEH INSPEKTORAT 27
GAMBAR 6. FASILITASI PENGISIAN DRH 29
GAMBAR 7. PEMUSNAHAN ARSIP INAKTIF 30
GAMBAR 8. FORUM PERANGKAT DAERAH RENJA 2026 31
GAMBAR 9. PELATIHAN PBJ PPK TIPE C 33

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan teknokratis, partisipatif, dan politis dengan tetap mengacu pada arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis, meliputi:

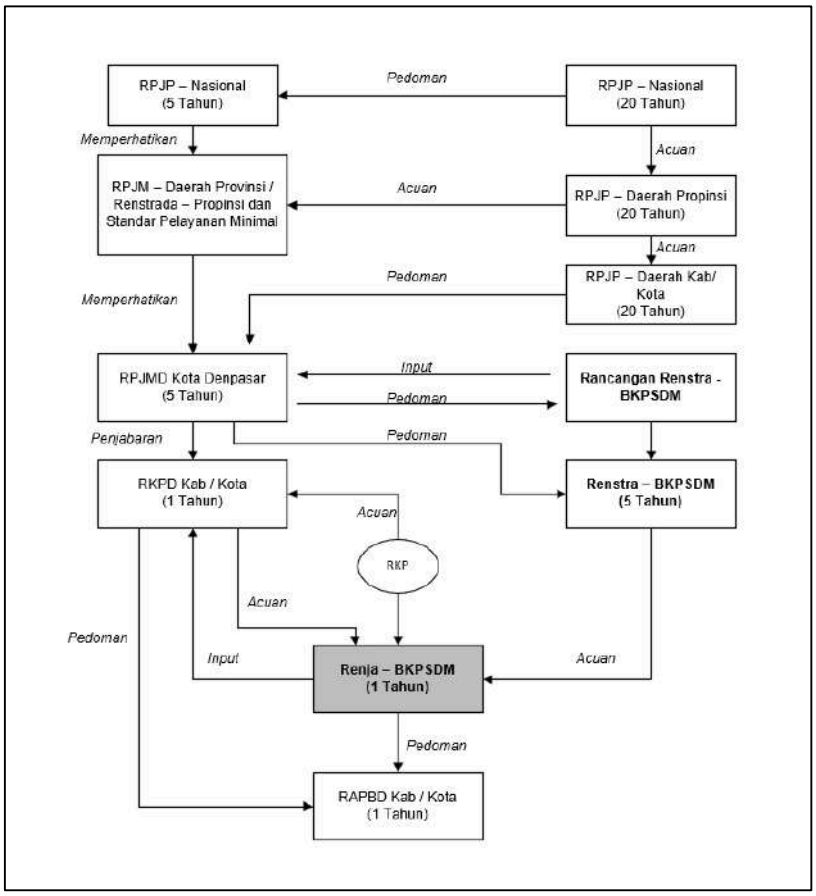
1. Analisis Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya – Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan sebagai dasar dalam perencanaan tahun berikutnya.
2. Identifikasi Isu Strategis dan Permasalahan – Mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi perangkat daerah dalam lingkup tugas dan fungsinya.
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renja – Penyusunan Rancangan Akhir berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kebutuhan.
4. Sinkronisasi dengan RKPD – Penyelarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi dokumen perencanaan tahunan tingkat daerah.
5. Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang – Diskusi dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
6. Penyempurnaan dan Penetapan Renja – Menyempurnakan rancangan berdasarkan masukan yang diterima dan menetapkannya sebagai dokumen resmi.

Renja Perangkat Daerah tidak berdiri sendiri, melainkan harus selaras dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional, antara lain:

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah yang menjadi dasar penyusunan RAPBD.

- Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah – Dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan utama dalam penyusunan Renja agar tetap berada dalam koridor visi dan misi daerah.
- Renja Kementerian/Lembaga (K/L) – Khusus bagi perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan nasional, Renja perlu diselaraskan dengan program kementerian terkait untuk memastikan sinergi kebijakan pusat dan daerah.
- Renja Perangkat Daerah Kota Denpasar – Perangkat daerah dalam lingkup Kota Denpasar harus memastikan keselarasan Renja dengan perangkat daerah lain agar terjadi sinergi dan efisiensi dalam pencapaian target pembangunan.

Adapun hubungan tersebut tersaji dalam gambar berikut:



Gambar 1. Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang merupakan dokumen anggaran tahunan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Tahapan tindak lanjut ini meliputi:

1. Penyusunan RKA-SKPD – Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran oleh masing-masing perangkat daerah.
2. Pembahasan dengan TAPD – Sinkronisasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan ketersediaan anggaran.
3. Pengajuan ke DPRD – RAPBD diajukan ke DPRD untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan.
4. Penetapan APBD – Setelah disetujui, RAPBD ditetapkan menjadi APBD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Dengan demikian, penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Kota Denpasar Tahun 2025 memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan kebijakan nasional serta daerah. Penyusunan yang sistematis dan berbasis data yang kuat akan memastikan efektivitas pelaksanaan program guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kota Denpasar.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kota Denpasar Tahun 2025 adalah:

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421
5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7) Undang – undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

16) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7)
25) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
26) Peraturan Daerah Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5)

27) Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
28) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).
29) Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);
30) Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/2050/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar Tahun 2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja BKPSDM Kota Denpasar Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen penetapan perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah sebagai tolok ukur penilaian kinerja BKPSDM Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025. Sedangkan tujuannya adalah:

1) Memberikan arah dalam menjalankan program kegiatan di BKPSDM Kota Denpasar tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pembangunan Kota Denpasar
2) Menyajikan data secara akurat, lengkap dan komprehensif terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan
3) Sebagai acuan dalam pengambilan keputusan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian *(review)* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-1) hingga triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan IKU, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan organisasi dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM KOTA DENPASAR TAHUN 2025

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM KOTA DENPASAR TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN CAPAIAN RENSTRA

UPAYA YANG TELAH KAMI LAKUKAN

BKPSDM Kota Denpasar berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepegawaian yang profesional

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Denpasar Tahun 2025 hingga akhir Triwulan II menjadi bagian penting dalam upaya menilai sejauh mana target kinerja tahunan dapat direalisasikan secara bertahap dan berkesinambungan. Evaluasi ini tidak hanya memotret capaian program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, namun juga memberikan gambaran awal terhadap kontribusi masing-masing kegiatan terhadap pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM.

Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi capaian kinerja, baik yang mendukung percepatan maupun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan. Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian kebijakan dapat dirumuskan lebih dini guna memastikan efektivitas pelaksanaan program serta akuntabilitas kinerja instansi dalam pengelolaan manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar terutama untuk usulan Perubahan Rrencana Kerja 2025.

Berikut adalah tabel capaian kinerja RENSTRA BKPSDM Kota Denpasar.

Tabel 1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2025

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program s/d tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (RENJA BKPSDM Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKPSDM s/d Tahun 2025	
						Target Renja BKPSDM Tahun 2025	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2025 (Triwulan II)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
3		BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN									
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	90%	481%	100%	100.00%	100%	100%	681%	757%
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang tunjangan sesuai peraturan dan perundangan yang berlakuMenerima Gaji dan Tunjangan ASN	320 orang	192 orang	64 orang	64 orang	100%	64 orang	320 orang	100%
	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	67%	67%	100%	100%	100%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program s/d tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (RENJA BKPSDM Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKPSDM s/d Tahun 2025	
						Target Renja BKPSDM Tahun 2025	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2025 (Triwulan II)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	5 Paket	100%
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	1 Paket	13 Paket	260%
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	3 paket	1 paket	1 Paket	100%	1 paket	5 paket	100%
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	5 Dok	14 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	1 Dok	18 Dok	360%
	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 lap	3 lap	1 lap	0 Lap	0%	1 lap	4 lap	80%
	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPSD	4 lap	2 Lap	1 Lap	0 Lap	0%	1 Lap	3 Lap	75%
	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah	Persentase pemenuhan pengadaan BMD	100	100			0%	100	100	100%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program s/d tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (RENJA BKPSDM Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKPSDM s/d Tahun 2025	
						Target Renja BKPSDM Tahun 2025	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2025 (Triwulan II)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	15 unit	5400%	63 Unit	18 Unit	29%	32 Unit	10400%	693%
	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	88.81	93	80.13	86.16%	93	93.73	104%
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Lap	3 Lap	1 Lap	0 Lap	0	1 Lap	4 Lap	80%
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	5 Lap	3 Lap	1 Lap	0 Lap	0	1 Lap	4 Lap	80%
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Lap	3 Lap	1 Lap	0 Lap	0	1 Lap	4 Lap	80%
	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	52%	52%	100%	100%	100%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program s/d tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (RENJA BKPSDM Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKPSDM s/d Tahun 2025	
						Target Renja BKPSDM Tahun 2025	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2025 (Triwulan II)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	120 unit	72 unit	24 unit	10 unit	41.67%	24 unit	106 unit	88%
	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	350 unit	214 unit	70 unit	9 unit	12.86%	70 unit	293 unit	84%
	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	3 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	5 unit	100%
2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan aspek-aspek manajemen kepegawaian berdasarkan sistem merit	99%	99%	99%	0%	0%	99%	99%	100%
	2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	- Nilai Aspek Perencanaan	40	40	40	0	0%	40	40	100%
			- Nilai Aspek pengadaan	40	40	40	0	0%	40	40	100%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program s/d tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (RENJA BKPSDM Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKPSDM s/d Tahun 2025	
						Target Renja BKPSDM Tahun 2025	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2025 (Triwulan II)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
			- Nilai aspek perlindungan dan pelayanan ASN	16	16	16	0	0%	16	16	100%
			- Nilai Aspek Sistem Informasi	23	19	23	0	0%	23	19	83%
	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	10 Dok	6 Dok	2 Dok	0 Dok	0	1 Dok	7 Dok	70%
	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	5 Lembaga	3 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	5 Lembaga	100%
	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dok	3 Dok	1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	4 Dok	80%
	2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Aspek Mutasi dan promosi	40	22.5	40	0	0%	40	22.5	56%
	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana, dan Mutasi ASN Antar Daerah	15 Dok	7 Dok	1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	8 Dok	53%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program s/d tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (RENJA BKPSDM Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKPSDM s/d Tahun 2025	
						Target Renja BKPSDM Tahun 2025	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2025 (Triwulan II)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	20 Dok	9 Dok	2 Dok	0 Dok	0%	2 Dok	11 Dok	55%
	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dok	3 Dok	1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	4 Dok	80%
	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Aspek Manajemen Kinerja	80	80	80		0%	80	80	100%
			Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	37.5	40	37.5		0%	40	40	107%
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Dok	3 Dok	1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	4 Dok	80%
4		BIDANG URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
2		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pemenuhan aspek manajemen talenta berdasarkan sistem merit	81%	66%	75%		0%	75%	66%	81%
	2.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Nilai Aspek Pengembangan Karir	105	80	100		0%	80	80	76%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program s/d tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (RENJA BKPSDM Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKPSDM s/d Tahun 2025	
						Target Renja BKPSDM Tahun 2025	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2025 (Triwulan II)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1064 org	5059 org	254 org	147 org	58%	134 org	5340 org	502%
	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	15 Dok	7 Dok	3 Dok	0 Dok	0%	3 Dok	10 Dok	67%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program s/d tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (RENJA BKPSDM Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKPSDM s/d Tahun 2025	
						Target Renja BKPSDM Tahun 2025	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2025 (Triwulan II)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	2.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	- Nilai Dimensi Kualifikasi	25	12.72	25	21.53	86%	22	21.53	86%
			- Nilai Dimensi Kompetensi	27	19.58	22	10.42	47%	25	10.42	39%
	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	20 Lap	11 Lap	4 Lap	0 Lap	0%	3 Lap	14 Lap	70%

Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Mayoritas dari target yang direncanakan untuk Tahun 2025 masih banyak yang belum terealisasi kinerjanya di triwulan II. Terdapat 13 (tiga belas) sub kegiatan yang capaian di triwulan II masih 0%, Hal ini disebabkan, mayoritas target indikator merupakan target yang baru dapat dihitung pada akhir tahun 2025 atau pada awal tahun 2026.

Dibandingkan dengan capaian RENSTRA BKPSDM, Tahun 2025 adalah tahun keempat dari periode 2021 – 2026, yang mana diharapkan capaian targetnya sudah berada pada rentang 75% -85%. Terlihat pada Tingkat capaian RENSTRA mayoritas sudah mencapai target bahkan melebihi target. Tetapi, masih ada yang capaiannya dibawah 80% seperti Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang capaian hingga tahun 2024 baru 75%, Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK mencapai 70%, Sub kegiatan pengelolaan Mutasi yang mencapai 53%, Sub kegiatan Pegelolaan kenaikan Pangkat PNS 55%, sub kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang mencapai 67%, dan sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatanyang capaiannya 70%.

Sementara itu ntuk Kegiatan yang indikatornya merupakan nilai dari aspek di Indeks sistem merit yang sampai dengan triwulan II pada tingkat capaian RENSTRA dibawah 80% yaitu Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang capaiannya 56%, Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang capaiannya 76%, dan Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan indikator Nilai Dimensi Kualifikasi sebesar 39%.

Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Adapun program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja sampai dengan triwulan II adalah Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN. Semua Sub kegiatan ini telah mencapai target 100%.

Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Sampai dengan triwulan II, tidak ada subkegiatan yang capaiannya melebihi target. Tetapi jika dbandingkan dengan Tingkat capaian RENSTRA, mayoritas sudah melebihi target, antara lain: Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.

Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target antara lain karena:

1. Penyelesaian target kebanyakan merupakan laporan ataupun dokumen yang baru disusun pada akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026.
2. Untuk capaian kegiatan tidak mencapai target karena belum optimal menggunakan Sistem Manajemen Talenta dalam proses manajemen ASN.
3. Terdapat perpindahan aplikasi pengadaan dari ekatalog versi 5 ke versi 6 dimana menyebabkan pengadaan barang jasa banyak tertunda.

Faktor yang menyebabkan melebihi target kinerja antara lain karena:

1. Penyesuaian target (bertambah) sesuai arahan Bappeda Kota Denpasar. Misalnya untuk target pada sub kegiatan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan. Kenaikan target pada tahun berjalan menjadikan kenaikan realisasi, sehingga ketika dibandingkan dengan target akumulasi pada RENSTRA menjadil sangat besar.

Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

- Capaian yang belum optimal di awal tahun berisiko menghambat pencapaian target akhir tahun dan target Renstra, terutama jika kegiatan bersifat kompleks dan memerlukan waktu pelaksanaan panjang.
- Sebaliknya, capaian tinggi di awal seperti pada pengadaan peralatan berpotensi meringankan beban realisasi di triwulan berikutnya, namun perlu dikaji keberlanjutannya agar tidak menimbulkan ketimpangan penganggaran dan akuntabilitas.

Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil

- Perlu adanya percepatan pelaksanaan kegiatan yang belum terealisasi pada triwulan selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan peningkatan kualitas ASN dan sistem kepegawaian.
- Penguatan koordinasi lintas bidang serta percepatan proses administratif menjadi krusial agar kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
- Perlu dilakukan evaluasi atas program yang realisasinya jauh melebihi target untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- Optimalisasi sistem monitoring dan pengendalian kegiatan secara berkala untuk mencegah ketertinggalan capaian.

.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BKPSDM KOTA DENPASAR

Kinerja pelayanan BKPSDM pada tahun 2025 diukur dengan menggunakan indikator yang ditetapkan pada RENSTRA Periode 2021 – 2026. Adapun indikator yang tersaji pada RENSTRA adalah Indikator Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengacu kepada RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021 – 2026.

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan untuk menilai kinerja pelayanan BKPSDM Kota Denpasar adalah Indeks Profesionalitas ASN sebagai indikator Tujuan, serta Indeks Sistem Merit sebagai Indikator Sasaran.

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar sampai dengan Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja RENSTRA Tahun						Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025)*
1	Mewujudkan ASN di Pemerintah Daerah Kota Denpasar yang profesional dalam menyelenggarakan pelayanan publik	Indeks Profesionalitas ASN	60	60	69.99	74.99	80.99	86.99	60.04	62.06	74.04	84.26	41.17
2	Peningkatan kualitas manajemen ASN yang berdasarkan sistem merit	Indeks Sistem Merit	0.73	0.85	0.89	0.92	0.95	0.96	0.7	0.73	0.81	0.95	n/a

**Cut off 31 Maret 2025*

Capaian Tujuan untuk Indeks Profesionalitas ASN dapat dipantau melalui aplikasi JASN dan indeks profesionalitas ASN dapat dipantau untuk capaian individu pada aplikasi MyASN dengan akun masing-

masing. Untuk Sasaran Strategis dengan indikator Indeks Sistem Merit tidak dapat dipantau per triwulan karena merupakan penilaian akhir tahun. Sehingga, baru dapat diketahui hasil penilaiannya pada Bulan Desember 2025.

Sementara untuk Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdapat 6 (enam) indikator yang diambil dalam Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017.

Berdasarkan data capaian indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, dapat disampaikan evaluasi sebagai berikut:

1. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (JP)
   Target Renstra untuk indikator ini konsisten sebesar 20 JP per tahun. Namun, capaian pada tahun 2025 hanya sebesar 9,09 JP, menunjukkan penurunan yang cukup tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2021–2024). Hal ini mengindikasikan belum optimalnya pelaksanaan diklat teknis di awal tahun, yang kemungkinan besar disebabkan oleh faktor perencanaan jadwal pelatihan atau kendala anggaran dan koordinasi. Perlu percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya untuk mengejar target tahunan.
2. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
   Indikator ini menunjukkan fluktuasi signifikan, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 (71%). Namun, capaian pada Triwulan II Tahun 2025 menurun drastis menjadi 2,27%, jauh dari target tahun 2025 sebesar 4,74%. Realisasi yang rendah ini wajar mengingat pelatihan formal biasanya dilaksanakan pada pertengahan hingga akhir tahun, namun tetap perlu menjadi perhatian untuk memastikan proses seleksi dan persiapan diklat berjalan lebih awal.
3. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Diklat Struktural
   Target Renstra secara konsisten sebesar 100% setiap tahun. Capaian tahun 2025 mencapai 112,75%, melebihi target dan menunjukkan keberhasilan yang sangat baik dalam pelaksanaan diklat struktural. Hal ini menunjukkan adanya penyelesaian backlog dari tahun-tahun sebelumnya serta pelaksanaan pelatihan bagi pejabat baru secara tepat waktu.

4. Persentase Keterisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

   Capaian sampai dengan Triwulan II 2025 adalah 84,62%, sedikit di bawah target 100%. Meski sempat mencapai 100% pada tahun 2023, penurunan ini dapat disebabkan oleh adanya mutasi, promosi, pensiun, atau penataan organisasi. Upaya percepatan pengisian jabatan JPT yang kosong perlu dilakukan melalui seleksi terbuka dan perencanaan kebutuhan jabatan yang terukur.

5. Persentase Keterisian Jabatan Administrasi

   Pada Triwulan II 2025, capaian berada di angka 90,80%, masih di bawah target 100%. Meskipun trennya cukup stabil dari tahun ke tahun, sedikit penurunan dibandingkan tahun 2023 dan 2024 menunjukkan perlunya konsolidasi internal dalam pemetaan jabatan serta percepatan pengangkatan atau rotasi pegawai.

6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu

   Jumlah pemangku JF terus meningkat dari tahun ke tahun, dan pada Triwulan II 2025 telah mencapai 4.541 orang, mendekati target akhir tahun 2025 sebesar 3.186. Kelebihan ini menunjukkan keberhasilan implementasi kebijakan transformasi jabatan struktural ke fungsional serta peningkatan minat ASN terhadap pola karier berbasis kompetensi dan kinerja.

Adapun capaian kinerja yang telah dicapai oleh BKPSDM pada tahun 2025 telah disajikan pada table berikut ini:

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar sampai dengan Tahun 2025

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Renstra BKPSDM Tahun Ke-						Realisasi Capaian tahun ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025)*
1	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	JP	20	20	20	20	20	20	57.17	48.6	419.48	253.13	9.09
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persentase	6.52%	6.52%	8.98%	12.36%	4.74%	6.52%	1%	5%	71%	34.26%	2.27%
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71%	75%	11.55%	96.02%	112.75%
4	Persentase keterisian jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	72%	92%	100%	97.44%	84.62%
5	Persentase keterisian jabatan adminsitrasi pada instansi pemerintah	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79%	95%	99.49%	94.19%	90.80%
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2886	2886	2986	3086	3186	3286	3024	3701	3816	4623	4541

**Cut off 31 Maret 2025*

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BKPSDM KOTA DENPASAR

Core busines BKPSDM Kota Denpasar adalah membantu Walikota Denpasar dalam hal kepegawaian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, kepegawaian yang menjadi kewenangan BKPSDM Kota Denpasar adalah Pegawai Negeri Sipil dan PPPK. Dengan bertujuan untuk mewujudkan ASN di Lingkungan Kota Denpasar yang lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada publik, maka

Isu strategis BKPSDM Kota Denpasar sesuai yang tertuang dalam RENSTRA adalah:

1. Rendahnya profesionalitas ASN di pemerintah Kota Denpasar
2. Pengelolaan manajemen kepegawaian yang tidak berdasarkan sistem merit.

Dalam pelaksanaan untuk menanggulangi sisu strategis tersebut, terdapat isu-isu turunan yang dihadapi oleh BKPSDM Kota Denpasar dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

2.3.1. KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN 2025 SESUAI TUPOKSI BKPSDM KOTA DENPASAR

Hasil kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan pada BKPSDM Kota Denpasar pada Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

<u>Rapat Evaluasi Capaian Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025 pada BKPSDM Kota Denpasar</u>

Sebagai komitmen untuk memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja diatasnya (harmonisasi kinerja), maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala dan berjenjang.

BKPSDM mewujudkan hal tersebut melalui Rapat Evaluasi Capaian Tahun 2024 serta menentukan strategi rencana kerja tahun 2025.



Gambar 2. Rapat evaluasi Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025

Rapat Tim Anggaran Pemeritah Daerah (TAPD) Kota Denpasar di Ruang Rapat Praja Madya Sekretariat Daerah Kota Denpasar.

Rapat dipimpin oleh Bapak Sekretaris Kota Denpasar didampingi oleh Bapak Plt. Asisten III dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar diikuti oleh Tim TAPD Kota Denpasar.

Rapat membahas Penyelesaian Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, Proses Pesetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke Kemendagri dan Penghitungan Pajak Tarif Efektif Rata-Rata.



Gambar 3. Rapat Tim TAPD

Rapat Perubahan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar/ Ibu Plt Asisten I Setda Kota Denpasar didampingi oleh Tim Penyusun dan Perancang (Suncang) serta diikuti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dan Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar. Pembahasan perubahan perwali TPP berkenaan dengan pajak berbasis Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan persertujuan atau pelaporan dalam pembayaran TPP.



Gambar 4. Rapat Perubahan Perwali TPP

Pembinaan Perangkat Daerah dibawah binaan Irban I dari Inspektorat Kota Denpasar

Pembinaan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025 pukul 14.00 WITA di BKPSDM dengan pemaparan materi oleh Irban I, A.A Ngurah Oka Wiranata, SS., M.Si beserta staf dan diterima oleh Sekretaris BKPSDM, I Komang Adi Wirawan, S.E,. M.Si, Kepala Bidang Mutasi, Luh Nyoman Endi Suari, S.Sos dan Kepala Bidang PKA, Ida Bagus Komang Yudi Sutawa, S.IP.,M.A.P, serta staf BKPSDM Kota Denpasar.



Gambar 5. Rapat Pembinaan oleh Inspektorat

Pembinaan bertujuan untuk early warning kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan Inspektorat Kota. Berdasarkan hasil reviu dari Inspektorat, BKPSDM tidak memiliki temuan di tahun 2024 dan akan ditingkatkan agar lebih baik di tahun berikutnya, untuk itu diperlukan koordinasi dan kolaborasi dengan Inspektorat Kota Denpasar agar segala kegiatan yang dilakukan oleh BKPSDM Kota Denpasar sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pemberian Penghargaan Pegawai Berkinerja Terbaik periode Oktober – Desember 2024

Di sela rangkaian susunan acara rutin kegiatan Apel ini, disampaikan pula Pengumuman dan Pemberian Piagam Penghargaan kepada Pegawai Berkinerja Terbaik Periode Oktober-Desember 2024 pada BKPSDM Kota Denpasar, mengingat Surat Keputusan Nomor 800.1/9107/BKPSDM/2024 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Pegawai Berkinerja Terbaik Berdasarkan Rapor ASN Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar.

Berikut nama Pegawai Berkinerja Terbaik bulan Oktober-Desember tahun 2024:

- Pegawai Berkinerja Terbaik jenjang Administrator yakni : I Wayan Ardana, S.Kom dengan nilai akhir 92,5
- Pegawai Berkinerja Terbaik Jenjang Pengawas / JFT : Putu Ayu Widiari, SE.,M.Si dengan nilai akhir 90,83

- Pegawai Berkinerja Terbaik Jenjang Pelaksana: Komang Ayu Pradnyatiwi Mustika, S.H., M.H. dengan nilai akhir 94,58, Ni Made Widya Premaiswari, S.STP., M.AP. dengan nilai 94,33, dan Ida Ayu Nyoman Sri Utami Dewi, S.E dengan nilai akhir 93,3.

Penilaian Pemberian Penghargaan Pegawai Berkinerja Terbaik Berdasarkan Rapor ASN didasarkan pada:

a. Predikat Kinerja Pegawai bulan Oktober-Desember tahun 2024;
b. Capaian Produktivitas dan Disiplin bulan Oktober-Desember tahun 2024;
c. Waktu Beban Kerja bulan Oktober-Desember tahun 2024;
d. Hukuman Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku bulan Oktober-Desember tahun 2024; dan
e. Penilaian Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar.

Fasilitasi Penyesuaian Data dan pengisian DRH PPPK Tahap I TA. 2024

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Denpasar melalui bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi memfasilitasi kegiatan Penyesuaian Data dan Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) PPPK Tahap I Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Kegiatan dilaksanakan selama 20 hari dari tanggal 7 - 26 Januari 2025 dengan total 99 sesi, diikuti oleh seluruh peserta yang telah lolos seleksi kompetensi PPPK Tahun 2024, baik itu dari Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Guru.

Harapannya dengan kegiatan ini dapat menyamakan persepsi dalam pengisian DRH dan mengurangi risiko terjadinya kesalahan data dalam pembuatan Surat Pernyataan Rencana Penempatan (SPRP) dan SK CPPPK sebagai persyaratan dokumen yang digunakan untuk melakukan usul Penetapan NI PPPK.



Gambar 6. Fasilitasi Pengisian DRH

Selanjutnya akan dilakukan verifikasi berkas pada Instansi terlebih dahulu, kemudian usul Penetapan NI PPPK dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara elektronik melalui SIASN. Untuk seluruh peserta yang telah mengakhiri pengisian DRH, agar tetap memantau group pemberkasan untuk mendapat informasi lebih lanjut terkait hasil verifikasi.

Ceremonial Pemusnahan Arsip Inaktif BKPSDM Kota Denpasar

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar melaksanakan Ceremonial Pemusnahan Arsip Inaktif yang difasilitasi oleh Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar pada Hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 pada Ruang Studio Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, Kepala Bidang Pengelolaan, Penyelamatan, dan Pelestarian Arsip, Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sistem, Arsiparis Ahli Madya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denbeserta Panitia Pemusnahan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar dan Tim Penilai Pemusnahan Arsip BKPSDM Kota Denpasar.

Kegiatan ini dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA)



Gambar 7. Pemusnahan Arsip Inaktif

Proses Pemusnahan Arsip Inaktif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar disaksikan langsung oleh unsur dari Inspektorat Kota Denpasar, Bagian Hukum Setda Kota Denpasar serta Arsiparis Kota Denpasar dan acara diakhiri dengan Penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Arsip.

Pemeriksaan Dugaan pelanggaran Disiplin pegawai ASN

Tim Pemeriksa Hukuman Disiplin dan Pertimbangan Izin Perceraian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran disiplin Pegawai ASN.

Rapat dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar selaku Ketua Tim Pemeriksa.

Penegakan Disiplin dimaksudkan untuk membina dan memberikan efek Jera bagi Pegawai ASN yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja 2026 BKPSDM Kota Denpasar

Selasa, 18 Februari 2025 BKPSDM Kota Denpasar mengadakan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 dengan mengundang seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting ini dibuka oleh Kepala BKPSDM Kota Denpasar, Bapak Drs. I Wayan Sudiana



Gambar 8. Forum Perangkat Daerah Renja 2026

Dilanjutkan dengan paparan oleh Sekretaris Bappeda Kota Denpasar Ibu Ir. Luh Nyoman Rai Suryathi, M.Si serta paparan dari Sekretaris BKPSDM Provinsi Bali oleh Bapak Dr. I Made Mahadi Sanatana, S.STP., M.A.P yang kemudian dilanjutkan paparan oleh Kepala BKPSDM Kota Denpasar. BKPSDM Kota Denpasar memberikan paparan mengenai gambaran umum kepegawaian serta target dan rencana program kegiatan BKPSDM Kota Denpasar di Tahun 2026.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan ditutup dengan pembacaan hasil perumusan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah oleh Sekretaris BKPSDM Kota Denpasar.

Semoga kegiatan Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat menjadi sarana penajaman kinerja sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

Sosialisasi Manajemen Kinerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

Sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi dari BKPSDM, pada Selasa,18 Februari 2025 di Ruang Rapat Lantai III BKPSDM dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Manajemen Kinerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Kegiatan ini merupakan bentuk Penghargaan atau reward yang diberikan kepada ASN berdasarkan peringkat RAPOR ASN terbaik. Kegiatan dibuka oleh Kepala BKPSDM, Drs. I Wayan Sudiana. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah yang bermanfaat bagi ASN Kota Denpasar, tidak hanya untuk menyelaraskan pemahaman kita bersama akan pentingnya Manajemen Kinerja ASN, tetapi juga menjadi wujud penghargaan kepada ASN atas capaian dalam RAPOR ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Pelatihan Kompetensi PBJ Level 2 PPK tipe C

BKPSDM memfasilitasi Pelatihan Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C yang dilakukan secara blended learning (e-Learning dan tatap muka / classroom). Pelatihan ini mengikutkan 70 pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dibagi menjadi 2 gelombang. Hal ini guna meningkatankan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan pelaku pengadaan khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana ketentuan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelatihan secara tatap muka (classroom) untuk gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 14 Pebruari 2025 dan gelombang kedua pada 18 s.d 19 Pebruari 2025 bertempat di Aston Denpasar Hotel dan Convention Center, Jl. Gatot Subroto Barat No. 283, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara yang difasilitasi oleh Diponegoro Smart Solution selaku Lembaga Penyelenggara Pelatihan (LPP) yang terakreditasi oleh LKPP.



Gambar 9. Pelatihan PBJ PPK Tipe C

Kegiatan tatap muka ini merupakan kelanjutan dari pelatihan secara e-learning di website LKPP yang telah diikuti dan diselesaikan oleh peserta. Setelah kegiatan tatap muka, pelatihan akan dilanjutkan dengan Evaluasi Akhir dan Post Test yang dilaksanakan di kedudukan masing – masing peserta.

Diharapkan melalui kegiatan ini, para peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan bisa mendapatkan sertifikasi kompetensi PBJ PPK tipe C agar bisa melaksanakan pengadaan barang jasa yang di Perangkat Daerahnya masing - masing.

2.3.2. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN DALAM MENYELENGGARAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Adapun permasalahan dan hambatan yang dialami pada tahun 2025 triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian target kebanyakan merupakan laporan ataupun dokumen yang baru disusun pada akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026.
2. Untuk capaian kegiatan tidak mencapai target karena belum optimal menggunakan Sistem Manajemen Talenta dalam proses manajemen ASN.
3. Terrdapat perpindahan aplikasi pengadaan dari ekatalog versi 5 ke versi 6 dimana menyebabkan pengadaan barang jasa banyak tertunda.

2.3.4. TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

TANTANGAN

Tantangan merupakan suatu hambatan yang ditemukan dalam instansi yang bersumber dari pihak eksternal. Hal-hal bersumber dari external dapat berupa peraturan yang diterbitkan dari Pemerintah/Instansi Pusat ataupun kondisi lain yang tidak dapat dikontrol langsung oleh instansi. Berikut adalah tantangan yang dihadapi oleh BKPSDM Kota Denpasar tahun 2025:

1. Penggunaan Aplikasi I-Mut yang menyebabkan proses bisnis administrasi kepegawaian menjadi lebih lama dari yang seharusnya.
2. Belum ada kejelasan tentang reformulasi penilaian indeks sistem merit setelah pembubaran KASN dan diserahterimakan ke BKN.

PELUANG

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Denpasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian. Berbagai peluang hadir untuk memajukan sistem kepegawaian yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Adapun peluang untuk BKPSDM di Tahun 2025 ini adalah dengan penyusunan RENSTRA periode baru dapat menyusun ulang kinerja dan mengkaji ulang proses bisnis yang dapat memberikan dampat efesiensi dan efektifitas dalam mencapai target IKU.

2.3.5. TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Sesuai dengan RENSTRA BKPSDM Kota Denpasar Periode 2021 – 2026, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang berkaitan dengan kewenangan urusan BKPSDM adalah TPB nomor 16 yaitu: **Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan** dengan isu yang terkait adalah **Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representative di setiap tingkatan**. Teridentifikasi pada kajian TPB ini, kesenjangan yang terjadi adalah **Masih rendahnya proporsi jabatan di lembaga public dibandingkan dengan distribusi nasional.** Artinya masih terdapat kesenjangan keterwakilan setiap kelompok kepentingan dalam pengisian formasi jabatan. Dalam hal kewenangan BKPSDM Kota Denpasar, proporsi jabatan yang dimaksud adalah Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama yang merupakan jabatan dengan kewenangan dalam membuat keputusan/kebijakan publik.

Sorotan yang menjadi isu saat ini adalah keterwakilan dalam hal gender. Sementara kompetensi dari para jabatan yang mengisi formasi JPT Pratama telah melalui proses seleksi terbuka sesuai amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil. Seleksi terbuka ini dilakukan untuk memastikan penempatan dan pengisian JPT Pratama sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan.

Tabel 4. Sebaran ASN di Pemerintah Kota Denpasar Berdasarkan Gender

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	30	8	38
2	Eselon III	84	73	157
3	Eselon IV	111	120	231
4	Non Eselon	2063	4096	6159
JUMLAH		2288	4297	6585

Tabel 5. Sebaran ASN di Pemerintah Kota Denpasar Berdasarkan Gender dari Tahun 2022 hingga Tahun 2024

No.	Nama Jabatan	2022			2023			2024		
		Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	30	8	38	31	8	39	30	8	38
2	Eselon III	96	75	171	93	80	173	84	73	157
3	Eselon IV	116	114	230	118	121	239	111	120	231
4	Non Eselon	1936	3522	5458	1852	3544	5396	2063	4096	6159
JUMLAH		2178	3719	5897	2094	3753	5847	2288	4297	6585

BKPSDM Kota Denpasar telah membuka peluang seluas-luasnya dalam pengisian jabatan yang berdasarkan sistem merit, dengan tidak memberikan persyaratan terkait jenis kelamin tetapi menitik beratkan pada kualifikasi dan kompetensi, tetapi hal tersebut ternyata belum berdampak kepada partisipasi pegawai perempuan dalam mengikuti lelang jabatan.

2.4. REVIEW TERHADAP RKPD

Posisi Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD Kota Denpasar adalah dua arah, yang pertama, menjadi input dan yang kedua mempedomani RKPD. Sebagai input disini adalah perangkat daerah melalu Renja, mengajukan usulan program / kerja yang menjadi bahan ataupun dasar dalam penyusunan RKPD. Dilain pihak, RKPD merupakan pedoman / acuan perangkat daaerah untuk menyusun Renja.

Tabel 6. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD 2025

Kode	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				485,178,363,712	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				31,246,378,615	
5.03	KEPEGAWAIAN				1,523,864,500	KEPEGAWAIAN				16,107,572,115	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	462,994,417,212	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	15,488,042,115	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan perangkat Daerah		Persentase serapan anggaran kegiatan/subkegiatan	90%	460,381,848,200	Administrasi Keuangan perangkat Daerah		Persentase serapan anggaran kegiatan/subkegiatan	90%	12,812,331,664	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tunjangan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku	55 Orang	460,381,848,200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tunjangan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku	55 Orang	12,812,331,664	

Kode	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	661,801,850	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	411,276,100	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,550,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,770,000	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	252,174,100	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	231,026,350	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	91,254,750	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	91,254,750	
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	11,220,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	11,220,000	
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan tamu	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10,696,000	Fasilitasi Kunjungan tamu	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6,000,000	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1 Laporan	286,907,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1 Laporan	58,005,000	

Kode	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan Konsultasi SKPD		Koordinasi dan Konsultasi SKPD			dan Konsultasi SKPD		Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	570,556,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	858,553,000	
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	101 Unit	570,556,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	101 Unit	858,553,000	
5.03.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerntahan Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat	95	699,105,162	Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerntahan Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat	95	889,435,351	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	16,000,000	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11,000,000	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	167,400,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	167,000,000	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	515,705,162	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	711,435,351	

Kode	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	100%	681,106,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	100%	516,446,000	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	258,056,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	289,996,000	
5.03.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	123,050,000	Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	115,750,000	
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	110,700,000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase pemenuhan aspek-aspek manajemen kepegawaian	91%%	1,523,864,500	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase pemenuhan aspek-aspek manajemen kepegawaian	91%%	619,530,000	

Kode	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			berdasarkan sistem merit					berdasarkan sistem merit			
5.03.02.2.01	Pengadan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN		(1) Nilai Aspek Perencanaan, (2) Nilai Aspek pengadaan, (3) Nilai aspek perlindungan dan pelayanan ASN, (4) Nilai aspek Sistem Informasi	(1) 40, (2) 40, (3) 16, (4) 24	1,066,505,500	Pengadan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN		(1) Nilai Aspek Perencanaan, (2) Nilai Aspek pengadaan, (3) Nilai aspek perlindungan dan pelayanan ASN, (4) Nilai aspek Sistem Informasi	(1) 40, (2) 40, (3) 16, (4) 24	193,940,000	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	868,392,000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	52,290,000	
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Denpasar	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1 Lembaga	103,113,500	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Denpasar	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1 Lembaga	46,650,000	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	95,000,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	95,000,000	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN		Nilai Aspek Mutasi dan promosi	40	437,919,000	Mutasi dan Promosi ASN		Nilai Aspek Mutasi dan promosi	40	408,370,000	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan	1 Dokumen	107,314,000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan	1 Dokumen	53,015,000	

Kode	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah					Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Denpasar	Jumlah pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Dokumen	22,050,000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Denpasar	Jumlah pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Dokumen	11,250,000	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	308,555,000	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	344,105,000	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		(1) Nilai Aspek Manajemen Kinerja, (2) Nilai Aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin	(1) 80, (2) 37,5	19,440,000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		(1) Nilai Aspek Manajemen Kinerja, (2) Nilai Aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin	(1) 80, (2) 37,5	17,220,000	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	19,440,000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	17,220,000	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				20,660,082,000	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				15,138,806,500	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase pemenuhan aspek manajemen talenta berdasarkan sistem merit	75%	20,660,082,000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase pemenuhan aspek manajemen talenta berdasarkan sistem merit	75%	15,138,806,500	

Kode	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis		Nilai Aspek Pengembangan Karir	100	13,896,248,000	Pengembangan Kompetensi Teknis		Nilai Aspek Pengembangan Karir	100	11,963,753,500	
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Denpasar	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	134 orang	13,252,528,000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Denpasar	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	134 orang	11,392,813,500	
5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan	1 Dokumen	643,720,000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan	1 Dokumen	570,940,000	

Kode	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		(1) Nilai Dimensi Kualifikasi (2) Nilai Dimensi Kompetensi	(1) 22, (2) 25	6,763,834,000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		(1) Nilai Dimensi Kualifikasi (2) Nilai Dimensi Kompetensi	(1) 22, (2) 25	3,175,053,000	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	1 Laporan	6,763,834,000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	1 Laporan	3,175,053,000	

Kode	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kepemimpinan, dan Prajabatan					Kepemimpinan, dan Prajabatan			

Komitmen untuk peningkatan kompetensi ASN telah dituangkan dalam Rencana Aksi Peningkatan Kompetensi Walikota Denpasar Periode 2022 – 2026. Hal ini dikuatkan dengan mandatory spending berdasarkan Pedoman Penyusunana Anggaran Dimana untuk anggaran pengembangan kompetensi ASN minimal 0,16% dari total belanja APBD.

Rencana yang tersaji dibawah terlampir dalam Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi Walikota Denpasar Tahun 2022 – 2026. Rencana aksi tersebut disusun pada tahun 2021 berdasarkan data kebutuhan perangkat daerah dan program prioritas daerah. Setelah rencana ini ditetapkan terdapat perubahan kebijakan dari pusat yang menyebabkan beberapa perencanaan pengembangan kompetensi tidak dapat dianggarkan. Sehingga, dana tersebut dialihkan ke pengembangan pelatihan lain seperti pengembangan kompetensi SPBE. Tahun 2024 telah dilakukan peningkatan kompetensi bagi pegawai di Dinas Komunikasi & Informatika Pemerintah Kota Denpasar dan Perangkat daerah lainnya yang memiliki tenaga IT atau yang tupoksinya berkaitan dengan SPBE. Peningkatan kompetensi ini bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Adapun rencana pengembangan kompetensi yang dianggarkan untuk tahun 2025 dialokasikan adalah sebagai berikut:

Tabel 7. RENCANA AKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

Tujuan	Sasaran	No	Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	% pencapaian target Pengembangan Kompetensi/triwulan				Perangkat Daerah
					Volume	Satuan				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terwujudnya SDM Kota Denpasar yang Profesional dan Kompeten	Meningkatnya Kompetensi SDM Kota Denpasar	A	Program Pengembangan SDM					1. BPSDM KEMENDAGRI/ BPSDM PROVINSI 2. INSTANSI PEMBINA TEKNIS 3. LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN YANG TERAKREDITASI 4.LEMBAGA KAJIAN/PENGABDIAN MASYARAKAT PERGURUAN TINGGI						
		I	Kegiatan Pengembangan Kompetensi											
		1.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren											
		1.1.1	Pelatihan Penyelenggaraan Tramtibum	Jumlah Peserta yang mendapatkan sertifikat pelatihan	10	Orang	150,000,000		ASN Sat.Pol.PP Kota Denpasar		50	50		Sat.Pol.PP Kota Denpasar
		1.1.2	Pelatihan Pendampingan UMKM	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan	4	orang	60,000,000		ASN pada Dinas Koperasi dan UMKM		100			Dinas Koperasi dan UMKM

Tujuan	Sasaran	No	Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	% pencapaian target Pengembangan Kompetensi/triwulan				Perangkat Daerah
					Volume	Satuan				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1.1.3	Pelatihan Kemetrologian	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat	2	orang	30,000,000		ASN pada Dinas Perindag		100			Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
		1,2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi Bagi Penyelenggara Perangkat Daerah Penunjang											
		1.2.4	Magang/ Praktek Kerja	Terselenggaranya Magang/praktek kerja pegawai	10	orang	-		ASN Potensial		10	45	45	Seluruh OPD
		1,3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Penyelenggara Urusan pemerintah Umum											
		1.3.1	Pelatihan Penanganan Konflik Pertanahan	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan	6	orang	90,000,000		ASN pada Dinas Perkim dan Kecamatan			100		Dinas Perkim dan Kecamatan
		1.3.2	Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Jumlah Peserta pelatihan yang lulus dan mendapatkan sertifikat	4	orang	160,000,000		PNS pada Dinas Perhubungan			100		Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	No	Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	% pencapaian target Pengembangan Kompetensi/triwulan				Perangkat Daerah
					Volume	Satuan				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1,4	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum											
		1.4.1	Uji kompetensi bagi JPTJ A, JP dan pelaksana	Jumlah Peserta yang diuji	150	Orang	525,000,000		JTP.JA.JP dan Pelaksana	5	40	45	10	Seluruh OPD
		II	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional											
			Terselenggaranya Ujian Sertifikasi Pengadaan barang jasa pemerintah tingkat dasar	Jumlah Peserta pelatihan yang lulus dan mendapatkan sertifikat	20	orang	300,000,000		ASN		50	50		Seluruh OPD
			Pelatihan Jafung Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	Jumlah Peserta pelatihan yang lulus dan mendapatkan sertifikat	8	orang	120,000,000		PNS Jafung PBJ		50	50		Bagian PBJ

Tujuan	Sasaran	No	Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	% pencapaian target Pengembangan Kompetensi/triwulan				Perangkat Daerah
					Volume	Satuan				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Terselenggaranya pelatihan teknis fungsional dan sosio kultural sesuai kebutuhan organisasi dan regulasi	Jumlah Peserta pelatihan yang lulus dan mendapatkan sertifikat	10	Orang	150,000,000		ASN	10	40	40	10	Seluruh OPD
		2,1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsinal, Kepemimpinan, dan Prajabatan											
		2.1.1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Pola Kontribusi)	Jumlah Peserta pelatihan yang lulus dan mendapatkan sertifikat	5	orang	226,305,000		Jabatan Pimpinan Tinggi		20	80		Seluruh OPD
		2.1.2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pola Kontribusi)	Jumlah Peserta pelatihan yang lulus dan mendapatkan sertifikat	6	orang	186,750,000		Jabatan Administrator	10	20	70		Seluruh OPD
		2.1.3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Pola Kontribusi)	Jumlah Peserta pelatihan yang lulus dan mendapatkan sertifikat	20	orang	504,600,000		Jabatan Pengawas	10	20	70		Seluruh OPD
		2.1.4	Pelatihan Dasar CPNS (Pola Kontribusi)	Jumlah Peserta pelatihan yang lulus	300	orang	2,788,800,000		Pelaksana	10	40	40	10	Seluruh OPD

Tujuan	Sasaran	No	Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	% pencapaian target Pengembangan Kompetensi/triwulan				Perangkat Daerah
					Volume	Satuan				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				dan mendapatkan sertifikat										
			Jumlah				5,291,455,000							

KETERANGAN :



: POLA KONTRIBUSI METODE BLENDED LEARNING
: POLA KONTRIBUSI METODE LURING
: POLA KONTRIBUSI METODE VIRTUAL/DARING
: POLA KEMITRAAN METODE BLENDED LEARNING
: POLA KEMITRAAN NON BUDGETER
: POLA KEMITRAAN METODE LURING

Pada renaksi yang akan dilampirkan dibawah ini, sudah disiapkan metode pengembangan kompetensi dalam berbagai metode. Total ada 6 (enam) metode, yaitu:

1. Pola Kontribusi Metode *Blended Learning*

   Merupakan pola pengembangan kompetensi dengan cara mengikutsertakan ASN Kota Denpasar pada penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara diklat terakreditasi. Metode pembelajaran dilaksanakan secara kombinasi meliputi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran dalam jaringan baik dengan *video conference*, *chatting* dan *e-learning*.

2. Pola Kontribusi Metode Luring

   Merupakan pola pengembangan kompetensi dengan cara mengikutsertakan ASN Kota Denpasar pada penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara diklat terakreditasi dengan metode konvensional tatap muka.

3. Pola Kontribusi Metode *Virtua*l/Daring

   Merupakan pola pengembangan kompetensi dengan cara mengikutsertakan ASN Kota Denpasar pada penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara diklat terakreditasi dengan metode metode pembelajaran dalam jaringan baik dengan *video conference*, *chatting* dan *e-learning*. Ini dapat dilakukan jarak jauh sehingga dapat dilakukan dengan perencanaan anggaran yang minim bahkan gratis.

4. Pola Kemitraan Metode *Blended Learning*.

   Merupakan pola pengembangan kompetensi yang dilakukan mandiri oleh BKPSDM Kota Denpasar dengan bekerjasama dengan Lembaga Penyelenggara diklat dan /atau narasumber kompeten bersertifikat. Pengembangan kompetensi ini menggunakan metode pembelajaran perpaduan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran dalam jaringan baik dengan *video conference*, *chatting* dan *e-learning*.

5. Pola Kemitraan Non-Budgeter.

   Merupakan pola pengembangan kompetensi yang dilakukan mandiri oleh BKPSDM Kota Denpasar dengan mengupayakan narasumber, lokus serta patok banding di dalam kota denpasar atau sekitarnya. Kegiatan ini dirancang tanpa mengeluarkan biaya (nol budget). Metode ini dapat dilakukan melalui magang atau praktek kerja serta pertukaran kerja pegawai dengan instansi yang dianggap dapat memberikan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan.

6. Pola Kemitraan Metode Luring

   Merupakan pola pengembangan kompetensi yang dilakukan mandiri oleh BKPSDM Kota Denpasar dengan bekerjasama dengan Lembaga Penyelenggara diklat dan /atau narasumber kompeten bersertifikat yang dirancang secara luring yaitu peserta dan narasumber/pengajar dilakukan tatap muka.

2.5. STRATEGI PENANGGULANGAN MASALAH / KENDALA

Adapun strategi untuk mengatasi kendala -kendala maupun tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan barang jasa Setda untuk percepatan pengadaan, mengadakan alternatif lain selama aplikasi e-katalog versi 6 belum sempurna.
2. Melakukan pemantaan berkala melalui aplikasi RANTAI KINERJA untuk mengendalikan capaian agara sesuai denga target yang ditetapkan
3. Menyusun kajian untuk melakukan perubahan strktur dan nomenklatur agar sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2025

Program dan kegiatan strategis BKPSDM mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Dari usulan Perubahan Anggaran untuk Tahun 2025 di BKPSDM Kota Denpasar, BKPSDM mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp.1.307.606.029. Dari yang anggaran induk sebesar Rp.29.938.773.586 menjadi Rp.31.246.378.615. Usulan penambahan ini sudah diinput pada SIPD.

Program dan kegiatan pada BKPSDM Kota Denpasar merupakan program untuk mendukung pelaksanaan program utama dan merupakan kegiatan belanja rutin terdiri dari 3 (tiga) program yang diimplementasikan kedalam 10 (sepuluh) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. USULAN RENCANA KEGIATAN PERUBAHAN ANGGARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				29,938,773,586	31,246,378,615	1,307,605,029
	KEPEGAWAIAN				16,009,647,086	16,107,572,115	97,925,029
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	14,553,074,086	15,488,042,115	934,968,029
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	90%%	90%%	12,464,117,512	12,812,331,664	348,214,152
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang tunjangan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku	70 orang	70 orang	12,464,117,512	12,812,331,664	348,214,152
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	429,901,400	411,276,100	-18,625,300
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	13,770,000	13,770,000	0

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	234,711,650	231,026,350	-3,685,300
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	91,254,750	91,254,750	0
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	11,220,000	11,220,000	0
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	8,000,000	6,000,000	-2,000,000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPSD	1 Laporan	1 Laporan	70,945,000	58,005,000	-12,940,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan BMD	100%	100%	393,607,000	858,553,000	464,946,000
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	63 Unit	90 Unit	393,607,000	858,553,000	464,946,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	93	806,702,174	889,435,351	82,733,177

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	11,000,000	11,000,000	0
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	167,400,000	167,000,000	-400,000
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	628,302,174	711,435,351	83,133,177
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	458,746,000	516,446,000	57,700,000
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	24 Unit	289,996,000	289,996,000	0
13	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	120 Unit	118,750,000	115,750,000	-3,000,000
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50,000,000	110,700,000	60,700,000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan aspek-aspek manajemen kepegawaian berdasarkan sistem merit	99%	99%	1,456,573,000	619,530,000	-837,043,000
	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	- Nilai Aspek Perencanaan - Nilai Aspek pengadaan - Nilai aspek perlindungan dan pelayanan ASN - Nilai Aspek Sistem Informasi	- 40 - 40 - 16 - 23	- 40 - 40 - 16 - 23	1,054,984,000	193,940,000	-861,044,000
15	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	2	865,050,000	52,290,000	-812,760,000
16	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	1	94,934,000	46,650,000	-48,284,000
17	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	95,000,000	95,000,000	0
	Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Aspek Mutasi dan promosi	40	40	384,369,000	408,370,000	24,001,000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
18	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana, dan Mutasi ASN Antar Daerah	1	1	104,364,000	53,015,000	-51,349,000
19	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2	2	11,250,000	11,250,000	0
20	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	1	268,755,000	344,105,000	75,350,000
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	- Nilai Aspek Manajemen Kinerja - Nilai Aspek Penggajian,Penghargaan dan Disiplin	- 80 -37.5	- 80 -37.5	17,220,000	17,220,000	0
21	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	17,220,000	17,220,000	0
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				13,929,126,500	15,138,806,500	1,209,680,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pemenuhan aspek manajemen talenta berdasarkan sistem merit	75%	75%	13,929,126,500	15,138,806,500	1,209,680,000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Nilai Aspek Pengembangan Karir	100	100	11,827,307,500	11,963,753,500	136,446,000
22	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	254 Orang	254 Orang	11,256,367,500	11,392,813,500	136,446,000
23	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	3 Dokumen	570,940,000	570,940,000	0
	Sertifikasi, Kelembagaan, pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	- Nilai Dimensi Kualifikasi - Nilai Dimensi Kompetensi	- 25 - 22	- 25 - 22	2,101,819,000	3,175,053,000	1,073,234,000
24	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bag iPimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	4 Laporan	2,101,819,000	3,175,053,000	1,073,234,000

Penambahan anggaran ini paling besar dialokasikan pada:

1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang bertambah Rp.348.214.152. Penambahan ini dikarenakan penyesuaian anggaran gaji dan tunjangan untuk PPPK formasi 2024.
2. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang bertambah Rp464.946.000. Penambahan ini untuk melaksanakan pengadaan laptop, komputer, pembuatan sumur komposit.
3. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang bertambah sebesar Rp. 60,700,000. Penambahan ini untuk penataan ruangan pertemuan lantai III.
4. Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN yang bertambah Rp. 75.350,000. Penambahan ini untuk membiayai honorarium Panitia Seleksi Terbuka untuk pengisian Formasi Jabatan Tinggi Pratama
5. Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang bertambah sebesar Rp. 136.446.000 untuk penambahan pembiayaan beasiswa kepada ASN yang telah berjalan dari tahun lalu.
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bag iPimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan bertambah Rp.1.073.234.000 untuk anggaran kontribusi Orientasi PPPK yag baru diankat pada Bulan Juni 2025.

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Denpasar Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian atas dinamika pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berlangsung, serta mempertimbangkan kebutuhan riil, perubahan kebijakan, dan ketersediaan sumber daya. Penyusunan dokumen ini tetap mengacu pada arah pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Renstra BKPSDM Tahun 2021–2026 dan Perubahan RKPD Kota Denpasar Tahun 2025.

Melalui Perubahan Renja ini, BKPSDM melakukan penajaman terhadap target-target kinerja serta perencanaan ulang program dan kegiatan strategis, khususnya dalam bidang pengembangan kompetensi, pembinaan karier, dan tata kelola kepegawaian. Penyesuaian ini merupakan langkah adaptif untuk menjawab tantangan pelayanan kepegawaian yang semakin kompleks dan menuntut inovasi yang berkelanjutan.

Kesimpulan dari capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, terutama dalam hal pengembangan kompetensi ASN. Hal ini perlu menjadi perhatian serius untuk dilakukan percepatan capaian pada triwulan berikutnya, melalui strategi yang lebih fokus dan terukur.

Sebagai strategi pelaksanaan di sisa Tahun 2025, BKPSDM Kota Denpasar akan mengedepankan langkah-langkah berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan pelatihan teknis dan formal, melalui pemanfaatan platform pembelajaran daring dan kerja sama strategis dengan lembaga pelatihan kompeten.
2. Percepatan pemetaan dan pemenuhan kebutuhan jabatan struktural dan fungsional, guna menjaga stabilitas organisasi dan efektivitas layanan publik.
3. Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja, untuk memastikan pelaksanaan program/kegiatan berjalan sesuai arah kebijakan dan dapat memberikan hasil yang terukur.
4. Penyesuaian kinerja yang dituangkan kedalam penyusuanan RENSTRA periode 2025 – 2029.

Dengan pelaksanaan strategi tersebut, diharapkan BKPSDM dapat memaksimalkan capaian kinerja hingga akhir tahun dan berkontribusi nyata dalam peningkatan kualitas birokrasi, khususnya dalam menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

PEMERINTAH
KOTA DENPASAR

PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN 2025



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR

https://brida.denpasarkota.go.id

WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3/1187/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan rencana kerja Perangkat Daerah, sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perangkat daerah untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan tugas dan fungsinya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Kota Denpasar Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);

7. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencan Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Juni 2025

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 19 JUNI 2025
NOMOR : 100.3.3/1187/HK/2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

1. PERUBAHAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
2. PERUBAHAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
3. PERUBAHAN RENJA RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR
4. PERUBAHAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2025
5. PERUBAHAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
6. PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
7. PERUBAHAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
8. PERUBAHAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
9. PERUBAHAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
10. PERUBAHAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2025
11. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
12. PERUBAHAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
13. PERUBAHAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
14. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
15. PERUBAHAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
16. PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
17. PERUBAHAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
18. PERUBAHAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2025
19. PERUBAHAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
20. PERUBAHAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
21. PERUBAHAN RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
22. PERUBAHAN RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
23. PERUBAHAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
24. PERUBAHAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
25. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

26. PERUBAHAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
27. PERUBAHAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
28. PERUBAHAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
29. PERUBAHAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
30. PERUBAHAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
31. PERUBAHAN RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
32. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
33. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2025
34. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2025
35. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2025
36. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
37. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, dokumen Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah direncanakan.

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, yang mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 ini nantinya dapat direalisasikan dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar. Sekian dan Terima kasih.

Denpasar, 19 Juni 2025

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Denpasar

I Made Pasek Mandira, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661011 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I **7**
2.1 Realisasi Kinerja dan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 7
2.2 Kendala dan Permasalahan dalam Pelaksanaan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 8
2.3 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi kendala dan permasalahan tersebut 8

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR **14**

BAB IV PENUTUP **20**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 9
Tabel 3.1 15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, yang mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka pada Tahun 2017 terbentuklah Lembaga/Instansi baru di Kota Denpasar yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar. Badan ini berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka pada tanggal 29 Desember 2023 Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar ditetapkan menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan, serta mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar mempunyai tugas dalam menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta lnvensi dan inovasi di daerah;
e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
i. pelaksanaan administrasi badan; dan
j. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas fungsinya.

Untuk menjalankan fungsi diatas, Badan Riset dan Inovasi Daerah menyusun dokumen Rencana Kerja yang mengacu pada visi Pemerintah Kota Denpasar yaitu "**Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju**" serta membuat program kegiatan berpedoman kepada Misi Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar yaitu:

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

Bedasarkan uraian latar belakang tersebut diatas Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 adalah:

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 3456);
2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2006, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kerja (Renja) ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan dan akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar tahun 2025 adalah:

1. Sebagai komitmen bagi Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan kegiatan dan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu periode tahunan.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar selama Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR

Bab ini menyajikan rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1. Realisasi Kinerja dan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi Kinerja merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa input, output, dan outcome pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimal indikator output.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2025 sampai dengan triwulan I.

Tahun 2025, anggaran Belanja Langsung Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar sebesar Rp 9.982.645.219,00 yang terdiri dari 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan. Realisasi fisik yang dapat dicapai sebesar 24,86% dan realisasi keuangan sebesar 18,61%.

2.2. Kendala dan Permasalahan dalam Pelaksanaan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 pada beberapa kegiatan terdapat penyesuaian anggaran untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Sehingga pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar mengusulkan kebutuhan anggaran pada beberapa kegiatan teknis dan kegiatan penunjang.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator dari sasaran merupakan ukuran pencapaian kinerja layanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Persentase Hasil Kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah.
2. Persentase Inovasi Daerah yang Diimplementasikan.

2.3. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi kendala dan permasalahan tersebut

Dalam perubahan RKPD Tahun 2025 telah dirancang sesuai dengan analisis kebutuhan dimana mengusulkan 2 (dua) program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan yang sebelumnya di anggaran induk hanya 21 (dua puluh satu) sub kegiatan, pada anggaran perubahan telah diusulkan 2 (dua) sub kegiatan masing-masing pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 1 (satu) sub kegiatan dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota 1 (satu) sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Hasil Pengendalian dan Evaluasi disajikan dalam bentuk tabel seperti Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar

No	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			**9,982,645,219.00**	**18.61**	**1,858,167,715.00**	**8,124,477,504.00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN KESEKRETARIATAN**	**100%**	**8,961,855,219.00**	**20.33**	**1,822,111,039.00**	**7,139,744,180.00**
a	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diimplementasikan**	**100%**	**6,875,004,219.00**	**22.72**	**1,561,897,425.00**	**5,313,106,794.00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	6,875,004,219.00	22.72	1,561,897,425.00	5,313,106,794.00
b	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diimplementasikan**	**100%**	**557,492,800.00**	**8.06**	**44,943,052.00**	**512,549,748.00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,243,000.00	21.55	1,991,500.00	7,251,500.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	147,574,500.00	2.71	4,000,000.00	143,574,500.00

No	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	202,236,300.00	11.96	24,181,050.00	178,055,250.00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	126,265,000.00	2.25	2,841,110.00	123,423,890.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	10,440,000.00	16.38	1,710,000.00	8,730,000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	61,734,000.00	16.55	10,219,392.00	51,514,608.00
c	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diimplementasikan**	100%	**117,036,550.00**	-	**-**	**117,036,550.00**
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	117,036,550.00	-	-	117,036,550.00
d	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan**	**100%**	**993,515,650.00**	**17.15**	**170,390,862.00**	**823,124,788.00**

No	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	175,400,000.00	15.84	27,785,848.00	147,614,152.00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	44,180,000.00	5.41	2,390,000.00	41,790,000.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	773,935,650.00	18.12	140,215,014.00	633,720,636.00
e	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan**	**100%**	**418,806,000.00**	**10.72**	**44,879,700.00**	**373,926,300.00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30,000,000.00	25.00	7,500,000.00	22,500,000.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	182,550,000.00	20.48	37,379,700.00	145,170,300.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	16,256,000.00	-	-	16,256,000.00

No	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	190,000,000.00	-	-	190,000,000.00
2	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG MENJADI REKOMENDASI KEBIJAKAN OLEH KEPALA DAERAH**	**100%**	**1,020,790,000.00**	**3.53**	**36,056,676.00**	**984,733,324.00**
		PERSENTASE INOVASI DAERAH YANG DIIMPLEMENTASIKAN	**100%**				
a	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang diimplementasikan**	**100%**	**185,650,000.00**	**2.05**	**3,800,000.00**	**181,850,000.00**
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	2 Laporan	185,650,000.00	2.05	3,800,000.00	181,850,000.00

No	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
b	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diimplementasikan**	**100%**	**120,275,000.00**	**-**	**-**	**120,275,000.00**
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	120,275,000.00	-	-	120,275,000.00
c	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang diimplementasikan**	**100%**	**714,865,000.00**	**4.51**	**32,256,676.00**	**682,608,324.00**
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	459,566,000.00	5.54	25,476,676.00	434,089,324.00
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	40,174,000.00	-	-	40,174,000.00
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	97,474,000.00	1.03	1,000,000.00	96,474,000.00
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	3 Laporan	117,651,000.00	4.91	5,780,000.00	111,871,000.00

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR

Pada Perubahan Renja Tahun 2025, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar merancang 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan kebutuhan dana sebesar Rp 11.359.368.864,00. Badan Riset dan Inovasi Daerah mengusulkan program teknis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Berikut disampaikan secara rinci Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 beserta Rencana Pendanaan pada Tabel 3.1:

Tabel 3.1
Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				**10,772,103,258.00**	**11,359,368,864.00**	**587,265,606.00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN KESEKRETARIATAN**	**100%**	**100%**	**9,751,313,258.00**	**10,283,167,864.00**	**531,854,606.00**
a	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diimplementasikan**	**100%**	**100%**	**7,542,071,924.00**	**7,725,731,630.00**	**183,659,706.00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	7,542,071,924.00	7,725,731,630.00	183,659,706.00
b	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diimplementasikan**	**100%**	**100%**	**557,492,800.00**	**552,327,700.00**	**(5,165,100.00)**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9,243,000	11,418,000	2,175,000.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	147,574,500	146,199,400	(1,375,100.00)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	202,236,300	196,276,300	(5,960,000.00)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	126,265,000	126,265,000	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	10,440,000	10,440,000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	61,734,000	61,729,000	(5,000.00)
c	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diimplementasikan**	**100%**	**100%**	**117,036,550.00**	**488,396,550.00**	**371,360,000.00**
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	40 Unit	117,036,550.00	134,536,550.00	17,500,000.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	21 unit	-	353,860,000.00	353,860,000.00
d	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan**	**100%**	**100%**	**1,115,905,984.00**	**1,115,905,984.00**	**-**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	175,400,000.00	175,400,000.00	-

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	44,180,000.00	44,180,000.00	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	896,325,984.00	896,325,984.00	-
e	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan**	**100%**	**100%**	**418,806,000.00**	**400,806,000.00**	**(18,000,000.00)**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	30,000,000.00	30,000,000.00	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	182,550,000.00	164,550,000.00	(18,000,000.00)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	16,256,000.00	16,256,000.00	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	190,000,000.00	190,000,000.00	-

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
2	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG MENJADI REKOMENDASI KEBIJAKAN OLEH KEPALA DAERAH**	**70%**	**70%**	**1,020,790,000.00**	**1,076,201,000.00**	**55,411,000.00**
		PERSENTASE INOVASI DAERAH YANG DIIMPLEMENTASIKAN	**100%**	**100%**			
a	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang diimplementasikan**	**100%**	**100%**	**185,650,000.00**	**185,650,000.00**	**-**
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	185,650,000.00	185,650,000.00	-
b	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang diimplementasikan**	**0%**	**100%**	**-**	**98,350,000.00**	**98,350,000.00**
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0	1 Dokumen	-	98,350,000.00	98,350,000.00

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
c	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diimplementasikan**	**100%**	**100%**	**120,275,000.00**	**120,275,000.00**	**-**
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	120,275,000.00	120,275,000.00	-
d	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang diimplementasikan**	**100%**	**100%**	**714,865,000.00**	**671,926,000.00**	**(42,939,000.00)**
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	459,566,000.00	451,066,000.00	(8,500,000.00)
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	1 Laporan	40,174,000.00	19,650,000.00	(20,524,000.00)
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	3 Laporan	97,474,000.00	97,474,000.00	-
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	3 Laporan	3 Laporan	117,651,000.00	103,736,000.00	(13,915,000.00)

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar mengacu pada Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar tahun 2021-2026 terutama dalam penetapan target-target kegiatan dan program yang dirancang untuk tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kota Denpasar.

Ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan pencapaian target-target dimaksud sangat penting dalam pencapaian kinerja Badan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar, dan apabila ketersediaan anggaran tidak dapat memenuhi kebutuhan tahun 2025, agar kemudian dirancang pada Rencana Kerja (Renja) tahun selanjutnya untuk pemenuhan target Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja (Renja) Badan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan Badan Riset dan Inovasi Daerah, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar tahun 2025.

2. Sasaran strategis Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai penanggung jawab Program, serta dilaksanakan oleh seluruh bidang di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar.

3. Sumber dana untuk menjalankan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2025, yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektif, efisien dan akuntabel.

4. Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 dilakukan dengan tertib dan obyektif. Pada akhir Tahun 2025 dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 yang merupakan evaluasi kinerja tahunan Badan Riset dan Inovasi Daerah, sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Kerja periode selanjutnya.

Demikian Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 ini disusun untuk dapat menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 serta menjadi pedoman dalam pencapaian target-target kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kota Denpasar.

Denpasar, 19 Juni 2025

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Denpasar

I Made Pasek Mandira, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661011 199503 1 001

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jalan Mulawarman Nomor 5 Denpasar, Telepon (0361) 414829 80111
Website: www.brida.denpasarkota.go.id || Pos-el: brida@denpasarkota.go.id

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2.	Pengolahan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Denpasar tahun 2024 berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2025	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan Kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Denpasar telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah disahkan	√			

Denpasar, 18 Juni 2025
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Denpasar

I Made Pasek Mandira, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660101 199503 1 001



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/2697/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);

7. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:

a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2025;
b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan unsur penunjang pemerintahan daerah dengan bidang urusan penelitian dan pengembangan;
c. menyusun dokumen Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2025;
d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2025; dan
e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 November 2023

a.n. Walikota Denpasar
Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Kota Denpasar,

I Made Pasek Mandira, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19661011 199503 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Walikota Denpasar.
2. Ketua DPRD Kota Denpasar.
3. Inspektur Kota Denpasar.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2023
NOMOR : 188.45/2697/HK/2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

Penasehat :
1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar

Pembina :
1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar

Sekretaris : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar

Anggota :
1. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar
2. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar
3. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar
4. Ni Made Diani Rismiyati, S.TP, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar
5. Ida Ayu Hari Chandani, SST. Par, M.Par, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar
6. Drh. Nyoman Prawisanthi Indriyani Gatra, M.Si, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar
7. Ayu Suri Afrida, S.E, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar

8. I Putu Subhaktiyasa, S.E, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar
9. A.A. Sri Basunari, S.E, Fungsional Umum Perencanaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar
10. Hario Agung Pradnya Wikarsa, S.E, Fungsional Umum Perencanaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar
11. Anak Agung Ayu Dwi Ariestiari, A.Md.
12. Putu Aditya Gunawan, S.Kom.

a.n. Walikota Denpasar
Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Kota Denpasar,



I Made Pasek Mandira, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19661011 199503 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA
(P-RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR
JL. GAJAH MADA NOMOR 1 DENPASAR

KATA PENGANTAR

Sesanti Angayubagya kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Asung Kertha Wara Nugraha-Nya kami telah dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Rencana Kerja (Renja) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Tahun 2025 secara umum terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Setda Kota Denpasar Tahun 2025 hingga Triwulan I serta Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 untuk menjalankan program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Denpasar dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan pembangunan baik aspek keuangan, target dan realisasinya. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkannya.

Kami menyadari Perubahan Rencana Kerja ini masih belum sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati demi kesempurnaan penyajian Renja yang akan datang kami mengharapkan adanya masukan dari semua pihak.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dalam menyusun Perubahan Renja ini sehingga dapat selesai sebagaimana mestinya.

Denpasar, 10 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH
KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS ALIT WIRADANA, S.SOS.,M.SI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19651110 198602 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....2
DAFTAR ISI....3
DAFTAR TABEL....4
BAB I PENDAHULUAN....5
I.1 Latar Belakang....5
I.2 Landasan Hukum....6
I.3 Maksud dan Tujuan....9
I.4 Sistematika Penulisan....10

BAB II EVALUASI TRIWULAN KE II PELAKSANAAN RENJA TA 2024 SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR....8
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024....18
BAB IV PENUTUP....29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I…….. 11

Tabel 3.1 Rencana Perubahan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025……..... 20

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 memuat program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja, target kinerja dan pendanaan sesuai dengan kebutuhan. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan visi dan misi Walikota Denpasar.

Dari hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 hingga triwulan I menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan kondisi Daerah antara lain :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Adanya perubahan asumsi belanja kegiatan karena adanya kegiatan yang mendesak yang harus dilaksanakan sehingga beberapa kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Denpasar mengalami Perubahan Pagu.
3. Berdasarkan hasil rapat tingkat Tim APD ada bebarapa usulan dari Perangkat Daerah baik pengurangan maupun penambahan anggaran induk yang harus dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah bersangkutan sehingga dapat mencapai target Renja yang telah ditetapkan.
4. Memperhatikan peraturan-peraturan terkait anggaran dan pelaksanan program prioritas baik nasional maupun daerah yang menyebabkan harus adanya rasionalisasi maupun penambahan anggaran untuk mendukung kegiatan dimaksud.

Untuk melengkapi dokumen perencanaan maka perlu dibuat Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang ada pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 nantinya.

I.2 Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
22. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);

23. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
24. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
25. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

I.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan dari Renja Perubahan Sekretariat Daerah adalah sebagai pedoman bagi pejabat di Sekretariat Daerah Kota Denpasar dalam merumuskan kegiatan pelaksanaan program yang lebih realistis dalam skala prioritas yang telah ditetapkan.

1. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah;
2. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcomes dan output yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan di dalam menilai kinerja organisasi;
3. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai.
4. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi;
5. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun eksternal organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 berfungsi sebagai berikut :

a. Pedoman Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2025.

b. Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Perubahan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025.

I.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TA 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan Triwulan I. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi kinerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025;
2. Kendala dan Permasalahan dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi kendala dan permasalahan tersebut.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENCANA KERJA PERUBAHAN TA 2025

Bab ini membahas program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja, pagu pendanaan, sumber pendanaan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 baik yang mengalami perubahan ataupun tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TA 2025
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar bermaksud untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan Renja Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kota Denpasar sampai dengan Triwulan I. Evaluasi Triwulan ke I terhadap hasil Renja Tahun 2025 bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas Sekretariat Daerah dalam Rencana Kerja Tahun 2025 dan sasaran RPJMD dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Evaluasi sebagaimana dimaksud, meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi menunjukan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan :

a) Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.
b) Adanya perubahan asumsi belanja kegiatan karena adanya kegiatan yang mendesak yang harus dilaksanakan sehingga beberapa kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Denpasar mengalami Perubahan Pagu.
c) Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan anggaran pada kegiatan di masing- masing Bagian.

Sekretariat Daerah Kota Denpasar mengelola Anggaran Induk di Tahun 2025 sebesar Rp. 137.202.657.450 yang terdiri dari 16 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan rincian belanja yang terdiri atas :

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
1.	**Belanja Operasi**	**125.821.080.450**	**18.563.732.970,00**	14,75
	a. Belanja Pegawai	48.789.705.724	9.728.599.952,00	19,94
	b. Belanja Barang dan Jasa	70.490.674.726	8.835.133.018,00	12,53
	c. Belanja Hibah	6.540.700.000	-	-
2.	**Belanja Modal**	**11.381.577.000**	-	-
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.359.165.000	-	-
	b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.412.000	-	-
Total Belanja Daerah (1+2)		**137.202.657.450**	**18.563.732.970,00**	**13,53**

Hingga Triwulan I Bulan Maret Tahun 2025 total realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Denpasar adalah sebesar Rp. 18.563.732.970,00 atau sebesar 13,53% dari total anggaran Tahun 2025. Rincian ini terdiri dari belanja operasi terealisasi sebesar Rp. 18.563.732.970,00 dan belanja modal belum terealisasi.

Terkait dengan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 yaitu Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah, di Triwulan I Tahun 2025 telah mencapai 88,6% dibandingkan dengan target triwulan I Tahun 2025. Adapun terdapat hanya 10 IKU yang tidak tercapai sesuai target Triwulan I Tahun 2025 yang mana diampu oleh 9 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Adapun Sebagian besar alasan tidak tercapainya IKU adalah karena penilaian terhadap indikator tersebut dilakukan di akhir tahun 2025.

Adapun kendala tidak tercapainya target pada program, kegiatan maupun sub kegiatan pada Triwulan I Tahuun 2025 antara lain karena :

1. Terdapat kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan melibatkan pemerintah pusat, sehingga masih menunggu konfirmasi jadwal pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat.

2. Adanya kegiatan yang belum terealisasi karena bergantung pada permintaan atau usulan dari masuarakat maupun pimpinan, serta dalam perencanaannya sulit untuk diprediksi.
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan fisik yang belum dapat berjalan karena proyek pembangunan fisik belum dimulai.
4. Prosedur pengadaan yang membutuhkan evaluasi TKDN dapat memakan waktu yang lama dan berdampak pada lambatnya proses pengadaan barang dan jasa kantor
5. Adanya peralihan aplikasi e-katalog dari versi 5 ke versi 6 yang membutuhkan proses penyesuaian dan mengakibatkan proses pengadaan barang dan jasa menjadi terlambat.
6. Beberapa proses keuangan masih dalam proses administrasi

Berdasarkan kendala-kendala tersbeut, maka adapun solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja fiisk maupun keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar adalah :

1. Melakukan penyesuaian baik anggaran maupun anggaran kas pada Pergeseran maupun Perubahan 2025 menyesuaikan kepada kebutuhan dan memperhatikan sisa anggaran yang belum terealisasi.
2. Meningkatkan koordinasi baik antar Perangkat Daerah maupun Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat mempercepat realisasi kegiatan.
3. Mempercepat proses administrasi keuangan untuk kegiatan yang sudah berjalan

Adapun rincian evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
4.01	**URUSAN SEKRETARIAT DAERAH**	**Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah**	**100%**	**137.202.657.450,00**	**88,6%**	**18.563.732.970,00**	**118.638.924.480,00**
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**106.082.133.100,00**	**15**	**16.624.251.970,00**	**89.457.881.130,00**
4.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**185 Orang/Bulan**	**41.817.550.666,00**	**21,48**	**8.981.698.134**	**32.835.852.532,00**
4.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang/Bulan	41.817.550.666,00	21,48	8.981.698.134	32.835.852.532,00
4.01.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	**14 Dokumen**	**11.244.823.776,00**	**18,35**	**2.200.533.648**	**9.044.290.128,00**
4.01.01.2.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelohan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14 Dokumen	11.244.823.776,00	18,35	2.200.533.648	9.044.290.128,00
4.01.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**24 Laporan**	**18.753.378.400,00**	**5,32**	**1.247.363.146**	**17.506.015.254,00**
4.01.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	18.753.378.400,00	5,32	1.247.363.146	17.506.015.254,00



Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**3.004.549.000,00**	**1,53**	**39.743.750**	**2.964.805.250,00**
4.01.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	166 Unit	160.150.000,00	0,69	1.103.500	159.046.500,00
4.01.01.2.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit	95.009.000,00	0,00	0	95.009.000,00
4.01.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	142 Unit	1.543.370.000,00	0,82	12.640.250	1.530.729.750,00
4.01.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.206.020.000,00	2,16	26.000.000	1.180.020.000,00
4.01.01.2.11	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**7.032.155.058,00**	**11,91**	**750.795.218**	**6.281.359.840,00**
4.01.01.2.11.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	4.256.080.058,00	5,23	222.482.818	4.033.597.240,00
4.01.01.2.11.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	60.000.000,00	6,49	3.893.400	56.106.600,00



Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01.01.2.11.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2.716.075.000,00	19,31	524.419.000	2.191.656.000,00
4.01.01.2.12	**Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan**	**17 Paket**	**11.255.726.200,00**	**13,86**	**1.598.688.543**	**9.657.037.657,00**
4.01.01.2.12.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17 Paket	11.255.726.200,00	13,86	1.598.688.543	9.657.037.657,00
4.01.01.2.13	**Kegiatan Penataan Organisasi**	**Persentase pelaksanaan indikator RB General dan RB Tematik**	**100%**	**157.808.000,00**	**4**	**5.625.000**	**152.183.000,00**
		Nilai Capaian Pelaporan Kinerja	**12,87**				
		Persentase PD yang memenuhi kepatuhan Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	**100%**				
		Persentase Nilai SKM PD dengan kategori Kinerja Baik	**100%**				
		Persentase PD yang melaksanakan Analisis Jabatan	**100%**				
		Persentase PD yang tepat tugas dan fungsinya	**100%**				
4.01.01.2.13.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	43.426.000,00	2	900.000,00	42.526.000,00
4.01.01.2.13.0002	Sub Kegiatan Faslitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	26.200.000,00	3	750.000,00	25.450.000,00



Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01.01.2.13.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	88.182.000,00	5	3.975.000	84.207.000,00
4.01.01.2.14	**Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase terlaksananya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan**	**100%**	**12.816.142.000**	**41**	**1.799.804.531,00**	**11.016.337.469**
4.01.01.2.14.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	6.516.180.000	25,00	1.392.037.731,00	5.124.142.269
4.01.01.2.14.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	5.830.117.000	25,00	306.678.500,00	5.523.438.500
4.01.01.2.14.0003	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	469.845.000	25,00	101.088.300,00	368.756.700
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Nilai LPPD**	**Sangat Tinggi**	**30.319.881.050,00**	**42,19**	**1.871.436.000,00**	**28.448.445.050,00**
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**100%**		**12,37**		
		Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM	**100%**		**2,61**		
		Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	**100%**		**25**		
4.01.02.2.01	**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**Nilai LPPD**	**Sangat Tinggi**	**1.028.874.000,00**	**42,19**	**227.710.000**	**801.164.000,00**
4.01.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	387.633.000,00	42,19	189.275.000	198.358.000,00
4.01.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	45.122.000	0	0	45.122.000
4.01.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	596.119.000,00	41,15	38.435.000	557.684.000,00



Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01.02.2.02	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	**24.705.302.650,00**	**12,37**	**1.575.126.000,00**	**23.130.176.650,00**
4.01.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	16.924.593.000,00	18,03	1.574.526.000,00	15.350.067.000,00
4.01.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	1.197.384.650,00	0,05	600.000,00	1.196.784.650,00
4.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	6.583.325.000,00	0	0,00	6.583.325.000,00
4.01.02.2.03	**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Produk Hukum yang Harmonis dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM**	**100%**	**2.413.313.500,00**	**2,61**	**63.000.000**	**2.350.313.500,00**
4.01.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 Dokumen	941.194.000,00	40	21.000.000	920.194.000,00
4.01.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	1.230.704.500	33,33	12.000.000	1.218.704.500
4.01.02.2.03.0003	Sub. Kegiatan Pendokumentasian Produk	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100 Dokumen	241.415.000	25	30.000.000	211.415.000



Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum						
4.01.02.2.04	**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah**	**100%**	**2.172.390.900,00**	**25**	**5.600.000**	**2.166.790.900,00**
4.01.02.2.04.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25 dokumen	8.400.000,00	24	0	8.400.000,00
4.01.02.2.04.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	6 dokumen	2.121.390.900,00	0	0	2.121.390.900,00
4.01.02.2.04.0003	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 laporan	42.600.000,00	100	5.600.000	37.000.000,00
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti**	**100%**	**800.643.300,00**	**8,33**	**68.045.000,00**	**732.598.300,00**
		Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	**100%**		**25**		
		Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	**100%**		**32**		
4.01.03.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak Lanjuti**	**100%**	**148.771.000,00**	**16,67**	**2.895.000,00**	**145.876.000,00**
4.01.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	117.848.000	0	0	117.848.000
4.01.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	20.098.000,00	25	2.325.000	17.773.000,00
4.01.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	10.825.000,00	25	570.000	10.255.000,00
4.01.03.2.04	**Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam Yang ditindak Lanjuti**	**100%**	**26.330.000**	**0**	**0**	**26.330.000**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01.03.2.04.0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	26.330.000	0	0	26.330.000
4.01.03.2.02	**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran**	**100%**	**71.608.300,00**	**25,00**	**1.125.000**	**70.483.300,00**
4.01.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	16.550.000,00	17,1	525.000	16.025.000,00
4.01.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	34.458.350,00	0,87	300.000	34.158.350,00
4.01.03.2.02.0003	Sub. Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	20.599.950,00	3,57	300.000	20.299.950,00
4.01.03.2.03	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti**	**100%**	**553.934.000,00**	**31,82**	**64.025.000**	**489.909.000,00**
4.01.03.2.03.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.676 Dokumen	173.350.000,00	25	38.225.000	135.125.000,00
4.01.03.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	44 Dokumen	238.500.000,00	25	24.000.000	214.500.000,00
4.01.03.2.03.0003	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang	142.084.000,00	100	1.800.000	140.284.000,00



BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Untuk menyukseskan dan mencapai target program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Denpasar maka diperlukan adanya perubahan yang memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan. Dalam Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan / memperoleh anggaran adalah terdiri dari 3 Program, 16 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan. Adapun dalam segi anggaran terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 20.887.026.910 yang sebelumnya dianggarkan pada APBD Induk Tahun 2025 sebesar Rp. 151.532.860.636,00 menjadi sebesar Rp. 172.419.887.546,00. Penambahan anggaran ini antara lain mengakomodir hibah dari Masyarakat sesuai dengan ketentuan serta adanya penambahan-penambahan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan yang diampu oleh masing-masing bagian pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Selain itu adapula beberapa sub kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan realisasi anggaran terakhir serta kebutuhan anggaran kegiatan Tahun 2025.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dari Sekretariat Daerah Kota Denpasar tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Rencana Kerja Induk Tahun 2025. Tujuan Sekretariat Daerah Kota Denpasar adalah Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik di Kota Denpasar dengan indikator tujuan adalah Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah yang secara lebih terperinci terkait target kinerja tujuan, dan sasaran dapat dijelaskan dalam Tabel berikut.

Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Kota Denpasar Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET TAHUN 2024
1	Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik di Kota Denpasar	Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengoordinasian Perangkat Daerah)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah	100%

Adapun isu-isu strategis terkait tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Denpasar juga tidak mengalami perubahan antara Renja Induk 2025 dan Renstra Perubahan 2021-2026 Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Adapun isu-isu strategis tersebut terdiri dari :

1. Belum optimalnya koordinasi kebijakan pelayanan kepemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
2. Belum optimalnya koordinasi kebijakan pelayanan perekonomian dan pembangunan.
3. Belum optimalnya koordinasi kebijakan pelayanan administrasi umum.

Rincian Plafon Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut

Tabel 3.1

Rencana Perubahan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	**Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**151.532.860.636,00**	**172.419.887.546**	**20.887.026.910**	
04.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**100%**	**117.946.086.186,00**	**134.558.290.196**	**16.612.204.010**	
4.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**185 Orang/Bulan**	**185 Orang/Bulan**	**48.688.108.752,00**	**53.436.326.768,00**	**4.748.218.016**	
4.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang/Bulan	185 Orang/Bulan	48.688.108.752,00	53.436.326.768,00	4.748.218.016	
4.01.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	**14 Dokumen**	**14 Dokumen**	**11.244.823.776,00**	**13.343.976.020,00**	**2.099.152.244**	
4.01.01.2.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14 Dokumen	14 Dokumen	11.244.823.776,00	13.343.976.020,00	2.099.152.244	



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
4.01.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**24 Laporan**	**24 Laporan**	**18.805.165.400,00**	**26.582.645.150,00**	**7.777.479.750**	
4.01.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	18.805.165.400,00	26.582.645.150,00	7.777.479.750	
4.01.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**3.004.549.000,00**	**3.489.324.000,00**	**484.775.000,00**	
4.01.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	166 Unit	166 Unit	160.150.000,00	163.150.000,00	**3.000.000**	
4.01.01.2.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	95.009.000,00	95.009.000,00	-	
4.01.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	142 Unit	142 Unit	1.543.370.000,00	1.543.370.000,00	-	
4.01.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	1.206.020.000,00	1.687.795.000,00	481.775.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
4.01.01.2.11	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**100%**	**7.032.155.058,00**	**7.317.101.058,00**	**284.946.000**	
4.01.01.2.11.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	4.256.080.058,00	4.256.080.058,00	-	
4.01.01.2.11.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	8 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
4.01.01.1.11.04	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2.716.075.000,00	3.001.021.000,00	284.946.000	
4.01.01.2.12	**Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan**	**17 Paket**	**17 Paket**	**11.595.626.200,00**	**14.345.082.200,00**	**2.749.456.000**	
4.01.01.2.12.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	11.595.626.200,00	14.345.082.200,00	2.749.456.000	
4.01.01.2.13	**Kegiatan Penataan Organisasi**	**Persentase pelaksanaan indikator RB General dan RB Tematik**	**100%**	**100%**	**169.012.000,00**	**157.208.000,00**	**(11.804.000,00)**	



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
		Nilai Capaian Pelaporan Kinerja	**12,87**	**12,87**				
		Persentase PD yang memenuhi kepatuhan Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	**100%**	**100%**				
		Persentase Nilai SKM PD dengan kategori Kinerja Baik	**100%**	**100%**				
		Persentase PD yang melaksanakan Analisis Jabatan	**100%**	**100%**				
		Persentase PD yang tepat tugas dan fungsinya	**100%**	**100%**				
4.01.01.2.13.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	43.426.000,00	43.426.000,00	-	
4.01.01.2.13.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan	26.200.000,00	25.600.000,00	- 600.000	
4.01.01.2.13.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	99.386.000,00	88.182.000,00	- 11.204.000	
4.01.01.2.14	**Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase terlaksananya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan**	**100%**	**100%**	**17.406.646.000**	**15.886.627.000**	**- 1.520.019.000**	
4.01.01.2.14.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	10.590.273.000	8.398.244.000	- 2.192.029.000	



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
4.01.01.2.14.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	6.314.323.000	7.018.538.000	704.215.000	
4.01.01.2.14.0003	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	4 Laporan	502.050.000	469.845.000	- 32.205.000	
04.01.02	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Nilai LPPD**	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	**32.492.191.150,00**	**37.042.032.450,00**	**4.549.841.300**	
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**100%**	**100%**				
		Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM	**100%**	**100%**				
		Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	**100%**	**100%**				
4.01.02.2.01	**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**Nilai LPPD**	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	**1.836.115.000,00**	**1.174.163.000,00**	**- 661.952.000**	
4.01.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	3 Dokumen	423.792.000,00	387.633.000,00	**- 36.159.000**	
4.01.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	4 Dokumen	74.304.000	191.613.000	**117.309.000**	
4.01.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1.338.019.000,00	594.917.000,00	- 743.102.000	



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
4.01.02.2.02	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	**100%**	**24.762.752.650,00**	**30.594.778.050,00**	**5.832.025.400**	
4.01.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	4 Dokumen	16.982.043.000,00	16.924.593.000,00	- 57.450.000	
4.01.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	5 Dokumen	1.197.384.650,00	1.235.485.050,00	38.100.400	
4.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	5 Dokumen	6.583.325.000,00	12.434.700.000,00	5.851.375.000	
4.01.02.2.03	**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Produk Hukum yang Harmonis dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM**	**100%**	**100%**	**2.507.543.500,00**	**2.630.491.500,00**	**122.948.000**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
4.01.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	963.098.000,00	991.494.000,00	28.396.000	
4.01.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	3 Kasus	1.259.816.500,00	1.359.704.500,00	99.888.000	
4.01.02.2.03.0003	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100 Dokumen	100 Dokumen	284.629.000,00	279.293.000	- 5.336.000	
4.01.02.2.04	**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah**	**100%**	**100%**	**3.385.780.000,00**	**2.642.599.900,00**	**- 743.180.100**	
4.01.02.2.04.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25 dokumen	25 dokumen	199.810.000,00	23.400.000,00	- 176.410.000	
4.01.02.2.04.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	6 dokumen	6 dokumen	3.131.820.000,00	2.576.599.900,00	- 555.220.100	
4.01.02.2.04.0003	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 laporan	1 laporan	54.150.000,00	42.600.000,00	- 11.550.000	
04.01.03	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti**	**100%**	**100%**	**1.094.583.300,00**	**819.564.900,00**	**- 275.018.400,00**	
		Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	**100%**	**100%**				



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
		Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	**100%**	**100%**				
4.01.03.2.01	**Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak Lanjuti**	**100%**	**100%**	**162.069.000,00**	**157.171.000,00**	**- 4.898.000**	
4.01.03.2.01.0001	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	117.848.000	117.848.000	0	
4.01.03.2.01.0002	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	26.048.000,00	28.498.000,00	2.450.000	
4.01.03.2.01.0003	Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	18.173.000,00	10.825.000,00	- 7.348.000	
4.01.03.2.04	**Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam**	**Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam Yang ditindak Lanjuti**	**100%**	**100%**	**56.966.000**	**26.330.000**	**0**	
4.01.03.2.04.0001	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evalausi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	56.966.000	26.330.000	0	



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
4.01.03.2.02	**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran**	**100%**	**100%**	**71.608.300,00**	**70.129.900,00**	**- 1.478.400**	
4.01.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	16.550.000,00	16.550.000,00	-	
4.01.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	34.458.350,00	34.458.350,00	-	
4.01.03.2.02.0003	Sub. Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	3 Laporan	20.599.950,00	19.121.550,00	- 1.478.400	
4.01.03.2.03	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa**	**Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti**	**100%**	**100%**	**803.940.000,00**	**565.934.000,00**	**- 238.006.000**	
4.01.03.2.03.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.676 Dokumen	5.676 Dokumen	173.350.000,00	185.350.000,00	12.000.000	
4.01.03.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	44 Dokumen	44 Dokumen	279.900.000,00	238.500.000,00	- 41.400.000	
4.01.03.2.03.0003	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang	150 Orang	350.690.000,00	142.084.000,00	- 208.606.000	
TOTAL					**151.532.860.636,00**	**172.419.887.546,00**	**20.887.026.910,00**	



BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Denpasar digunakan untuk acuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Denpasar yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan di masing – masing Bagian. Perumusan Perubahan Renja ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 yang akan melandasi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025, dalam rangka melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas Asung Kertha Wara NugrahaNya, kami telah berhasil menyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman melaksanakan program dan kegiatan dalam memenuhi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan. Perumusan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Denpasar mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini menjadi upaya dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kota Denpasar Tahun 2025 dan target kinerja RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Selanjutnya kami berharap penyusunan Rencana Kerja ini, dapat merepresentasikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD serta tugas dan fungsi DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, serta dipergunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Denpasar yang lebih baik pada tahun anggaran 2025.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Denpasar, 10 Juni 2025
Sekretaris DPRD Kota Denpasar

Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
Pembina Tk. I/ Gol IV/b
NIP. 196811141998031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 5
2.1 Realisasi kinerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 5
2.2 Kendala dan Permasalahan dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 7
2.3 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil 8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR 9
3.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 9
BAB IV PENUTUP 18

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I 5
Tabel 3.1 Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan 11
Tabel 3.2 Penjelasan Perubahan Target Kinerja Tahun 2025 13
Tabel 3.3 Penjelasan Perubahan Pendanaan Tahun 2025 15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra dan Renja. Perubahan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Penyusunan perubahan renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2025 harus berpedoman pada perubahan RKPD Kota Denpasar Tahun 2025.

Sekretariat DPRD Kota Denpasar sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggaraan administratif kesekretariatan DPRD; penyelenggaraan administratif keuangan DPRD; fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2025 atas hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2024 tentang rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2024 tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dengan telah melakukan pergeseran anggaran sebanyak 3 (tiga) kali dengan ditetapkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 25 Maret 2025. Namun, Sekretariat DPRD Kota Denpasar hanya ikut berpartisipasi melakukan pergeseran sebanyak 2 (dua) kali ditetapkan dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 17 Maret 2025. Besaran pagu anggaran pada APBD Induk sebesar Rp 105.502.172.370,- mengalami penyesuaian/pergeseran menjadi Rp 88.787.383.996,- dengan tetap melaksanakan 2 program, 13 kegiatan, dan 43 sub kegiatan.

Realisasi fisik kegiatan sebesar 29,79% dengan serapan anggaran sebesar 18,03% atau Rp 16.011.660.544,- dari Rp 88.787.383.996,-.

Memperhatikan hasil capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar sampai dengan Triwulan I tahun 2025, perlu dipertimbangkan untuk melakukan Perubahan Rencana Kerja terhadap proyeksi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan serta penganggaran melalui Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembngunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Bali Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 31);
19. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);
20. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);
21. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2024 tentang rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 30);

22. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 16);
23. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 26);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah untuk kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025.

1.3.2 Tujuan

Berdasarkan maksud tersebut, tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun anggaran 2025,
2. Merumuskan perubahan pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD Kota Denpasar selama tahun berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I **Pendahuluan**, menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

BAB II **Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I**, menyajikan kajian (review) terhadap hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan Triwulan I.

BAB III **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**, menyajikan rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.

BAB IV **Penutup**, simpulan menyeluruh dari Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025.

BAB II
HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa input, output, dan outcome dari tingkat sasaran strategis hingga ke tingkat sub kegiatan. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Denpasar. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 yang telah dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dapat digunakan sebagai pembanding kinerja untuk tahun 2025. Capaian kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2024 sebesar 100% yang dilakukan dengan 2 (dua) Program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan capaian kinerja fisik tahun 2024 sebesar 98,83%, didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp 94.524.814.582,- dan serapan anggaran sebesar Rp 75.085.899.678,- atau sebesar 79.44%.

2.1 Realisasi kinerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2025 mengacu pada hasil laporan kinerja triwulan I tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan**	**100 %**	**66.482.474.370**	**43,50 %**	**14.092.761.657**	**52.389.712.713**
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100 %	10.004.261.528	95,74 %	2.151.418.796	7.852.842.732
4.02.01.2.02.0001	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*47 Orang/Bulan*	*10.004.261.528*	*45 Orang/Bulan*	*2.151.418.796*	*7.852.842.732*
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100 %	3.455.565.700	42,53 %	373.936.400	3.081.629.300
4.02.01.2.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*13 Paket*	*1.999.732.600*	*6 Paket*	*238.240.000*	*1.761.492.600*
4.02.01.2.06.0003	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*3 Paket*	*97.219.500*	*2 Paket*	*7.852.500*	*89.367.000*
4.02.01.2.06.0004	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*5 Paket*	*245.235.600*	*1 Paket*	*6.625.500*	*238.610.100*
4.02.01.2.06.0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*111.930.000*	*1 Paket*	*1.562.400*	*110.367.600*
4.02.01.2.06.0006	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*168 Dokumen*	*702.426.000*	*39 Dokumen*	*115.231.000*	*587.195.000*
4.02.01.2.06.0008	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*	*170.700.000*	*3 Laporan*	*4.050.000*	*166.650.000*
4.02.01.2.06.0009	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	*128.322.000*	*2 Laporan*	*375.000*	*127.947.000*
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100 %	3.222.037.770	25 %	406.617.369	2.815.420.401
4.02.01.2.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan*	*12 Laporan*	*602.400.000*	*3 Laporan*	*83.017.369*	*519.382.631*
4.02.01.2.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan*	*12 Laporan*	*2.619.637.770*	*3 Laporan*	*323.600.000*	*2.296.037.770*

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	2.632.002.000	43,92 %	161.258.600	2.470.743.400
4.02.01.2.09.0001	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*5 unit*	*385.352.000*	*5 unit*	*68.800.000*	*316.552.000*
4.02.01.2.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*37 unit*	*799.890.000*	*28 unit*	*32.223.000*	*767.667.000*
4.02.01.2.09.0007	*Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	*181 unit*	*275.560.000*	*0 unit*	*11.000.000*	*264.560.000*
4.02.01.2.09.0010	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	*19 unit*	*1.171.200.000*	*0 unit*	*49.235.600*	*1.121.964.400*
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	46.730.465.372	33,33 %	10.989.342.492	35.741.122.880
4.02.01.2.15.0001	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD*	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD*	*45 Orang/Bulan*	*45.594.462.872*	*45 Orang/Bulan*	*10.989.342.492*	*34.605.120.380*
4.02.01.2.15.0002	*Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan*	*4 paket*	*960.565.000*	*0 Paket*	-	*960.565.000*
4.02.01.2.15.0003	*Pelaksanaan Medical Check Up DPRD*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD*	*45 Orang*	*175.437.500*	*0 Orang*	-	*175.437.500*
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100 %	438.142.000	20,45 %	10.188.000	427.954.000
4.02.01.2.16.0002	*Fasilitasi Fraksi DPRD*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD*	*5 Laporan*	*3.750.000*	*0 Laporan*	-	*3.750.000*
4.02.01.2.16.0003	*Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	*22 Laporan*	*434.392.000*	*9 Laporan*	*10.188.000*	*424.204.000*
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan**	**100 %**	**39.019.698.000**	**16,09 %**	**1.918.898.887**	**37.100.799.113**
		Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	**87,5 %**		**90,56 %**	**-**	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	2.243.934.000	5,56 %	-	2.243.934.000
4.02.02.2.01.0001	*Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	*12 Dokumen*	*366.588.000*	*2 Dokumen*	-	*366.588.000*
4.02.02.2.01.0002	*Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	*18 Dokumen*	*1.755.596.000*	*0 Dokumen*	-	*1.755.596.000*
4.02.02.2.01.0004	*Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi*	*2 Dokumen*	*121.750.000*	*0 Dokumen*	-	*121.750.000*
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	566.628.000	0 %	-	566.628.000
4.02.02.2.02.0001	*Pembahasan KUA dan PPAS*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS*	*2 Dokumen*	*9.000.000*	*0 Dokumen*	-	*9.000.000*
4.02.02.2.02.0002	*Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	*2 Dokumen*	*9.000.000*	*0 Dokumen*	-	*9.000.000*
4.02.02.2.02.0003	*Pembahasan APBD*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD*	*5 Dokumen*	*530.628.000*	*0 Dokumen*	-	*530.628.000*
4.02.02.2.02.0004	*Pembahasan APBD Perubahan*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan*	*2 Dokumen*	*9.000.000*	*0 Dokumen*	-	*9.000.000*
4.02.02.2.02.0006	*Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*	*2 Dokumen*	*9.000.000*	*0 Dokumen*	-	*9.000.000*
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100 %	13.495.200.000	35,12 %	1.853.744.847	11.641.455.153
4.02.02.2.03.0001	*Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum*	*24 Laporan*	*3.120.013.000*	*13 Laporan*	*422.312.648*	*2.697.700.352*
4.02.02.2.03.0002	*Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur*	*24 Laporan*	*3.522.683.000*	*15 Laporan*	*412.926.813*	*3.109.756.187*
4.02.02.2.03.0003	*Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat*	*Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat*	*24 Laporan*	*3.317.019.000*	*14 Laporan*	*539.175.086*	*2.777.843.914*
4.02.02.2.03.0004	*Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian*	*24 Laporan*	*3.520.485.000*	*17 Laporan*	*479.330.300*	*3.041.154.700*
4.02.02.2.03.0006	*Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan*	*2 Dokumen*	*3.000.000*	*0 Dokumen*	-	*3.000.000*
4.02.02.2.03.0007	*Pengawasan Penggunaan Anggaran*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran*	*2 Dokumen*	*3.000.000*	*0 Dokumen*	-	*3.000.000*
4.02.02.2.03.0008	*Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah*	*Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah*	*2 Dokumen*	*9.000.000*	*0 Dokumen*	-	*9.000.000*
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	4.644.350.000	30,28 %	53.750.180	4.590.599.820

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
4.02.02.2.04.0002	*Pendalaman Tugas DPRD*	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*	*6 Dokumen*	*2.992.762.000*	*1 Dokumen*	*11.825.180*	*2.980.936.820*
4.02.02.2.04.0004	*Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli*	*Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli*	*6 Orang*	*518.400.000*	*2 Orang*	-	*518.400.000*
4.02.02.2.04.0005	*Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi*	*Jumlah Tenaga Ahli Fraksi*	*5 Orang*	*259.200.000*	*2 Orang*	-	*259.200.000*
4.02.02.2.04.0006	*Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	*12 Dokumen*	*129.000.000*	*3 Dokumen*	*11.175.000*	*117.825.000*
4.02.02.2.04.0007	*Penyusunan Program Kerja DPRD*	*Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD*	*12 Dokumen*	*436.988.000*	*5 Dokumen*	*750.000*	*436.238.000*
4.02.02.2.04.0008	*Publikasi dan Dokumentasi Dewan*	*Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan*	*12 Dokumen*	*308.000.000*	*3 Dokumen*	*30.000.000*	*278.000.000*
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	3.442.500.0000	33,33 %	-	3.442.500.000
4.02.02.2.05.0003	*Pelaksanaan Reses*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*	*3 Dokumen*	*3.442.500.000*	*1 Dokumen*	-	*3.442.500.000*
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	196.228.000	0 %	-	196.228.000
4.02.02.2.06.0002	*Pengawasan Kode Etik DPRD*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD*	*2 Laporan*	*196.228.000*	*0 Laporan*	-	*196.228.000*
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100 %	14.430.858.000	8,33 %	11.403.860	14.419.454.140
4.02.02.2.08.0001	*Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	*12 Dokumen*	*14.430.858.000*	*1 Dokumen*	*11.403.860*	*14.419.454.140*
JUMLAH			**100 %**	**105.502.172.370**	**29,79 %**	**16.011.660.544**	**89.490.511.826**

Pagu anggaran tahun 2025 pada Tabel 2.1 berpedoman pada APBD Induk Tahun 2025 sesuai DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 27 Desember 2024. Selama triwulan I tahun 2025, Sekretariat DPRD Kota Denpasar telah melaksanakan pergeseran anggaran sebanyak 2 (dua) kali. Pergeseran ke-1 yang telah ditetapkan dengan DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 17 Februari 2025 dilakukan karena adanya penyesuaian belanja pegawai (PPPK) dengan penambahan anggaran sebesar Rp 276.439.614,- serta pergeseran antarjenis pada komponen belanja perjalanan dinas sehingga pagu anggaran menjadi Rp105.778.611.984,-. Pergeseran ke-2 telah ditetapkan dengan DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 18 Maret 2025 sebagai tindaklanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pagu anggaran pergeseran ke-2 berkurang sebesar Rp16.714.788.374,- menjadi Rp 88.787.383.996,-

2.2 Kendala dan Permasalahan dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Permasalahan utama pelayanan pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi secara general dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar yaitu :

1. Belum memadai kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
3. Belum optimalnya layanan fasilitasi kesekretariatan DPRD.

Adapun kendala/permasalahan teknis yang terjadi selama Triwulan I Tahun 2025 adalah :

1. Pekerjaan pemeliharaan bangunan/gedung dan belanja modal (pembuatan gazebo) yang belum dapat diproses karena standar harga pada Perwali Kota Denpasar Nomor 58 Tahun 2025 tentang standar harga jasa tahun anggaran 2025 dan Perwali Kota Denpasar Nomor 50 Tahun 2025 tentang standar biaya jasa tahun anggaran 2025 tidak mengakomodir usulan RKBMD sebagaimana dimaksud. Sehingga berpotensi belum optimalnya dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
2. Pekerjaan pengadaan belanja modal yang tidak ada memiliki sertifikat TKDN belum dapat diproses karena terkendala dalam penyusunan kajian pengadaan import dari tim P3DN Sekretariat DPRD Kota Denpasar. Hal tersebut karena belum memadai kompetensi SDM tentang P3DN. Sehingga berpotensi belum optimalnya dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
3. Adanya perubahan kebijakan penggunaan dari katalog versi 5 menjadi katalog versi 6, menyebabkan beberapa pengadaan barang dan jasa terkendala. Sehingga berpotensi belum optimalnya dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

2.3 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

Adapun rencana perbaikan yang akan diambil untuk mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi :

1. Meningkatkan koordinasi baik dengan dinas seperti BPKAD/ Bagian PBJ/ Inspektorat/ BPK, dsb untuk mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi/ pelatihan kantor sendiri/ bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Melakukan monev secara berkala melalui survei kepuasan pelayanan publik dan melaksanakan forum konsultasi publik dengan memperluas cangkupan peserta/ stakeholder dalam penyelenggaraan diskusi/ forum agar layanan fasilitasi kesekretariatan DPRD diberikan secara optimal.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang akan diambil dalam rangka penyusunan perubahan rencana kerja tahun 2025 adalah melakukan pencermatan dalam perumusan target kinerja, pencermatan pengukuran output kinerja sesuai evidence / bukti pendukung yang akurat, dan pencermatan anggaran sebagai tindaklanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Adapun Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan terakhir adalah sebagai berikut.

a. Kedudukan Sekretariat DPRD Kota Denpasar (Pasal 5) adalah “Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD”. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
b. Sekretariat DPRD Kota Denpasar mempunyai tugas pokok yakni:
   - menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan,
   - mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta
   - menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
c. Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi (Lampiran I) yaitu:
   - penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD,
   - penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD,
   - fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD,
   - penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
   - penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya
d. Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Denpasar (Pasal 16) terdiri dari:
   - Sekretaris DPRD,
   - Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian,
   - Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan,
   - Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, dan
   - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Denpasar Nomor 100.3.3/117/Sekret.DPRD/2024 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP), terdapat 8 (delapan) jenis pelayanan yang ditetapkan yaitu :

- Pelayanan pembahasan rancangan KUA dan PPAS serta KUA dan PPAS Perubahan
- Pelayanan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan APBD Perubahan
- Pelayanan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD
- Pelayanan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

- Pelayanan fasilitasi fungsi pengawasan DPRD
- Pelayanan pelaksanaan reses dan pokok-pokok pikiran DPRD
- Pelayanan pembahasan rancangan Peraturan Daerah
- Pelayanan penerimaan kunjungan tamu kerja
- Pelayanan pengaduan masyarakat secara online

3.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2021-2026. Berikut penjabaran visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar dan perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2025:

Visi	:	Kota Kreatif Berbasis Budaya menuju Denpasar Maju
Misi ke-3	:	**Kejujuran** dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*)
Tujuan Strategis - *Indikator Kinerja*	:	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD ➢ *Indeks kepuasan layanan kesekretariatan DPRD*
Sasaran Strategis - *Indikator Kinerja Utama*	:	Pemenuhan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD ➢ *Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan*
Strategi	:	Meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
Arah Kebijakan	:	1. Meningkatkan kualitas kompetensi SDM 2. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar pada Tahun 2025, seiring perjalanan terdapat penyesuaian yang bertujuan agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan mempertimbangkan usulan masyarakat, kegiatan prioritas, dan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan maka ditetapkan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam perubahan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2025 tidak mengalami perubahan yaitu tetap terdiri dari 1 (satu) program prioritas dan 1 (satu) program penunjang, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana dimaksud. Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan		Target Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertamba/ (Berkurang)
1	2	3	4		5		6	7	8=7-6
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**66.482.474.370**	**67.411.201.150**	**928.726.780**
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100	%	100	%	10.004.261.528	10.780.821.430	776.559.902
4.02.01.2.02.0001	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*47*	*Orang/Bulan*	*70*	*Orang/Bulan*	*10.004.261.528*	*10.780.821.430*	*776.559.902*
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100	%	100	%	3.455.565.700	3.455.682.350	116.650
4.02.01.2.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*13*	*Paket*	*20*	*Paket*	*1.999.732.600*	*1.987.051.250*	*-12.681.350*
4.02.01.2.06.0003	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*3*	*Paket*	*3*	*Paket*	*97.219.500*	*93.407.500*	*-3.812.000*
4.02.01.2.06.0004	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*5*	*Paket*	*3*	*Paket*	*245.235.600*	*245.235.600*	*0*
4.02.01.2.06.0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1*	*Paket*	*1*	*Paket*	*111.930.000*	*100.100.000*	*-11.830.000*
4.02.01.2.06.0006	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*168*	*Dokumen*	*14*	*Dokumen*	*702.426.000*	*703.866.000*	*1.440.000*
4.02.01.2.06.0008	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12*	*Laporan*	*12*	*Laporan*	*170.700.000*	*197.700.000*	*27.000.000*
4.02.01.2.06.0009	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12*	*Laporan*	*12*	*Laporan*	*128.322.000*	*128.322.000*	*0*
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100 100	%	100	%	3.222.037.770	3.436.137.998	214.100.228
4.02.01.2.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan*	*12*	*Laporan*	*12*	*Laporan*	*602.400.000*	*554.400.000*	*-48.000.000*
4.02.01.2.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan*	*12*	*Laporan*	*12*	*Laporan*	*2.619.637.770*	*2.881.737.998*	*262.100.228*
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	100	%	2.632.002.000	2.517.602.000	-114.400.000
4.02.01.2.09.0001	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*5*	*unit*	*5*	*unit*	*385.352.000*	*385.352.000*	*0*
4.02.01.2.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*37*	*unit*	*32*	*unit*	*799.890.000*	*685.490.000*	*-114.400.000*
4.02.01.2.09.0007	*Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	*181*	*unit*	*283*	*unit*	*275.560.000*	*275.560.000*	*0*
4.02.01.2.09.0010	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	*19*	*unit*	*13*	*unit*	*1.171.200.000*	*1.171.200.000*	*0*
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	%	100	%	46.730.465.372	46.730.465.372	0
4.02.01.2.15.0001	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD*	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD*	*45*	*Orang/Bulan*	*45*	*Orang/Bulan*	*45.594.462.872*	*45.594.462.872*	*0*
4.02.01.2.15.0002	*Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan*	*4*	*paket*	*4*	*paket*	*960.565.000*	*960.565.000*	*0*
4.02.01.2.15.0003	*Pelaksanaan Medical Check Up DPRD*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD*	*45*	*Orang*	*45*	*Orang*	*175.437.500*	*175.437.500*	*0*
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100	%	100	%	438.142.000	490.492.000	52.350.000
4.02.01.2.16.0002	*Fasilitasi Fraksi DPRD*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD*	*5*	*Laporan*	*4*	*Laporan*	*3.750.000*	*3.000.000*	*-750.000*
4.02.01.2.16.0003	*Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	*22*	*Laporan*	*22*	*Laporan*	*434.392.000*	*487.492.000*	*53.100.000*
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**39.019.698.000**	**34.210.417.750**	**-4.809.280.250**
		Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	**87,5**	**%**	**90,04**	**%**			
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	%	100	%	2.243.934.000	2.614.067.000	370.133.000
4.02.02.2.01.0001	*Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	*12*	*Dokumen*	*12*	*Dokumen*	*366.588.000*	*358.064.000*	*-8.524.000*

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan		Target Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertamba/ (Berkurang)
1	2	3	4		5		6	7	8=7-6
4.02.02.2.01.0002	*Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	*18*	*Dokumen*	*18*	*Dokumen*	*1.755.596.000*	*2.184.328.000*	*428.732.000*
4.02.02.2.01.0004	*Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi*	*2*	*Dokumen*	*1*	*Dokumen*	*121.750.000*	*71.675.000*	*-50.075.000*
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	%	100	%	566.628.000	577.748.000	11.120.000
4.02.02.2.02.0001	*Pembahasan KUA dan PPAS*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS*	*2*	*Dokumen*	*2*	*Dokumen*	*9.000.000*	*6.600.000*	*-2.400.000*
4.02.02.2.02.0002	*Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	*2*	*Dokumen*	*2*	*Dokumen*	*9.000.000*	*6.600.000*	*-2.400.000*
4.02.02.2.02.0003	*Pembahasan APBD*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD*	*5*	*Dokumen*	*5*	*Dokumen*	*530.628.000*	*551.348.000*	*20.720.000*
4.02.02.2.02.0004	*Pembahasan APBD Perubahan*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan*	*2*	*Dokumen*	*2*	*Dokumen*	*9.000.000*	*6.600.000*	*-2.400.000*
4.02.02.2.02.0006	*Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*	*2*	*Dokumen*	*2*	*Dokumen*	*9.000.000*	*6.600.000*	*-2.400.000*
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100	%	100	%	13.495.200.000	15.054.465.000	1.559.265.000
4.02.02.2.03.0001	*Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum*	*24*	*Laporan*	*24*	*Laporan*	*3.120.013.000*	*3.478.857.000*	*358.844.000*
4.02.02.2.03.0002	*Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur*	*24*	*Laporan*	*24*	*Laporan*	*3.522.683.000*	*3.898.461.000*	*375.778.000*
4.02.02.2.03.0003	*Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat*	*Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat*	*24*	*Laporan*	*24*	*Laporan*	*3.317.019.000*	*3.786.701.000*	*469.682.000*
4.02.02.2.03.0004	*Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian*	*24*	*Laporan*	*24*	*Laporan*	*3.520.485.000*	*3.888.421.000*	*367.936.000*
4.02.02.2.03.0006	*Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan*	*2*	*Dokumen*	*1*	*Dokumen*	*3.000.000*	*1.500.000*	*-1.500.000*
4.02.02.2.03.0007	*Pengawasan Penggunaan Anggaran*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran*	*2*	*Dokumen*	*0*	*Dokumen*	*3.000.000*	*0*	*-3.000.000*
4.02.02.2.03.0008	*Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah*	*Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah*	*2*	*Dokumen*	*1*	*Dokumen*	*9.000.000*	*525.000*	*-8.475.000*
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100	%	100	%	4.644.350.000	4.477.478.000	-166.872.000
4.02.02.2.04.0002	*Pendalaman Tugas DPRD*	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*	*6*	*Dokumen*	*6*	*Dokumen*	*2.992.762.000*	*2.992.762.000*	*0*
4.02.02.2.04.0004	*Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli*	*Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli*	*6*	*Orang*	*4*	*Orang*	*518.400.000*	*388.800.000*	*-129.600.000*
4.02.02.2.04.0005	*Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi*	*Jumlah Tenaga Ahli Fraksi*	*5*	*Orang*	*2*	*Orang*	*259.200.000*	*216.000.000*	*-43.200.000*
4.02.02.2.04.0006	*Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	*12*	*Dokumen*	*12*	*Dokumen*	*129.000.000*	*124.500.000*	*-4.500.000*
4.02.02.2.04.0007	*Penyusunan Program Kerja DPRD*	*Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD*	*12*	*Dokumen*	*12*	*Dokumen*	*436.988.000*	*460.816.000*	*23.828.000*
4.02.02.2.04.0008	*Publikasi dan Dokumentasi Dewan*	*Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan*	*12*	*Dokumen*	*12*	*Dokumen*	*308.000.000*	*294.600.000*	*-13.400.000*
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	%	100	%	3.442.500.000	3.240.000.000	-202.500.000
4.02.02.2.05.0003	*Pelaksanaan Reses*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*	*3*	*Dokumen*	*3*	*Dokumen*	*3.442.500.000*	*3.240.000.000*	*-202.500.000*
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	%	100	%	196.228.000	209.744.000	13.516.000
4.02.02.2.06.0002	*Pengawasan Kode Etik DPRD*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD*	*2*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	*196.228.000*	*209.744.000*	*13.516.000*
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100	%	100	%	14.430.858.000	8.036.915.750	-6.393.942.250
4.02.02.2.08.0001	*Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	*12*	*Dokumen*	*12*	*Dokumen*	*14.430.858.000*	*8.036.915.750*	*-6.393.942.250*
JUMLAH			**100**	**%**	**100**	**%**	**105.502.172.370**	**101.621.618.900**	**-3.880.553.470**

Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dilaksanakan dengan perkiraan biaya pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 101.621.618.900,-. Sedangkan pada APBD Induk Tahun 2025 tersedia anggaran sebesar Rp 105.502.172.370,-. Namun, terdapat rasionalisasi dalam rangka menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tersedia anggaran sebesar Rp 88.787.383.996. Untuk mencapai target kinerja yang ditarget pada tahun 2025, tidak ada perubahan perkiraan biaya dari Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 yaitu sebesar Rp 101.621.618.900,-. Namun, terdapat perubahan target kinerja dari rancangan awal RKPD Perubahan Tahun 2025 yaitu :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dari rancangan awal target kinerja Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD sebesar 87.5% sesuai target Renstra Tahun 2021-2026, disesuaikan berdasarkan capaian kinerja tahun 2024 yaitu sebesar 88.91%. Penetapan target kinerja diperhitungkan menggunakan tren capaian kinerja beberapa periode sebelumnya.
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dari rancangan awal target kinerja 46 orang/bulan menjadi 70 orang/bulan. Hal tersebut disebabkan karena penambahan 25 orang PPPK Tahap 1 yang akan dilantik pada pertengahan tahun 2025.
3. Pengawasan Penggunaan Anggaran, dari rancangan awal target kinerja 2 dokumen menjadi 0 dokumen. Hal tersebut karena sub kegiatan diefisiensi dengan pelaksanaan dilakukan secara sekaligus melalui rapat kerja Badan Anggaran pada kegiatan pembahasan kebijakan anggaran atau rapat kerja masing-masing komisi.
4. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, dari rancangan awal target kinerja 2 orang menjadi 4 orang. Hal tersebut disebabkan karena penyediaan sesuai kebutuhan.
5. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dari 4 orang menjadi 2 orang. Hal tersebut disebabkan karena penyediaan sesuai kebutuhan.

Berikut penjelasan perubahan target kinerja :

Tabel 3.2 Penjelasan Perubahan Target Kinerja Tahun 2025

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Keterangan
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan**	**100 %**	**100 %**	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	
4.02.01.2.02.0001	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*47 Orang/Bulan*	*70 Orang/Bulan*	*Perubahan target kinerja karena menyesuaian jumlah PNS yang menerima pada Maret 2025 sebanyak 45 orang dan penambahan jumlah PPPK Tahap 1 yang akan dilantik pada tahun 2025 sebanyaj 25 orang*
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100 %	100 %	
4.02.01.2.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*13 Paket*	*20 Paket*	*Perubahan target kinerja karena menyesuaikan jumlah paket sesuai usulan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor*
4.02.01.2.06.0003	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*3 Paket*	*3 Paket*	
4.02.01.2.06.0004	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*5 Paket*	*3 Paket*	*Perubahan target kinerja karena menyesuaikan jumlah paket sesuai usulan pengadaan bahan logistik kantor*
4.02.01.2.06.0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*1 Paket*	
4.02.01.2.06.0006	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*168 Dokumen*	*14 Dokumen*	*Perubahan target kinerja karena perhitungan kinerja seharusnya berdasarkan jenis penyediaan bahan bacaan*
4.02.01.2.06.0008	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	
4.02.01.2.06.0009	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100 %	100 %	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan		Target Kinerja Setelah Perubahan		Keterangan
4.02.01.2.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan*	*12*	*Laporan*	*12*	*Laporan*	
4.02.01.2.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan*	*12*	*Laporan*	*12*	*Laporan*	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	100	%	
4.02.01.2.09.0001	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*5*	*unit*	*5*	*unit*	
4.02.01.2.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*37*	*unit*	*32*	*unit*	*Perubahan target kinerja karena menyesuaikan kepemilikan alat angkutan yang tercatat dalam KIB B yaitu terdiri 3 unit roda 4 untuk Kepala Bagian, 9 unit roda 4 untuk operasional, 4 unit motor listrik, dan 16 unit roda 2*
4.02.01.2.09.0007	*Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	*181*	*unit*	*283*	*unit*	*Perubahan target kinerja karena menyesuaikan jumlah asset yang akan dipelihara berdasarkan usulan rkbmd*
4.02.01.2.09.0010	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*19*	*unit*	*13*	*unit*	*Perubahan target kinerja karena menyesuaikan kepemilikan Gedung dan bangunan yang tercatat dalam KIB C*
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	%	100	%	
4.02.01.2.15.0001	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD*	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD*	*45*	*Orang/Bulan*	*45*	*Orang/Bulan*	
4.02.01.2.15.0002	*Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan*	*4*	*paket*	*4*	*paket*	
4.02.01.2.15.0003	*Pelaksanaan Medical Check Up DPRD*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD*	*45*	*Orang*	*45*	*Orang*	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100	%	100	%	
4.02.01.2.16.0002	*Fasilitasi Fraksi DPRD*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD*	*5*	*Laporan*	*4*	*Laporan*	*Perubahan target kinerja karena menyesuaikan jumlah fraksi DPRD berdasarkan Keputusan DPRD Kota Denpasar Nomor 100.1.4.2/105/DPRD/2024 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi DPRD Masa Jabatan 2024-2029*
4.02.01.2.16.0003	*Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	*22*	*Laporan*	*22*	*Laporan*	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan**	**100**	**%**	**100**	**%**	
		Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	**87,5**	**%**	**90,04**	**%**	Perubahan target kinerja disesuaikan berdasarkan capaian kinerja kepuasan layanan tahun 2024 sebesar 88.91, penetapan perubahan target diperhitungkan berdasarkan tren periode sebelumnya maka diperoleh 90,04.
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	%	100	%	
4.02.02.2.01.0001	*Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	*12*	*Dokumen*	*12*	*Dokumen*	
4.02.02.2.01.0002	*Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	*18*	*Dokumen*	*18*	*Dokumen*	
4.02.02.2.01.0004	*Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi*	*2*	*Dokumen*	*1*	*Dokumen*	*Perubahan target kinerja karena menyesuaikan ranperda inisiatif DPRD berdasarkan Keputusan DPRD Kota Denpasar Nomor 100.3.1/112 /DPRD/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025*
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	%	100	%	
4.02.02.2.02.0001	*Pembahasan KUA dan PPAS*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS*	*2*	*Dokumen*	*2*	*Dokumen*	
4.02.02.2.02.0002	*Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	*2*	*Dokumen*	*2*	*Dokumen*	
4.02.02.2.02.0003	*Pembahasan APBD*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD*	*5*	*Dokumen*	*5*	*Dokumen*	
4.02.02.2.02.0004	*Pembahasan APBD Perubahan*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan*	*2*	*Dokumen*	*2*	*Dokumen*	
4.02.02.2.02.0006	*Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*	*2*	*Dokumen*	*2*	*Dokumen*	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100	%	100	%	
4.02.02.2.03.0001	*Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum*	*24*	*Laporan*	*24*	*Laporan*	
4.02.02.2.03.0002	*Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur*	*24*	*Laporan*	*24*	*Laporan*	
4.02.02.2.03.0003	*Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat*	*Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat*	*24*	*Laporan*	*24*	*Laporan*	
4.02.02.2.03.0004	*Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian*	*24*	*Laporan*	*24*	*Laporan*	
4.02.02.2.03.0006	*Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan*	*2*	*Dokumen*	*1*	*Dokumen*	*Perubahan target kinerja karena penyampaian hasil pemeriksanaan BPK tanpa pembahasan kepada DPRD dan pelaksanaannya bersifat tentative*
4.02.02.2.03.0007	*Pengawasan Penggunaan Anggaran*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran*	*2*	*Dokumen*	*0*	*Dokumen*	*Penghapusan subkegiatan karena pelaksanaan pengawasan penggunaan anggaran dilaksanakan secara sekaligus melalui rapat kerja Badan Anggaran pada kegiatan pembahasan kebijakan anggaran atau rapat kerja masing-masing komisi*
4.02.02.2.03.0008	*Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah*	*Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah*	*2*	*Dokumen*	*1*	*Dokumen*	*Perubahan target kinerja karena fasilitasi pembahasan LKPJ Kota Denpasar tahun 2024 telah berakhir pada April 2025 yang menghasilkan 1 dokumen rekomendasi hasil pembahasan LKPJ oleh Badan Anggaran DPRD Kota Denpasar*

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan		Target Kinerja Setelah Perubahan		Keterangan
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100	%	100	%	
4.02.02.2.04.0002	*Pendalaman Tugas DPRD*	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*	*6*	*Dokumen*	*6*	*Dokumen*	
4.02.02.2.04.0004	*Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli*	*Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli*	*6*	*Orang*	*4*	*Orang*	*Perubahan target kinerja karena menyesuaikan kebutuhan berdasarkan :* *- Keputusan Sekretaris DPRD Kota Denpasar Nomor 100.3.3/02/Sekret.DPRD tentang Penetapan dan Penugasan Tim Ahli/Kelompok Pakar Badan Pembentukan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Denpasar Tahun 2025 sebanyak 2 orang* *- Keputusan Sekretaris DPRD Kota Denpasar Nomor 100.3.3/03/Sekret.DPRD tentang Penetapan dan Penugasan Tim Ahli/Kelompok Pakar Pimpinan DPRD Kota Denpasar Tahun 2025 sebanyak 2 orang*
4.02.02.2.04.0005	*Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi*	*Jumlah Tenaga Ahli Fraksi*	*5*	*Orang*	*2*	*Orang*	*Perubahan target kinerja karena menyesuaikan kebutuhan berdasarkan :* *- Keputusan Sekretaris DPRD Kota Denpasar Nomor 100.3.3/04/Sekret.DPRD tentang Penetapan Tenaga Ahli Fraksi PSI-Nasdem DPRD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 sebanyak 1 orang* *- Keputusan Sekretaris DPRD Kota Denpasar Nomor 100.3.3/05/Sekret.DPRD tentang Penetapan Tenaga Ahli Fraksi Gerindra DPRD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 sebanyak 1 orang*
4.02.02.2.04.0006	*Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	*12*	*Dokumen*	*12*	*Dokumen*	
4.02.02.2.04.0007	*Penyusunan Program Kerja DPRD*	*Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD*	*12*	*Dokumen*	*12*	*Dokumen*	
4.02.02.2.04.0008	*Publikasi dan Dokumentasi Dewan*	*Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan*	*12*	*Dokumen*	*12*	*Dokumen*	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	%	100	%	
4.02.02.2.05.0003	*Pelaksanaan Reses*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*	*3*	*Dokumen*	*3*	*Dokumen*	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	%	100	%	
4.02.02.2.06.0002	*Pengawasan Kode Etik DPRD*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD*	*2*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100	%	100	%	
4.02.02.2.08.0001	*Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	*12*	*Dokumen*	*12*	*Dokumen*	
JUMLAH			**100**	**%**	**100**	**%**	

Berikut penjelasan perubahan pendanaan :

Tabel 3.3 Penjelasan Perubahan Pendanaan Tahun 2025

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan		Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertamba/ (Berkurang)	Keterangan
			Induk	Pergeseran ke-2			
1	2	3	4	5	6	7 = 6-5	8
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan**	**66.482.474.370**	**65.602.178.246**	**67.411.201.150**	**1.809.022.904**	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	10.004.261.528	9.285.048.404	10.780.821.430	1.495.773.026	
4.02.01.2.02.0001	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*10.004.261.528*	*9.285.048.404*	*10.780.821.430*	*1.495.773.026*	*Penambahan pendanaan PPPK Tahap 1 Tahun 2024 dari 5 bulan menjadi 7 bulan*
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	3.455.565.700	3.390.832.700	3.455.682.350	64.849.650	
4.02.01.2.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1.999.732.600*	*1.953.641.600*	*1.987.051.250*	*33.409.650*	*Penambahan belanja modal*
4.02.01.2.06.0003	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*97.219.500*	*93.407.500*	*93.407.500*	*0*	
4.02.01.2.06.0004	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*245.235.600*	*245.235.600*	*245.235.600*	*0*	
4.02.01.2.06.0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*111.930.000*	*100.100.000*	*100.100.000*	*0*	
4.02.01.2.06.0006	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*702.426.000*	*702.426.000*	*703.866.000*	*1.440.000*	*Penambahan langganan surat kabar/majalah sebagai bahan bacaan yang belum dianggarkan sampai dengan Desember 2025*
4.02.01.2.06.0008	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*170.700.000*	*167.700.000*	*197.700.000*	*30.000.000*	*Penambahan belanja makanan dan minuman*
4.02.01.2.06.0009	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*128.322.000*	*128.322.000*	*128.322.000*	*0*	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	3.222.037.770	3.173.337.770	3.436.137.998	262.800.228	
4.02.01.2.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan*	*602.400.000*	*554.400.000*	*554.400.000*	*0*	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan		Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertamba/ (Berkurang)	Keterangan
			Induk	Pergeseran ke-2			
1	2	3	4	5	6	7 = 6-5	8
4.02.01.2.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan*	*2.619.637.770*	*2.618.937.770*	*2.881.737.998*	*262.800.228*	*Perubahan pendanaan karena :* *1. Penambahan Iuran pengelolaan sampah selama 5 bulan* *2. Penambahan Jasa Appraisal dalam rangka perubahan Perwali Kota Denpasar Nomor 15 tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Trasnportasi DPRD bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* *3. Rasionalisasi jasa outsourching sopir dan tukang kebun yang tidak direalisasikan pada Januari sd April 2025*
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2.632.002.000	2.632.002.000	2.517.602.000	-114.400.000	
4.02.01.2.09.0001	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*385.352.000*	*385.352.000*	*385.352.000*	*0*	
4.02.01.2.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*799.890.000*	*799.890.000*	*685.490.000*	*-114.400.000*	*Perubahan pendanaan karena penyesuaian target kinerja sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan penyediaan bbm untuk kendaraan operasional dari 13 unit menjadi 10 unit*
4.02.01.2.09.0007	*Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	*275.560.000*	*275.560.000*	*275.560.000*	*0*	
4.02.01.2.09.0010	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1.171.200.000*	*1.171.200.000*	*1.171.200.000*	*0*	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	46.730.465.372	46.730.465.372	46.730.465.372	0	
4.02.01.2.15.0001	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD*	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD*	*45.594.462.872*	*45.594.462.872*	*45.594.462.872*	*0*	
4.02.01.2.15.0002	*Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan*	*960.565.000*	*960.565.000*	*960.565.000*	*0*	
4.02.01.2.15.0003	*Pelaksanaan Medical Check Up DPRD*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD*	*175.437.500*	*175.437.500*	*175.437.500*	*0*	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	438.142.000	390.492.000	490.492.000	100.000.000	
4.02.01.2.16.0002	*Fasilitasi Fraksi DPRD*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD*	*3.750.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*0*	
4.02.01.2.16.0003	*Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	*434.392.000*	*387.492.000*	*487.492.000*	*100.000.000*	*Penambahan belanja makanan dan minuman*
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan**	**39.019.698.000**	**23.185.205.750**	**34.210.417.750**	**11.025.212.000**	
		Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD					
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.243.934.000	1.421.157.000	2.614.067.000	1.192.910.000	
4.02.02.2.01.0001	*Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	*366.588.000*	*239.410.000*	*358.064.000*	*118.654.000*	*Penambahan belanja perjalanan dinas Bapemperda dan belanja makanan dan minuman rapat kerja Bapemperda*
4.02.02.2.01.0002	*Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	*1.755.596.000*	*1.060.072.000*	*2.184.328.000*	*1.124.256.000*	*Penambahan belanja perjalanan dinas Pansus*
4.02.02.2.01.0004	*Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi*	*121.750.000*	*121.675.000*	*71.675.000*	*-50.000.000*	*Perubahan pendanaan karena menyesuaikan ranperda inisiatif DPRD berdasarkan Keputusan DPRD Kota Denpasar Nomor 100.3.1/112 /DPRD/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025*
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	566.628.000	383.906.000	577.748.000	193.842.000	
4.02.02.2.02.0001	*Pembahasan KUA dan PPAS*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS*	*9.000.000*	*6.600.000*	*6.600.000*	*0*	
4.02.02.2.02.0002	*Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	*9.000.000*	*6.600.000*	*6.600.000*	*0*	
4.02.02.2.02.0003	*Pembahasan APBD*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD*	*530.628.000*	*357.506.000*	*551.348.000*	*193.842.000*	*Penambahan belanja perjalanan dinas badan anggaran*
4.02.02.2.02.0004	*Pembahasan APBD Perubahan*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan*	*9.000.000*	*6.600.000*	*6.600.000*	*0*	
4.02.02.2.02.0006	*Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*	*9.000.000*	*6.600.000*	*6.600.000*	*0*	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	13.495.200.000	6.197.842.000	15.054.465.000	8.856.623.000	
4.02.02.2.03.0001	*Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum*	*3.120.013.000*	*1.447.541.000*	*3.478.857.000*	*2.031.316.000*	*Penambahan belanja perjalanan dinas Komisi I DPRD*
4.02.02.2.03.0002	*Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur*	*3.522.683.000*	*1.557.135.000*	*3.898.461.000*	*2.341.326.000*	*Penambahan belanja perjalanan dinas Komisi III DPRD*
4.02.02.2.03.0003	*Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat*	*Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat*	*3.317.019.000*	*1.612.985.000*	*3.786.701.000*	*2.173.716.000*	*Penambahan belanja perjalanan dinas Komisi IV DPRD*
4.02.02.2.03.0004	*Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian*	*3.520.485.000*	*1.570.581.000*	*3.888.421.000*	*2.317.840.000*	*Penambahan belanja perjalanan dinas Komisi II DPRD*

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan		Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertamba/ (Berkurang)	Keterangan
			Induk	Pergeseran ke-2			
1	2	3	4	5	6	7 = 6-5	8
4.02.02.2.03.0006	*Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan*	*3.000.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*0*	
4.02.02.2.03.0007	*Pengawasan Penggunaan Anggaran*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran*	*3.000.000*	*0*	*0*	*0*	
4.02.02.2.03.0008	*Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah*	*Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah*	*9.000.000*	*8.100.000*	*525.000*	*-7.575.000*	*Rasionalisasi karena fasilitasi rapat LKPJ telah selesai dilaksanakan pada April 2025*
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	4.644.350.000	4.490.992.000	4.477.478.000	-13.514.000	
4.02.02.2.04.0002	*Pendalaman Tugas DPRD*	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*	*2.992.762.000*	*2.992.762.000*	*2.992.762.000*	*0*	
4.02.02.2.04.0004	*Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli*	*Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli*	*518.400.000*	*518.400.000*	*388.800.000*	*-129.600.000*	*Rasionalisasi kelompok pakar / tim ahli AKD yang tidak direalisasikan pada Januari sd April 2025*
4.02.02.2.04.0005	*Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi*	*Jumlah Tenaga Ahli Fraksi*	*259.200.000*	*259.200.000*	*216.000.000*	*-43.200.000*	*Rasionalisasi tenaga ahli fraksi yang tidak direalisasikan pada Januari sd April 2025*
4.02.02.2.04.0006	*Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	*129.000.000*	*124.500.000*	*124.500.000*	*0*	
4.02.02.2.04.0007	*Penyusunan Program Kerja DPRD*	*Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD*	*436.988.000*	*301.530.000*	*460.816.000*	*159.286.000*	*Penambahan belanja perjalanan dinas Bamus dan belanja makanan dan minuman rapat kerja Bapemperda*
4.02.02.2.04.0008	*Publikasi dan Dokumentasi Dewan*	*Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan*	*308.000.000*	*294.600.000*	*294.600.000*	*0*	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.442.500.000	3.442.500.000	3.240.000.000	-202.500.000	
4.02.02.2.05.0003	*Pelaksanaan Reses*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*	*3.442.500.000*	*3.442.500.000*	*3.240.000.000*	*-202.500.000*	*Rasionalisasi pendanaan belanja makanan dan minuman pelaksanaan Reses pada masa sidang I tahun 2025 yang tidak direalisasikan pada 8-10 Maret 2025*
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	196.228.000	145.330.000	209.744.000	64.414.000	
4.02.02.2.06.0002	*Pengawasan Kode Etik DPRD*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD*	*196.228.000*	*145.330.000*	*209.744.000*	*64.414.000*	*Penambahan belanja perjalanan dinas Badan Kehormatan DPRD*
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	14.430.858.000	7.103.478.750	8.036.915.750	933.437.000	
4.02.02.2.08.0001	*Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	*14.430.858.000*	*7.103.478.750*	*8.036.915.750*	*933.437.000*	*Perubahan pendanaan karena :* *1. Penambahan penyediaan buku agenda DPRD untuk tahun 2026* *2. Penamabahan belanja perjalanan dinas Pimpinan DPRD* *3. Penambahan belanja perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Munas/Rakor Asosiasi DPRD se Indonesia (ADEKSI)*
JUMLAH			**105.502.172.370**	**88.787.383.996**	**105.502.172.370**	**12.834.234.904**	

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2025 atas hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I tahun 2025. Perumusan Perubahan Rencana Kerja ini digunakan sebagai sarana pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2025.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar sampai dengan Triwulan I tahun 2025 yaitu capaian realisasi fisik kegiatan sebesar 29,79%. Berdasarkan pagu anggaran pergeseran ke-2 yang ditetapkan pada 18 Maret 2025 sebesar Rp 88.787.383.996,- dengan capaian serapan anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebesar 18,03% (Rp 16.011.660.544,-) atau capaian serapan anggaran sebesar 72,73% dari target anggaran kas pergeseran ke-2 (sampai dengan Triwulan I Tahun 2025) sebesar Rp 22.016.572.194.

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis tidak mengalami perubahan dengan rincian 2 program, 13 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025 berkurang sebesar Rp 3.880.553.470,- dari APBD Induk. Namun, jika dibandingkan dengan APBD Pergeseran Ke-2 perkiraan biaya meningkat sebesar Rp 12.834.234.904,- sehingga pagu anggaran perubahan rencana kerja tahun 2025 menjadi Rp 101.621.618.900,-.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Denpasar, 10 Juni 2025
Sekretaris DPRD Kota Denpasar

Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 196811141998031003

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	V			
2	Pengolahan data dan informasi	V			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota Denpasar	V			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Denpasar tahun 2024 berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar	V			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	V			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2025	V			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	V			
8	Penelaahan usulan masyarakat	V			
9	Perumusan kegiatan prioritas	V			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	V			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan	V			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	V			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	V			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	V			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	V			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Denpasar telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	V			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan	V			

Denpasar, 10 Juni 2025
Sekretaris DPRD Kota Denpasar

Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 196811141998031003

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA

(RENJA)

KECAMATAN DENPASAR BARAT

TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KECAMATAN DENPASAR BARAT

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025 dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025 dibuat untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan maupun acuan untuk menyusun kegiatan agar pelayanan publik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat terlaksana dengan baik khususnya di Kecamatan Denpasar Barat.

Sangat disadari bahwa Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini masih jauh dari yang diharapkan karena keterbatasan yang kami miliki, maka kami mohon kritik dan sarannya demi kesempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025.

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025 ini kami buat. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025 ini, dan semoga berguna bagi semua masyarakat dan pihak yang berkepentingan.

Denpasar Barat, 28 Mei 2025
CAMAT DENPASAR BARAT



Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19790411 199802 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …… i

KATA PENGANTAR ……. ii

DAFTAR ISI …… iii

BAB I PENDAHULUAN ……. 1

1.1 Latar Belakang ……..... 1

1.1.1 Umum ……... 1

1.1.2 Struktur Organisasi Kantor Camat Denpasar Barat …….. 2

1.2 Landasan Hukum …… 3

1.3 Maksud dan Tujuan …… 5

1.4 Sistematika Penulisan …… 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD……... **7**

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan PD ……... 7

2.2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan …… 7

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD ……..…… 8

2.2 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ……... 9

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja s.d Triwulan I Tahun 2025 ……... 9

2.4 Kendala dan Permasalahan ……..... 17

2.5 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran……..... 17

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ……..... 18

3.1 Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tahun 2025 …….. 18

BAB IV PENUTUP …… 28

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Umum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dinyatakan bahwa Kecamatan di bentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan Kota Denpasar baik dalam meningkatnya jumlah penduduk maupun laju pertumbuhan perekonomian masyarakat di berbagai bidang seperti pembangunann, transportasi, pelayanan kepada masyarakat maka memerlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Barat tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Denpasar yaitu**" KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU".**

Dalam proses pencapaian visi tersebut, penyusunan Renja PD berdasarkan Misi Kota Denpasar yaitu:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibnas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan bali.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, maka Walikota Denpasar melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat Denpasar Barat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun tugas pokok Camat Denpasar Barat adalah sebagai berikut sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah:

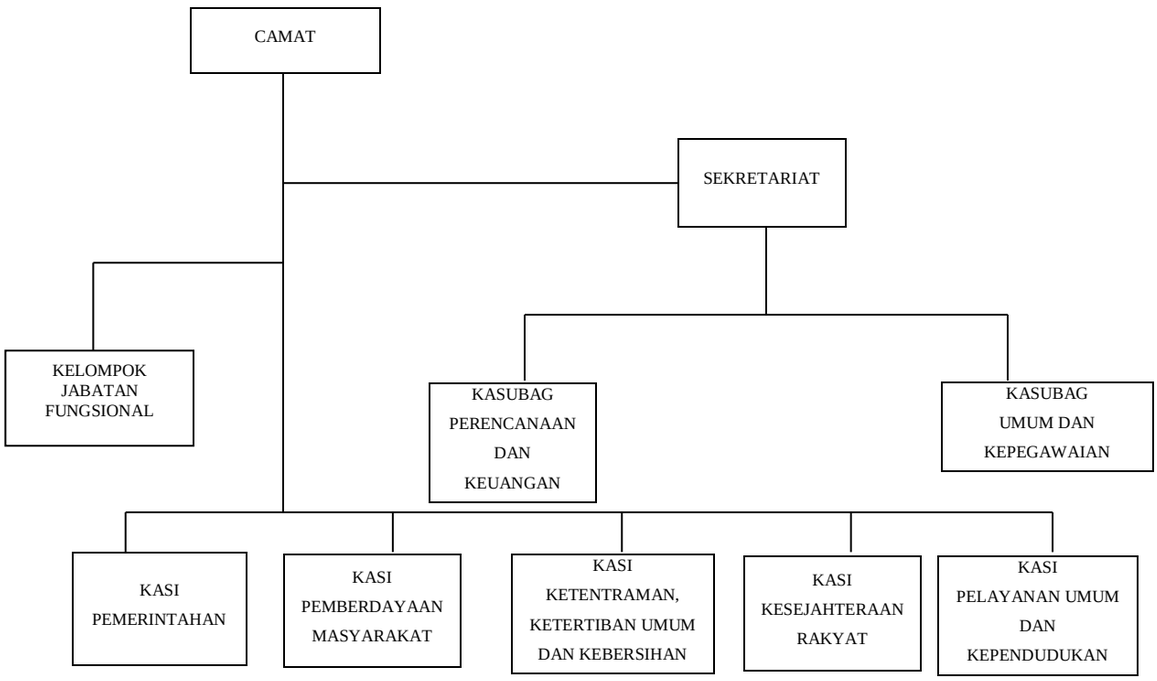
1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

1.1.2 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT DENPASAR BARAT

Dalam merealisasikan program kebijakan pemerintahan, Kantor Camat Denpasar Barat mempunyai 1 Camat, 1 Sekretaris Camat, 2 Kasubag dan 5 Kepala Seksi, sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Denpasar Barat.

Adapun struktur organisasi Kantor Camat Denpasar Barat adalah sebagai berikut:

- **Struktur Organisasi Kantor Camat Denpasar Barat:**



Nama Pejabat Struktural Kantor Camat Denpasar Barat Kota Denpasar;

- Camat : Ida Bagus Made Purwanasara,SSTP.,M.Si
- Sekretaris Kecamatan : I Putu Eka Pertama, S.Sos.,M.A.P
- Kasubag Keuangan dan Perencanaan : Ida Ayu Made Margarini, S.Sos
- Kasubag Umum dan Kepegawaian : Ida Ayu Ketut Sri Indrayani, S.E
- Kasi Pemerintahan : I Kadek Partha Wiguna ,S.Sos
- Kasi Pelayanan Umum dan Kependudukan : Ni Made Rai Ani, SE
- Kasi Kesejahteraan Masyarakat : Ketut Ayu Semadi Asri, SE
- Kasi Ketentraman dan Ketertiban : Plt. I Nyoman Agus Gunawan, S.Sos
- Kasi Pemberdayaan Masyarakat : Plt. I Made Sudarsana, S.Sos

Jumlah Pegawai keseluruhan di Kantor Camat Denpasar Barat adalah 123 orang :

- PNS : 51 orang
- Kontrak : 72 orang

- **Anggaran:**

  Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sumber dananya berasal dari APBD Kota Denpasar.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
17. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 25);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dimaksud untuk menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik, bersih, bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Good Governance).

Adapun tujuan dari Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan untuk mengakomodasi semua sasaran yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Barat tahun 2025, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- Latar Belakang.
- Umum.
- Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Denpasar Barat.
- Landasan Hukum.
- Maksud dan Tujuan.
- Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.2 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

2.4 Kendala dan Permasalahan

2.5 Kebijakan/Tindakan Perencaan dan Penganggaran

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan.

3.1 Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar, menjelaskan tugas Camat adalah sebagai berikut:

a. menetapkan program kerja Kecamatan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. melaksanakan penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan umum dan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;
f. menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan Perangkat Daerah di wilayah Kecamatan berdasarkan fungsi kewilayahan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Kecamatan
g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat;
h. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka ketertiban dan keamanan wilayah;
i. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum;
j. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan;

k. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;
l. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
m. melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
n. melaksanakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan rasa nasionalisme bagi masyarakat;
o. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka pemenuhan layanan prima bagi masyarakat;
p. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
q. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Denpasar Barat sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang kewilayahan tersebut perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021 – 2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
				RENJA 2025	RENJA P-2025
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,16%	97,16%
		Meningkatkan koordinasi perangkat daerah	Persentase Koordinasi yang terlaksana	100%	100%
		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang di bina	100%	100%

Memperhatikan tabel 2.1 penyesuaian target tujuan/sasaran Rancangan Akhir Perubahan Renja 2025 diatas, menunjukkan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tidak mengalami perubahan meskipun terdapat penyesuaian anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025.

2.2 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Secara umum di Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang menjadi isu dan permasalahan yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat yaitu:

- Masalah kebersihan lingkungan dan kesehatan
- Masalah kependudukan.
- Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Masalah sumber daya manusia masih kurang memadai.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja s.d Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisa efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*perfomance gap)* yang terjadi.

Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan

secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efesien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya. Hasil pengendalian dan evaluasi di sajikan dalam bentuk tabel seperti tabel 2.2 Berikut ini;

Tabel 2.2

Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Kode Rekening	Urusan / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 s/d Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
7	**URUSAN KEWILAYAHAN**			**26.847.404.020**		**4.528.369.988**	**22.319.034.032**
7.01	**KECAMATAN DENPASAR BARAT**			**26.847.404.020**		**4.528.369.988**	**22.319.034.032**
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan**	**100%**	**19.652.307.470**	**19**	**3.835.788.798**	**15.816.518.672**
7.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**11.730.339.129**	**25**	**2.415.041.784**	**9.315.297.345**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	11.730.339.129	25	2.415.041.784	9.315.297.345
7.01.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**998.610.450**	**29**	**216.636.800**	**781.973.650**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	25.016.000	50	7.153.520	17.862.480

7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	655.814.050	25	160.664.000	495.150.050
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	110.457.400	25	31.187.000	79.270.400
7.01.01.2.06.00054	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	96.704.000	25	10.730.000	85.974.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	91.479.000	25	6.032.280	85.446.720
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	100%	19.140.000	25	870.000	18.270.000
7.01.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah**	**100%**	**405.916.474**	**0**	**-**	**405.916.474**
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	84.766.500	0	-	84.766.500
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang siap Pakai	100%	321.149.974	0	-	321.149.974
7.01.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**5.504.634.408**	**25**	**1.103.207.614**	**4.401.426.794**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	310.283.000	25	48.109.514	262.173.486

7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	5.000.000	25	3.000.000	2.000.000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	5.189.351.408	25	1.052.098.100	4.137.253.308
7.01.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**100%**	**1.012.807.009**	**17**	**100.902.600**	**911.904.409**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaaran Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	47.790.000	25	10.552.400	37.237.600
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	477.210.000	25	90.350.200	386.859.800
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100%	487.807.009	0	-	487.807.009
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Nilai Survey Kepuasan (SKM) Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat**	**100%**	**206.758.000**	**43**	**47.481.000**	**159.277.000**
7.01.02.2.01	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Koordinasi di tingkat Kecamatan**	**100%**	**190.976.000**	**60**	**32.975.000**	**158.001.000**

7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	100%	29.950.000	95	28.850.000	1.100.000
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Lomba PSN, PKK dan posyandu	100%	161.026.000	25	4.125.000	156.901.000
7.01.02.2.04	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat**	**Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat**	**100%**	**15.782.000**	**25**	**14.506.000**	**1.276.000**
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Survey Kepuasan Masyarakat	100%	15.782.000	25	14.506.000	1.276.000
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**6.104.161.250**	**13**	**542.404.990**	**5.561.756.260**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan**	**100%**	**6.104.161.250**	**13**	**542.404.990**	**5.561.756.260**
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana di Kelurahan	100%	1.013.128.000	0	-	1.013.128.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	5.091.033.250	25	542.404.990	4.548.628.260
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**777.069.300**	**25**	**90.477.200**	**686.592.100**

7.01.04.2.02	**Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100%**	**777.069.300**	**25**	**90.477.200**	**686.592.100**
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pendataan Penduduk yang dilaksanakan; Jumlah Patroli Lingkungan yang dilaksanakan	100%	777.069.300	25	90.477.200	686.592.100
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Kewenangan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan**	**100%**	**84.953.000**	**25**	**12.218.000**	**72.735.000**
7.01.05.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan**	**100%**	**84.953.000**	**25**	**12.218.000**	**72.735.000**
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaab dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Kegiatan HUT RI dan HUT Kota Denpasar	100%	64.996.000	25	10.668.000	54.328.000

7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi antar Kecamatan	100%	19.957.000	25	1.550.000	18.407.000
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan**	**100%**	**22.155.000**	**0**	**-**	**22.155.000**
7.01.06.2.01	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa**	**100%**	**22.155.000**	**0**	**-**	**22.155.000**
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Evaluasi RAPBDes	100%	22.155.000	0	-	22.155.000
	J U M L A H		**100%**	**26.847.404.020**	**21**	**4.528.369.988**	**22.319.034.032**

2.4 Kendala dan Permasalahan

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025 s.d triwulan I, umumnya terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang sering muncul, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun sumber daya. Berikut ini beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi yaitu;

1. Belum optimalnya sinkronisasi antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD 2025, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian program/kegiatan prioritas
2. Adanya perubahan peraturan atau kebijakan dari pusat atau daerah yang belum diantisipasi
3. Proses pengadaan mengalami kendala administratif karena adanya perubahan sistem pengadaan dari e-katalog V.5 menjadi V.6, sehingga menghambat pelaksanaan fisik kegiatan
4. Penyesuaian alokasi anggaran atau keterlambatan pencairan dana
5. Kinerja penyedia jasa atau pelaksana kegiatan kadang tidak sesuai dengan rencana
6. Keterbatasan jumlah atau kompetensi sumber daya dalam melaksanakan program kegiatan
7. Keterbatasan sistem informasi pelaporan yang belum sepenuhnya digital atau belum terintegrasi antar OPD.

2.5 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran

Untuk mengatasi beberapa kendala/permasalahan diatas, perlu diambil kebijakan dan tindakan perencanaan serta penanganan yang tepat. Berikut beberapa kebijakan/ tindakan yang dapat dilakukan antara lain;

1. Melakukan review dan sinkronisasi berkala antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD
2. Mendorong forum perangkat daerah lebih interaktif dan berbasis data dalam proses musrenbang
3. Menyediakan pelatihan pengolahan dan analisis data untuk staf perencana maupun pejabat pengadaan barang/jasa
4. Menyusun timeline kegiatan yang lebih realistis
5. Merencanakan anggaran kas secara tepat agar penyerapan anggaran menjadi lebih optimal
6. Meningkatkan seleksi dan evaluasi terhadap penyedia jasa berdasarkan sistem merit dan kinerja
7. Membangun mekanisme sanksi dan penghargaan terhadap pegawai berdasarkan hasil kinerja.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Kecamatan Denpasar Barat

Rancangan akhir perubahan rencana kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang akan dilaksanakan. Rencana kerja Kantor Camat Denpasar Barat tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2025

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8
KEWILAYAHAN					**26.847.404.020**	**28.258.504.201**	**1.411.100.181**
KECAMATAN DENPASAR BARAT					**14.303.779.440**	**14.887.739.621**	**583.960.181**
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan**	**100%**	**100%**	**13.946.386.440**	**14.551.314.621**	**604.928.181**
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**11.730.339.129**	**12.105.632.591**	**375.293.462**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	11.730.339.129	12.105.632.591	375.293.462
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**297.856.700**	**300.118.700**	**2.262.000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	10.081.000	10.081.000	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	220.315.300	220.933.300	618.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	20.365.400	22.009.400	1.644.000

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	35.215.000	35.215.000	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	100%	100%	11.880.000	11.880.000	0
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**346.024.974**	**493.608.961**	**147.583.987**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	24.875.000	171.767.000	146.892.000
	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang siap Pakai	100%	100%	321.149.974	321.841.961	691.987
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**1.085.096.628**	**1.158.885.360**	**73.788.732**
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	147.600.000	147.600.000	0
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	5.000.000	5.000.000	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	932.496.628	1.006.285.360	73.788.732
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**487.069.009**	**493.069.009**	**6.000.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaaran Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100%	47.790.000	47.790.000	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	170.662.000	176.662.000	6.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100%	100%	268.617.009	268.617.009	0

2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Nilai Survey Kepuasan (SKM) Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat**	**100%**	**100%**	**206.758.000**	**205.272.000**	**(1.486.000)**
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Terlaksananya Koordinasi di tingkat Kecamatan**	**100%**	**100%**	**190.976.000**	**190.426.000**	**(550.000)**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	100%	100%	29.950.000	29.950.000	0
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Lomba PSN, PKK dan posyandu	100%	100%	161.026.000	160.476.000	(550.000)
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	**Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat**	**100%**	**100%**	**15.782.000**	**14.846.000**	**(936.000)**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	15.782.000	14.846.000	(936.000)
3	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**100%**	**43.527.000**	**24.045.000**	**(19.482.000)**
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100%**	**100%**	**43.527.000**	**24.045.000**	**(19.482.000)**
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pendataan Penduduk yang dilaksanakan; Jumlah Patroli Lingkungan yang dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	43.527.000	24.045.000	(19.482.000)
4	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Kewenangan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan**	**100%**	**100%**	**84.953.000**	**84.953.000**	**0**
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan**	**100%**	**100%**	**84.953.000**	**84.953.000**	**0**

	Pembinaan Wawasan Kebangsaab dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Kegiatan HUT RI dan HUT Kota Denpasar	100%	100%	64.996.000	64.996.000	0
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi antar Kecamatan	100%	100%	19.957.000	19.957.000	0
5	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan**	**100%**	**100%**	**22.155.000**	**22.155.000**	**0**
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa**	**100%**	**100%**	**22.155.000**	**22.155.000**	**0**
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Evaluasi RAPBDes	100%	100%	22.155.000	22.155.000	0
	J U M L A H		**100%**	**100%**	**14.303.779.440**	**14.887.739.621**	**583.960.181**

Tabel 3.2 Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Kelurahan Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8
	KELURAHAN PEMECUTAN				**5.506.988.604**	**5.977.128.604**	**470.140.000**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**2.384.911.954**	**2.723.911.954**	**339.000.000**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**296.449.950**	**296.449.950**	**-**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	7.179.000	7.179.000	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	202.219.950	202.219.950	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	22.398.000	22.398.000	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	100%	32.194.000	32.194.000	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	28.679.000	28.679.000	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	3.780.000	3.780.000	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**38.801.500**	**382.301.500**	**343.500.000**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	38.801.500	382.301.500	343.500.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**1.742.618.504**	**1.738.118.504**	**(4.500.000)**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	59.400.000	59.400.000	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	1.683.218.504	1.678.718.504	(4.500.000)

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**307.042.000**	**307.042.000**	**-**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	152.392.000	152.392.000	-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100%	100%	154.650.000	154.650.000	-
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**100%**	**2.866.028.050**	**2.997.168.050**	**131.140.000**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan**	**100%**	**100%**	**2.866.028.050**	**2.997.168.050**	**131.140.000**
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana di Kelurahan	100%	100%	609.760.000	679.760.000	70.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	2.256.268.050	2.317.408.050	61.140.000
3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**100%**	**256.048.600**	**256.048.600**	**-**
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	***Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada***	**100%**	**100%**	**256.048.600**	**256.048.600**	**-**
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pendataan Penduduk yang dilaksanakan, Jumlah Patroli Lingkungan yang dilaksanakan	100%	100%	256.048.600	256.048.600	-
JUMLAH			**100%**	**100%**	**5.506.988.604**	**5.977.128.604**	**470.140.000**

Tabel 3.3 Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Kelurahan Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8
KELURAHAN PADANGSAMBIAN					**4.321.338.802**	**4.425.338.802**	**104.000.000**
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**1.787.503.002**	**1.891.503.002**	**104.000.000**
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**231.879.250**	**231.879.250**	**0**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	4.774.000	4.774.000	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	110.384.250	110.384.250	0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	50.449.000	50.449.000	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	100%	44.470.000	44.470.000	0
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	18.322.000	18.322.000	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan	100%	100%	3.480.000	3.480.000	0
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**0**	**104.000.000**	**104.000.000**
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	100%	100%	0	42.000.000	42.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	0	52.000.000	52.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**1.482.593.752**	**1.482.593.752**	**0**
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	52.200.000	52.200.000	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	1.430.393.752	1.430.393.752	0

	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**73.030.000**	**73.030.000**	**0**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	46.500.000	46.500.000	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100%	100%	26.530.000	26.530.000	0
2	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**100%**	**2.312.848.200**	**2.312.848.200**	**0**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan**	**100%**	**100%**	**2.312.848.200**	**2.312.848.200**	**0**
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana di Kelurahan	100%	100%	373.368.000	373.368.000	0
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	1.939.480.200	1.939.480.200	0
3	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**100%**	**220.987.600**	**220.987.600**	**0**
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada**	**100%**	**100%**	**220.987.600**	**220.987.600**	**0**
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pendataan Penduduk yang dilaksanakan, Jumlah Patroli Lingkungan yang dilaksanakan	100%	100%	220.987.600	220.987.600	0
	J U M L A H		**100%**	**100%**	**4.321.338.802**	**4.425.338.802**	**104.000.000**

Tabel 3.4 Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Kelurahan Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah /Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8
KELURAHAN DAUH PURI					**2.715.297.174**	**2.968.297.174**	**253.000.000**
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**1.533.506.074**	**1.786.506.074**	**253.000.000**
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**172.424.550**	**172.424.550**	**0**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	2.982.000	2.982.000	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	122.894.550	122.894.550	0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	17.245.000	17.245.000	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	100%	20.040.000	20.040.000	0
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	9.263.000	9.263.000	0
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**21.090.000**	**247.090.000**	**226.000.000**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	21.090.000	238.090.000	217.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	100%	100%	0	9.000.000	9.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**1.194.325.524**	**1.221.325.524**	**27.000.000**

	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	51.083.000	51.083.000	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	1.143.242.524	1.170.242.524	27.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**145.666.000**	**145.666.000**	**0**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	107.656.000	107.656.000	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100%	100%	38.010.000	38.010.000	0
2	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**100%**	**925.285.000**	**925.285.000**	**0**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan**	**100%**	**100%**	**925.285.000**	**925.285.000**	**0**
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana di Kelurahan	100%	100%	30.000.000	30.000.000	0
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	895.285.000	895.285.000	0
3	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**100%**	**256.506.100**	**256.506.100**	**0**
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada**	**100%**	**100%**	**256.506.100**	**256.506.100**	**0**
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pendataan Penduduk yang dilaksanakan, Jumlah Patroli Lingkungan yang dilaksanakan	100%	100%	256.506.100	256.506.100	0
	J U M L A H		**100%**	**100%**	**2.715.297.174**	**2.968.297.174**	**253.000.000**

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025 yang memuat kebijakan program/kegiatan dan pendanaan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Denpasar Barat. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Denpasar Barat di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar.

2. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
   a. Kecamatan Denpasar Barat berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Perubahan Kota Denpasar Tahun 2025.
   b. Kecamatan Denpasar Barat berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Perubahan Renja Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025 dan RKPD Perubahan Kota Denpasar Tahun 2025.
   c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

3. Rencana Tindak Lanjut.

   Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Barat selain sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan dan pendanaan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Denpasar Barat. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta

kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Barat juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Barat ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Denpasar Barat serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Denpasar.

Denpasar Barat, 28 Mei 2025
CAMAT DENPASAR BARAT

Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19790411 199802 1 001

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KECAMATAN DENPASAR TIMUR

RENCANA KERJA PERUBAHAN
(Renja Perubahan)
TAHUN 2025

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Waça karena berkat Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN)Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN)Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut diatas Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN)sementara ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2021 – 2026.

Demikian Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN)Kecamatan Denpasar Timur ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2025.

Denpasar, 28 Mei 2025
Camat Denpasar Timur

Ketut Sri Kanyawati,S.KM.,M.Kes
Pembina
NIP. 19710626 199402 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 5
1.1. Latar Belakang 5
1.2. Landasaran Hukum 6
1.3. Maksud dan Tujuan 8
1.4. Sistematika Penulisan..... 9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN BERJALAN 10
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Timur Tahun (2025) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 10
2.1.1. Reasiliasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil yang direncanakan. 10
2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/Kegiatan yang direncanakan.... 10
2.1.3. Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target Program/Kegiatan .. 12
2.1.4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD. 12
2.1.5. Kebijakan/Tindakan perencanaan penganggaran yang pelu diambil untuk mengatsi faktor-faktor penyebab tersebut..... 12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Denpasar Timur 12
2.2.1. Analisis dari Aspek Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi. 13
2.2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Denpasar Timur dari aspek Output Pelaksanaan Program/Kegiatan..... 16

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Denpasar Timur. 17
2.3.1. Kinerja Pelayanan PD dan hal Kritis yang terkait dengan Pelayanan PD. 17
2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD 18
2.3.3. Dampak Permasalahan terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian Program Nasional/International, seperti SPM dan MDGs. 18
2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan PD. 18
2.3.5. Formulasi Isu-isu penting Berupa Rekomentasi dan Catatan Strategis untuk ditindak lanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas tahun yang direncanakan. 18
2.4. Review terhadap Rancangan akhir RKPD. 19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 20

BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 21

BAB IV Penutup ……. 27

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sejalan dengan proses penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN)PD, yang disusun dengan berpedoman kepada RENSTRA PD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN)Kecamatan Denpasar Timur tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja PD dan merupakan dokumen

rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Timur tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan Denpasar Timur tahun 2021-2026

Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi Kecamatan Denpasar Timur, adapun misi Kecamatan Denpasar Timur tetap mengacu kepada misi sebelumnya yaitu sebagai berikut :

1. Menumbuh kembangkan jati diri masyarakat Kecamatan Denpasar Timur berdasarkannilai-nilai luhur budaya local (Bali).
2. Pemberdayaan Masyarakat dilandasi dengan nilai budaya dan Kearifan lokal.
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar (Good Governance)
4. Menciptakan pelayanan publik yang prima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Mempercepat pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi melalui sistem ekonomi kerakyatan

Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN)Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program,kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan.

Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN)Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2025 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Denpasar Timur.

1.2. Landasan Hukum.

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2024 adalah:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4365);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerinta Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Renvana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026
l. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
m. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahub 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
n. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar tahun 2021 Nomor 5)
o. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN)Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Denpasar Timur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kota Denpasar Tahun 2025 dan berpedoman pada Draft Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2021-2026. Renja (Rancangan akhir Rencana Kerja) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Denpasar Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN)Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Kecamatan Denpasar Timur dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Denpasar Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Timur dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar.
2. Menetapkan program,kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Denpasar Timur tahun 2025.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2025.
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program,kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja PD Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2025, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

Bab I Penduhuluan

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Review Terhadap Rancangan akhir
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN TAHUN BERJALAN

2.1. Gasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana Perangkat Daerah (PD) diamanatkan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN).

Rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Timur merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah / PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Timur. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabillitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Kecamatan Denpasar Timur ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari

hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Timur selama tahun 2024 serta perkiraan target anggaran Tahun 2025.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja PD Kecamatan Denpasar Timur 2024. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja sesuai Keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

Dari 6 Program dan 12 Kegiatan rata rata semua Program dan Kegiatan masih berjalan.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Penyerapan anggaran sebesar Rp.3.605.203.302 atau 24,96 % dari total anggaran Rp.14.441.987.750
    - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyerapan anggaran sebesar Rp.143.776.750 atau 14,24 % dari total anggaran Rp.1.009.342.550
    - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyerapan anggaran sebesar Rp.3.600.000 atau 2,57 % dari total anggaran Rp. 140.309.000
    - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyerapan anggaran sebesar Rp.1.938.193.794 atau 26,57 % dari total anggaran Rp. 7.294.114.124
    - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyerapan anggaran sebesar Rp.90.575.500 atau 9,60 % dari total anggaran Rp. 943.716.000
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
    - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyerapan anggaran sebesar Rp.40.364.900 atau 14,73 % dari total anggaran Rp.274.015.000

- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Penyerapan anggaran sebesar Rp.9.997.900 atau 32,33 % dari total anggaran Rp.30.925.000

3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyerapan anggaran sebesar Rp. 167.490.000 atau 13,79 % dari total anggaran Rp. 1.214.174.950

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, Penyerapan anggaran sebesar Rp. 535.639.000 atau 10,56 % dari total anggaran Rp.5.070.311.400

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah, Penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.000.000 atau 1,22 % dari total anggaran Rp. 245.087.000

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

- Kegiatan Fasilitas,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Penyerapan anggaran sebesar Rp.0 atau 0 % dari total anggaran Rp. 32.685.000

2.1.3 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, tidak terpenuhinya target kinerja Program/Kegiatan.

Secara keseluruhan dari target kinerja sudah mendekati dari target yang di pasang dan juga kegiatan yang masih nol karena target kegiatan pada triwulan II,III dan IV.

2.1.4 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra berimplikasi pada lancarnya urusan administrasi kantor dan pelayanan di Kecamantan Denpasar Timur, serta telah dilaksanakan kegiatan musrenbang.

2.1.5 Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

1. Membuat perencanaan kebutuhan anggaran dengan lebih cermat dan rinci.

2. Memberikan peningkatan wawasan kepada aparat perencana di Kecamatan dalam membuat rencana yang lebih optimal.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Denpasar Timur.

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Denpasar Timur sebagai sebagai salah satu PD yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.2.1. Analisis dari aspek pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.

Mengacu pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah ,susunan Organisasi Kecamatan di Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

a. Camat
b. Sekretariat Kecamatan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

c. Seksi Pemerintahan

d. Seksi Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Kebersihan

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

f. Seksi Kesejahteraan Rakyat

g. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan

h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan disebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan merupakan wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai Kepala Kecamatan, dan Camat bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan kedudukannya tersebut Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- menetapkan program kerja Kecamatan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- melaksanakan penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan umum dan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;

- menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan Perangkat Daerah di wilayah Kecamatan berdasarkan fungsi kewilayahan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Kecamatan;

- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat;

- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka ketertiban dan keamanan wilayah;

- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum;

- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan;

- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;

- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;

- melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- melaksanakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan rasa nasionalisme bagi masyarakat;

- memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka pemenuhan layanan prima bagi masyarakat;

- mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

- menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan PD Kecamatan Denpasar Timur dapat diukur secara kualitatif atas koordinasi yang dilakukan oleh Camat beserta jajarannya dalam bidang tugas-tugas pemerintahan umum, keamanan dan ketertiban, perlindungan dan kesatuan bangsa, pembangunan fisik, ekonomi dan lingkungan hidup, bidang kesejahteraan masyarakat, serta masalah kependudukan, kebersihan dan perijinan.

2.2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Denpasar Timur dari aspek *output* Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

- Kegiatan dministrasi Keuangan Perangkat Daerah, Penyerapan anggaran sebesar Rp.3.605.203.302 atau 24,96 % dari total anggaran Rp.14.441.987.750
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyerapan anggaran sebesar Rp.143.776.750 atau 14,24 % dari total anggaran Rp.1.009.342.550
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyerapan anggaran sebesar Rp.3.600.000 atau 2,57 % dari total anggaran Rp. 140.309.000

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyerapan anggaran sebesar Rp.1.938.193.794 atau 26,57 % dari total anggaran Rp. 7.294.114.124
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyerapan anggaran sebesar Rp.90.575.500 atau 9,60 % dari total anggaran Rp. 943.716.000
- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyerapan anggaran sebesar Rp.40.364.900 atau 14,73 % dari total anggaran Rp.274.015.000
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Penyerapan anggaran sebesar Rp.9.997.900 atau 32,33 % dari total anggaran Rp.30.925.000
- Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyerapan anggaran sebesar Rp. 167.490.000 atau 13,79 % dari total anggaran Rp. 1.214.174.950
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, Penyerapan anggaran sebesar Rp. 535.639.000 atau 10,56 % dari total anggaran Rp.5.070.311.400
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah, Penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.000.000 atau 1,22 % dari total anggaran Rp. 245.087.000
- Kegiatan Fasilitas,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Penyerapan anggaran sebesar Rp.0 atau 0 % dari total anggaran Rp. 32.685.000

Berdasarkan serapan anggaran tersebut dapat diukur capaian kinerja Kecamatan Denpasar Timur berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagai output pelaksanaan program kegiatan yaitu sebagai berikut :

Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama Th. 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	93,90 %
2	Meningkatkan	Persentase Koordinasi	100%

	Koordinasi Perangkat Daerah	yang terlaksan	
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di bina	7 Desa

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Denpasar Timur.

2.3.1. Kinerja Pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.

Kecamatan Denpasar Timur sebagai salah satu PD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, sampai saat ini mempunyai kinerja yang baik, hal ini dapat dilihat dari minimnya keluhan dari para pelanggan (masyarakat) terhadap pelayanan yang telah diberikan.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD antara lain :

1. Masih rendahnya tingkat kemampuan SDM Aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Seringkali terjadi perubahan ketentuan tentang pengelolaan Administrasi yang begitu cepat dan belum dipahami oleh masyarakat sehingga menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan yang prima

2.3.3. Dampak permasalahan terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/international, seperti SPM dan MDGs.

Sejauh ini semua permasalahan di atas belum berdampak serius terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah maupun terhadap capaian program nasional dan internasional.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan PD.

a. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan PD.
   1) Semakin tingginya tuntutan pelayanan prima dari aparatur oleh masyarakat .
   2) Pesatnya kemajuan teknologi informasi.
   3) Berkembangnya penerapan pelayanan yang berstandar ISO.

b. Peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.
   1) Adanya komitmen pucuk pimpinan dalam meningkatkan pelayanan yang bersandar "sewaka dharma".
   2) Adanya standar pelayanan yang jelas dan rinci (sesuai SOP).
   3) Adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah atasan.

2.3.5. Formulasi Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan antara lain :

Sebagai ujung tombak pelayanan di tingkat Kecamatan maka rekomendasi dan catatan strategis yang dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja dalam pelayanan adalah dengan adanya Sumber daya Manusia yang lebih baik dan handal serta memiliki kompetensi yang ditempatkan di Kecamatan sehingga dapat meningkatkan kinerja Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagai Koordinator Pemerintah Desa / Kelurahan

2.4. Review Terhadap Rancangan akhir RKPD.

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur serta mengacu kepada Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah(RKPD) Kota Denpasar. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan (RKPD) Kota Denpasar disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat / melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum PD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja PD (Proses *Button-up* dan *Top-down*).

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2025 yang diusulkan Kecamatan Denpasar Timur sebesar Rp. **31.515.032.606,00** yang terdiri dari 6 program dan 11 kegiatan

Dilihat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Denpasar Timur tahun 2025 secara prinsip tidak mengalami perubahan dengan program dan kegiatan tahun berjalan 2023, namun dari segi anggaran terjadi perubahan pendanaan. Dengan dana tersebut diharapkan sasaran target kinerja Kecamatan Denpasar Timur pada tahun 2025 dapat mencapai 95%

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Denpasar Timur diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan..

a. Perbandingan rancangan akhir RKPD dengan hasil analisa kebutuhan.
   Dalam RKPD 2024 Kecamatan Denpasar Timur mengusulkan 6 Program 11 kegiatan , dan pada tahun 2025 akan merancang 6 Program 11 kegiatan untuk keberlangsungan pembangunan Kecamatan Denpasar Timur
b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting.
   Program dan kegiatan pada Kecamatan Denpasar Timur mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar .

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Berdasarkan hasil musrenbang dan usulan para pemangku kepentingan, serta PD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, terdapat beberapa usulan program / kegiatan yang banyak diprioritaskan seperti :

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

BAB III
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

a. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

   Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2024 adalah 6 Program dengan 11 Kegiatan

b. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

   Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Denpasar Timur sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Denpasar Timur dan melingkupi semua Desa/Kelurahan.

c. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

TABEL PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN DENPASAR TIMUR 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Pagu Induk 2025**	**Pagu Perubahan 2025**	**Bertambah/ Berkurang**
URUSAN KEWILAYAHAN	**30.665.742.774**	**31.515.032.606**	849.289.832
Kecamatan Denpasar Timur	**17.816.840.284**	**18.618.395.016**	801.554.732
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA	**17.172.247.334**	**17.975.413.016**	**803.165.682**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**14.441.987.750**	**15.077.438.432**	**635.450.682**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.441.987.750	15.077.438.432	635.450.682
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**486.893.650**	**610.893.650**	**124.000.000**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.473.000	11.473.000	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	388.620.950	512.620.950	124.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000	1.500.000	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63.699.700	63.699.700	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.600.000	21.600.000	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**75.934.000**	**67.149.000**	**(8.785.000)**
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.934.000	67.149.000	(8.785.000)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.688.866.934**	**1.741.366.934**	**52.500.000**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	474.360.000	474.360.000	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.214.506.934	1.267.006.934	52.500.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**478.565.000**	**478.565.000**	**-**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	213.150.000	213.150.000	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	265.415.000	265.415.000	-
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**274.015.000**	**291.215.000**	**17.200.000**
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**243.090.000**	**260.290.000**	**17.200.000**
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	95.350.000	95.350.000	-
Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	147.740.000	164.940.000	17.200.000

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	**30.925.000**	**30.925.000**	**-**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	30.925.000	30.925.000	-
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-
Pendidikan dan Pelatihan Formal			-
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**92.805.950**	**73.995.000**	**(18.810.950)**
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**92.805.950**	**73.995.000**	**(18.810.950)**
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	92.805.950	73.995.000	(18.810.950)
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**245.087.000**	**245.087.000**	**-**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**245.087.000**	**245.087.000**	**-**
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	235.087.000	235.087.000	-
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000	10.000.000	-
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**32.685.000**	**32.685.000**	**-**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**32.685.000**	**32.685.000**	**-**
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	32.685.000	32.685.000	-
Kelurahan Kesiman	**3.652.016.220**	**3.737.906.220**	**85.890.000**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1.888.993.220**	**1.934.169.220**	**45.176.000**
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**156.723.000**	**201.223.000**	**44.500.000**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.701.000	4.701.000	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.403.500	150.903.500	44.500.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.649.000	6.649.000	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.049.500	34.049.500	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.920.000	4.920.000	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**22.500.000**	**22.500.000**	**-**
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.500.000	22.500.000	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.627.687.220**	**1.627.687.220**	**-**

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.600.000	45.600.000	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.393.900	144.393.900	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.437.693.320	1.437.693.320	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**82.083.000**	**82.759.000**	**676.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.429.000	69.429.000	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.654.000	13.330.000	676.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**1.455.263.000**	**1.495.977.000**	**40.714.000**
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**1.455.263.000**	**1.495.977.000**	**40.714.000**
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	446.298.000	446.298.000	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.008.965.000	1.049.679.000	40.714.000
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**307.760.000**	**307.760.000**	**-**
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**307.760.000**	**307.760.000**	**-**
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	307.760.000	307.760.000	-
Kelurahan Sumerta	**3.303.126.230**	**3.338.126.230**	35.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1.819.742.980**	**1.854.742.980**	**35.000.000**
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**163.602.400**	**163.602.400**	**-**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.586.000	1.586.000	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.717.600	110.717.600	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.754.800	22.754.800	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.624.000	23.624.000	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.920.000	4.920.000	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**10.000.000**	**20.000.000**	**10.000.000**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	20.000.000	10.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.489.877.580**	**1.514.877.580**	**25.000.000**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.200.000	43.200.000	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.334.900	120.334.900	25.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.351.342.680	1.351.342.680	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**156.263.000**	**156.263.000**	**-**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.203.000	65.203.000	-
Pemeliharaan Mebel	1.500.000	1.500.000	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89.560.000	89.560.000	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**1.224.030.250**	**1.224.030.250**	**-**
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**1.224.030.250**	**1.224.030.250**	**-**
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	535.054.250	535.054.250	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	688.976.000	688.976.000	-
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**259.353.000**	**259.353.000**	**-**
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**259.353.000**	**259.353.000**	**-**
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	259.353.000	259.353.000	-
Kelurahan Dangin Puri	3.058.747.340	3.064.862.340	6.115.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1.415.842.090**	**1.452.117.090**	**36.275.000**
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**96.485.500**	**96.485.500**	**-**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.637.000	3.637.000	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.301.000	60.301.000	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.670.500	11.670.500	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.097.000	17.097.000	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.780.000	3.780.000	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**31.875.000**	**41.875.000**	**10.000.000**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.875.000	41.875.000	10.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.111.870.590**	**1.135.870.590**	**24.000.000**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.400.000	75.200.000	18.800.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.191.350	88.391.350	5.200.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	972.279.240	972.279.240	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**175.611.000**	**177.886.000**	**2.275.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.940.000	79.940.000	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95.671.000	97.946.000	2.275.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**1.383.708.250**	**1.377.548.250**	**(6.160.000)**
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**1.383.708.250**	**1.377.548.250**	**(6.160.000)**

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	180.000.000	180.000.000	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.203.708.250	1.197.548.250	(6.160.000)
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**259.197.000**	**235.197.000**	**(24.000.000)**
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**259.197.000**	**235.197.000**	**(24.000.000)**
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	259.197.000	235.197.000	(24.000.000)
Kelurahan Penatih	2.835.012.700	2.755.742.800	(79.269.900)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1.532.643.800**	**1.542.643.800**	**10.000.000**
Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.638.000	115.638.000	10.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.578.000	1.578.000	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.397.000	67.397.000	10.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.505.000	15.505.000	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.500.000	7.500.000	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.738.000	18.738.000	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.920.000	4.920.000	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.375.811.800	1.375.811.800	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.400.000	38.400.000	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.359.600	107.359.600	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.230.052.200	1.230.052.200	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.194.000	51.194.000	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.194.000	51.194.000	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**1.007.309.900**	**918.040.000**	**(89.269.900)**
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.007.309.900	918.040.000	(89.269.900)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.500.000	10.500.000	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	996.809.900	907.540.000	(89.269.900)
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	295.059.000	295.059.000	-

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	295.059.000	295.059.000	-
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	295.059.000	295.059.000	-

BAB IV
PENUTUP

Rancangan akhir Rencana Kerja (RENJA Perubahan) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Walikota Denpasar "KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU" dan mengacu pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja Perubahan)Kecamatan Denpasar Timur yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Denpasar Timur. Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja Perubahan) sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Denpasar Timur di dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar.

1.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. Kecamatan Denpasar Timur berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (RENJA Perubahan) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Denpasar Tahun 2025.
b. Kecamatan Denpasar Timur berkewajiban untuk menyusun Rancangan akhir Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Rancangan akhir Renja Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2025 dan RKPD Kota Denpasar Tahun 2025.
c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rancangan akhir Renja Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023

1.3 Rencana Tindak Lanjut.

Rancangan akhir Rencana Kerja (RENJA Perubahan) Kecamatan Denpasar Timur selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Denpasar Timur. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rancangan akhir Renja Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program, kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Rancangan akhir Renja Kecamatan Denpasar Timur juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan

rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Rancangan akhir Renja Kecamatan Denpasar Timur ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Denpasar Timur serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Denpasar.

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025



KECAMATAN DENPASAR SELATAN

KOTA DENPASAR

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tersusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025. Kami menyadari bahwa materi Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan sebelumnya maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Terimakasih atas kerjasama semua pihak sehingga pelaksanaan Laporan Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Selatan dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Selatan, pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025 ini. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan, saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak serta OPD terkait pada Pemerintah Kota Denpasar guna penyempurnaan Penyusun Renja dimasa mendatang.

Denpasar, 28 Mei 2025
Plt. Camat Denpasar Selatan

Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP,.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19790411 199802 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang……. 1

1.2 Landasan Hukum……. 2

1.3 Maksud dan Tujuan…….. 4

1.4 Sistematika Penulisan……... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Rentra PD 6

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD……. 12

2.2.1 Capaian Kinerja Keuangan ……..…….. 13

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD……. 13

BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 20

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 20

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025..... 20

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH……. 26

BAB V PENUTUP…….. 49

.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2025 ini merupakan penjabaran Awal daripada rencana strategis (renstra) tahun 2021-2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, Renja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan rencana kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana kerja. Adapun dalam tahap penyusunan rancangan Renja ini berdasar pada rancangan awal RKPD dan rencana strategis (renstra) tahun 2021-2026 Kecamatan Denpasar Selatan.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini di dalamnya telah dilakukan analisis evaluasi capaian pada tahun 2025 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2025. Selain itu, juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis Kecamatan Denpasar Selatan, baik di Kota Denpasar, Provinsi Bali maupun Nasional.

Peningkatan pelayanan public yang baik (*good governance)* berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement);* peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan; dan penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan tri Hita Karana, yang mana reformasi pada sektor ekonomi pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan yang tertuang dalam Rencana Strategis yang mengarahkan semua unsur yang mempengaruhi Lingkungan Internal (kekuatan dan kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) berdasarkan hal tersebut, disusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja berpedoman pada :

1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah di rubah dengan Permendagri No 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodetifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 8 Tahun 2016), tambahan lembaran daerah Kota Denpasar Nomor 8);
18. Peraturan Walikota Denpasar nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Selatan dimaksud sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan prinsip-prinsip *good govenance* (penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme) sesuai dengan Visi dan Misi.

Penyusunan rancangan rencana kerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2025, yang merupakan penjabaran tahun pertama dari pada Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2021-2026. Sedangkan tujuannya adalah sebagai gambaran awal apa yang akan dilakukan oleh Kecamatan Denpasar Selatan pada Tahun 2025 dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Kecamatan Denpasar Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal SKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

Lampiran

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Renja Perangkat Daerah, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi Renja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kecamatan Denpasar Selatan tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kota Denpasar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat DaerahTahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Ralisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah**	**16,855,020,210**	**18,747,198,481**	**21,322,769,383**	**14,310,769,413**	**67%**	**24,593,265,510**	**57,651,233,404**	**342%**
7	***01***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***16,855,020,210***	***10,527,117,152***	***11,087,695,301***	***7,970,646,337***	***72%***	***13,895,572,291***	***32,393,335,780***	***192%***
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	16,855,020,210	10,524,117,152	11,084,695,301	7,969,146,337	72%	13,895,572,291	32,388,835,780	192%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	3,000,000	3,000,000	1,500,000	50%	-	4,500,000	0%
7	***01***	***01***	***2.05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***99,825,000***	***0***	***0***	***-***	***0%***	***-***	***-***	***0%***
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan ASN	99,825,000	0	0	0	0	-	-	0%
7	***01***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***1,539,449,292***	***819,279,859***	***1,645,377,816***	***1,062,674,308***	***65%***	***1,316,585,000***	***3,198,539,167***	***208%***

7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,212,235	21,357,739.00	24,324,839.00	20,657,000	85%	25,015,500	67,030,239	222%
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,164,554,229	567,919,720.00	1,334,040,984.00	854,609,958	64%	976,893,000	2,399,422,678	206%
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	0%	-	-	0%
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	0%	-	-	0%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	213,156,070	149,098,400.00	199,649,243.00	127,251,350	64%	239,436,500	515,786,250	242%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	131,526,758	80,904,000.00	87,362,750.00	60,156,000	69%	75,240,000	216,300,000	164%
7	**01**	**01**	**2.07**		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah***	***Tersedianya Barang Milik Daerah***	***730,109,402***	***79,176,000***	***59,007,482***	***51,300,000***	***87%***	***196,779,000***	***327,255,000***	***45%***
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubel yang diadakan	-	0	0	-	0%	-	-	0%
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	-	0	0	-	0%	-	-	0%
7	01	01	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang siap Pakai	-	0	0	0	0	-	-	0%
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang siap Pakai	730,109,402	79,176,000	59,007,482	51,300,000	87%	196,779,000	327,255,000	45%
7	**01**	**01**	**2.08**		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***7,953,153,705***	***6,614,217,464***	***6,942,254,286***	***4,600,530,112***	***66%***	***7,992,158,844***	***19,206,906,420***	***242%***
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	577,920,200	298,246,143	514,826,592	236,594,383	46%	520,010,400	1,054,850,926	183%
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300,761,332	172,522,850	61,781,456	25,475,000	41%	43,743,000	241,740,850	80%

7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7,074,472,173	6,143,448,471	6,365,646,238	4,338,460,729	68%	7,428,405,444	17,910,314,644	253%
7	**01**	**01**	**2.09**		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terpeliharanya Barang Milik Daerah***	***2,896,672,836***	***707,408,006***	***1,588,434,498***	***625,618,656***	***39%***	***1,192,170,375***	***2,525,197,037***	***87%***
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	83,453,700	44,283,300	53,722,550	30,809,000	57%	45,860,000	120,952,300	145%
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	789,155,334	423,640,280	595,363,303	297,026,000	50%	574,061,000	1,294,727,280	164%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Mebel	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11,646,250	8,670,000	6,194,000	1,500,000	24%	3,540,000	13,710,000	118%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,434,626,096	35,608,526	419,765,865	167,386,556	40%	231,139,375	434,134,457	30%
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	577,791,456	195,205,900	513,388,780	128,897,100	25%	337,570,000	**661,673,000**	**115%**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat**	**1,222,669,005**	**189,889,900**	**258,541,398**	**223,247,415**	**86%**	**361,069,250**	**774,206,565**	**63%**
7	**01**	**02**	**2.01**		***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Terlaksananya Koordinasi di tingkat Kecamatan***	***1,222,669,005***	***145,390,400***	***203,887,880***	***170,906,165***	***84%***	***214,763,250***	***531,059,815***	***43%***

7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	60,308,675	24,679,400	39,883,131	35,908,131	90%	48,350,250	108,937,781	181%
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Lomba PSN, PKK dan posyandu	1,162,360,330	120,711,000	164,004,749	134,998,034	82%	166,413,000	422,122,034	36%
7	***01***	***02***	***2.04***		***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	***Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat***	***69,212,000***	***44,499,500***	***54,653,518***	***52,341,250***	***96%***	***146,306,000***	***243,146,750***	***351%***
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	69,212,000	44,499,500	54,653,518	52,341,250	96%	146,306,000	243,146,750	351%
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**6,752,241,356**	**6,213,405,420**	**4,975,479,703**	**2,935,828,863**	**59%**	**4,610,754,335**	**13,759,988,618**	**204%**
7	01	03	2.02		***Pemberdayaan Kelurahan***	***Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan***	***6,752,241,356***	***6,213,405,420***	***4,975,479,703***	***2,935,828,863***	***59%***	***4,610,754,335***	***13,759,988,618***	***204%***
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana di Kelurahan	16,705,248	11,175,500.00	14,129,290.00	0	0%	13,954,350	25,129,850	150%
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana di Kelurahan	2,751,443,200	2,038,332,400.00	2,072,267,503.00	1,055,907,113	51%	2,158,667,485	5,252,906,998	191%
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3,984,092,908	4,163,897,520.00	2,889,082,910.00	1,879,921,750	65%	2,438,132,500	8,481,951,770	213%
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1,025,138,862**	**657,157,450**	**747,193,911**	**414,567,850**	**55%**	**1,217,667,750**	**2,289,393,050**	**223%**
7	***01***	***04***	***2.02***		***Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada***	***Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada***	***1,025,138,862***	***657,157,450***	***747,193,911***	***414,567,850***	***55%***	***1,217,667,750***	***2,289,393,050***	***223%***

7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pendataan Penduduk yang dilaksanakan, Jumlah Patroli Lingkungan yang dilaksanakan	1,025,138,862	657,157,450	747,193,911	414,567,850	55%	1,217,667,750	2,289,393,050	223%
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan**	**160,052,750**	**99,262,500**	**159,924,647**	**131,016,103**	**82%**	***187,978,150***	**418,256,753**	**261%**
7	**01**	**05**	**2.01**		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan***	***160,052,750***	***99,262,500***	***159,924,647***	***131,016,103***	***0***	***187,978,150***	***418,256,753***	**261%**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Kegiatan Hut RI dan Hut Kota Denpasar	126,777,750	81,762,500	129,774,647	119,121,103	0	160,978,150	361,861,753	285%
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi antar Kecamatan	33,275,000	17,500,000	30,150,000	11,895,000	0	27,000,000	56,395,000	169%
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan**	**78,197,581**	**17,925,000**	**16,050,000**	**2,775,000**	**17%**	**15,825,000**	**36,525,000**	**47%**
7	**01**	**06**	**2.01**		***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa***	***78,197,581***	***17,925,000***	***16,050,000***	***2,775,000***	***17%***	***15,825,000***	***36,525,000***	***47%***
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Evaluasi RAPBDes	78,197,581	17,925,000	16,050,000	2,775,000	17%	15,825,000	36,525,000	47%

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Denpasar Selatan merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tugas-tugas Camat dan tidak ada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan standar pelayanan minimal tertentu/lainnya selain ketentuan tentang Indikator Kinerja Utama yang dimiliki.

Kecamatan Denpasar Selatan sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016-2021 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Selatan. Pencapaian IKU Kecamatan Denpasar Selatan tersaji dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Capaian IKU Kecamatan Denpasar Selatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	100%	100%
2	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	100%	100%
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha Desa	Jumlah Desa yang dibina	100%	100%

2.2.1 Capaian Kinerja Keuangan

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dalam Tahun Anggaran 2024 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	258.541.398	245.469.398
	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	31.298.069.967	28.458.609.327
	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha Desa	Jumlah Desa yg Dibina	16.050.000	14.100.000

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kecamatan Denpasar Selatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi Lainnya.

Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Kecamatan Denpasar Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

Pertumbuhan wilayah yang sangat dinamis dan cepat, tetapi dengan keterbatasan ketersediaan lahan non pertanian menjadikan permasalahan yang kompleks diwilayah Kecamatan Denpasar Selatan. Sehingga alih lahan pertanian menjadi non pertanian yang nantinya dipergunakan sebagai area perumahan pemukiman baru.

Faktor wilayah Kecamatan Denpasar Selatan sebagai wilayah aglomerasi perkotaan menjadikan daya tarik tersendiri bagi konsumen perumahan dan kalangan bisnis property. Salah satu upaya dengan permasalahan keterbatasan lahan dengan banyaknya pembangunan. Plus minus adanya hunian vertikal adalah faktor dampak sosial.

A. Kondisi Eksternal dan Internal Dari gambaran umum di atas perlu diungkapkan dengan jelas faktor-faktor penentu keberhasilan. Perumusan faktor-faktor kunci keberhasilan dilakukan dengan mengidentifikasikan unsur-unsur strategis yang dapat memberikan muatan untuk proses pencapaian visi dan misi Kecamatan Denpasar Selatan.

   Dengan menggunakan analisis SWOT diperoleh gambaran lingkungan internal dan eksternal guna penetapan kunci-kunci keberhasilan sebagai berikut :

   1 .Kondisi Internal

   1) Potensi yang dimiliki (Kekuatan/Strength)
      - Potensi luas wilayah yang merupakan pengembangan area bisnis, jasa dan pendidikan dapat menjadikan penggerak roda perekonomian masyarakat setempat baik dengan usaha dibidang property, kuliner maupun penginapan (kost-kostan dan hotel)
      - Kemampuan masyarakat yang tinggi dalam berkreasi dan berinovasi untuk meningkatkan penghasilan dengan berbagai sumber daya yang ada.
      - Karakteristik masyarakat yang aspiratif.
      - Aspek penyelenggaraan pemerintahan dengan dukungan pegawai yang memadai dan relatif berkualitas di Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
      - Adanya sumber dana APBD.
      - Motivasi kerja pegawai cukup tinggi.
      - Jelasnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Denpasar Selatan.
   2) Kelemahan (Weakness)
      - Pemanfaatan lahan yang berorientasi ekonomi dan cenderung mengabaikan ekosistem/kelestarian lingkungan.

- Dorongan dan kemauan yang masih lemah pada masyarakat dalam upaya meningkatkan penghasilan.
- Jumlah dan kualitas pegawai kurang dibarengi dengan disiplin, upaya pemeliharaan skill (kemampuan & ketrampilan) yang kontinyu dalam penyesuaian dengan tuntutan/dinamika masyarakat tentang pelayanan yang lebih baik/prima dari aparatur pemerintah.
- Pengolahan manajemen pemerintah yang belum efektif dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan, sumber daya organisasi (aparat, dana dan peralatan) kurang dapat dimanfaatkan secara efisien, sehingga terjadi tugas dan fungsi yang kurang tertangani.

2. Kondisi Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

1. Image tentang kawasan Kecamatan Denpasar Selatan yang merupakan perkembangan kawasan kota menjadikan nilai lahan selalu meningkat.
2. Pemahaman akan kedudukan Kecamatan pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dari masyarakat, desa, instansi sentral terkait di Kecamatan.
3. Partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah mampu memenuhi kebutuhan bersama lingkungan sekitarnya dalam kehidupan masyarakat masih tinggi.

B. Tantangan (Threats)

1. Belum termanfaatkannya secara optimal potensi sumber daya yang ada baik dengan tujuan ekonomis maupun pelestarian lingkungan.
2. Tuntutan pelayanan publik yang harus selalu lebih baik dari masyarakat, tanpa melihat sumber daya organisasi.
3. Kondisi kesehatan lingkungan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang masih perlu mendapat prioritas dan perhatian.
4. Fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat masih perlu perhatian.

Kondisi Aparatur Keberadaan Pegawai pada Kecamatan Kecamatan Denpasar Selatan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Pegawai sumber daya manusia merupakan salah satu komponen untuk mencapai kesuksesan suatu tujuan. Peran pegawai yang merupakan pemikir, perencana dan pelaksana keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Camat menentukan keberhasilan pencapaian visi, misi, dan kebijakan Pemerintah Kota Denpasar. Sumber daya manusia pada Kecamatan Denpasar Selatan yang ada pada saat ini diberdayakan seoptimal mungkin untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

C. Permasalahan Pelayanan

Permasalahan pelayanan di Kecamatan Denpasar Selatan diuraikan dalam klasifikasi tiap-tiap Seksi sebagai berikut :

1. Sekretariat Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat antara lain:
   a. Pengelolaan arsip yang belum optimal.
   b. Pengelolaan perpustakaan yang belum optimal
   c. Pengelolaan keuangan yang belum optimal.
   d. Perencanaan yang kurang optimal.
   e. Pengelolaan dokumen kepegawaian yang belum optimal
   f. Perlu data monografi yang valid untuk penentu kebijakan

2. Seksi Pemerintahan

   Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemerintahan antara lain:

   a) Masih sering terjadinya konflik konflik pertanahan.
   b) Meningkatnya pemanfaatan tanah yang belum berizin.
   c) Masih lemahnya pemahaman perangkat Kelurahan tentang administrasi pemerintahan.

d) Belum maksimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan Desa.

e) Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban antara lain :

a) Lemahnya pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

b) Lemahnya penertiban PKL

c) Lemahnya pemahaman tentang peraturan per Undang-Undangan.

d) Tindak kriminal cenderung meningkat

e) Kesadaran masyarakat tentang hukum masih rendah.

f) Pengetahuan masyarakat tentang antisipasi bencana masih rendah.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat antara lain :

a) Belum tercipta iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif sebagai tolok ukur kemampuan ekonomi masyarakat.

b) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

c) Terbatasnya pemberian stimulant pembangunan Desa dan Dusun.

d) Belum optimalnya potensi daerah yang harus dikelola.

e) Data kemiskinan yang kurang valid.

f) Kurang optimalnya penggunaan bantuan pemberdayaan masyarakat.

g) Penyusunan Siklus tahunan Desa dan APBDes tidak tepat waktu.

h) Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan Desa.

i) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pembangunan desa

5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesejahteraan Masyarakat antara lain :

a) Kurangnya peranserta perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
b) Belum tertanganinya masalah-masalah sosial masyarakat.
c) Penanganan kesehatan masyarakat belum optimal.
d) Perlu pengembangan kesenian di masyarakat.
e) Belum optimalnya pelestarian adat budaya dan tradisi masyarakat

6. Seksi Pelayanan Umum

Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Pelayanan Umum antara lain:

a) Masih lemahnya validitas data kependudukan.
b) Lemahnya pemahaman mempunyai KTP dan KK
c) Semakin tingginya pelayanan publik yang harus ditangani.
d) Peningkatan jumlah penduduk dan masuk penduduk
e) Jaringan perekaman data SIAK yang sering terganggu.
f) Kurang lengkapnya persyaratan permohonan ijin- ijin.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah guna meningkatkan kapasitas pegawai perlu dilakukan bimbingan, motivasi, inovasi yang tinggi untuk mendukung itu diperlukan diklat dan kursus ilmu tehnologi modern, serta untuk meningkatkan pelayanan sangat diperlukan infrastruktur sarana dan prasarana yang cukup guna menunjang kelancaran kerja.

D. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis dalam penyusunan prioritas tahun yang direncanakan:

a. Perlu adanya tuntutan untuk melaksanakan perubahan tata kelola pemerintahan dengan tersedianya Sumber Daya Manusia yang berpotensi.

b. Perlu adanya pendelegasian kewenangan yang dapat dilakukan oleh Kecamatan, walaupun sebenarnya sudah ada kewenangan yang bersifat aktributif tetapi masih perlu diikuti kewenangan delegatif.
c. Perlu adanya arah kebijaksanaan yang jelas terhadap pengembangan dan penataan wilayah terutama pada titik-titik pembangunan wilayah sesuai dengan pengembangan dan peruntukannya.
d. Perubahan fungsi lahan yang sangat pesat mengingat Kecamatan Denpasar Selatan merupakan daerah pengembangan kawasan perkotaan yang mengalami perkembangan sangat pesat sehingga perlu inovasi baru dalam penanganannya dengan tehnologi yang ada.
e. Infrastruktur sarana dan prasarana yang ada masih belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan sehingga masih perlu untuk ditingkatkan pembangunannya.
f. Peluang kerja dan lapangan kerja yang ada cukup banyak tetapi tidak diimbangi dengan keahlian dan ketrampilan bagi calon pencari kerja, sehingga perlu adanya diklat bagi calon pencari kerja.
g. Angka kemiskinan di Kecamatan Denpasar Selatan masih cukup tinggi dan masih perlu penangan yang serius, sehingga pendampingan dari steakholder sangat diharapkan baik bimbingan, pelatihan dan penguatan modal usaha bagi KK misk

BAB. III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyusunan perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota serta seluruh stakeholders untuk mendapatkan suatu input rencana pembangunan prioritas yang bertitik tolak dari permasalahan serta hambatan-hambatan yang ada, dalam pengembangan rencana program di daerah diperlukan harmonisasi terkait penyelenggaraan pembangunan untuk sinergitas antara lembaga pusat dan daerah.

Kecamatan Denpasar Selatan sebagai perangkat daerah Kota Denpasar memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Denpasar Selatan di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Denpasar Selatan yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksananakan di Kecamatan Denpasar Selatan telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan hal tersebut di Tahun 2025 nanti, diperlukan sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Denpasar beserta seluruh lapisan masyarakat Kota Denpasar sehingga cita-cita Pembangunan Denpasar dapat tercapai, maka Tujuan dan sasaran Renja merupakan suatu penjabaran atau

implementasi dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan yang bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, yang akan menjadi arah perjalanan pemerintah namun berdasarkan pada kriteria-kriteria dan kewenangan yang mudah dipahami seluruh masyarakat.

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
				2025
1	***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan***	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	100%
		Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	100%
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yg Dibina	100%

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program / kegiatan dalam tahun 2025 guna mencapai visi dan misi Walikota bahwa Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar telah menetapkan tujuan dan sasasaran guna meningkatkan perkembangan Kecamatan Denpasar Selatan.

Rencana kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yeng telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan sekretariat Kecamatan Denpasar Selatan.

Adapun Program dan Kegiatan Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Denpasar

Kecamatan Denpasar Selatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Catatan
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Denpasar Selatan**	**Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah**	
a.	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Kecamatan Denpasar Selatan**	***Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Denpasar Selatan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	
b.	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**Kecamatan Denpasar Selatan**	***Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Denpasar Selatan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan ASN	
c.	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Kecamatan Denpasar Selatan**	***Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah***	
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Denpasar Selatan	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Denpasar Selatan	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Denpasar Selatan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Denpasar Selatan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	
d.	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah***	**Kecamatan Denpasar Selatan**	***Tersedianya Barang Milik Daerah***	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Denpasar Selatan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Denpasar Selatan	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang siap Pakai	
e.	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Kecamatan Denpasar Selatan**	***Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Denpasar Selatan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Denpasar Selatan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
f.	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Kecamatan Denpasar Selatan**	***Terpeliharanya Barang Milik Daerah***	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Denpasar Selatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Denpasar Selatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Denpasar Selatan	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Denpasar Selatan**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat**	
a.	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	**Kecamatan Denpasar Selatan**	***Terlaksananya Koordinasi di tingkat Kecamatan***	
-	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Denpasar Selatan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	
-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Denpasar Selatan	Terlaksananya Kegiatan Lomba PSN, PKK dan posyandu	
b.	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	**Kecamatan Denpasar Selatan**	***Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat***	
-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Kecamatan Denpasar Selatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	

3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Denpasar Selatan**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	
a.	***Pemberdayaan Kelurahan***	**Kecamatan Denpasar Selatan**	***meningkatnya persentase pembangunan daerah***	
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Denpasar Selatan	usulan masyarakat yang akomodir di Kelurahan	
-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Denpasar Selatan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia	
-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Denpasar Selatan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Denpasar Selatan**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	
a.	***Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada***	**Kecamatan Denpasar Selatan**	***Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada***	
-	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Denpasar Selatan	Jumlah Pendataan Penduduk yang dilaksanakan, Jumlah Patroli Lingkungan yang dilaksanakan	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kecamatan Denpasar Selatan**	**Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan**	
a.	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	**Kecamatan Denpasar Selatan**	***Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan***	
-	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Denpasar Selatan	Terlaksananya Kegiatan Hut RI dan Hut Kota Denpasar	
-	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Denpasar Selatan	Terlaksananya Koordinasi antar Kecamatan	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Denpasar Selatan**	**Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan**	

a.	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**Kecamatan Denpasar Selatan**	***Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa***	
-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Denpasar Selatan	Terlaksananya Evaluasi RAPBDes	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan sekretariat Kecamatan Denpasar Selatan.

Rencana kerja Kecamatan Denpasar Selatan dalam Tahun 2025 tetap mengacu pada Sasaran dan Tujuan yang telah di tetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar maupun Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Untuk mencapai sasaran dan Tujuan yang sebagaimana yang telah ditetapkan.

Adapun Rencana Kerja yang akan di lakukan oleh Kecamatan Denpasar Selatan pada Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Usulan Kegiatan Yang akan dilaksanakan dalam TA. 2025
Oleh Kecamatan Denpasar Selatan

Kecamatan Denpasar Selatan

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Targert Capaian Kineja	Pagu Indikatif 2025 (Rp.)	Pagu Indikatif Perubahan 2025 (Rp.)
1					2	3	4	5	6
7					**URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN**				
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**17,697,294,582**	**19,695,543,373**
7	**01**	**01**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN**	**100%**	**15,942,303,422**	**17,132,647,723**
7	01	01	02.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	15,942,303,422	17,132,647,723
7	01	01	02.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	-

7	**01**	**01**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor**	**100%**	**321,246,000**	**306,071,450**
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	7,093,000	7,093,000
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	244,956,450	235,315,450
7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	60,556,550	55,023,000
7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	8,640,000	8,640,000
7	**01**	**01**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**37,976,000**	**307,226,000**
7	01	01	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	37,976,000	307,226,000
7	**01**	**01**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**1,023,313,160**	**1,301,392,200**
7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	154,200,000	119,900,000
7	01	01	02.08	02	Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	-	-
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	869,113,160	1,181,492,200
7	**01**	**01**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**372,456,000**	**648,206,000**

7	01	01	02.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43,972,000	43,972,000
7	01	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	14 Unit	144,604,000	146,454,000
7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	91,000,000	374,900,000
7	01	01	02.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	92,880,000	82,880,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan**	**83%**	**268,189,250**	**262,114,250**
7	**01**	**02**	**02.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Survey Kepuasan Masyarakat**	**100%**	**226,383,250**	**220,383,250**
7	01	02	02.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrencam)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	38,302,250	38,302,250
7	01	02	02.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	188,081,000	182,081,000
7	**01**	**02**	**02.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Survey Kepuasan Masyarakat**	**100%**	**41,806,000**	**41,731,000**
7	01	02	02.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (PATEN Dll)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	41,806,000	41,731,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**171,979,000**	**58,545,000**

7	**01**	**04**	**02.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Kasus yang ditangani**	**100%**	**171,979,000**	**58,545,000**
7	01	04	02.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	171,979,000	58,545,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan**	**100%**	**348,642,150**	**348,642,150**
8	**01**	**05**	**02.01**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**348,642,150**	**348,642,150**
9	01	05	02.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantaopkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	333,942,150	333,942,150
9	01	05	02.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	14,700,000	14,700,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA**	**persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan**	**100%**	**17,625,000**	**17,625,000**
8	**01**	**06**	**02.01**		**Failitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa Yang Dapat Pembinaan dan Pengawasan**	**100%**	**17,625,000**	**17,625,000**
9	01	06	02.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	17,625,000	17,625,000
Total								**18,503,729,982**	**20,382,469,773**

Kelurahan Pedungan

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Targert Capaian Kineja	Pagu Indikatif 2025 (Rp.)	Pagu Indikatif Perubahan 2025 (Rp.)
1					2	3	4	5	6
7					**URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN**				
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1,918,229,320**	**2,216,351,304**
7	**01**	**01**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor**	**100%**	**188,386,800**	**188,421,800**
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3,497,000	3,497,000
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	156,766,800	156,766,800
7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	24,643,000	24,678,000
7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	3,480,000	3,480,000
7	**01**	**01**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**-**	**180,000,000**
7	01	01	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	180,000,000
7	**01**	**01**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**1,420,807,520**	**1,538,894,504**
7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	53,400,000	53,400,000

7	01	01	02.08	02	Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	2,200,000	2,200,000
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,365,207,520	1,483,294,504
7	**01**	**01**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**309,035,000**	**309,035,000**
7	01	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	14 Unit	94,658,000	94,658,000
	01	01	02.10	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	1,400,000	1,400,000
7	01	01	02.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	186,467,000	186,467,000
7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	26,510,000	26,510,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**1,906,610,850**	**2,001,796,850**
7	**01**	**03**	**02.02**		**Pemberdayaan Kelurahan**	**Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah**	**100%**	**1,906,610,850**	**2,001,796,850**
7	01	03	02.02	01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	2,615,000	2,615,000
7	01	03	02.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	350,000,000	350,000,000
7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1,553,995,850	1,649,181,850

7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**231,936,600**	**231,936,600**
7	**01**	**04**	**02.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Kasus yang ditangani**	**100%**	**231,936,600**	**231,936,600**
7	01	04	02.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	231,936,600	231,936,600
Total								**4,056,776,770**	**4,450,084,754**

Kelurahan Sesetan

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Targert Capaian Kineja	Pagu Indikatif 2025 (Rp.)	Pagu Indikatif Perubahan 2025 (Rp.)
1					2	3	4	5	6
7					**URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN**				
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1,948,847,702**	**2,335,188,578**
7	**01**	**01**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor**	**100%**	**235,684,150**	**235,684,150**
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2,702,000	2,702,000
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	204,335,150	204,335,150
7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	25,167,000	25,167,000
7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	3,480,000	3,480,000

7	**01**	**01**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**31,600,000**	**192,566,000**
7	01	01	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	31,600,000	192,566,000
7	**01**	**01**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**1,565,512,552**	**1,653,984,928**
7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	72,000,000	72,000,000
7	01	01	02.08	02	Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	9,000,000	9,000,000
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,484,512,552	1,572,984,928
7	**01**	**01**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**116,051,000**	**252,953,500**
7	01	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	14 Unit	66,566,000	68,066,000
	01	01	02.10	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	-	-
7	01	01	02.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	37,025,000	172,427,500
7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	12,460,000	12,460,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**1,737,128,750**	**2,010,658,150**
7	**01**	**03**	**02.02**		**Pemberdayaan Kelurahan**	**Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah**	**100%**	**1,737,128,750**	**2,010,658,150**

7	01	03	02.02	01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	2,971,950	2,986,950
7	01	03	02.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	350,000,000	350,000,000
7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1,384,156,800	1,657,671,200
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**275,207,600**	**275,207,600**
7	**01**	**04**	**02.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Kasus yang ditangani**	**100%**	**275,207,600**	**275,207,600**
7	01	04	02.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	275,207,600	275,207,600
Total								**3,961,184,052**	**4,621,054,328**

Kelurahan Serangan

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Targert Capaian Kineja	Pagu Indikatif 2025 (Rp.)	Pagu Indikatif Perubahan 2025 (Rp.)
1					2	3	4	5	6
7					**URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN**				
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1,207,369,810**	**1,488,949,070**
7	**01**	**01**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor**	**100%**	**211,026,000**	**197,076,000**

7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3,789,000	3,789,000
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	171,977,000	162,577,000
7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	31,780,000	27,230,000
7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	3,480,000	3,480,000
7	**01**	**01**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**9,975,000**	**219,568,000**
7	01	01	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	9,975,000	219,568,000
7	**01**	**01**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**857,953,810**	**943,890,070**
7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	57,000,000	57,000,000
7	01	01	02.08	02	Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,000,000	1,000,000
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	799,953,810	885,890,070
7	**01**	**01**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**128,415,000**	**128,415,000**
7	01	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	14 Unit	82,035,000	82,035,000
	01	01	02.10	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2,160,000	2,160,000

7	01	01	02.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10,000,000	10,000,000
7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	34,220,000	34,220,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**1,310,338,200**	**1,728,100,200**
7	**01**	**03**	**02.02**		**Pemberdayaan Kelurahan**	**Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah**	**100%**	**1,310,338,200**	**1,728,100,200**
7	01	03	02.02	01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	2,685,000	2,685,000
7	01	03	02.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	301,700,000	781,700,000
7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1,005,953,200	943,715,200
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**229,503,600**	**229,503,600**
7	**01**	**04**	**02.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Kasus yang ditangani**	**100%**	**229,503,600**	**229,503,600**
7	01	04	02.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	229,503,600	229,503,600
Total								**2,747,211,610**	**3,446,552,870**

Kelurahan Panjer

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Targert Capaian Kineja	Pagu Indikatif 2025 (Rp.)	Pagu Indikatif Perubahan 2025 (Rp.)
1					2	3	4	5	6
7					**URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN**				
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1,311,087,070**	**1,499,911,188**
7	**01**	**01**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor**	**100%**	**213,696,734**	**207,696,734**
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4,941,000	4,941,000
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	146,269,984	146,269,984
7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	59,065,750	53,065,750
7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	3,420,000	3,420,000
7	**01**	**01**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	-	-
7	01	01	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	-

7	**01**	**01**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**930,795,336**	**1,009,619,454**
7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	60,000,000	54,000,000
7	01	01	02.08	02	Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,600,000	1,075,000
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	869,195,336	954,544,454
7	**01**	**01**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**166,595,000**	**282,595,000**
7	01	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	14 Unit	51,185,000	51,185,000
	01	01	02.10	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	7,000,000	7,000,000
7	01	01	02.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	-	-
7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	108,410,000	224,410,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**1,353,676,150**	**1,357,876,150**
7	**01**	**03**	**02.02**		**Pemberdayaan Kelurahan**	**Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah**	**100%**	**1,353,676,150**	**1,357,876,150**

7	01	03	02.02	01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	1,730,100	1,730,100
7	01	03	02.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	383,600,000	383,600,000
7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	968,346,050	972,546,050
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**246,262,460**	**246,262,460**
7	**01**	**04**	**02.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Kasus yang ditangani**	**100%**	**246,262,460**	**246,262,460**
7	01	04	02.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	246,262,460	246,262,460
Total								**2,911,025,680**	**3,104,049,798**

Kelurahan Renon

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Targert Capaian Kineja	Pagu Indikatif 2025 (Rp.)	Pagu Indikatif Perubahan 2025 (Rp.)
1					2	3	4	5	6
7					**URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN**				
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1,167,819,098**	**1,884,468,996**
7	**01**	**01**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor**	**100%**	**124,216,002**	**126,068,502**

7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2,025,800	3,134,800
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	91,990,602	92,734,102
7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	19,759,600	19,759,600
7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	10,440,000	10,440,000
7	**01**	**01**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**29,479,000**	**656,879,000**
7	01	01	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	29,479,000	656,879,000
7	**01**	**01**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**871,333,096**	**957,230,494**
7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	75,000,000	75,000,000
7	01	01	02.08	02	Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	30,798,000	30,798,000
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	765,535,096	851,432,494
7	**01**	**01**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**142,791,000**	**144,291,000**
7	01	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	14 Unit	73,681,000	73,681,000
7	01	01	02.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	22,460,000	22,460,000

7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	46,650,000	48,150,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**1,052,724,858**	**1,153,867,358**
7	**01**	**03**	**02.02**		**Pemberdayaan Kelurahan**	**Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah**	**100%**	**1,052,724,858**	**1,153,867,358**
7	01	03	02.02	01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	2,050,000	2,050,000
7	01	03	02.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	275,944,658	374,072,158
7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	774,730,200	777,745,200
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**242,030,600**	**238,280,600**
7	**01**	**04**	**02.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Kasus yang ditangani**	**100%**	**242,030,600**	**238,280,600**
7	01	04	02.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	242,030,600	238,280,600
Total								**2,462,574,556**	**3,276,616,954**

Kelurahan Sanur

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Targert Capaian Kineja	Pagu Indikatif 2025 (Rp.)	Pagu Indikatif Perubahan 2025 (Rp.)
1					2	3	4	5	6
7					**URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN**				
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1,244,085,454**	**2,336,119,996**
7	**01**	**01**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor**	**100%**	**159,039,542**	**159,039,542**
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3,186,900	3,186,900
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	125,086,642	125,086,642
7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	25,846,000	25,846,000
7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	4,920,000	4,920,000
7	**01**	**01**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**22,350,000**	**180,053,000**
7	01	01	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	22,350,000	180,053,000
7	**01**	**01**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**952,998,912**	**1,058,129,454**
7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	65,100,000	65,100,000

7	01	01	02.08	02	Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,660,000	1,660,000
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	886,238,912	991,369,454
7	**01**	**01**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**109,697,000**	**938,898,000**
7	01	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	14 Unit	60,487,000	60,487,000
	01	01	02.10	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	-	-
7	01	01	02.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20,000,000	849,201,000
7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	29,210,000	29,210,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**1,526,044,900**	**1,523,214,900**
7	**01**	**03**	**02.02**		**Pemberdayaan Kelurahan**	**Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah**	**100%**	**1,526,044,900**	**1,523,214,900**
7	01	03	02.02	01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	1,150,000	1,150,000
7	01	03	02.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	457,769,500	464,189,500
7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1,067,125,400	1,057,875,400
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**222,518,600**	**222,518,600**

7	**01**	**04**	**02.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Kasus yang ditangani**	**100%**	**222,518,600**	**222,518,600**
7	01	04	02.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	222,518,600	222,518,600
Total								**2,992,648,954**	**4,081,853,496**

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah untuk periode Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan.

Dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Denpasar Selatan melaksanakan 6 (enam) program dengan 12 (Dua belas) kegiatan dan 28 (Dua puluh delapan) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 43.365.756.973.00,-

Rencana Rancangan Program Kerja Kecamatan Denpasar Selatan ini merupakan program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Selatan pada periode tahun 2025. Rencana Program ini hanya merupakan program Kecamatan Denpasar Selatan, sedang pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan Kecamatan di Kota Denpasar. Dengan demikian, Rencana Program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses Kecamatan Denpasar Selatan dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

Denpasar, 28 Mei 2025
Plt. Camat Denpasar Selatan

Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP,.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19790411 199802 2 001

2025

RANCANGAN AKHIR

RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Waça karena berkat Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Denpasar Utara dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Denpasar Utara berpedoman pada Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I (satu) Tahun 2025 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 serta Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024 ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024.

Denpasar, 28 Mei 2025
Camat Denpasar Utara

I Wayan Yusnawara, SSTP.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19770730 199802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Dasar Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan..... 3
1.4. Sistematika Penulisan..... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU..... 5
2.1. Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Perangkat Daerah..... 5

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN..... 9
3.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025..... 9

BAB IV PENUTUP..... 21

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Tahun 2025 adalah tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan perubahan dinamika pembangunan di wilayah kecamatan.

Perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan, menyesuaikan program dan kegiatan dengan kondisi terkini, serta meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan ditingkat kecamatan serta untuk mengetahui capaian program dan kegiatan, kendala yang dihadapi, serta potensi untuk perbaikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1992Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk HukumDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
18. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 25);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Denpasar Utara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Denpasar Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Denpasar Utara adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan program dan kegiatan perubahan Kecamatan Denpasar Utara tahun 2025;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025;
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD. TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
- 3.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Denpasar Utara merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) Tahun yang meliputi Penjabaran Perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Utara. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabillitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Denpasar Utara ini menyajikan Dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Utara selama tahun anggaran 2025.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan selama 3 bulan terakhir, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2025 yang telah dilaksanakan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara, antara lain :

Tabel 2.1. Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
	Kecamatan						
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**20.336.591.533**	**32,28%**	**6.563.964.446**	**13.772.627.087**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**	**100%**	**13.709.500.553**	**32,21%**	**4.416.370.533**	**9.293.130.020**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	63 orang/bulan	13.709.500.553	32,21%	4.416.370.533	9.293.130.020
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**	**100%**	**1.186.406.200**	**34,52%**	**409.493.650**	**776.912.550**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 paket	24.541.000	41,62%	10.215.000	14.326.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	912.988.800	32,67%	298.269.300	614.719.500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tersedianyan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	118.036.400	34,18%	40.345.400	77.691.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tersedianyan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	108.452.000	48,59%	52.701.950	55.750.050
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tersedianyan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	1 dokumen	22.388.000	35,56%	7.962.000	14.426.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**4.662.889.780**	**33,53%**	**1.563.262.223**	**3.099.627.557**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	513.200.000	23,46%	120.376.852	392.823.148
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PersentasePenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	4.149.689.780	34,77%	1.442.885.371	2.706.804.409
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**777.795.000**	**22,48%**	**174.838.040**	**602.956.960**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51 unit	432.285.000	21,08%	91.145.100	341.139.900
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70 unit	345.510.000	24,22%	83.692.940	261.817.060

2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai SKM**	**93,16**	**252.453.000**	**50,71%**	**128.009.000**	**124.444.000**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100%**	**221.095.000**	**54,63%**	**120.785.000**	**100.310.000**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 laporan	60.615.000	58,59%	35.515.000	25.100.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	160.480.000	53,13%	85.270.000	75.210.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**31.358.000**	**23,04%**	**7.224.000**	**24.134.000**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	93,16	31.358.000	23,04%	7.224.000	24.134.000
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**3.881.867.442**	**25,56%**	**992.251.930**	**2.889.615.512**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100%**	**3.881.867.442**	**25,56%**	**992.251.930**	**2.889.615.512**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 lembaga kemasyarakatan	6.556.000	45,00%	2.950.000	3.606.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	60 unit	1.265.641.442	0,00%	-	1.265.641.442
	Pemerdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	23 pokmas	2.609.670.000	37,91%	989.301.930	1.620.368.070
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**795.487.000**	**48,74%**	**387.707.000**	**407.780.000**
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**795.487.000**	**48,74%**	**387.707.000**	**407.780.000**
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	795.487.000	48,74%	387.707.000	407.780.000

5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kewenangan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan**	**100%**	**170.920.000**	**16,09%**	**27.500.000**	**143.420.000**
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	**Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**170.920.000**	**16,09%**	**27.500.000**	**143.420.000**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 orang	141.220.000	10,13%	14.300.000	126.920.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	29.700.000	44,44%	13.200.000	16.500.000
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan**	**100%**	**31.400.000**	**2,39%**	**750.000**	**30.650.000**
	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100%**	**31.400.000**	**2,39%**	**750.000**	**30.650.000**
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	31.400.000	2,39%	750.000	30.650.000
	Total			**25.468.718.975**		**8.100.182.376,00**	**17.368.536.599**

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

5.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan kegiatan merupakan penjabaran pelaksanaan urusan yang terdiri dari urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Berikut disajikan perubahan rencana pendanaan berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah

Berikut disajikan secara terinci Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025, beserta indikator kinerja, target dan pagu indikatifnya yang berpedoman pada Perubahan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2025 Kota Denpasar disajikan dalam tabel dibawah ini :

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Indikator Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu APBD Induk 2025	Pagu Usulan Perubahan	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
	Kecamatan					
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**15.459.077.278**	**17.003.475.659**	**1.539.970.381**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**13.407.556.688**	**14.523.761.069**	**1.116.204.381**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN,Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN, Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN.	64 orang/bulan, 1 tahun, 100%	13.407.556.688	14.523.761.069	1.116.204.381
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**385.176.650**	**389.604.650**	**4.428.000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	1 paket, 100%	9.368.000	9.368.000	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yng disediakan, persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket, 100%	296.752.650	306.658.650	9.906.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan, persentasetersediansya peralatan rumah tangga	1 paket, 100%	25.689.000	25.689.000	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 paket, 100%	41.091.000	38.341.000	(2.750.000)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peratran perundang-undangan yang disedikan, persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 dokumen, 100%	12.276.000	9.548.000	(2.728.000)

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**1.269.905.940**	**1.467.891.940**	**197.986.000**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Laporam, 100%	300.400.000	300.400.000	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan pperlengkapan kantor yang disediakan, persentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Laporam, 100%	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan, persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporam, 100%	969.505.940	1.167.491.940	197.986.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**396.438.000**	**622.218.000**	**225.780.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit, 100%	197.818.000	223.558.000	25.740.000
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit, 100%	198.620.000	398.660.000	200.040.000

2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)**	**83%**	**257.053.000**	**253.053.000**	**(4.000.000)**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100%**	**225.295.000**	**221.695.000**	**(3.600.000)**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait; Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan, 100%	61.815.000	61.215.000	(600.000)
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan; Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen, 100%	163.480.000	160.480.000	(3.000.000)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**31.758.000**	**31.358.000**	**(400.000)**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan; Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1 Dokumen, 100%	31.758.000	31.358.000	(400.000)

3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**83.145.000**	**40.040.000**	**(43.105.000)**
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100%**	**83.145.000**	**40.040.000**	**(43.105.000)**
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	1 Laporan, 100%	83.145.000	40.040.000	(43.105.000)
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan**	**100%**	**177.075.000**	**170.920.000**	**(6.155.000)**
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**177.075.000**	**170.920.000**	**(6.155.000)**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Persentase Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 orang, 100%	147.375.000	141.220.000	(6.155.000)
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan; Persentase Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 dokumen, 100%	29.700.000	29.700.000	-

5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan**	**100%**	**32.200.000**	**31.400.000**	**(800.000)**
	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**32.200.000**	**31.400.000**	(800.000)
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa; Persentase Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100%	32.200.000	31.400.000	(800.000)
	Kelurahan Tonja					
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1.409.956.050**	**1.602.432.230**	**114.147.500**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**241.197.050**	**355.344.550**	**114.147.500**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	1 paket, 100%	4.660.000	4.585.000	(75.000)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yng disediakan, persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket, 100%	195.880.050	317.618.550	121.738.500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan, persentasetersedianya peralatan rumah tangga	1 paket, 100%	17.621.000	15.605.000	(2.016.000)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 paket, 100%	19.076.000	13.576.000	(5.500.000)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peratran perundang-undangan yang disedikan, persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 dokumen, 100%	3.960.000	3.960.000	-

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**1.050.833.000**	**1.119.429.680**	**68.596.680**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Laporam, 100%	113.800.000	140.800.000	27.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan pperlengkapan kantor yang disediakan, persentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Laporam, 100%	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan, persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporam, 100%	937.033.000	978.629.680	41.596.680
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**117.926.000**	**127.658.000**	**9.732.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit, 100%	65.876.000	65.348.000	(528.000)
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit, 100%	52.050.000	62.310.000	10.260.000
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**1.108.960.842**	**1.148.869.842**	**39.909.000**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**100%**	**1.108.960.842**	**1.148.869.842**	**39.909.000**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan; Persentasse Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 lembaga kemasyarakatan, 100%	1.506.000	1.506.000	-

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun; Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 unit, 100%	471.740.842	471.740.842	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas, 100%	635.714.000	675.623.000	39.909.000
3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**234.391.000**	**237.391.000**	**3.000.000**
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100%**	**234.391.000**	**237.391.000**	**3.000.000**
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	1 Laporan, 100%	234.391.000	237.391.000	3.000.000
	Kelurahan Ubung					
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1.212.499.320**	**1.302.942.320**	**47.243.000**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**250.895.900**	**298.138.900**	**47.243.000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	1 paket, 100%	3.553.000	3.553.000	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yng disediakan, persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket, 100%	192.950.300	245.337.300	52.387.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan, persentasetersedianya peralatan rumah tangga	1 paket, 100%	33.253.600	33.253.600	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 paket, 100%	17.179.000	12.035.000	(5.144.000)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peratran perundang-undangan yang disedikan, persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 dokumen, 100%	3.960.000	3.960.000	-

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**801.198.420**	**844.398.420**	**43.200.000**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Laporam, 100%	36.000.000	36.000.000	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan pperlengkapan kantor yang disediakan, persentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Laporam, 100%	-	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan, persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporam, 100%	765.198.420	808.398.420	43.200.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**160.405.000**	**160.405.000**	**-**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit, 100%	102.435.000	102.435.000	-
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit, 100%	57.970.000	57.970.000	-
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**936.285.100**	**954.875.100**	**18.590.000**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**100%**	**936.285.100**	**954.875.100**	**18.590.000**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan; Persentasse Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 lembaga kemasyarakatan, 100%	3.100.000	3.100.000	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun; Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 unit, 100%	554.309.100	554.309.100	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas, 100%	378.876.000	397.466.000	18.590.000

3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**281.186.000**	**280.811.000**	**(375.000)**
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100%**	**281.186.000**	**280.811.000**	**(375.000)**
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	1 Laporan, 100%	281.186.000	280.811.000	375.000
	Kelurahan Peguyangan					
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1.690.084.020**	**1.827.913.020**	**89.229.000**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**349.391.600**	**438.620.600**	**89.229.000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	1 paket, 100%	6.960.000	6.960.000	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yng disediakan, persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket, 100%	246.638.800	340.767.800	94.129.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan, persentase tersedianya peralatan rumah tangga	1 paket, 100%	41.472.800	41.472.800	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 paket, 100%	49.400.000	44.500.000	(4.900.000)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peratran perundang-undangan yang disedikan, persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 dokumen, 100%	4.920.000	4.920.000	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**1.237.666.420**	**1.286.266.420**	**48.600.000**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Laporam, 100%	63.000.000	63.000.000	-

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan pperlengkapan kantor yang disediakan, persentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Laporam, 100%	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan, persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporam, 100%	1.174.666.420	1.223.266.420	48.600.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**103.026.000**	**103.026.000**	**-**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit, 100%	66.156.000	66.156.000	-
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit, 100%	36.870.000	36.870.000	-
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**1.675.281.500**	**1.792.531.500**	**117.250.000**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**100%**	**1.675.281.500**	**1.792.531.500**	**117.250.000**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan; Persentasse Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 lembaga kemasyarakatan, 100%	1.950.000	1.950.000	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun; Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 unit, 100%	239.591.500	239.591.500	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas, 100%	1.433.740.000	1.550.990.000	117.250.000

3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**249.470.000**	**246.170.000**	**(3.300.000)**
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100%**	**249.470.000**	**246.170.000**	**(3.300.000)**
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	1 Laporan, 100%	249.470.000	246.170.000	(3.300.000)

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025 merupakan hasil penyempurnaan dari rancangan sebelumnya dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, serta perubahan asumsi dan prioritas pembangunan daerah.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025 yang menyesuaikan terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, perubahan kebijakan, serta kondisi aktual di lapangan. Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan tetap berorientasi pada pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Denpasar, khususnya dalam memperkuat pelayanan publik, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah kecamatan.

Diharapkan dengan adanya Perubahan Renja ini, pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dapat lebih terarah, efektif, dan efisien serta mampu menjawab tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mewujudkan rencana kerja yang berkualitas dan tepat sasaran dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. Kecamatan Denpasar Utara berkewajiban untuk mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Denpasar Tahun 2025;
b. Kecamatan Denpasar Utara berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Denpasar

Utara Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kota Denpasar Tahun 2025;

c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

1.2 Rencana Tindak Lanjut.

Rancangan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Utara selain sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan dan pendanaan perubahan untuk Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Denpasar Utara. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Denpasar Utara juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Denpasar Utara ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Denpasar Utara serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Denpasar.